KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

IAEI

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DAERAH 2019-2020

2019-2020

Direktorat Infrastruktur Ekosistem Syariah

Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019-2020

Penasehat
Ventje Rahardjo Soedigno

Penanggung Jawab dan Penyunting (Editors)
Dr. Sutan Emir Hidayat
Dr. Irfan Syauqi Beik

Penyusun
Direktorat Infrastruktur Ekosistem Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
Ikatan Ahli Ekonomi Islam
Badan Zakat Nasional

Tim Penyusun
Dr. Muhammad Quraisy
Citra Atrina Sari, S.E
Nadiah Hidayati, MM
Dr. Ginanjar Dewandaru

Tim Pendukung
Adelina Zuleika, Lc., M.IF
Cindy Cintokowati, S.E, M.Sc
Kurnia Haryakusuma, S.E, M.Sc
Ryanda Al Fathan, S.E
Eva Afifah Tsuraya, M.Sc
Atiqoh Nasution, B.Econs, MIFP
Yopi Nursali, S.E
Sudarmawan Samidi, MM
Dr. Bagus Aroyo
Dr. Luqyan Tammani
Ni Putu Desintya, M.Sc
Urip Budiarto, S.P
Astika Rahmah Ghanny, S.E
Adhitya Kusuma Zaenardi, S.E
Dita Anggraini, S.E
Aisha Putrina Sari, M.S.M
Muhammad Hasbi Zaenal, Ph.D
Herlina Wijayanti, S.IP
Muhammad Wanto, S.Sy

Desain
Yahya Ayyash, S.E

Penerbit
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
Gedung Permata Kuningan Lantai PH
Jalan Kuningan Mulia No. 9C, 12830
No Telpon: 021 – 8068 – 3350
E-mail: humas@kneks.go.id

HAK CIPTA © 2020 Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Islam (KNEKS), Indonesia. Hak Cipta Dilindungi Undang – Undang. Dilarang memperbanyak publikasi ini dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Islam (KNEKS).

Daftar Isi

Sambutan Direktur Eksekutif KNEKS viii

Kata Pengantar Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah x

Pendahuluan 2

1.1 Latar Belakang 2

1.2 Tujuan 4

1.3 Metodologi 4

Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 6

Provinsi Aceh 13

Sekilas Provinsi Aceh 13

Regulasi Tingkat Daerah Provinsi Aceh 14

RPJMD dan Rencana Pemerintah Daerah di Sektor Ekonomi Syariah 15

Program Pemerintah Daerah di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah 19

Gambaran Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah 24

Peluang Investasi Daerah untuk Industri Keuangan Syariah 35

Praktik Terbaik dan Studi Kasus Unik Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah 38

Wawancara Kepala Instansi Daerah Provinsi Aceh 41

Lampiran 63

Provinsi Sumatera Barat 67

Sekilas Provinsi Sumatera Barat 67

Regulasi Tingkat Daerah Sumatera Barat 68

RPJMD dan Rencana Pemerintah Daerah di Sektor Ekonomi Syariah 69

Program Pemerintah Daerah di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah 71

Gambaran Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah 77

Peluang Investasi Daerah untuk Industri Keuangan Syariah 88

Praktik Terbaik dan Studi Kasus Unik Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah 89

Wawancara Kepala Instansi Daerah Provinsi Sumatera Barat 93

Lampiran 109

Provinsi Jawa Barat 111
Sekilas Provinsi Jawa Barat 111
Regulasi Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat 112
RPJMD dan Rencana Pemerintah Daerah di Sektor Ekonomi Syariah 113
Program Pemerintah Daerah di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah 116
Gambaran Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah 123
Peluang Investasi Daerah untuk Industri Keuangan Syariah 134
Survei UMK (Usaha Kecil & Mikro) Sektor Makanan Minuman Provinsi Jawa Barat 136
Praktik Terbaik dan Studi Kasus Unik Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah 148
Wawancara Kepala Instansi Daerah Provinsi Jawa Barat 152
Lampiran 161

Provinsi Jawa Timur 166
Sekilas Provinsi Jawa Timur 166
Regulasi Tingkat Daerah Provinsi Jawa Timur 167
RPJMD dan Rencana Pemerintah Daerah di Sektor Ekonomi Syariah 168
Program Pemerintah Daerah di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah 171
Gambaran Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah 177
Peluang Investasi Daerah untuk Industri Keuangan Syariah 188
Survei UMK (Usaha Kecil & Mikro) Sektor Makanan Minuman Provinsi Jawa Timur 189
Praktik Terbaik dan Studi Kasus Unik Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah 201
Wawancara Kepala Instansi Daerah Provinsi Jawa Timur 206
Lampiran 211

Provinsi DKI Jakarta 214
Sekilas Provinsi DKI Jakarta 214
Regulasi Tingkat Daerah DKI Jakarta 215
RPJMD dan Rencana Pemerintah Daerah di Sektor Ekonomi Syariah 216
Program Pemerintah Daerah di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah 219
Gambaran Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah 223
Peluang Investasi Daerah untuk Industri Keuangan Syariah 232
Praktik Terbaik dan Studi Kasus Unik Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah 235
Wawancara Kepala Instansi Daerah Provinsi DKI Jakarta 237
Lampiran 246

Provinsi Jawa Tengah....248
Sekilas Provinsi Jawa Tengah....248
Regulasi Tingkat Daerah Provinsi Jawa Tengah....249
RPJMD dan Rencana Pemerintah Daerah di Sektor Ekonomi Syariah....250
Program Pemerintah Daerah di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah....252
Gambaran Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah....258
Peluang Investasi Daerah untuk Industri Keuangan Syariah....269
Survei UMK (Usaha Kecil & Mikro) Sektor Makanan Minuman Provinsi Jawa Tengah....270
Praktik Terbaik dan Studi Kasus Unik Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah....282
Wawancara Kepala Instansi Daerah Provinsi Jawa Tengah....284
Lampiran....294

Provinsi Kalimantan Selatan....298
Sekilas Provinsi Kalimantan Selatan....298
Regulasi Tingkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan....299
RPJMD dan Rencana Pemerintah Daerah di Sektor Ekonomi Syariah....300
Program Pemerintah Daerah di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah....303
Gambaran Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah....309
Peluang Investasi Daerah untuk Industri Keuangan Syariah....317
Praktik Terbaik dan Studi Kasus Unik Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah....319
Wawancara Kepala Instansi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan....321
Lampiran....328

Provinsi Nusa Tenggara Barat....330
Sekilas Provinsi Nusa Tenggara Barat....330
Regulasi Tingkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat....331
RPJMD dan Rencana Pemerintah Daerah di Sektor Ekonomi Syariah....332
Program Pemerintah Daerah di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah....334
Gambaran Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah....342
Peluang Investasi Daerah untuk Industri Keuangan Syariah....352
Praktik Terbaik dan Studi Kasus Unik Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah....354
Wawancara Kepala Instansi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat....356
Lampiran....364

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 367
Sekilas Provinsi Yogyakarta 367
Regulasi Tingkat Daerah Provinsi Yogyakarta 368
RPJMD dan Rencana Pemerintah Daerah di Sektor Ekonomi Syariah 369
Program Pemerintah Daerah di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah 370
Gambaran Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah 375
Peluang Investasi Daerah untuk Industri Keuangan Syariah 385
Praktik Terbaik dan Studi Kasus Unik Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah 386
Wawancara Kepala Instansi Daerah Provinsi Yogyakarta 388
Lampiran 398

Sulawesi Selatan 402
Sekilas Provinsi Sulawesi Selatan 402
Regulasi Tingkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 403
RPJMD dan Rencana Pemerintah Daerah di Sektor Ekonomi Syariah 404
Program Pemerintah Daerah di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah 406
Gambaran Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah 410
Peluang Investasi Daerah untuk Industri Keuangan Syariah 420
Praktik Terbaik dan Studi Kasus Unik Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah 421
Wawancara Kepala Instansi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 423
Lampiran 428

Provinsi Kalimantan Timur 431
Sekilas Provinsi Kalimantan Timur 431
Regulasi Tingkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 432
RPJMD dan Rencana Pemerintah Daerah di Sektor Ekonomi Syariah 433
Program Pemerintah Daerah di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah 436
Gambaran Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah 442
Peluang Investasi Daerah untuk Industri Keuangan Syariah 450
Praktik Terbaik dan Studi Kasus Unik Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah 451
Wawancara Kepala Instansi Daerah Provinsi Kalimantan Timur 453
Lampiran 457

Provinsi Sumatera Utara 460
Sekilas Provinsi Sumatera Utara 460
Regulasi Tingkat Daerah Sumatera Utara 461
RPJMD dan Rencana Pemerintah Daerah di Sektor Ekonomi Syariah 462
Program Pemerintah Daerah di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah 464
Gambaran Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah 469
Peluang Investasi Daerah untuk Industri Keuangan Syariah 476
Praktik Terbaik dan Studi Kasus Unik Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah 478
Wawancara Kepala Instansi Daerah Provinsi Sumatera Utara 480
Lampiran 484

Sambutan

Direktur Eksekutif
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan ridha-Nya kita dapat menyelesaikan Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019/2020. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Ekonomi dan keuangan syariah dewasa ini mengalami perkembangan pesat baik dalam tataran global maupun nasional. Ekonomi syariah diprediksi terus tumbuh hingga USD 3,2 triliun pada tahun 2024, dan menjadi lahan investasi yang potensial bagi para investor. Investasi pada ekonomi syariah bahkan naik hingga 399 persen pada tahun 2018, dengan nilai USD 1,2 miliar. Tumbuhnya beberapa institusi ekonomi dan keuangan syariah di beberapa negara menegaskan hal ini.

Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan jumlah populasi penduduk Muslim terbesar di dunia (sekitar 240 juta jiwa), menyimpan potensi ekonomi syariah yang sangat besar. Dengan sumber daya alam yang melimpah serta sumber daya manusia yang terus meningkat kuantitas dan kualitasnya, Indonesia sesungguhnya telah memiliki modal yang besar untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan Syariah terkemuka dunia. Untuk mewujudkan hal ini tentu membutuhkan dukungan tidak hanya Pemerintah di tingkat Pusat namun juga Pemerintah di tingkat Provinsi/Daerah.

Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019/2020 ini merupakan salah satu usaha KNEKS dalam melibatkan peran serta Pemerintah Provinsi/Daerah dalam usaha mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi syariah di berbagai Provinsi di

Indonesia. Sehingga hadirnya laporan ini diharapkan sebagai sebuah pendekatan dari atas ke bawah (*top-down approach*) dan pendekatan bawah ke atas (*bottom-up approach*) untuk mendorong peran serta Pemerintah Daerah/Provinsi dalam mengembangkan potensi lokal ekonomi dan keuangan Syariah sesuai kearifan lokal (*local wisdom*) pada daerah masing-masing. Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019/2020 juga dapat dijadikan sebagai referensi atau benchmark kinerja Pemerintah Provinsi dalam hal pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah. Diharapkan setiap provinsi lain di Indonesia dapat mencontoh dan menerapkan success-story pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah di provinsi yang dimuat dalam laporan ini. Ke depan, dengan majunya pengembangan industri ekonomi dan keuangan syariah dari tingkat daerah/Provinsi diharapkan dapat memperkokoh ketahanan ekonomi nasional dan mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terdepan di dunia.

Terima Kasih

Wabillahitaufik Walhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Jakarta, November 2020
Direktur Eksekutif KNEKS

Ventje Rahardjo Soedigno

Kata pengantar

Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019/2020 ini dapat selesai dengan baik. Sholawat dan salam juga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Belakangan ini, perkembangan ekonomi syariah mendapatkan perhatian masyarakat global maupun nasional. Ekonomi syariah dipandang mampu menjadi sumber pertumbuhan baru ekonomi nasional serta mampu menjawab berbagai tantangan dalam dinamika perekonomian nasional. Menurut laporan Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2019/2020, Indonesia menempati posisi 5 besar dunia dalam sektor Modest Fashion (No.3), Muslim Friendly Travel (No.4), dan Keuangan Syariah (No.5). Sementara peringkat Indonesia di Global Islamic Finance Report 2019/2020 mencapai posisi yang membanggakan pada peringkat 1 serta menempati peningkatan drastis di Global Islamic Economy Indicator 2019/2020 menempati peringkat 5. Prestasi Indonesia di pemeringkatan tersebut tidak lepas dari upaya Pemerintah dalam membentuk KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) sebagai upaya mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional dan bentuk upaya serius pemerintah mengembangkan ekonomi syariah yang melibatkan semua pemangku kepentingan di Indonesia.

Keunikan yang dimiliki sistem ekonomi syariah terletak pada nilai-nilai yang sejalan dengan kearifan lokal masyarakat Indonesia antara lain seperti keadilan, kejujuran, tolong menolong,

profesional, serta keberpihakan pada kelompok lemah. Kesamaan nilai-nilai tersebut mendorong keinginan diterapkannya sistem ekonomi syariah secara lebih menyeluruh di setiap aspek kehidupan masyarakat. Alhamdulillah Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019/2020 ini dapat diselesaikan dan diharapkan ke depan dapat mendorong antusiasme dan semangat pengembangan Ekonomi Syariah mulai dari tingkat provinsi/daerah serta dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait potensi ekonomi Syariah di provinsi-provinsi tersebut. Seiring waktu, tumbuh harapan agar ekonomi syariah dapat lebih berperan mendorong pembangunan ekonomi nasional serta agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan inklusif oleh masyarakat Indonesia.

Terima Kasih

Wabillahitaufik Walhidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Jakarta, November 2020

Direktur Infrastruktur Ekosistem Ekonomi Syariah

Dr. Sutan Emir Hidayat

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar global, Indonesia berpotensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah yang dapat menjadi instrumen penting dalam mendongkrak perekonomian nasional. Ekonomi syariah tidak terbatas pada prinsip-prinsip Islam dalam sistem perekonomian namun juga berkaitan dengan sistem keuangan dan sektor riil. Sistem ekonomi syariah perlu menjadi roda penggerak ekonomi nasional yang inklusif serta berkelanjutan. Capaian ini tidak mudah untuk dilakukan tanpa melakukan kajian khusus, pemetaan, dan melakukan strategi bersama pemangku kepentingan terkait.

Dengan jumlah populasi Muslim terbesar di Dunia yakni sebesar 232,5 juta jiwa atau mencapai 87.18 persen, potensi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sejatinya sangat besar. Menurut Laporan Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2019/2020, Indonesia menempati posisi 5 besar dunia dalam sektor Fesyen Muslim (No.3), Pariwisata Ramah Muslim (No.4), dan Keuangan Syariah (No.5). Namun, Indonesia sendiri saat ini belum mampu berperan sebagai produsen baik dalam sektor industri halal maupun dalam sektor keuangan syariah. Sehingga kedepannya, peluang untuk mengembangkan sektor-sektor di dalam ekonomi syariah sangat besar yang kemudian dapat berdampak positif pada perekonomian nasional Indonesia. Diantaranya, pengembangan produk makanan-minuman halal, fesyen halal dan pariwisata ramah muslim yang yang merupakan sektor-sektor unggulan ekspor dan pendapatan devisa Indonesia, penguatan serta pemberdayaan sektor UMKM halal yang akan secara langsung memperkuat industri halal dan sejalan dengan ekspansi sektor pariwisata ramah muslim yang menjadi penopang neraca perdagangan jasa Indonesia.

Pengembangan sektor-sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah ini potensinya telah dimiliki oleh beberapa provinsi/daerah di Indonesia. Faktor-faktor produksi yang melimpah seperti kekayaan sumber daya alam (SDA) serta meningkatnya kuantitas dan kualitas sumber daya insani (SDI) menjadi modal besar pengembangan ekonomi Syariah di provinsi/daerah di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa prinsip-prinsip Ekonomi Syariah sendiri telah menyatu dengan kearifan lokal (*local-wisdom*) budaya dan adat istiadat masyarakat di Indonesia. Di berbagai daerah/provinsi terdapat banyak kearifan lokal di bidang ekonomi yang

telah diimplementasikan oleh masyarakat lokal secara turun temurun. Sebagai contoh dalam praktik pembagian hasil panen dengan istilah yang berbeda ditiap daerah di Indonesia seperti: *memperduoi* (Minangkabau), *toyo* (Minahasa), *sawal/tesang* (Sulawesi), *maro/mertelu* (Jawa Tengah), *nengah/jejuron* (Priangan). Dimana istilah-istilah tersebut bermakna perjanjian bagi hasil 1:1 artinya setengah untuk pemilik tanah dan setengah untuk penggarap dari total hasil bersih panen.

Adanya Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019/2020 juga merupakan sebuah upaya pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dalam mendorong Pemerintah Daerah/Provinsi serta meningkatkan peran serta seluruh stakeholders, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan Syariah di tingkat lokal atau daerah masing-masing. Selain itu Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019/2020 ini juga disusun sebagai suatu referensi pengembangan ekonomi syariah agar mampu memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya pada pengembangan ekonomi syariah di level daerah/provinsi. Melalui pemahaman yang utuh, identifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi syariah di beberapa daerah/provinsi di Indonesia akan menjadi semakin terukur. Dengan mengetahui perkembangan informasi ekonomi Syariah di berbagai daerah/provinsi diharapkan dapat menjadi referensi (*benchmark*) kinerja Pemerintah Daerah/Provinsi dalam hal pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah di daerah/provinsi terkait. Sehingga dapat diambil langkah strategis oleh masing-masing Pemerintah Daerah/Provinsi dalam mengembangkan sektor ekonomi dan keuangan syariah daerah. Dewasa ini geliat ekonomi Syariah di berbagai daerah/provinsi juga semakin meningkat sehingga provinsi/daerah lain dapat mengambil pelajaran sukses (*success-story*) sehingga dapat diaplikasikan di daerah masing-masing dengan mempertimbangkan kearifan lokal budaya di daerah tersebut.

Namun kesuksesan (*success-story*) pembangunan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat Pemerintah Daerah/Provinsi ini juga sebaiknya disusun dalam sebuah publikasi yang dapat diakses oleh publik berupa laporan yang komprehensif yang mencakup aspek regulasi, data fundamental, praktik bisnis, tantangan, peluang investasi, dsb., pada sektor industri halal, keuangan syariah, keuangan mikro syariah, keuangan sosial syariah (zakat, infak, sedekah dan wakaf/ZISWAF), dan pendidikan ekonomi syariah serta pemberdayaan ekonomi pesantren. KNEKS memandang bahwa salah satu langkah strategis dalam mendukung proses percepatan pengembangan keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia adalah melalui penyusunan informasi yang lengkap, padat dan komprehensif dalam dalam bentuk publikasi Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah di Indonesia. Hingga saat ini belum ada laporan perkembangan ekonomi Syariah yang memaparkan informasi tentang kebijakan, regulasi, rencana dan program-program yang terkait ekonomi Syariah yang dilakukan Pemerintah Daerah dan lembaga/institusi di daerah/provinsi tersebut. Beberapa informasi tersebut sebenarnya diperlukan oleh pengambil kebijakan (pimpinan dan pemerintah provinsi/daerah) dan pemangku kepentingan (praktisi, akademisi, investor dan masyarakat) dalam rangka

memajukan perkembangan ekonomi Syariah di provinsi/daerah terkait. Selain itu adanya Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2020 ini juga dapat membantu memberikan informasi strategis kepada potensial investor (baik investor dalam dan luar negeri) yang tertarik untuk berinvestasi di sektor ekonomi dan keuangan syariah pada provinsi/daerah terkait.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019/2020 adalah sebagai berikut:

i. Untuk mengetahui perkembangan sektor-sektor ekonomi dan keuangan syariah di tingkat Pemerintah Provinsi/Daerah khususnya terkait aspek regulasi/peraturan, data fundamental, praktik bisnis/studi kasus, tantangan, peluang investasi, dsb., di sektor industri halal serta UMKM halal, keuangan syariah, keuangan mikro syariah, keuangan sosial syariah (ZISWAF), pengembangan ekonomi pesantren dan pendidikan ekonomi/keuangan syariah.
ii. Sebagai suatu referensi atau *benchmark* kinerja Pemerintah Provinsi/Daerah dalam hal pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah sehingga dapat diambil langkah strategis oleh masing-masing Pemerintah Daerah/Provinsi terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah/provinsi tersebut.
iii. Sebagai sebuah pendekatan *top-down* dan *bottom-up* untuk mendorong Pemerintah Daerah/Provinsi dalam hal penguatan ekosistem ekonomi Syariah dan industri halal serta pengembangan potensi lokal ekonomi dan keuangan Syariah di daerah masing-masing.
iv. Sebagai suatu metode pembelajaran silang (*cross-learning*) terkait keunggulan masing-masing provinsi/daerah pada program-program, praktik bisnis/kasus studi, kebijakan, inovasi yang terkait dengan sektor-sektor ekonomi dan keuangan Syariah.

1.3 Metodologi

Secara umum, Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019/2020 menggunakan instrumen pengumpulan data untuk mengetahui antara lain melalui *Focus Group Discussion* (FGD), dan kuesioner terstruktur. Kuesioner pertama berupa kuesioner yang diberikan kepada instansi/perangkat pemerintah provinsi dan lembaga/institusi pemangku kepentingan ekonomi Syariah di 12 Provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun Kuesioner yang disebarkan yaitu kepada:

1. Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi
2. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
5. Dinas Pariwisata Provinsi
6. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi
7. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Provinsi
8. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi
9. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi

Kuesioner pertama bertujuan untuk mendapatkan informasi sebagai berikut:

i. Regulasi atau peraturan di tingkat daerah/provinsi yang terkait dengan ekonomi dan keuangan Syariah.
i. Rencana & program pemerintah daerah/provinsi yang telah dibuat atau masih dalam tahap perencanaan pada terkait sektor ekonomi & keuangan Syariah
ii. Gambaran sektor ekonomi dan keuangan Syariah di daerah/provinsi tersebut.
iii. Studi kasus *(case-study*) dan praktik terbaik (*best-practice*) terkait sektor ekonomi dan keuangan Syariah di provinsi tersebut
iv. Peluang investasi (*investment-opportunity*) di daerah/provinsi tersebut.

Selain itu terdapat juga kuesioner kedua berupa interview yang dilakukan secara tertulis kepada pimpinan instansi/perangkat daerah dan institusi/lembaga pada 12 Provinsi yang bertujuan untuk mendapatkan pandangan (*insight*) dan perspektif terkait visi, rencana dan program-program terkait sektor ekonomi dan keuangan Syariah pada institusi/lembaga bersangkutan, serta peluang dan tantangan pengembangan ekonomi syariah di provinsi/daerah tersebut.

Ekosistem

Ekonomi dan Keuangan Syariah

Dalam rangka mendorong peran ekonomi syariah sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru Indonesia, diperlukan integrasi setiap elemen pendukung ekonomi syariah yang tercermin dalam ekosistem ekonomi syariah yang kuat. Dengan membentuk ekosistem ekonomi syariah yang kokoh dari hulu hingga ke hilir, maka para *stakeholder* serta penggerak ekonomi syariah tersebut diharapkan dapat memiliki kesempatan yang jauh lebih besar untuk meningkatkan proses bisnis baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini juga penting untuk merangsang munculnya inovasi dan motivasi para pelaku ekonomi tersebut

Elemen yang membentuk ekosistem ekonomi syariah, seperti ditunjukkan gambar 2.1, terdapat pada interaksi 2 blok utama, yaitu sisi *supply* (penawaran) dan sisi *demand* (permintaan), yang didukung oleh elemen pada blok infrastruktur ekosistem. Sisi *supply* merupakan blok besar berisi para pelaku industri yang berasal dari berbagai sektor perekonomian. Sedangkan sisi *demand*, baik yang berasal dari domestik maupun global, menggambarkan kebutuhan produk yang dihasilkan dari industri. Blok infrastruktur ekosistem berfungsi untuk memfasilitasi dan mendukung aktivitas yang dilakukan pada blok utama.

Terdapat 4 kelompok pelaku ekonomi yang membentuk blok sisi penawaran produk dan jasa ekonomi syariah, yaitu klaster industri halal, klaster keuangan komersil, klaster keuangan sosial, dan klaster komunitas. Interaksi pada sisi penawaran merepresentasikan dukungan kuat aktivitas industri pada sektor rill yang berasal dari sektor-sektor industri pada klaster keuangan komersil maupun keuangan sosial, termasuk partisipasi komunitas ekonomi syariah. Karena itu, pengembangan sektor keuangan syariah harus selaras dengan kebutuhan penguatan sektor riil, terutama industri halal dan usaha-usaha syariah agar tercipta sinergi yang berkelanjutan.

Industri halal merupakan bagian terpenting dalam ekosistem ekonomi Syariah yang diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap neraca perdagangan dengan menghadirkan produk-produk halal yang berdaya saing secara nasional dan global. Potensi luar biasa pada industri halal perlu dipetakan dan disinergikan dengan usaha-usaha syariah sehingga mendorong keterlibatan lembaga keuangan syariah yang lebih kuat. Sektor-sektor industri

halal yang menjadi prioritas adalah makanan dan minuman halal, fesyen muslim, pariwisata ramah muslim, farmasi dan kosmetik halal, serta media dan rekreasi halal. Industri lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dapat dikategorikan sebagai bisnis syariah.

Dalam pengembangan industri halal diperlukan infrastruktur pendukung seperti kawasan industri, laboratorium, pelabuhan, teknologi digital, dan sarana infrastruktur pendukung lainnya, untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan industri dalam melakukan proses produksinya secara terintegrasi dalam satu kawasan yang memenuhi persyaratan halal. Hal ini dapat berdampak pada kemudahan proses sertifikasi halal sehingga memberikan hasil pada peningkatan kapasitas industri dalam menghasilkan produk halal bernilai tambah tinggi, meningkatkan daya saing produk halal Indonesia, menarik investasi, dan meningkatkan kontribusi produk halal Indonesia dalam perdagangan global.

Dalam menjalankan aktivitas bisnis dan ekonomi, baik usaha dengan skala ultra mikro hingga perusahaan besar, semua sektor pada industri halal memiliki aktivitas rantai pasok yang serupa, yaitu mulai dari input, produksi, distribusi hingga penjualan dan pemasaran. Perbedaannya terletak pada jumlah entitas yang terlibat dalam rantai pasok dan kompleksitas aktivitasnya. Untuk usaha ultra mikro atau mikro, seluruh aktivitas rantai pasok dilakukan oleh orang yang sama, yang juga pemilik dari usaha tersebut. Semakin besar skala usahanya, aktivitas rantai pasok dilakukan oleh unit-unit yang berbeda dengan kompleksitas yang lebih tinggi.

Secara umum, klaster keuangan komersial dapat dibagi menjadi 3 sektor, yaitu sektor perbankan, sektor pasar modal dan sektor keuangan non-bank. Ketiga sektor ini saling mendukung dan berperan dalam pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran investasi dan pembiayaan kepada pelaku usaha yang ada di sektor rill, mulai dari pembiayaan ke sektor UMKM hingga pembiayaan infrastruktur yang termasuk proyek strategis nasional.

Sumber dana dari keuangan komersial yang perlu lebih dioptimalkan berasal dari investor global, dana pemerintah, investor institusional seperti BPKH, BP Jamsostek, dan Taspen. Sedangkan potensi lainnya yang selama ini telah ada seperti investor ritel yang membeli saham, sukuk atau reksadana serta masyarakat yang menyimpan uangnya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito tetap perlu dijaga sambil meningkatkan edukasi dan literasi atas produk-produk yang ada.

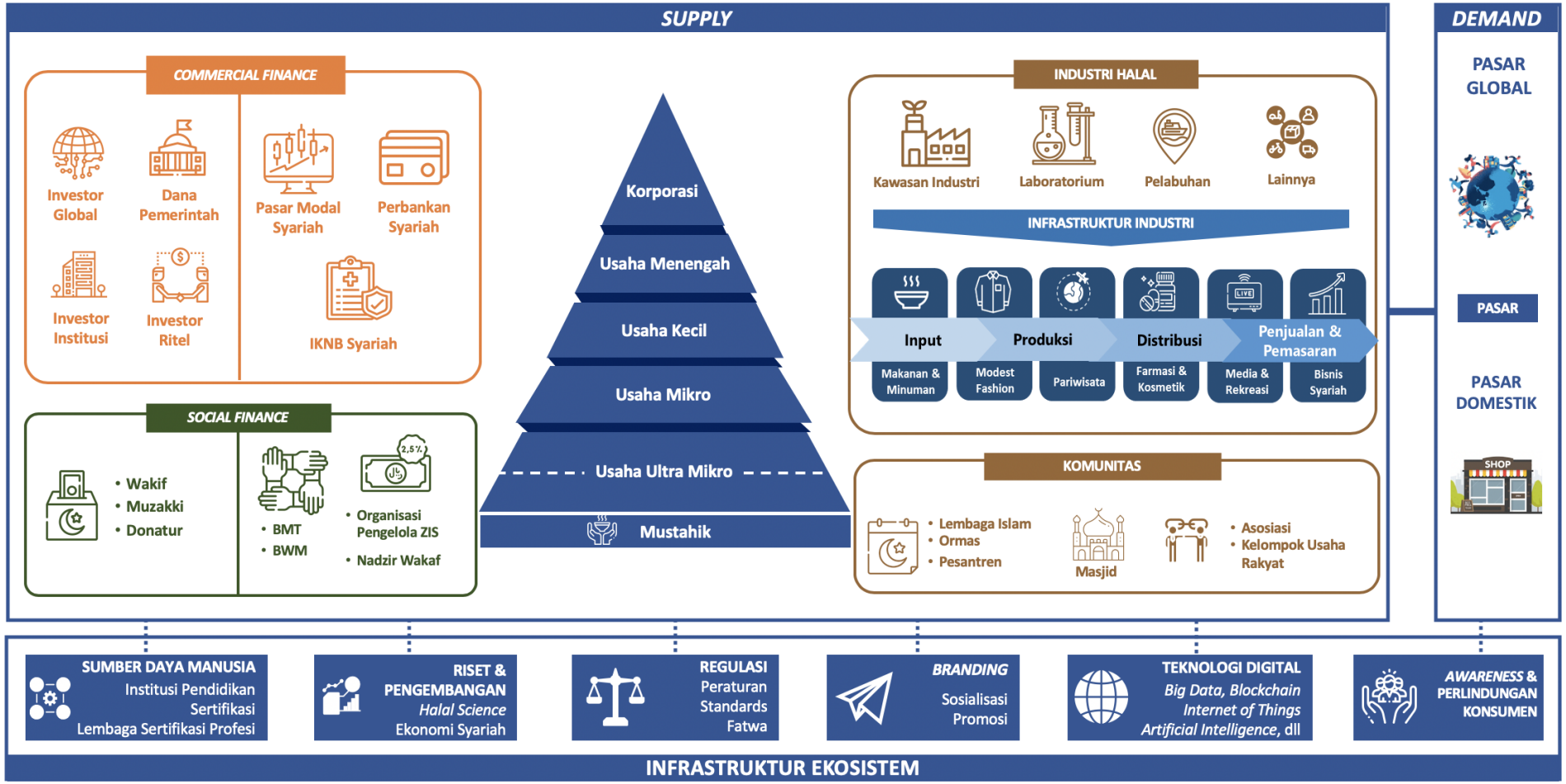

Gambar 2.1. Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah

Selain keuangan komersil, dukungan keuangan sosial yang berasal dari Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) juga menjadi klaster industri yang sama pentingnya. Masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan (mustahik) dijaga tingkat konsumsinya dengan bantuan dari dana zakat, infak dan sedekah, sehingga meskipun penghasilannya nihil, mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Dalam Islam, telah diatur syarat dan ketentuan mengenai zakat dan pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan dana tersebut (asnaf zakat). Salah satu peran zakat adalah menjaga tingkat konsumsi nasional. Mobilisasi dana zakat dari muzakki untuk disalurkan ke mustahik dilakukan oleh lembaga-lembaga amil zakat yang ada di tingkat daerah hingga nasional. Instrumen keuangan sosial syariah lainnya adalah wakaf, yang merupakan aset/dana abadi dengan penerima manfaatnya lebih luas dari asnaf zakat. Lembaga Nadzir atau pengelola wakaf bertugas untuk menghimpun dana wakaf, mengelola aset/dana wakaf tersebut dan menyalurkan manfaatnya kepada penerima manfaat sesuai mandat dari wakif.

Dalam pelaksanaanya, usaha mikro, kecil dan menengah (UMK) biasanya dilayani oleh lembaga keuangan seperti BMT dan BPRS. Untuk skala yang lebih besar, kebutuhan pengelolaan keuangannya akan dilayani oleh bank umum Syariah maupun unit usaha Syariah suatu Bank. Usaha menengah dan korporasi dapat dilayani oleh bank Syariah untuk kebutuhan permodalan dan pembiayaannya. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang mencari pendanaan melalui penerbitan sukuk atau IPO dapat dibantu oleh perusahaan sekuritas.

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan membutuhkan perlindungan atas risiko yang dapat dialami perusahaan ataupun karyawan dan nasabahnya, sehingga mereka membutuhkan produk asuransi Syariah, mulai dari asuransi kerugian, asuransi kebakaran, asuransi untuk kendaraan operasional ataupun asuransi Kesehatan untuk para karyawannya. Selain perlindungan, pelaku usaha juga membutuhkan *cash management* dalam mengelola arus kas usaha. Penggunaan *cash management* dan *digital payment* yang disediakan oleh Lembaga keuangan baik bank ataupun non-bank sangat berperan dalam aktivitas operasional pelaku usaha.

Keuangan komersial dapat dibagi menjadi 3 sektor, yaitu sektor perbankan, sektor pasar modal dan sektor keuangan non-bank. Ketiga sektor ini saling mendukung dan berperan dalam pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran investasi dan pembiayaan kepada pelaku usaha yang ada di sektor rill, mulai dari pembiayaan ke sektor UMKM hingga pembiayaan infrastruktur yang termasuk proyek strategis nasional. Sumber dana dari keuangan komersial dapat berasal dari investor global, dana pemerintah, investor institusional seperti BPKH, BP Jamsostek, dan Taspen, serta berasal dari investor ritel yang membeli saham, sukuk atau reksadana serta masyarakat yang menyimpan uangnya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.

Dalam ekosistem ekonomi Syariah, interaksi antar industri halal maupun industri keuangan Syariah dengan komunitas tidak dapat dipisahkan. Komunitas menjadi elemen penting dalam ekosistem, dimana komunitas dapat berperan penting sebagai pelaku industri, sebagai konsumen, sebagai tempat pertukaran informasi dan juga menyuarakan aspirasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah.

Elemen-elemen utama dalam ekosistem ini diharapkan tumbuh bersama dan saling mendukung satu sama lain untuk meningkatkan kontribusi ekonomi dan keuangan Syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Untuk dapat berkembang dengan baik, elemen-elemen utama ini perlu didukung oleh ekosistem pendukung seperti Sumber Daya Manusia yang handal, Riset & Penembangan yang berkualitas, Regulasi yang progresif dan tidak tumpeng tindih, serta teknologi digital yang mumpuni. Sedangkan dari sisi permintaan, perlu dilakukan literasi yang masif serta perlindungan konsumen yang memadai. Peran aktif dari masing-masing elemen dalam ekosistem akan saling mendukung dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan keuangan Syariah yang efisien, kompetitif dan *sustainable*.

Dalam rangka mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah, maka fokus utama program kerja KNEKS sesuai dengan Perpres no. 28 tahun 2020 meliputi: 1) pengembangan produk industri halal, 2) pengembangan industri keuangan Syariah, 3) pengembangan dana sosial Syariah, dan 4) pengembangan dan perluasan kegiatan usaha Syariah. Anggota KNEKS bersama dengan manajemen eksekutif telah merumuskan dan akan melaksanakan beberapa program kerja strategis yang meliputi tapi tidak terbatas pada:

1. Pengembangan infrastruktur dan klaster industri halal.
2. Berkembangnya standar halal/Halal Assurance System (HAS) yang komprehensif untuk mendukung percepatan industri produk halal nasional.
3. Peningkatan kontribusi industri halal terhadap neraca perdagangan nasional.
4. Pengembangan UMKM yang berdaya saing dan menjadi bagian dari rantai nilai halal global.
5. Penciptaan dan penguatan usaha-usaha Syariah baru.
6. Digitalisasi ekonomi Syariah yang mamacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi umat.
7. Optimalisasi peran Pemerintah melalui kebijakan afirmatif untuk industri keuangan Syariah.
8. Penguatan modal dan pendanaan industri ekonomi dan keuangan Syariah.
9. Penguatan kapasitas, tata kelola, dan infrastruktur industri keuangan Syariah.
10. Pengelolaan ZISWAF yang transformatif.
11. Peningkatan inklusi keuangan Syariah melalui optimalisasi jaringan pesantren.
12. Penguatan IKMS yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.

13. Penguatan SDM ekonomi Syariah unggul dan berdaya saing global.
14. Peningkatan kualitas dan kuantitas riset dan pengembangan industri halal
15. Penguatan regulasi perekonomian Syariah
16. Peningkatan program literasi ekonomi dan keuangan Syariah.

Provinsi
Aceh

Sekilas
tentang Ekonomi Syariah Provinsi Aceh

Provinsi Aceh yang memiliki julukan Serambi Mekkah tercermin dalam pemerintahannya yang memiliki misi pelaksanaan syariat Islam secara sempurna yang tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kesadaran masyarakat Aceh untuk beragama secara menyeluruh telah mendorong meningkatnya penggunaan jasa keuangan Syariah dan konsumsi produk halal.

Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Aceh melaju sangat cepat semenjak lahirnya Qanun (Peraturan Daerah) No.11/2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Kehadiran Qanun/peraturan daerah tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ini memperkuat implementasi pembangunan ekonomi syariah di Aceh dan menambah pendapatan asli daerah dimana proses konversi Bank BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah menjadi titik kulminasinya. Konversi Bank Aceh Syariah yang merupakan proses konversi BPD pertama di Indonesia mendorong market share aset perbankan Syariah nasional keluar dari jebakan pasar angka 5%. Sementara pada sektor keuangan mikro Syariah, hampir seluruh lembaga keuangan mikro di Aceh telah meminta penerapan prinsip Syariah dan ditargetkan pada akhir 2021 seluruh Koperasi konvensional sudah konversi menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah/KSPPS (Dinas Koperasi Aceh, 2019).

Provinsi ini juga sangat berpotensi dalam pengembangan sektor industri halal. Klaster industri halal yang menjadi unggulan di Aceh adalah makanan-minuman halal dan pariwisata ramah Muslim. Industri makanan dan minuman halal dapat disokong oleh besarnya potensi bahan baku keduanya, seperti hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang berkontribusi sebesar 29.6 persen terhadap PDR. Sementara di sektor Pariwisata ramah Muslim, provinsi Sumatera Barat juga merupakan salah satu salah satu daerah prioritas untuk mendukung pengembangan wisata ramah Muslim di Tanah Air (Kementerian Pariwisata, 2019).

Regulasi Tingkat Daerah
di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah

Peraturan Daerah terkait Keuangan Syariah	Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok Pokok Syariat Islam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal
Peraturan Daerah terkait Industri Halal	Peraturan Daerah tentang Konversi Bank Aceh Syariah (dalam tahap finalisasi)
Peraturan Daerah terkait Makanan/Minuman Halal	Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok Pokok Syariat Islam
Peraturan Daerah terkait Fesyen Muslim	Qanun Prov. NAD No. 11 Tahun 2002 Pasal 13 dan 23 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam. Qanun Aceh No.8 Tahun 2014 tentang Pokok Pokok Syariat Islam
Peraturan Gubernur terkait Pariwisata ramah Muslim	Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan
Peraturan Gubernur terkait Pengelolaan Zakat	Pergub Nomor 08 tahun 2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat
Peraturan Daerah Lainnya	Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencabutan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim Sukamakmur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh

Rencana Pemerintah Daerah
di Sektor Ekonomi Syariah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 di Provinsi Aceh memfokuskan pada "Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani" dengan 10 misi utama yaitu:

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani.
2. Memperkuat pelaksanaan syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain.
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki.
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional.
5. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi.
6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.
7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan.
8. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif.
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence-based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Inflasi		Tingkat Pengangguran		Tingkat Kemiskinan		Konsumsi RT		Konsumsi Pemerintah		Investasi		Ekspor		Impor	
2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
4.61%	4.15%	1.84%	1.69%	6.36%	6.20%	15.68%	15.01%	1.82%	2.13%	0.23%	1.41%	1.18	2.18%	0.92%	0.57%	-0.10%	0.74%

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022

- Mutu Pendidikan dan Dinul Islam
- Akses dan Kualitas Kesehatan
- Infrastruktur Terintegrasi
- Ketahanan dan Kemandirian Pangan
- Nilai Tambah Sektor Strategis
- Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja
- Investasi dan Kemandirian Energi
- Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan dan Kebencanaan
- Perdamaian dan Reformasi Birokrasi

16 Program Unggulan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Aceh 2017-2022	Isu Strategis RPJMD Provinsi Aceh 5 tahun ke depan
▪ *Aceh Peumulia* (Pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat,berkualitas dan bebas pungutan liar (pungli) ▪ *Aceh Meuadab* (Diharapkan mampu mengembalikan khittah Aceh sebagai Serambi Mekkah melalui implementasi nilai-nilai ke-Islam-an dalam kehidupan sehari-hari melalui penguatan Pendidikan berbasis moral, penguatan budaya masyarakat adat, ▪ *Aceh Dame* (Diharapkan mampu terwujud penguatan pelaksanaan UUPA sesuai prinsip-prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif) ▪ *Aceh Carong (*Diharapkan dapat terwujud Anak Aceh cerdas (caròng) dengan pelaksanaan beberapa kegiatan*)* ▪ *Aceh Teuga* (Mengembalikan dan meningkatkan prestasi olahraga Aceh di tingkat nasional dan regional ▪ *Aceh Seujahtera* (Diharapkan pemenuhan akses layanan Kesehatan gratis yang lebih mudah dan pembangunan rumah sakit regional) ▪ *Aceh Seuninya* (Penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin secara bertahap danpenyediaan skema perumahan murah bagi pasangan muda yang kurang mampu. ▪ *Aceh Meugoe dan Meulaot* (Melaksanakan pembangunan pertaniandan ekonomi maritim melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi) ▪ *Aceh Troe* (Pemenuhan bahan pangan dan gizibagi seluruh rakyat Aceh secara mandiri) ▪ *Aceh Energi* (Pemenuhan energi listrik bagi rakyat Aceh dan industri yang berasal dari energi bersih-terbarukan) ▪ *Aceh Kreatif* (Mendorong tumbuhnya industri sesuai dengan potensi sumberdaya daerah dan memproteksi produk yang dihasilkannya) ▪ *Aceh Kaya* (Merangsang tumbuhnya entrepreneur yang ditunjang dengan kemudahan akses terhadap modal, keterampilan dan pasar) ▪ *Aceh Siat* (Dengan adanya SIAT seluruh informasi yang berguna untuk pembangunan dan pelayanan akan ter-*update* dengan cepat, dapat diakses oleh semua stakeholder melalui	▪ Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik ▪ Penguatan nilai-nilai ke-Islaman dan budaya ke-Acehan ▪ Penguatan perdamaian secara berkelanjutan ▪ Pemenuhan ketahanan dan kemandirian pangan ▪ Pengembangan pertanian dan perikanan ▪ Pengembangan industri, dan koperasi dan UMKM ▪ Pengembangan pariwisata ▪ Ketenagakerjaan ▪ Ketersediaan dan ketahanan energi ▪ Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi ▪ Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah ▪ Pemenuhan perumahan dan permukiman layak huni ▪ Peningkatan kualitas dan pelayanan Pendidikan ▪ Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga ▪ Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan ▪ Pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ▪ Penanggulangan kerawanan bencana, pengelolaan sumberdaya alam, dan lingkungan hidup

satu pintu, sertamenjadi acuan bersama dalam perencanaan pembangunan pada setiap tingkat pemerintahan. ▪ *Aceh Green* (Penegasan terhadap pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang sensitif terhada presiko bencana alam dengan konsep pembangunan) ▪ *Aceh Seuninya* (Penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin secara bertahap dan penyediaan skema perumahan murah bagi pasangan muda yang kurang mampu. ▪ *Aceh Seumeugot* (Diharapkan dapat tersedianya sarana dan prasarana (infrastruktur) secara cerdas dan berkelanjutan serta terintegrasi untuk menjadi daya ungkit pembangunan ekonomi.	

Rencana Pembangunan Ekonomi Syariah di Provinsi Aceh

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 di Provinsi Aceh bertujuan sebagai berikut:

- Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas
- Memperkuat pelaksanaan Aqidah, Syariah, dan Akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat
- Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip MoU Helsinki
- Meningkatkan pembangunan demokrasi
- Meningkatkan kualitas SDM Aceh yang memiliki daya saing
- Meningkatkan prestasi olahraga dan kepemudaan ditingkat nasional dan regional
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
- Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- Menurunnya angka kemiskinan
- Mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi di Aceh
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- Menurunnya angka pengangguran
- Membangun Sistem Informasi Aceh secara terpadu dan terintegrasi
- Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip *Evidence Based Planning*
- Mengurangi ketimpangan antar wilayah
- Meningkatnya prasarana dan sarana pelayanan dasar
- Meningkatkan tatakelola lingkungan Hidup lestari
- Meningkatkan pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan
- Meningkatkan tata Kelola kebencanaan

Sektor Pariwisata Ramah Muslim	Sektor Makanan dan Produk Halal
▪ Rencana Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim di daerah Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Pidie Jaya, Pidie, Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Timur ▪ Meningkatkan kontribusi pariwisata ramah Muslim melalui penguatan citra/brand image Aceh sebagai destinasi pariwisata ramah Muslim.	▪ Pelaksanaan Pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) dengan adanya audit dan pemberian sertifikat halal kepada pelaku usaha di sektor makanan/minuman di Provinsi Aceh dengan target sertifikasi halal sebanyak 1.050, 1.350, dan 1.650 kepada pelaku sektor makanan/minuman.
Sektor Keuangan Mikro Syariah	**Sektor Keuangan Sosial Syariah**
▪ Mendorong lebih banyak lagi Koperasi Syariah agar mempunyai ijin dan berbadan hukum Syariah serta pembinaan koperasi Syariah agar melahirkan koperasi Syariah	▪ Menggali sumber-sumber pendapatan baru termasuk melalui instrument zakat/infaq/shadaqah, sesuai dengan peluang dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh

Program Pemerintah Daerah
di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah

Sektor Industri Halal

Program Pemerintah Provinsi Aceh

Sektor industri halal unggulan yang akan diprioritaskan pengembangannya adalah sektor makanan-minuman halal dan pariwisata ramah Muslim. Industri makanan dan minuman halal dapat disokong oleh besarnya potensi bahan baku keduanya, seperti hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang berkontribusi sebesar 29,6 persen terhadap PDRB. Aceh mempunyai banyak sekali objek wisata yang berpotensi dikembangkan untuk sektor pariwisata ramah Muslim. Saat ini, objek wisata di Aceh tercatat sebanyak 978 spot wisata, mulai dari wisata bahari, wisata alam, wisata budaya, wisata religius, wisata kuliner, dan cagar budaya

Program Pendukung Sektor Industri Halal

Makanan dan Minuman halal	▪ Program Pengembangan dan Pembinaan UKM ○ Pengembangan Usaha bagi UMKM ○ Peningkatan Daya Saing UMKM ▪ Program Pegembangan Industri Kreatif dan Aneka ▪ Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif dan Aneka ▪ Sub Keg. ○ Bimbingan Penerapan HaKI, SNI, P-IRT dan Sertifikat Halal Bagi IKM Binaan Disperindag Aceh Tahun 2020 ▪ Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama ▪ Keg. Pembinaan Sertifikasi Jaminan Halal
Fesyen Muslim	▪ Program Pengembangan dan Pembinaan UKM ▪ Pengembangan Usaha bagi UMKM ▪ Peningkatan Daya Saing UMKM ▪ Program Pengembangan Industri Kreatif dan Aneka ○ Bimbingan Teknis Desain Pakaian Muslim untuk IKM Fesyen Kab. Aceh Barat, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Kota Lhokseumawe, dan Langsa di Banda Aceh ▪ Pendampingan Tenaga Ahli Produk Kerajinan Pakaian Muslim untuk IKM Fesyen Kab. Aceh Barat, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Kota Lhoksemawe dan Langsa ▪ Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya ▪ Kegiatan Penyelenggaraan Event dan Budaya ○ Islamic Fashion Festival pada DPA 2020 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh
Pariwisata ramah Muslim	Program Pemasaran Pariwisata, program Destinasi Pariwisata pada Disbudpora Kab. Aceh Jaya

Jumlah Kegiatan Syariah/Halal

	Jumlah Event Produk Daerah	Jumlah Event Produk Halal/Syariah/Islami
Fesyen	3	1
Pariwisata	29	3

Sentra Sektor Industri Halal

Makanan dan Minuman Halal	Fesyen Muslim
-	Pasar Atjeh Baru

Penetapan Daerah Pariwisata Ramah Muslim

Tahap	Daftar Desa/Kabupaten/Kota Wisata ramah Muslim
Sudah ada	Kabupaten Aceh Jaya
Dalam tahap perencanaan	-

Program Pendorong Pariwisata Ramah Muslim

Program pemerintah daerah dalam mendorong industri Pariwisata ramah Muslim yaitu:

- Sertifikasi Auditor Perbintangan Hotel
- Sosialisasi aturan Kepariwisataan
- Business Matching Kemitraan Pariwisata
- Family Trip (Famtrip)
- Penyambutan Kapal Pesiar
- Program Pemasaran Pariwisata

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pendukung Sektor Industri Halal

- Pelaksanaan program Industri Kreatif Syariah (IKRA) yang mendorong penguatan UMKM di bidang fashion dan food (makanan dan minuman).
- Pengembangan Gampong Nusa sebagai salah satu destinasi wisata desa berbasis syariah.
- Pelaksanaan program Wirausaha Bank Indonesia (WUBI) dengan penanaman nilai-nilai syariah dalam bisnis.
- Dimasukkannya sharia values dalam pengembangan program LED Nilam, klaster, dan program pengembangan UMKM lainnya.

Sektor UMKM dan ekonomi pesantren

Program Pemerintah Provinsi Aceh

Program Pemberdayaan UMKM

Sektor	Daftar Program Pendampingan
Makanan dan minuman halal	▪ Bimbingan teknis pengolahan makanan dan minuman ▪ Pelatihan manajemen bisnis ▪ Pendampingan bagi pelaku IKM ▪ Bantuan peralatan ▪ Sertifikasi (Halal, HaKi) ▪ Promosi melalui berbagai event pameran dalam daerah, luar daerah dan luar negeri
Fesyen Muslim	▪ Bimbingan teknis bagi desainer fesyen ▪ Pelatihan manajemen bisnis ▪ Pendampingan bagi pelaku IKM bidang fesyen ▪ Bantuan peralatan ▪ Sertifikasi produk (HaKi) ▪ Promosi melalui berbagai event pameran dalam daerah, luar daerah dan luar negeri

Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	2017	2018	2019
IKM mendapat pendampingan	1,239	370	337
IKM mendapat pendampingan sertifikasi halal	50	-	30

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Ekonomi Pesantren

Jumlah Pesantren	Program Pengembangan Ekonomi (*Lampiran*)
4	2
▪ Pesantren Darul Ulum ▪ Pesantren Thalibul Huda ▪ Pesantren Budi Lamno ▪ Pesantren Darun Nizham	▪ Program Pendampingan Kemandirian Ekonomi terhadap ke-4 Pesantren tersebut yaitu diantaranya: 1. Program pendampingan dalam rangka mengoptimalkan aset produktif yang dimiliki oleh pesantren dengan memperbaiki standar pengelolaan usaha. 2. Ruang lingkup program ini meliputi penyusunan kurikulum pendampingan, memberikan pelatihan dari sisi teori dan praktek, serta membantu pengelola usaha di pesantren agar lebih professional dalam menjalankan kegiatannya sehingga dapat memberikan kontribusi dan peran yang optimal dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan dan menjaga berkelanjutan usaha pesantren.

Sektor Keuangan Syariah

Program Otoritas Jasa Keuangan (Provinsi)

Sub-sektor	Detil Program
Perbankan Syariah	▪ Pendampingan Bank Konvensional dan BPR dalam rangka mengimplementasikan Qanun LKS No 11 Tahun 2018. ▪ Ikut serta sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Konversi Lembaga Keuangan Konvensional ke Lembaga Keuangan Syariah yang dibentuk oleh Plt. Gubernur Aceh. ▪ Ikut serta sebagai tim Peraturan gubernur (Pergub) yang bertugas menyelaraskan rancangan Pergub dengan peraturan dan ketentuan OJK. ▪ Memberikan Workshop Peningkatan Kualitas bagi BPRS di dalam menyalurkan pembiayaan dengan akad Salam dan Istishna.
Bank Pembangunan Daerah	▪ Melakukan pendampingan untuk pelaksanaan program transformasi BPD pada PT Bank Aceh Syariah. ▪ Melakukan pendampingan dan pemantauan PT Bank Aceh Syariah di dalam meningkatkan penyaluran pembiayaan UMKM, antara lain dengan mengevaluasi persyaratan yang perlu dipenuhi oleh bank untuk menjadi bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Keuangan Syariah

- Memonitor secara berkala kinerja pembiayaan di sektor UMKM.
- Memberikan masukan terkait dengan inovasi akad dan implementasi teknologi sederhana yang membantu operasional pelaksanaan tugas AO Financing.
- Mendorong cara berpikir dan tindakan yang forward looking kepada jajaran direksi dalam mengantisipasi perkembangan teknologi dan kompetisi layanan jasa perbankan.
- Memberikan pelatihan kepada account officer terkait ekonomi dan keuangan syariah (pengetahuan dasar mengenai ekonomi syariah, pengetahuan teknis perbankan dan peningkatan wawasan akad syariah).
- Penyusunan modul edukasi ekonomi dan keuangan syariah (yang salah satu didalamnya membahas tentang perbankan syariah).
- Pelaksanaan kegiatan seminar/talkshow terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah secara berkala.
- Mengawal implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah yang terkait dengan perbankan.

Sektor Keuangan Mikro Syariah

Program Pemerintah Daerah Provinsi Aceh

Program Pendampingan, Pengawasan, dan Pengembangan Koperasi Syariah (KSPPS)

Program	Institusi Keuangan Mikro Syariah
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	▪ Pelatihan Manajemen Pola Syariah Bagi KSP/USP/KSPPS/USPPS yang direncanakan pelaksanaannya secara virtual ▪ Pelatihan Pengawas Syariah Koperasi

Program Otoritas Jasa Keuangan (Provinsi)

Program Pendampingan, Pengawasan, dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

- Program Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan, pelatihan Pengelolaan, Pelaporan, dan Pengawasan BWM.

Sektor Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Program BAZNAS Provinsi Aceh

Kategori Program ZIS dan Alokasi Baznas Provinsi Aceh

Kategori	Nama Program	Jumlah Penerima Manfaat (jiwa)	Besar Alokasi Penyaluran (Rp)
Sosial Kemanusiaan	1. Bantuan untuk Fakir Uzur	2,520	15,120,000,000
	2. Bantuan Insidentil untuk kebutuhan hidup	95	475,773,000
	3. sehari-hari	4,000	3,200,000,000
	4. Bantuan Santunan Ramadhan untuk Keluarga Miskin		
	5. Bantuan Pendampingan untuk Anak Terlantar dan Anak Korban Kekerasan	20	200,000,000
	6. Bantuan untuk Pembelian Perlengkapan Bayi dan Ibu Melahirkan bagi Keluarga Kurang Mampu	80	200,000,000
	7. Bantuan untuk Muallaf Baru	50	100,000,000
	8. Bantuan Biaya untuk orang terlantar dan Kehabisan Bekal Karena Sakit dan Keadaan Mendesak Lainnya	100	500,000,000
	9. Bantuan untuk Korban Musibah dan Bencana Alam	300	600,000,000
Pendidikan	1. Bantuan Insidentil untuk kebutuhan pendidikan	50	250,000,000
	2. Beasiswa Penuh Muallaf	206	2,893,000,000
	3. Beasiswa Berkelanjutan Muallaf	123	590,400,000
	4. Beasiswa Penuh Keluarga Miskin	374	4,672,950,000
	5. Beasiswa Berkelanjutan Keluarga Miskin	822	6,467,200,000
Kesehatan	1. Bantuan bagi Penderita Kanker, Thalassemia dan Penyakit Kronis Lainnya dari Keluarga Miskin	300	1,800,000,000
	2. Bantuan Insidentil Untuk Merawat/Menjaga Orang Sakit	50	250,000,000
	3. Bantuan Insidentil untuk orang Sakit	50	250,000,000
Pemberdayaan Ekonomi	1. Bantuan Dana untuk Pembelian Alatalat/Peralatan Kerja bagi Masyarakat Miskin)	337	2,696,000,000
	2. Gampong Produktif	20	3,000,000,000
	3. Bantuan Dana untuk Kelompok Usaha Bersama	10	800,000,000
	4. Bantuan Modal Ekonomi Muallaf	88	874,000,000
Dakwah	1. Pendampingan Syariah bagi muallaf	300	234,000,000
	2. Bantuan untuk Pengembangan dan Syiar Keislaman	1,390	1,400,000,000

Gambaran
Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah

Sektor Industri Halal

Nilai Ekspor Provinsi Aceh

Sektor	Jumlah Ekspor (USD)	% Dibandingkan dengan Total Ekspor Non-Migas
Makanan dan Minuman	138,028,713	43.45 %
Makanan dan Minuman Halal	38,028,713	43.45 %

Jumlah Usaha/Merk dengan Sertifikat Halal pada Sektor Makanan dan Minuman

Sektor Usaha/Brand (Tahun 2018)		Sektor Usaha/Brand (Tahun 2019)	
Roti	26	Roti	40
Katering dan Restoran	15	Katering dan Restoran	28
Tepung, Kanji, dan produk turunan/olahan	1	Tepung, Kanji, dan produk turunan/olahan	1
Es, es krim, dan bahan-bahan pendukung	2	Es, es krim, dan bahan-bahan pendukung	3
Susu dan produk olahan/turunan susu	1	Susu dan produk olahan/turunan susu	1
Makanan olahan, daging dan unggas	5	Makanan olahan, daging dan unggas	7
Makanan olahan ikan	6	Makanan olahan ikan	7
Makanan olahan telur	0	Makanan olahan telur	1
Makanan ringan	1	Makanan ringan	1
Pemanis, bumbu dapur, bumbu penyedap/ pelengkap	6	Pemanis, bumbu dapur, bumbu penyedap/ pelengkap	6
Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	11	Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	16
Semua Usaha/Brand Tersertifikasi Halal	74	Semua Usaha/Brand Tersertifikasi Halal	111

Sumber: Daftar Belanja Produk Halal LPPOM MUI hingga periode Maret-April-Mei 2019

Kontribusi Sektor Mamin terhadap Perekonomian Provinsi Aceh

	2019	2018	2017	2016	2015
PDRB (Milliar Rupiah)					
Mamin olahan	3,161.4	3,420.6	3,215	2,642.6	2,378.2
Mamin olahan, Base = 2010	2,452.4	2,410.2	2,259.7	2,018.8	1,863.9
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb)	2,528.3	2,250.9	1,964.6	1,655.8	1,418.1
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb), Base = 2010	1,619.9	1,501.1	1,365.3	1,230.3	1,122.1
Pertumbuhan PDRB (%)					
Mamin olahan, Base = 2010	1.75	6.66	11.93	8.31	5.95
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb), Base = 2010	7.91	9.95	10.97	9.64	6.12

Kontribusi pada PDRB (%)					
Mamin olahan	1.93	2.19	2.2	1.93	1.84
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb)	1.54	1.44	1.35	1.21	1.1

Total Produksi Daging Daerah (Tahun 2017)

Populasi Ternak		Produksi Daging Ternak (kg)	
Sapi Potong	627,698	Sapi	8,550,274
Sapi Perah	50	Sapi Impor	-
Kerbau	171,195	Kerbau	3,162,618
Kuda	2,778	Kuda	-
Kambing	615,526	Kambing	2,710,227
Domba	91,585	Domba	433,215
Populasi Unggas		**Produksi Daging Unggas (kg)**	
Ayam Kampung	5,598,990	Ayam Kampung	11,739,066
Ayam Petelur	441,442	Ayam Petelur	355,158
Ayam Broiler	5,571,629	Ayam Broiler	7,409,776
Bebek	2,960,138	Bebek	1,798,125

Skor Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) tahun 2018 Provinsi Aceh

Akses	63
Komunikasi	58
Lingkungan	70
Jasa	63
Skor IMTI	**66**

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Provinsi Aceh

	2018	2017	2016	2015	2014
PDRB (Milliar Rupiah)					
Jasa akomodasi	251.7	259.6	218.7	215.1	185
Jasa akomodasi, Base = 2010	171.8	179.6	157.9	158,6	143.4
Pertumbuhan PDRB (%)					
Jasa akomodasi, Base = 2010	-4.37	13.74	-0.41	10.57	6.26
Kontribusi pada PDRB (%)					
Jasa akomodasi	0.16	0.18	0.16	0.17	0.14

Rating untuk Pariwisata Ramah Muslim di Provinsi Aceh

Skor	Aspek		Skor	Aspek	
Skor Akses	Udara	5	Skor Lingkungan	Kedatangan Turis Muslim	5
	Kereta	1		Jangkauan Wi-Fi	4
	Laut	5		Komitmen terhadap Wisata ramah Muslim	4
	Infrastruktur Jalan				
Skor Komunikasi	Panduan Pelancong Muslim	4	Skor Jasa	Restoran Halal	5
	Edukasi Pemangku Kepentingan	5			
	Jangkauan Pasar	5		Masjid	5
	Pemandu Tur	5		Bandara	5
	Pemasaran Digital	5		Hotel	5
				Atraksi	5
			Skor Total		76
			Rata-rata Skor		4.47

NB: data lengkap bisa didapatkan di dalam Laporan Perkembangan Pariwisata Ramah Muslim Daerah 2019-2020

Indikator Pariwisata Ramah Muslim Provinsi Aceh

Indikator	Skor/Nilai	Keterangan
Akses	Baik	Memiliki akses udara, laut, kereta api, dan infrastruktur jalan yang baik
Akses Udara	Baik	Memiliki bandara internasional
Bandara International	1	
Akses Kereta	Baik	
Akses Laut	Baik	
Terminal Kapal Pesiar	1	
Pelabuhan	1	Pelabuhan internasional
Infrastruktur Jalan		
Jalan Nasional/Negara	2,100	(km)
Jalan Provinsi	1,782.7	(km) Sebagian besar kondisi jalan dalam keadaan baik, 17% dalam kondisi sedang
Komunikasi	Baik	Aceh memiliki komunikasi terkait pariwisata ramah Muslim yang baik, seperti panduan untuk pengunjung Muslim, edukasi untuk pemangku kepentingan, kegiatan pendukung jangkauan pasar, pemandu tur, dan melakukan pemasaran digital
Panduan bagi Pelancong Muslim	Ada	Terdapat 5 buah buku panduan yang telah dipublikasikan

Indikator	Skor/Nilai	Keterangan
Edukasi Pemangku Kepentingan	Baik	Edukasi dilakukan dalam bentuk *workshop*
Workshop	8	Dalam kurun waktu 12 bulan
Jangkauan Pasar	Baik	Terdapat program jangkauan pasar, namun tidak dijelaskan secara detil
Program Jangkauan Pasar	9	Tidak dirinci
Pemandu Tur	Baik	Terdapat pemandu tur yang memiliki kemampuan Bahasa Inggris dan Arab
Bahasa Arab	34	
Bahasa Inggris	55	
Pemasaran Digital	Baik	Pemasaran digital dilakukan dengan aplikasi, *website*, dan media sosial
Aplikasi	6	Aplikasi tersedia di Googleplay
Website	11	
Media Sosial	Ada	Google plus, Facebook, Twitter, Instagram, Kaskus, Youtube
Lingkungan	Baik	Aceh memiliki banyak turis. Cakupan jaringan wifi-nya baik. Aceh juga sudah menerapkan *qanun* di salah satu provinsi sehingga mendukung pariwisata ramah Muslim.
Kedatangan Turis	Baik	Terdapat wisatawan domestik dan mancanegara, namun wisatawan mancanegara cenderung sedikit
Wisatawan Domestik	2,665,189	
Wisatawan Mancanegara	78,000	45% nya Muslim
Jangkauan Wifi	Baik	Wifi di bandara kualitasnya baik dan gratis, kecepatannya pun juga tinggi
Komitmen terhadap Halal Tourism	Baik	Salah satu provinsi di Aceh menerapkan *qanun*
Jasa	Baik	Sebagian besar kebutuhan industri pariwisata ramah Muslim dan hal-hal yang fundamental seperti restoran halal, masjid, bandara, hotel, dan atraksi sudah dimiliki dengan kualitas yang baik
Restoran Halal	Baik	Terdapat restoran halal, tempat ibadah yang layak, hotel syariah, dan daya tarik wisata yang dilengkapi toilet dan mushala yang bersih

Indikator	Skor/Nilai	Keterangan
Restoran bersertifikat halal	13	Baru terdapat sedikit restoran bersertifikasi halal, lebih banyak yang *self-claimed*
Restoran/ Rumah makan halal *(self-claimed)*	1,448	
Masjid	Baik	Terdapat 11,102 tempat ibadah Muslim, kondisinya baik
Masjid	4,067	
Mushala	7,035	
Bandara	Baik	Terdapat tempat sholat
Mushala	5	
Hotel	Baik	Terdapat hotel syariah, hotel dengan dapur halal, dan dapur yang tidak menyediakan alkohol
Hotel Syariah	2	
Hotel dengan dapur bersertifikat halal	7	
Hotel yang tidak menyediakan menu babi	34	
Atraksi	Baik	Setiap situs dan daya tarik wisata dilengkapi dengan restoran bersertifikat halal serta toilet dan mushala yang bersih
Situs budaya islami	14	
Daya tarik wisata budaya	89	
Daya tarik lokal	123	

Sektor Keuangan Syariah

Indeks Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah

Indeks	Tahun 2016	Tahun 2019
Indeks literasi keuangan Syariah (OJK)	21.1%	20.21%
Indeks inklusi keuangan Syariah (OJK)	41.5%	41.5%
Indeks literasi ekonomi Syariah (BI)	-	4.2%

Profil Keuangan BPD Syariah - Bank Aceh Syariah (*Miliar Rupiah*)

	2015	2016	2017	2018	2019
Total Aset Gross	2,588	18,759	22,612	23,095	25,121
Total Pembiayaan	1,714	12,206	12,847	13,237	14,363
Total DPK	2,089	14,429	18,499	18,390	20,925

Total FDR	82.05%	84.59%	69.44%	71.98%	68.64%
Total NPF	0.18%	1.39%	1.38%	1.04%	1.29%
Pangsa Pasar (%)	-	-	-	47%	49%

Profil Industri Perbankan Syariah (BUS) di Aceh (*Ribu Miliar Rupiah*)

	2018	2019
Pangsa pasar (%)	53%	55%
Pembiayaan berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	1,183	1,800
Modal kerja (bukan UMKM)	44	324
Investasi (UMKM)	348	429
Investasi (bukan UMKM)	77	262
Konsumsi	12,441	13,510
NPF berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	106	51
Investasi (UMKM)	33	14
Konsumsi	27	32
Total		
Total aset gross	28.558	32.119
Total pembiayaan	14.094	16.325
Portfolio pembiayaan UMKM (%)		
Total DPK	20.452	24.206
Total FDR	68.91%	67.44%
Total NPF	138	98
Total NPF (%)	2%	0.6%

Profil Industri Perbankan Syariah (BUS) di Provinsi Aceh (*Miliar Rupiah*)

	2018	2019
Pangsa pasar (%)	2%	2%
Pembiayaan berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	75	78
Modal kerja (bukan UMKM)	6	6
Investasi (UMKM)	2	1
Konsumsi	158	194
NPF berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	-	2
Modal kerja (bukan UMKM)	-	2
Konsumsi	1	1
Total		
Total aset gross	513	621
Total pembiayaan	241	279
Portfolio pembiayaan UMKM (%)	255	313
Total DPK	94.58%	89.28%
Total FDR	1	5
Total NPF	513	621
Total NPF (%)	0.6%	1.8%

Sektor Keuangan Mikro Syariah

Jumlah LKMS/BWM yang Mendapatkan Program Pendampingan dan Pengawasan dari OJK

IKMS	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah mendapat pendampingan OJK	-	1	2
Jumlah yang mendapat pengawasan OJK	-	-	1

Profil Fundamental LKMS dan BWM di bawah Pengawasan OJK

LKMS dan BWM	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah LKMS di wilayah/daerah	1	2
Jumlah anggota LKMS	-	22
Jumlah pegawai LKMS	12	12
Modal sendiri (*dalam Rupiah*)	-	6.7 Miliar
Volume usaha (*dalam Rupiah*)	-	-
Sisa Hasil Usaha/SHU (*dalam Rupiah*)	-	6.4 Juta
Total aset (*dalam Rupiah*)	6.2 Miliar	30.9 Miliar
Rata-rata pembiayaan LKMS (*dalam Rupiah*)	0<n<5 juta 100% 5<n<10 juta 0% 10<n<20 juta 0% 20<n<50 juta: 0%	0<n<5 juta 0% 5<n<10 juta 0% 10<n<20 juta 100% 20<n<50 juta: 0%

Jumlah IKMS yang Mendapatkan Program Pendampingan dan Pengawasan dari Pemerintah Provinsi Aceh

IKMS	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah IKMS yang mendapat pendampingan	-	-
Jumlah IKMS yang diawasi oleh dinas (pengawasan yang dimaksud adalah di cek laporan RAT, kunjungan ke IKMS, dsb)	9	4

Sektor Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Daftar BAZNAS aktif

23 BAZNAS Aktif	Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Simeuleu, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Bener Meriah, Kota Sabang, Kota Langsa, Kota Banda Aceh, Kota Subulussalam, Kota Lhoksuemawe

Jumlah Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah *(dalam Rupiah)*

Jenis Dana	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Penghimpunan Zakat ▪ Zakat Maal/Harta	190,137,842,941	209,029,967,970	Belum ada
Penghimpunan Infak ▪ Infak Bebas	75,265,953,988	74,432,913,746	Belum ada

Jumlah Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah *(dalam Rupiah)*

Jenis Dana	Tahun 2018	Tahun 2019
Penyaluran Zakat	7,418,607,000	3,210,000
Penyaluran Infak	8,000,000	-

Program Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah di Provinsi Aceh

Bidang Program	Nama Program	Jumlah Penerima Manfaat (jiwa)	Besar Alokasi Penyaluran (Rp)	Nama Lembaga
Sosial Kemanusiaan	Bantuan untuk Fakir Uzur	2,520	15,120,000,000	Unit Fakir Uzur
	Bantuan Insidentil untuk Kebutuhan Hidup Sehari-Hari	95	475,773,000	Pendistribusian
	Bantuan Santunan Ramadhan untuk Keluarga Miskin	4,000	3,200,000,000	Pendistribusian
	Bantuan Pendampingan untuk Anak Terlantar dan Anak Korban Kekerasan	20	200,000,000	Pendistribusian
	Bantuan untuk Pembelian Perlengkapan Bayi dan Ibu Melahirkan bagi Keluarga Kurang Mampu	80	200,000,000	Pendistribusian
	Bantuan untuk Muallaf Baru	50	100,000,000	Pendistribusian
	Bantuan Biaya untuk Orang Terlantar dan Kehabisan Bekal Karena Sakit dan Keadaan Mendesak Lainnya	100	500,000,000	Pendistribusian
	Bantuan untuk Korban Musibah dan Bencana Alam	300	600,000,000	Pendistribusian
Pendidikan	Bantuan Insidentil untuk Kebutuhan Pendidikan	50	250,000,000	Pendistribusian
	Beasiswa Penuh Muallaf	206	2,893,000,000	Unit Beasiswa
	Beasiswa Berkelanjutan Muallaf	123	590,400,000	Unit Beasiswa

Bidang Program	Nama Program	Jumlah Penerima Manfaat (jiwa)	Besar Alokasi Penyaluran (Rp)	Nama Lembaga
	Beasiswa Penuh Keluarga Miskin	374	4,672,950,000	Unit Beasiswa
	Beasiswa Berkelanjutan Keluarga Miskin	822	6,467,200,000	Unit Beasiswa
Kesehatan	Bantuan bagi Penderita Kanker, Thalassemia dan Penyakit Kronis Lainnya dari Keluarga Miskin	300	1,800,000,000	Unit Fakir Uzur
	Bantuan Insidentil untuk Merawat/Menjaga Orang Sakit	50	250,000,000	Pendistribusian
	Bantuan Insidentil Untuk Orang Sakit	50	250,000,000	Pendistribusian
Pemberdayaan Ekonomi	Bantuan Dana untuk Pembelian Alat-Alat/Peralatan Kerja bagi Masyarakat Miskin	337	2,696,000,000	Pendistribusian
	Gampong Produktif	20	3,000,000,000	ZIS Produktif
	Bantuan Dana untuk Kelompok Usaha Bersama	10	800,000,000	Pendistribusian
	Bantuan Modal Ekonomi Muallaf	88	874,000,000	ZIS Produktif
Dakwah	Pendampingan Syariah bagi Muallaf	300	234,000,000	Pendistribusian
	Bantuan untuk Pengembangan dan Syiar Keislaman	1.390	1,400,000,000	Pendistribusian

Indeks Zakat Nasional (IZN) Provinsi Aceh

	2018	2019
Indeks Zakat Nasional/IZN (Dimensi Makro)		
Regulasi	0.25	0.92
Dukungan Finansial dari Pemerintah (APBN/APBD) untuk BAZNAS	1	0.92
Jumlah Resmi Lembaga Zakat/OPZ, muzakki, and mustahik	0.75	0.81
Rasio, Jumlah muzakki individual/jumlah rumah tangga di level Provinsi	0	0.31
Rasio, Jumlah dari muzakki institusi/jumlah institusi di level Provinsi	0.25	0.60
Database dari institusi/lembaga zakat yang terdaftar	0.33	0.57
Total Indeks Makro	**0.58**	**0.82**

	2018	2019
Indeks Zakat Nasional/IZN (Dimensi Mikro)		
Penghimpunan	1	0.25
Pengelolaan	0.75	0.69
Penyaluran	0.69	0.75
Pelaporan	0.75	0.67
Indeks Kesejahteraan CIBEST	0.75	0.81
Modifikasi Indeks Pengembangan Manusia (HDI)	0.75	0.48
Kemandirian	0.5	0.50
Institutional	0.81	0.57
Dampak Zakat	0.7	0.62
Total Indeks Mikro	**0.74**	**0.58**

Sektor UMKM dan Ekonomi Pesantren

Jumlah Pesantren dengan Usaha-Usaha Syariah

15 Pondok Pesantren	18 Usaha-usaha Syariah (*detil tersedia di Lampiran*)

Sektor Pendidikan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Perguruan Tinggi yang menyediakan Program Studi Ekonomi dan Keuangan Syariah Terkait

Jenjang	Jumlah Universitas tahun 2019	Program Studi tahun 2019		2018		2019	
		Nama Program studi	Jumlah Program Studi	Jml. Dosen	Jml. Mahasiswa	Jml. Dosen	Jml. Mahasiswa
Sarjana	21	Akuntansi Syariah	1	6	126	-	326
		Bisnis Islam	-	-	-	-	-
		Ekonomi Syariah	13	113	7,450	-	5,739
		Hukum Ekonomi Syariah	9	69	6,798	-	3,563
		Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam	-	-	-	-	-
		Manajemen Bisnis Syariah	-	-	-	-	-
		Manajemen Haji dan Umroh	-	-	-	-	-
		Perbankan Syariah	9	72	5,144	-	3,428
		Manajemen Keuangan Syariah	1	7	467	-	312
Magister	2	Hukum Ekonomi Syariah	1	6	84	6	63
		Ekonomi Syariah	1	6	-	6	-
Doktoral	0						

Akreditasi Perguruan Tinggi Dan Program Studi Ekonomi Syariah Terkait

Akreditasi	Akreditasi Perguruan Tinggi			Akreditasi Program Studi		
	S1	S2	S3	S1	S2	S3
Akreditasi A	-	-	-	1	-	-
Akreditasi B	-	-	-	9	1	-
Akreditasi C	-	-	-	10	1	-
Belum Terakreditasi	-	-	-	15	-	-

Peluang Investasi Daerah
untuk Industri Keuangan Syariah

No.	Nama Proyek Investasi	Stakeholders	Sektor	Tahapan Proyek Investasi	Nilai Perkiraan Investasi (*dalam Rupiah*)
1	Proyek jalan tol: ▪ Binjai – Langsa ▪ Langsa – Lhokseumawe ▪ Lhokseumawe – Sigli ▪ Sigli – Banda Aceh	Pemerintah/ Perusahaan	Infrastruktur	Ruas Sigli – Banda Aceh sedang dalam tahap pembangunan oleh Hutama Karya	Total Investasi: ▪ 7.4 triliun ▪ 6.1 triliun ▪ 7.8 triliun ▪ 6.2 triliun
2	Potensi: PLTA di 15 Kabupaten/Kota di Aceh	Pemerintah/ Swasta	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Perencanaan	-
3	Potensi: Panas Bumi di 8 Kabupaten	Pemerintah/ Swasta	Panas Bumi (Geothermal)	▪ Jaboi Keuneukai (Pembangunan) ▪ Seulawah Agam (Pembangunan)	-
4	Peluang: Pabrik Pengolahan Minyak Goreng Nagan Raya	Swasta	Perkebunan (Komoditas Kelapa Sawit)	Perencanaan	Tersedia, difasilitasi oleh BKPM RI. Estimasi Investasi: ▪ Investasi: 115 miliar ▪ Modal Kerja: 222 miliar ▪ Estimasi Pendapatan: 245 miliar ▪ NPV: 201.5 juta ▪ IRR : 50.15% ▪ BCR: 2.761295268 ▪ BEP: 3 Tahun 9 Bulan
5	Peluang: Pembangunan Kopi Instan Aceh	Konsorsium KEK Arun Lhokseumawe/ Swasta	Perkebunan (Komoditas Kopi)	Perencanaan	Hitungan Estimasi Investasi oleh Bappeda Aceh Tengah: ▪ Pembangunan Pabrik & Modal Kerja ▪ US$ 3.3 juta ▪ Biaya operasional: US$ 2.9 juta ▪ NPV: US$ 1.8 juta ▪ IRR: 23% ▪ BC: 1.6 ▪ BEP: 6 Tahun

No.	Nama Proyek Investasi	Stakeholders	Sektor	Tahapan Proyek Investasi	Nilai Perkiraan Investasi (*dalam Rupiah*)
6	Peluang: ▪ Pembangunan Industri Pengolahan Kakao (Pasta, Mentega dan Bubuk Coklat ▪ Pembangunan Industri Kemasan	Konsorsium KEK Arun Lhokseumawe/ Swasta	Perkebunan (Komoditas Coklat)	Perencanaan	Hitungan estimasi Investasi: US$ 97 juta ▪ NVP: US$ 5.7 juta ▪ BC: 1.69 ▪ BEP: 6 Tahun 9 bulan
7	Peluang: Pembangunan Industri Pengolahan Minyak Nilam	Kepemilikan Lahan: Pemerintah/ Swasta	Perkebunan (Komoditas Nilam)	Perencanaan	Estimasi Investasi Hasil Perhintungan Bappeda Aceh Jaya ▪ Total Investasi: US$ 1.1 juta ▪ NPV: US$ 3.1 juta ▪ IRR: 64.22% ▪ BEP: 2 Tahun
8	Potensi: Pembangunan Pabrik Pengolahan Serai Wangi	Swasta	Perkebunan (Komoditas Serai Wangi)	Perencanaan	-
9	Peluang: Pengembangan Sapi di Aceh Besar	Pemerintah/ Swasta	Perternakan (Pengembangan Industri Sapi)	-	-
10	Pengembangan Sapi di Pidie	Milik Masyarakat dan Swasta	Perternakan (Pengembangan Industri Sapi	Perencanaan	Estimasi secara keseluruhan
11	Pengembangan Sapi di Nagan Raya	Milk Koperasi Aneuk Nanggroe dan Swasta	Perternakan (Pengembangan Industri Sapi	Perencanaan	Estimasi secara keseluruhan
12	Pengembangan Sapi di Aceh Tengah	Milik masyarakat dan milik pemerintah dan Swasta	Peternakan	Perencanaan	Estimasi secara keseluruhan
13	Pengembangan Sapi di Bener Meriah	Milik Pemerintah dan Swasta	Peternakan	Perencanaan	Estimasi secara keseluruhan
14	Potensi: Pengembangan Pelabuhan Perikanan Idi	Milik Pemerintah dan Swasta	Perikanan	Perencanaan	-
15	Potensi: Pengembangan Pelabuhan Perikanan Sawang Ba'U	Milik Pemerintah dan Swasta	Perikanan	Perencanaan	-
16	Pengembangan wisata laut : Pusat Diving dan Snorkelling Babang	Pemerintah dan Swasta	Pariwisata	Perencanaan	-
17	Pengembangan Potensi Wisata Gayo Lues	Perusahaan dan Swasta	Pariwisata	Perencanaan	-

No.	Nama Proyek Investasi	Stakeholders	Sektor	Tahapan Proyek Investasi	Nilai Perkiraan Investasi (*dalam Rupiah*)
18	Pengembangan Wisata Kota Banda Aceh	Pemerintah dan Swasta	Pariwisata	Perencanaan	-
19	Pengembangan Lapangan Golf Lhoknga, Aceh Besar	Pemerintah dan Swasta	Pariwisata	Perencanaan	-

Islamisasi Lembaga Keuangan: Qanun Aceh No 11 Tahun 2008 tentang Lembaga Keuangan Syariah

Dr. Hafas Furqani, M.Ec[1]
Dr. Ratna Mulyany, MSACC[2]

Latar Belakang

Provinsi Aceh menempuh terobosan baru dengan melakukan islamisasi seluruh lembaga keuangan. Ini dilakukan dengan ditetapkannya Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang "Lembaga Keuangan Syariah". Qanun ini sendiri lahir dari serangkaian cita-cita untuk memanifestasikan komitmen bersama masyarakat Aceh untuk pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan bermasyarakat. Langkah ini bermula pada era reformasi dengan penerbitan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memberikan kewenangan kepada Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam. Selanjutnya, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memperkukuh komitmen ini dan menyatakan bahwa Syari'at Islam menjadi landasan kehidupan masyarakat Aceh. Pada Pasal 126 disebutkan:

1. Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syari'at Islam
2. Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syari'at Islam.

Agar Syariat Islam terlaksana dengan baik dan teratur, pemerintah Aceh bertanggungjawab secara sistematis menyusun kebijakan pelaksanaan Syariat Islam. Pada UU No. 11 Tahun 2006 pasal 127 ayat (1) disebutkan tanggungjawab pemerintah Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota atas penyelenggaraan pelaksanaan syari'at Islam. Di samping itu, Ulama Aceh juga memainkan perannya. Dalam Qanun Aceh No 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) diseburkan bahwa untuk mendukung pelaksanaan Syariat Islam "Peran dan kedudukan para Ulama perlu dilembagakan dalam sebuah badan yang bersifat independen dan berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami".

Pelaksanaan Syaraiat Islam yang dimaksud adalah mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh. Ini tergambar dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang "Pokok-Pokok Syariat Islam" pada Pasal 2 disebutkan bahwa ruang lingkup Syariat Islam mencakup semua aspek kehidupan masyarakat dan aparatur di Aceh yang pelaksanaannya meliputi aqidah, Syariah dan Akhlak. Selanjutnya, disebutkan juga bahwa pelaksanaan Syariat Islam bidang Syariah meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata),

---

[1] Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN Ar-Raniry
[2] Asisten Professor, FEB, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

jinayat (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan) dan pembelaan Islam. Penerapan Syariat Islam di Aceh adalah bermaksud melindungi agama, jiwa, harta, akal, kehormatan, harkat, nasab, masyarakat dan lingkungan hidup (pasal 3).

Arah penerapan Syariat Islam dalam bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat Aceh mulai secara sistematis disusun sejak tahun 2015 di mana Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh melakukan kajian tentang Lembaga Keuangan Syariat di Aceh, sehingga dapat Menghasilkan Naskah Akademik yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Selanjutnya, diskusi intensif dan terbuka dalam bentuk FGD dan diskusi publik dilakukan untuk penyempurnaan draft rancangan Qanun LKS. Pada tahun 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) membentuk pansus pembahasan Rancangan Qanun LKS bersama dengan lembaga terkait seperti Dinas Syariat Islam, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Praktisi Perbankan dan Akademisi dari FEBI UIN Ar-Raniry. Hasil pembahasan yang panjang dan komprehensif akhirnya melahirkan penerbitan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah pada rapat paripurna DPRA dan diundangkan pada tanggal 4 Januari 2019 dalam Lembaran Daerah Aceh.

Ruang Lingkup

Prinsip dari Qanun LKS mengamanatkan bahwa sejalan dengan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di provinsi Aceh maka Pemerintah Aceh perlu mengatur transaksi keuangan masyarakat Aceh yang sesuai Syariat Islam. Aturan ini meliputi lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh dan juga cara bertansaksi dalam aktivitas lembaga keuangan.Qanun LKS berlaku untuk wilayah Aceh yang mencakup individu atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh dan juga LKS yang menjalankan usaha di Aceh atau berkantor pusat di Aceh. Pada Pasal 6 disebutkan bahwa Qanun LKS berlaku untuk:

- Setiap orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh
- Setiap orang yang beragama bukan Islam yang melakukan transaksi keuangan di Aceh
- Setiap orang beragama bukan Islam, badan usaha atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota
- LKS yang menjalankan usaha di Aceh
- LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh

Isi Qanun LKS

Qanun LKS memuat 12 Bab dan 67 Pasal Qanun yang berisi aturan terkait pelaksanaan jasa lembaga keuangan Syariah di Provinsi Aceh yang harus dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Syariah. Prinsip Syari'ah adalah prinsip hukum dan etika keislaman dalam kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah. Secara umum, Qanun LKS mengatur empat dimensi penting dalam praktik keuangan Syariah di Aceh yaitu:

1. Lembaga keuangan Syariah (LKS) yang merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan Syariah non perbankan dan sektor keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip Syariah yang mencakup pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, pegadaian, koperasi, lembaga pembiayaan, anjak piutang, lembaga keuangan mikro, atau lembaga jasa keuangan lainnya yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.
2. Pihak-pihak yang terkait yang melakukan aktivitas transaksi atau menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan Syariah di Aceh seperti individu, badan usaha, lembaga, dan juga para *stakeholder* terkait seperti Pemerintah Aceh, Baitul Mal Aceh.
3. Kegiatan usaha LKS dan ativitas transaksi keuangan Syariah seperti simpanan, pinjaman, pembiayaan dan investasi yang harus sesuai dengan ketentuan akad Syariah.

Beberapa terobosan penting yang ingin diwujudkan dalam Qanun LKS adalah sebagai berikut:

- Kewajiban lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip Syariah (Pasal 2)
- Kegiatan usaha LKS yang meliputi transaksi jasa keuangan (penyaluran, pembiayaan, pengelolaan dan investasi) berdasarkan prinsip Syariah (Pasal 38).
- Pembentukan Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (Pasal 42).
- Pembentukan Dewan Syariah Aceh (DSA) dan Dewan Syariah Kebupaten untuk kepentingan pengaturan, koordinasi dan pengawasan Syariah di tingkat Aceh (Pasal 46-48).
- Peran LKS dalam pengembangan usaha sector riil masyarakat (Pasal 38 ayat (6)).
- Kewajiban Bank Syariah mencapai rasio pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah minimal 30% pada tahun 2020 dan 40% pada tahun 2022 (Pasal 14 ayat (3) dan (4)).
- Kewajiban LKS melakukan pembinaan pada UKM (Pasal 60 ayat 4).

- Pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah mengutamakan akad berbasis bagi hasil dan jumlahnya paling sedikit 10% pada tahun 2020, 20% pada tahun 2022 dan 40% pada tahun 2024 (Pasal 14 ayat 7).
- Kewajiban LKS melakukan kegiatan keuangan sosial (Pasal 38 ayat (2)).
- Peran LKS dalam pengumpulan harta agama berupa wakaf, hibah, zakat, infaq dan sadaqah dalam bentuk tunai (Pasal 38 ayat (7)).
- Kerjasama Bank Syariah dengan Baitul Mal dalam penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan wakaf dan termasuk juga pembiayaan murah kepada usaha mikro (Pasal 15 dan 16).
- Peran LKS dalam edukasi dan literasi keuangan Syariah (Pasal 17)
- Peran Pemerintah Aceh dalam menfasilitasi, membentuk dan memberikan insentif kepada bank Syariah yang berkinerja baik (Pasal 19 dan 20).
- Ikatan bagi setiap orang beragama Islam dan bertempat tinggal di Aceh untuk melakukan transaksi perasuransian di Aceh dalam aktivitas asuransi Syariah (Pasal 22).
- Aturan terkait pasar modal Syariah yang meliputi instrumen, saham, reksadana dan sukuk (Pasal 23)
- Pemerintah Aceh dapat mengeluarkan obligasi Syariah atau sukuk daerah (Pasal 23 ayat (7).
- Pengelolaan dana pensiun berdasarkan prinsip Syariah (Pasal 24)
- Aktivitas modal ventura berdasarkan prinsip Syariah (Pasal 25)
- Aturan terkait pegadaian Syariah, produk dan prinsip pegadaian Syariah (Pasal 26-27)
- Koperasi pembiayaan harus memenuhi prinsip Syariah (Pasal 28)
- Lembaga / perusahaan pembiayaan Syariah wajib melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah (Pasal 29).
- Aturan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Pasal 34).
- Aturan teknologi financial Syariah yang harus memperhatikan prinsip-prinsip Syariah (Pasal 35).
- Aturan lembaga keuangan Non-Bank Syariah lainnya yang harus memenuhi prinsip Syariah dalam operasionalnya (Pasal 37).
- Seluruh Transaksi Keuangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota wajib melalui LKS (Pasal 50).
- Menginfentarisasikan Lembaga Keuangan Non formal oleh Pemerintah (Pasal 53).

Manfaat dan Dampak

Implementasi Qanun LKS akan memberikan dampak positif dalam dua bentuk, yaitu pertama terlaksananya implementasi Syariat Islam secara lebih meluas dalam kehidupan masyarakat Aceh yang merambah dimensi ekonomi dan keuangan. Kedua, perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah akan lebih besar dan semarak di Indonesia secara umum. Dalam simulasi perhitungan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, proporsi aset perbankan Syariah di Indonesia akan bertambah sekitar Rp 25.76 Triliun sebagai akibat limpahan konversi lembaga keuangan Syariah di Aceh sehingga menaikkan pangsa pasar perbankan Syariah nasional menjadi 6.10 persen. Dengan kata lain, total aset perbankan Syariah meningkat menjadi Rp 505.6 triliun dan total aset perbankan konvensional turun menjadi Rp 7,786.8 triliun.

Wawancara
Kepala Instansi Daerah

Bagaimana visi, rencana, dan program-program terkait ekonomi syariah?

Kepala Bappeda Provinsi Aceh

Visi Pemerintah Aceh RPJMA 2017-2022
"Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani".

Misi: Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain.

Peraturan Daerah:
- Qanun Aceh No.8 Tahun 2014 Tentang Pokok Pokok Syariat Islam
- Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah
- Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah

Tujuan:
1. Menguatnya tatanan Ekonomi Syari'ah
   Program:
   - Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama (Jumlah Sertifikat Produk Halal yang Diterbitkan)
   - Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan (Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Lembaga Sosial Keagamaan)
   - Program Pengelolaan ZISWAF (Persentase Peningkatan Pemahaman ZISWAF)
   - Program Pembinaan Syariat Islam (Persentase Pembayar ZIS)

2. Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami
   Program:
   - Pengembangan Nilai Budaya (Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Menghargai Nilai Budaya)
   - Program Pegelaran Seni Budaya Daerah (Jumlah keikutsertaan dalam Festival Seni dan Budaya (Festival/Tahun)
   - Program Pengelolaan Keragaman Budaya (Meningkatkan Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan dan Keragaman Budaya)

Misi 8: Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, perdagangan, industri dan industri kreatif yang kompetitif.

Peraturan Daerah
- Qanun Prov. NAD No. 11 tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam
- Qanun Aceh No.8 Tahun 2014 Tentang Pokok Pokok Syariat Islam
- Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan

Tujuan:
1. Meningkatnya pembangunan industri
   Program:
   - Program pengembangan industri kreatif dan aneka (Meningkatnya kontribusi sub sektor industri kreatif dan aneka)

- Program perwilayahan industri (Meningkatnya jumlah kawasan industri dan sentra industri) Kawasan Industri (KI), Sentra Industri Kecil, Menengah (SIKIM)
- Program pengembangan sentra-sentra industri potensial (Meningkatnya kontribusi sektor industri)

2. Meningkatnya kontribusi pariwisata
   Program
   - Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Jumlah kunjungan wisatawan wusantara dan wancanegara)

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh

Visi Gubernur Aceh yaitu: "Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil dan Melayani".

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada misi ke sebelas dan ke duabelas, yaitu:
"Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif".

Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh terkait pengembangan ekonomi syariah, industri halal dan sektor keuangan syariah di Aceh:

1. Mengembangkan standarisasi dan inovasi produk industri halal dan keuangan syariah
2. Membentuk lembaga-lembaga pendukung ekonomi syariah
3. Menyusun program pelatihan dengan memanfaatkan perkembangan IT
4. Mensinergikan program pengurus pusat maupun pengurus wilayah dengan lembaga pemerintah pemangku ekonomi Syariah
5. Meningkatkan daya saing produk dan jasa dengan fokus makanan halal. Dalam hal ini, Disperindag Aceh membuka dan memfasilitasi konsultasi dan sosialisasi sertifikasi halal, hingga fasilitasi pendaftaran sertifikasi halal.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh

Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh adalah "Menjadikan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sehat, kuat dan berdaya saing menuju masyarakat makmur serta sejahtera pada tahun 2022" melalui rencana dan program-program kegiatan yang mendukung terwujudnya visi tersebut. Adapun kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Aceh terkait pengembagan sektor Ekonomi Syariah, Industri Halal dan sektor keuangan Syariah adalah pengesahan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang mengatur sendi-sendi pelaksanaan dan pengelolaan perekonomian sesuai prinsip syariah Islam di sektor keuangan termasuk dalam hal pengembangan Koperasi. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh bekerjasama dengan MUI Pusat telah melakukan Bimbingan Teknis dan Sertifkasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Syariah (USPPS), mulai tahun 2018 (Tahap I) menghasilkan sejumlah 28 orang DPS dan tahun 2019 (Tahap II) sejumlah 60 orang DPS. Dilanjutkan dengan bantuan fasilitasi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Konvensional ke Syariah melalui Notaris.
Selain itu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh juga gencar melakukan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis sistem keuangan syariah kepada pengurus/pengelola koperasi pada tahun anggaran 2019 kepada 150 pengurus/pengelola koperasi di 3 (tiga) wilayah yaitu Banda Aceh, Aceh Barat Daya dan Bireuen sebagai bentuk implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh memiliki 5 strategi untuk mendorong pertumbuhan industri halal di Aceh yaitu:

- *Competitivenes* (daya saing), Peningkatan daya saing dilakukan melalui pendataan sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan seperti makanan dan minuman, fashion, wisata dan ekonomi digital;
- *Certification* (sertifikasi), Sertifikasi produk diberikan untuk mempeluas akses pasar dengan mendorong koperasi dan pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi;
- *Coordination* (koordinasi), Koordinasi juga dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh agar terjadinya sinergi program dan kebijakan antar stakeholder terkait untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai sumbver pertumbuhan ekonomi baru;

- *Campaign* (publikasi/promosi), Promosi diperlukan untuk memperkenalkan kepada publik tentang gaya hidup halal yang bersifat universal , tidak hanya untuk Muslim , namun juga untuk non Muslim, dan;
- *Corporation* (kerjasama). Kerjasama antara pemangku kepentingan industri halal nasional dan internasional untuk membangun Aceh sebagai pusat industri halal global.

Salah satu strategi untuk mencapai visi Aceh sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka di Indonesia ialah dengan memperkuat rantai nilai halal (halal value chain). Di dalamnya terdapat sejumlah industri yang berkaitan dengan kebutuhan produk dan jasa halal, seperti makanan dan minuman alias kuliner, pariwisata, serta fesyen busana sopan/syar'I.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh

Visi: "Terwujudnya Aceh Sebagai Daerah Investasi Utama Melalui Pelayanan Terpadu yang Prima"

Misi:
1. Meningkatkan percepatan reformasi birokrasi bidang penanaman modal,
2. Membentuk citra Aceh sebagai daerah tujuan utama investasi,
3. Melaksanakan integrasi perencanaan dan pengendalian penanaman modal dengan pemerintah, pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, swasta, perbankan, akademisi dan masyarakat,
4. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pemerintah Aceh telah diberikan kewenangan untuk menjalankan Syariat Islam, suatu sistem yang telah diidam-idamkan oleh seluruh masyarakat Aceh sejak lama, melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Segala warga masyarakat Aceh yang beragama Islam, wajib menjalankan syariat Islam secar paripurna. Sebagaimana yang telah diketahui, syariat Islam merupakan satu-satunya solusi untuk mencapai standar tatanan organisasi kemasyarakatan yang ideal. Hal ini dikarenakan adanya dua aspek evaluasi yang menjadi dasar ideologis dalam pelaksanaan segenap ketentuan syariat Islam, yaitu aspek duniawi dan aspek akhirat. Oleh karena itu, dengan komitmen mematuhi serta menghormati pelaksanaan syariat islam, diharapkan seluruh aspek khususnya bidang perekonomian dapat bertumbuh kembang secara ideal dan sesuai harapan teoretis.

Berbicara mengenai bidang perekonomian/investasi, melalui Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal, telah diatur dasar-dasar melakukan kegiatan penanaman modal/berusaha di Aceh. Sebagaimana disebutkan pada pasal 8, bahwa Pemerintah Aceh mendukung penuh atas keberlangsungan ekonomi syariah yang ditandai dengan adanya perhatian khusus bagi seluruh kegiatan berusaha untuk melakukan kerjasama dengan lembaga ekonomi syariah. Hal ini bermakna perhatian Pemerintah Aceh agar keberlangsungan perekonomian syariah di Aceh adalah sangat besar. Selanjutnya, pada sektor keuangan syariah saat ini, Provinsi Aceh juga telah memiliki Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dalam upaya mewujudkan pelaksanaan syariat islam secara kaffah dan memperkuat implementasi pembangunan ekonomi syariah di Aceh. DPMPTSP beberapa waktu lalu juga sudah bekerjasama dengan Bank Mandiri Syariah dalam memberikan informasi dan pemahaman kepada karyawan terkait dengan produk perbankan syariah. Dapat kami informasikan juga seluruh karyawan DPMPTSP memiliki rekening pada Bank Aceh Syariah

Pada sektor industri halal, Provinsi Aceh juga sudah memiliki regulasi dengan terbitnya Qanun nomor 8 tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal dimana pemerintah Aceh berkewajiban melindungi masyarakat dari mengkonsumsi makanan, minuman, dan obat-obatan serta menggunakan kosmetik, produk kimia biologi agar terjamin kehalalannya. Dalam sektor pariwisata, Pemerintah Aceh juga sudah memiliki branding Aceh Halal Tourism serta aktif dalam upaya mempromosikannya. Dengan brand image ini, diharapkan akan menarik minat investasi dan kerjasama wisatawan Muslim dan calon investor ke Aceh dalam bidang investasi dan pengembangan proyek di sektor pariwisata, properti, perdagangan bahkan infrastruktur.

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam program peningkatan promosi, kerjasama investasi dan pengembangan potensi ungguan daerah ada beberapa kegiatan yaitu
- *Aceh Trade, Tourism and Investment Forum*
- Pertemuan kerjasama negara Asean dan fasilitasi dunia usaha pada IMT-GT

- Marketing investasi
- Bisnis forum investasi
- Marketing Investment Indonesia (MII) dan IMT-GT untuk peningkatan kerjasama dan peningkatan promosi investasi.

DPMPTSP juga memiliki program pemberdayaan usaha kemitraan UMKM dengan perusahaan PMA/PMDN, BUMN, BUMD. Proses pelayanan perizinan dilaksanakan secara *online system*, sehingga memberikan proses waktu lebih singkat, nyaman, murah, efektif dan efisien.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh

Pembenahan dan persiapan Aceh sebagai destinasi wisata yang ramah untuk dikunjungi tetap ditingkatkan. Kemenangan Aceh sebagai Destinasi Halal Budaya terbaik tingkat dunia dan Bandara Sultan Iskandar Muda sebagai Bandara Ramah Wisatawan Muslim terbaik tingkat dunia serta Aceh sebagai destinasi wisata ramah Muslim telah menambah jumlah kunjungan wisatawan Muslim ke Aceh. Pelaku pariwisata baik jajaran pemerintah maupun masyarakat diharapkan terus memberikan kontribusi positif dalam upaya memajukan sektor pariwisata di Aceh.

Beberapa program yang telah dilakukan selama ini yaitu:

- Melakukan pelatihan-pelatihan (*capacity building*) SDM pariwisata
- Kerjasama dengan lembaga terkait (Pemerintah, BUMN/BUMD, Lembaga Pendidikan dan Industri Pariwisata)
- Memperbanyak paket-paket produk pariwisata ramah Muslim
- Menyediakan kemudahan fasilitas islami bagi wisatawan
- Uji kompetensi pelaku bagi usaha pariwisata

Dengan program tersebut telah membawa Aceh meraih kemenangan tingkat Nasional di peringkat kedua sebagai Destinasi Wisata ramah Muslim Unggulan Indonesia 2019 melalui Standar Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019 yang mengacu pada Global Muslim Travel Index (GMTI). Hal tersebut akan semakin mempertegas Visi Pemerintah Aceh dalam "Mewujudkan Aceh sebagai Destinasi Wisata ramah Muslim Unggulan Dunia".

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh

Visi & Misi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Aceh

Program Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Aceh memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) berlandaskan prinsip dan nilai-nilai syariah Islam. Cara untuk mencapai tujuan itu disesuaikan dengan sasaran/target yang telah ditentukan sebagaimana yang telah ditulis sebelumnya, diantaranya Peningkatan Aset Usaha Syariah, Peningkatan Pembiayaan Keuangan Syariah, Tingkat Kedalaman Pasar Keuangan, Tingkat Literasi & Akses Keuangan Syariah, serta *International Standing*.

Visi pengembangan ekonomi syariah di Aceh diupayakan sejalan dengan visi Gubernur Provinsi Aceh yang ingin mewujudkan Aceh yang damai dan sejahtera. Misi pengembangan ekonomi syariah juga dinilai sejalan dengan salah satu misi Gubernur Provinsi Aceh, yaitu "Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman". Islam sebagai agama yang paripurna, tentu memiliki panduan yang lengkap di berbagai aspek kehidupan, termasuk perekonomian. Aceh sebagai salah satu barometer nasional penerapan syariat Islam perlu untuk terus berproses menciptakan kesejahteraan melalui perekonomian berbasis syariah Islam.

Dengan mempertimbangkan pandangan masyarakat Aceh yang kuat terhadap agama, sekaligus adanya misi Gubernur Provinsi Aceh untuk memperkuat pelaksanaan syariat Islam, maka visi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Aceh diusulkan sebagai berikut: "Mewujudkan Aceh sejahtera melalui penerapan nilai dan prinsip syariah Islam dalam setiap aspek dan sendi sendi perekonomian".

Berdasarkan visi dimaksud, misi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah diusulkan: "Menyatukan keterkaitan pengembangan sektor keuangan dan sektor riil perekonomian berbasis syariah Islam", melalui beberapa cara sebagai berikut:

1. Meningkatkan wawasan masyarakat Aceh untuk menerapkan nilai-nilai syariah dalam praktek dan transaksi ekonomi melalui edukasi yang terstruktur dan masif, serta peningkatan peran lembaga pendidikan Islam dan masjid.
2. Menyusun rekomendasi kebijakan strategis yang bersifat *top down* untuk mengakselerasi perkembangan ekonomi-keuangan syariah di Aceh.
3. Mendorong terciptanya wirausaha dan semangat kewirausahaan, dan secara bersamaan mengupayakan adanya kerjasama/linkage antara lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha, baik di pelaku berskala mikro, kecil, menengah, maupun besar.
4. Memperkuat *networking* dan kerjasama bisnis antar pelaku usaha dan investor, baik di dalam wilayah Aceh, di tingkat nasional-internasional, berdasarkan prinsip bisnis syariah.
5. Meningkatkan kualitas manajemen Lembaga Keuangan Syariah dan inovasi-implementasi akad/produk keuangan syariah.
6. Mengoptimalkan pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana *Islamic Social Finance* (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf).

Penjelasan Misi Program Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Aceh

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kami merekomendasikan 6 (enam) misi untuk mendukung visi Program Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Provinsi Aceh. Keenam misi dimaksud merupakan interpretasi dari berbagai peran *stakeholder,* baik di sektor ekonomi riil maupun di sektor keuangan syariah. Berikut penjelasan singkat dari keenam misi program dimaksud.

Penjabaran Misi Pertama

"*Meningkatkan wawasan masyarakat Aceh untuk menerapkan nilai-nilai syariah dalam praktek dan transaksi ekonomi melalui edukasi yang terstruktur dan masif, serta peningkatan peran lembaga pendidikan Islam dan masjid*."

Tujuan dari misi pertama adalah membangun konstruksi berpikir masyarakat Aceh bahwa persoalan muamalah tidak terlepas dari panduan syariah Islam. Pengetahuan yang terbatas terhadap nilai-nilai syariah dalam perekonomian berpotensi memunculkan resistensi, bahkan menganggap nilai yang ada dalam ekonomi syariah sama saja dengan konvensional. Fenomena dimana masyarakat Muslim tidak memahami panduan syariah dalam perekonomian telah banyak ditemui, dan menimbulkan kemacetan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di banyak tempat.

Dari sisi penawaran, pemahaman terhadap nilai-nilai syariah juga akan mendorong terciptanya sumber perekonomian baru yang dapat diwujudkan dalam berbagai bisnis halal: *halal fashion, halal tourism, halal food, halal pharmaceutical, halal logistic & distribution,* hingga bertumbuhnya jurusan-jurusan berbasis syariah di tingkat Perguruan Tinggi (ilmu ekonomi syariah, akuntansi syariah, manajemen syariah, dst). Dari sisi permintaan, pemahaman masyarakat terhadap nilai syariah dalam perekonomian akan menstimulasi adanya *demand* terhadap berbagai produk dan jasa halal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat (Knowledge/K) terhadap nilai-nilai Islam dalam muamalah akan berbanding lurus dengan berkembangnya bisnis berbasis syariah (Ysy), baik dari sisi penawaran (S) maupun permintaan (D).

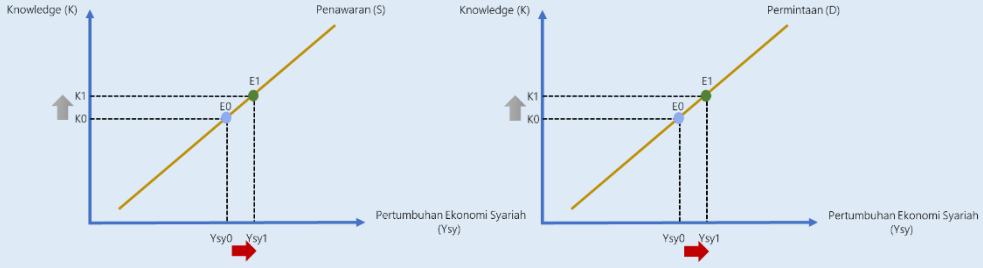

Sebaliknya, apabila di tengah masyarakat tidak tercipta pemahaman yang baik tentang nilai-nilai syariah dalam perekonomian, maka selamanya ekonomi dan keuangan syariah hanya akan tumbuh dalam nuansa kapitalisme/perekonomian konvensional, yang diantara keduanya saling mematikan.

Dari sisi pendidikan berbasis madrasah, Aceh memiliki sekitar 998 lembaga, 96.433 murid dan 4.304 rombel[3], yang diantaranya terdiri dari 355 madrasah Aliyah, 408 madrasah tsanawiyah, dan 594 madrasah ibtidaiyah, serta keberadaan sekitar 1.573 masjid dan ribuan santri-alumni santri. Dengan keberadaan lembaga pendidikan Islam yang sedemikian banyak, maka memasukkan kurikulum mengenai ekonomi syariah di tingkat sekolah menengah pertama dan/atau sekolah menengah atas merupakan salah satu cara efektif untuk mengenalkan nilai Islam dalam perekonomian sejak dini. Dengan demikian, diharapkan dalam jangka panjang, generasi muda Aceh dapat dengan jelas melihat keterkaitan antara keimanan dan keislamannya dalam satu *frame* yang utuh (tidak terpisah).

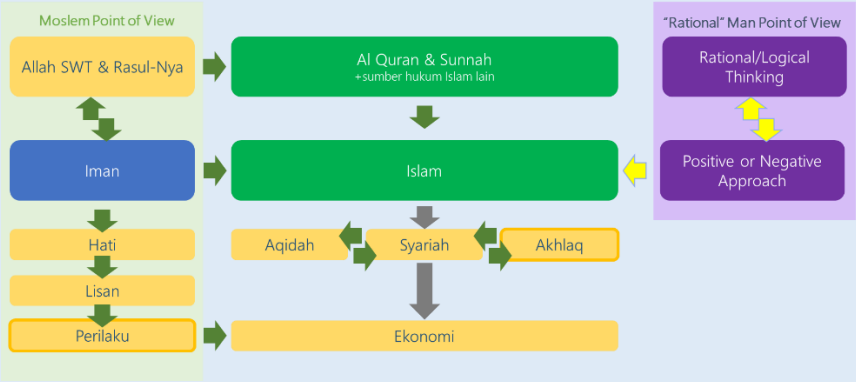

Muslim Menjadikan Iman sebagai Titik Awal Memahami Islam dan Syariahnya

Penjabaran Misi Kedua

"Menyusun rekomendasi kebijakan strategis yang bersifat top down untuk mengakselerasi perkembangan ekonomi-keuangan syariah di Aceh"

Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Aceh sangat berpotensi diakselerasi lebih cepat dibanding provinsi lainnya. Hal ini didukung oleh kuatnya religiusitas masyarakat dan Pemerintah Aceh untuk menerapkan syariah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nilai dan implementasi syariah Islam perlu menjadi nafas dari visi dan misi setiap pimpinan di Aceh, baik di tingkat Gubernur, hingga bahkan Kepala Desa (Geuchik). Tanpa adanya internalisasi nilai syariah dalam uraian visi dan misi para pimpinan daerah, maka prinsip syariah Islam di bidang muamalah rentan untuk terbengkalai oleh karena berbagai hal, mulai dari masih belum kuatnya pemahaman mengenai ilmu dan praktek ekonomi syariah di tingkat makro-mikro ekonomi, hingga adanya skeptisisme terhadap penerapan syariah dalam perekonomian.

Konversi BPD Aceh menjadi BPD Aceh Syariah merupakan salah satu bukti yang menunjukkan keberpihakan Pemerintah Provinsi Aceh yang mampu mengakselerasi pertumbuhan *market share* perbankan syariah di tingkat provinsi hingga nasional. Proses konversi ini secara tidak langsung menambah perhitungan aset, DPK dan pembiayaan perbankan syariah, dan mengurangi variabel-variabel yang sama pada perbankan konvesional. Saat ini Pemerintah Provinsi Aceh sedang menyusun *qanun* tentang Lembaga Keuangan Syariah, sebagai salah satu produk keberpihakan lainnya kepada pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Namun demikian, masih banyak potensi yang perlu memperoleh perhatian dan dukungan kebijakan Pemerintah, mulai dari kebijakan pengembangan destinasi wisata ramah Muslim, kebijakan kawasan ekonomi khusus yang bernafaskan syariah, kebijakan untuk menggerakkan potensi ZISWAF, dan berbagai potensi kebijakan lain yang akan kami uraikan dalam sub-bab berikutnya mengenai inovasi rekomendasi kebijakan pengembangan ekonomi syariah di Aceh.

Penjabaran Misi Ketiga

"*Mendorong terciptanya wirausaha dan semangat kewirausahaan, dan secara bersamaan mengupayakan adanya kerjasama/linkage antara lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha, baik di pelaku berskala mikro, kecil, menengah, maupun besar.*"

[3]https://aceh.kemenag.go.id/file/file/Data%20Pendidikan%20Madrasah%202017/jumlah_lembaga_madrasah,_murid_dan_rombel.htm

Telah manjadi sebuah pengertian secara umum bahwa untuk mendorong potensi sumber daya alam dan manusia, serta untuk menyalakan mesin-mesin produksi diperlukan satu faktor penting, yaitu kewirausahaan atau *entrepreneurship.* Bahkan sebagian kalangan mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan salah satu syarat yang menentukan apakah sebuah negara berkembang dapat berevolusi menjadi negara maju. Menurut Bank Dunia, syarat suatu negara yang memiliki perekonomian yang baik dan maju minimal memiliki 4% wirausaha[i]. Saat ini, Indonesia diperkirakan telah memiliki sekitar 3.3% pengusaha, sementara Malaysia 5%, dan Singapura 7%.

Saat ini, telah banyak cerita menunjukkan bahwa wirausaha tidak lahir dari faktor keturunan atau talenta, tetapi melalui penumbuhan pendidikan mengenai kewirausahaan itu sendiri. Selain pendidikan, kewirausahaan memerlukan inovasi, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Dalam konteks pengembangan ekonomi syariah, karakter seorang wirausaha yang terbentuk haruslah sesuai dengan nilai dan prinsip syariah Islam. Untuk membentuk karakter wirausaha Muslim diperlukan proses yang tidak sebentar. Diperlukan sinergi dengan kalangan pendidik (di tingkat SMA dan Perguruan Tinggi), korporasi/perusahaan, dan juga Pemerintah/stakeholder lainnya untuk mendukung adanya *event,* membentuk dan memperkuat komunitas wirausaha Muslim, perlombaan, *award,* dan skema-skema pembiayaan untuk pengusaha pemula (*start up*).

Di sisi lain, keberadaan lembaga keuangan syariah sebagai faktor penting untuk mendorong perekonomian, termasuk mendukung lahirnya wirausaha baru tidak dapat dipungkiri. Dalam konteks makro, perkembangan perbankan syariah secara langsung/tidak langsung telah mendorong tumbuhnya perkembangan bisnis berbasis syariah di berbagai sektor perekonomian. Untuk menciptakan iklim perekonomian syariah yang mendukung lahirnya wirausaha baru, maka fungsi intermediasi perbankan syariah perlu untuk dioptimalkan disalurkan kepada masyarakat Aceh, dan secara paralel, wirausaha yang baru tersebut diperkuat dengan skema kerjasama dengan para pelaku usaha yang lain (misal untuk mendukung distribusi, pemasaran, produksi, dsb.), dan didukung dengan skema anggaran lain bekerjasama dengan pihak swasta (mekanisme *angel investment*, dll).
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa misi ketiga ini merupakan salah satu upaya yang tersistem untuk menciptakan sumber ekonomi baru melalui lahirnya wirausaha baru yang menjalankan bisnisnya sesuai dengan syariah Islam.

Penjabaran Misi Keempat
"*Memperkuat networking dan kerjasama bisnis antar pelaku usaha dan investor, baik di dalam wilayah Aceh, di tingkat nasional-internasional, berdasarkan prinsip bisnis syariah.*

Ruang lingkup ekonomi syariah tidak terbatas hanya pada lembaga keuangan, baik yang bersifat sosial maupun komersial. Ekonomi syariah memiliki ruang lingkup yang sama luasnya dengan pemahaman kita terhadap perekonomian yang selama ini kita pahami. Dengan demikian, dalam konteks investasi, maka diharapkan berbagai rencana investasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah, baik yang bersifat domestic maupun asing, dapat dikawal agar sesuai dengan *guidance* syariah Islam.

Dalam 5 tahun terakhir, jumlah investasi di Aceh mencapai Rp 21 Triliun. Dari angka tersebut, 75% merupakan investasi domestik, dan 25% asing/internasional. Negara dengan investasi terbesar di Aceh adalah Tiongkok, lalu disusul oleh Malaysia di posisi kedua. Gubernur Provinsi Aceh menyampaikan bahwa setidaknya ada empat sektor prioritas investasi di Aceh, yaitu agroindustry, infrastuktur dan energi, pengembangan pariwisata dan kawasan[4].

Melihat potensi ini, sudah selayaknya provinsi Aceh memiliki konsep pembiayaan dan instrumen investasi berbasis syariah, dan mengundang ketertarikan investor potensial lainnya (baik dalam maupun luar negeri), yang didukung dengan implementasi nilai-nilai syariah dalam setiap sektor ekonomi yang menjadi target investasi.

[4] http://kek.go.id/berita/2017/11/KEK-Arun-Lhokseumawe-Dorong-Ekonomi-Aceh-169

Penjabaran Misi Kelima

"Meningkatkan kualitas manajemen Lembaga Keuangan Syariah dan inovasi-implementasi akad/produk keuangan syariah"

Lembaga keuangan syariah memiliki peran sentral dalam mendukung perekonomian berbasis syariah. Namun selama ini ada kendala yang ditemui oleh masyarakat, baik berupa kekecewaan yang bersifat non-teknis (seperti pandangan mengenai belum sesuainya implementasi akad perbankan sesuai dengan panduan fiqih), hingga yang bersifat teknis (seperti kecepatan pelayanan, kompetensi pegawai dalam menjelaskan akad-akad syariah, belum baiknya edukasi untuk membangun pemahaman nasabah, belum banyaknya alternatif akad syariah untuk mendukung sektor pertanian, dsb.).

Kendala-kendala yang muncul menciptakan stigma yang menghambat perkembangan perbankan syariah, terutama perkembangan yang bersifat *bottom up.* Dengan demikian, diperlukan evaluasi berkala terhadap kualitas pengelolaan layanan jasa keuangan syariah, termasuk memberikan ruang untuk berinovasi dengan tetap memperhatikan aspek fiqih dan *maqashid syariah.*

Penjabaran Misi Keenam

"*Mengoptimalkan pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana Islamic Social Finance (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf)*"

Kinerja pengumpulan dan penyaluran dana sosial Islam perlu untuk menjadi bahan evaluasi rutin oleh para *stakeholder.* Tidak hanya bagi para pengelolanya (Baitul Mal atau lembaga amil zakat), tetapi juga bagi instansi Pemerintah yang bertanggungjawab untuk mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan iklim ekonomi yang inklusif.

Keberhasilan dalam mengoptimalkan dana ZISWAF dalam konteks pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bukti bahwa ekonomi syariah lebih komprehensif bila dibandingkan sistem ekonomi yang lain. Islam memberikan ruang yang seimbang bagi *altruism,* sekaligus dengan memperhatikan kepentingan pribadi (*egoism*) sebagai hasil atas usaha masing-masing individu. Sistem ekonomi syariah berbeda dengan sistem ekonomi yang lain, baik kapitalisme atau pun sosialisme, yang terkesan terlalu ekstrim dalam memisahkan kepedulian-kedermawanan, moralitas ekonomi, dan pengaturan hak-hak kepemilikan individu.

Dari sudut pandang ekonomi, penyaluran ZISWAF merupakan upaya untuk merekayasa *demand* yang dapat diatur pengaruhnya (dalam jangka panjang atau dalam jangka pendek) melalui pemberian bantuan yang bersifat langsung dan produktif, sesuai dengan prioritas/kategori 8 asnaf/golongan yang telah diatur dalam Al Quran.

Kepala OJK Banda Aceh

Program-program yang dilaksanakan oleh OJK Provinsi Aceh untuk mengembangkan sektor ekonomi dan keuangan syariah di Aceh antara lain:

- Mengawal implementasi kebijakan Kantor Pusat OJK terkait ekonomi dan keuangan syariah.
- Menjadi tim penyusun Qanun terkait ekonomi dan keuangan syariah.
- Memberikan sosialisasi Qanun terkait ekonomi dan keuangan syariah.
- Menjadi narasumber di berbagai acara dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
- Memfasilitasi temu bisnis (*business matching*) antara pelaku usaha dengan Industri Jasa Keuangan (IJK) syariah.

Kedepannya, untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Aceh, OJK Provinsi Aceh akan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan berbagai instansi untuk mendukung penerapan Qanun yang digagas oleh Pemerintah Daerah serta melakukan sosialisasi terkait syariah dan pengembangan ekonomi ke berbagai lapisan masyarakat antara lain melalui program Edukasi Perlindungan Konsumen dan program Tim Perepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Bagaimana peluang pengembangan sektor ekonomi Syariah, industri halal, dan sektor keuangan syariah?

Kepala Bappeda Provinsi Aceh

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan
- Membuka pangsa pasar wisata negara-negara islam melalui produk-produk halal
- Mempermudah pinjaman dan menjamin praktek-praktek riba dengan keuntungan bersama (HabluminAllah dan Hablumminannas)
- Keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Al Quran dan Hadist), implementasi prinsip syariah yang menjadi pembeda utama dengan sektor konvensional

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh

- Didukung oleh regulasi khusus yang mengatur tentang ekonomi syariah yaitu Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.
- Didukung oleh kesadaran masyarakat Aceh yang mayoritas Muslim.
- Semua masyarakat Aceh mengkonsumsi/menggunakan barang dan jasa halal.
- Aceh merupakan bagian dari daerah pengeluaran barang/makanan halal (Muslim *food expenditure*).
- Bonus demografi pada 2025-2035, yang berpotensi menghasilkan masyarakat kelas menengah. Peningkatan kelompok ini didominasi oleh umat Muslim yang kreatif yang menjadikan bisnis dan keuangan syariah juga lebih beragam
- Dalam rangka pengeluaran produk halal, Kanwil Kemenag dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh secara tegas mendukung terlaksananya jaminan produk halal sesuai dengan amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Hal ini tentu menjadi peluang untuk membangkitkan semangat para pelaku industri untuk menyentuh sektor *halal food*.
- Fokus pengembangan ekonomi syariah di Aceh dapat dikembangkan sesuai degan sektor usaha yang diinginkan, seperti industri makanan dan minuman, tata busana, pariwisata, media dan rekreasi, serta farmasi dan kosmetika. Hal ini memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memilih usaha yang dapat dikembangkan.
- Penegakan syariat Islam di Aceh telah merambah ke berbagai bidang usaha dan jasa terutama di bidang ekonomi. Sebagai langkah pendukung, pemerintah berkomitmen untuk menguatkan lembaga keuangan syariah, Industri Kecil Menengah (IKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis produk Syariah. Bahkan semua lembaga keuangan konvensional wajib mengkonversikan sistem manajemen pengelolaannya berbasis Syariah
- Generasi muda Aceh bangga dan berani menyatakan bahwa Aceh Negeri Syariah. Hal ini menjadikan tumbuhnya generasi baru yang membawa perubahan dimasa mendatang

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh

Dengan disahkannya Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah memberikan peluang yang besar khususnya bagi pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan Usaha Simpan Pinjam Syariah dan UMKM Syariah/Halal dikarenakan amanah dari Qanun tersebut yang mewajibkan seluruh lembaga keuangan baik bank dan non bank untuk menjalankan usaha sesuai dengan prinsip dan pengelolaan syariah paling lambat pada Desember 2020. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh terus berupaya dan berkesinambungan mengembangkan KSPPS/USPPS melalui penambahan jumlah tenaga DPS dengan program/ kegiatan Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah yang bekerjasama dengan MUI Pusat dan fasilitasi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Konvensional ke Syariah. Untuk UMKM Syariah khususnya di bidang kuliner halal, dengan memfasilitasi para pelaku UMKM di bidang kuliner untuk memperoleh sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Aceh menjadi salah satu destinasi favorit wisata kuliner halal di Indonesia dengan potensi dan keanekaragaman cita rasa kuliner halal menjadi salah satu prioritas pengembangan di sektor UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh

Visi Gubernur Aceh yaitu: "Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil dan Melayani".

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada misi ke sebelas dan ke duabelas, yaitu:
"Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industry dan industri kreatif yang kompetitif".

Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh terkait pengembangan ekonomi syariah, industri halal dan sektor keuangan syariah di Aceh:

1. Mengembangkan standarisasi dan inovasi produk industri halal dan keuangan syariah
2. Membentuk lembaga-lembaga pendukung ekonomi syariah
3. Menyusun program pelatihan dengan memanfaatkan perkembangan IT
4. Mensinergikan program pengurus pusat maupun pengurus wilayah dengan lembaga pemerintah pemangku ekonomi Syariah
5. Meningkatkan daya saing produk dan jasa dengan fokus *halal food*. Dalam hal ini, Disperindag Aceh membuka dan memfasilitasi konsultasi dan sosialisasi sertifikasi halal, hingga fasilitasi pendaftaran sertifikasi halal.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh

Provinsi Aceh merupakan provinsi yang secara geografis sangat strategis, dengan status ekonomi khusus dan penerapan syariat islam menjadikan aceh ramah terhadap investasi. Investasi merupakan instrumen peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada pengembangan pada sektor potensial seperti agro industri, energi dan infrastruktur, pariwisata dan pengembangan kawasan industri Aceh. Keempat sektor tersebut memiliki pondasi yang kuat untuk dikembangkan dan tentunya sejalan dengan penerapan Syariat islam secara kaffah dari berbagai sektor kehidupan masyarakat di provinsi Aceh. Apalagi jika dikaitkan dengan ketersediaan regulasi yang mendukung investasi namun tidak mencederai penerapan nilai-nilai syariat Islam, menjadikan Aceh sangat tepat dan cocok menjadi destinasi utama bagi setiap kegiatan investasi berbasis syariah.

Selain itu, Aceh juga telah memiliki Kawasan Industri Aceh dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe menjadi magnet dan peluang bagi investor yang ingin berinvestasi pada kawasan yang memiliki insentif dan kemudahan termasuk pengurangan pajak dan kemudahan lainnya. Melalui dua kawasan ini, menjadi harapan untuk terlaksananya lokomotif kegiatan berusaha yang dapat menumbuhkan berbagai sektor turunan dengan value added yang besar.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh

Aceh dengan julukan Serambi Mekkah memiliki potensi yang besar dalam pengembangan wisata ramah Muslim. Penetapan Aceh sebagai daerah Syariat Islam telah melahirkan beberapa produk hukum yang mengatur tentang etikan dan tatanan kehidupan sosial masyarakat berdasarkan pada hukum-hukum Islam. Oleh karena itu, pariwisata ramah Muslim merupakan salah satu wisata yang sangat cocok untuk diimplimentasikan di Aceh yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Industri Halal merupakan sektor paling penting dalam mendukung wisata ramah Muslim dimana para wisatawan akan menggunakan dan mengkonsumsi produk dan usaha bersertifikasi halal. Oleh karena itu, dukungan pelaku usaha terutama usaha kepariwisataan sangat dibutuhkan dalam memperbanyak usaha bersertifikasi halal dan paket wisata ramah Muslim.

Begitu juga menyangkut wisata ramah Muslim yang merupakan budaya kehidupan masyarakat Aceh baik dalam hubungan sosial maupun pendekatan ritual yang selalu berpedoman kepada anjuran dan larangan yang ada dalam agama Islam. Hal Ini dapat dilihat dari tingkat kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara yang naik dari tahun ke tahun yaitu di tahun 2018 mencapi 2.5 Juta dan tahun 2019 menjadi 2.6 Juta sedangkan wisatawan Muslim mengalami kenaikan dari 30 ribu orang di tahun 2018 dan tahun 2019 menjadi 40 ribu orang yang pada umumnya berasal dari Negeri Malaysia.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh

Penguatan Sektor Riil Ekonomi Syariah

Kami mencoba menyederhanakan ruang lingkup sektor keuangan dan sektor riil pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui konsep "5F", yaitu *finance* (keuangan syariah), *food* (makanan-minuman halal), *fashion* (busana Muslim), *fundutainment* (industri kreatif berbasis syariah), dan *fantrepreneur* (kewirausahaan Islam). *Finance* atau keuangan syariah dapat dianalogikan sebagai "sumber air" yang diperlukan untuk menghidupi seluruh sektor perekonomian. Sumber air tersebut harus bisa mengaliri seluruh lahan, sehingga diperlukan saluran-saluran irigasi yang baik, dan didukung dengan tanaman-tanaman yang memiliki nilai ekonomi.

Dalam konteks pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, tidak ada keterpisahan atau *decoupling* antara sektor keuangan dengan sektor riil. Imam Ghazali mengibaratkan uang sebagaimana cermin yang tidak memiliki warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Hal ini menandakan bahwa sektor keuangan hanyalah "cermin" dari sektor riil. Senada dengan hal ini, Ibnu Khaldun menyampaikan bahwa penggerak pembangunan adalah sektor riil. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut. Kekayaan suatu negara ditentukan oleh tingkat produksi dan neraca pembayaran yang positif. Dalam keadaan nilai uang tidak berubah, maka perubahan harga semata-mata ditentukan oleh perubahan kekuatan permintaan dan penawaran. Dengan demikian, keselarasan antara sektor riil dan sektor keuangan merupakan hal yang sangat vital untuk diperhatikan.

Dalam konteks Aceh, dalam bab mengenai Statistik Perbankan Syariah, telah diuraikan adanya tanda-tanda perekonomian Aceh yang belum banyak didukung oleh sektor perbankan. Rasio FDR perbankan syariah masih di kisaran 68.41%, masih dibawah dari ambang batas bawah Rasio Intermediasi Makroprudensial yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 80%. Peran perbankan untuk mendukung PDRB pun masih belum cukup tinggi. *Loan to GDP Ratio* Provinsi Aceh (perbandingan antara total kredit perbankan dan PDRB Aceh) masih di kisaran 21% (PDRB ADHB) sampai 25% (PDRB AHDK).

Dengan demikian, pemberdayaan sektor riil merupakan kunci pengembangan ekonomi dan kesejahteraan di Aceh. Provinsi Aceh masih memiliki "sumber air menganggur" yang terlihat dari belum optimalnya rasio FDR perbankan. Selain melalui dana perbankan, Aceh masih berpeluang untuk meningkatkan investasi untuk mendorong perekonomian, dengan syarat Pemerintah dan jajaran *stakeholder*-nya mengupayakan dengan kemampuan terbaik untuk menjaga kualitas *governance* (Aceh Peumulia), mendukung kemudahan berwirausaha berinvestasi tanpa mengurangi kontrol terhadap aspek syariah dan inklusivitas (Aceh Kaya & Aceh Meuadab), mendorong pengembangan sektor riil berbasis keunggulan lokal (Aceh Kreatif), mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (Aceh Carong), membangun sarana-prasarana pendukung (Aceh Seumeugot), serta menjaga kepercayaan publik terhadap ketertiban-keamanan (Aceh Dame).

Sebagaimana program yang dicanangkan oleh Gubernur Aceh, melalui integrasi program Aceh Peumulia, Aceh Kaya, Aceh Meudab, Aceh Kreatif, Aceh Carong, Aceh Seumegot, dan Aceh Dame, maka secara teori akan menghasilkan suasana yang kondusif untuk mengakselerasi perekonomian. Agar teori ini dapat teraplikasi dengan baik, maka Pemerintah perlu senantiasa mereview rencana pembangunan yang telah disusunnya bersama dengan akademisi dan praktisi.

Beberapa sektor riil potensial yang sementara ini dikumpulkan berdasarkan konsep 5F (kecuali *Finance* karena telah banyak diuraikan dalam bab sebelumnya):

Food

Ada beberapa event yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pengembangan makanan halal di Aceh, beberapa diantaranya seperti Aceh Internasional Halal Food Festival 2017, Entrepreneur Kopi Gayo, Aceh Culinary Festival, dan Banda Aceh Coffee Festival. Kuliner halal tentu sangat potensial untuk dikembangkan di Aceh, yang salah satunya terindikasi dari bertumbuhnya restaurant dan warung kopi. Potensi kuliner di Aceh diperkirakan mencapai Rp 367.5 Triliun.

Namun tentu pengembangan makanan halal memerlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, terutama dari sisi pelabelan halal suatu produk makanan/minuman. Oleh karena itu, langkah Pemerintah untuk memperkuat *branding* "The Light of Aceh" melalui *Halal Food* dan *Halal Certification* perlu untuk didukung dan dikembangkan bersama.

Fashion

Aceh yang memiliki keunggulan dalam implementasi syariah Islam dan juga keberagaman budaya tentu telah memiliki modal yang kuat, bahwa penikmat fashion dan desainer Aceh bisa berkreasi untuk menunjukkan karyanya kepada publik dengan nuansa yang Islami, terlebih lagi Aceh sendiri sudah dinobatkan sebagai destinasi halal budaya terbaik dunia. Berbagai lomba yang bisa diikuti oleh seluruh kalangan pecinta fashion di Aceh seperti Aceh Islamic Fashion Parade, Aceh Hijab Fashion Week, Fashion Show Busana Muslim APFA Aceh, Make Up Artist Competition, Fashion Design Contest, dan juga Pemilihan Duta Islamic Fashion Aceh.

Angka konsumsi rumah tangga untuk fashion mencapai Rp 282.8 Triliun, atau menempati urutan kedua setelah kuliner dengan angka konsumsi rumah tangga (sebesar Rp 367.5 Triliun). Jika melihat angka statistik ini, kita tentu menyadari bahwa industri fashion merupakan sektor yang sangat potensial untuk di kembangkan, khususnya di Aceh. Terlebih lagi dengan tren busana islami yang marak dewasa ini, yang sangat sesuai dengan kondisi sosiokultural masyarakat Aceh yang lekat dengan nilai-nilai islami. Pada April 2018 lalu, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Aceh menghadiri *launching* Asosiasi Perancang Fashion Aceh (APFA). Dalam acara tersebut, Dekransda menyampaikan bahwa pengembangan *fashion* di Aceh memerlukan kreativitas yang tinggi untuk mengembangkan model dan motif yang sesuai dengan selera pasar saat ini.

Fantrepreneur

Pengembangan kewirausahaan merupakan salah satu upaya untuk membuka "kue ekonomi" baru, sekaligus diharapkan dapat memberi dampak positif berupa penurunan angka pengangguran dan pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan. Hal ini juga sejalan dengan program Pemerintah, yaitu Aceh Kaya, yang diharapkan dapat menumbuhkan *entrepreneur* yang ditunjang dengan kemudahan terhadap akses modal, keterampilan dan pasar.

Penguatan semangat entrepreneurship ini perlu didukung oleh lembaga keuangan syariah, baik yang bersifat komersial, maupun lembaga keuangan syariah yang bersifat sosial. Upaya mempermudah akses permodalan tidak terlepas dari upaya untuk menyeleksi, membina dan mendampingi para *start up* hingga mencapai taraf "*feasible*", dan kemudian didukung dengan upaya penyusunan skim atau pola pembiayaan perbankan agar para pengusaha pemula dapat masuk dalam kategori "*bankable*". Dengan demikian, Pemerintah Aceh perlu bersinergi dengan lembaga keuangan syariah, akademisi, dan juga regulator agar program Aceh Kaya dapat berjalan lebih optimal.

Fundutainment

Setiap tahun jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Aceh mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 sebanyak 2,154,249 wisatawan terdiri dari 76,452 wisman dan 2,077,797 wisnus. Penetapan kawasan wisataa Marina di Pulau Banyak, Aceh Singkil, menjadikan Sabang sebagai wisata bahari dunia (wisata kapal pesiar) dan kawasan yang nyaman untuk investasi kelas dunia. Dengan masuknya sektor pariwisata dalam program prioritas merupakan sebuah loncatan besar terhadap sektor pariwisata di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.

Festival Danau Laut Tawar dengan rangkaian kegiatan pacuan kuda, Laut Tawar Bike Championship, Pentas Seni Gayo, Pameran Foto, Lomba Prahu, Lomba Marathon Lintas Danau Laut Tawar 10 K, dll.

Atraksi wisata marina mempromosikan Sabang sebagai Destinasi Wisata Kapal Yatch dan Bahari dengan mengikutsertakan beberapa kapal yacht luar negeri yang akan siggah di Sabang dan didukung dengan beberapa atraksi wisata budaya menarik lainnya, seperti Pagelaran Seni dan Budaya, Festival Diving, Festival Layang-layang, Pameran Foto, dll. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan September 2017 di Kota Sabang dengan target pengunjung 5,000 wisatawan, baik nasional maupun internasional.

Melalui Aceh International Rapa'i Festival dengan mengundang beberapa negara sahabat yang memiliki peralatan musik tradisional menjadi event yang menarik dalam mempromosikan Aceh melalui musik tradisi.

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan September 2017 di Kota Banda Aceh dengan target pengunjung 5,000 wisatawan, baik nasional maupun internasional.

803 objek wisata di Provinsi Aceh, namun potensi tersebut belum semuanya menjadi destinasi wisata yang dikunjungi oleh wisatawan. Aceh punya potensi yang luar biasa, punya garis pantai yang cukup panjang, mempunyai kuliner yang enak dan aktivitas budaya yang sangat menarik, di wilayah tengah punya alam yang bagus, di timur wisata budaya. Ada empat jenis usaha pariwisata Aceh akan dipromosikan yang pelaksanaannya mematuhi aturan syariah, seperti hotel halal, sistem makanan halal, paket wisata ramah Muslim, amenitas destinasi yang berstandar halal seperti mushalla di objek wisata, serta atraksi wisata yang halal.

Aceh memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi destinasi wisata ramah Muslim karena menerapkan syariat Islam, yang mana dalam kehidupan masyarakatnya berlaku norma, nilai dan aturan yang berlandaskan syariah Islam. Aceh sangat terbuka dan *welcome* kepada wisatawan dan fasilitas yang dibutuhkan bagi wisatawan Muslim sangat mudah ditemukan di Aceh. Aceh juga menyediakan berbagai fasilitas yang memberikan pelayanan dan kemudahan dan ramah terhadap kebutuhan wisatawan Muslim, seperti adanya sistem jaminan halal, kemudahan untuk beribadah, makanan halal, hotel-hotel yang menerapkan *halal friendly*, tersedianya arah kiblat, mushalla, toilet yang sesuai dengan standar wisatawan Muslim, dan didukung dengan paket-paket wisata religi. Berikut informasi mengenai agenda wisata di Aceh.

Event Wisata di Provinsi Aceh

- Festival Danau Air Tawar 2017 (Kabupaten Aceh Tengah)
- Sail Sabang 2017
- Aceh International Rapa'i Festival 2017 (Banda Aceh)
- Seni Putro Phang Universitas Syiah Kuala di Wuhan, China
- Festival Seni Budaya Tradisional dan Kreasi Meulaboh
- Saman 10.001 Gayo Lues (Aceh Tengah)
- Festival Musik "The Light of Aceh"
- Weh Dive Fest 2018 di Sabang
- Aceh Sufi World Music Festival di Banda Aceh 2018
- Festival Danau Lut Tawar di Takengon
- Aceh International Rapai Festival di Lhokseumawe
- Burni Telong Challenge di Bener Meriah
- Pekan Kebudayaan Aceh 2018 di Banda Aceh
- Festival Pulau Banyak di Singkil
- Aceh International Surfing Championship di Simeulue
- Sabang International Free Diving Championship di Sabang

Kemandirian Ekonomi Pesantren

Aceh memiliki kurang lebih 1,573 dayah, yang terdiri dari 1,055 dayah salafi dan 518 dayah terpadu. Meski dengan jumlah yang cukup banyak, masih banyak dayah yang belum diimbangi oleh kualitas sarana dan pra-sarana, gedung yang layak pakai, ketersediaan ruang belajar yang memadai, serta kurikulum yang teratur[5]. Apabila dihitung secara proporsional (dibandingkan data BPS tahun 2014), jumlah santri dengan keberadaan 1,573 dayah dimaksud dapat mencapai 247,563 santri dan sekitar 20,815 tengku.

Terminologi "kemandirian ekonomi pesantren" menurut kami kurang tepat oleh karena beberapa pesantren di Indonesia berusia ratusan tahun, atau lebih tua dari berdirinya negeri ini. Pesantren merupakan salah satu organisasi yang mampu mempertahankan eksistensinya dalam kurun waktu yang sangat panjang dan terus berdiri hingga saat ini.

Peran Bank Indonesia menurut hemat kami adalah memberikan wawasan/keilmuan terkini tentang bagaimana sebuah unit bisnis dikelola, serta memberikan motivasi agar pesantren bersedia untuk memberikan peran yang lebih dari sekedar "mendidik seorang ulama", yaitu menjadi laboratorium ekonomi yang mampu bersama-sama dengan Pemerintah memperkuat perekonomian umat.

Dalam menjalankan program kemandirian pesantren ini, kami merekomendasikan agar penguatan dapat dilakukan kepada 2 unsur: pesantren sebagai sebuah lembaga yang memiliki unit bisnis, dan santri sebagai *agent of change* ekonomi syariah yang berpotensi untuk dididik menjadi seorang *"santripreneur"*.

Program untuk pesantren diantaranya yang tertuang dalam Program Strategis No. 14, dimana masing-masing pesantren didampingi oleh Bank Indonesia melakukan *feasibility study* atas unit bisnis yang dianggap paling unggul, yang dilanjutkan dengan pemberian bantuan teknis dan pemberian alat melalui anggaran Program Sosial Bank Indonesia. Selain itu, kami mengusulkan beberapa program pendukung seperti:

- Penyusunan Prospektus Unit Usaha Pesantren
- Penyelenggaraan Forum Bisnis Pesantren
- Pendirian *Holding Pesantren*
- Pembentukan Website dalam rangka mendukung sisi pemasaran produk pesantren
- Sosialisasi Standar Akuntasi Pencatatan Keuangan Pesantren

Program untuk para santri kami usulkan sebagai berikut:

- Program Inkubator Bisnis Pesantren (Pusat Pelatihan Bisnis Pesantren)
- Pengembangan Konsep Bisnis "S to S" dan "S to P"
- Sinergi Program dengan Kementerian (misal: Kementerian Perindustrian)

Potensi Pengembangan Keuangan Sosial Syariah

Secara kelembagaan, di Aceh, Baitul Mal adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan mengelola zakat, wakaf dan harta agama lainnya. Dasar hukum Baitul Mal di Provinsi Aceh adalah Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam UUPA terdapat tiga pasal berkenaan dengan zakat, yaitu: Pasal 180 ayat (1) huruf d, "Zakat merupakan salah satu penerimaan daerah Aceh dan Penerimaan Daerah Kabupaten Kota". Pasal 191, "Zakat, Harta Wakaf dan Harta Agama lainnya dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang diatur dengan Qanun". Pasal 192, "Zakat yang dibayar menjadi pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan (PPh) terhutang dari wajib pajak". Suatu kekhususan di Aceh ialah pemberlakuan zakat sebagai salah satu sumber Pendapat Asli Daerah (PAD) yang bersifat khusus. Tetapi walaupun sebagai PAD, zakat tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang sudah dianggarkan dalam APBD, kecuali untuk penyaluran zakat yang sesuai dengan syariat Islam. Pengumpulan zakat, infak dan sedekah di Baitul Mal Provinsi Aceh dan 23 Baitul Mal Kabupaten/Kota di seluruh Aceh mengalami kenaikan sejak 2010 sampai saat ini. Pada 2010 pengumpulan ZIS sebesar Rp 87.02 milyar, kemudian 2011 meningkat menjadi Rp 100.10 milyar, dan 2012 menjadi Rp 127.17 Milyar, dan tahun 2013 terhimpun Rp 134.87 milyar[6]. Pada tahun 2015 dan 2016, pengumpulan zakat di Aceh mencapai Rp 192 dan Rp218 Miliar. Menurut informasi dari berbagai sumber, potensi zakat di Aceh mencapai Rp 1.3 - 1.4 Triliun. Apabila dihitung berdasar PDRB, maka besar potensi zakat akan mencapai triliunan. Namun perhitungan berdasar PDRB dinilai kurang akurat dalam menentukan besar potensi zakat yang dapat direalisasikan.

Berdasarkan pendekatan perbankan, kami mencoba menghitung potensi zakat melalui data tabungan dengan nilai > Rp 100 juta dalam jangka waktu 12 bulan. Dengan pendekatan dimaksud, kami menemukan nilai nominal sebesar Rp 2.49 Triliun. Apabila diasumsikan 98.49% merupakan milik Muslim, dan 50% dari jumlah pemilik rekening dimaksud bersedia membayar zakat, maka ada tambahan nilai zakat sekitar Rp 30.7 Miliar, apabila pengumpulan dana zakat dapat diintegrasikan dengan perbankan.

Selain zakat, potensi wakaf sebagai bagian dari keuangan sosial syariah di Aceh memiliki cukup tinggi. Hal ini diindikasikan dari jumlah tanah wakaf yang mencapai 24,898 unit, dengan luas sekitar 767,869,012 m^2. Berikut jumlah tanah wakaf berdasar provinsi[7]:

[6] http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/baitul-mal-aceh-bagian-dari-sistem-pengelolaan-zakat-nasional/
[7] Sumber: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tertanggal Maret 2016

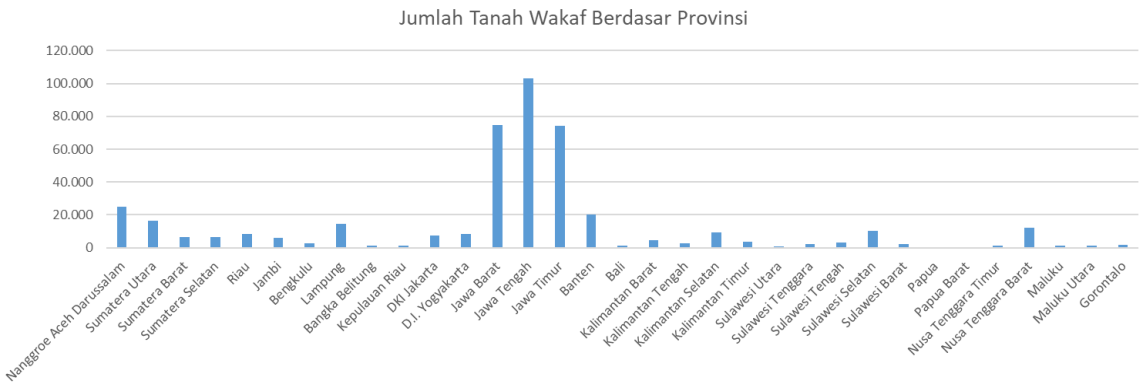

Terdapat perbedaan data statistik mengenai jumlah tanah wakaf berdasarkan provinsi. Namun terlepas dari hal tersebut, pemanfaatan tanah wakaf secara produktif berpotensi terbentur dengan pemahaman masyarakat Aceh terhadap penggunaan tanah wakaf yang sebagian besar bermadzhab Imam Syafii yang tidak memperkenankan pengalihan fungsi tanah wakaf dari tujuan wakif. Masyarakat hanya akan mengelola tanah wakaf sesuai dengan amanah wakif, yang sebagian besar dimanfaatkan untuk masjid

Kepala OJK Banda Aceh

Peluang pengembangan sektor keuangan syariah di Aceh sangat besar dan hal tersebut didukung oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Dukungan dari Pemda tercermin dari telah ditetapkannya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah pada tanggal 31 Desember 2018 dan diundangkan pada tanggal 4 Januari 2019. Qanun tersebut mewajibkan seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh agar dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Sehingga, seluruh lembaga keuangan di Aceh yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional wajib menyesuaikan dengan Qanun tersebut paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkannya, yaitu 4 Januari 2022. Atas hal tersebut, dapat dipastikan bahwa peluang pengembangan sektor keuangan syariah di Aceh akan terdorong dengan adanya Qanun LKS tersebut.

Bagaimana tantangan utama yang saat ini dihadapi dalam mengembangkan sektor ekonomi syariah, industri halal, dan keuangan syariah?

Kepala Bappeda Aceh

Tantangan yang dihadapai sebagai berikut:

- Sumber daya manusia yang belum memadai
- Lembaga keuangan dan non keuangan Syariah belum sepenuhnya memahami praktek-praktek dalam implementasi karena turunan dari peraturan yang belum selesai

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh

Tantangan utama yang saat ini dihadapi dalam mengembangkan ekonomi syariah, industri halal (dalam aspek perindustrian) dan sektor keuangan syariah di Aceh.

- Masih kurangnya kerjasama baik secara nasional ataupun internasional untuk memperkenalkan industri halal khas Aceh.
- Masih terbatasnya akses dan pembangunan infrastruktur dan prasarana pendukung.
- Iklim sistem perdagangan yang belum mencapai keadilan secara kaffah, serta industri ramah lingkungan.
- Lamban/terbatasnya sosialisasi dan edukasi masyarakat untuk menguatkan kepercayaan ekonomi berbasis Syariah untuk memperkecil gap antara industri syariah dan konvensional.
- Edukasi istilah ekonomi syariah yang masih belum dipahami oleh masyarakat awam. Meskipun sudah begabung dengan perbankan syariah, masyarakat masih bingung menggunakan istilah-istilah yang dipakai. Mereka cenderung masih memakai istilah-istilah konvensional.
- Masih terbatasnya Inovasi produk dan kualitas dalam layanan. Hal tersebut hanya dapat didukung melalui sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya.
- Masih terbatasnya kerjasama antar pemangku kepentingan dan pelaku usaha demi tercapai tujuan.

- Tidak terselengaranya konsorsium global tentang ekonomi syariah yang merambah ke semua sektor usaha sehingga bisa menjadi acuan bagi masyarakat dalam mengembangkan bisnis/usahanya. Hasil konsorsium dapat berupa sertifikasi yang disepakati untuk membuka kursus yang sejalan dengan permintaan industri. Hal ini perlu dilakukan untuk digunakan sebagai pegangan bagi siapapun yang ingin mengembangkan industri syariah.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh

Tantangan utama yang dihadapi dalam mengembangkan sektor Ekonomi Syariah, Industri Halal dan Sektor Keuangan Syariah, khususnya pengembangan Koperasi Syariah dan UMKM Syariah/Halal di Aceh adalah kebiasaan masyarakat/pelaku usaha dengan pola konvensional terutama di sektor permodalan/kredit. Untuk mengubah pola pikir (*mindset*) tersebut dibutuhkan upaya ekstra dari pemerintah, khususnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh dalam melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM terkait pola pengelolaan syariah baik itu di sektor Ekonomi Syariah, Industri Halal dan Sektor Keuangan Syariah, khususnya pengembangan Koperasi Syariah dan UMKM Syariah/Halal. Selain itu terbatasnya sumber daya manusia yang memahami pola syariah di Aceh sehingga proses pengintegrasian pengelolaan konvensional ke pola syariah harus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh

Visi Gubernur Aceh yaitu: “Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil dan Melayani”.

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada misi ke sebelas dan ke duabelas, yaitu:
”Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif”.

Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh terkait pengembangan ekonomi syariah, industri halal dan sektor keuangan syariah di Aceh:

1. Mengembangkan standarisasi dan inovasi produk industri halal dan keuangan syariah
2. Membentuk lembaga-lembaga pendukung ekonomi syariah
3. Menyusun program pelatihan dengan memanfaatkan perkembangan IT
4. Mensinergikan program pengurus pusat maupun pengurus wilayah dengan lembaga pemerintah pemangku ekonomi Syariah
5. Meningkatkan daya saing produk dan jasa dengan fokus *halal food*. Dalam hal ini, Disperindag Aceh membuka dan memfasilitasi konsultasi dan sosialisasi sertifikasi halal, hingga fasilitasi pendaftaran sertifikasi halal.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh

Tantangan masuknya investasi di Indonesia sebenarnya bermuara pada masih banyaknya regulasi, prosedur birokrasi yang panjang, serta banyaknya regulasi/kebijakan pemerintah pusat yang sering berubah-ubah. Sehingga hal ini menjadi hambatan tersendiri bagi para investor, diharapkan kedepan dengan adanya penyederhanaan regulasi seperti omnibuslaw akan menjadi suatu solusi yang efektif. Kemudian juga kualitas SDM maupun sarana dan prasarana yang perlu terus ditingkatkan dengan berbagai dukungan finansial yang tidak sedikit.

Selain itu, peranan media juga sangat mempengaruhi atas citra yang ditimbulkan dari pemberitaannya. Media-media yang tidak mendukung pelaksanaan syariat islam, akan dapat berpotensi merusak suasana sehingga timbul fitnah maupun pemberitaan negatif/hoax tentang realita bahwa pengembangan ekonomi syariah adalah solusi bagi umat manusia saat ini.

Faktor alam seperti bencana, wabah/pandemi seperti Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, saat ini juga merupakan kendala yang paling signifikan dalam pengembangan iklim investasi di suatu daerah. Seluruh sektor mengalami kelumpuhan akibat harus mematuhi protocol kesehatan yang ditetapkan secara global oleh WHO guna pencegahan terjadinya penularan secara luas antar sesama manusia.

Dukungan penuh dari berbagai stakeholder dan masyarakat sangat diharapkan karena dapat menjadi faktor penentu untuk memperbaiki iklim investasi dan merubah image suatu daerah menjadi pro investasi, khususnya bagi sektor ekonomi syariah, industri halal, serta sektor keuangan syariah.

Kepala Dinas Kebudayaan & Pariwisata Provinsi Aceh

Tantangan menuju wisata ramah Muslim di Aceh adalah sulitnya mengubah pemahaman masyarakat Aceh bahwa semua yang mereka makan sudah bersumber dari zat yang halal, walaupun secara hakiki masih ada yang belum sempurna terutama dalam proses pembuatan makanan, minuman dll. Saat ini Aceh sudah memiliki peraturan daerah (qanun) yang mengatur tentang Sistem Jaminan Produk Halal yaitu Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016. Namun masih ada masyarakat yang kurang memahami aturan dari qanun tersebut, hal ini mungkin saja keterbatasan sosialisasi kepada masyarakat oleh pemerintah.

Hal lain yang juga menjadi tantangan menuju wisata ramah Muslim khususnya para pelaku pariwisata yg mengarah kepada wisata ramah Muslim yaitu:

- Persiapan dan pembiayaan standarisasi unit usaha pariwisata (hotel dan restoran)
- Pembiayaan untuk uji kompetensi SDM pariwisata (lembaga Pendidikan, dan pelaku usaha pariwisata

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh

Tantangan Program Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Provinsi Aceh yaitu diantaranya:

Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Dalam satu dekade terakhir, terdapat beberapa survei dan atau penelitian yang telah dilakukan untuk meneliti pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah di beberapa provinsi. Penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia, bekerjasama dengan Universitas Brawijaya pada tahun 2000 di Jawa Timur menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah belum cukup baik. Sekitar 67.4% responden belum memahami perbedaan antara perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional. Kondisi yang berkebalikan didapat saat penelitian sejenis dilakukan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor di Kalimantan Selatan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 88% dari responden pernah mendengar perbankan syariah, dan sekitar 75.6% responden telah memahami prinsip operasional bank syariah.

Sekitar sepuluh tahun kemudian, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rifki Ismal pada tahun 2010 kepada 409 responden yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jogjakarta menunjukkan adanya peningkatan pemahaman perbankan syariah yang menggembirakan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden telah memahami jenis-jenis produk tabungan perbankan syariah, meskipun belum memahami instrumen keuangan syariah dengan baik.

Peningkatan pemahaman mengenai perbankan syariah ini nampaknya belum mengindikasikan adanya peningkatan jumlah *sharia loyalist. S*ekitar 67% dari responden penelitian tersebut berencana memindahkan dananya dari perbankan syariah apabila kondisi ekonomi sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Kenyataan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa bank syariah masih dipersepsikan sebagai “bank religius”, atau “bank bagi hasil” saja, dan seolah menunjukkan masih minimnya motif ekonomi atau benefit dari sisi bisnis yang menjadi alasan atau pendorong utama masyarakat bergabung dengan perbankan syariah.

Di Provinsi Aceh, dimana sekitar 98.49% berpenduduk Muslim, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2016 diperoleh informasi bahwa indeks literasi keuangan syariah sekitar 21.09%, dan tingkat inklusi keuangan syariah berada di kisaran 41.45%. Di Jawa Timur, wilayah dengan ± 94.46% berpenduduk Muslim, literasi keuangan syariah telah mencapai 29.35%, namun tingkat inklusi keuangan masih di kisaran 12.21%.

Informasi mengenai tingkat inklusi keuangan Aceh dimaksud nampaknya tidak secara langsung berhubungan positif dengan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Tingkat inklusi keuangan syariah di Provinsi Aceh sepertinya banyak didorong oleh faktor kebijakan *top down,* dimana Pemerintah Provinsi Aceh melakukan konversi BPD Aceh menjadi BPD Aceh Syariah di sekitar bulan September 2016. Sebelumnya, indeks keuangan syariah di Provinsi Aceh masih rendah. Apabila jumlah penduduk Aceh pada 2016 sebanyak 5.096.248 jiwa, berikut data inklusi keuangan syariah:

Keterangan	Aug-2016	Des-2016	Des-2017
Jumlah Penduduk Aceh	5,096,248	5,096,248	5,198,683
Jumlah Rekening*			
- Total Jumlah Rekening	3,983,812	3,989,584	5,335,188
- Rekening Konvensional	3,429,279	2,256,263	3,403,518
- Rekening Syariah	554,533	1,733,321	1,931,670
Inklusi Keuangan*			
- Total Jumlah Rekening	78.17%	78.28%	102.63%
- Rekening Konvensional	67.29%	44.27%	65.47%
- Rekening Syariah	10.88%	34.01%	37.16%

*Sumber: Bank Indonesia, diolah

Berdasarkan tabel di atas, kita dapat memperhatikan kondisi inklusi keuangan syariah di Aceh pada bulan Agustus 2016, sebelum adanya konversi. Pada saat itu, tingkat inklusi keuangan syariah Aceh berada di kisaran 10.88%, dengan porsi rekening perbankan syariah terhadap total jumlah rekening sebesar 13.92%. Pasca adanya konversi BPD Aceh menjadi BPD Aceh Syariah, secara langsung terjadi peningkatan signifikan dari sisi aset, DPK, dan pembiayaan syariah, baik dari sisi nominal maupun jumlah rekening. Inilah efektivitas kebijakan *top down*, yang mampu memberikan akselerasi yang nyata dan cepat. Berbeda dengan pergerakan dakwah ekonomi syariah yang bersifat *bottom up* yang pengaruhnya memerlukan waktu, dan terkadang tidak memberikan hasil sebagaimana yang ditargetkan. Inilah urgensi kombinasi antara kebijakan *top down* dan *bottom up,* keduanya saling menguatkan satu sama lain. Perlu ada edukasi yang lebih intensif dan massif kepada masyarakat Aceh agar sepenuhnya memahami hakikat Fatwa MUI dan para ulama di Aceh terkait keharaman bunga bank konvensional, baik secara fiqih maupun dampak ekonomi makro-mikro.
Untuk mengukur tingkat inklusi keuangan terkini, kami mencoba menggunakan perbandingan jumlah penduduk Aceh dengan jumlah rekening yang ada pada data Bank Indonesia. Apabila jumlah penduduk Aceh pada tahun 2017 diperkirakan 5,198,683 jiwa (dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk sekitar 2.01%), dan jumlah rekening DPK per Desember 2017 sejumlah 5,335,188, maka tingkat inklusi keuangan Aceh sudah mencapai 102.63%. Dari jumlah dimaksud, 3,403,518 diantaranya merupakan rekening perbankan konvensional (63.79%). Selain porsi rekening perbankan konvensional yang masih besar, tren jumlah rekening konvensional di Aceh menunjukkan hasil yang lebih positif dibandingkan dengan jumlah rekening syariah.

Kondisi ini menunjukkan adanya pekerjaan rumah yang cukup berat di Provinsi Aceh, yaitu lebih giat mengedukasi masyarakat mengenai ekonomi dan keuangan syariah untuk meningkatkan kesadaran terhadap ekonomi syariah sebagai bagian integral dari pelaksanaan agama bagi Muslim, dan secara bersamaan terus berupaya meningkatkan persentase *Islamic financial inclusion* yang lebih kuat secara fundamental.

Pengembangan & Implementasi Model Bisnis Kerjasama Berbasis Syariah

Pengembangan model bisnis perbankan syariah tidak hanya menjadi tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator, tetapi juga menjadi tugas dari setiap pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia. Dalam konteks pengembangan UMKM misalnya, Bank Indonesia lebih memiliki wawasan teoritis dan teknis, serta pengalaman dalam mengembangkan UMKM baik melalui penyusunan kajian *lending model,* implementasi konsep pengembangan klaster, pengembangan kewirausahaan, *local economic development,* kajian komoditas/produk/jenis usaha unggulan UMKM, hingga pengembangan *Regional Investor Relation Unit* (RIRU). Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan pengembangan pola pembiayaan (*lending model*) berbasis syariah diusulkan oleh Bank Indonesia dan *stakeholder* lainnya kepada OJK, dan kemudian apabila dinilai berpotensi, dapat diteruskan kepada Dewan Syariah Nasional. Selain itu, Bank Indonesia pasca berdirinya OJK justru memiliki ruang lingkup yang luas dalam mengembangkan model-model bisnis berbasis syariah. Tidak hanya mengenai perbankan, Bank Indonesia juga dapat memberikan dukungannya untuk pengembangan keuangan syariah, baik yang bersifat komersial, maupun yang bersifat sosial.

Meningkatkan Kerjasama Antar Pelaku Usaha

Geliat pengembangan keuangan syariah di Aceh telah terlihat nyata dari sisi perbankan sejak dikonversinya BPD Aceh. Namun dalam konteks ekonomi syariah, perbankan hanyalah merupakan bagian dari keseluruhan sistem. Pengembangan ekonomi syariah mencakup berbagai aspek dan sektor perekonomian, dan ada di setiap transaksi

ekonomi. Harus diakui bahwa perbankan merupakan lokomotif berkembangnya ekonomi syariah di tanah air, dan juga memiliki peran penting sebagai pemegang fungsi intermediasi yang menyalurkan dana dari *surplus spending unit* kepada *deficit spending unit.* Namun mendorong perbankan saja tentu tidaklah cukup. Pemerintah dan *stakeholder* ekonomi syariah perlu ikut mendorong terjalinnya kerjasama antar pelaku usaha, meski di sisi lain masih ada tugas untuk meningkatkan kepercayaan dan kinerja perbankan untuk membiayai para pelaku usaha dalam rangka menaikkan persentase *Finance to Deposit Ratio* perbankan syariah di Aceh. Untuk itu, kedua mekanisme kerjasama, baik antar sesama pelaku usaha maupun antara pelaku usaha dengan perbankan harus dikembangkan secara simultan.

Kerjasama antar pelaku usaha dapat didorong melalui *business matching,* pembentukan komunitas-komunitas entrepreneurship, memperkuat wawasan *account officer* perbankan syariah dalam memahami seluk beluk bisnis, serta menyelenggarakan *expo* secara berkala.

Beberapa *event* yang sempat diselenggarakan di Aceh dan berpotensi dimanfaatkan untuk mendorong kerjasama antar pelaku usaha antara lain:

Makanan-Minuman Halal	Industri Busana Muslim
Event	*Event*
- Aceh Internasional Halal Food Festival 2017	- Aceh Islamic Fashion Parade (AIFP)
- Entrepreneur Kopi Gayo	- Asosiasi Perancang Fashion Aceh (APFA)
Program	- Aceh Hijab Fahion Week
- Aceh Cullinary Festival di Banda Aceh 2018	- Fashion Show Busana Muslim APFA Aceh
- Banda Aceh Coffee Festival di Banda Aceh 2018	Komunitas:
	- Sisterly Community Aceh
	- Hijab Community Aceh
	- Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI)

Inovasi Rekomendasi Kebijakan Pemerintah Daerah

Pergerakan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia banyak didorong oleh inisiatif-inisiatif yang berasal dari masyarakat (*bottom up*). Pendirian Bank Muamalat pada tahun 1991 juga merupakan buah dari perjuangan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa pengusaha Muslim. Setelah beberapa dekade pasca pendirian Bank Muamalat sebagai penanda awal bangkitnya ekonomi berbasis syariah di Indonesia, pertumbuhan perbankan syariah nampaknya menemui stagnasi. Dalam beberapa periode, perkembangan market share perbankan syariah masih belum mampu mencapai sasaran yang diharapkan.

Perkembangan perbankan syariah di Aceh lebih menggembirakan. Dari sisi nominal DPK, *market share* aset dan pembiayaan perbankan syariah di Provinsi Aceh jauh melampaui persentase *market share* nasional. Sebelum adanya konversi, *market share* perbankan syariah Aceh dari sisi nominal DPK, pembiayaan dan aset telah mencapai 10.80%, 10.41%, dan 11.28% (Agustus 2016). Saat ini, *market share* DPK, pembiayaan dan aset telah mencapai 55.13%, 42.35 dan 54.43%. Hal ini merupakan hasil dari kebijakan Pemerintah Provinsi Aceh yang mengkonversi BPD Aceh menjadi BPD Aceh Syariah.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keputusan untuk mengkonversi BPD Aceh merupakan kebijakan strategis Pemerintah dari sisi perbankan yang dapat menjadi contoh bagi pengambilan kebijakan dan/atau program pengembangan ekonomi syariah di Aceh lainnya.

Apabila didukung dengan *political will* yang baik, beberapa kebijakan nasional dimaksud ada yang secara instan direplikasi di tingkat daerah, namun demikian ada pula yang masih memerlukan kajian terlebih dahulu demi menjamin kelancaran proses implementasinya kelak. Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi Aceh dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menempatkan seluruh dana BUMD dan instansi terkait di perbankan syariah,
2. Menghimbau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengkonversi/mendirikan BPR Syariah,
3. Mengalokasikan dana hibah kepada masyarakat untuk pembentukan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah/BMT,
4. Membangun kawasan-kawasan ekonomi dan pelabuhan berbasis syariah,
5. Mendukung pengembangan dan percepatan proses sertifikasi halal bagi produk UMKM,

6. Menjadikan *event* penting provinsi bernuansa syariah, dan dirangkaikan dengan konsep pengembangan pariwisata syariah,
7. Memberikan insentif bagi pengembangan kewirausahaan Islam berbasis industri kreatif,
8. Memberikan proses edukasi keuangan Islam melalui kurikulum pendidikan bermuatan lokal dan melalui gerakan ekonomi berbasis masjid,
9. Memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat agar kredit program yang dialokasikan untuk Aceh hanya disalurkan dalam skema-skema yang seusai dengan syariah,
10. Mengkaji penerbitan instrumen keuangan syariah berbasis wakaf, berbasis proyek, dan berbasis aset dalam rangka memenuhi pembiayaan infrastruktur,
11. Mengawal implementasi Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok - Pokok Syariat Islam, pasal 21 ayat 1-4, dan terus mengembangkan peraturan pendukung berkembangnya lembaga keuangan syariah di Aceh, dsb.

Pengembangan Produk dan Layanan Keuangan Syariah

Perkembangan produk dan layanan perbankan syariah selama 26 tahun terakhir dinilai cukup baik. Inovasi produk bebasis *rahn* dan *ijarah* juga mulai dikembangkan. Namun demikian, keterbatasan modal menyebabkan mayoritas perbankan syariah terjebak dalam BUKU 1 dan BUKU 2, sehingga belum bisa mengembangkan produk/kegiatan usahanya seperti pengembangan uang elektronik, sebagai bank kustodian, dan *trust*. Keterbatasan ini juga menyebabkan perbankan syariah dinilai kurang bersaing dari sisi harga (*pricing*) dan kualitas layanan. Untuk dapat meningkatkan daya saingnya, pengembangan perbankan syariah diharapkan dapat diarahkan kepada beberapa segmen seperti *start up,* usaha mikro-kecil, pembiayaan korporasi dan infrastuktur.

Sistem IT Belum Cukup Handal

Sistem teknologi informasi yang dimiliki oleh mayoritas lembaga keuangan syariah belum cukup canggih bila dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Di era digital saat ini, teknologi yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah diinilai tidak mampu mengakomodir kebutuhan transaksi masyarakat dengan dunia *online*. Sistem teknologi informasi yang *existing* saja terkadang belum cukup handal, masih sering ditemui adanya kesalahan sistem (*error*) dan berbagai keterbatasan fitur. Dengan kondisi ini, lembaga keuangan syariah semakin dihadapkan pada situasi yang tidak kompetitif.

Terbatasnya Sumber Daya Insani yang Berkualitas

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan per Oktober 2017, jumlah tenaga kerja bank umum dan unit usaha syariah diperkirakan mencapai 56,691 orang, dan jumlah tenaga kerja BPR Syariah mencapai 4,578 orang.
Isu mengenai kurangnya sumber daya insani yang berkualitas memang selalu menjadi salah satu tantangan yang perlu dituntaskan bersama. Selain itu, ada kecenderungan bank konvensional mempertahankan SDM terbaiknya, sehingga perbankan syariah diisi dengan karyawan "pilihan kedua". Sumber daya yang berkinerja baik juga cenderung memilih bank konvensional yang dinilai lebih *settle* dalam segala hal, termasuk lebih baik dari sisi remunerasi.

Apabila ini persoalannya, maka para praktisi perbankan syariah dan juga regulator setidaknya memiliki dua pekerjaan rumah. Pertama, pelatihan berkala untuk meningkatkan *knowledge* mengenai seluk beluk ekonomi dan keuangan syariah, termasuk operasional perbankan syariah, perlu terus menerus dijaga. Perbankan syariah tidak boleh irit untuk meningkatkan *skill* karyawan mereka, sehingga alokasi anggaran khusus *training* perlu disusun dengan baik. Kedua, adalah memberikan sentuhan spiritualitas yang lebih intensif bagi para pegawai. Para pegawai terbaik perlu memahami bahwa bekerja di perbankan syariah merupakan bagian dari upaya menyempurnakan iman di bidang keuangan. Bekerja di perbankan syariah merupakan bentuk dakwah Islam sebagai agama yang final dan sempurna. Kedua sisi ini, sisi kompetensi dan spiritualitas, harus diperhatikan secara seimbang agar persoalan keterbatasan sumber daya insani berkualitas dapat diselesaikan.

Terbatasnya Layanan Keuangan/Perbankan Syariah

Di Provinsi Aceh, ada sekitar 11 bank umum syariah dan unit usaha syariah yang telah beroperasi. Beberapa diantaranya BPD Aceh Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mega, dan BTPN Syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (Februari, 2018), perbankan syariah di Aceh (baik Bank Umum Syariah maupun BPR Syariah) memiliki 22 kantor kas, 102 kantor cabang pembantu, 36 kantor cabang. Dari jumlah tersebut, sebaran jaringan kantor BPD Aceh Syariah saat ini memiliki 21 Kantor Kas, 86 Kantor Cabang Pembantu, dan 26 Kantor Cabang. Jumlah BPR Syariah sejak tahun 2013 – 2018 masih memiliki

jumlah yang sama, yaitu 10 BPRS. Selain perbankan, Aceh juga memiliki 15 unit Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)[8].

Kelompok Bank		KPO/KC	KCP/UPS	KK	Total Jaringan Kantor
		HOO/BO	SBO/SSU	CO	
1	Jawa Barat	62	217	25	304
2	DKI Jakarta	73	152	36	261
3	Jawa Timur	43	133	18	194
4	NAD	37	102	22	161
5	Jawa Tengah	38	85	16	139
6	Banten	20	63	8	91
7	Sumatera Utara	25	47	3	75
8	Aceh	12	34	9	55
9	Sumatera Selatan	15	35	1	51
10	Kalimantan Timur	14	33	2	49

Dengan ketersediaan jumlah kantor perbankan syariah tersebut, dapat dikatakan bahwa layanan perbankan syariah di Aceh sudah sangat baik, meskipun masih perlu diperlengkap dengan data ketersediaan infrastruktur pendukung lainnya (seperti ATM, ketersediaan jaringan untuk mengakses *mobile banking,* dll) serta kajian terkait layanan akses keuangan syariah yang dapat memperjelas ada atau tidaknya *gap* pelayanan keuangan syariah diukur dari luas wilayah, perbandingan jumlah penduduk, dll.

Potensi jaringan kantor yang sudah baik dimaksud akan lebih optimal apabila otoritas (BI dan OJK), praktisi perbankan syariah, ulama, dan tokoh masyarakat bersama-sama melakukan edukasi terkait ekonomi dan keuangan syariah. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang berbagai keunggulan perbankan syariah dapat memberikan dorongan yang seimbang dari sisi *demand* (masyarakat), selagi para pemangku kepentingan terus mendorong kualitas dan kuantitas sisi *supply* (perbankan).

Standarisasi Kompetensi Dewan Pengawas Syariah

Proses pengambilan fatwa sebuah produk/layanan keuangan syariah di Indonesia cukup berbeda dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Indonesia memiliki Dewan Syariah Nasional sebagai bagian dari Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang independen dari segala pemangku kepentingan bisnis keuangan syariah. Pengaturan aspek fikih terhadap lolos/tidaknya sebuah produk keuangan syariah di Indonesia juga termasuk lebih ketat dibandingkan negara lainnya. Namun demikian pada aspek praktis di lapangan, masih ada perbedaan kompetensi antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga keuangan syariah. Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah bagaimana pihak otoritas memberikan pelatihan secara berkala untuk menjamin kesetaraan kompetensi dari setiap dewan pengawas syariah.

Dalam hal ini, Bank Indonesia secara tidak langsung memiliki keperluan untuk bersinergi dengan OJK dalam menjaga kualitas Dewan Pengawas Syariah, terutama bagi bank syariah/BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerjanya. Beberapa model pengembangan akad syariah yang mampu memberikan *multiplier effect* kepada masyarakat akan berpotensi diaplikasikan apabila Dewan Pengawas Syariah memahami dengan baik hubungan antara aspek fiqih, aspek bisnis, manajemen risiko, dan juga modifikasi skema-skema pembiayaan.

Apabila Aceh belum memiliki organisasi serupa, maka menurut hemat kami perlu dibentuk ADPASI Aceh. Selain mampu meningkatkan kerjasama dan hubungan baik dengan Otoritas Jasa Keuangan dan perbankan, inisiasi pembentukan ADPASI dapat memperkuat peran ulama dalam memberikan dakwah ekonomi syariah di tengah masyarakat. Sebaliknya, apabila Aceh telah membentuk badan serupa, maka Bank Indonesia dapat mengambil peran dari sisi fasilitasi kerjasama pelatihan/training.

Optimalisasi Potensi *Islamic Social Finance*

Potensi *Islamic social fund* (zakat, infaq, shadaqah dan wakaf) sangat perlu untuk dioptimalkan agar usaha untuk melakukan pemerataan kekayaan/distribusi harta, memperbaiki daya beli masyarakat, serta mampu menjaga kebutuhan primer kaum marginal dapat dilakukan dengan baik. Namun, beberapa hal yang perlu dipahami terkait dengan optimalisasi dana sosial Islam dimaksud adalah terkait dengan perhitungan potensi yang seringkali mengabaikan siapa saja kalangan yang akan menjadi subjek & objek, seberapa besar kesadaran kalangan dimaksud untuk memberikan sebagian hartanya, dan bagaimana faktor lain seperti keterbatasan data, minimnya kompetensi dalam mengelola dana, dll sangat mempengaruhi realisasi dari potensi dimaksud.

Pemerintah Aceh telah memiliki sebuah lembaga khusus untuk mengelola dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS), yaitu Baitul Maal. Baitul Maal telah mengoptimalkan pengumpulan ZIS yang diharapkan memiliki dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Baitul Maal dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui dana ZIS diantaranya melalui pelatihan/kursus keterampilan, penyediaan peralatan kerja, pembangunan/rehab rumah fakir miskin, penyediaan modal usaha tanpa bunga, beasiswa, dan kegiatan lainnya. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan oleh Baitul Maal terus ditingkatkan melalui kerjasama dengan perbankan baik dalam pengumpulan dan penyaluran dana sosial Islam yang terkumpul, memperkuat basis data muzakki dan mustahiq, serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait guna memperoleh masukan-masukan yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan Baitul Maal.

Pemerintah Aceh kabarnya akan memperkuat peran Baitul Mal dalam penanggulangan kemiskinan, mengingat potensi ZIS yang ada diperkirakan cukup besar, yaitu sekitar Rp 1.4 Triliun. Saat ini, Baitul Maal telah menghimpun hampir Rp 300 miliar/tahun. Angka ini masih dapat ditambah dengan penyetoran zakat yang belum terdata dan dibayar masing-masing muzakki. Secara internal pengurus Baitul Mal masih mengandalkan pendistribusian ZIS secara konsumtif dan karitatif. Persentase program dan kegiaan ZIS yang bersifat pemberdayaan dan produktif masih cukup kecil, sebagaimana kondisi lembaga pengumpul ZIS di tingkat nasional lainnya.

Kepala OJK Banda Aceh

Di antara tantangan utama dalam mengembangkan sektor keuangan syariah di Aceh adalah menyelaraskan pemahaman antara IJK dengan masyarakat terkait sektor keuangan syariah. Sampai dengan saat ini, masih terdapat masyarakat yang beranggapan bahwa sektor keuangan syariah tidak berbeda dengan sektor keuangan konvensional. Sehingga, masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan jasa dari sektor keuangan konvensional akan sulit untuk beralih kepada sektor keuangan syariah. Padahal, jasa yang ditawarkan oleh sektor keuangan syariah tidak lebih sedikit dari jasa yang ditawarkan oleh sektor keuangan konvensional di samping pelaksanaan kegiatan usahanya yang sudah menggunakan akad-akad berdasarkan prinsip syariah. Di sisi lain, masih terdapat masyarakat yang beranggapan bahwa sektor keuangan syariah harus memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat seperti fasilitas pinjaman yang lebih murah dan pemberian bagi hasil dari simpanan yang lebih besar. Pemahaman tersebut perlu diluruskan dengan edukasi yang memadai, karena sektor keuangan syariah merupakan lembaga bisnis yang masih berorientasi profit dan tetap mempertimbangkan kemakmuran masyarakat.

Lampiran

Provinsi Aceh

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Ekonomi Pesantren

No	Nama Pesantren	Deskripsi Program
1	Pesantren Darul Ulum	Pengembangan Sektor Usaha Daur Ulang Sampah, Pertanian Cabai Merah dan INKRAF
2	Pesantren Thalibul Huda	Pengembangan Sektor Usaha Perdagangan
3	Pesantren Bahrul Ulum Diniyah Islamiyah (BUDI) Lamno	Pengembangan Sektor Usaha Pertanian Serai Wangi
4	Pesantren Darun Nizham	Pengembangan Sektor Usaha Pertanian Budidaya Ubi/Singkong

Daftar Usaha-Usaha Syariah yang Dikelola Pondok Pesantren

No.	Nama Pesantren	Lokasi Pesantren	Unit Usaha	Deskripsi
1	Darul Ulum	Banda Aceh	Percetakan	Fasilitasi pendirian unit usaha percetakan dengan pemberian alat-alat percetakan yang menunjang proses produksi barang-barang seperti plakat, kaos, percetakan sablon, mug sablon dsb.
2	Babul Maghfirah	Aceh Besar	Pertanian, Peternakan Ayam Petelur, dan Pertanian Hidroponik	Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang agro, yang didukung dengan pemberian peralatan pertanian berupa mesin *hand tractor*, lori angkut, mesin pompa, dan mesin penyalur air.
3	Thalibul Huda	Aceh Besar	Koperasi-Mart	Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang perdagangan berupa swalayan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari santri dan masyarakat di sekitar pesantren. Pendirian usaha ini diperkuat dengan pemberian bantuan peralatan dan perlengkapan penunjang toko.
4	Al Munawwarah	Pidie Jaya	Koperasi-Mart	Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang perdagangan berupa swalayan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari santri dan masyarakat di sekitar pesantren. Pendirian

No.	Nama Pesantren	Lokasi Pesantren	Unit Usaha	Deskripsi
				usaha ini diperkuat dengan pemberian bantuan peralatan dan perlengkapan penunjang toko.
5	Jabal Nur Jadid	Aceh Selatan	Perdagangan	Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang perdagangan berupa jasa isi ulang air minum yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari santri dan masyarakat di sekitar pesantren. Pendirian usaha ini diperkuat dengan pemberian bantuan peralatan dan perlengkapan penunjang beroperasinya usaha dimaksud.
6	Ummul Ayman	Bireun	Perikanan	Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang perikanan berupa budidaya ikan lele yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari santri dan masyarakat di sekitar pesantren. Pendirian usaha ini diperkuat dengan pemberian bantuan pembangunan kolam-kolam ikan.
7	Darussalam	Aceh Selatan	Koperasi-Mart	Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang perdagangan berupa swalayan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari santri dan masyarakat di sekitar pesantren. Pendirian usaha ini diperkuat dengan pemberian bantuan peralatan dan perlengkapan penunjang toko.
8	Darul Abrar	Aceh Jaya	Koperasi-Mart	Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang perdagangan berupa swalayan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari santri dan masyarakat di sekitar pesantren. Pendirian usaha ini diperkuat dengan pemberian bantuan peralatan dan perlengkapan penunjang toko.
9	Darun Nizham	Aceh Jaya	Pertanian Singkong	Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang pertanian berupa budidaya ubi/singkong. Pendirian usaha ini diperkuat dengan pemberian bantuan alat pertanian, pembangunan sarana pertanian dan saprodi.
10	Bahrul Ulum Diniyah Islamiyah (BUDI) Lamno	Aceh Jaya	Pertanian Serai Wangi	Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang pertanian berupa budidaya serai wangi. Pendirian usaha ini diperkuat dengan pemberian bantuan alat pertanian, pembangunan sarana pertanian dan saprodi.
11	Bustanul Mualimin Al-Munawwarah	Pidie Jaya	Intergrated Farming (Peternakan Ayam dan Perikanan)	Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang peternakan berupa budidaya ayam dan ikan lele yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari santri dan masyarakat di sekitar pesantren. Pendirian usaha ini diperkuat dengan

No.	Nama Pesantren	Lokasi Pesantren	Unit Usaha	Deskripsi
				pemberian bantuan pembangunan infrastruktur penunjang peternakan/perikanan.
12	Darul Qur'an	Aceh Besar	Perdagangan (Mart)	Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang perdagangan berupa swalayan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari santri dan masyarakat di sekitar pesantren. Pendirian usaha ini diperkuat dengan pemberian bantuan peralatan dan perlengkapan penunjang toko.
13	Darussa'adah	Pidie Jaya	BMT - Lembaga Keuangan Pesantren	Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang keuangan berupa Baitul Maal wat Tamwil yang dapat mendukung tersedianya akses keuangan Syariah di lingkungan pesantren. Pendirian usaha ini diperkuat dengan pemberian bantuan peralatan dan perlengkapan penunjang BMT.
14	Safinatussalamah	Aceh Singkil	Perdagangan (Mart)	Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang perdagangan berupa swalayan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari santri dan masyarakat di sekitar pesantren. Pendirian usaha ini diperkuat dengan pemberian bantuan peralatan dan perlengkapan penunjang toko.
15	Gontor 10	Aceh Besar	Pertanian Jagung	Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang pertanian berupa penanaman jagung di lahan pesantren yang dapat dimanfaatkan/dijual kepada masyarakat di sekitar pesantren. Pendirian usaha ini diperkuat dengan pemberian bantuan berupa prasarana (seperti: pagar), dan olah lahan (pembuatan bedeng, pembersihan lahan, dsb) di lahan seluas 2 hektar.

Provinsi
Sumatera Barat

Sekilas
tentang Ekonomi Syariah di Provinsi Sumatera Barat

Peluang pengembangan ekonomi syariah di Provinsi Sumatera Barat sangat besar mengingat 98 persen penduduknya adalah Muslim. Dengan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" prinsip ekonomi Syariah sangat sejalan dengan kearifan lokal yang di anut masyarakat Sumatera Barat. Geliat ekonomi syariah di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari sektor keuangan mikro syariah dengan maraknya pembentukan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang mendapatkan dukungan tidak hanya dari Pemerintah daerah namun juga dari segenap lapisan masyarakat Sumatera Barat. Keputusan mengkonversi Bank BPD Sumatera Barat menjadi Bank Nagari Syariah oleh pemegang saham pada RUPS tahun 2019 menjadi momentum yang sangat baik dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumatera Barat.

Sementara di sektor Industri Halal Sumatera Barat juga memiliki potensi untuk pariwisata ramah Muslim karena beragamnya objek wisata dengan keindahan alamnya, seperti daerah pesisir, bukit, dan alam yang hijau serta telah masuk ke dalam destinasi halal yang tercantum dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Ripparnas) yang dicanangkan Pemerintah. Jika dilihat dari kondisi masyarakat beserta potensi daerahnya, Sumatera Barat memiliki peluang untuk mengembangkan industri halal dibidang makanan/kuliner, UMKM, fesyen Muslim dan pertanian. Hal ini sejalan dengan fokus Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan mengembangkan agribisnis, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM,dan investasi.

Regulasi Tingkat Daerah
di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah

Peraturan Daerah terkait Industri Halal	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata ramah Muslim
Peraturan Daerah terkait Keuangan Syariah	Peraturan Daerah Tentang Konversi Bank Nagari (dalam tahap finalisasi)
Peraturan Gubernur terkait Pariwisata ramah Muslim	Sudah disahkan (dalam tahap finalisasi)
Peraturan Gubernur terkait Fesyen Muslim	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat

Rencana Pemerintah Daerah
di Sektor Ekonomi Syariah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 di Provinsi Sumatera Barat memfokuskan pada "Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani & Sejahtera" dengan 5 misi utama yaitu:

- Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah *"Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"*
- Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional
- Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat,beriman, berkarakter,dan berkualitas tinggi
- Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah
- Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Inflasi		Tingkat Pengangguran		Tingkat Kemiskinan		Konsumsi RT		Konsumsi Pemerintah		Investasi		Ekspor		Impor	
2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
5,14%	5,05%	2,60%	1,66%	5,55%	5,33%	6,55%	6,29%	4,70%	4,69%	4,63%	5,10%	3,29%	4,96%	-14,05%	-8,52%	0,51%	-14,47%

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Penekanan dan skala prioritas pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 secara umum ditujukan pada skala prioritas pembangunan untuk pemantapan landasan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan kepada peningkatan daya saing produk dan hubungan regional terutama dengan provinsi tetangga. Daya saing produk Sumatera Barat semakin kuat karena meningkatnya produktifitas, kualitas produk dan efisiensi usaha akibat dari penggunaan teknologi maju sehingga kesejahteraan petani, peternak dan nelayan semakin membaik dan diharapkan dalam waktu bersamaan, sektor pariwisata dan industri kecil lainnya dapat berkembang dengan lebih baik

4 Program Unggulan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat 2018-2023

- Kedaulatan pangan
- Kedaulatan Energi
- Kemaritiman dan Kelautan
- Pariwisata dan Industri.

Isu Strategis RPJMD Sumatera Barat 5 tahun ke depan

- Pembangunan Mental dan Peningkatan Pengamalan Nilai-nilai Adat dan Agama
- Penanganan Bencana Alam
- Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah
- Peningkatan Infrastruktur
- Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik
- Pengurangan Pengangguran dan Peningkatan Kualitas SDM
- Pemberdayaan UMKM dan Koperasi
- Peningkatan Ketahanan Pangan
- Globalisasi dan Peningkatan Daya Saing Daerah
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Rencana Pembangunan Ekonomi Syariah di Provinsi Sumatera Barat

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 di Provinsi Sumatera Barat bertujuan sebagai berikut:

- Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan disertai dengan penguatan kelembagaan agama dan adat.
- Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme; Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel; serta meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif, dan partisipatif
- Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas dan berkarakter serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter; Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat; Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan tepat guna; serta meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak
- Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan disertai dengan peningkatan produksi danketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan peningkatan kesejahteraan petani; Menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya serta menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal
- Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah disertai dengan pelaksanaan Tata Ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan peningkatan kualitas Kawasan konservasi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

Sektor Pariwisata Ramah Muslim	Sektor Makanan dan Produk Halal
▪ Menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama ▪ Mengembangkan pariwisata berbasis keunggulan alam, budaya, kuliner, kearifan lokal khususnya pariwisata ramah Muslim dan nuansa Islami. ▪ Membenahi destinasi utama dan pengelolaan serta kualitas sarana dan prasarana pariwisata khususnya pariwisata ramah Muslim.	▪ Bimbingan teknis cara pengelolaan makanan yang *halal* dan *thoyyib* (baik) seperti GMP, CPPOB, HACCP ▪ Mendorong pemilik rumah makan dan hotel di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat untuk memenuhi sertifikasi halal ▪ Meningkatkan Perlindungan Konsumen melalui pembinaan terhadap sektor makanan dan minuman melalui pengawasan terhadap barang beredar di pasaran dan peningkatan konsumen cerdas
Sektor Fesyen Muslim	**Sektor Keuangan Syariah (Komersial & Sosial)**
▪ Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, khususnya Fesyen Muslim ▪ Pelatihan diversifikasi produk busana Muslim ▪ Peningkatan promosi produk fesyen Muslim melalui pameran dalam dan luar negeri	▪ Melakukan penguatan kelembagaan, transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan zakat ▪ Meningkatkan penghimpunan dan penyaluran serta pemanfaatan dana zakat, infak, wakaf, sedekah yang tepat sasaran ▪ Meningkatkan sinergitas pendistribusian zakat antar lembaga pengelola zakat

Program Pemerintah Daerah
di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah

Sektor Industri Halal

Program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Sektor industri halal unggulan yang akan diprioritaskan pengembangannya adalah sektor makanan minuman, pariwisata, dan fesyen. Selanjutnya, Peraturan Gubernur terkait ekonomi syariah akan menjadi landasan hukum untuk Kabupaten/Kota mengembangkan potensi ekonomi syariah.

Program Pendukung Sektor Industri Halal

Makanan dan Minuman halal	▪ Pelatihan bimbingan teknis cara pengelolaan makanan dan minuman halal yang baik seperti GMP, CPPOB, HACCP
Fesyen Muslim	▪ Pelatihan Busana Muslim dengan menggunakan bahan khas daerah Sumatera Barat seperti tenun, sulaman, border ▪ Pelatihan diversifikasi produk busana Muslim
Pariwisata ramah Muslim	Pelaksanaan event-event untuk sosialisasi untuk pemangku kepentingan di sektor pariwisata ramah Muslim

Jumlah Kegiatan Syariah/Halal

	Jumlah Event Produk Daerah	Jumlah Event Produk Halal/Syariah/Islami
Makanan dan Minuman	26 Event (Dalam dan Luar Negeri)	2 Event
Fesyen		2 Event
Pariwisata		2 Event

Sentra Sektor Industri Halal

Makanan dan Minuman Halal	Fesyen Muslim
Sentra sektor makanan minuman halal direncanakan di 19 kabupaten/kota	Sentra sektor makanan minuman halal direncanakan di 19 kabupaten/kota

Penetapan Daerah Pariwisata Ramah Muslim

Tahap	Daftar Desa/Kabupaten/Kota Wisata ramah Muslim
Sudah ada	-
Dalam tahap perencanaan	Kota Padang Panjang

Program Pendorong Pariwisata Ramah Muslim

Program pemerintah daerah dalam mendorong industri Pariwisata ramah Muslim yaitu:

a. Menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Pariwisata ramah Muslim
b. Pelaksanaan Event-Event Ekonomi Kreatif bernuansa Halal
c. Pembuatan Leaflet Pariwisata ramah Muslim

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pendukung Sektor Industri Halal

- Program pelatihan sertfikasi halal kepada 15 UMKM Sektor Kuliner dan fasilitasi sertifikasi Halal kepada klaster Sapi Perah Binaan
- Fasilitasi antara UMKM Syariah dengan Pondok Pesantren dalam bentuk Kerjasama penjualan produk unit usaha misalnya antara UMKM Syariah Rendang Kokoci dengan Ponpes Modern Al Kautsar
- Program *coaching*/pembekalan kepada 11 UMKM di sektor Makanan/minuman dan 9 UMKM sektor fashion yang terpilih melalui seleksi Industri Kreatif Syariah (IKRA) tahun 2018.
- Mengikuti Event Festival Ekonomi Syariah dan ISEF 2019 untuk kampnaye dan memperluas pemasaran industry syariah
- Mengikutsertakan salah satu UMKM Halal (*Rendang Katuju*) binaan BI Kantor Perwakilan Sumatera Barat dalam kegiatan Indonesia Halal Economy Investment Forum 2019 (IHEIF-2019) di Jeddah, Arab Saudi serta Indonesia Syariah Economic Festival 2019 (ISEF 2019) di Jakarta, Indonesia yang menghasilkan kesepakatan investasi dengan Investor maupun kesepakatan sebagai pemasok rendang untuk musim haji 2020
- Program pelatihan yang lebih mendalam/spesifik (*deep-coaching)* terhadap UMKM Syariah pilihan di Bandung dan Jakarta.
- Melakukan rencana pelaksanaan event IKRA 2020 dengan target UMKM sektor makanan/minuman halal dan fesyen Muslim

Sektor UMKM dan Ekonomi Pesantren

Program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Program Kemitraan UMKM dan Pengusaha Besar

Tahap	Daftar Program Kemitraan di peringkat Desa/Kabupaten/Kota
Sudah ada	▪ Pengembangan UMKM kerajinan unggulan Sumbar ▪ Peningkatan akses pembiayaan UMKM ke mitra perbankan dan lembaga non-bank (IKNB) ▪ Pembuatan buku data base UMKM unggulan Sumbar ▪ Peningkatan kapasitas kewirausahaan ▪ Pengadaan sarana dan prasarana UMKM ▪ Pengembangan kemitraan produk UMKM binaan Pemprov Sumbar ▪ Partisipasi promosi & produk UMKM ▪ Sosialisasi pendafaran merek dan sertifikat halal dan PIRT ▪ Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Melalui Bimbingan ▪ Teknis Peningkatan Usaha dengan nara sumber terkait ▪ Perkuatan Produk UMKM melaui Bimbingan Teknis ▪ Standarisasi Produk, Fasilitasi Kemasan, Label dan Paper ▪ Fasilitasi Pendaftaran Merek Dagang ke Kemenhumham dan Halal ke LPOM

Program Pemberdayaan UMKM

Sektor	Daftar Program Pendampingan
Makanan dan minuman halal Fesyen Muslim Pariwisata ramah Muslim	1) Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM 2) Program Pengembangan Wirausaha Pemula 3) Program Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM 4) Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan UMKM Sumatera Barat

Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	2017	2018	2019
UMKM mendapat pendampingan	212 Koperasi Syariah 123 UMKM Halal	212 Koperasi Syariah 362 UMKM Halal	318 Koperasi Syariah 45 UMKM Halal

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Ekonomi Pesantren

Jumlah Pesantren	Program Pengembangan Ekonomi (*Lampiran*)
4	4
▪ Pesantren Perguruan Diniyyah Puteri, Kota Padang Panjang ▪ Pesantren Modern Al Kautsar, Kabupaten 50 Kota ▪ Pondok Pesantren Waqaf Ar Risalah, Kota Padang ▪ Pondok Pesantren Sumatra Thawalib Parabek, Kabupaten Agam	▪ Pada tahun 2019, kegiatan yang dilaksanakan terkait pengembangan kemandirian ekonomi pesantren Perguruan Diniyyah Puteri, kota Padang Panjang berupa bantuan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) berupa 2 unit mesin laundry untuk meningkatkan kapasitas unit usaha Zam-zam Laundry. Selain itu diadakan juga penandatanganan Kerjasama Program Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren Modern Al Kautsar di Kabupaten 50 kota. ▪ Pendampingan kepada unit usaha Fashion Diniyyah berupa peninjauan atas rekomendasi hasil pendampingan tahun sebelumnya, antara lain rencana produk baru, target produksi, dan rencana pemasaran/ penguatan branding ▪ Program pendampingan terakit pencatatan laporan keuangan dan pemberian bantuan berupa sarana produksi untuk mendirikan unit usaha pengolahan air minum isi ulang, laundry, barbershop dan jasa fotocopy di Pesantren Modern Al Kautsar, Kabupaten 50 Kota. ▪ Pada tahun 2020 melakukan penjajakan dalam rangka memperluas Kerjasama pengembangan kemandirian ekonomi (catering) kepada Pondok Pesantren Waqaf Ar Risalah, Kota Padang dan Pondok Pesantren Sumatra Thawalib Parabek, Kabupaten Agam

Sektor Keuangan Syariah

Program Otoritas Jasa Keuangan (Provinsi)

Sub-sektor	Detil Program
Perbankan Syariah	▪ Mendukung perkembangan Perbankan Syariah melalui pemberian izin pembukaan kantor cabang Syariah Bukit Tinggi dan kantor cabang Syariah Batu Sangkar PT BPD Sumatera Barat serta Kantor cabang Pembantu Syariah Bukit Tinggi PT Bank Tabungan Negara ▪ Melakukan Langkah strategis untuk memperluas market share perbankan Syariah serta memberikan edukasi pemahaman terhadap Perbankan Syariah kepada

Sub-sektor	Detil Program
	Perbankan Konvensional terutama BPR di wilayah Sumatera, sehingga atas hal tersebut BPR berinisiatif melakukan konversi menjadi BPRS ▪ Menyelenggarakan event-event terkait sosialisasi yang diadakan bersama-sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Barat misalnya dialog Publik Ekonomi Syariah "Pengembangan Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Provinsi Sumatera Barat" dan "Optimalisasi Peran Pemerintah dalam mendukung Konversi Bank Nagari" ▪ Memperluas Pengembangan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan cara: a. Mendorong Pengembangan Industri Halal Unggulan di Indonesia serta turut serta dalam FGD yang membahas pariwisata ramah Muslim di Sumatera Barat b. Mendorong lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan skala usaha dan adopsi teknologi c. Memperkuat sinergi antara pelaku industri halal dengan industri jasa keuangan dan stakeholder terkait lainnya d. Mendorong dan memfasilitasi proses konversi BPR Konvensional di Provinsi Sumatera Barat menjadi BPR Syariah, antara lain PT BPR Sungai Puar dan PT BPR Jam Gadang yang saat ini sedang dalam proses konversi serta PT BPR Khatulistiwa Bonjol yang saat ini telah mengajukan permohonan konversi. e. Mendorong BPRS di Sumatera Barat untuk melaksanakan operasional berbasis Teknologi Sistem Informasi. Sehingga nasabah dapat merasakan kenyamanan yang sama dalam pelayanan baik operasional dan jasa teknologi dengan bank konvensional yang telah terlebih dahulu menggunakan IT sebagai basis operasionalnya. f. Bekerja sama dengan pemerintah daerah, Asbisindo, MUI, MES, media massa, serta elemen terkait untuk meningkatkan literasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi terkait perbankan syariah dan ekonomi syariah. Sehingga, diharapkan dapat meningkatkan transaksi syariah di masyarakat baik melalui perbankan syariah maupun lembaga jasa keuangan Syariah lainnya.
Bank Pembangunan Daerah	▪ Program pengawasan yang dilakukan OJK Provinsi Sumatera Barat terhadap PT. BPD Sumbar yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai salah satu alternatif bagi masyarakat dalam menyimpan dana maupun mendapatkan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah ▪ Mendorong para pemegang saham untuk melakukan penguatan terhadap UUS PT BPD Sumbar agar animo masyarakat Provinsi Sumatera Barat untuk dapat bertransaksi Syariah dapat difasilitasi oleh PT. BPD Sumatera Barat. ▪ Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Bank, Pemegang saham mengambil keputusan untuk melakukan konversi dari bank konvensional menjadi bank Syariah untuk mengoptimalkan pelayanan Syariah dan penggunaan kantor di seluruh jaringan kantor PT. BPD Sumatera Barat. Sehingga OJK terus melakukan pendampingan dan memfasilitasi konsultasi dan diskusi proses proses serta kajian dan hal-hal yang perlu dilakukan oleh Bank agar konversi dapat berjalan dengan baik. ▪ OJK Provinsi Sumatera Barat juga turut mendorong dan mengawal pengembangan produk UUS PT BPD Sumbar dan saat ini telah mengajukan permohonan sebagai penyalur KUR Syariah yang sedang dalam proses persetujuan oleh pengawas dan telah dikoordinasikan dengan PIC Kemenko Perekonomian bahwa secara parallel sedang disiapkan Sistem Informasi.

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Keuangan Syariah

- Meluncurkan sistem layanan pembayaran non-tunai melalui QRIS untuk pembayaran zakat, infak dan sedekah (ZIS) untuk masjid Raya Sumatera Barat dan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat. Dimana sejauh ini telah ada sebanyak 10 mesjid dan 4 lembaga ZISWAF ynag menggunakan QRIS dalam penggalangan dana ZISWAF di Sumtaera Barat

Sektor Keuangan Mikro Syariah

Program Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Program Pendampingan, Pengawasan, dan Pengembangan Koperasi Syariah (KSPPS)

Program	Institusi Keuangan Mikro Syariah
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	▪ Pembinaan kelembagaan koperasi ▪ Peningkatan pelayanan izin usaha simpan pinjam koperasi ▪ Pembenahan koperasi yang tidak aktif ▪ Pembinaan dan pelaksanaan penilaian kesehatan Usaha simpan pinjam koperasi ▪ Review penerapan dan sanksi bagi koperasi ▪ Pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan usaha simpan pinjam koperasi ▪ Pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan kelembagaankoperasi ▪ Pelatihan -pelatihan bagi Koperasi Syariah
Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi	▪ Peningkatan peran usaha simpan pinjam koperasi pola syariah ▪ Bimbingan Teknis Peninqkatan Permodalan ▪ Pelatihan dan Uji Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS dan USPPS Koperasi ▪ Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi pengelola KSP/KSPPS melalui SKKNI ▪ Pelatihan SOM dan SOP KSPPS dan USPPS Koperasi ▪ Klinik Syariah sebagai wadah konsultasi bagi KSPPS dan USPPS Koperasi di PLUT KUKM Dungan 5 Tim Konsultansi KSPPS dan USPPS Koperasi (Bidang Syariah Muammalah, IT dan Akuntansi Syariah). ▪ Melakukan pendampingan bagi koperasi Syariah dalam Penerapan akuntansi keuangan syariah dan Penerapan pelaksanaan akad (sedang mengusahakan proses aplikasi akuntansi keuangan syariah berbasis IT yang seragam) ▪ Uji petik pengawasan KSPPS dan USPPS Koperasi sebanyak 23 Koperasi

Program Otoritas Jasa Keuangan (Provinsi)

Program Pendampingan, Pengawasan, dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

- Kegiatan Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat tahun 2019:
  - Melakukan pendampingan dan sosialisasi
  - Melakukan pemeriksaan on-site ke LMKS
- Rencana kegiatan Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat tahun 2020:
  - Melakukan pendampingan dan sosialisasi
  - Melakukan pemeriksaan on site ke LKMS
- Pelatihan diberikan tanggal 26 s.d 28 Agustus 2019 di Kota Padang dengan topik prinsip dasar kredit/pembiayaan yaitu Pengembangan UMKM, Ketentuan terkait LKM dan Laporan Keuangan LKM

Sektor Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Program BAZNAS Provinsi Sumatera Barat

Kategori Program ZIS dan Alokasi BAZNAS Provinsi Sumatera Barat

Kategori	Nama Program	Jumlah Penerima Manfaat (jiwa)	Besar Alokasi Penyaluran (Rp)
Sosial Kemanusiaan	Sosial	4.333	4.218.081.000
Pendidikan	Pendidikan	1.050	5.925.804.901
Kesehatan	Kesehatan	140	663.163.000
Pemberdayaan Ekonomi	Ekonomi	2.800	1.435.860.000
Dakwah	Dakwah & Advokasi	350	138.110.000

Gambaran
Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah

Sektor Industri Halal

Nilai Ekspor Provinsi Sumatera Barat

Sektor	Jumlah Ekspor tahun 2018 (USD)	% Dibandingkan dengan Total Ekspor Non-Migas (tahun 2018)
Makanan dan Minuman	8,509.20	0.53%

Jumlah Usaha/Merk dengan Sertifikat Halal pada Sektor Makanan dan Minuman (Mamin)

Sektor Usaha (Tahun 2018)		Sektor Usaha (Tahun 2019)	
Roti	29	Roti	29
Katering dan Restoran	6	Katering dan Restoran	12
Tepung, Kanji, and produk turunan/olahan	2	Tepung, Kanji, and produk turunan/olahan	3
Es, es krim, dan bahan-bahan pendukung	1	Es, es krim, dan bahan-bahan pendukung	1
Susu dan produk olahan/turunan susu	0	Susu dan produk olahan/turunan susu	0
Makanan olahan, daging dan unggas	24	Makanan olahan, daging dan unggas	24
Makanan olahan ikan	12	Makanan olahan ikan	12
Makanan olahan telur	1	Makanan olahan telur	1
Makanan ringan	1	Makanan ringan	42
Pemanis, bumbu dapur, bumbu penyedap/ pelengkap	42	Pemanis, bumbu dapur, bumbu penyedap/ pelengkap	2
Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	10	Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	10
Semua Usaha Tersertifikasi Halal	129	Semua Usaha Tersertifikasi Halal	136

Sumber: Daftar Belanja Produk Halal LPPOM MUI hingga periode Maret-April-Mei 2019

Kontribusi Sektor Mamin terhadap Perekonomian Provinsi Sumatera Barat

	2019	2018	2017	2016	2015
PDRB (Milliar Rupiah)					
Mamin olahan	9,516.59	10,392.15	9,797.42	9,346.02	8,393.93
Mamin olahan, Base = 2010	7,584.88	8,106,40	-	-	-
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb)	2,620.07	2,346,38	2,112.02	1,868.35	1,615.87
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb), Base = 2010	1,514.47	1,400.13	-	-	-
Pertumbuhan PDRB (%)					
Mamin olahan, Base = 2010	-6.38	6.06	-	-	-
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb), Base = 2010	8.17	8.23	-	-	-

Kontribusi pada PDRB (%)					
Mamin olahan	3.86	4.51	-	-	-
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb)	1.06	1.02	-	-	-

Total Produksi Daging Daerah (Tahun 2018)

Populasi Ternak		Produksi Daging Ternak (ton)	
Sapi Potong	401,094	Sapi	2,0298.94
Sapi Perah	712	Sapi Impor	Belum ada
Kerbau	78,038	Kerbau	2,225.71
Kuda	1,668	Kuda	6.77
Kambing	250,557	Kambing	825.1
Domba	5,572	Domba	34.71
Populasi Unggas		Produksi Daging Unggas (ton)	
Ayam Kampung	3,974,889	Ayam Kampung	4,870.13
Ayam Petelur	11,236,623	Ayam Petelur	7,811.27
Ayam Broiler	65,436,217	Ayam Broiler	71,105.60
Bebek	1,101,263	Bebek	647.58

Skor Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) Tahun 2018 Provinsi Sumatera Barat

Access	57
Communication	55
Environment	73
Services	52
IMTI score	59

Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Provinsi Sumatera Barat

	2018	2017	2016	2015	2014
PDRB (Milliar Rupiah)					
Jasa akomodasi	800	723	662	584	499
Jasa akomodasi, Base = 2010	433	400	378	352	335
Pertumbuhan PDRB (%)					
Jasa akomodasi, Base = 2010	8.25	5.82	7.39	5.07	6.01
Kontribusi pada PDRB (%)					
Jasa akomodasi	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25

Rating untuk Pariwisata Ramah Muslim di Provinsi Sumatera Barat

Skor	Aspek		Skor	Aspek	
Skor Akses	Udara	5	Skor Lingkungan	Kedatangan Turis Muslim	5
	Kereta	3		Jangkauan Wi-Fi	4
	Laut	4		Komitmen terhadap Pariwisata ramah Muslim	2
	Infrastruktur Jalan	4			
Skor Komunikasi	Panduan Pelancong Muslim	3	Skor Jasa	Restoran Halal	5
	Edukasi Pemangku Kepentingan	3		Masjid	5
	Jangkauan Pasar	5		Bandara	5
	Pemandu Tur	5		Hotel	4
	Pemasaran Digital	5		Atraksi	5
			Skor Total		72
			Rata-rata Skor		4,24

NB: data lengkap bisa didapatkan di dalam Laporan Perkembangan Pariwisata ramah Muslim Daerah 2019-2020

Indikator Pariwisata Ramah Muslim Provinsi Sumatera Barat

Indikator	Skor/Nilai	Keterangan
Akses	Cukup baik	Terdapat akses udaral, akses laut dan kondisi jalan yang baik, tapi belum memiliki akses/jalur kereta api
Akses Udara	Baik	Terdapat bandara internasional dan domestik
Bandara International	1	
Bandara Domestik	2	
Akses Kereta	-	Belum memiliki akses/jalur kereta api
Akses Laut	Baik	Terdapat pelabuhan
Terminal Kapal Pesiar	1	
Infrastruktur Jalan	Baik	Mayoritas Kondisi jalan dalam kondisi baik
Jalan Nasional/Negara	934.55	km
Jalan Provinsi	1,484.44 km	km
Komunikasi	Baik	Memiliki panduan pengunjung, edukasi pemangku kepentingan, kegiatan pendukung jangkauan pasar, pemandu pelancong, dan melakukan pemasaran digital
Panduan bagi Pelancong Muslim	Ada	Hanya terdapat buku panduan dalam Bahasa Inggris

Indikator	Skor/Nilai	Keterangan
Eksemplar Bahasa Inggris	Ada	Tidak terinfo berapa jumlah jenis eksemplar
Eksemplar Bahasa Arab	-	
Edukasi Pemangku Kepentingan	Cukup Baik	Terdapat workshop pariwisata ramah Muslim
Workshop	2	
Jangkauan Pasar	Baik	Terdapat beberapa kegiatan terkait pariwisata ramah Muslim, terutama festival ramah Muslim
Konferensi/*Event*/Expo	2	
Kegiatan B2B	6	
Festival Ramah Muslim	4	Minangkabau Fashion Festival. Nusantara Marandang, Sumarak Syawal, Festival Tabuik
Pameran	3	Minangkabau Fashion Festival. Nusantara Marandang, Sumarak Syawal, Festival Tabuik
Pemandu Tur	Cukup Baik	Terdapat pemandu tur yang menguasai Bahasa Arab dan Bahasa Inggris
Bahasa Arab	5	
Bahasa Inggris	350	
Digital Marketing	Baik	Terdapat beberapa platform digital marketing lainnya
Apps	2	Google apps
Website	-	Web promosi wisata ramah Muslim
Media Sosial	Ada	Google plus,Facebook, Twitter, Instagram, Youtube
Lingkungan	Baik	Banyak wisatawan yang datang ke Sumatera barat. Cakupan jaringan wifi-nya juga bagus. Sumatera Barat memiliki komitmen untuk mengembangan pariwisata ramah Muslim
Kedatangan Turis	Baik	Terdapat wisatawan domestik dan mancanegara, namun turis mancanegara relatif lebih sedikit
Wisatawan Domestik	8,073,070	
Wisatawan Mancanegara	57,638	74% nya Wisatawan Muslim

Indikator	Skor/Nilai	Keterangan
Jangkauan Wifi	Baik	Wi-fi di area bandara sangat memadai dan memiliki akses di semua lini
Komitmen terhadap Halal Tourism	Baik	setiap pemangku kepentingan industri pariwisata harus menyiapkan fasilitas dan sarana pariwisata ramah Muslim
Jasa	Baik	Sebagian besar kebutuhan industri pariwisata ramah Muslim dan hal-hal yang fundamental seperti restoran halal, masjid, bandara, hotel, dan atraksi sudah dimiliki dengan kualitas yang baik
Restoran Halal	Baik	Restoran dan outlet bersertifikasi halal sudah banyak walaupun masih ada yang *self-claimed*
Restoran bersertifikat halal	20	
Outlet bersertifikat halal	57	
Restoran/ Rumah makan halal (Self-claimed)	1,300	
Masjid	Baik	Terdapat banyak masjid dan mushala
Masjid	2,233	
Mushala	52	Biasanya terdapat di Destinasi Daya Tarik Wisata Unggulan
Bandara	Baik	
Mushala	4	3 mushalla di area transit, 1 Mushala pada area umum
Tempat Wudhu	6	3 di area transit, 3 di area umum
Shalat Jumat	Ada	
Hotel	Baik	Sudah ada hotel dengan dapur bersertifikat halal dan hotel yang tidak menyediakan menu babi dan alkohol
Hotel Syariah	28	Hotel Syariah
Hotel dengan dapur bersertifikat halal	8	Hotel dengan dapur bersertifikat halal
Hotel yang tidak menyediakan menu babi	379	Hotel yang tidak menyediakan menu babi
Atraksi	Baik	banyak destinasi dengan akses mudah dan restoran bersertifikasi halal, dilengkapi dengan toilet dan mushalla yang bersih.
Situs budaya islami	21	
Daya tarik wisata budaya	67	
Daya tarik lokal	122	

Indikator	Skor/Nilai	Keterangan
Lainnya	Ada	Pusat perbelanjaan dengan mushala/masjid yang layak (7 di Padang, 1 di Bukittinggi, 1 di Payakumbuh, 1 di olok, 1 di Dharmasraya, 1 di Pariaman)

Sektor Keuangan Syariah

Indeks Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sumatera Barat

Indeks	Tahun 2016	Tahun 2019
Indeks literasi keuangan Syariah (OJK)	11.6%	17.28%
Indeks inklusi keuangan Syariah (OJK)	7.3%	22.25%
Indeks literasi ekonomi Syariah (BI)	-	14.3%

Profil keuangan Bank BPD Sumatera Barat- UUS (*dalam Miliar Rupiah*)

	2015	2016	2017	2018	2019
Total aset gross	1,275	1,341	1,379	1,456	1,735
Total pembiayaan	1,233	1,292	1,326	1,392	1,510
Total DPK	612	936	1,032	1,145	1,542
Total FDR	201.34%	138.11%	128.53%	121.61%	98.57%
Total NPF	2.36%	2.33%	2.38%	2.28%	2.13%

Profil Industri Perbankan Syariah (BUS) di Sumatera Barat (*dalam Miliar Rupiah*)

	2018	2019
Pembiayaan berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	586.74	582.21
Modal kerja (bukan UMKM)	45.20	84.28
Investasi (UMKM)	314.77	299.38
Investasi (bukan UMKM)	93.26	127.73
Konsumsi	1,455.85	1,753.27
NPF berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	47.09	45.50
Modal kerja (bukan UMKM)	0.88	2.06
Investasi (UMKM)	22.04	23.85
Investasi (bukan UMKM)	2.43	0.53
Konsumsi	34.80	24.09
Total		
Total aset gross	5,288	6,497
Total pembiayaan	3,935	4,625
Total DPK	4,125	5,335
Total FDR	95%	86.69%
Total NPF	4.3%	3.4%

Profil industri perbankan Syariah (UUS) di Sumatera Barat (*dalam Miliar Rupiah*)

	2018	2019
Pembiayaan berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	1,445	1,222
Modal kerja (bukan UMKM)	166	258
Investasi (UMKM)	241	303
Investasi (bukan UMKM)	846	709
Konsumsi	2,708	2,984
NPF berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	160	274
Investasi (UMKM)	46	22
Investasi (bukan UMKM)	10	212
Konsumsi	84	110
Total		
Total aset gross	8,074	9,037
Total pembiayaan	5,404	5,475
Total DPK	6,412	7,298
Total FDR	84.29%	75.01%
Total NPF	300	618

Sektor Keuangan Mikro Syariah

Jumlah LKMS dan BWM yang Mendapatkan Program Pendampingan dan Pengawasan dari OJK

IKMS	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah yang mendapat program pendampingan OJK	1	2
Jumlah yang mendapat program pengawasan OJK	1	2

Profil Fundamental LKMS dan BWM di Bawah Pengawasan OJK

LKMS dan BWM	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah IKMS yang berada di wilayah daerah	1	2
Jumlah anggota IKMS	213	601
Jumlah pegawai IKMS	4	8
Jumlah pegawai yang mempunyai sertifikasi pengelola KSPPS (IKMS)	-	-
Modal sendiri (*dalam ribu rupiah*)	4.2 Juta	4.6 Juta
Jumlah modal luar/pinjaman	-	-
Jumah cadangan koperasi/permodalan (*dalam ribu rupiah)*	-	86,3
Volume usaha (*dalam ribu rupiah)*	438,000	412,414
Sisa Hasil Usaha/SHU (*dalam ribu rupiah*)	1,9	72,9
Total aset (*dalam ribu rupiah*)	4.2 Juta	5.1 Juta

LKMS dan BWM	Tahun 2018	Tahun 2019
Rata-rata pembiayaan IKMS di Wilayah Kerja	0 < n <= 5 jt 100% 1,25 jt < n <= 10 jt 0% 10 jt < n <= 20 jt 0% 20 jt < n <= 50 jt 0% > 50 jt 0%	0 < n <= 5 jt 100% 1,25 jt < n <= 10 jt 0% 10 jt < n <= 20 jt 0% 20 jt < n <= 50 jt 0% > 50 jt 0%
Tingkat kesehatan	Sehat: 1	Sehat: 2

Jumlah IKMS yang Mendapatkan Program Pendampingan dan Pengawasan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

IKMS (KSPPS/USPPS-Koperasi)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah IKMS yang mendapat	50	56	108
Jumlah IKMS yang diawasi oleh Dinas (pengawasan yang dimaksud adalah eek laporan RAT, kunjungan ke IKMS, dsb.)	45	10	32

Profil Fundamental IKMS yang Mendapatkan Program Pendampingan dan Pengawasan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

IKMS (KSPPS/USPPS,BMT, Kopontren, dll)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah IKMS yang berada di wilayah kerja	204	207	225
Jumlah Anggota IKMS	30,556	30,748	35,279
Jumlah Pegawai yang mempunyai sertifikasi pengelola KSPPS (IKMS)	-	-	41
Modal sendiri (*dalam ribu Rupiah*)	77.6 Juta	121.4 Juta	307.2 Juta
Modal luar/pinjaman (*dalam ribu Rupiah*)	79 Juta	109.3 Juta	175.7 Juta
Volume usaha (*dalam ribu Rupiah*)	176.7 Juta	390.2 Juta	453.2 Juta
Sisa Hasil Usaha/SHU (*dalam ribu Rupiah*)	5.9 Juta	30.9 Juta	36.2 Juta
Total aset (*dalam ribu Rupiah*)	156.7 Juta	230.7 Juta	296.6 Juta
Tingkat kesehatan IKMS/Koperasi	Sehat: 3 Cukup Sehat: 0 Dalam pengawasan: 1 Dalam pengawasan khusus: 0	Sehat: 1 Cukup Sehat: 0 Dalam pengawasan: 0 Dalam pengawasan khusus: 0	Sehat: 4 Cukup Sehat: 0 Dalam pengawasan: 1 Dalam pengawasan khusus:

Sektor Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Daftar BAZNAS aktif dan LAZ aktif (Rekomendasi BAZNAS)

19 Baznas aktif & 1 LAZ aktif (Rekomendasi BAZNAS)	Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Kep. Mentawai, Kabupaten Agam, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, KAbupaten Pesisir Selatan, KAbupaten Pasaman, KAbupaten Pasaman Barat, Kabupaten Dharmas Raya, Kabupaten Solok Selatan, Kota Padang, Kota Sawah Lunto, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, Kota Solok, Kota Pariaman dan Perkumpulan LAZ Ar Risalah Charity.

Jumlah Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah (Rp)

Jenis Dana	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Penghimpunan Zakat			
▪ Zakat Fitrah	Belum ada	Belum ada	3.290.000
▪ Zakat Maal/Harta	7.639.425.961	12.805.478.981	19.623.930.980
Penghimpunan Infak			
▪ Infak Bebas	-	9.860.000	28.097.942
▪ Infak Terikat (termasuk CSR dan kurban)	-	-	206.000.000

Jumlah Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (Rp)

Jenis Dana	Tahun 2018	Tahun 2019
Penyaluran Zakat	7.418.607.000	3.210.000
Penyaluran Infak	8.000.000	-

Besar Alokasi Penyaluran Zakat, Infak, Infak Terikat, Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Bidang Program	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Sosial Kemanusiaan	2,786,159,200	3,531,448,000	4,218,081,000
Pendidikan	2,874,361,000	1,876,927,000	5,925,804,901
Kesehatan	549,783,000	340,482,000	663,163,000
Pemberdayaan Ekonomi	1,608,000,000	1,512,900,000	1,435,860,000
Dakwah	271,285,000	156,850,000	138,110,000

Program Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah di Provinsi Sumatera Barat

No	Kategori	Nama Program	Jumlah Penerima Manfaat (Jiwa)	Besar Alokasi Penyaluran (Rp)
1	Sosial Kemanusiaan	Sosial	4,333	4,218,081,000
2	Pendidikan	Pendidikan	1,050	5,925,804,901
3	Kesehatan	Kesehatan	140	663,163,000
4	Pemberdayaan Ekonomi	Ekonomi	2,800	1,435,860,000
5	Dakwah	Dakwah dan Advokasi	350	138,110,000

Indeks Zakat Nasional (IZN) Sumatera Barat

	2018	2019
Indeks Zakat Nasional/IZN (Dimensi Makro)		
Regulasi	0,25	1,00
Dukungan Finansial dari Pemerintah (APBN/APBD) untuk BAZNAS	0	0,23
Jumlah Resmi Lembaga Zakat/OPZ, muzakki, and mustahik	0,75	0,81
Rasio, Jumlah muzakki individual/jumlah rumah tangga di level Provinsi	0	0,44
Rasio, Jumlah dari muzakki institusi/jumlah institusi di level Provinsi	0,25	0,06
Database dari institusi/lembaga zakat yang terdaftar	0,33	0,44
Total Indeks Makro	**0,18**	**0,53**
Indeks Zakat Nasional/IZN (Dimensi Mikro)		
Penghimpunan	0	0,38
Pengelolaan	0,5	0,65
Penyaluran	0,81	0,80
Pelaporan	0,75	0,63
Indeks Kesejahteraan CIBEST	1	0,90
Modifikasi Indeks Pengembangan Manusia (HDI)	0,5	0,44
Kemandirian	0,5	0,52
Institutional	0,49	0,61
Dampak Zakat	0,7	0,64
Total Indeks Mikro	**0,62**	**0,62**

Indeks Skor Literasi dan Pemahaman Zakat Provinsi Sumatera Barat

	2020
Indeks Literasi Zakat	65.94
Indeks Pemahaman Dasar tentang Zakat	52.84
Indeks Pemahaman Lanjutan tentang Zakat	72.99

Indeks Skor Literasi dan Pemahaman Wakaf Provinsi Sumatera Barat

	2020
Indeks Literasi Wakaf	54.95
Indeks Pemahaman Dasar tentang Wakaf	60.92
Indeks Pemahaman Lanjutan tentang Wakaf	43.85

Sektor UMKM dan Ekonomi Pesantren

Jumlah Pesantren dengan usaha-usaha Syariah

4 Pondok Pesantren	8 Usaha-usaha Syariah (*detil di Lampiran*)

Sektor Pendidikan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Perguruan Tinggi yang menyediakan Program Studi Ekonomi dan Keuangan Syariah terkait

Jenjang	Jumlah Universitas tahun 2019	Program Studi tahun 2019		2018		2019	
		Nama Program studi	Jml. Program Studi	Jml. Dosen	Jml. Mahasiswa	Jml. Dosen	Jml. Mahasiswa
Sarjana	9	Akuntansi Syariah	2	8	616	8	563
		Ekonomi Syariah	8	44	5655	44	3450
		Hukum Ekonomi Syariah	4	23	1796	23	673
		Hukum Bisnis Syariah	3	14	1077	14	995
		Manajemen Bisnis Syariah	1	6	214	6	222
		Manajemen Keuangan Syariah	1	6	54	6	33
		Manajemen Zakat dan Wakaf	2	14	265	14	239
		Perbankan Syariah	6	37	5682	37	2608
		Zakat dan Wakaf	1	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
Magister	4	Ekonomi Syariah	4	16	213	16	104
		Hukum Ekonomi Syariah	1	6	38	6	21
Doktoral	-						

Akreditasi Perguruan Tinggi Dan Program Studi Ekonomi Syariah Terkait

Akreditasi	Akreditasi Perguruan Tinggi			Akreditasi Program Studi		
	S1	S2	S3	S1	S2	S3
Akreditasi A	-	-	-	2	-	-
Akreditasi B	5	4	-	12	3	-
Akreditasi C	Belum ada	-	-	3	-	-
Belum Terakreditasi	4	-	-	11	2	-

Peluang Investasi Daerah
untuk Industri Keuangan Syariah

No.	Nama Proyek Investasi	Stakeholders	Sektor	Tahapan Proyek Investasi	Nilai Perkiraan Investasi (*dalam Rupiah*)
1	Industri Minyak Nilam	Pemprov Sumbar	Industri	Dokumen Perencanaan	26.6 Miliar
2	KEK Mandeh	Pemprov Sumbar	Pariwisata	Dokumen Perencanaan	687.7 Miliar
3	Objek Wisata Pantai Aie Manih	Pemprov Sumbar	Pariwisata	Dokumen Perencanaan	168 Miliar
4	PLT Biagas	Pemprov Sumbar	Energi	Dokumen Perencanaan	37.2 Miliar
5	Pulau Tangah	Pemprov Sumbar	Pariwisata	Dokumen Perencanaan	26.7 Miliar
6	The White King Fantasi	Pemprov Sumbar	Pariwisata	Dokumen Perencanaan	93.3 Miliar
7	Pengelolaan Pabrik Cokelat	Pemprov Sumbar	Industri	Dokumen Perencanaan	7.4 Miliar
8	Panorama Ampangan	Pemprov Sumbar	Pariwisata	Dokumen Perencanaan	217 Miliar
9	Pengembangan Objek Wisata Sungai Batang Agam	Pemprov Sumbar	Pariwisata	Dokumen Perencanaan	10 Miliar
10	Sarasah Aja Batimpo	Pemprov Sumbar	Pariwisata	Dokumen Perencanaan	6.6 Miliar
11	Planetarium Equator Bonjol	Pemprov Sumbar	Pariwisata	Dokumen Perencanaan	17.5 Miliar
12	Pengembangan Kawasan Wisata Lembah Harau	Pemprov Sumbar	Pariwisata	Dokumen Perencanaan	406.3 Miliar
13	Kereta Gantung	Pemprov Sumbar	Pariwisata	Dokumen Perencanaan	131.4 Miliar
14	Pembangunan Dermaga Wisata Muara Anai	Pemprov Sumbar	Pariwisata	Dokumen Perencanaan	71.2 Miliar
15	Pembangunan Pabrik Pakan Ikan	Pemprov Sumbar	Industri	Dokumen Perencanaan	2.8 Miliar
16	Pengembangan Kawasan Wisata Danau Kembar (Pembangunan *Rest Area)*	Pemprov Sumbar	Pariwisata	Dokumen Perencanaan	9.3 Miliar
17	Pengembangan Kawasan Wisata Danau Kembar (dermaga)	Pemprov Sumbar	Pariwisata	Dokumen Perencanaan	20.5 Miliar
18	Pengembangan Kawasan Wisata Danau Kembar (panorama)	Pemprov Sumbar	Pariwisata	Dokumen Perencanaan	4.1 Miliar
19	Pengembangan *Hotel/Cottage & Food Court*	Pemprov Sumbar	Pariwisata	Dokumen Perencanaan	15.5 Miliar

Praktik Unik Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Modern Al Kautsar Lima Puluh Kota dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Dr. Rozalinda, M.Ag[9]

Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang operasionalnya tunduk kepada Undang-Undang No. 1 Tahn 2013 Tentang Lembaga Keuanganu Mikro, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 61/ POJK.05/2015 Tentang Perizinan dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh PINBUK. Secara kelembagaan BWM berbadan hukum koperasi. Lembaga ini mendapat izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keberadaan BWM merupakan komitmen pemerintah untuk terus memperluas penyediaan akses keuangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat menengah dan kecil. BWM didirikan untuk memberikan solusi bagi masyarakat di lingkungan pondok pesantren yang kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan.

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Sistem operasional seluruh BWM yang ada di seluruh Indonesia semuanya sama karena tunduk pada peraturan yang sama, disiapkan dan dilatih serta diawasi oleh lembaga yang sama. Lembaga ini mempunyai program pemberdayaan masyarakat di lingkungan pondok pesantren. Fungsi lembaga dalam hal ini adalah menyalurkan dana pembiayaan kepada masyarakat miskin produktif khususnya di sekitar pesantren.

Dekatnya hubungan Pondok Pesantren Modern Al Kautsar dengan masyarakat sekitarnya menjadi dasar bagi pemerintah menjadikan pesantren ini sebagai lembaga pengelola BWM. PPM Al Kautsar dipandang mempunyai potensi sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menyalurkan pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro, di samping tugas utamanya sebagai lembaga pendidikan Islam. Keterlibatan pesantren ini secara aktif dalam pemberdayaan masyarakat di Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat merupakan wujud dari komitmen pesantren terhadap masyarakat sekitarnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pondok pesantren itu sendiri.

Dalam menjalankan bisnisnya, LKMS Bank Wakaf Mikro PPM Al Kautsar mendapatkan suntikan dana awal LAZNAS BSM sebesar Rp250.000,00 yang digunakan untuk biaya pengadaan sarana dan prasarana kantor. Kemudian, mendapatkan suntikan dana lagi sebesar Rp4.000.000.000,- yang digunakan untuk menjalankan kegiatan BWM. Dana Rp4.000.000.000,- tersebut tidak semuanya digunakan untuk kegiatan BWM,

[9] Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang

Rp3.000.000.000,00.- diinvestasikan dalam bentuk deposito mudharabah di BSM sebagai dana abadi. (Bagi hasil yang diterima digunakan untuk biaya operasional Bank wakaf mikro seperti gaji, biaya listrik ATK dan sebagainya). Sementara itu, Rp1.000.000.000,00.- digunakan untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Dana sebesar Rp1.000.000.000,00.-ini dipecah menjadi Rp100.000.000,00.- sebagai dana likuid pembiayaan. Sedangkan Rp900.000.000,00.- disimpan dalam bentuk bilyet deposito yang dapat diambil apabila Rp100.000.000,00.- pertama telah tersalurkan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sembilan bilyet deposito dapat dicairkan Rp100.000.000,00.- berikutnya ketika pembiayaan putaran pertama telah meningkat dari 1 juta ke pembiayaan 1,5 juta atau 2 juta.

Barat. LKMS BWM Al Kautsar merupakan BWM pertama yang berdiri di Sumatera. BWM ini didirikan oleh 20 orang pendiri yang berada dalam lingkungan Pondok Pesantren Muhammadiyah (PPM) PM Al-Kautsar. BWM Al Kautsar masuk ke dalam pembentukan BWM tahap ke 3 dari 10 BWM yang dibentuk pada tahun 2018. Secara resmi BWM Al Kautsar dibentuk pada tanggal 27 April 2018. Lembaga keuangan ini memperoleh pengesahan badan hukum koperasi dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tanggal 3 Mei 2018 dengan nomor BH 008304/BH/M.KUKM.2/V/2018. Kemudian, memperoleh izin usaha LKMS dari Otoritas Jasa keuangan pada tanggal 3 Mei 2018 dengan nomor KEP-61/KO.052/2018. LKMS yang diresmikan pada tanggal 8 Juni 2018 ini ini telah memiliki nasabah lebih dari 415 orang yang terdiri dari 3 HALMI (Halaqah Mingguan) 23 KUMPI (Kumpulan Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia). Model Pemberdayaan BWM Al-Kautsar dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

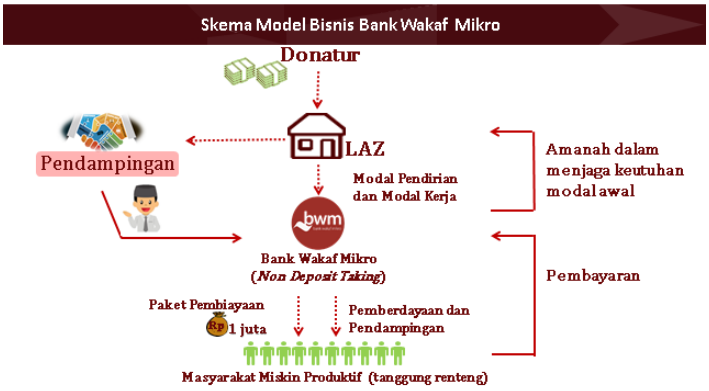

BWM Al-Kautsar memiliki karakteristik unik yang menjadikan lembaga ini menjadi role model pemberdayaan masyarakat miskin produktif. BWM tidak diperkenankan menghimpun dan mengelola dana baik tabungan atau simpanan dari masyarakat (non deposit taking), menyediakan pendampingan dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah dengan segmen pasar utama perempuan miskin potensial produktif sekitar pesantren. Ibu ibu yang kurang mampu secara ekonomi, memiliki usaha kecil dan punya kemauan untuk mengembangkan usahanya yang tinggal di sekitar pondok pesantren dengan radius 5 kilometer dari lokasi BWM, mempunyai komitmen untuk mengikuti prosedur dan program BWM. Penyaluran pembiayaan pada LKMS ini menggunakan pendekatan kelompok dengan sistem tanggung renteng. Para calon nasabah akan mendapat pelatihan dasar terlebih dahulu sebelum diberikan pembiayaan. Nasabah akan diberikan pendampingan secara berkala mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga disertai pendidikan agama.

1. Proses Pendampingan sebelum pencarian pembiayaan

Dalam menyalurkan pembiayaan BWM melakukan: Survey keadaan calon nasabah, kemudian malakukan Uji kelayakan. Indikator penilaian kelayakan calon nasabah adalah: Indeks Rumah, Indeks Pendapatan, Indeks Asset dan Indeks Pemilikan Tanah. Calon anggota yang memenuhi kriteria harus mencari empat orang anggota untuk membentuk kumpulan sementara (calon kumpulan). Calon kumpulan ini yang dapat disetujui untuk mengikuti Pra Pelatihan Wajib Kelompok (Pra-PWK) dan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK).

Pertemuan Pra Pelatihan Wajib Kelompok dilakukan memantapkan tekad dan minat untuk mengikuti program BWM dan membentuk Kelompok Usaha Mikro Pesantren Indonesia (KUMPI), memperkenalkan mekanisme penyaluran pembiayaan. KUMPI merupakan sarana perantara (chanelling) agar anggota mendapatkan modal pembiayaan dari BWM. Dalam satu KUMPI terdapat 5 (lima) orang nasabah.

BWM melayani pembiayaan secara kelompok, dengan sistem pembiayaan tanggung renteng, untuk itu dibentuk KUMPI. Di BWM hanya kelompok yang berhak mendapatkan pinjaman dan menjamin bayaran kembali pinjaman anggota. KUMPI memberikan jaminan kepada lembaga bahwa mereka bertanggung jawab, dapat dipercaya dan sanggup membayar sekiranya ada yang telat membayar angsuran. Bila anggota menerima pinjaman, mereka juga sanggup membayar tabungan yang telah ditetapkan. Anggota KUMPI dapat saling

membantu, sumbang menyumbang dalam mengatasi tunggakan, mendorong agar setiap anggota mematuhi semua aturan terutama hadir dalam rapat kelompok dan disiplin membayar pinjaman setiap minggu.

Selanjutnya peserta mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) suatu program yang diadakan oleh BWM untuk memberikan gambaran dan pengertian kepada para calon nasabah, tentang: Prinsip, tujuan dan kegunaannya dari modal usaha; Sistem dan prosedur pelaksanaannya; Hak, kewajiban dan tanggung jawab para anggota. Pelatihan wajib kelompok dilakukan selama 1 jam dalam waktu 5 hari berturut-berturut. Dalam pelatihan ini diberikan beberapa materi dengan terkait dengan lembaga, hak dan kewajiban anggota. Pengetahuan tentang mengelola keuangan.

PWK wajib diikuti oleh semua calon nasabah Duduk pada saat pelatihan diurutkan berdasarkan kesepakatan kelompok, urutannya dibalik dari belakang orang yang paling membutuhkan duduk paling belakang begitu seterusnya. Orang yang duduk paling belakang mendapat pencairan pembiayaan terlebih dahulu. Orang yang menjadi ketua duduk paling depan.

Sebelum pelatihan nasabah sudah diinstruksikan membawa uang Rp2.000,- setiap hari pelatihan. Pada hari pertama nasabah disuruh mengumpulkan uang Rp 2.000,-, supervisor mencatat nomor seri kemudian menitipkan kepada nasabah yang duduk paling belakang. Besoknya uang yang dititipkan ke peserta yang menerima amanah diminta untuk menyerahkan kepada supervisor untuk dicek nomor serinya apakah masih tetap atau sudah berubah. Apabila nomor seri uang Rp 2.000,- tersebut masih sama berarti nasabahnya amanah namun apabila nomor serinya telah berubah berarti nasabah tidak amanah. Pada saat ini supervisor akan menekankan pentingnya perilaku amanah pada setiap peserta. Diakhir pertemuan pada hari kedua supervisor melakukan pernainan yang sama yakni mengumpulkan uang Rp 2.000,-, mencatat nomor seri dan menitipkan kepada peserta yang duduk pada urut kedua dari belakang. Begitu seterusnya sampai pada peserta yang duduk paling depan.

Setelah pelatihan wajib kelompok, peserta mengikuti Uji Pengesahan Kelompok (UPK) Semua calon nasabah diwajibkan mengikuti Ujian Pengesahan Kelompok (UPK). Ujian ini dilakukan pada hari kelima PWK oleh supervisor BWM. Anggota kelompok dinyatakan lulus selanjutnya dikukuhkan sebagai nasabah BWM. Penilaian untuk dilakukan UPK bukan hanya fokus pada hasil dari jawaban namun juga ada beberapa kategori seperti kedisiplinan, amanah. Kedisiplinan dinilai pada waktu PWK selama 5 hari berturut-turut yang mengharuskan nasabah harus datang tepat waktu. Amanah dinilai dari penitipan uang Rp2.000,- kepada calon nasabah dengan secara bergantian selama 4 hari berturut-turut. Uang tersebut merupakan uang milik anggota kelompok kemudian dikumpulkan setiap hari oleh supervisor. superviosor menulis nomor kode uang. Besoknya uang yang dititipkan diminta kembali oleh supervisor untuk diperiksa. Apabila nomor kode uang berubah berarti nasabah tidak amanah.

2. Pendampingan pasca Pencairan Pembiayaan

Pencairan pembiayaan dilakukan dalam 3 tahap menggunakan pola 2-2-1. Pola pencairan pembiayaan 2-2-1 ini adalah model yang mengajarkan sikap kepedulian diurutkan berdasarkan siapa yang paling membutuhkan maka ia yang lebih dahulu mendapatkan pencairan pembiayaan. Minggu pertama Halaqah Mingguan (HALMI) dicairkan untuk 2 orang nasabah, kemudian HALMI kedua dicairkan untuk 2 orang nasabah berukutnya dan yang terakhir 1 orang yaitu ketua pada halalaqah mingguan ketiga. Untuk pencairan tahap awal dari pihak BWM memberikan dana pembiayaan kepada nasabah sebesar Rp1.000.000 per orang.

Model pemberdayaan yang diterapkan pada BWM adalah Halaqah Mingguan. HALMI dilakukan sekali seminggu selama 1 jam yang didampingi oleh supervisor BWM. Nasabah mendapatkan pendampingan dan pembinaan setiap minggu pada kegiatan halaqah mingguan. Pada halaqah mingguan ini nasabah mendapat pembinaan mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga serta pengetahuan agama Islam. Setiap nasabah KUMPI mengangsur pinjaman setiap minggu pada saat pertemuan HALMI sampai lunas. Di samping itu, Nasabah harus memiliki tabungan tanggung renteng yang dikelola oleh ketua KUMPI (bukan BWM). Tabungan kelompok ini berfungsi sebagai jaminan kelompok apabila terjadi tunggakan angsuran dari nasabah. Jika terjadi kekurangan angsuran maka dilakukan mekanisme tanggung renteng dengan menggunakan dana tanggung renteng kelompok.

Kegiatan HALMI dilaksanakan secara rutin, wajib diikuti oleh setiap nasabah. HALMI dilakukan untuk membangun sikap dan rasa kebersamaan, komitmen, konsisten, dan disiplin. Di samping itu juga membangun sikap solidarits, tanggung jawab, dan kerjasama kelompok melalui sistem tanggung renteng dalam pembayaran cicilan pinjaman. HALMI merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan kepada anggota KUMPI dan penyaluran dana pembiayaan serta pembayaran angsuran, simpanan, dan setoran tabungan yang disesuaikan dengan kesepakatan kelompok. Uniknya tanggung renteng dalam pembiayaan di BWM merupakan suatu keharusan. Jika ada anggota kelompok yang tidak mampu membayar cicilannya pada minggu itu, maka seluruh anggota nasabah akan menanggung cicilan anggota kelompok yang tidak mampu membayar cicilan pembiayaannya. Sumber dana tanggung renteng diambilkan dari tabungan kelompok yang disetor anggota

kepada ketua KUMPI. Model tanggung renteng ini dalam istilah fiqh dikenal kafalah. Pada akad kafalah, orang yang tidak mampu membayar utang ditanggung oleh pihak lain untuk melunasi hutangnya.

Pembiayaan yang dilakukan oleh BWM adalah model pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan miskin produktif berbasis kelompok. Walaupun pembiayaan itu diterima oleh masing masing nasabah untuk pengembangan usahanya, namun, setiap anggota kelompok bertanggung jawab terhadap pembayaran cicilan pada kelompok tersebut. Dengan pola tanggung renteng atau yang dikenal dengan kafalah dalam ekonomi syariah, masing masing anggota kelompok saling bertanggung jawab terhadap pembayaran cicilan pembiayaan. Bila salah seorang mengalami kesulitan dalam pembayaran cicilan pembiayaan maka anggota kelompok yang lain bertanggung jawab untuk membayarkan cicilan anggota yang bermasalah. Model seperti ini telah diterapkan oleh Muhammad Yunus dengan pola social entrepreneurship pada Grameen Bank pada tahun 1983 di Bangladesh.

Bank Wakaf Mikro pada LKMS ini hanyalah sebuah nama, lembaga ini bukan bank dalam arti yang sesungguhnya karena tidak berfungsi sebagai lembaga intermediary yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro, dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini juga bukan pula lembaga wakaf karena tidak mengelola asset wakaf serta tidak menerapkan prinsip prinsip wakaf. Bila merujuk kepada Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf pelabelan bank wakaf mikro kepada LKMS ini tidak tepat. Namun, pelabelan ini bisa diterima bila LKMS dapat menerapkan prinsip prinsip pengelolan wakaf. Dana Rp 4.000.000.000 yang diberikan kepada BWM harus diikrarkan sebagai wakaf oleh donaturnya yang bertindak sebagai wakif. Pengelolaannya dana ini harus menerapkan prinsip prinsip wakaf yakni terjaganya sustainability atau keabadian asset wakaf. Dana wakaf dikelola secara produktif, biaya operasional lembaga diambil dari perolehan atau bagi hasil investasi wakaf. Sementara dana pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat harus terjaga keutuhannya, tidak boleh berkurang apalagi habis..

Wawancara
Kepala Instansi Provinsi Sumatera Barat

Bagaimana visi, rencana, dan program-program terkait ekonomi syariah?

Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Secara Institusi, pada Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat terkait dengan visi, rencana program-program terkait dengan pengembangan sektor Ekonomi Syariah, Industri Halal dan Sektor Keuangan Syariah tidak terkait secara langsung, namun dalam dokumen perencanaan jangka panjang (RPJPD) dan dokumen jangka menengah (RPJMD) sudah mengakomodir perencanaan pembangunan pengembangan sektor ekonomi syariah dan sektor keuangan syariah sebagai berikut :

Pengembangan sektor ekonomi syariah di Provinsi Sumatera Barat yang sudah diakomodir dalam RPJPD perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, pada Preriode Tahap IV (2016-2021), dengan Pencapaian Indikator Pengembangan Sektor Ekonomi Syariah Tahun
2005-2025 sebagai berikut:

Indikator	2010	2015	2020	2025	
				Semula	Menjadi
Kesolehan sosial terbangun	40%	60%	75%	80%	
(% Pembayar Zakat)					10
Kenaikan Zakat yang dikelola Badan/Lembaga Amil Zakat (%)					10
Peningkatan, pengumpulan, nilai ZIS					
Kelembagaan Ekonomi					
pangsa pasar praktek syariah	5%	20%	25%	35%	
Koperasi berbasis Syariah					912

Dari data diatas, dilakukan revisi indikator menjadi :

a. Kenaikan zakat yang dikelola badan amil zakat (%) dengan target 2025= 10 %
b. Peningkatan pengumpulan nilai zakat, infak dan sadaqah (%) dengan target 2025 = 10 %
c. Koperasi berbasis syariah dengan target 2025 = 912 Unit

RPJMD Tahap I (2005-2010)	Terlaksananya Penerapan Sistem Perbankan Syariah
RPJMD Tahap II (2011-2015)	Semakin Mantapnya Penerapan Sistem Perbankan Syariah
RPJMD Tahap III (2016-2021)	Terlaksananya Penerapan Sistem Perbankan Syariah
RPJMD Tahap IV (2021-2025)	Semakin Mantapnya Pelaksanaan Sistem Ekonomi Syariah

Terkait dengan pengembangan sektor ekonomi syariah di Provinsi Sumatera Barat sudah digariskan dalam RPJPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, dengan Arah Kebijakan :

a. Pengembangan Pariwisata Halal dan nuansa islami
b. Pengembangan Koperasi Syariah
c. Pengembangan Perbankan Syariah, Pemerintah Sumatera Barat sudah melaksanakan antara lain:
   - Penyusunan Perda terkait dengan Konversi PT. Bank Pembangunan Daerah menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Syariah.
   - Kajian berupa naskah akademis Konversi PT. Bank Pembangunan Daerah menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Syariah

- Dalam RUPSLB tanggal 30 November 2019 disepakati jangka waktu 2 tahun untuk konversi menjadi Bank Syariah.
- Adapun Program-Program Pemerintah Daerah dalam mendorong sektor keuangan syariah saat ini adalah Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke Bank Nagari

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, yaitu : "Mewujudkan Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing", Maksudnya "Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing" disini yaitu Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang mampu bertahan terhadap gejolak ekonomi dan menghasilkan produk sehat dan aman dikonsumsi, serta memberikan perlindungan bagi konsumen. Rencana dan Program-Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat :

Rencana Industri sebagai berikut :
1. Memperkuat struktur industri yang berdaya saing berbasis sumberdaya dan penguasaan teknologi;
2. Mengembangkan usaha hilirisasi produk industri pengolahan;
3. Meningkatkan kualitas produk industri;
4. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia sektor industri.

Program-Program Industri sebagai berikut :
a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
b. Program Peningkatan Kualitas Produk Industri.

Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera dalam mewujudkan Industri Halal sebagai berikut :
1. Pendampingan dan pembinaan Industri Kecil Menengah untuk mendapatkan Sertifikat Halal;
2. Kegiatan Standardisasi dan Sertifikat Produk Industri Kecil dan Menengah, dengan memberikan fasilitasi sertifikat halal melalui LPPOM MUI Provinsi Sumatera Barat;
3. Memberikan sosialisasi kepada Pelaku Industri Kecil Menengah Agro tentang Sertifikat Halal.
4. Data IKM binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat yang telah difasilitasi Sertifikat Halal

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menegah Provinsi Sumatera Barat

Visi dan Misi:
Meningkatkan kinerja dan daya saing Koperasi serta usaha simpan pinjam dan UMKM dalam mengelola pontensi ekonomi.

Tujuan:
Meningkatkan peran koperasi sektor riil dan usaha simpan pinjam koperasi dalam perekonomian daerah.

Sasaran:
Meningkatnya daya saing dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah.

Strategi:
1. Meningkatkan produktivitas koperasi
2. Meningkatkan manajemen usaha koperasi
3. Meningkatkan permodalan koperasi
4. Meningkatkan pembiayaan usaha anggota

Kebijakan:
1. Peningkatan kapasitas usaha koperasi pertanian, non pertanian, dan aneka usaha
2. Peningatan kemitraan, promosi danjaringan pemasaran produk koperasi
3. Peningkatan pemupukan modal sendiri koperasi dan kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya
4. Peningkatan pembiayaan usaha anggota

Program dan Kegiatan 2020:

Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi:
1. Pembinaan kelembagaan koperasi
2. Peningkatan pelayanan izin usaha simpan pinjam koperasi
3. Pembenahan koperasi tidak aktif
4. Pembinaan dan pelaksanaan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi
5. Review penerapan dan sanksi bagi koperasi
6. Pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan usaha simpan pinjam koperasi
7. Pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan koperasi
8. Pelatihan -pelatihan bagi koperasi

Peningkatan dan Pengembangan daya saing koperasi:
1. Peningkatan peran usaha simpan pinjam Koperasi pola syariah
2. Bimbingan teknis peningkatan permodalan
3. Pelatihan dan Uji Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS dan USPPS Koperasi
4. Pelatihan dan uji kompetensi bagi pengelola KSP/KSPPS melalui SKKNI
5. Pelatihan SOM dan SOP KSPPS dan USPPS Koperasi
6. Klinik Syariah sebagai wadah konsultasi bagi KSPPS dan USPPS Koperasi di PLUT KUKM dengan 5 Tim Konsultansi KSPPS dan USPPS Koperasi (Bidang Syariah Muammalah, IT dan, Akuntansi Syariah).
7. Melakukan pendampingan bagi koperasi syariah dalam Penerapan akuntansi keuangan syariah dan penerapan pelaksanaan akad (sedang mengusahakan proses aplikasi akuntansi keuangan syariah berbasis IT yang seragam)
8. Uji petik pengawasan KSPPS dan USPPS Koperasi sebanyak 23 Koperasi

Peningkatan dan Pengembangan daya saing UMKM:
1. Sosialisasi prosedur sertifikasi halal bersama LPOM MUI Sumbar
2. Memfasilitasi sertifikasi halal bagi produk UKM unggulan Sumbar beberapa tahun terakhir
3. Terus mensosialisasian secara berkelanjutan bahwajaminan halal produk memiliki peluang yang semakin menjanjikan untuk berkembangnya pemasaran produk karenajuga berkembangnya usaha yang berlandaskan syariah
4. Fasilitasi Sertifikasi halal produk UKM
5. Bimbingan teknis kemasan label dan paperbag dan fasilitasinya
6. Fasilitasi pendaftaran merek UKM potensial

Rencana Kegiatan 2021:
1. Melakukan bimbingan dan pembinaan teknis usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang berkedudukan di Kab/Kota
2. Melakukan pembinaan yang meliputi upaya untuk mengembangkan iklim usaha yang kondusif, kemudahan dan perlindungan bagi KSPPS/USPPS
3. Melakukan bimbingan yang meliputi:
   a. Penerapan prinsip kehati-hatian usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi
   b. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi
   c. Penerapan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi secara mandiri
   d. Peningkatan akses pembiayaan melalui perkuatan permodalan
   e. Pengembangan berbagai skim pembiayaan
   f. Pemanfaatan modal penyertaan, obligasi syariah, dan surat utang syariah atau sukuk koperasi
4. Melakukan pembinaan teknis usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi yang meliputi:
   a. Pemberdayaan dan pengembangan KSPPS dan USPPS Koperasi
   b. Pengelolaan dan pendayagunaan kegiatan maal
   c. Penumbuhan KSPPS dan USPPS Koperasi
   d. Literasi keuangan syariah
   e. Pengembangan jaringan kerjasama antar KSPPS atau USPPS Koperasi melalui Koperasi sekunder
   f. Pelaksanaan Prinsip Syariah bagi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

Visi pembangunan pariwisata yaitu terwujudnya Sumatera Barat sebagai destinasi utama Pariwisata berkelas dunia yang berbasis agama dan budaya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan. Pariwisata ramah Muslim menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan kepariwisataan.

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pengembangan pariwisata ramah Muslim adalah:

a. Sosilasiasi Pariwisata ramah Muslim; Mensosialisasikan kepada stakeholder pariwisata tentang pariwisata ramah Muslim dan dukungan industri pariwisata dalam pengembangan pariwisata ramah Muslim sejak tahun 2016 s.d sekarang. Dukungan yang diharapkan dari industri adalah sertifikasi halal terhadap usahanya, penyediaan fasilitas tamu yang ramah Muslim (musholla, toilet dan tempat wudhu, kolam renang yang terpisah).

b. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pariwisata ramah Muslim Sumatera Barat, sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder dalam pengembangan pariwisata ramah Muslim yang saat ini menunggu sidang pengesahan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

c. Pemberian subsidi untuk biaya pengurusan sertifikasi halal bagi rumah makan dan restoran sejak tahun 2017 s.d sekarang dengan jumlah rumah makan dan restoran hotel yang sudah bersertifikat halal sebanyak 28 rumah makan/restoran.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

- Visi, misi, rencana, program, dan kegiatan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat dalam mendorong peningkatan investasi terkait sektor ekonomi syariah, industri halal, dan keuangan syariab.

- Visi DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat, "Menjadikan Sumatera Barat sebagai Daerah Tujuan Investasi yang Menarik, Unggul dan Berdaya Saing"

Dalarn mencapai visi tersebut, ditetapkan misi DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

a. Mendukung terwujudnya Peningkatan Daya Tarik Investasi di Surnatera Barat
b. Meningkatkan Pelayanan Investasi Yang Berkualitas

Program dan kegiatan DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat yang telab dilaksanakan dan menjadi kegiatan rutinan tahunan yang terkait berhubungan dengan mendorong peningkatan investasi di daerah, sebagai berikut:

a. Program Peningkatan lklim Investasi dan Realisasi [nvestasi, dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Penyelesaian permasalahan investasi
   - Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat
   - Penyusunan Feasibility Study Proyek Investasi
   - Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
   - Gelar Potensi dan Temu Usaha
   - Forum Investasi Sumatera Barat
   - Forum komunikasi pelaku usaba daerah
   - Kerjasama Promosi dan Misi Investasi
   - Pertemuan Strategi Promosi Peluang Investasi
   - Inventarisasi tanah ulayat yang berpotensi untuk penanaman modal

b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan kegiatan sebagai berikut:
   - Pelayanan Terpadu Satu Pintu
   - Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan yang berbasis teknologi informasi
   - Peningkatan penyelesaian rnasalah pelayanan terpadu

Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Bank Indonesia memiliki visi mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia. Dalam menjalankan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah, BI berperan sebagai AIR (Akselerator, Inisiator dan Regulator). Secara garis besar, program kerja utama pengembangan Eksyar Indonesia terdiri dari:

a. Pemberdayaan Ekonomi Syariah
b. Pendalaman Pasar Keuangan Syariah
c. Program Edukasi dan Sosialisasi Eksyar

Di Sumbar visi dan program kerja pengembangan ekonomi Syariah tersebut dilaksanakan dengan kegiataan antara lain:

a. Berperan aktif sebagai Ketua Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Padang
b. Melakukan koordinasi dengan OJK Provinsi Sumbar
c. Bersinergi dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam kegiatan kampanye Eksyar melalui penyelenggaraan:
    1) Road to FESyar 2019 di Padang. Berdasarkan pengalaman keberhasilan melaksanakan Road to Fesyar kami telah mengusulkan dan kemudian ditetapkan sebagai penyelenggara Festival Ekonomi Syariah Regional Sumatera 2020
    2) Sosialiasi dan Koordinasi Pengembangan Ekonomi Syariah
    3) Seminar Logika EKonomi Syariah
d. Menyelenggarakan Menyelenggarakan pelatihan dengan topik service excellent kepada pengelola usaha ponpes, training for trainer Tata Kelola Wakaf bekerja sama dengan lkatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, dan pelatihan sertifikasi halal kepada UMKM binaan dan umkm lainnya di Kota Padang Panjang
e. Memberikan pendampingan kepada UMKM syariah yang bergerak di bidang food dan fashion dalam rangka program pengembangan lndustri Kreatif Syariah (IKRA).
f. Memberikan pendampingan kepada usaha yang dimiliki oleh Ponpes dalam rangka program pengembangan kemandirian ekonomi pondok pesantren. Pada saat ini, terdapat 2 ponpes sebagai pilot project pengembangan kemandirian ekonomi ponpes dan akan ada penambahan 2 ponpes pada tahun 2020. Demikian juga pada tahun-tahun berikutnya akan ada ponpes baru yang menjadi pilot project. Selain pengembangan usaha dimasing-masing ponpes, Bl memfasilitasi pembentukan holding pesantren yang terdiri dari gabungan/kerja sama unit usaha ponpes dengan tujuan untuk meningkatkan akses input/output dari unit usaha ponpes, dalam hal ini ponpes yang berada di wilayah Sumatera bagian Utara.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat

Sesuai dengan amanat undang-undang, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan hal tersebut, OJK turut berperan aktif dalam pengembangan sektor Keuangan Syariah dengan mendorong tumbuhnya industri Keuangan syariah di Indonesia.

Kondisi Perbankan Syariah Provinsi Sumatera Barat									Perbankan Syariah Nasional	
Indikator	2018	Feb 2019	2019	Feb 2020	growth (YoY)		growth (YtD)		Nasional (Feb 2020)	%
Total Aset (dalam miliar rupiah)	3,345	3,345	3,877	3,800	↑	13.60%	↓	-1.99%	365,165	1.04%
Persentase terhadap Aset Konvensional	5.21%	5.82%	5.80%	6.21%	↑	0.39%	↑	0.41%	8.10%	
Dana Pihak Ketiga (dalam miliar rupiah)	3,045	3,045	3,582	3,606	↑	18.41%	↑	0.65%	300,147	1.20%
Persentase terhadap DPK Konvensional	5.93%	7.73%	7.84%	7.89%	↑	0.15%	↑	0.05%	6.99%	
Pembiayaan (dalam miliar rupiah)	2,650	2,650	3,021	2,987	↑	12.72%	↓	-1.13%	234,595	1.27%
Persentase terhadap Kredit Konvensional	5.17%	5.56%	5.58%	5.52%	↓	-0.04%	↓	-0.06%	6.46%	
NPF	4.70%	5.15%	3.68%	3.51%	↓	-1.64%	↓	-0.16%	3.59%	
LDR	87.02%	87.02%	84.32%	82.83%		-4.18%		-1.49%	78.16%	

- Total Aset perbankan syariah di Sumatera Barat posisi Februari 2020 sebesar Rp3,8 Triliun, meningkat sebesar 13,6% dibandingkan Februari 2019. Sejalan dengan peningkatan total aset diatas, share total aset perbankan syariah di Sumatera Barat terhadap keseluruhan perbankan meningkat menjadi 6,21% (meningkat 0,39% YoY).
  - Total Dana Pihak Ketiga di Sumatera Barat posisi Februari 2020 sebesar Rp3,6 Triliun, meningkat sebesar 18,41 % dibandingkan Februari 2019. Sejalan dengan peningkatan dana pihak ketiga diatas, share total DPK perbankan syariah di Sumatera Barat terhadap keseluruhan perbankan meningkat menjadi 7 ,89% (meningkat 0, 15%).
  - Total Pembiayaan di Sumatera Barat posisi Februari 2020 sebesar Rp2,98 Triliun, meningkat sebesar 12,72% dibandingkan Februari 2019. Meskipun pembiayaan tumbuh sebesar 12,72%, share total pembiayaan perbankan syariah di Sumatera Barat terhadap keseluruhan kredit dan pembiayaan perbankan turun menjadi 5,52% (turun 0,04% YoY).
  - Kualitas penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah meningkat, dilihat dari persentase NPF pada Februari 2020 sebesar 3,51% atau turun (membaik) dibandingkan posisi Februari 2019 sebesar 5,15%.

KINERJA TRANSAKSI SAHAM PASAR MODAL SUMBAR						
Kategori	2017	2018	Mar-19	2019	Mar-20	YoY
Jumlah SID Investor	8,724	13,098	14,433	17,501	18,213	26.19%
Nilai Transaksi (triliun Rp)	10.18	6.26	1.24	9.89	0.70	-44.05%
Volume Transaksi (juta saham)	21,125.36	8,812.88	2,200.98	16,910.41	1,187.61	-46.04%
Frekuensi Transaksi (ribu kali)	1608.97	523.10	128.27	1,310.95	132.30	3.14%

- Jumlah SID Investor Saham (syariah dan non-syariah) di Provinsi Sumatera Barat posisi Maret 2020 sebesar 18.213 SID, meningkat sebesar 26, 19% dibanding posisi Maret 2019.
- Nilai Transaksi kumulatif dari investor yang berada di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Maret 2020 sebesar Rp700 miliar.
- Volume Transaksi kumulatif dari investor yang berada di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Maret 2020 sebesar 1,18 miliar saham.
- Frekuensi transaksi kumulatif dari investor yang berada di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Maret 2020 sebanyak 132 ribu kali.

Jenis Pembiayaan	Dec-18 (Rp miliar)	Mar-19 (Rp miliar)	Dec-19 (Rp miliar)	Mar-20 (Rp miliar)	YtD	YoY
Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah	601	577	586	598	2.03%	3.62%
Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah	18.95	22.43	33.51	39.69	18.44%	76.94%
Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah	0.06	0.04	0.22	-	-100.00%	-100.00%
Total Piutang Pembiayaan Syariah Sumatera Barat	**620**	**599**	**620**	**637**	2.88%	6.35%
Total Piutang Pembiayaan Syariah (Nasional)	**20,866**	**19,426**	**17,327**	**16,615**	-4.11%	-14.47%
Persentase	**2.97%**	**3.09%**	**3.58%**	**3.84%**	0.26%	0.75%

- Total Piutang Pembiayaan Syariah di Provinsi Sumatera Barat posisi Maret 2020 sebesar Rp637 miliar, meningkat sebesar 6,35% dibanding posisi Maret 2019. Hal ini relatif lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan piutang pembiayaan syariah nasional yang turun sebesar 14,47% (YoY).
- Secara persentase, jumlah Piutang Pembiayaan Syariah di Provinsi Sumatera Barat adalah 3,84% dari jumlah Piutang Pembiayaan Syariah Nasional.

- Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah, sebagai implementasi dari Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  a. a. Memperkuat lembaga keuangan syariah, antara lain melalui peningkatan modal usaha dan SDM, penguatan informasi, varrasi produk, pemanfaatan teknologi dalam proses bisnis, serta penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang baik.
  b. b. Mendorong terciptanya demand keuangan syariah yang sustainable melalui peningkatan literasi dan inklusi masyarakat terhadap industri keuangan syariah, yang saat ini dirasakan masih kurang.
  c. Membentuk ekosistem keuangan syariah, melalui sinergi dan kolaborasi di antara pelakujasa keuangan syariah di berbagai sektor, dengan pelaku industri halal di sektor riil.

Kontribusi OJK sebagai regulator dalam meningkatkan ketahanan kelembagaan SJK dilakukan dengan menerbitkan ketentuan-ketentuan yang mengatur pengembangan keuangan syariah di Indonesia serta terdapat ketentuan-ketentuan yang memberikan insentif dan/ atau relaksasi untuk mempercepat pertumbuhan SJK syariah.

Program-program pengembangan keuangan syariah yang telah dilaksanakan OJK Provinsi Sumatera Barat sebagai implementasi Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah 2017-2019 adalah sebagai berikut:

No.	Program	Implementasi
1	Mendorong Pembentukan Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki skala usaha besar	Mendorong konversi PT BPD Sumatera Barat dan beberapa BPR di Sumatera Barat untuk menjadi Bank dan BPR Syariah. Saat ini sedang diajukan konversi 2 BPR menjadi BPRS serta RUPS telah menyetujui konversi PT BPD Sumatera Barat. Selanjutnya terdapat beberapa BPR lain yang sudah mendapat persetujuan RUPS untuk konversi menjadi BPRS.
2	Mendorong industri untuk menggunakan teknologi informasi dalam memberikan layanan keuangan syariah	Telah diimplementasikan Cash Management System pada Unit Usaha Syariah PT BPD Sumatera Barat dalam memberikan layanan keuangan syariah kepada masvarakat seiak tahun 2018.
3	Memperluas jaringan layanan perbankan syariah	Mendukung perkembangan Perbankan Syariah melalui perizinan pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah, diantaranya yaitu: - Pembukaan 2 (dua) Kantor Cabang Syariah Bukittinggi dan Kantor Cabang Syariah Batusangkar PT BPD Sumatera Barat. - Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syariah Bukittinggi PT Bank Tabungan Negara.
4	Memperluas jaringan layanan pasar modal syariah	Pembukaan Galeri Investasi Syariah IAIN Batusangkar dan Galeri Investasi Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. Kedua galeri investasi tersebut diharapkan dapat memberi pendidikan terkait investasi syariah di pasar modal kepada mahasiswa dan masyarakat umum.

5	Memperluas jaringan layanan IKNB syariah	Pembukaan Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren Modern Al Kautsar Kabupaten Limapuluh Kota dengan tujuan menggerakkan perekonimian masyarakat di sekitar pesantren melalui penyaluran pembiayaan mikro dengan skema syariah kepada masvarakat produktif
6	Melakukan diversifikasi target dan metode sosialisasi dan edukasi keuangan syariah	Dialog Publik Ekonomi dan Ekonomi Syariah dengan tema "Pengembangan Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Sumatera Barat" dan "Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Mendukung Konversi Bank Nagari", untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mikro dan pengurus koperasi syariah terkait perbankan syariah dan akuntansi syariah.
7	Menyelenggarakan *Training for Trainer* Keuangan Syariah	Sosialisasi Perbankan Syariah Kepada 230 Ulama, Dai/Mubaligh Se-Kota Padang Bersama Dengan MES Kota Padang, Pemko Padang, UUS Bank Nagari Dan Al-Ha.mas, untuk meningkatkan pemaha.man Da'i terkait Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam agar dapat menjadi salah satu topik rutin dalam ceramahnya kepada masyarakat.

Selanjutnya, kedepan OJK Provinsi Sumatera Barat akan meningkatkan sinergi dengan instansi maupun lembaga lainnya yang telah terjalin selama ini untuk memperluas cakupan ekonomi syariah melalui edukasi, sosialisasi, event terkait syariah dsb. Hal ini juga selaras dengan Lima Kebijakan dan Inisiatif OJK pada tahun 2020 yaitu diantaranya adalah Pengembangan Ekosistem Ekonomi & Keuangan Syariah dengan cara:

a. Mendorong pengembangan industri halal unggulan di Indonesia, di Provinsi Sumatera Barat OJK Sumbar turut serta dalam Forum Group Discussion (FGD) yang membahas Pariwisata Ramah Muslim di Sumatera Barat sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi syariah.
b. Mendorong lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan skala usaha dan adopsi teknologi.
c. Memperkuat sinergi antara pelaku industri halal dengan industri jasa keuangan dan stakeholder terkait lainnya
d. Mendorong dan memfasilitasi proses konversi BPR Konvensional lainnya di Provinsi Sumatera Barat menjadi BPR Syariah.
e. Mendorong BPRS di Sumatera Barat untuk melaksanakan operasional berbasis Teknologi Sistem Informasi. Sehingga nasabah dapat merasakan kenyamanan yang sama dalam pelayanan baik operasional dan jasa teknologi dengan bank konvensional yang telah terlebih dahulu menggunakan IT sebagai basis operasionalnya.
f. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah, Asbisindo, MUI, MES, media massa, serta elemen terkait untuk meningkatkan literasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi terkait perbankan syariah dan ekonomi syariah. Sehingga, diharapkan dapat meningkatkan transaksi syariah di masyarakat baik melalui perbankan syariah maupun lembaga jasa keuangan syariah lainnya.

Bagaimana peluang pengembangan sektor ekonomi syariah, industri halal, dan sektor keuangan syariah?

Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat

1. Secara Umum peluang pengembangan ekonomi syariah di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:
   a. Kekuatan falsafah *adat basandi syara, syara basandi kitabullah* di Sumatera barat yang memiliki suku asli minangkabau yang penduduknya mayoritas Muslim, bahkan orang Minang beragama Islam adalah suatu keniscayaan di Sumatera Barat ini karena adanya falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah serta sikap komitmen dalam menegakkan ajaran Syariat agama Islam. Sehingga jika ada orang minang yang murtad dari agama Islam maka orang tersebut tidak diakui lagi menjadi orang minang.
   b. Di Provinsi Sumatera Barat lebih dari 95% penduduknya beragama Islam (Muslim).
   c. *Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia menjadikan Sumatera Barat salah satu platform* Dilihat dari kebiasaan dan kecenderungan orang minangkabau dalam hal jual beli dan kerjasama prinsip bagi hasil telah ada sejak budaya Minangkabau itu lahir kemudian menjadi tradisi bagi orang Minang, contoh kerja sama dalam menggarap padi di sawah.

2. Perkembangan Ekonomi Syariah di Provinsi Sumatera Barat, fokus ke 3 program/produk unggulan: Pariwisata ramah Muslim, Koperasi/UMKM/IKM Syariah, dan Perbankan Syariah. Secara khusus, peluang pengembangan ekonomi syariah sebagai berikut:

a. Sektor Pariwisata
   1. Pada tahun 2026 diperkirakan akan terdapat 230 juta wisatawan Muslim yang melancong ke seluruh destinasi halal di dunia, termasuk ke Indonesia dengan potensi perputaran ekonomi sebesar US $ 300 miliar.
   2. Ditetapkannya Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu destinasi halal dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2015-2025
   3. Konsep Pariwisata ramah Muslim Dalam Pembangunan Pariwisata Sumatera Barat adalah konsep pembangunan destinasi ramah Muslim (Moslem friendly destination) yang mendukung ketersediaan produk dan jasa wisata bagi wisatawan Muslim"
   4. Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sedang menyusun Perda Pariwisata ramah Muslim, yang prosesnya sudah ditetapkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat dan saat ini sedang dalam fasilitasi pemberian Nomor Register di Kementerian Dalam Negeri RI.
   5. Dasar ditetapkannya Pariwisata Halal di Provinsi Sumatera Barat
      - Kesepakatan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota menjadikan Sumatera Barat sebagai Destinasi Wisata Halal (tahun 2016)
      - Terpilihnya Sumbar sebagai World's Best Halal Destination (tahun 2016)
      - Terpilihnya Sumbar sebagai World's Best Halal Culinary Destination (tahun 2016)
      - Memberikan subsidi untuk pengurusan Sertifikasi Halal untuk industri (rumah makan/restoran, serta restoran di Hotel)
      - Memberikan subsidi sertifikasi halal kepada pelaku usaha pariwisata
        Tahun 2017 : 9 pelaku usaha restoran/rumah makan
        Tahun 2018 : 11 pelaku usaha
   6. Disepakatinya Ranperda Pariwisata Halal dan saat ini menunggu proses penomoran registrasi di Kemendagri RI.

b. Sektor Koperasi Syariah
   1. Sejak tahun 2004 di Provinsi Sumatera Barat telah mulai melaksanakan pengelolaan koperasi berdasarkan prinsip pembiayaan syariah, mengacu pada Kepmenkop dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
   2. Saat ini pelaksanaan Kegiatan Koperasi Pola Syariah di Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Permenkop dan UKM RI nomor 11 Tahun 2017 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

3. Pemprov Sumbar senantiasa terus membina dan mendorong untuk pengembangan terhadap gerakan koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah (USPPS) dalam kegiatan Peningkatan Peran Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pola Syariah (KSPPS).
4. Perkembangan KSPPS & USPPS dari Tahun 2016 mengalami peningkatan s/d Tahun 2018

	2016	2017	2018
KSPPS	189	189	189
USPPS	30	23	29

5. Beberapa Inovasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk pengembangan koperasi dan UMKM halal antara lain :
   - SAKURA Sya (Sistem AKUntansi kopeRAsi Syariah) (on progress untuk aplikasi dan pengembangan pada http://diskopukm.sumbarprov.go.id/)
   - LARASYA (beLAjar kopeRAsi SYAriah) (on progress untuk aplikasi dan pengembangan pada http://diskopukm.sumbarprov.go.id/).

c. Perbankan Syariah

1. Perbankan syariah terus tumbuh pesat di Sumatera Ba rat yang terlihat dari naiknya total asset dan tingginya minat masyarakat untuk menabung di Bank Syariah dan juga sudah mulai beragamnya produk perbankan yang ditawarkan.
2. Dasar berdirinya Bank Syariah di Provinsi Sumatera Barat yaitu Bank Nagari Syari'ah
   a. Penyusunan Perda terkait dengan Konversi PT. Bank Pembangunan Daerah menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Syariah.
   b. Bantuan teknis dan peningkatan kapasitas SDM untuk Konversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah
   c. Sudah Didaftarkan Dalam Prolegda 2020

BPR Syariah

a. Inisiasi Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah.
b. Kebutuhan adanya lembaga pembiayaan berbasis syari'ah.
b. Masih terbatasnya lembaga keuangan yang membiayai koperasi syari'ah
c. Membangun ekonomi masyarakat dan pemenuhan kebutuhan permodalan syari'ah UKM

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

Peluang dari pengembangan Industri Halal di Sumatera Barat yaitu sangat besar karena dari sekitar 35.000 IKM yang tersebar di 19 Kabupaten dan Kota, yang bergerak disektor Makanan dan Minuman sekitar 26.000 IKM, jadi isu mengenai Makanan dan Minuman yang halal merupakan masalah yang sangat penting sekali, dimana dalam UU No. 33 Tahun 2014 menyatakan sertifikat halal merupakan suatu yang wajib dimiliki oleh Industri Pengolahan Makanan dan Minuman.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Sumatera Barat

Peluang pengembangan sektor ekonomi syariah khususnya pengembangan koperasi syariah/BMT di Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Penduduk Sumatera Barat mayoritas beragama Islam
2. Sangat banyak anggota koperasi yang ingin koperasi untuk berkonversi ke pola syariah
3. Peningkatan jumlah koperasi yang akan berkonversi menjadi koperasi syariah
4. Kebijakan pengembangan koperasi syariah sudah dimuat dalam Rencana Pembangunan JangkaPanjang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025
5. Dukungan dari berbagai stakeholder dalam pengembangan koperasi syariah (MUI, MES dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota)

Tahun 2016 Sumatera Barat dikukuhkan sebagai Destinasi Halal Terbaik di Dunia pada ajang '' WORLD HALAL TOURISM AWARD 2016 DI DUBAI dengan kategori:

- WORLD'S BEST HALAL CULINARY DESTINATION
- WORLD'S BEST HALAL DESTINATION
- WORLD'S BEST HALAL TOUR OPERATOR

Sebuah pengakuan dari masyarakat dunia bahwa Sumatera Barat memiliki keunggulan segmen tersendiri untuk membangun perekonomiannya dan sekaligus hal ini merupakan tantangan dan pendorong bagi Pemerintah Sumatera Barat untuk menumbuh kembangkan perekonomian berbasis pariwisaha dan produk halal. Kita menyakinan dengan dukungan seluruh komponen dan lembaga jika mendorong secara bersama-sama dengan besik yang sudah ada perkembangan ekonomi syariah, destinasi wisata halat serta dukungan produk UMKM bersertifikasi halal, Sumatera Barat berpeluang untuk berkembang menuju ekonomi syariah dan produk berbasis halalan dan toyyiban.

Kepala Dinas Penananaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat memiliki 4 sektor unggulan yang ditawarkan kepada investor yakni pariwisata, energi baru terbarukan, perikanan, dan industri (terutama industri hilir yang mengolah hasil pertanian dan perikanan). Keempat sektor tersebut tentunya sangat menjanjikan bagi pengembangan ekonomi syariah di Sumatera Barat. Kegiatan investasi pada sektor pariwisata, perikanan, dan industri memberikan peluang yang besar bagi pengembangan industri halal di Sumatera Barat.

Sektor pariwisata tentunya perlu didukung dengan keberadaan industri halal guna menyokong kegiatan di sektor pariwisata. Keuangan syariah juga menjadi sek:tor yang menarik untuk ditawarkan kepada investor dengan harapan keuangan syariah dapat berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan terutama pada keempat sektor unggulan tersebut. Selama ini dapat dikatakan sektor keuangan syariah masih terbatas dalam pembiayaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Ke depan, sektor ekonomi syariah, industri halal, dan keuangan syariah sangat dibutuhkan peran dan andilnya dalam mendorong pengembangan dan berkontribusi terhadap empat sektor unggulan investasi di Provinsi Sumatera Barat.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

Menurut kami peluang pengembangan khususnya Industri Halal dan Pariwisata ramah Muslim di Sumbar sangat besar, karena pariwisata ramah Muslim sangat sesuai dengan falsafah hidup yang dianut oleh masyarakat Sumbar yaitu Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Dengan budaya dan falsafah hidup yang dianut oleh masyarakat serta keindahan alam budaya Sumbar, pariwisata ramah Muslim menjadi genre yang pas dengan pariwisata Sumatera Barat.
Untuk pengembangan industri halal, masyarakat Sumbar yang mayoritas Muslim, kuliner Sumatera Barat diyakini halal oleh wisatawan. Namun ini tentunya perlu dilengkapi dengan sertifikasi halal.

Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Pengembangan ekonomi syariah secara nasional tidak terlepas dari keaktifan dan konsistensi program-program pengembangan ekonomi syariah di daerah, seperti di Sumatera Barat. "Ekonomi Syari'ah dan Masyarakat Sumatera Barat" ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Falsafah Budaya Minang yakni "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" yang dipegang oleh masyarakat Minang sejak dulu kala dapat menjadi modal bagi keberhasilan pengembangan ekonomi syariah di Sumatera Barat. Jumlah penduduk Sumatera Barat sekitar 5,32 juta (pada tahun 2017) merupakan potensi pasar sekaligus sebagai pelaku ekonomi syariah.

Potensi tersebut sekaligus menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan jumlah pelaku maupun nilai transaksi di sektor ekonomi syariah. Diperlukan sosialisasi/kampanye ekonomi dan keuangan syariah yang dilaksanakan secara konsisten dan kontinyu, agar masyarakat mengetahui dan menyadari pentingnya berusaha secara syariah, sehingga kemudian secara bertahap masyarakat mau menjalankan aspek kehidupan perekonomiannya berdasarkan ekonomi dan keuangan syariah

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat

Sumatera Barat memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan keuangan syariah dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

Masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang sebagian besar terdiri dari suku Minangkabau hidup dengan falsafah "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*". Melalui falsafah tersebut, masyarakat terdorong untuk dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aspek sosial-ekonomi.

Penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 sebanyak 5,38 juta jiwa. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2019 (YoY) sebesar 5,13%. Luas daratan Provinsi Sumatera Barat sebesar 42.297 km2 dengan sebagian besar wilayah memiliki garis pantai yang berpotensi ekonomi di sektor perikanan. Pengembangan sektor pertanian dengan konsep *value chain financing* yang memadukan pengembangan kawasan jagung, peternakan rakyat dan pengolahan rendang sebagai makanan khas serta komoditas ekspor unggulan Provinsi Sumatera Barat yang saat ini telah menjadi fokus program kerja berbagai stakeholder yang tergabung dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Potensi pengembangan sektor keuangan syariah di Sumatera Barat meliputi sektor pariwisata dan kuliner syariah. Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan sebagai salah satu daerah tujuan wisata berbasis syariah berdasarkan Rencana Induk Pariwisata Nasional tahun 2015-2025. Pemerintah daerah secara aktif mempromosikan Sumatera Barat sebagai daerah tujuan wisata syariah tingkat dunia, dan Sumatera Barat telah beberapa kali memperoleh penghargaan sebagai daerah tujuan wisata berbasis syariah antara lain penghargaan World's Best Halal Destination dan World's Best Halal Culinary Destination pada The World Halal Tourism Award 2016.

Pengembangan Wisata Halal oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat tersebut dapat menjadi lokomotif bagi industri lain yang berperan sebagai industri pendukung pariwisata ramah Muslim. Industri yang berpotensi untuk dikembangkan mencakup penyediaan transportasi, penyediaan akomodasi (penginapan dan makan minum), pengolahan makanan serta industri kerajinan. Dengan dikembangkannya industri-industri tersebut akan tercipta suatu ekosistem perekonomian syariah yang mencakup berbagai sektor yang semuanya dijalankan dengan prinsip syariah.

Untuk mencapai tujuan mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, OJK Sumbar melakukan dorongan dari dua sisi, yaitu hulu dan hilir. Pada sisi hilir adalah menciptakan Sektor Jasa Keuangan yang kuat dan stabil. Di sisi lain, pada sisi hulu dilakukan dengan turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Adapun program TPAKD yang telah dan akan dilakukan OJK Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Telah Dilakukan	Akan Dilakukan
Pembukaan akses keuangan kepada 35 Nagari di tahun 2018 dan 38 Nagari di tahun 2019 melalui program Pengembangan Kawasan InklusiKeuangan Terpadu bersinergi dengan Nagari Mandiri Pangan. Penyelenggaraan kegiatan Business Matching dalam rangka peningkatan peran sektor jasa Keuangan melalui fasilitasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada sektor yang menjadi concern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa 7 kali kegiatan sosialisasi dan 1 kali kegiatan expo jasa keuangan pada tahun 2019 yaitu: a. Kegiatan Sosialisasi dengan tema "Kemitraan Antara Peternak dengan Petani Jagung Pada Kawasan Perunggasan di Sumatera Barat" pada tanggal 6 April 2019 di Kota Payakumbuh dengan mengundang 200 perwakilan kelompok tani dan peternak.	Pengembangan Kawasan Inklusi Keuangan Terpadu bersinergi dengan Nagari Mandiri Pangan melalui pembukaan akses keuangan kepada 4 Nagari Mandiri Pangan. untuk mendukung Program Strategis Nasional serta sebagai upaya melawan rentenir yang telah merajalela di petani sehingga kesejahteraan masyarakat tidak tercapai yaitu: a. Perluasan Lahan Jagung sebanyak 10.000 Ha melalui penyaluran KUR kepada petani jagung b. Menjamin kemandirian/ kedaulatan pangan stok daging sapi melalui KUR Khusus klaster peternakan untuk mendorong peningkatan populasi sapi dari 500 ribu ekor menjadi 1 juta ekor dalam kurun

b. Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Keuangan kepada Kelompok Petani Jagung, Peternak serta UKM di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 30 April 2019 di Payakumbuh. Kegiatan dihadiri oleh 200 peserta yang terdiri dari perwakilan petani, peternak dan pelaku UKM yang berada di bawah binaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat serta Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sumatera Barat.
c. Kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat dan Edukasi Keuangan kepada Petani di Kab. Pasaman Barat pada tanggal 22 Juli 2019 di Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat. Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan penandatanganan MoU antara Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Bank Penyalur KUR terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan Penunjukan Kecamatan Kinali sebagai Pilot Project perluasan 10.000 Hektar lahan jagung
d. Kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat dan Edukasi Keuangan kepada Petani di Kab.Limapuluh Kota pada tanggal 2 Agustus 2019
e. Kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat dan Edukasi Keuangan kepada petani di Kab. Lima Puluh Kota pada tanggal 27 Agustus 2019 bersamaan dengan penandatanganan MoU antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Bank Penyalur KUR terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat kepada Petani di Kabupaten Limapuluh Kota
f. Kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat dan Edukasi Keuangan kepada Petani di Nagari Batu Kambing Kab.Agam pada tanggal 13 September 2019
g. Kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat dan Edukasi Keuangan kepada Petani di Nagari Palembayan Kab.Agam pada tanggal 16 September 2019
h. Pelaksanaan Expo Keuangan dalam bentuk kegiatan AKSI Pangan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 17 Desember 2019

waktu 5 tahun kedepan Program ini untuk mendukung keberhasilan ekspor rendang (Go International Rendang).

c. Menjamin kemandirian/kedaulatan pangan stok beras melalui program KUR klaster Padi untuk pembukaan 18.000 hektar lahan sawah di 70 Kawasan Nagari Mandiri Pangan dengan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
d. Program KUR Klaster Perikanan Budidaya Ikan KErapu untuk akselerasi peningkatan kesejahteraan nelayan.
e. Program KUR Klaster Perkebunan Kopi Solok Rajo pada lahan 3.470 hektar untuk peningkatan kesejahteraan petani kopi
f. Program KUR Klaster Bawang Putih sebanyak 580 hektar di 5 Kabupaten (Tanah Datar, Solok Selatan, Agam, Pasaman dan Solok) dalam rangka mengurangi impor bawang putih.

Bagaimana tantangan utama apa yang saat ini dihadapi dalam mengembangkan sektor ekonomi syariah, industri halal, dan sektor keuangan syariah?

Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Ada 3 hal yang menjadi tantangan utama untuk mengembangkan Ekonomi Syariah di Sumatera Barat :

1. Persaingan dengan sistem ekonomi lain. Ekonomi Syariah merupakan sistem ekonomi yang baru berkembang di Indonesia harus siap bersaing dengan ekonomi kapitalis dan sosialis yang telah berkembang dan mengakar sejak pra kemerdekaan indonesia hingga sekarang, ini menjadi tantangan yang sangat signifikan untuk pengembangannya di Sumatera Barat.
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan pemangku kebijakan terkait ekonomi syariah.
3. Belum optimalnya pemanfaatan ekonomi digital untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

Tantangan utama pada saat ini dihadapi dalam pengembangan sektor Industri Halal di Sumatera Barat sebagai berikut :

- Para pelaku Industri Makanan dan Minumanan saat ini masih kurang mendapat
- sosialisasi mengenai kewajiban penggunaan sertifikat halal;
- Anggaran untuk memperoleh sertifikat halal masih dirasakan sangat mahal, sehingga bagi Industri Kecil Makanan dan Minuman menjadi suatu masalah yang utama untuk keberlangsungan usaha mereka tersebut;
- Lembaga yang memfasilitasi sertifikat halal saat ini masih satu, sehingga menjadi kendala di mana tiap daerah tarif pengurusan sertifikat halal berbeda-beda.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menegah Provinsi Sumatera Barat

Aspek Kelembagaan Koperasi :
1. Kurangnya DPS yang bersertikat dan atau direkomendasikan oleh DSN MUI
2. Kurangnya SDM Pengelola yang bersertifikasi kompetensi

Aspek Usaha:
1. Perlunya peningkatan Pengelolaan Maal dan Tamwil
2. Koperasi belum menjadi salah satu lembaga pengelola ZISWAF
3. Perlunya penyusunan SOM & SOP yang baku dan seragam
4. Perlunya penyediaan aplikasi akuntansi keuangan syariah berbasis IT yang seragam
5. Perlunya peningkatan permodalan koperasi syariah

Aspek Pemenuhan Kaidah Syariah
1. Belum terpenuhinya kaidah-kaidah syariah yang tertuang dalam akad-akad dalam setiap transaksi
2. Kurangnya Bimtek dan pelatihan peningkatan SDM pengelola
3. Perlunya Klinik Syariah dalam rangka advokasi pendampingan teknis

a. Sumberdaya manusia pelaku UMKM yang sebahagiannya masih rendah,berada di umur tidak produktif dan basis ekonomi yang masih lemah
b. Petugas pendampingan yang memahami seluk beluk Ekonomi Syariah yang masih sedikit dan keterbatasan dukungan anggaran untuk peningkatan SDM dan sosialisasi ke masyarakat secara luas
c. Sebahagian besar pelaku UMKM tidak punya modal awal yang kuat untuk berusaha sehingga untuk dukungan permodalan agak malas mencari dukungan modal dengan prosedur relatif rumit dan memerlukan waktu agak lama

d. Untuk pengurusan sertifikasi Halal diawali dengan S PIRT dari Dinkes Kab/Kota ini sebahagian Kab/Kota anggaran terbatas untuk sosialisasi dan UMKM juga berbayar kepada Pemda dan ini sudah kita diskusikan dengan Dinas Kesehatan dan Pemda Kab/Kota untuk di bebaskan dan tidak dipungut biaya
e. Untuk pengurusan sertifikasi halal beberapa tahun kebelakang sesuai aturan yang ada dibawah koordinasi LPOM MUI pengurusan sertifikasi Halal adalah berbayar sedangka kemampuan UMK sangat lemah dari segi finansial sehingga menjadi kendala dalam memasifkan sertifikasi halal ini.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

Menurut kami tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata ramah Muslim adalah komitmen dari seluruh pihak baik Pemerintah Daerah, industri/pelaku usaha dan masyarakat. Dalam pengembangan pariwisata ramah Muslim dibutuhkan penyediaan fasilitas yang ramah Muslim (musholla, toilet dan tempat wudhu, rumah makan yang bersertifikat halal). Untuk penyediaan fasilitas perlu dukungan komitmen dan penganggaran.

Kepala Dinas Penananaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Sebagai daerah dengan penduduk beragama Islam yang tinggi, 97 % dari total populasi, secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada tantangan atau hambatan yang berarti dalam mengundang masuknya investasi ke Sumatera barat untuk mengembangkan sektor ekonomi syariah, industri halal, dan keuangan syariah. Apalagi didukung pula oleh filosofi kehidupan bermasyarakat yang dianut oleh orang Minangkabau dengan filosofinya "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" yang mencerminkan bahwa kehidupan masyarakat Minangkabau harus berlandaskan kepada hukum dan ketentuan Syariat Islam. Untuk industri halal, kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal masih rendah. Hal ini disebabkan karena masyarakat menganggap bahwa semua produk di pasar sudah halal karena mayoritas masyarakat di Provinsi Sumatera Barat beragama Islam. Hal ini membuat masyarakat belum menganggap industri halal sebagai peluang bisnis. Masalah krusial yang selama ini sering dianggap menjadi faktor penghalang masuknya investasi yang membutuhkan lahan luas adalah keberadaan tanah ulayat. Permasalahan terjadi disebabkan karena pemanfaatan tanah ulayat yang selama ini menurut masyarakat seringkali merugikan pemilik tanah ulayat. Namun untuk mengatasi pennasalahan ini, DPM &PTSP Provinsi Sumatera Barat telah menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nornor 6 Tahun
2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dengan menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal. Dengan penetapan Peraturan Gubemur ini diharapkan tercipta pola pemanfaatan tanah ulayat yang saling menguntungkan bagi pemilik tanah ulayat maupun bagi investor dan diharapkan dapat mengeliminasi konflik di kemudian hari ketika kegiatan investasi telah berlangsung di atas tanah ulayat.

Sedangkan untuk keuangan syariah, trend menunj ukkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya keuangan syariah yang jauh dari konsep riba. Bahkan Bank Nagari (BPD Sumatera Barat) turut merespon peningkatan kesadaran masyarakat akan kebutuhan keuangan syariah tersebut dengan melakukan konversi Bank Nagari dari bank konvensional menjadi bank syariah berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada akhir November 2019 yang lalu.
Tantangan utama lainnya dalam mengundang masuknya investasi dari luar untuk mengembangkan ekonomi syariah adalah belum dikenalnya Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah yang berpotensi untuk investasi ekonomi syariah, sehingga perlu promosi yang dapat menarik investor berinvestasi di Provinsi Sumatera Barat di sektor ekonomi Syariah Islam (termasuk industri halal dan keuangan syariah.

Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

a. Keterbatasan kapabilitas untuk meningkatkan kapasitas ekonomi syariah, baik dari sisi SDM maupun dari sisi teknologi informasi.
b. Keterbatasan permodalan usaha syariah dan akses ke lembaga keuangan
c. Terbatasnya akses pasar untuk menjual hasil produksi usaha syariah/ponpes.
d. Pemahaman/kesadaran dan kebanggaan masyarakat untuk berusaha secara syariah masih rendah karena usaha syariah masih dimaknai sebatas pada makanan halal saja.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat

Meskipun Sumatera Barat memiliki potensi dari segi agama, budaya masyarakat dan komitmen kuat dari pemerintah daerah, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Industri Jasa Keuangan terkait pengembangan sektor syariah, khususnya di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

- Masyarakat Sumatera Barat cenderung rasional dalam hal melakukan kegiatan ekonomi. Sehingga kecenderungan untuk menempatkan dana (DPK) pada bank syariah relatif lebih tinggi dikarenakan margin atau imbalan bagi hasil yang akan diperoleh pada bank syariah relatif lebih tinggi dibanding bank konvensional.
- Sejalan dengan imbalan bagi hasil DPK syariah yang cukup tinggi, mempengaruhi equivalent rate penyaluran dana (pembiayaan) yang relatif lebih tinggi dibandingkan suku bunga kredit bank konvensional. Sehingga masyarakat Sumatera Barat cenderung memilih produk pembiayaan atau kredit pada bank konvensional dengan suku bunga yang lebih rendah.
- Persentase masyarakat yang memahami produk keuangan syariah belum begitu tinggi. Diperlukan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar produk keuangan syariah tidak hanya dipandang dari sisi untung-ruginya saja namun penerapan keuangan syariahjuga perlu memperhatikan aspek keberkahan. Hal ini dikarenakan konsep ekonomi syariah adalah satu-satunya konsep ekonomi yang diturunkan berdasarkan nilai-nilai dalam agama Islam.
- Sinergi antar instansi atau lembaga dalam berkomitmen mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Sumatera Barat masih perlu ditingkatkan. Sehingga program-program dan anggaran yang dimiliki oleh masing-masing instansi atau lembaga tersebut lebih fokus untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.

Lampiran

Provinsi Sumatera Barat

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Ekonomi Pesantren

No	Nama Pesantren	Deskripsi Program
1	Pondok Pesantren Al Kautsar Muhammadiyah	Pengembangan Sektor Usaha Jasa *(Fotocopy)*
2	Pondok Pesantren Diniyyah Puteri	Pengembangan Sektor Usaha Jasa *(Laundry)*

Daftar Usaha-Usaha Syariah yang Dikelola Pondok Pesantren

No.	Nama Pesantren	Nama Unit Usaha yang dikelola Santri	Deskripsi
1	Pondok Pesantren Al Kautsar Muhammadiyah	Laundry, Depot Air minum isi ulang, dan barber shop	Sektor Usaha Jasa Fotokopi dan Depot Air Minum isi ulang
2	Pondok Pesantren Diniyyah Puteri	Fashion Diniyyah	Pengembangan Sektor Usaha Baju Muslim
		Zam-zam Laundry	Pengembangan Sektor Usaha (Laundry)
3	Pondok Pesantren Sumatera Thawalib	Jasa Catering	Jasa Catering saat ini hanya untuk sekitar 1.300 orang untuk 3 kali makan sementara kapasitas jasa catering masing memungkinkan untuk dikembangkan di luar pondok pesantren dan sangat berpotensi apabila unit usaha cateing ini di kembangkan menjadi rumah makan/ restaurant.
4	Pondok Pesantren Yayasan Waqaf Ar Risalah	Jasa Konveksi dan Jasa Bordir	Pada saat ini kebutuhan penyediaan seragam siswa berupa kain,jasa menjahit dan border dipenuhi pihak ketiga. Sehingga Yayasan memiliki rencana pembentukan unit usaha konveksi namun pada tahap awal difokuskan untuk memenuhi kebutuhan border

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Provinsi

Jawa Barat

Sekilas

tentang Ekonomi Syariah Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah. Dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yaitu sekitar 49 juta jiwa dimana 98 persen diantaranya Muslim, maka Provinsi Jawa Barat berpeluang untuk dijadikan sebagai poros ekonomi Syariah. Dengan potensi sektor unggulan seperti Pariwisata ramah Muslim, Kuliner Halal, Fesyen Halal serta Kosmetik Halal, Provinsi Jawa Barat memiliki banyak peluang untuk mendominasi pasar domestik dan internasional untuk segmen tersebut. Dukungan pemerintah daerah Jawa Barat dalam bentuk regulasi serta tersusunnya roadmap pengembangan ekonomi Syariah menunjukkan keseriusan pemerintah daerah/provinsi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Provinsi Jawa Barat.

Regulasi Tingkat Daerah
di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah

Peraturan Daerah	Perda No. 13 Tahun 2015 Tentang "Pembinaan dan Pengawasan Produk Barang Higienis dan Halal"
Peraturan Gubernur	Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Ekonomi Halal (*dalam proses*)
Peraturan Gubernur terkait Pariwisata ramah Muslim	Pergub Tim Percepatan Pariwisata ramah Muslim
Peraturan Gubernur terkait Dana Sosial Keagamaan	Nomor 70 Tahun 2015
Rencana / *Masterplan* / *Blueprint* Pengembangan Keuangan Syariah Daerah	Kebijakan Ekonomi Syariah Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru Provinsi Jawa Barat dan Implementasi Pada Perencanaan Pembangunan
Lainnya	Roadmap pengembangan Ekonomi Syariah Provinsi Jawa Barat

Rencana Pemerintah Daerah
di Sektor Ekonomi Syariah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 di Provinsi Jawa Barat memfokuskan pada "Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat". Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, adalah: "Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi".

Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Inflasi		Tingkat Pengangguran		Tingkat Kemiskinan		Konsumsi RT		Konsumsi Pemerintah		Investasi		Ekspor		Impor	
2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
5.64%	5.07%	3.54%	3.21%	8.17%	7.99%	7.25%	6.82%	5.03%	4.75%	3.80%	5.13%	5.58%	4.11%	6.71%	2.39%	2.22%	-5.56%

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jawa Barat Tahun 2018-2023

- Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
- Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
- Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
- Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

9 Program Unggulan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 2018-2023

- Akses Pendidikan Untuk Semua dan Pengembangan Budaya
- Desentralisasi Layanan Kesehatan
- Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi
- Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata
- Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara
- Infrastruktur Konektivitas Wilayah
- Gerakan Bangun Desa (Gerbang Desa)
- Subsidi Gratis Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah)
- Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

Isu Strategis RPJMD Jabar 5 tahun ke depan

- Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia
- Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial
- Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan
- Reformasi Birokrasi

Rencana Pembangunan Ekonomi Syariah di Provinsi Jawa Barat

Sektor Pariwisata Ramah Muslim

- Penguatan sektor Sumber Daya Insani (SDM) di bidang pariwisata ramah Muslim Provinsi Jawa Barat dengan dilakukannya penyusunan modul pelatihan pariwisata ramah Muslim, pelatihan pariwisata ramah Muslim untuk industry dan penerapan Kriteria Pedoman Pariwisata ramah Muslim Jawa Barat serta adanya sertifikasi kompetensi keprofesian
- Peningkatan Kualitas Destinasi Wisata ramah Muslim Bertaraf Internasional dengan Harga Terjangkau:
  - Dilakukannya kajian infrastruktur dan perencanaan pembangunan infrastruktur pariwisata ramah Muslim bertaraf internasional
  - Penyusunan standar kualitas pariwisata ramah Muslim melalui pengembangan aplikasi *Muslim friendly rating*
  - Kajian paket-paket wisata ramah Muslim terintegrasi dan penyusunan paket-paket wisata unggulan
  - Penyediaan Insentif dan stimulus bagi paket wisata dan destinasi unggulan disertai sosialisasi paket wisata ramah Muslim dengan stakeholder terkait
- Peningkatan Daya Saing Industri dan Ekosistem Usaha Pariwisata ramah Muslim
  - Mendorong komitmen Kepala Daerah dan Pimpinan para pelaku usaha pariwisata untuk mengembangkan pariwisata ramah Muslim
  - Penguatan rantai nilai industri pariwisata ramah Muslim
  - Penguatan kerjasama antara lembaga, perusahaan, dan stakeholder untuk meningkatkan daya saing utamanya di sektor transportasi, akomodasi, dan industri makanan dan minuman halal
- Intensifikasi Promosi dan Pengembangan Kelembagaan Pariwisata ramah Muslim.
  - Penguatan branding pariwisata ramah Muslim melalui media sosial
  - Pembuatan platform aplikasi promosi dan e-commerce industri pariwisata ramah Muslim
  - Menyelenggarakan program event-event pariwisata ramah Muslim berkelanjutan
- Pembentukan program penghargaan tingkat daerah yang telah melalui kajian indikator-indikator program penghargaan

Sektor Makanan dan Produk Halal

- Penguatan Regulasi dan Infrastruktur Produk Halal
  - Merumuskan mekanisme standardisasi yang efisien dan efektif baik offline dan online
  - Merumuskan kebijakan standardisasi produk halal
  - Sosialisasi dan implementasi kebijakan dan mekanisme standardisasi produk halal
- Peningkatan Pembentukan Infrastruktur Produk Makanan dan Minuman Halal
- Pembentukan dan percepatan lembaga pemeriksa halal (LPH) produk makanan dan minuman
- Pembentukan tim percepatan standarisasi proses produksi, penyajian, dan sertifikasi jenis makanan dan minuman halal
- Penetapan harga minimum dan pembiayaan sertifikasi halal pada makanan dan minuman
- Pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang dapat menunjang pengembangan industri halal
- Integrasi data system informasi halal
- Standardisasi dan sertifikasi produk makanan dan minuman halal
- Promosi dan literasi produk halal sebagai lifestyle
- Membuka rantai distribusi tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional
- Program daerah unggulan makanan dan minuman halal
- Membuka rantai distribusi tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional
- Program daerah unggulan makanan dan minuman halal
  - Identifikasi pontesi pusat-pusat produk halal
  - Penyusunan strategi pengembangan industri makanan dan minuman halal daerah
  - Sosialisasi program pengembangan industri makanan dan minuman halal
  - Pembangungan infrastruktur dan konektivitas yang memperkuat pengembangan industri makanan dan minuman halal
- Peningkatan Efektivitas Institusi dan Industri Makanan Halal
  - Menyediakan program insentif bagi pelaku usaha
  - Monitoring dan evaluasi

Sektor Fesyen Muslim	Sektor Keuangan Syariah
▪ Penguatan Pasar Fesyen Muslim Jawa Barat o Peningkatan Kompetensi SDM (SKKNI) o Scale-up wirasusaha fesyen Muslim ▪ Peningkatan awareness dan kecintaan terhadap produk fesyen Muslim ▪ Mendorong *market driven* Produk Fesyen Muslim o Penguatan link and match dan peningkatan kapasitas produksi (terutama IKM) o Penguatan industri hulu untuk bahan baku dan industri manufaktur fesyen Muslim o Perlindungan terhadap plagiarisme dan hak cipta o Pemanfaatan teknologi industri 4.0 melalui platform digital	▪ Kolaborasi dan Sinergi dengan sektor Halal value chain o *Co-branding* dengan produk kosmetik halal dan *co-marketing* dengan *halal travel*/pariwisata ramah Muslim Indonesia o Kolaborasi dengan pembiayaan Syariah ▪ Pengoptimalan Kerangka Umum Kerja pada Sektor Keuangan Islam ▪ Kolaborasi di sektor Keuangan Islam agar dapat menyokong Sektor Industri Halal
Sektor Media dan Rekreasi Halal	
▪ Peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM kreatif pada sektor Media & Rekreasi Halal ▪ Peningkatan daya tarik Industri media dan rekreasi halal agar menjadi andalan di pasar nasional ▪ Peningkatan Halal Value Literation di sektor Obat-Kosmetik Halal ▪ Sinergi pengembangan produk kesehatan dan kosmetik halal	

Program Pemerintah Daerah
di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah

Sektor Industri Halal

Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Sektor industri halal unggulan yang akan diprioritaskan pengembangannya adalah sektor makanan minuman, pariwisata, dan fesyen. Selanjutnya, Peraturan Gubernur terkait ekonomi syariah akan menjadi landasan hukum untuk Kabupaten/Kota mengembangkan potensi ekonomi syariah. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah membentuk Konsorsium Halal Center yang terdiri dari 17 Perguruan Tinggi di Jawa Barat. Pembentukan Konsorsium ini merupakan wujud pengembangan *halal value chain* termasuk riset sains halal untuk memperkuat perkembangan ekonomi syariah di Jawa Barat.

Program Pendukung Sektor Halal

Makanan dan Minuman Halal	▪ Sertifikasi halal produk makanan dan minuman ▪ Sertifikasi halal Rumah Potong Hewan (RPH) ▪ Promosi perdagangan dalam dan luar negeri, Pameran
Fesyen Muslim	▪ Festival Busana Muslim (Muslim Fashion Festival Depok, Cirebon Halal Festival, Subang) ▪ Promosi perdagangan dalam dan luar negeri, Pameran ▪ Peningkatan teknologi industri terkait produk bersih
Pariwisata Ramah Muslim	Pembentukan Kota/Kabupaten Halal di Cirebon

Jumlah Kegiatan Syariah/Halal

	Jumlah Event Produk Daerah	Jumlah Event Produk Halal/Syariah/Islami
Makanan dan Minuman	3	2
Fesyen	3	1
Pariwisata	2	1

Sentra Sektor Industri Halal

Makanan dan Minuman Halal	Fesyen Muslim
Sentra sektor makanan minuman halal direncanakan ada di Cirebon, Depok, dan Bogor dengan cara menggiatkan program sertifikasi makanan minuman halal. Pertimbangan lainnya bahwa Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Bandung telah menyumbangkan pendapatan terbesar pada Provinsi Jawa Barat pada sektor makanan.	Sentra fesyen Muslim akan dipusatkan di Bandung. Pemerintah telah membuat blue-print perencanaan Kota Bandung sebagai pusat bisnis busana Muslim dunia.

Penetapan Daerah Pariwisata Ramah Muslim

- Beberapa daerah memiliki potensi pariwisata ramah Muslim, dikarenakan kearifan lokal yang sudah bernuansa Islami seperti Depok dan Majalengka; wisata alam seperti Cirebon, Kuningan, Purwakarta dan Subang; dan wisata kerajinan dan kuliner seperti Purwakarta.
- Atensi Pemerintah dalam melihat pariwisata ramah Muslim sebagai *leading sector* juga terlihat dari deklarasi kota halal pada Kota Depok, festival kebudayaan yang mengandung unsur Islami pada Kota Majalengka, dan peninggalan bangunan sejarah islam pada Kota Cirebon.
- Potensi kunjungan wisatawan asing juga terlihat meningkat, terutama wisata air. Khusus di daerah Kabupaten Subang, terjadi peningkatan wisatawan asing dari timur tengah untuk berekreasi wisata air.

Tahap	Daftar Desa/Kabupaten/Kota Wisata ramah Muslim
Sudah ada	Kabupaten Halal di Cirebon
Dalam tahap perencanaan	Kota Bandung

Program Pendorong Pariwisata Ramah Muslim

Program Industri Pariwisata melalui kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Wisata ramah Muslim tahun 2020, mendorong kepada hotel-hotel untuk melakukan pariwisata ramah Muslim, melalui hal-hal sebagai berikut:

- Menyediakan makanan halal
- Menyediakan fasilitas shalat, pemberitahuan waktu azan, dan arah kiblat.
- Adanya pemisahan antara kolam renang dan spa terpisah antara lelaki dan perempuan.
- Bar hotel bebas dari minuman beralkohol.
- Menyediakan Al-Qur'an di kamar hotel.
- Menyediakan tempat wudhu yang terpisah antara pria dan wanita
- Menyediakan SDM di bidang pramuwisata untuk berbahasa Arab
- Menyediakan sarana berbuka puasa dan sahur.

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pendukung Sektor Halal

- Program IKRA (Industri Kreatif Syariah); Total existing hasil kurasi ±30 UMKM
- Program Pariwisata ramah Muslim
- Festival Ekonomi Syariah wilayah Jawa (FeSyar).
- International Sharia Economic Festival (ISEF)
- Program FUSARI (Fasilitasi UMKM dan Pondok Pesantren oleh Akademisi dan Praktisi)
- Pendampingan UMKM Produk berlabel Halal
- *Capacity Building*: Seminar Optimalisasi & Digitalisasi Ziswaf untuk pengembangan UMKM.
- Desa Berdikari (PSBI Berbasis Ziswaf)
- Seminar terkait Sertifikasi Halal bekerjasama dengan LPPOM MUI yang diikuti oleh 215 UMKM di Priangan Timur.
- Pendampingan kepada UMKM binaan/mitra atau klaster binaan serta Wirausaha Bank Indonesia untuk mendapatkan sertifikat halal dari lembaga terkait, berjumlah 27 UMKM.
- Pendampingan IKRA terhadap 4 UMKM fesyen, 2 UMKM Makanan.

Sektor UMKM dan Ekonomi Pesantren

Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat

One Pesantren One Product (OPOP)

- Program One Pesantren One Product (OPOP) adalah program untuk mencetak pesantren mandiri melalui pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kapasitas ekonomi pesantren melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi dan informasi, peningkatan akses pasar dan fasilitasi akses pembiayaan.
- Peserta OPOP merupakan pesantren atau koperasi pesantren yang terdaftar resmi yang dibuktikan dengan NSPP (Nomor Standar Pondok Pesantren) atau NIK (Nomor Induk Koperasi) yang memiliki usaha

skala mikro atau kecil berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan belum berbadan usaha Perseroan Terbatas (PT).

- Dengan jumlah total pesantren terbanyak di Indonesia, Provinsi Jawa Barat menginisiasi ekonomi syariah dalam berbagai sektor baik itu makanan, minuman, fesyen, obat-obatan, pertanian, peternakan, otomotif, dan lain-lain.

Program Kemitraan UMKM dan Pengusaha Besar

Tahap	Daftar Program Kemitraan di peringkat Desa/Kabupaten/Kota
Sudah ada	▪ OPOP (sektor makanan dan minuman, fesyen, pertanian dan peternakan) ▪ Program Wirausahawan Baru (Start Up) ▪ Program Wirausaha Naik Kelas (Scale Up) ▪ Kredit Usaha Mikro : Kredit Mesra dari CSR Bank BJB
Tahap perencanaan	Inkubator bisnis

Program Pemberdayaan UMKM

Sektor	Daftar Program Pendampingan

Makanan dan Minuman Halal	▪ Program UMKM Juara
	  ○ Pendampingan selama 6 bulan;
	  ○ Fasilitasi legalitas hak merk;
	  ○ Fasilitasi pendampingan, pameran dalam daerah, pameran luar provinsi, pameran luar negeri
	▪ Pelatihan pengolahan makan berbahan baku lokal
	▪ Pelatihan keterampilah, olahan makanan bagi rumah tangga miskin
	▪ Pendampingan dan pelatihan ekspor

Fesyen Muslim	▪ Program UMKM Juara ▪ Pelatihan kerajinan kain perca ▪ Pelatihan produk bersih industri tekstil ▪ Pendampingan dan pelatihan ekspor

Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	2017	2018	2019
IKM mendapat pendampingan	1,593 Unit Usaha	1,797 Unit Usaha	1,797 Unit Usaha
IKM mendapat pendampingan sertifikasi halal	750 produk	279 produk	300 produk
UMKM mendapat pendampingan	-	-	2,500 UMKM; 100 UMKM untuk fasilitasi hak merk

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Ekonomi Pesantren

Jumlah Pesantren	Program Pengembangan Ekonomi (*Lampiran*)
35	29

- Holding pesantren Jawa Barat
- Pendampingan ponpes terkait pembentukan Koperasi Primer

- Pengembangan pengelolaan usaha sampah di pesantren Bina Insan Mulya, Kabupaten Cirebon
- Pengembangan usaha perikanan di PP. Kebon Cinta Ciwaringin, Kab. Cirebon

- Program sosial Bank Indonesia untuk kemandirian pondok pesantren
- Pengembangan usaha terpadu (sentra durian sinapel, pengembangan sampah dan pengembangan air minum) di PP. Sabilul Mardiyah, Kabupaten Majalengka
- Pengembangan usaha perikanan di PP. Salman Dukupuntang, Kab. Cirebon
- Pengembangan usaha laundry dan bakery di PP. Al islah Tajug, Kabupaten Indramayu
- Pengembangan usaha pertanian terpadu (greenhouse) di PP. Almuminin, Kabupaten Indramayu
- Pengembangan usaha di konveksi pakaian di PP. Kebon Jambu Al Islami, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon
- Pengembangan usaha laundry di PP. An-Nur, Kabupaten Kuningan
- Program dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian pesantren, di wilayah kerja Tasikmalaya. Contohnya, intervensi program di unit usaha yang dilakukan oleh pesantren baik di bidang pertanian, peternakan, ritel, dll.
- Melakukan riset terkait potensi pengembangan ekonomi pesantren di wilayah Priangan Timur.

Program Pengembangan UMKM Syariah

Nama Program	Detil Program
Pitching UMKM bersama Fintech Syariah	▪ Pelatihan *pitching* untuk UMKM ▪ Pitching day bersama Fintech syariah ▪ Sosialisasi tentang Fintech syariah ▪ Management keuangan syariah bersama Fintech Syariah
UMKM melek Bursa Saham Syariah	▪ Sosialisasi tentang Bursa Saham ▪ Sosialisasi tentang saham syariah ▪ Bagaimana tahapan menuju IPO ▪ Bagaimana masuk bursa saham syariah

Sektor Keuangan Syariah

Program Otoritas Jasa Keuangan (Regional)

Sub-sektor	Detil Program
Perbankan Syariah	▪ Mendorong upaya Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) atau Spin Off selambatnya tahun 2023. ▪ Mendorong digitalisasi perbankan syariah ▪ Mendorong perbankan syariah untuk bersinergi dengan lembaga keuangan syariah lainnya untuk memperkaya produk dan jasa keuangan syariah. ▪ Meningkatkan inklusi dan literasi produk dan jasa perbankan syariah.
Bank Pembangunan Daerah	▪ Mendorong Bank untuk melakukan penataan struktur kepemilikan saham (maksimal kepemilikan oleh lembaga jasa keuangan lainnya sebesar 40%) selambatnya tahun 2028 untuk mengurangi dominasi kepemilikan yang dapat berdampak negative terhadap operasional bank ▪ Mendorong BPD dalam pemenuhan kepengurusan dan perkuatan permodalan di tahun 2020 ▪ Pengawasan secara aktif untuk memastikan penyerapan profil risiko dan Tata Kelola bank (GCG) berjalan dengan baik.

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Keuangan Syariah

- Pemanfaatan QRIS untuk lembaga amil zakat (Bank CIMB Niaga Syariah)
- Pengembangan kampung wirausaha BSM
- Program Gerakan Nasional Non Tunai di pondok pesantren bekerjasama dengan perbankan

- Program pendampingan dalam rangka pembentukan koperasi primer bagi pondok pesantren
- Program pendampingan UMKM untuk akses layanan keuangan
- Program QRIS untuk LAZISWAF bekerjasama dengan perbankan dan penyedia jasa sistem pembayaran

Sektor Keuangan Mikro Syariah

Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Program Pengembangan Koperasi Syariah

Program	Institusi Keuangan Mikro Syariah
Expo Pembiayaan Syariah	▪ Kopontren Al-Mughni ▪ Kspps Bmt Barrah ▪ Kspps Bmt Al-Amanah
Bimtek Penguatan Usaha KSP/USP-Kop dan KSPPS/USPPS-Kop	▪ Kbmt Tazkia Garut ▪ Bmt Ciawi Tasik ▪ Kspps Bmt El Taqwa ▪ Kopontren Al Khoeriah ▪ Kopontren Ar Rahmah ▪ Bmt At Ta'awun ▪ Kspps Bmt Al Fajr

Program Otoritas Jasa Keuangan (Regional)

Program Pendampingan, Pengawasan, dan Pengembangan Bank Wakaf Mikro (BWM)

- Koperasi LKMS Berkah Bersama Baiturrahman
- Koperasi LKMS Berkah Umat Ciganitri
- Koperasi LKMS Barokah Pesantren Al-Masthuriyah
- Koperasi LKMS Amal Dana Bergulir
- Koperasi LKMS Bita Amanah Umat

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Koperasi dan Keuangan Mikro Syariah

- Program pendampingan dalam rangka pembentukan koperasi primer bagi pondok pesantren
- Program pendampingan UMKM untuk akses layanan keuangan

Program Pendampingan Koperasi Syariah

Koperasi Syariah Desk	▪ Pertemuan rutin para palaku koperasi Syariah rutin ▪ Konsultasi rutin setiap Kamis jam 3.30-5.00 tentang koperasi Syariah ▪ Membantu, membina dan mendampingi proses pendirian koperasi Syariah ▪ Membuat jejaring bisnis antar koperasi Syariah

Sektor Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Program BAZNAS Provinsi Jawa Barat

Kategori Program ZIS dan Alokasi Provinsi Jawa Barat

Kategori	Nama Program	Jumlah Penerima Manfaat (jiwa)	Besar Alokasi Penyaluran (Rp)
Sosial Kemanusiaan	1. Layanan Aktif 2. Tanggap Bencana 3. Respon Kebencanaan 4. Stimulan Rutilahu 5. Bantuan Rutitebe 6. Sosial Kemanusiaan	15,335	6,465,708,010
Pendidikan	1. Beasiswa Mulia 2. Beasiswa Zakti 3. Fasilitas Belajar 4. Advokasi Pendidikan	3,294	6,632,729,904
Kesehatan	1. Layanan Kesehatan 2. Layanan Mobil Sehat 3. Siaga Gizi Sehat 4. Sanitasi Air Bersih 5. Stimulan Rutisae 6. Advokasi Kesehatan	1,906	4,379,243,427
Pemberdayaan Ekonomi	1. Pemberdayaan Masyarakat 2. Pelatihan Produktif 3. Sarana Mandiri 4. Bantuan Wirausaha 5. Pendampingan Usaha	3,245	1,914,286,000
Dakwah	1. Ramadhan Ceria 2. Safari Ramadhan 3. Berbagi Qur'an 4. Fasilitas Ibadah 5. Pembinaan Imtak 6. Syiar Islam	12,801	7,450,907,846

Program ZIS BAZNAS Provinsi Jawa Barat Dalam Mengatasi Permasalahan Pandemi Covid-19

Nama Program	Mekanisme Penyaluran Bantuan	Alokasi Penyaluran (Rp)*	Tipe Penerima Bantuan/ Manfaat *	Dampak yang Terjadi pada Penerima Manfaat
Paket Sembako	Penyerahan paket Sembako	-	-	-
Bantuan Tunai	Bantuan uang tunai	-	-	-
Penyemprotan Disinfectan	Penyemprotan Disinfectan di 1.406 lokasi	-	-	-
Hand Sanitizer	Pembagian 12.641 botol Hand Sanitizer	-	-	-
Paket Makan	Pemberian Paket Makan sebanyak 8.150 paket	-	-	-
Paket APD Medis dan Vitamin	Pemberian Paket APD Medis dan Vitamin sebanyak 4.916	-	-	-
Wastafel Sehat	Pembuatan Wastafel Sehat sebanyak 253 unit	-	-	
Pembagian Masker	Pembagian Masker sebanyak 94.661 buah	-	-	-
TOTAL	-	35.722.498.359	450.022	-

NB: Data yang tersedia untuk Alokasi Penyaluran dan Tipe Penerima Bantuan/Manfaat hanya Data Total saja

Gambaran
Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah

Sektor Industri Halal

Nilai Ekspor Provinsi Jawa Barat

Sektor	Jumlah Ekspor (USD)	% Dibandingkan dengan Total Ekspor Non-Migas
Makanan dan minuman	1.181.801.167	0.0047 %
Fesyen	3.103.470.000	12.37 %
Fesyen Muslim	2.297.970	0.000009 %

Jumlah Usaha/ Merk dengan Sertifikat Halal pada Sektor Makanan dan Minuman (Mamin)

Sektor Usaha (Tahun 2018)		Sektor Usaha (Tahun 2019)	
Roti	28	Roti	27
Katering dan Restoran	84	Katering dan Restoran	83
Tepung, Kanji, and produk turunan/olahan	0	Tepung, Kanji, and produk turunan/olahan	5
Es, es krim, dan bahan-bahan pendukung	0	Es, es krim, dan bahan-bahan pendukung	5
Susu dan produk olahan/turunan susu	5	Susu dan produk olahan/turunan susu	5
Makanan olahan, daging dan ungags	44	Makanan olahan, daging dan unggas	42
Makanan olahan ikan	16	Makanan olahan ikan	16
Makanan olahan telur	6	Makanan olahan telur	6
Makanan ringan	61	Makanan ringan	60
Pemanis, bumbu dapur, bumbu penyedap/ pelengkap	30	Pemanis, bumbu dapur, bumbu penyedap/ pelengkap	30
Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	41	Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	41
Semua Usaha/Brand Tersertifikasi Halal	315	Semua Usaha/Brand Tersertifikasi Halal	320

Sumber: Daftar Belanja Produk Halal LPPOM MUI hingga periode Maret-April-Mei 2019

Kontribusi Sektor Mamin terhadap Perekonomian Jawa Barat

	2018	2017	2016	2015	2014
PDRB (Milliar Rupiah)					
Mamin olahan	91,836.43	83,165.63	76,342.3	66,062.75	56,286.69
Mamin olahan, Base = 2010	66,599.38	61,985.7	58,457.97	53,215.43	48,525.06
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb)	46,342.36	40,779.06	36,081.43	31,846.94	27,883.62
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb), Base = 2010	32,067.08	29,552.34	27,196.75	24,864.83	22,828.67
Pertumbuhan PDRB (%)					
Mamin olahan, Base = 2010	7.44	6.03	9.85	9.67	10.59
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb), Base = 2010	8.51	8.66	9.38	8.92	6.19
Kontribusi pada PDRB (%)					
Mamin olahan	4.68	4.65	4.62	4.33	4.06
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb)	2.36	2.28	2.18	2.09	2.01

Total Produksi Daging Daerah (Tahun 2017)

Populasi Ternak		Produksi Daging Ternak (kg)	
Sapi Potong	405,334	Sapi	1,659,849
Sapi Perah	115,827	Sapi Impor	70,839,666
Kerbau	102,743	Kerbau	1,906,667
Kuda	12,928	Kuda	56,622
Kambing	1,251,354	Kambing	9,396,708
Domba	11,425,574	Domba	11,245,574
Populasi Unggas		**Produksi Daging Unggas (kg)**	
Ayam Kampung	26,166,517	Ayam Kampung	26,860,050
Ayam Petelur	15,157,182	Ayam Petelur	13,519,991
Ayam Broiler	122,314,586	Ayam Broiler	823,863,375
Bebek	11,649,227	Bebek	8,913,345

Skor Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) Tahun 2018 Provinsi Jawa Barat

Akses	79
Komunikasi	46
Lingkungan	42
Jasa	56
Skor IMTI	**52**

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Jawa Barat

	2018	2017	2016	2015	2014
PDRB (Milliar Rupiah)					
Jasa akomodasi	8,298.91	7,616.07	6,932.62	6,251.88	5,838.53
Jasa akomodasi, Base = 2010	6,093.07	5,733.08	5,362.61	4,911.72	4,716.36
Pertumbuhan PDRB (%)					
Jasa akomodasi, Base = 2010	6.28	6.91	9.18	4.14	5.08
Kontribusi pada PDRB (%)					
Jasa akomodasi	0.42	0.43	0.42	0.41	0.42
Jumlah turis					
Turis mancanegara	-	1,962,639	2,027,629	4,428,094	4,984,035
Turis domestik	-	47,992,088	56,334,706	58,728,666	59,644,070

Rating untuk Pariwisata Ramah Muslim di Provinsi Jawa Barat

Skor	Aspek		Skor	Aspek	
Skor Akses	Udara	5	Skor Lingkungan	Kedatangan Turis Muslim	5
	Kereta	5		Jangkauan Wi-Fi	4
	Laut	2		Komitmen terhadap Pariwisata ramah Muslim	3
	Infrastruktur Jalan	4			

Skor Komunikasi	Panduan Pelancong Muslim	3	Skor Jasa		
	Edukasi Pemangku Kepentingan	3		Restoran Halal	5
	Jangkauan Pasar	4		Masjid	5
	Pemandu Tur	5		Bandara	5
	Pemasaran Digital	5		Hotel	5
				Atraksi	1
			Skor Total		69
			Rata-rata Skor		4,06

NB: data lengkap bisa didapatkan di dalam Laporan Perkembangan Pariwisata ramah Muslim Daerah 2019-2020

Indikator Pariwisata Ramah Muslim Provinsi Jawa Barat

Indikator	Skor/Nilai	Keterangan
Akses	Cukup baik	Terdapat akses udara, akses kereta, akses laut, dan infrastruktur jalan yang baik
Akses Udara	Baik	Terdapat bandara internasional
Bandara International	2	
Akses Kereta	Baik	Terdapat akses kereta
Jumlah rute	Ada	Panjang 926 km, belum terinfo banyak rutenya, melayani perjalanan kereta di daerah Jawa Barat dan sekitarnya
Akses Laut	Cukup baik	Terdapat pelabuhan
Pelabuhan	1	
Infrastruktur Jalan	Baik	Kondisi jalan sebagian besar dalam kondisi baik dan layak
Jalan Provinsi	1,949 km	Panjang 1,949 km, 450 km nya adalah jalan tol
Komunikasi		Memiliki panduan pengunjung, edukasi untuk pemangku kepentingan, kegiatan pendukung jangkauan pasar, pemandu tur, dan melakukan pemasaran digital
Panduan bagi Pelancong Muslim	Cukup baik	Hanya terdapat buku panduan dalam Bahasa Inggris
Eksemplar Bahasa Inggris	2	Terdapat 2 jenis eksemplar
Edukasi Pemangku Kepentingan	Baik	Terdapat workshop pariwisata ramah Muslim
Workshop	25	
Jangkauan Pasar	Baik	Terdapat beberapa kegiatan pariwisata ramah Muslim, terutama festival ramah Muslim
Festival Ramah terhadap Muslim	42	
Trip Keluarga	Ada	Al Jazeerah TV, Saudi Arabia
Pemandu Tur	Baik	Terdapat pemandu tur yang menguasai Bahasa Arab dan Bahasa Inggris
Bahasa Arab	107	
Bahasa Inggris	561	
Pemasaran Digital	Baik	Terdapat aplikasi, web, media sosial, dan pemasaran digital lainnya
Aplikasi	2	Google apps
Website	9	

Indikator	Skor/Nilai	Keterangan
Media Sosial	3	Facebook, Twitter, Instagram
Lainnya	Ada	Video youtube, paket wisata ramah Muslim, kampanye *influencer*
Lingkungan	Baik	Banyak wisatawan yang datang ke Jawa Barat. Cakupan jaringan wifi-nya juga baik. Jawa Barat memiliki komitmen untuk mengembangan pariwisata ramah Muslim
Kedatangan Turis	Baik	Terdapat wisatawan domestik dan mancanegara, namun turis mancanegara relatif lebih sedikit
Wisatawan Domestik	63,298,608	
Wisatawan Mancanegara	155,862	90% nya Muslim
Jangkauan Wifi	Baik	Jaringan internet di bandara gratis dan kualitasnya bagus
Komitmen terhadap Pariwisata ramah Muslim	Cukup baik	Sedang menyusun strategi pengembangan pariwisata ramah Muslim. Sudah mengadakan beberapa konferensi, seminar, serta mendorong seritfikasi halal
Jasa	Baik	Sebagian besar kebutuhan industri pariwisata ramah Muslim dan hal-hal yang fundamental seperti restoran halal, masjid, bandara, hotel, dan atraksi sudah dimiliki dengan kualitas yang baik
Restoran Halal	Baik	Restoran dan outlet bersertifikasi halal sudah banyak walaupun masih ada yang *self-claimed*
Restoran bersertifikat halal	119	
Outlet bersertifikat halal	2,608	
Restoran/ Rumah makan halal *(self-claimed)*	3,671	
Masjid	Baik	Terdapat banyak masjid dan mushala
Masjid	49,938	
Mushala	37,867	
Bandara	Baik	
Mushala	6	2 di area transit, 4 di area umum
Shalat Jumat	Ada	
Hotel	Baik	Sudah ada hotel dengan dapur bersertifikat halal dan hotel yang tidak menyediakan menu babi dan alkohol
Hotel dengan dapur bersertifikat halal	1	
Hotel yang tidak menyediakan menu babi	-	Tidak terinfo
Hotel yang tidak menyediakan menu babi dan alkohol	753	
Atraksi	Baik	Terdapat situs budaya Islami serta wisata budaya dan lokal yang ramah Muslim
Situs budaya islami	13	
Daya tarik wisata budaya	436	99 yang ramah Muslim
Daya tarik lokal	1,496	60 yang ramah Muslim

Sektor Keuangan Syariah

Indeks Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah

Indeks	Tahun 2016	Tahun 2019
Indeks literasi keuangan Syariah (OJK)	4.7%	18.06%
Indeks inklusi keuangan Syariah (OJK)	22.3%	21.99%
Indeks literasi ekonomi Syariah (BI)	-	16.9%

Profil keuangan BPD Syariah – Bank Jabar Banten Syariah (*Milliar Rupiah*)

	2015	2016	2017	2018	2019
Total aset gross	6,440	7,442	7,714	6,741	7,723
Total pembiayaan	5,000	4,540	5,447	4,659	Belum ada
Total DPK	4,700	5,119	5,978	5,182	5,788.15
Total FDR	104.75%	98.73%	91.03%	89.85%	93.53%
Total NPF	6.93%	17.91%	22.04%	4.58%	3.54%
Pangsa pasar (%)	-	-	-	5%	5.5%

Profil Industri Perbankan Syariah (BUS) di Jawa Barat (*Milliar Rupiah*)

	2018	2019
Pangsa pasar (%)	23.1%	25%
Pembiayaan berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	4,808	5,815
Modal kerja (bukan UMKM)	2,603	2,048
Investasi (UMKM)	2,377	3,167
Investasi (bukan UMKM)	1,818	1,338
Konsumsi	12,979	14,894
NPF berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	292	260
Modal kerja (bukan UMKM)	4	27
Investasi (UMKM)	125	119
Investasi (bukan UMKM)	13	10
Konsumsi	252	305
Total		
Total aset gross	39,904	45,089
Total pembiayaan	24,585	27,261
Portfolio pembiayaan UMKM (%)	29.2%	32.9%
Total DPK	30,431	35,244
Total FDR	80.79%	77.35%
Total NPF	686	721
Total NPF (%)	2.8%	2.6%

Profil Industri Perbankan Syariah (UUS) di Jawa Barat (dalam *Rupiah*)

	2018	2019
Pangsa pasar (%)	8.5%	9%
Pembiayaan berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	1,107	1,044
Modal kerja (bukan UMKM)	535	472
Investasi (UMKM)	250	259
Investasi (bukan UMKM)	647	667
Konsumsi	6,852	8,047
NPF berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	100	311
Modal kerja (bukan UMKM)	-	183
Investasi (UMKM)	11	23
Konsumsi	109	145
Total		
Total aset gross	12,296	12,371
Total pembiayaan	9,391	10,489
Portfolio pembiayaan UMKM (%)	14.5%	12.4%
Total DPK	7,950	7,742
Total FDR	118.13%	135.48%
Total NPF	220	661
Total NPF (%)	2.3%	6.3%

Sektor Keuangan Mikro Syariah

Jumlah LKMS dan BWM yang Mendapatkan Program Pendampingan dan Pengawasan dari OJK

LKMS	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah yang mendapat pendampingan OJK	1	4	5

Profil Fundamental LKMS dan BWM di Bawah Pengawasan OJK

LKMS dan BWM	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah LKMS yang berada di wilayah daerah	2	5	6
Jumlah anggota LKMS	40	100	120
Jumlah pegawai LKMS	9	22	26
Modal sendiri (*dalam Rupiah*)	508.5 Juta	517.5 Juta	487 Juta
Volume usaha (*dalam Rupiah*)	45 Juta	301 Juta	727 Juta
Sisa Hasil Usaha/SHU (*dalam Rupiah*)	1.32 Juta	33.1 Juta	125 Juta
Total asset (*dalam Rupiah*)	786 Juta	17,536 Juta	21,836 Juta
Rata-rata pembiayaan LKMS (*dalam Rupiah*)	0 < n <= 5 jt 100% 1,25 jt < n <= 10 jt 0% 10 jt < n <= 20 jt 0%	0 < n <= 5 jt 100% 1,25 jt < n <= 10 jt 0% 10 jt < n <= 20 jt 0%	0 < n <= 5 jt 100% 1,25 jt < n <= 10 jt 0% 10 jt < n <= 20 jt 0%

LKMS dan BWM	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
	20 jt < n <= 50 jt 0% > 50 jt 0%	20 jt < n <= 50 jt 0% > 50 jt 0%	20 jt < n <= 50 jt 0% > 50 jt 0%

Jumlah IKMS dan BWM yang Mendapatkan Program Pendampingan dan Pengawasan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat

IKMS	2019
Jumlah IKMS yang mendapatkan program pendampingan	23
Jumlah IKMS yang diawasi oleh Dinas (pengawasan yang dimaksud adalah pengecekan laporan RAT, kunjungan ke IKMS, dsb.)	23

Profil Fundamental IKMS dan BWM di Bawah Pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Koperasi Syariah (KSPPS) di Provinsi Jawa Barat

IKMS (KSPPS/USPPS, BMT, Kopontren)	Tahun 2019
Jumlah IKMS yang berada di wilayah kerja	23
Jumlah anggota IKMS	116.720
Jumlah modal sendiri (*dalam Rupiah*)	73.151.034.913
Jumlah volume usaha* (*dalam Rupiah*)	254.749.331.396,41
Jumlah sisa hasil usaha (*dalam Rupiah*)	1.534.243.042
Jumlah aset IKMS	448.169.995.228,86
Rata-rata pembiayaan IKMS di Wilayah kerja	0 < n <= 5 jt 100% 1,25 jt < n <= 10 jt 0% 10 jt < n <= 20 jt 0% 20 jt < n <= 50 jt 0% > 50 jt 0%

NB: Data untuk Volume Usaha hanya tersedia dalam bentuk Pembiayaan ke anggota KSPPS saja

Sektor Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Daftar BAZNAS Aktif dan LAZ Aktif (Rekomendasi BAZNAS)

28 BAZNAS aktif dan 21 LAZ (Rekomendasi BAZNAS)	Baznas Provinsi Jawa Barat, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Kerawang, Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Indramayu, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran, Kota Banjar serta LAZ Rumah

	Zakat Indonesia, LAZ Daarut Tauhid , LAZ Perkumpulan Persatuan Islam, LAZ Rumah Yatim Ar-Rohman Indonesia, LAZ Panti Yatim Indonesia Al Fajr, LAZ Semai Sinergi Umat,LAZ Gema Indonesia Sejahtera,LAZ Yayasan Al Hilal Rancapanggung,LAZ Rumah Peduli Umat Bandung Barat,LAZ Zakatku Bakti Persada,LAZ Indonesia Berbagi,LAZ Amal Madani Indonesia,LAZ Insan Masyarakat Madani,LAZ Al Bunyan Bogor,LAZ Yayasan Zakat Sukses,LAZ Yayasan Nahwa Nur,LAZ Yayasan Rumah Amal,LAZ Yayasan Muslim Al-Kahfi Bekasi,LAZ Yayasan Ukhuwah Care Indonesia, LAZ Yayasan Tasdiqul Quran, LAZ Yayasan Baitulmaalku

Alokasi APBD/Hibah Pemerintah Daerah kepada Institusi Pengelola Zakat yang Resmi

Daftar Alokasi APBD/Hibah	Nominal Alokasi (Rp)
Hak keuangan pimpinan	864,920,000
Biaya administrasi umum	82,580,000

Jumlah Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah (Rp)

Jenis Dana	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Penghimpunan Zakat			
▪ Zakat Fitrah	9,000,000	6,435,000	2,311,750
▪ Zakat Maal/Harta	15,193,831,261	23,928,810,351	24,422,731,718
Penghimpunan Infak			
▪ Infak Bebas	1,099,637,154	463,767,338	890,137,180
▪ Infak Terikat (termasuk CSR dan kurban)	94,560,929	766,791,703	1,537,415,706

Jumlah Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (Rp)

Jenis Dana	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Penyaluran Zakat	19,807,521,532	18,623,356,169	25,824,184,787
Penyaluran Infak	782,590,300	338,966,500	1,018,690,400
Jumlah Penerima Manfaat Tercatat			
▪ Perorangan	2,086 Orang	1,870 Orang	2,874 Orang
▪ Yayasan/Komunitas	2,125 Orang	1,173 Orang	1,601 Orang

Besar Alokasi Penyaluran Zakat, Infak, Infak Terikat, Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Bidang Program	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Sosial Kemanusiaan	6,662,476,100	4,545,051,053	6,478,708,010
Pendidikan	3,417,232,000	3,646,943,500	6,632,729,904
Kesehatan	2,448,043,700	4,541,055,700	4,379,243,427
Pemberdayaan Ekonomi	2,168,610,500	1,840,491,000	1,914,286,000
Dakwah	5,111,159,232	4,562,534,116	7,437,907,846

Program Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah di Provinsi Jawa Barat

No	Kategori	Nama Program	Jumlah Penerima Manfaat (Jiwa)	Besar Alokasi Penyaluran (Rp)
1	Sosial Kemanusiaan	1. Layanan Aktif 2. Tanggap Bencana 3. Respon Kebencanaan 4. Stimulan Rutilahu 5. Bantuan Rutitebe 6. Sosial Kemanusiaan	15,335	6,465,708,010
2	Pendidikan	1. Beasiswa Mulia 2. Beasiswa Zakti 3. Fasilitas Belajar 4. Advokasi Pendidikan	3,294	6,632,729,904
3	Kesehatan	1. Layanan Kesehatan 2. Layanan Mobil Sehat 3. Siaga Gizi Sehat 4. Sanitasi Air Bersih 5. Stimulan Rutisae 6. Advokasi Kesehatan	1,906	4,379,243,427
4	Pemberdayaan Ekonomi	1. Pemberdayaan Masyarakat 2. Pelatihan Produktif 3. Sarana Mandiri 4. Bantuan Wirausaha 5. Pendampingan Usaha	3,245	1,914,286,000
5	Dakwah	1. Ramadhan Ceria 2. Safari Ramadhan 3. Berbagi Qur'an 4. Fasilitas Ibadah 5. Pembinaan Imtak 6. Syiar Islam	12,801	7,450,907,846

Indeks Zakat Nasional (IZN) Jawa Barat

	2018	2019
Indeks Zakat Nasional/IZN (Dimensi Makro)		
Regulasi	Belum ada	1
Dukungan Finansial dari Pemerintah (APBN/APBD) untuk BAZNAS	Belum ada	1
Jumlah Resmi Lembaga Zakat/OPZ, muzakki, and mustahik	0.75	1
Rasio, Jumlah muzakki individual/jumlah rumah tangga di level Provinsi	Belum ada	Belum ada
Rasio, Jumlah dari muzakki institusi/jumlah institusi di level Provinsi	0.75	Belum ada
Database dari institusi/lembaga zakat yang terdaftar	0.5	0,33
Total Indeks Makro	**0.15**	**0,80**
Indeks Zakat Nasional/IZN (Dimensi Mikro)		
Penghimpunan	0.75	1
Pengelolaan	0.75	1
Penyaluran	0.88	1

Pelaporan	1	1
Indeks Kesejahteraan CIBEST	1	1
Modifikasi Indeks Pengembangan Manusia (HDI)	0.75	1
Kemandirian	0.5	0,58
Institutional	0.84	1
Dampak Zakat	0.8	0,72
Total Indeks Mikro	**0.82**	**0,83**

Indeks Skor Literasi dan Pemahaman Zakat Jawa Barat

	2020
Indeks Literasi Zakat	73.38
Indeks Pemahaman Dasar tentang Zakat	78.53
Indeks Pemahaman Lanjutan tentang Zakat	63.83

Indeks Skor Literasi dan Pemahaman Wakaf Jawa Barat

	2020
Indeks Literasi Wakaf	59.93
Indeks Pemahaman Dasar tentang Wakaf	68.04
Indeks Pemahaman Lanjutan tentang Wakaf	44.86

Sektor UMKM dan Ekonomi Pesantren

Jumlah Pesantren dengan Usaha-Usaha Syariah

22 Pondok Pesantren	57 Usaha-usaha Syariah (*detil di Lampiran*)

Sektor Pendidikan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Perguruan Tinggi yang Menyediakan Program Studi Ekonomi dan Keuangan Syariah Terkait

Jenjang	Jumlah Universitas tahun 2019	Program Studi tahun 2019		2018		2019	
		Nama Program studi	Jml. Program Studi	Jml. Dosen	Jml. Mahasiswa	Jml. Dosen	Jml. Mahasiswa
Sarjana	90	Akuntansi Syariah	4	21	483	21	333
		Bisnis Islam	1	8	355	8	177
		Ekonomi Syariah	55	343	12.464	343	7.070
		Hukum Ekonomi Syariah	27	173	5.465	173	2.974
		Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam	1	10	Belum ada	10	Belum ada
		Manajemen Bisnis Syariah	5	15	623	15	413
		Manajemen Haji dan Umroh	2	3	36	3	22
		Manajemen Keuangan Syariah	2	7	1.735	7	1.045
		Perbankan Syariah	34	153	3.489	153	1.583
Magister	5	Ekonomi Syariah	5	17	125	17	84
		Akuntansi Syariah	1	-	-	-	-
		Hukum Ekonomi Syariah	1	5	187	5	177
Doktoral	0						

Akreditasi Perguruan Tinggi Dan Program Studi Ekonomi Syariah Terkait

Akreditasi	AkreditasiPerguruan Tinggi			AkreditasiProgram Studi		
	S1	S2	S3	S1	S2	S3
Akreditasi A	7	2	-	4	-	-
Akreditasi B	8	1	-	30	2	-
Akreditasi C	33	1	-	49	2	-
Belum TerAkreditasii	42	1	-	48	3	-

Peluang Investasi Daerah
untuk Industri Keuangan Syariah

No.	Nama Proyek Investasi	Pemangku Kepentingan	Sektor	Tahapan Proyek Investasi	Nilai Perkiraan Investasi (dalam Rupiah)
1	Lulut Nambo Solid Waste Treatment Plant	Pemprov Jabar	Infrastruktur	Tahap Konstruksi	125,000/ton
2	Legok Nangka Solid Waste Treatment Plant	Pemprov Jabar	Infrastruktur	Siap untuk Penawaran	3.2 triliun
3	Jatigede Water Treatment Plant	Pemprov Jabar	Infrastruktur	Siap untuk Penawaran	2.1 triliun
4	Greater Bandung Railway Development	Pemprov Jabar	Infrastruktur	Siap untuk Penawaran	3.7 triliun
5	6 Regional Hospital Development	Pemprov Jabar	Infrastruktur	Kajian Pendahuluan	350 miliar – 1.4 triliun
6	Publik Street Lighting	Pemprov Jabar	Infrastruktur	Perencanaan	200 miliar untuk akses
7	Greater Bandung Raya Liquid Water Treatment Plant	Pemprov Jabar	Infrastruktur	Perencanaan	115.3 miliar
8	Greater Bandung Water Treatment Plant	Pemprov Jabar	Infrastruktur	Perencanaan	2.9 triliun
9	Puncak Pass Acess Way	Pemprov Jabar	Infrastruktur	Perencanaan	1.2 triliun
10	Patimban Railway Access	Pemerintah Pusat	Infrastruktur	Perencanaan	1.1 triliun
11	Kertajati Railway Access	Pemerintah Pusat	Infrastruktur	Perencanaan	2.7 triliun
12	Cibungur – Tanjung Rasa Shortcut Railway	Pemerintah Pusat	Infrastruktur	Perencanaan	1.9 triliun
13	Nusawiru Airport	Pemprov Jabar	Infrastruktur	Perencanaan	238 miliar
14	Greater Cirebon Liquid Waste Treatment Plant	Pemprov Jabar	Infrastruktur	Perencanaan	116.5 miliar
15	Pondok Seni Pangandaran	PT. Jaswita Jabar	Pariwisata	Perencanaan	42 miliar
16	BIJB Transit Hotel	PT. Jaswita Jabar	Pariwisata	Perencanaan	19.2 miliar
17	Jahe	PT Agro Jabar	Komoditas	*Captive Market*	15 miliar
18	Kentang	PT Agro Jabar	Komoditas	*Captive Market*	9.6 miliar
19	Lemon	PT Agro Jabar	Komoditas	*Captive Market*	10.5 miliar
20	Kopi	PT Agro Jabar	Komoditas	*Captive Market*	75 miliar
21	Stevia	PT Agro Jabar	Komoditas	*Captive Market*	20.4 miliar
22	Bawang Putih	PT Agro Jabar	Komoditas	*Captive Market*	6 miliar
23	Kacang	PT Agro Jabar	Komoditas	*Captive Market*	31 miliar
24	Paprika	PT Agro Jabar	Komoditas	*Captive Market*	1.5 miliar
25	Vanila	PT Agro Jabar	Komoditas	*Captive Market*	1.5 miliar
26	Mangga	PT Agro Jabar	Komoditas	Data Tidak Tersedia	5 miliar
27	Jagung	PT Agro Jabar	Komoditas	*Captive Market*	3.6 miliar
28	Cabai	PT Agro Jabar	Komoditas	*Captive Market*	2.5 miliar
29	Singkong	PT Agro Jabar	Komoditas	*Captive Market*	5 miliar
30	Nilam	PT Agro Jabar	Komoditas	*Captive Market*	10.8 miliar
31	Jabon	PT Agro Jabar	Komoditas	*Captive Market*	10 miliar

No.	Nama Proyek Investasi	Pemangku Kepentingan	Sektor	Tahapan Proyek Investasi	Nilai Perkiraan Investasi (dalam Rupiah)
32	Sengon	PT Agro Jabar	Komoditas	Data Tidak Tersedia	8 miliar
33	Industri Tepung Tapioka	PT Agro Jabar	Komoditas	Sedang Beroperasi	5 miliar
34	Pabrik Kopi	PT Agro Jabar	Komoditas	Sedang Beroperasi	10 miliar
35	Pabrik Pakan (Indigofera)	PT Agro Jabar	Komoditas	Data Tidak Tersedia	77.3 miliar
36	Penyimpanan Sayuran	PT Agro Jabar	Komoditas	Data Tidak Tersedia	62.5 miliar
37	Pabrik Gula Aren	PT Agro Jabar	Komoditas	Data Tidak Tersedia	5.5 miliar
38	Gudang Sayuran	PT Agro Jabar	Komoditas	Data Tidak Tersedia	6 miliar
39	Pabrik Pemrosesan Buah	PT Agro Jabar	Komoditas	Sedang Beroperasi	6 miliar
40	Unggas	PT Agro Jabar	Komoditas	Data Tidak Tersedia	3.6 miliar
41	Peternakan Sapi Perah	PT Agro Jabar	Komoditas	Data Tidak Tersedia	199.7 miliar
42	Al-Ihsan Development Project	RSUD Al-Ihsan	Kesehatan	Perencanaan	500 miliar
43	Kertajati Aetropolis Development	PT BIJB	Infrastruktur	Perencanaan	Data Tidak Tersedia

Survei UMK (Usaha Mikro dan Kecil) Makanan Minuman Olahan[10]

Provinsi Jawa Barat

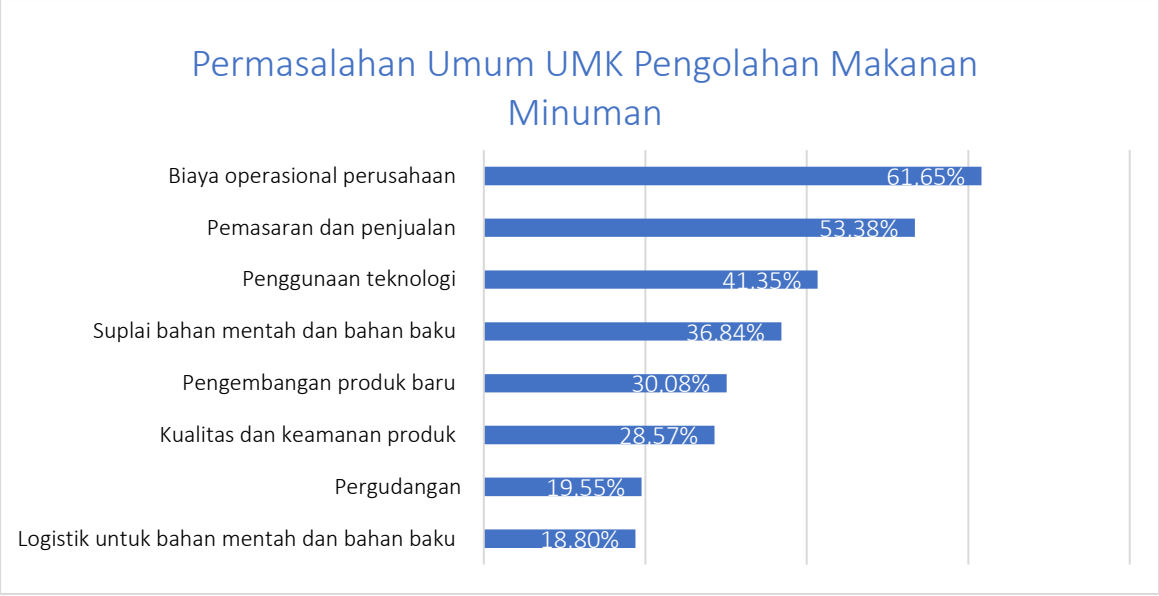

[10] Kegiatan survey dilakukan bersama IPB dan GAPPMI (bagian UMKM) dengan jumlah responden sebanyak 125 UMK Makanan Minuman Olahan di Provinsi Jawa Barat

Top 3 Permasalahan Aspek Pemasaran
Kesulitan dalam menjual produk kepada perusahaan besar
41,18%
Terlalu banyak kompetitor produk sejenis
38,82%
Harga produk kompetitif dengan kualitas terbaik
35,29%
Kesulitan dalam menentukan jalur penjualan yang efektif dan efisien
28,24%
Kurang dapat memenuhi permintaan konsumen dalam volume besar dan cepat
27,06%
Kesulitan dalam menjual produk ke pasar ekspor
24,71%
Tidak/kurang memahami kebutuhan dan perilaku konsumen
23,53%
Design packaging produk
20,00%
Mahalnya biaya iklan
18,82%
Program iklan & pemasaran tidak sesuai dengan target konsumen
11,76%

Top 3 Permasalahan Aspek Suplai Bahan Baku
Fluktuasi harga bahan baku
53,89%
Mahalnya harga bahan baku
53,89%
Faktor musiman untuk bahan baku jenis tertentu
30,54%
Kesulitan dalam mendapatkan kualitas yang baik
28,74%
Kurangnya akses kepada berbagai macam supplier
18,56%
Cukupnya ketersediaan uang kas
17,37%
Kurangnya informasi yang benar terkait harga pasar
16,77%
Kesalahan spesifikasi bahan baku pada saat barang diterima
12,57%
Keterlambatan dalam menerima bahan baku
11,38%
Kurangnya variasi jenis bahan baku
10,78%
Rendahnya kualitas jasa logistik dari supplier
7,78%

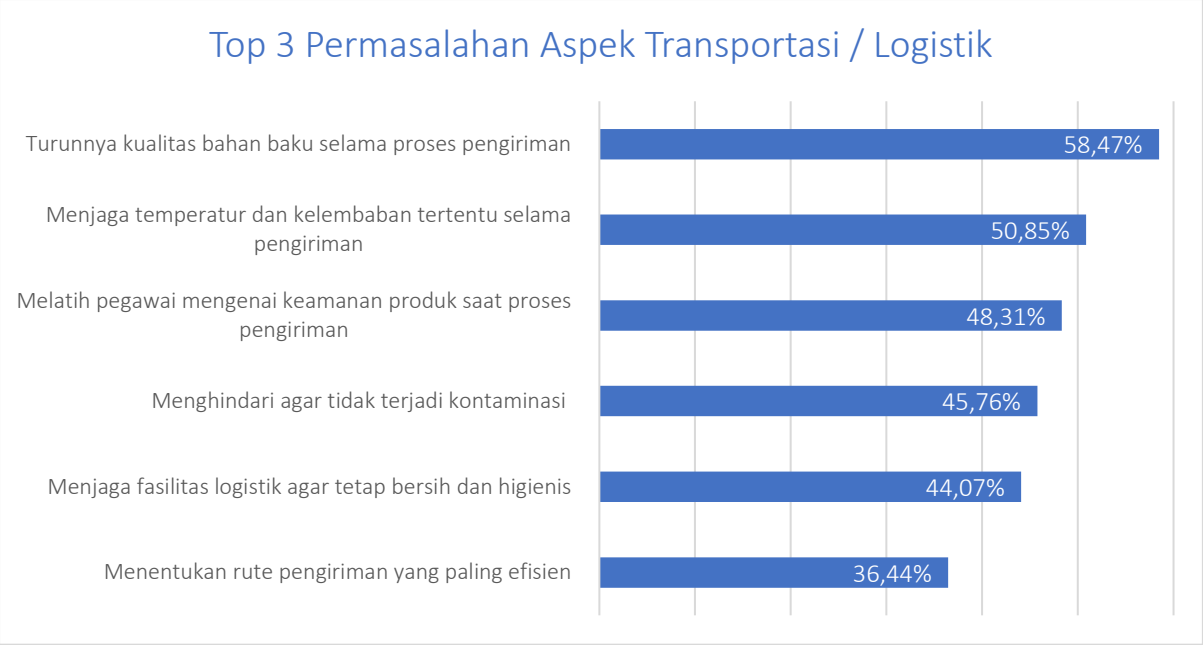
Top 3 Permasalahan Aspek Transportasi / Logistik
Turunnya kualitas bahan baku selama proses pengiriman
58,47%
Menjaga temperatur dan kelembaban tertentu selama pengiriman
50,85%
Melatih pegawai mengenai keamanan produk saat proses pengiriman
48,31%
Menghindari agar tidak terjadi kontaminasi
45,76%
Menjaga fasilitas logistik agar tetap bersih dan higienis
44,07%
Menentukan rute pengiriman yang paling efisien
36,44%

Top 3 Permasalahan Aspek Pergudangan
Menghindari tidak terjadi kontaminasi di bahan mentah/barang jadi
39,61%
Menjaga temperatur dan kelembaban tertentu di tempat penyimpanan untuk bahan mentah/barang jadi
37,66%
Menjaga tempat penyimpanan agar tetap bersih dan higienis
35,71%
Mengatur perputaran produk secara optimal
34,42%
Kurangnya/tidak adanya fasilitas untuk menyimpan bahan mentah
34,42%
Kurangnya/tidak adanya fasilitas untuk menyimpan barang jadi
32,47%
Turunnya kualitas bahan mentah di tempat penyimpanan
26,62%
Turunnya kualitas barang jadi di tempat penyimpanan
22,73%

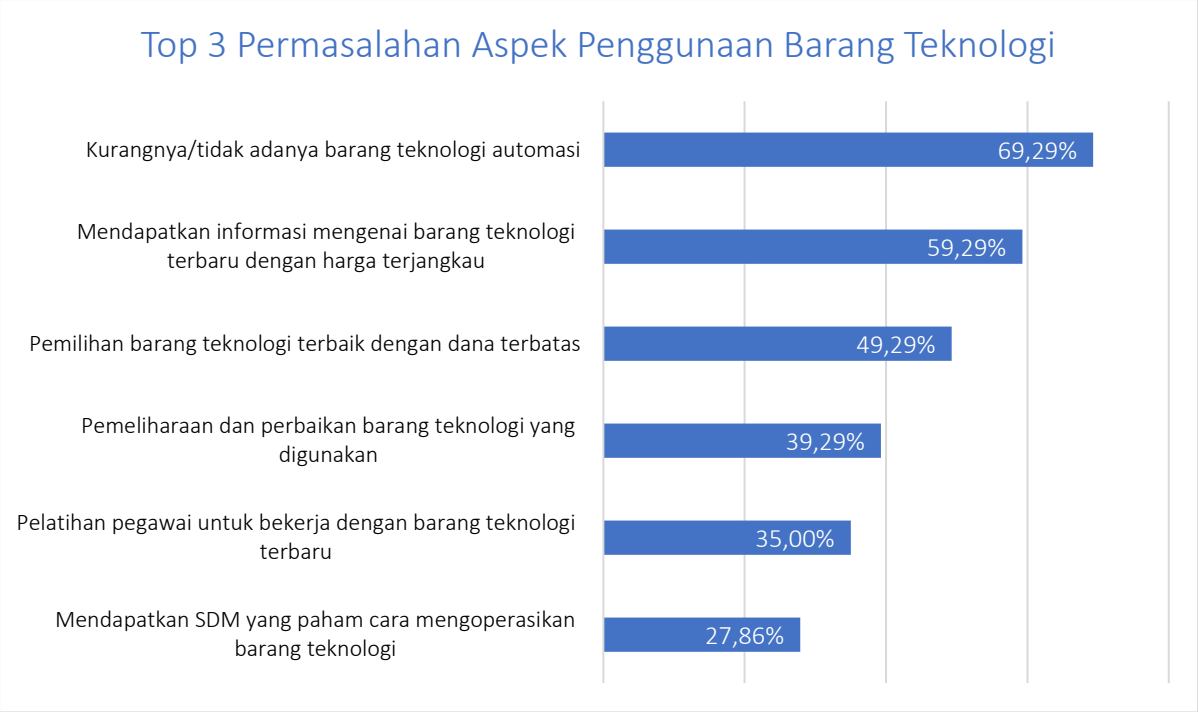
Top 3 Permasalahan Aspek Penggunaan Barang Teknologi
Kurangnya/tidak adanya barang teknologi automasi
69,29%
Mendapatkan informasi mengenai barang teknologi terbaru dengan harga terjangkau
59,29%
Pemilihan barang teknologi terbaik dengan dana terbatas
49,29%
Pemeliharaan dan perbaikan barang teknologi yang digunakan
39,29%
Pelatihan pegawai untuk bekerja dengan barang teknologi terbaru
35,00%
Mendapatkan SDM yang paham cara mengoperasikan barang teknologi
27,86%

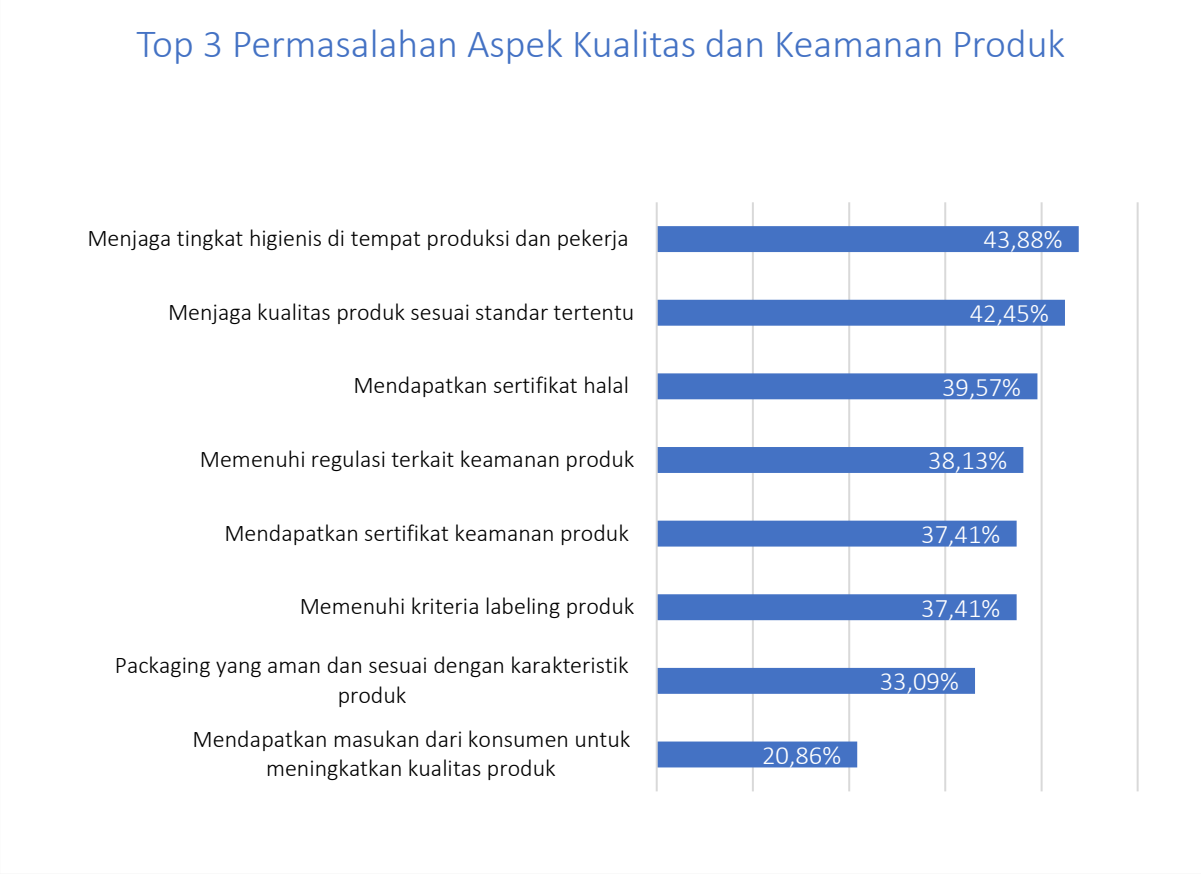
Top 3 Permasalahan Aspek Kualitas dan Keamanan Produk
Menjaga tingkat higienis di tempat produksi dan pekerja
43,88%
Menjaga kualitas produk sesuai standar tertentu
42,45%
Mendapatkan sertifikat halal
39,57%
Memenuhi regulasi terkait keamanan produk
38,13%
Mendapatkan sertifikat keamanan produk
37,41%
Memenuhi kriteria labeling produk
37,41%
Packaging yang aman dan sesuai dengan karakteristik produk
33,09%
Mendapatkan masukan dari konsumen untuk meningkatkan kualitas produk
20,86%

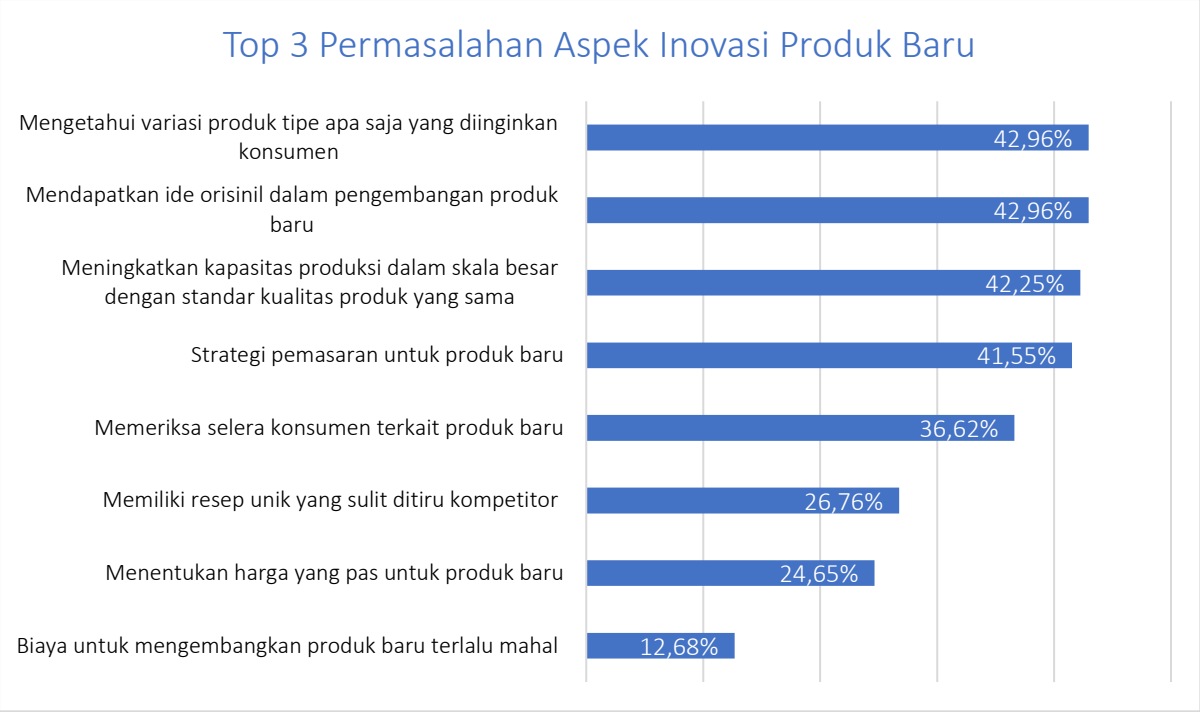
Top 3 Permasalahan Aspek Inovasi Produk Baru
Mengetahui variasi produk tipe apa saja yang diinginkan konsumen
42,96%
Mendapatkan ide orisinil dalam pengembangan produk baru
42,96%
Meningkatkan kapasitas produksi dalam skala besar dengan standar kualitas produk yang sama
42,25%
Strategi pemasaran untuk produk baru
41,55%
Memeriksa selera konsumen terkait produk baru
36,62%
Memiliki resep unik yang sulit ditiru kompetitor
26,76%
Menentukan harga yang pas untuk produk baru
24,65%
Biaya untuk mengembangkan produk baru terlalu mahal
12,68%

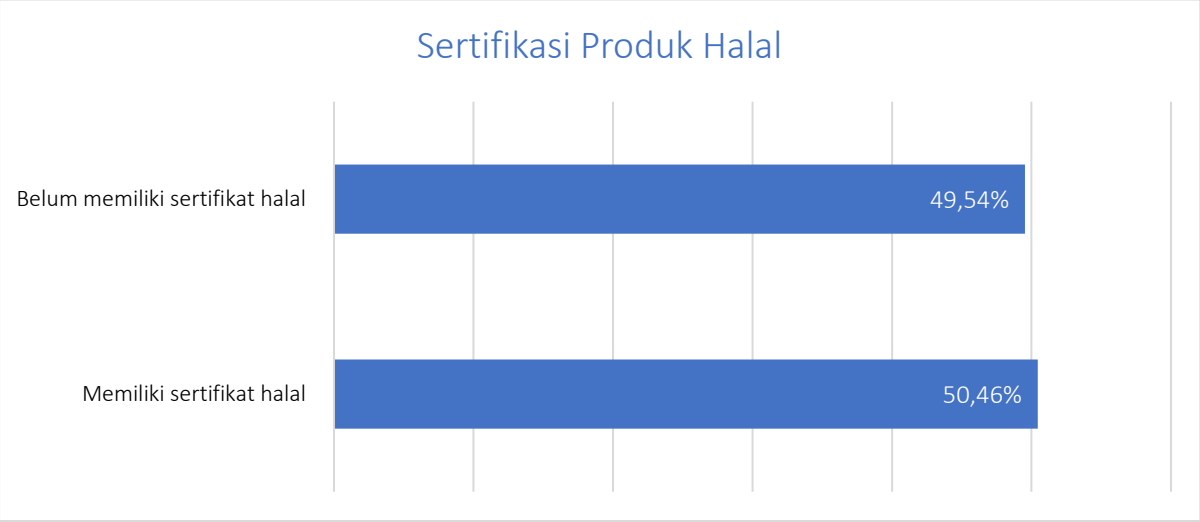
Sertifikasi Produk Halal
Belum memiliki sertifikat halal
49,54%
Memiliki sertifikat halal
50,46%

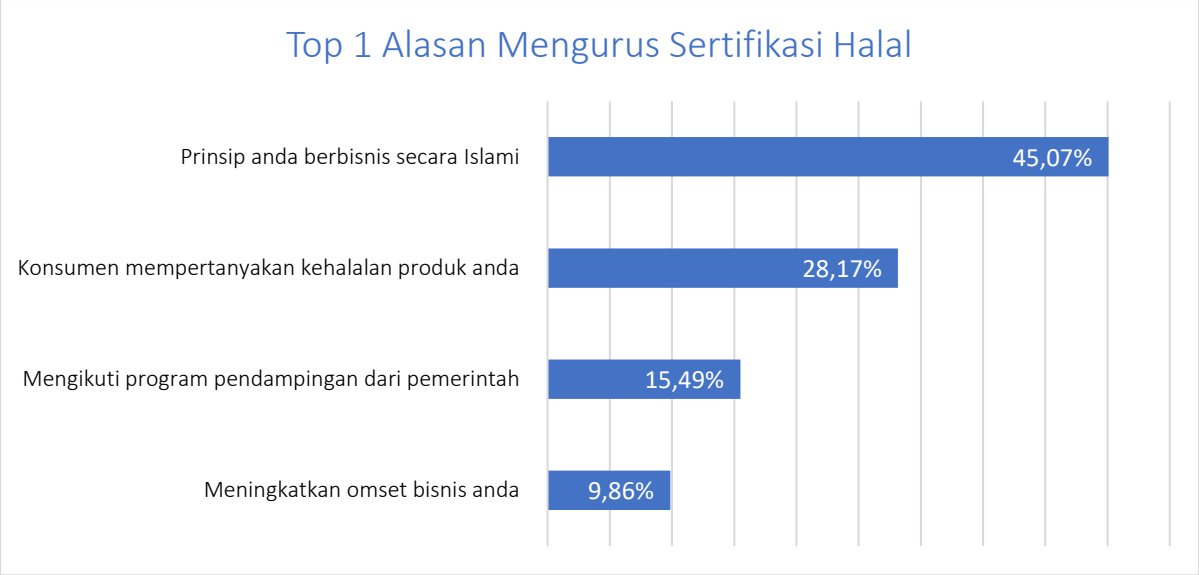
Top 1 Alasan Mengurus Sertifikasi Halal
Prinsip anda berbisnis secara Islami
45,07%
Konsumen mempertanyakan kehalalan produk anda
28,17%
Mengikuti program pendampingan dari pemerintah
15,49%
Meningkatkan omset bisnis anda
9,86%

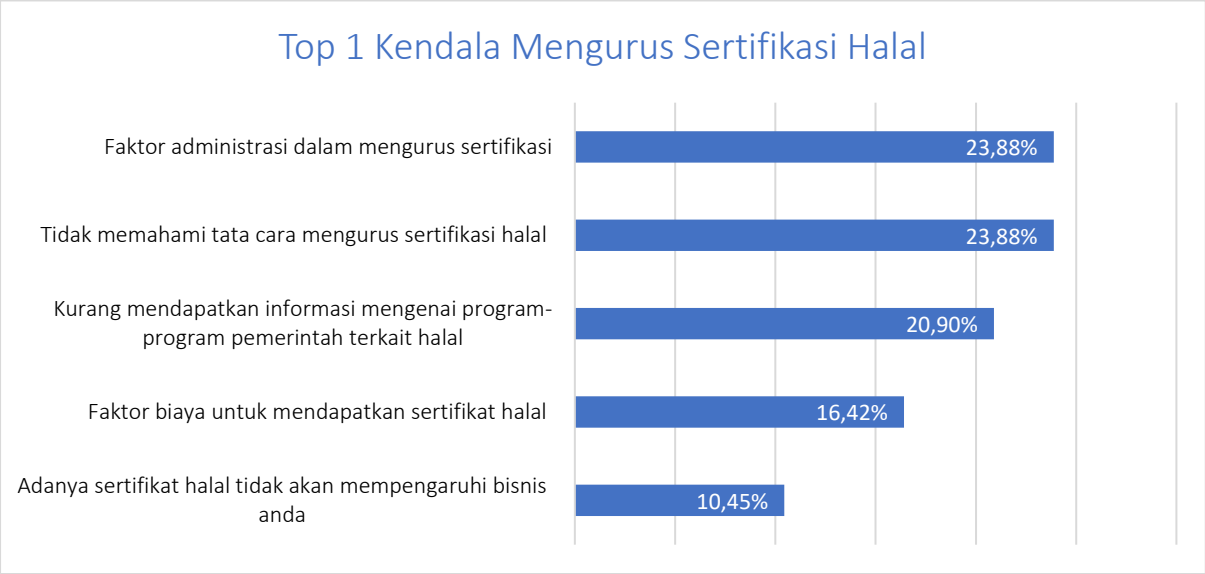
Top 1 Kendala Mengurus Sertifikasi Halal
Faktor administrasi dalam mengurus sertifikasi
23,88%
Tidak memahami tata cara mengurus sertifikasi halal
23,88%
Kurang mendapatkan informasi mengenai program-program pemerintah terkait halal
20,90%
Faktor biaya untuk mendapatkan sertifikat halal
16,42%
Adanya sertifikat halal tidak akan mempengaruhi bisnis anda
10,45%

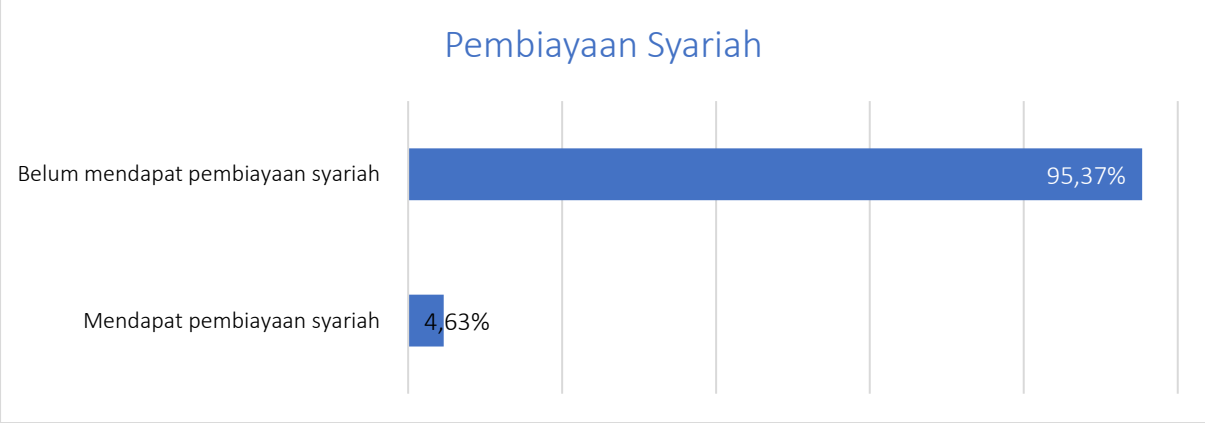
Pembiayaan Syariah
Belum mendapat pembiayaan syariah
95,37%
Mendapat pembiayaan syariah
4,63%

Survei UMK (Usaha Mikro dan Kecil) Makanan Minuman Kuliner[11]

Provinsi Jawa Barat

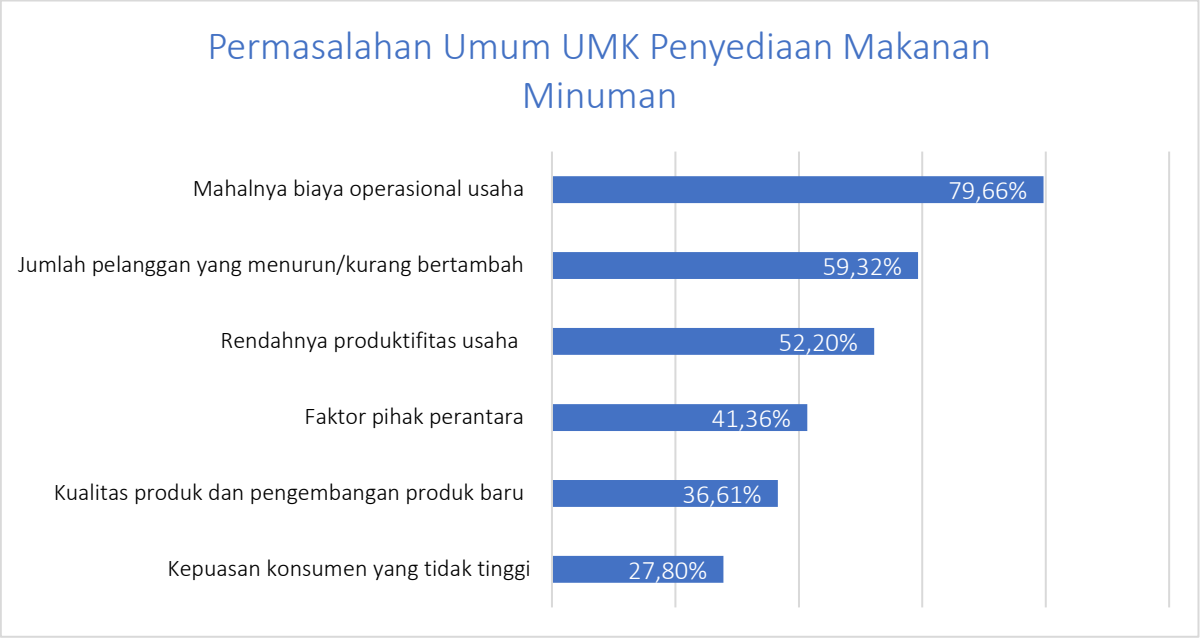

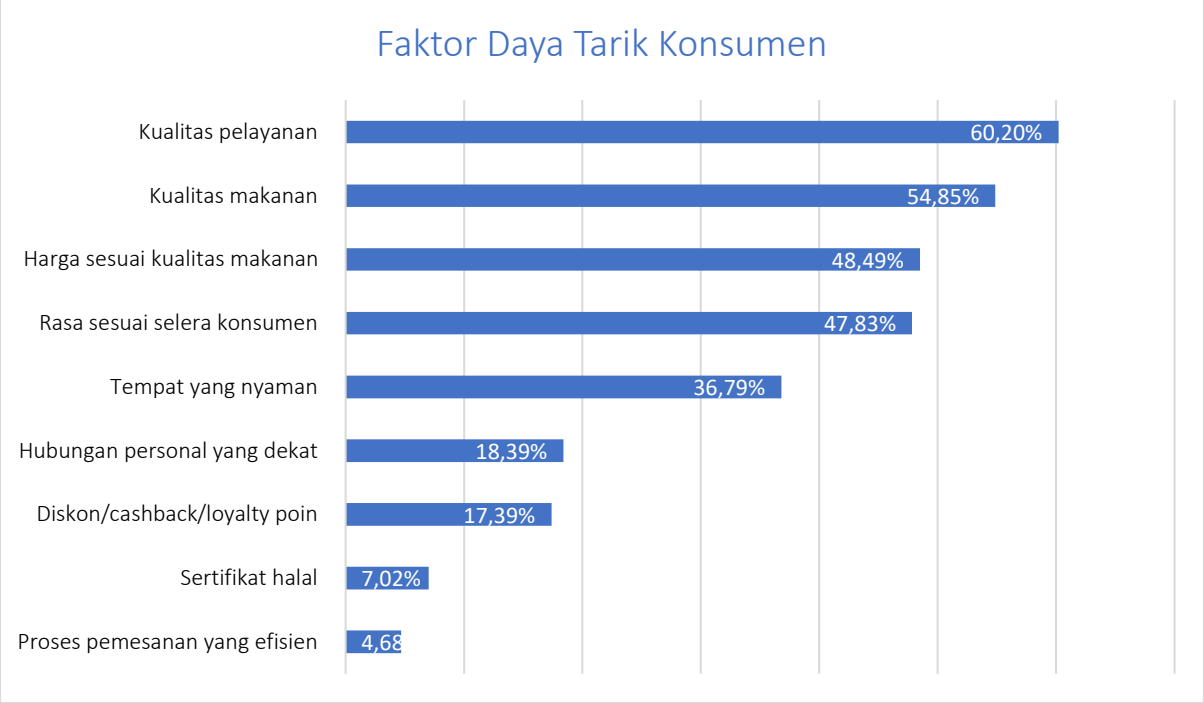

[11] Kegiatan survey dilakukan bersama IPB dan GAPPMI (bagian UMKM) dengan jumlah responden sebanyak 294 UMK Makanan Minuman Kuliner di Provinsi Jawa Barat

Top 3 Permasalahan Aspek Biaya Operasional
Bahan baku
69,84%
Gaji pegawai
65,57%
Sewa
46,89%
Pemeliharaan dapur, dsb
39,02%
Teknologi
11,48%
Bahan mentah yang tak terpakai
10,82%
Legal
10,16%
Bahan mentah yang busuk
9,84%
Pelatihan pegawai
9,18%
Perantara untuk mendapatkan suplai bahan baku
6,89
Food delivery dari pihak ketiga
4,26%
Suku bunga pinjaman
4,26%

Top 3 Permasalahan Aspek Produktifitas Usaha
Pegawai kurang/tidak produktif
48,48%
Mengelola rumah makan secara manual
40,40%
Meningkatkan kualitas masakan & praktik bisnis
37,04%
Kesulitan dalam peningkatan kompetensi pegawai
32,32%
Kesulitan dalam mendapatkan/mempertahankan pegawai
31,99%
Peralatan yang sudah lama dan tidak efisien
28,28%
Kurang/berlebih terkait jumlah bahan baku
27,27%
Lamanya waktu proses pemesanan makanan
27,27%
Kurang efisien dalam proses dokumentasi bukti pembayaran
22,22%

Top 3 Permaslahan Aspek Pemasaran
Terlalu banyak kompetitor di lokasi usaha
61,54%
Mahalnya biaya iklan
44,82%
Konsumen baru tidak menjadi konsumen setia
38,13%
Konsumen baru tidak mau mencoba
35,12%
Lokasi restoran tidak menarik
33,11%
Program iklan dan pemasaran tidak sesuai dengan target konsumen
29,43%
Kurangnya/tidak ada jasa catering
16,05%
Konsumen lebih banyak datang hanya jika ada diskon/cashback
13,38%
Konsumen memberi feedback yang buruk di social media
12,37%
Mahalnya biaya pengantaran makanan
10,03

Top 3 Permasalahan Aspek Suplai Bahan Baku
Fluktuasi harga bahan baku
73,00%
Mahalnya harga bahan baku
70,67%
Faktor musiman untuk bahan baku jenis tertentu
39,00%
Kesulitan dalam mendapatkan kualitas bahan baku yang baik dari pensuplai
28,67%
Kurangnya akses kepada berbagai macam pensuplai/supplier dengan jaringan yang luas
16,33%
Kurangnya variasi terkait jenis bahan baku dari pensuplai
14,67%
Kurangnya informasi yang benar terkait harga pasar untuk bahan baku
14,33%
Cukupnya ketersediaan uang kas
12,67
Keterlambatan dalam menerima bahan mentah/baku
12,00
Kesalahan spesifikasi bahan baku pada saat barang tersebut diterima dari pensuplai
6,6
Rendahnya kualitas jasa logistik dari pensuplai
5,

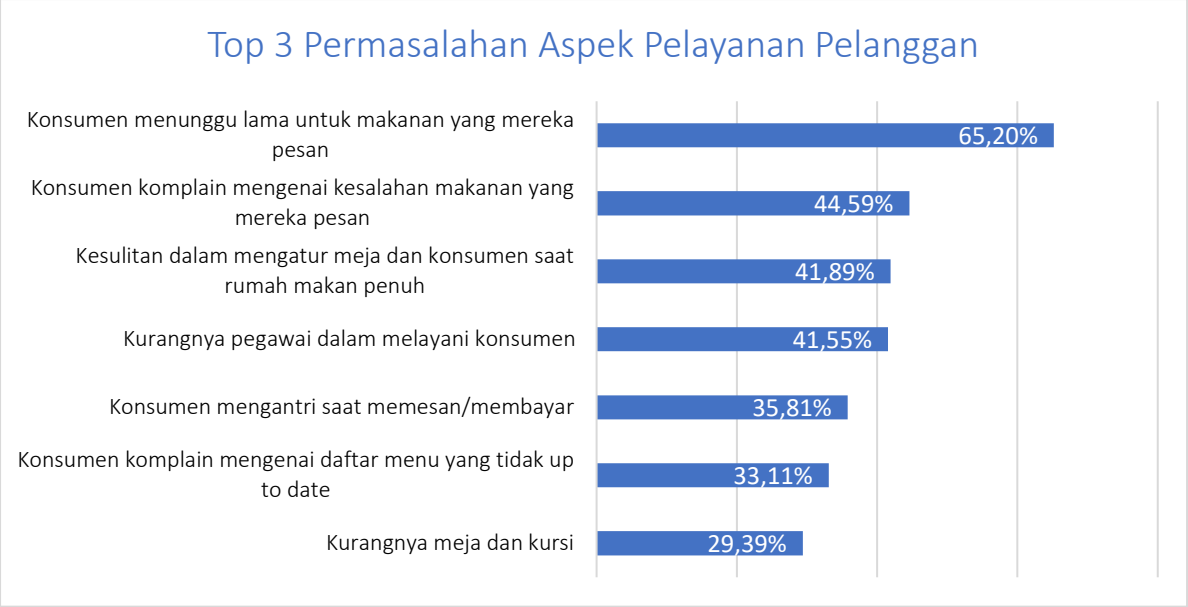
Top 3 Permasalahan Aspek Pelayanan Pelanggan
Konsumen menunggu lama untuk makanan yang mereka pesan
65,20%
Konsumen komplain mengenai kesalahan makanan yang mereka pesan
44,59%
Kesulitan dalam mengatur meja dan konsumen saat rumah makan penuh
41,89%
Kurangnya pegawai dalam melayani konsumen
41,55%
Konsumen mengantri saat memesan/membayar
35,81%
Konsumen komplain mengenai daftar menu yang tidak up to date
33,11%
Kurangnya meja dan kursi
29,39%

Top 3 Permasalahan Aspek Pengembangan Produk Baru
Mengetahui variasi produk-produk tipe apa saja yang diinginkan konsumen
49,66%
Memeriksa selera konsumen terkait produk baru
48,32%
Mendapatkan ide orisinil dalam pengembangan produk baru
43,62%
Meningkatkan kapasitas produksi dalam skala besar dengan standar kualitas produk yang sama
39,93%
Strategi pemasaran untuk produk baru
38,93%
Menentukan harga yang pas untuk produk baru
30,87%
Memiliki resep unik yang sulit ditiru kompetitor
27,18%
Biaya pengembangan produk baru mahal
15,77%

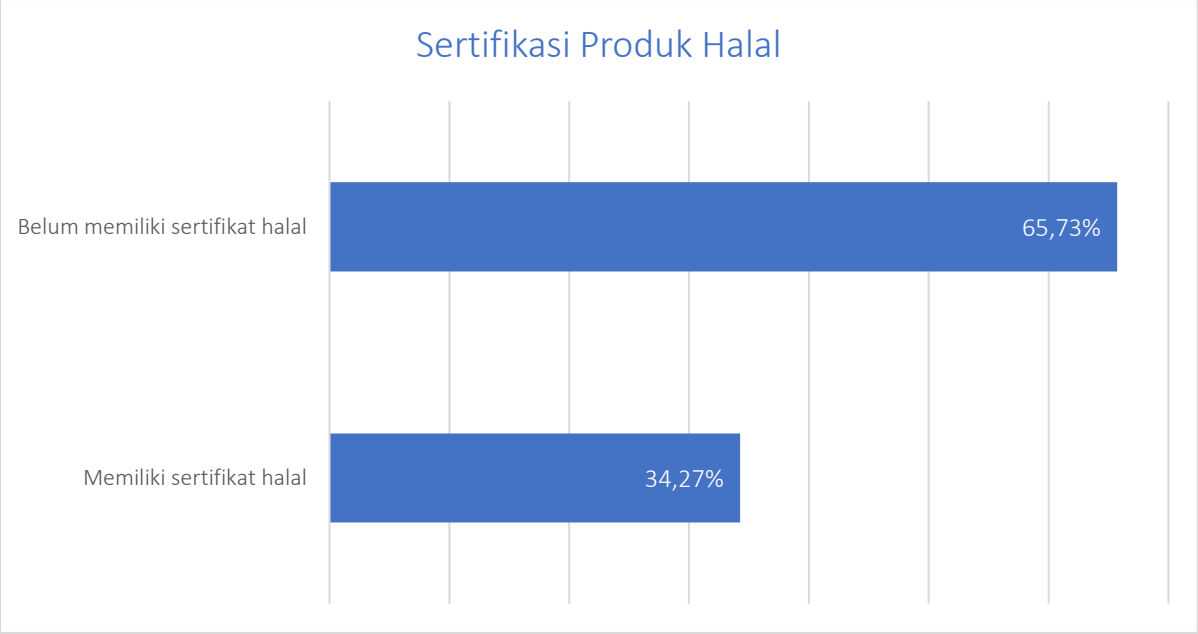
Sertifikasi Produk Halal
Belum memiliki sertifikat halal
65,73%
Memiliki sertifikat halal
34,27%

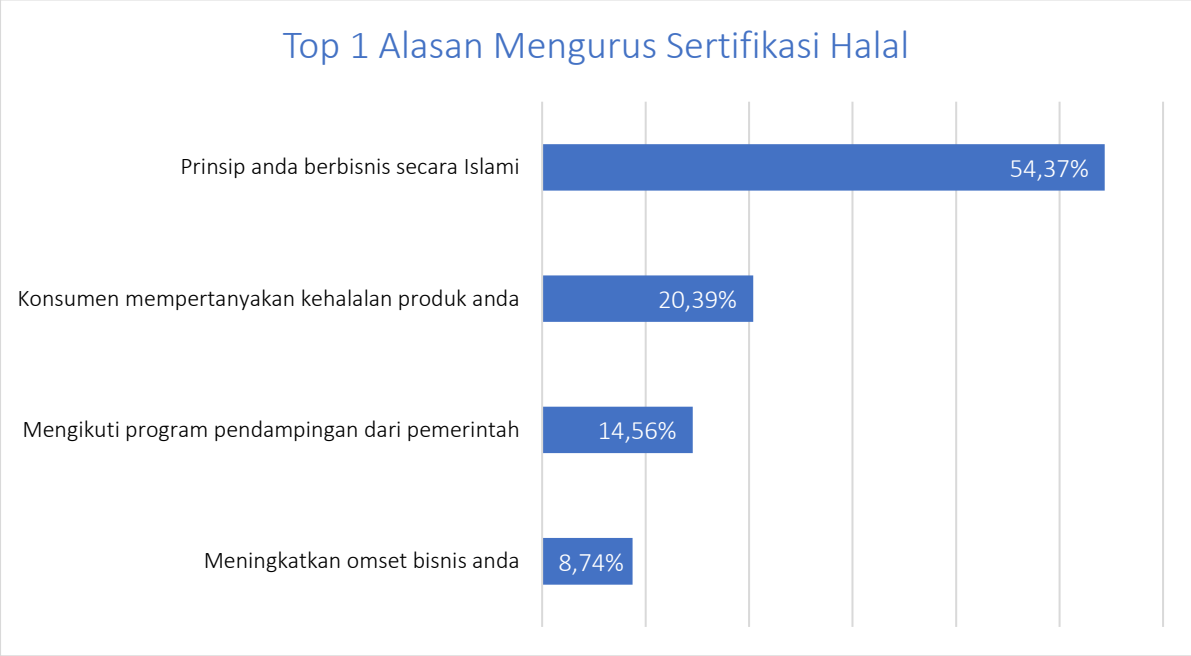
Top 1 Alasan Mengurus Sertifikasi Halal
Prinsip anda berbisnis secara Islami
54,37%
Konsumen mempertanyakan kehalalan produk anda
20,39%
Mengikuti program pendampingan dari pemerintah
14,56%
Meningkatkan omset bisnis anda
8,74%

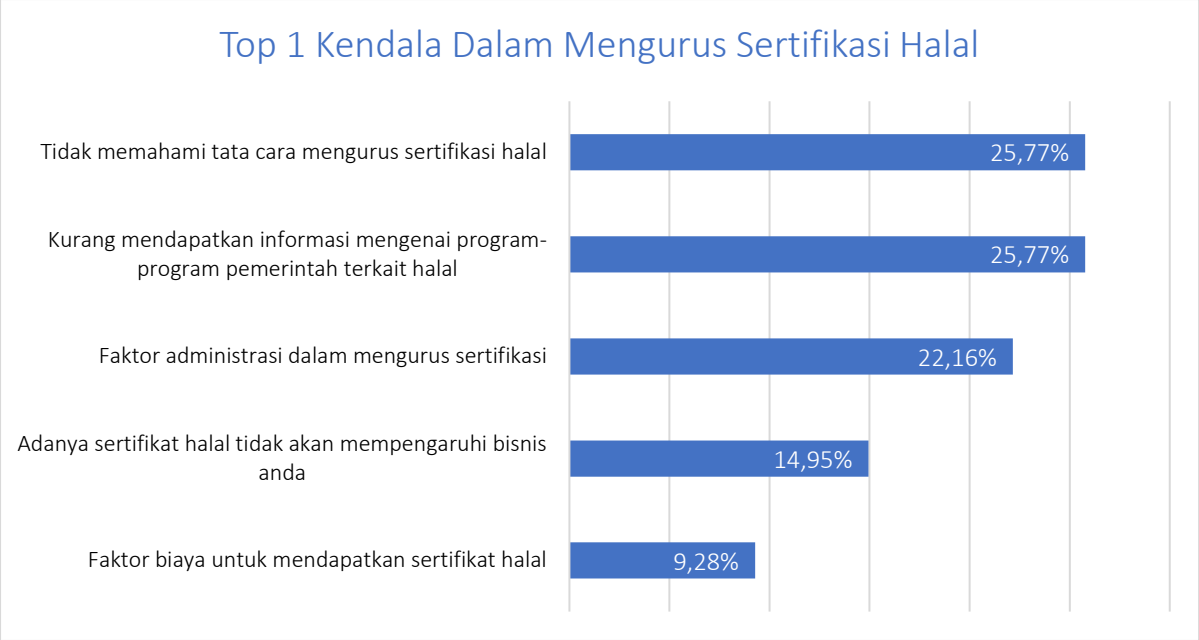
Top 1 Kendala Dalam Mengurus Sertifikasi Halal
Tidak memahami tata cara mengurus sertifikasi halal
25,77%
Kurang mendapatkan informasi mengenai program-program pemerintah terkait halal
25,77%
Faktor administrasi dalam mengurus sertifikasi
22,16%
Adanya sertifikat halal tidak akan mempengaruhi bisnis anda
14,95%
Faktor biaya untuk mendapatkan sertifikat halal
9,28%

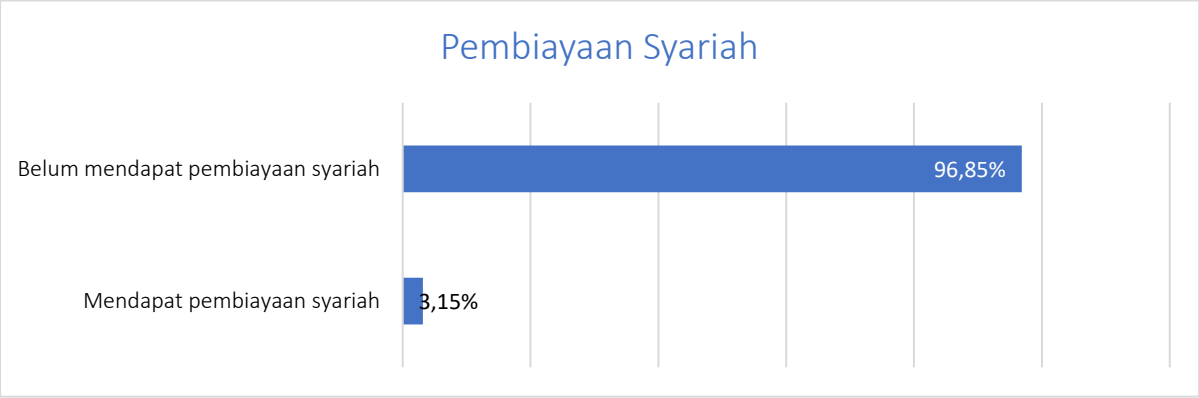
Pembiayaan Syariah
Belum mendapat pembiayaan syariah
96,85%
Mendapat pembiayaan syariah
3,15%

Praktik-Praktik Terbaik (*Best Practices*) dan Kasus Unik pada Industri Halal di Provinsi Jawa Barat

Prof. Dr. Ir. Sudarso Kaderi Wiryono, DEA[12]
Oktofa Yudha Sudrajad, PhD[13]
Aang Noviyana Umbara, MSM[14]

Industri halal merupakan arus perekonomian baru yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain karena mayoritas populasinya menganut agama islam, terjadi pula peralihan gaya hidup menjadi lebih sadar akan label halal dan *thayyib*. Dilansir dari Laporan *State of the Global Islamic Economy*, belanja total untuk industri halal yang mencapai 218,8 dollar AS pada Tahun 2017. Kini, industri halal Indonesia menjadi ceruk pasar yang potensial dan terus berkembang. Oleh karenanya, penting untuk mempersiapkan diri guna menangkap peluang menjadi produsen produk halal pasar Muslim dalam negeri.

Berbicara mengenai *best practices,* Jawa Barat mengejawantahkan gaung industri halal dalam Misi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang keempat, *"meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil"*. Misi tersebut mengemban prioritas pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi. Makna umat yang tersirat tidak hanya terbatas pada cakupan agama islam, namun lebih luas lagi, umat dimaknai sebagai "masyarakat" atau "bangsa" (KBBI, 2019). Lantas, misi tersebut dikonkritkan berupa program pembangunan daerah seperti Millennial Juara, Budaya Juara, Wirausaha Juara, dan Ekonomi Kreatif Juara. Dengan demikian, produk kebijakan ekonomi umat yang dikembangkan melalui industri halal di Jawa Barat selaras dengan misi dari hulu dan mampu diintegrasikan dalam program pembangunan di hilir.

Kebijakan terkait industri halal ini diharapkan secara riil mampu meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB, Laju Pertumbuhan Sektor Industri, dan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan. Lebih jauh lagi, pengembangan industri halal diharapkan mampu menimbulkan *multiplier effect* seperti Produk Domestik Bruto Indonesia, Laju Pertumbuhan Ekonomi, berkurangnya angka kemiskinan juga angka pengangguran, menguatnya nilai tukar rupiah, menurunnya angka inflasi dan perolehan penghargaan ekonomi syariah baik pada level nasional maupun internasional. Sebagai bentuk evaluasi kinerja, indikator yang dipilih merupakan indikator ekonomi yang dapat terukur dan terlingkup dalam 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Provinsi Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat telah mengkaji dan menyusun peta jalan pengembangan kebijakan ekonomi syariah untuk 2020-2025 melalui studi lapangan, survey, dan analisis data sekunder terkait sektor industri halal. Studi lapangan dilakukan di seluruh Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Barat untuk memetakan apa yang kini direncanakan dan apa yang telah dilaksanakan terkait dengan kebijakan ekonomi syariah. Survey dilaksanakan pada pemangku kebijakan untuk menentukan sektor industri halal mana yang harus diprioritaskan melalui rangkaian *Focus Group Discussion* (FGD) dan penentuan prioritas dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Kemudian analisis data sekunder yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat mengenai sektor industri halal.

---

[12] Guru Besar, Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung
[13] Dosen, Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung
[14] Alumni Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung

Sektor industri halal ini terdiri dari 6 sektor, yakni sektor makanan dan minuman, sektor pariwisata, sektor fesyen, sektor keuangan, sektor farmasi dan kosemetik, dan sektor fesyen. *Roadmap* tersebut berisikan *blueprint* strategi sektoral yang berfokus pada sektor-sektor unggulan. Strategi tersebut menjelaskan mengenai rekomendasi program dan penjabaran aktivitas juga pemetaan pemangku kepentingan terkait. Penentuan sektor unggulan dilaksanakan dengan melakukan analisis faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal diantaranya adalah potensi Jawa Barat, kontribusi ekonomi sektoral industri halal, *business value chain*. Sementara itu, faktor internal terdiri dari regulasi, *governance* dan penghargaan yang diperoleh Jawa Barat.

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa tiga sektor unggulan Jawa Barat mencakup sektor makanan dan minuman, sektor pariwisata dan sektor fesyen. Sektor unggulan ini berperan sebagai lokomotif ekonomi, artinya jika sektor tersebut maju, sektor yang lainnya pun akan terbawa maju. Sektor unggulan ini secara simultan akan dikembangkan berdampingan dengan sektor pendukung utama yakni sektor keuangan. Kemudian, sektor farmasi dan kosmetik dan sektor media dan rekreasi yang juga merupakan pemain penting dalam industri besar, menjadi sektor yang akan dikembangkan beriringan.

Kemudian, perlu digarisbawahi untuk praktik terbaik dalam industri halal diperlukan setidaknya tiga hal. Pertama, kolaborasi antar *stakeholder* untuk penguatan aspek hukum berupa percepatan regulasi atau pedoman halal industri dan integrasi sistem infomasi halal yang terhubung melalui media digital. Kedua, penguatan mata rantai industri halal yang dapat berupa sertifikasi SDM maupun managemen pengelolaan yang menjamin kriteria halal dan peningkatan kesadaran gaya hidup halal. Ketiga, peningkatan efektivitas institusi dan industri dapat berupa proses *branding, market channeling,* hingga inisiasi insentif berupa pelatihan dan pendampingan.

Di Jawa Barat, kasus unik dari industri halal dapat ditemukan dari beragamnya potensi, perspektif juga inisiatif kelembagaan dan pemangku kepentingan di tiap kota dan kabupaten. Hal tersebut menjadi tantangan sendiri dalam mengembangkan industri halal, karena sifat dasarnya teridiosinkrasi dan bergantung pada kepentingan kolektif. Sebagai contoh, sektor unggulan antar suatu kabupaten atau kota dapat berbeda, pun dalam lingkup sektor yang sama, komoditas yang diunggulkan dapat berlainan. Sehingga pada akhirnya kebutuhan dan pendekatan untuk mengembangkan industri halal sampai komponen mikro pada tatanan masyarakat harus dipersonalisasi dan dikostumisasi. Misalnya saja, antara Kabupaten Cirebon dengan Kabupaten Kuningan yang sama-sama mengunggulkan sektor makanan halal. Namun, Kabupaten Cirebon berfokus pada komoditas bahan baku daging halalnya karena banyaknya olahan masakan dari daging. Sedangkan Kuningan melakukan pendekatan sertifikasi halal pada penganan tape ketan yang merupakan salah satu makanan khasnya. Maka dari itu, metode yang digunakan untuk mampu menyarikan apa yang kiranya fundamental dalam pengembangan industri halal di tiap kota dan kabupaten harus digali berdasarkan dari permintaan pasar, kesiapan daerah untuk mendeklarasikan diri dan pemenuhan standar halal.

Praktik-Praktik Terbaik (Best Practices) dan Kasus Unik pada Koperasi Pesantren Alif, Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Dr. Lukman M Baga[15]
Dwi Putriana Nuramanah Kinding[16]

Koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi yang sangat memiliki peran strategis bagi masyarakat. Salah satu koperasi yang memiliki keunikan adalah Kopontren Alif yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Al-Ittifaq (Al-Ittifaq). Al-Ittifaq adalah sebuah organisasi keagamaan yang bersifat keilmuan, sosial, berjiwa kewirausahaan untuk mengembangkan jiwa kemandirian. Al-Ittifaq tumbuh dari keresahan sebagai pendirianya; Kyai Fuad Affandi. Beliau menyadari bahwa sebagian besar santrinya berasal dari kalangan kurang mampu sehingga tidak mampu untuk berkontribusi dalam biaya pendidikan. Pak Kyai juga merasa bertanggungjawab terhadap kemandirian serta kemampuan para santri agar dapat meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan hidupnya. Maka dari itu Al-Ittifaq berkembang dengan karakteristik kegiatan pendidikan agama yang dipadukan dengan berbagai kegiatan di bidang pertanian sesuai dengan potensi alamnya. Karakteristik ini menjadi daya tarik bagi Pesantren ini sehingga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Salah satunya ditandai peningkatan jumlah santri menjadi 326 orang (256 putra dan 70 putri) dengan jumlah ustadz sebanyak 14 orang (tahun 2018).

Letak Ponpes Al-Ittifaq berada di daerah pegunungan di Kampung Ciburial Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung dengan kondisi suhu rendah, sehingga memiliki keunggulan dalam budidaya dataran tinggi. Didasarkan pada niat ibadah dan menegakan syariat islam, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan, kemampuan usaha dan juga pendapatannya, maka kegiatan usaha yang dilakukan tidak hanya mengusahakan lahan pertanian sendiri sebagai tempat produksi. Pengunaan lahan pertanian yang diusahakan mengalami perkembangan pesat, dari sebelumnya 400 m2, kini menjadi 17 hektar. Al-Ittifaq juga mampu menampung hasil pertanian dari kelompok tani di sekitar pondok pesantren dan juga menjadi koperasi penyalur hasil budidaya alumni santri, petani binaan dan serta masyarakat sekitar sehingga telah mampu untuk memasarkan produknya kepada konsumen ritel (supermarket).

Seluruh kegiatan usaha yang dijalankan Al-Ittifaq dinaungi oleh Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq atau biasa disebut Kopontren Alif, dengan beberapa layanan unit usaha dimiliki sehingga digolongkan sebagai Koperasi serba usaha. Adapun bersadarkan RAT tahun 2019 jumlah anggota Kopotren Alif tercatat sebanyak 1100 orang. Koperasi merupakan badan usaha, yang didirikan dan dimiliki oleh para anggotanya sebagai media pemenuh kebutuhan bersama dengan tujuan yang sama. Koperasi dapat digunakan tidak hanya untuk kebutuhan di bidang ekonomi saja melainkan berguna secara sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Pelaksanaannya berdasarkan asas kekeluargaan, dimana koperasi tidak bertujuan untuk menguntungkan salah satu pihak saja melainkan bertujuan mencapai keuntungan bersama. Hal ini yang membedakan antara koperasi dengan badan usaha lainnya.

Kopontren Alif memiliki empat unit usaha, yaitu unit sarana waserda, unit pemasaran, unit simpan pinjam dan unit agribisnis. Pada unit usaha simpan pinjam, transaksi yang dilakukan telah mencapai 2,37 M. Dari empat unit yang dimiliki Kopontren Alif, unit usaha yang memiliki peran penting adalah unit usaha agribisnis. Unit agribisnis ini melibatkan banyak orang dari mulai hulu sampai hilir. Unit agribisnis terdiri atas unit pertanian (budidaya dan pemasok sayuran), unit peternakan (penggemukan domba dan peternakan sapi), dan unit budidaya ikan dan pembuatan pupuk organik. Dimana dua unit terakhir tersebut ditujukan hanya untuk memenuhi kebutuhan usahatani dan konsumsi harian santri dan keluarga Pondok Pesantren. Unit agribisnis mengalami perkembangan kelembagaan, dengan terbentuknya 5 kelompok tani dan balai mandiri.

---

[15] Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CI-BEST), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Pertanian Bogor (IPB)
[16] Mahasiswi Magister Agribisnis Institut Pertanian Bogor (IPB)

Peran Kopontren Alif sebagai wadah usaha agribisnis dijalankan dalam bentuk Pusat Inkubator Agribisnis (PIA) yang berfungsi untuk memberikan daya (kekuatan), motivasi dan petunjuk kepada masyarakat luas yang berminat terhadap pengembangan agribisnis. Disamping itu dalam bentuk Lembaga Ekonomi Pedesaan Masyarakat Mandiri (LEPPM) yang menyediakan dan mendistribusikan dana bagi para petani yang tergabung dalam binaan Ponpes Al-Ittifaq. Kopontren Alif selain mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya, juga mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggotanya.

Kopontren Alif memiliki peran sebagai sumber kebutuhan pendanaan Ponpes Al-Ittifaq sehingga Ponpes mampu secara mandiri membiayai kebutuhan kegiatan belajarnya. Sisa dari SHU Kopontren Alif tersebut digunakan untuk beasiswa sekolah di yayasan, biaya listrik dan kegiatan sosial. Hal tersebut sesuai dengan konsep Al-Ittifaq sebagai organisasi yang bersifat sosial keagamaan dimana sebagian besar santri berasal dari anak yatim piatu dan orang tidak mampu. Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan pada Kopontren menjadi media pembelajaran, pembekalan untuk mendapat berbagai pengalaman dan pelatihan. Sehingga ketika sudah menjadi alumni santri, dapat secara mandiri mengembangkan kemampuan yang sudah didapatkan di Al-Ittifaq.

Adanya unit agribisnis pada Kopontren Alif yang mampu menyalurkan hasil pertanian anggotanya menjadikan salah satu gerbang kepastian pasar bagi petani. Hal ini juga berdampak baik terhadap usaha Kopontren dengan jumlah produk yang dapat sesuai permintaan pasar, menjadikan adanya posisi rebut tawar yang bagi produk yang akan dijual. Petani merasa lebih diuntungkan karena produknya akan dibeli dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang biasa mereka terima di pasaran, menjadikan adanya pemutusan mata rantai yang terlalu panjang. Namun, produk hanya akan dibeli apabila sesuai dengan kualitas standar produk yang sudah ditetapkan oleh Kopontren Alif. Bagi petani mitra, kegiatan yang dilakukan tidak hanya sekedar proses penukaran hasil panen menjadi pendapatan saja. Melainkan sebagai metode pembelajaran untuk lebih meningkatkan keunggulan kompetitif dan komparatif produknya agar produk dapat bersaing dipasaran. Adapun berbagai kegiatan pelatihan telah diselenggarakan oleh Kopontren Alif, guna menunjang keberhasilan usahatani para petani mitranya yang bekerjasama dengan stakeholder terkait seperti lembaga pemerintah maupun swasta.

Sasaran pasar utama komoditas sayuran Alif ditujukan untuk konsumen ritel yang berada di wilayah Bandung, Cimahi dan Tangerang. Pemilihan lokasi pasar dilakukan pada kota-kota besar, dengan konsumen akhir yang memiliki minat berbelanja di retail besar, yaitu konsumen kelas menengah ke atas.

Pemilihan tujuan pasar kepada konsumen ritel, memiliki keuntungan dan kelemahan bagi Kopontren Alif. Keuntungannya adalah dengan adanya kesepakatan di awal bahwa produk Kopontren Alif akan dibeli oleh konsumen ritel mitra dengan kualitas sesuai standar yang diminta walaupun dengan harga yang lebih baik. Namun kelemahannya adalah dengan karakteristik produk sayuran sangat dipengaruhi oleh iklim, mudah rusak, dan tidak terlalu tahan lama menjadikan harus adanya berbagai cara agar dapat tetap bisa hadir setiap saat sesuai dengan keinginan konsumen. Hal ini menjadikan dibutuhkannya pelatihan, diskusi serta kerjasama dengan ahli agar dapat meningkatkan pemahaman, keunggulan kompetitif juga komparatif, melatih petani profesional dan santri agar dapat berdaya saing tinggi.

Hasil kerja yang selama ini telah dilakukan Pontren Al Ittifaq khususnya Kopontren Alif telah membuahkan hasil. Salah satunya adalah pada tanggal 12 Desember 2018 ditunjuknya Koperasi Pesantren Alif sebagai Koperasi Ponpes Juara, pada bidang usaha sayuran dan peternakan. Selain itu, dijadikannya Pondok Pesantren percontohan oleh Gubernur Jawa Barat pada Program *One Pesantren One Product*.

Wawancara
Kepala Instansi Provinsi Jawa Barat

Bagaimana visi, rencana, dan program-program terkait ekonomi Syariah?

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat

Visi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yakni "Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi", tertuang lima misi penting. Di antaranya, dua misi utama, mencakup a) melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif; b) mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan; 4) meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil.

Dua misi ini secara khusus menjadi landasan untuk mengembangkan kebijakan ekonomi syariah di Jawa Barat. Kedua misi tersebut mengemban prioritas pembangunan yang sama yaitu pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi. Rencana pengembangan ekonomi halal sedang disusun dalam bentuk Peraturan gubernur (sedang di proses).

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan arahan Gubernur Jawa Barat, Pemprov Jawa Barat berkomitmen untuk mengembangkan perbankan syariah. Potensi pengembangan ekonomi syariah sangat besar mengingat Provinsi Jawa Barat berpenduduk mayoritas Muslim dengan dukungan jumlah pesantren di Jabar cukup banyak sekitar 12.000 pesantren. Namun demikian, *market share* perbankan syariah masih kecil sekitar 8.36 % dan aktivitas ekonomi lainnya masih berfokus kepada Bank konvensional. Hal ini menjadi satu alasan yang menjadikan sistem ekonomi berbasis syariah berpotensi besar untuk dapat tumbuh berkembang di Tanah Pasundan.

Terkait perkembangan ekonomi syariah di sektor Industri dan Perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya memfasilitasi Industri Kecil dan Menengan untuk mendapatkan sertifikasi halal, SNI, HKI, dan IG untuk beberapa kota Kabupaten di Jawa Barat. Fasilitasi Halal yang telah dilaksanakan dari tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019 mencapai 6545 IKM.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat mepunyai tugas pokok melakanakan urusan pemerintahan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil meliputi kelembagaan koperasi, pemberdayaan koperasi, usaha kecil, serta pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang menjadi kewenangan Provinsi dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2019 yaitu Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan lnovasi dan Kolaborasi" melalui Misi ke-empat yaitu "Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonom Umat yang Sejahtera dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan."

Dalam mewujudkan tercapainya Visi dan Misi tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat menyusun dan melaksanakan program/kegiatan khususnya yang berhubungan dengan pengembangan sektor ekonomi syariah, industri halal dan keungan syariah, khususnya pengembangan Koperasi dan UMKM Syariah, antara lain:

1. Program One Pesantren One Product (OPOP)
   - Bisnis dan perekonomian pesantren merupakan salah satu penunjang fungsi utama pesantren yailu pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Bisnis pesantren yang dijalankan dengan prinsip manajamen yang baik mampu mendukung keberlanjutan pesantren. Salah satu strategi dalam mengembangkan ekonomi syariah yaitu meningkatkan kualitas produk lokal melalui pemberdayaan

Koperasi dan UMKM yang dikelola oleh pesantren. Peningkatan kualitas manajerial termasuk diantaranya produksi, operasional, keuangan dan pemasaran yang dapat meningkatkan daya saing produk khususnya yang diproduksi oleh pesantren.

- Potensi pegembangan produk halal
- Potensi pengembangan keuangan syariah
- Potensi pengembangan Koperasi Syariah bagi pesantren yang telah memiliki badan usaha koperasi
- Akselerasi pembentukan Koperasi Syariah bagi pesantren yang belum memiliki badan hukum koperasi

2. Program Dana Bergulir Kredit MESRA (Masyarakat Ekonomi Sejahtera)
Kredit MESRA adalah program kredit tanpa bunga dan anggunan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Lembaga Keuangan/Perbankan, bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat melalui pendekatan rumah ibadah, akses permodalan, memudahkan masyarakat mendapatkan pembiayaan mikro, mengurangi angka poengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi selaras yang dengan keimanan.

3. Program UMKM Naik Kelas (UMKM Juara)
Pelaku usaha yang sudah memiliki karakteristik *entrepreneur* ditandai denga semangat, sikap, perilaku, dan mampu dalam menagani usaha dan/atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.
   - Potensi pengembangan produk UMKM Naik Kelas yang Bersertifikat Halal
   - Potensi pengembangan UMKM Naik Kalas yang memanfaatkan akses pembiayaan syariah
   - Potensi pengembangan komunitas usaha UMKM Naik Kelas untuk membentuk Badan Usaha Koperasi Syariah

4. Program Koperasi Juara
   a. Kelembagaan Koperasi
      - Bimbingan Teknis RAT Berbasis Teknolgi lnfonnasi dan komunikasi (TIK)
      - Sertifikasi Pengurus, Pengawas, Pengelola dan Dewan Pengawas Syariah
      - Bimbingan Teknis Anggaran Rumah Tangga, Penyusunan SOP, Peraturan Khusus dan Perubahan Anggaran Dasar
      - Bimbingn Teknis Peningkatan Efektifitas Peran dan Fungsi Pengurus dan Pengawas
      - Pendampingan Koperasi

   b. Pemberdayaan Koperasi
      - Bimbingan Teknis Pembiayaan KSPPS/USPPS Koperasi
      - Bimbingan Teknis Penguatan Usaha KSPPS/USPPS Koperasi
      - Advokasi Penguatan Kompetensi Usaha KSPPS/USPPS Koperasi
      - Benchmark Pengambangan Usaha KSPPS/USPPS Koperasi
      - Kopersi Go Digital (Aplikasi Pengelolaan Bisnis dan Keuangan) KSPPS/USPPS Koperasi

   c. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
      - Penanganan Khusus Koperasi Bermasalah
      - Advokasi Penilaian Kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi
      - Penerapan Metode Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
      - Pengawasan Kepatuhan dan Kelembagaan Koperasi

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Barat

Sebagaimana dimaklumi, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hanya dikenal visi Kepala Daerah. Visi Gubernur Jawa Barat adalah “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”.

Terdapat 9 program yang dikembangkan di Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Akses Pendidikan Untuk Semua
   - Kelas pintar untuk semua: Pembangunan 1 (satu) universitas di setiap Kabupaten/Kota

2. Desentralisasi Layanan Kesehatan
   - Layad Rawat
   - Pembangunan dan Perbaikan Rumah Sakit
   - Posyandu Juara

3. Pertumbuhan Ekonomi Umat Berbasis Inovasi
   - Ekonomi digital
   - Inkubator bisnis
   - Creative/Start-up Hub
   - Gudang tani dan ikan juara
   - Kredit 0 %
4. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata
   - 1 kota/kabupaten destinasi wisata unggul
   - Infrastruktur pariwisata
   - Pengembangan SDM pariwisata

5. Pesantren Juara:
   - Moderanisasi dana umat
   - Tunjangan santri dan ulama
   - Moderenisasi manajemen pesantren
   - 1 pesantren 1 produk (*tren mart*)

6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah:
   - 100 % jalan mulus di Jawa Barat
   - Pembangunan dan perbaikan jalan kereta

7. Gerbang Desa (Gerakan Bangun Desa)
   - 1 desa 1 BUMDes (OVOP)
   - Tunjangan desa
   - Irigasi pertanian desa
   - Internet masuk desa

8. Subsidi Gratis GOLEKMAH (Golongan Ekonomi Lemah)
   - Rumah gratis
   - Transportasi gratis
   - Layanan kesehatan gratis
   - Pendidikan gratis
   - Sembako gratis

9. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah
   - Provinsi pintar (*e-planning budgeting, e-money*, e-remunerasi kinerja, dll)
   - Kota/Desa pintar
   - Pemekaran Wilayah

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat

Visi yang berkaitan dengan Pariwisata ramah Muslim adalah menjadikan Jawa Barat sebagai Destinasi Wisata Ramah Muslim Unggulan di Indonesia. Program terobosannya adalah "Pariwisata Ramah Muslim Juara". Kegiatan yang mendukung Jawa Barat menjadi Destinasi Ramah Muslim Unggulan, mencakup:

1. Tahun 2019: Sosialisasi Sertifikasi Halal untuk Hotel (bagian kichen), dan Restoran
2. Tahun 2020: Kajian Panduan Praktis Tahapan Pariwisata ramah Muslim Jawa Barat (dalam proses penyelesaian)
3. Tahun 2021:

- Kajian Penguatan Daya Tarik Wisata Ramah Muslim di Destinasi Wisata
- Bintek Penguatan Daya Tarik Wisata Ramah Muslim bagi Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan dan Aparatur Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pendampingan Sertifikasi Halal Hotel (bagian KIchen) dan Restoran Mandiri
- Pelatihan Pendampingan Penyusunan Dokumen Sertifikasi Halal

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat

Visi pengembangan ekonomi syariah Jawa Barat ialah *"Terwujudnya Jawa Barat sebagai poros ekonomi keuangan syariah inklusif di Indonesia yang mensinergikan seluruh potensi stakeholder melalui pengembangan kemandirian ekonomi pesantren, industri kreatif syariah, halal value chain, literasi keuangan syariah dan pemanfaatan teknologi digital sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru Jawa Barat dan mendukung Jabar Juara Lahir Batin".*

Sebagai representasi Bank Indonesia di daerah, Program pengembangan ekonomi syariah KPwBI Jawa Barat dilandaskan pada strategi Pengembangan ekonomi syariah Bank Indonesia yang terdiri dari:

- Pengembangan kemandirian ekonomi syariah berbasis pesantren,
- Industri kreatif syariah yang berdaya saing tinggi dan berwawasan ekonomi syariah,
- Halal value chain,
- Pembiayaan keuangan syariah,
- Kapasitas kelembagaan ekonomi syariah yang professional
- Pengetahuan, keterampilan dan literasi keuangan syariah.

Namun demikian, KPwBI Jawa Barat memiliki beberapa program kekhusuan dalam pengembangan ekonomi syariah sejalan dengan upaya mendukung program pemerintah provinsi Jawa Barat menjadikan Jabar Juara Lahir Batin. KPwBI Jabar dan Pemprov Jabar melakukan sinergitas dalam beberapa program eksyar diantaranya adalah:

- Pengembangan Kemandirian Pondok Pesantren melalui One Product One Pesantren (OPOP), Unit usaha pesantren di dorong untuk memanfaatkan teknologi digital baik dari proses produksi, pengolahan hasil panen, penjualan, pembiayaan dan pembayaran
- Pengembangan Halal Value Chain melalui pendirian Konsorsium Halal Centre dan pelatihan sertifikasi Halal
- Pengembangan kelembagaan Koperasi Pondok Pesantren melalui pelatihan dan pendampingan pendirian Koperasi Pondok Pesantren.

Selain itu, KPw BI Jabar juga memliki beberapa program eksyar unggulan diantaranya program PUSPA, salah satu program yang mensinergikan keterlibatan para praktisi, akademisi dan mahasiswa dalam memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap Industri Kreatif/UMKM Syariah. Mahasiswa dalam rentang waktu tertentu melakukan pendampingan secara langsung terhadap para UMKM syariah serta mendapatkan monitoring dari para para dosen. Kinerja pelatihan dan pendampingan sebagai bagian dari nilai akademik yang diberikan dosen kepada mahasiswa.

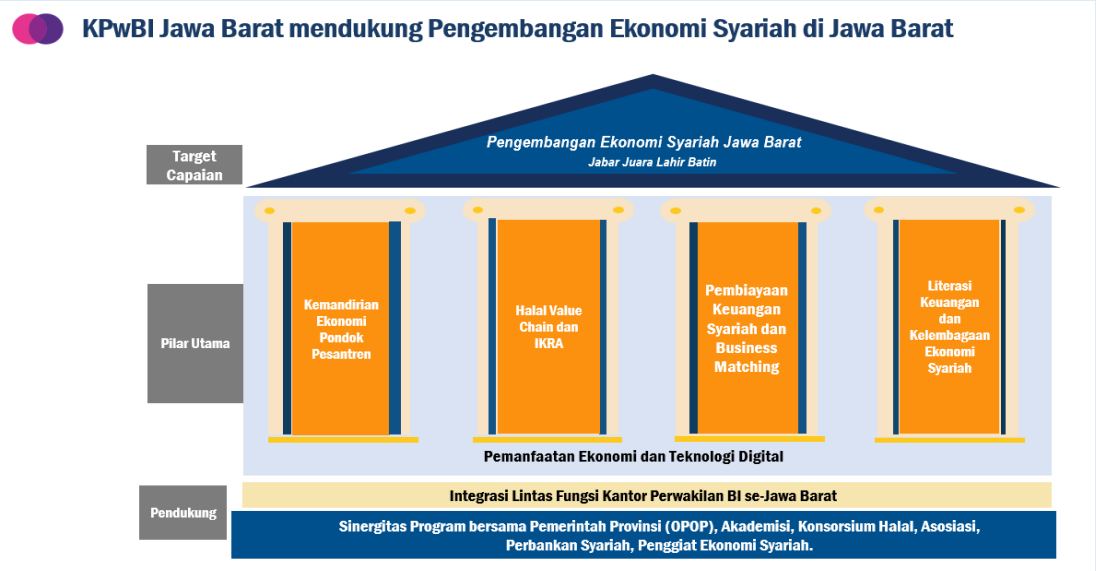

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jawa Barat

- Dukungan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk menyukseskan program kerja pemerintah seperti One Product One Pesantren & One Village One Product.
- Peningkatan literasi keuangan syariah melalui sosialisasi kepada masyarakat bersama MES, IAEI, dan Akademisi.

Bagaimana peluang pengembangan sektor ekonomi Syariah, industri halal, dan sektor keuangan Syariah?

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat

Hampir semua Kabupaten/Kota yang disurvei memiliki potensi untuk pengembangan sektor pariwisata dan menilai bahwa pariwisata mampu dijadikan leading sektor perekonomian syariah. Hal ini terlihat dari kearifan lokal yang sudah bernuansa islami seperti Depok dan Majalengka, wisata alam seperti Cirebon, Kuningan, Purwakarta dan Subang, dan wisata kerajinan dan kuliner seperti Purwakarta. Selain potensi di dalam daerah tersebut, potensi kunjungan wisatawan asing juga terlihat meningkat, terutama wisata air. Atensi pemerintah dalam melihat pariwisata sebagai leading sector juga terlihat dari deklarasi kota halal pada Kota Depok, festival kebudayaan yang mengandung unsur islami pada Kota Majalengka, dan peninggalan bangunan sejarah islam pada Kota Cirebon.

Geliat *Modest Fashion* saat ini berpusat di Bandung, dan berpotensi menjadi kiblat busana Muslim Indonesia. Hampir di tiap Kota/Kabupaten bisa dipastikan bahwa peminat busana Muslim terus meningkat. Bandung merupakan daerah paling berkontribusi pada perdagangan Muslim Indonesia yaitu 20 % perdagangan busana Muslim di Indonesia berasal dari Bandung. Melihat hal tersebut, pemerintah membuat blue-print perencanaan Kota Bandung sebagai pusat bisnis busana Muslim dunia.

Halal media and recreation di semua Kabupaten/Kota masih baru mulai dikembangkan. Beberapa data yang diperoleh saat survey kunjungan lapangan misalnya adalah perusahaan yang berbasis media rekreasi yang menciptakan aplikasi untuk wisata kuliner halal (Halal Local). Contoh halal media dan rekreasi adalah channel Manajemen Qolbu (Bandung), Akhyar TV (Bekasi).

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

Menurut catatan Kementerian Agama tahun 2016, total jumlah pesantren di Indonesia sebanyak 28.961 unit dan 32% diantaranya berada di Jawa Barat. Artinya Jawa Barat hadir sebagai daerah dengan pesantren terbanyak di Indonesia. Selain itu, mayoritas penduduk Jawa Barat sekitar 87% adalah Muslim. Sehingga Jawa Barat memiliki potensi yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi syariah termasuk untuk ekspor produk-produk halal ke penjuru dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan ekonomi syariah di Jawa Barat terus memperlihatkan tren positif. Kini, Jawa Barat menduduki peringkat kedua secara nasional setelah Ibu Kota Jakarta dalam pertumbuhan sektor ekonomi syariah. Beberapa sektor potensial yang dapat digarap pasar syariah adalah fenomena banyaknya lembaga pendidikan berbasis Islam di Jawa Barat.

Terlebih, menurut data yang dihimpun oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa, setiap pesantren di Jawa Barat memiliki jumlah santri sekitar 500 orang. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa pesantren di Jawa Barat dapat dijadikan sebagai lembaga ekonomi alternatif dalam upaya pemberdayaan masyarakat berbasis syariah. Walau perkembangan industri keuangan syariah semakin menunjukan tren peningkatan, terutama pada tahun 2018, namun dari sisi *market share* masih perlu ditingkatkan karena ekonomi syariah melawan sektor yang juga terus bergerak (industry konvensional). Artinya jika ekonomi syariah ingin terus berkembang maka harus tumbuh lebih besar dari konvensional.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

Peluang pengembangan ekonomi syariah, industri halal, dan sektor keuangan syariah, khususnya pengembangan Koperasi Syariah dan Produk UMKM halal di Jawa Barat sangat besar apabila dilihat dari indikator Visi, Misi dan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat denan mengacu kepada penjelasan pada nomor satu sebagaimana tersebut di atas.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Barat

Peluang tersebut cukup besar, karena di samping letak geografis Jawa Barat yang strategis sebagai penyangga Ibu Kota, Jawa Barat juga mempunyai jumlah penduduk sebesar 49.316.712 orang (BPS, 2019) dan merupakan yang terbesar di Indonesia dengan mayoritas beragama Islam. Menguatnya kecintaan dalam menjalankan syariat agama dalam transaksi ekonomi juga telah menumbuhkan usaha yang bergerak di bidang Muslim *fashion*, kuliner halal, serta maraknya institusi finansial syariah.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat

Peluang pengembangan pariwisata ramah Muslim di Jawa Barat sangat berpotensi, antara lain :

- Mempunyai Kebijakan Ekonomi Syariah Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru Jawa Barat dan Implementasi Pada Perencanaan Pembangungan (BAPPEDA JABAR)
- Mempunyai Desain, Strategis, Rencana, Aksi (DSRA) Pengembangan Destinasi Pariwisata ramah Muslim di Jawa Barat 2020 - 2022
- Mempunyai Pedoman Pariwisata ramah Muslim Jawa barat
- Draft Pergub Tentang Pengembangan Ekonomi Halal
- Provinsi Jawa Barat menjadi Top 5 Destinasi Pariwisata ramah Muslim Unggulan Nasional
- Wisata Alam, Rekreasi dan Belanja yang inovatif dan kolaboratif
- Letak Geografis yang berdekatan dengan Ibu Kota DKI Jakarta
- Mayoritas penduduk beragama islam
- Tersedia Airport Internasional, Husen Sastranegara dan Kertajati
- Fasilitas dan Pelayanan Hotel yang Ramah Muslim
- Hotel Syariah (self claimed)
- Restoran berdertifikat Halal

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat

Dengan jumlah penduduk mayoritas Muslim (43 juta jiwa), jumlah pondok pesantren mencapai hampir 12.000 serta banyaknya perguruan tinggi di Jabar yang menghadirkan program-program studi ekonomi berbasis syariah, Jawa Barat memliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan ekonomi syariah

Selain itu, Jawa barat juga memiliki keindahan alam yang sangat menarik bagi wisatawan asing terutama dari negara-negara Muslim (Muslim traveller). Industri kreatif Jawa Barat juga potensial untuk dikembangkan menjadi pusat industri kreatif halal untuk menopang pariwisata dan ekspor produk halal seperti fashion, makanan, obat-obatan dan kosmetik.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jawa Barat

- Jawa Barat memiliki penduduk 48 juta jiwa atau hampir 20% dari total penduduk di Indonesia, dengan mayoritas penduduknya Muslim. Hal tersebut menjadikan Jawa Barat adalah Provinsi dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di Indonesia.
- Jumlah penduduk yang besar tersebut tentu menjadi pasar keuangan Syariah yang besar apabila dapat dikelola dengan baik.
- Pemerintah Daerah di Jawa Barat sangat mendukung penuh pengembangan

- Wisata ramah Muslim dan fashion syariah, seperti dilakukannya Bazaar UMKM di Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jabar.
- Banyak mega proyek seperti: pengembangan kawasan bandara BIJB, kereta cepat Jakarta-Bandung, Waduk Jatigede dan Cisumdawu yang tentu memerlukan pendanaan dalam jangka Panjang.
- Provinsi dengan ekspor ekraf terbesar di Indonesia dengan porsi 33.56% secara Nasional (2017).
- Dalam keterangan yang disampaikan oleh Gubernur, Jawa Barat memiliki sekitar 12.000 pesantren. Potensi ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar pesantren melalui program yang telah dicanangkan Pemerintah Daerah yaitu One Product One Pesantren (OPOP).
- Selain melalui OPOP, OJK juga mendukung program Pemda Jawa Barat melalui pembentukan Bank Wakaf Mikro (BWM), yang saat ini telah beroperasi sebanyak 8 BWM.

Bagaimana tantangan utama yang saat ini dihadapi dalam mengembangkan sektor ekonomi Syariah, industri halal, dan sektor keuangan Syariah?

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat

Produk halal belum semuanya terstandarisasi. Isu dan tantangan yang dihadapi oleh sektor makanan halal adalah ekspor produk halal yang belum dimaksimalkan dengan baik karena produk halal belum semuanya terstandardisasi dan bersertifikat seperti produk dari peternakan, perkebunan, dan rumah potong hewan (RPH). RPH merupakan tempat pemotongan hewan milik pemerintah negeri yang secara hukum sah dan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Menteri sesuai SNI, sehingga mudah untuk memonitor kehalalan daging yang dipotong dan didistribusikan dari RPH. Sedangkan yang banyak beroperasi di masyarakat adalah Tempat Pemotongan Hewan (TPH) yang merupakan milik swasta dan tidak termonitor dengan baik. Hal ini mempersulit proses penjaminan daging yang beredar itu halal. Strategi yang bisa dilakukan adalah peningkatan kualitas TPH menjadi RPH dengan pemberian izin dan standardisasi, lalu memperluas dan mempermudah aksesibilitas masyarakat ke RPH sehingga perlu didirikan RPH yang juga menampung kebutuhan masyarakat di desa, tidak hanya yang di kota saja.

Regulasi yang belum selaras. Saat ini regulasi yang memayungi ranah ekonomi syariah masih belum terintegratif dan belum ada keselarasan visi dan misi dari regulasi yang terdapat pada masing-masing masterplan atau blue print yang dibuat antardepartemen atau regulator, seperti OJK, Bank Indonesia, Bappenas, Kemenkeu, Depag, dsb. Upaya perbaikan regulasi belum maksimal sehingga masih harus terus menerus dilakukan agar terjadi keselarasan dalam operasional ekonomi syariah dengan kondisi-kondisi yang terus berubah dalam perekonomian secara makro. Hal tersebut bisa diminimalisir dengan mendorong percepatan penyusunan regulasi yang melandasi pengimplementasian kebijakan ekonomi syariah. Penyelarasan kebijakan pun masih terjadi secara nyata, misalnya saja dengan disahkannya UU Halal, namun lembaga sertifikasi halal dan dewan halal masih belum dioperasikan di banyak daerah.

Kompetisi Pasar Halal Global. Dengan banyaknya negara dengan populasi Muslim, beberapa Negara misalnya Thailand, Singapura, Taiwan, dan China mulai tertarik untuk mengambil keuntungan dari pasar industri halal. Selain itu, masih banyak sektor industri yang bahan bakunya diimpor sehingga diperlukan inovasi bahan baku agar bisa bersaing dengan pasar global. Hal lain yang bisa dilakukan adalah dengan dilakukan kolaborasi antar UMKM untuk menyokong dan menjadi supporting mediaries untuk perusahaan multinasional sektoral.

Stakeholders' Sustainability. Perlunya semua stakeholder untuk berkolaborasi dan membentuk Ekonomi Syariah yang inklusif agar keberlangsungan bisa dicapai.

Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang belum mumpuni. Isu ini menjadi sangat penting mengingat sektor pariwisata merupakan salah satu unggulan di ekonomi syariah. Namun, kualitas sarana prasarana pariwisata ramah Muslim di negara-negara pesaing relatif lebih baik. Pada sektor lainnya pun terdapat tendensi bahwa pengusaha masih minim keahlian atau pengetahuan di bidang pemasaran dan teknologi.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat

Tantangan saat ini adalah masih kurangnya edukasi dan literasi baik kepada industri maupun IKM serta masih terdapatnya kendala permodalan, Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi, produk dan layanan yang belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, sebagian umat Islam belum sepenuhnya menyadari manfaat dan pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah di bidang ekonomi serta upaya mempromosikan hasil produk halal ke pasar ekspor.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

Tantangan yang dihadapi adalah masih adanya kebijakan (peraturan perundangan) yang menghambat dalam pengembangan ekonomi syariah, antara lain daya dukung aksesibilitas untuk mendapatkan sertifikat kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DSP) untuk menjalankan transaksional syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiaaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS); Aksesibilitas sertifikasi halal produk UMKM; Aksesibilitas pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan yang murah, mudah dan cepat untuk Koperasi dan UMKM dan Aksesibiias kemudahan pemasaran produk maupun jasa syariah.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Barat

Tantangan utama dalam mengundang masuknya investasi adalah rendahnya daya saing. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Lee Kuan Yew School of Publik Policy yang dilakukan pada tahun 2018, daya saing Provinsi Jawa Barat berada di peringkat ketiga. Peringkat pertama adalah Provinsi DKI Jakarta dan peringkat ke dua adalah Provinsi Jawa Timur.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat

- Perlu adanya *political will* dari Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi Jabar, Pemda Kab/Kota dan sinergitas dari unsur penta helix yaitu: Pemerintah, Akademisi, Pelaku Usaha Pariwisata, Masyarkat, dan Media Massa.
- Kepgub. Tim Percepatan Pariwisata ramah Muslim menunggu disyahkan oleh Bapak Gubernur
- Sertifikasi Halal untuk Hotel (kichen) masih sangat minim
- Sertifikasi Kompetensi SDM Pariwisata ramah Muslim belum terdata
- Mendorong Daya Tarik Wisata Ramah Muslim, Promosi Digital Pariwisata ramah Muslim, Sertifikasi Usaha Pariwisata dan SDM Pariwisata.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat

Sebagaimana diketahui, ketimpangan antara potensi dan realisasi pertumbuhan sektor ekonomi syariah, industri halal, dan sektor keuangan syariah menjadi tantangan bagi sektor-sektor ini untuk berkembang dan mengejar ketertinggalan dari sektor-sektor konvensional. Sektor ekonomi syariah, industri halal, dan sektor keuangan syariah merupakan industri baru jika dibandingkan dengan sektor ekonomi, industri, dan keuangan konvensional. Riset dan inovasi diperlukan untuk menopang eksyar agar dapat tumbuh pesat dan memiliki daya saing.

Keuangan dan Pembiayaan ekonomi syariah masih belum berkembang dengan baik dan menjadi solusi pembiayaan masyarakat. Di Jawa Barat kehadiran, “Bank Emok” (pinjaman dana oleh rentenir) yang memberikan fasilitas kecepatan proses dengan bunga tinggi baik untuk konsumsi dan usaha sangat marak terjadi sehingga sering membelit permasalahan kemiskinan di masyarakat. Perbankan syariah memiliki permasalahan tersendiri seperti:

- Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum mumpuni di bidang ekonomi dan keuangan syariah,
- Permodalan bank syariah masih terbatas
- Belum memadai sehingga mengurangi efisiensi pelayanan, belum optimalnya aspek legal yang dapat mendukung pengembangan ekonomi syariah, dan kurangnya literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Selain itu, pptimalisasi pemanfaatan dana Zakat, Infak, Shadaqoh, dan Wakaf (ZISWAF) belum optimal sehingga kontribusinya masih rendah untuk mendukung pembangunan.

Tantangan lain yang dihadapi masih rendahnya literasi tentang ekonomi keuangan syariah di hampir seluruh lapisan masyarakat terutama bagi para pelaku usaha. Persyaratan industri halal masih dipandang sebagai beban, belum dilihat sebagai peluang pasar. Rendahnya literasi juga dapat mengakibatkan masyarakat menghindari transaksi ekonomi dengan prinsip syariah.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jawa Barat

- Saat ini di Jawa Barat terdapat 11 Bank Umum Syariah, 8 Unit Usaha Syariah dan 28 BPRS. Jumlah ini masih terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk dan potensi pasar Syariah yang sangat besar.
- Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk-produk syariah IJK (Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB) masih cukup rendah.
- Perbankan syariah sangat bergantung pada sumberdana mahal (exclude dana setoran haji) berupa deposito dan pembiayaan antar bank.
- Aset perbankan syariah di Jawa Barat sangat kecil, yaitu hanya sekitar 8%, sehingga kesulitan modal untuk bersaing dengan perbankan konvensional dalam mengembangkan usaha seperti ekspansi ataupun meningkatkan penerapan teknologi.

Lampiran

Provinsi Jawa Barat

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Ekonomi Pesantren

No	Nama Pesantren	Deskripsi Program
1	Ponpes Al Islah Tajug Kabupaten Indramayu	Program Pengembangan Usaha Jasa Laundry Program Pengembangan Usaha Bakery
2	Ponpes Kebon Jambu Al Islamy Kabupaten Cirebon	Program Pengembangan Usaha Jahit
3	Ponpes Almuminin Kabupaten Kabupaten Indramayu	Program Pengembangan Usaha Hortikultura *(Green House)*
4	Ponpes Annur Kabupaten Kuningan	Program Pengembangan Usaha Jasa Laundry
5	Ponpes Salman Kabupaten Cirebon	Program Pengembangan Usaha Perikanan
6	Ponpes Kebon Cinta Kab. Indramayu	Program Pengembangan Usaha Perikanan
7	Ponpes Sabilul Mardiyah Kab, Majalengka	Program Pengembangan Usaha Terpadu (olahan durian, pengolahan air minum, pengolahan
8	Ponpes Bina Insan Mulya Kab, Cirebo	Program Pengembangan Usaha Pengolahan Sampah
9	Ponpes Bustanun Najah, Kab. Kuningan	Program Pengembangan Usaha Perikanan
10	▪ Ponpes Suryalaya ▪ Ponpes Al-issiyah ▪ Ponpes Fajrul Islam ▪ Ponpes Hidayatul Ullum ▪ Ponpes An Nur Karangresik ▪ Ponpes Urwatul Wustha	Program Pangan Mandiri: Pemberdayaan ekonomi dan kemandirian pesantren melalui budidaya komoditas hortikultura dan sayuran di pekarangan dengan media polybag (*urban farming).*
11	▪ Ponpes Ar Risalah ▪ PesantreneurshiPAY	Program Pangan Mandiri: Budidaya komoditas hortikultura dan sayuran di pekarangan dengan media hydroponic (*urban farming).*
12	Ponpes Suryalaya	▪ Pengembangan Warung Serba Ada (Waserda) bekerjasama dengan retail modern ▪ Pelatihan dan pendampingan terkait pengembangan usaha warung serba ada "Hidmat Mart" untuk mendukung kemandirian ekonomi pesantren bekerjasama dengan retail modern. ▪ Pengembangan usaha penggilingan padi/huller untuk mendukung kemandirian ekonomi pesantren.
13	Ponpes Cipasung	Program Replikasi Pengembangan Warung Serba Ada (Waserda) Ponpes Suryalaya: Pengembangan usaha warung serba ada "Minamart" untuk mendukung kemandirian ekonomi pesantren. Program ini merupakan replikasi dari program pengembangan waserda yang terdapat di Ponpes Suryalaya.

14	Ponpes Al isiyyah	Program Pengembangan Pengolahan Udang Vaname: Pengembangan usaha pengolahan udang vaname melalui pembuatan rumah produksi (miniplant) pengolahan udang dan melakukan pendampingan pelatihan dalam rangka mendorong ekspor udang vaname.
15	Ponpes Baitunnazah	*Green House* untuk Produk Pertanian Cabai Merah
16	Ponpes Al Mustofa	*Green House* untuk Produk Pertanian Cabai Merah
17	Ponpes Najaatain	*Green House* untuk Produk Pertanian Cabai Merah
18	Ponpes Sururon	*Green House* untuk Produk Pertanian Cabai Merah
19	Ponpes As Sariatul Ulum	*Green House* untuk Produk Pertanian Cabai Merah
20	Ponpes Minathul Huda	*Green House* untuk Produk Pertanian Cabai Merah
21	Ponpes Bahrul Ulum	*Green House* untuk Produk Pertanian Cabai Merah
22	Ponpes Nurul Falah	*Green House* untuk Produk Pertanian Cabai Merah
23	Ponpes Riyadhul Hidayah	*Green House* untuk Produk Pertanian Cabai Merah
24	Ponpes Banyulana	*Green House* untuk Produk Pertanian Cabai Merah
25	Ponpes At-Taqwa	Pelatihan Pengembangan Koperasi.
26	Ponpes Al Ittifaq	Pemberian Bantuan Berupa Pipanisasi
27	Ponpes Al Falah	Pelatihan Pengembangan Koperasi dan BI Corner
28	Ponpes Najaatain	Pembangunan Sumur Bor Dan *Cultivator*
29	Ponpes Al Masthuriyah	Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Maggot Lele

Daftar Usaha-Usaha Syariah yang Dikelola Pondok Pesantren

No.	Nama Pesantren	Nama Unit Usaha yang dikelola Santri	Deskripsi
1	PP. Al Islah Bobos Kabupaten Cirebon	Batu Alam	Jual Matrial / bahan Baku
		USPPS Kopontren Al Islah	Aset Kredit
		Warpostel Net	Jasa Pelayanan Expedisi dan PPOB
		Alfamart	Penjualan Produk Keb, sehari -hari
		Pengolahan sampah	Penjualan sampah plastik
2	PP. Al Islah Tajug Kabupaten Indramayu	Usaha Jasa Laundry	Usaha Jasa laundry untuk santri
		Usaha Air Minum	Pejualan air minum untuk kebutuhan para santri
		Usaha Bakery	Penjualan Roti untuk kebutuhan para santri di kantin
		Usaha Toko ATK & Keb.Santri	Kopontren
3	PP. Kebon Jambu Al Islamy Kabupaten Cirebon	Usaha Jahit Pakaian	Pengembangan usaha Jasa jahit pakaian internal
		Usaha Toko ATK & Keb. Santri	Penjualan produk keb. sehari-hari
4	PP. Almuminin Kabupaten Indramayu	Peternakan Domba	Pembesaran domba untuk qurban dan akikah
		Pertanian Terintegrasi (pupuk)	Pengolahan limbah kotoran kambing
		Pakan Permentasi & Pembuatan Nutrisi	Pembuatan pakan untuk ternak dan molase
		Pertanian Sayuran Daun *(Green House)*	Usaha sayuran pakcoy & salada budidaya melalui greenhouse
5	Pesantren Attaqwa *Digitalpreuneurship* Kota Cirebon	Fashion Muslim dan Muslimah	Usaha penjualan pakaian Muslim & muslmah secara online
		Jasa Event Organizer	Jasa EO

No.	Nama Pesantren	Nama Unit Usaha yang dikelola Santri	Deskripsi
		Usaha Marketing Digital	Jasa Marketing Digital UMKM
6	PP. Madinantun Najah Kabupaten Kuningan	Usaha Jasa wisata alam "woodland"	
7	PP. Nadwatul Banin Kabupaten Cirebon	Usaha Pengelolaan Sampah	Pengolahan sampah organik
8	PP. YLPI Buntet Kabupaten Cirebon	Usaha Toko Serba Ada	Penjualan produk kebutuhan sehari - hari
		Usaha Jasa Keuangan Syariah BWM PP Buntet	Usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah (pinjaman modal)
9	PP Khas Kempek Kabupaten Cirebon	Usaha Toko ATK & Keb. Santri	Usaha Kopontreen
		Usaha Isi Ulang Air minum	Masih dipergunakan unk kalangan internal sendiri
		Usaha Pengolahan sampah	Baru mulai berjalan
		Usaha Jasa Keuangan Syariah	Total Aset Kredit
10	PP. Saung Balong Kabupaten Majalengka	Usaha Rumah Makan	Usaha Restauran
		Usaha jasa Wisata Hydropoic	Usaha wisata taman hydroponic
		Usaha Isi Ulang Air minum	Usaha perdagangan air isi ulang
11	PP. Annur Kabupaten Kuningan	Usaha Toko sembako	Kopontren
		Usaha Laundry	
12	Ponpes Al Isiyyah	Mini Market Qini Mart, UKM, PT. Usaha Mandiri isiyyah, Tambak Udang Qini Vaname, PT. RUT	Memiliki + 2.000 orang santri. Merupakan pesantren Thorekat yang sudah memisahkan manajemen pesantren dan manajemen bisnisnya.
14	Ponpes Cipasung	KBIH, Isi Ulang Air Minum, Sablon dan Konveksi, Pertanian, Perikanan	Memiliki 3.000 orang santri yang bermukim di lingkungan pesantren. Pesantren sudah memiliki beberapa usaha menuju kemandirian pesantren.
15	Ponpes Suryalaya	Lembaga Usaha Pedesaan (Mini Market, Bakrie Roti, Kolam Ikan Bioplok)	Bisnis pesantren dikelola oleh LUP (Lembaga Usaha Pedesaan). Manajemen pesantren sudah terpisah dengan manajemen bisnis pesantren.
16	Ponpes Al Amin	PT Persada Al Amin (Jasa Haji dan Umroh, Rumah Makan, Perkebunan Jati, Ayam) dan PT Tjiwulan Putera Mandiri (Bordir)	Pesantren memiliki usaha dibidang fashion berupa pakaian Muslim laki-laki/Jubah yang di ekspor ke Timur Tengah. Manajemen pesantren sudah terpisah dengan manajemen usahanya.
17	Ponpes Darussalam	Pabrik Roti, Pabrik sandal, Peci dan Laundry, serta bimbingan umroh	Usaha pesantren masih dalam skala kecil dan masih perlu pengembangan.
18	Ponpes Ar Risalah	Inkubator bisnis (Screen House, Hoponik, Perikanan, Stek Jati Platinum Bioplok, Saham di Restoran Engking	Usaha yang dilakukan masih skala kecil untuk memenuhi kebutuhan pesantren, sehingga masih diperlukan pengembangan.
19	Ponpes Al Ittifaq	Koperasi Al-Ittifaq	Koperasi Al Ittifaq (Penjualan produk produk pertanian ke supermarket dan pasar lokal)

No.	Nama Pesantren	Nama Unit Usaha yang dikelola Santri	Deskripsi
20	Ponpes Daarut Tauhid	Badan Diklat, BMT, Koperasi, Pesantren Mart, Bakery	Penyediaan Jasa Keuangan Mikro Syariah dan Produk Roti Bakery
21	Ponpes Najaatain	Pertanian	Produk butternut, pepaya dan tanaman hortikultura
22	Ponpes At Taqwa	Peternakan	Peternakan Kambing

Provinsi
Jawa Timur

Sekilas
tentang Ekonomi Syariah di Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur dengan mayoritas penduduk Muslim sebanyak 97.81% berhasil mendorong pengembangan ekonomi syariah khususnya di sektor pengembangan ekonomi pesantren. Dengan julukan "Provinsi Santri", provinsi Jawa Timur sudah memiliki program pengembangan ekonomi syariah untuk pesantren antara lain dilakukan melalui adanya sinergi diantara beberapa pesantren dalam membentuk koperasi sekunder bernama Sarekat Bisnis Pesantren, pengembangan Koperasi Syariah/BMT di beberapa pesantren serta ikhtiar penguatan ekonomi syariah melalui program One Pesantren One Product (OPOP).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memiliki komitmen yang kuat dalam pengembangan ekonomi Syariah misalnya penetapan kawasan industri halal di Kabupaten Sidoarjo, inisiasi rencana pendirian Islamic Science Park di Pulau Madura serta penjajakan proses spin-off Unit Usaha Syariah Bank Jatim menjadi Bank Umum Syariah yang dimulai sejak tahun 2017. Potensi pengembangan ekonomi syariah di Jawa Timur juga diperkuat dengan kontribusi UMKM dimana diperkirakan ada sekitar 9,59 juta unit UMKM di Jawa Timur dan 95 persen di antaranya adalah usaha mikro. Komitmen pemerintah daerah Provinsi Jawa TImur terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah juga sudah tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur 2019. Dokumen tersebut mencantumkan upaya pengembangan pembiayaan ekonomi syariah yang merupakan salah satu arah kebijakan keuangan daerah.

Regulasi Tingkat Daerah
di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah

Rencana Peraturan Daerah terkait Keuangan Syariah	Perda Provinsi Jatim 8/2018 tentang Perubahan Kelima Atas Perda 8/2013 tentang Penyertaan Modal, Modal Dasar PT Bank Jatim Syariah
Rencana / *Masterplan* / Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah Provinsi Jawa Timur	Belum ada

Rencana Pemerintah Daerah
di Sektor Ekonomi Syariah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024 di Provinsi Jawa Timur memfokuskan pada "TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG" dengan 6 misi Pembangunan Provinsi Jawa Timur yaitu:

- **Misi 1**: Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah
- **Misi 2**: Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan
- **Misi 3**: Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan
- **Misi 4**: Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya
- **Misi 5**: Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan

Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Inflasi		Tingkat Pengangguran		Tingkat Kemiskinan		Konsumsi RT		Konsumsi Pemerintah		Investasi		Ekspor		Impor	
2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
5.50%	5.52%	2.86%	2.12%	3.99%	3.92%	10.85%	10.20%	4.84%	4.81%	5.00%	4.63%	6.08%	4.92%	2.47%	-0.33%	7.37%	-8.80%

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jawa Timur Tahun 2019-2024

RPJMD merupakan arah pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dimana Dokumen RPJMD menjabarkan permasalahan pembangunan, isu strategis, visi, misi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan programprogram pembangunan daerah. RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 memperhatikan dan selaras dengan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 karena pembangunan daerah adalah bagian pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional akan tercapai jika didukung oleh pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan nasional.

Program-program Unggulan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024	Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Timur 5 tahun ke depan
▪ Keluarga harapan plus ▪ Jatim Satya (Jawa Timur Sejahtera dan Mulya): Penanggulangan kemiskinan perdesaan ▪ *Millennial job center* ▪ *Service point*, pelatihan, investasi, *co-working space* dan pemberdayaan masyarakat ▪ *Science techno park dream team* ▪ Pelatihan kerja dan pelatihan intensif di 16 UPT BLK serta program *Job Market Fair* ▪ *Vocational training* ▪ Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan ▪ Revitalisasi SMK melalui sekolah pengampu ▪ peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap ▪ Beasiswa untuk SMK jurusan prioritas (kelautan, teknologi pertanian, pariwisata) ▪ Program pengembangan teknis keterampilan kejuruan (inkubator) ▪ Pendidikan kesetaraan berbasis vokasi (kejar paket) ▪ Pesantren Pengasuhan Anak Masa Depan (Pesan Aman) ▪ Program desa sehat ▪ Penyediaan Pelayanan Kesehatan Gratis Dan Berkualitas (TANTISTAS) serta perluasan akses dan penguatan fasilitas kesehatan ▪ Pemenuhan redistribusi tenaga kesehatan terutama di wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan dan Kepulauan Bahari Husada (rumah sakit terapung) ▪ Optimalisasi pemenuhan ruang laktasi, ramah anak dan disabilitas di perkantoran, sekolahan, dan berbagai ruang publik yang lain. ▪ Penyediaan air minum (SPAM) regional ▪ Penyediaan akses sanitasi layak ▪ Penanganan desa rawan kekeringan ▪ Pengembangan & Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) ▪ Penanganan banjir ▪ Peningkatan kesalehan dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha ▪ *Vocational training*, pusat konsultansi dan pendampingan pasca kepulangan PMI (Pekerja Migran Indonesia) wanita ▪ Pengembangan pusat agropolitan dan kawasan terpadu pertanian ▪ Penguatan SDM pertanian dan gapoktan ▪ Pengembangan produk pangan berbasis agro	▪ Kualitas sumber daya manusia berbasis keagamaan dan kebudayaan ▪ Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat ▪ Tata kelola pemerintah dan reformasi birokrasi ▪ Demokrasi kewargaan ▪ Pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Rencana Pembangunan Ekonomi Syariah di Provinsi Jawa Timur

Rumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung konektivitas Antar Wilayah
2. Menurunnya Angka Kemiskinan
3. Meningkatnya Kesetaraan Gender (Pemberdayaan Wanita)
4. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar
5. Menurunnya Tingkat Pengangguran
6. Terwujudnya Pemerintahan yang Baik
7. Menguatnya Nilai - Nilai Demokrasi dalam Kehidupan Sosial Masyarakat
8. Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Sektor Pariwisata Ramah Muslim	Sektor Makanan/Minuman dan Produk Halal
▪ Pengembangan wisata ramah Muslim (*halal tourism*) mencakup pemenuhan ketersediaan makanan dan minuman halal di lokasi wisata, kemudahan fasilitas untuk bersuci dan beribadah serta sarana, fasilitas dan pelayanan tidak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan nilai Syariah	▪ Penguatan kualitas produk KUKM diantaranya dalam bentuk fasilitasi standarisasi KUKM dengan jenis standarisasi terdiri dari standarisasi halal, SNI, ISO dan merk. ▪ Peningkatan daya saing komoditi peternakan untuk mengoptimalisasi peningkatan kualitas mutu produk, pemasaran hasil dan penambahan unit usaha produk hewan yang memenuhi standard ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).
Sektor Keuangan Syariah	**Sektor Fesyen Muslim**
▪ Mendorong *spin-off* Bank Jatim Syariah paling lambat pada 2023 sehingga sesuai dengan syarat yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 21/2008 tentang perbankan Syariah ▪ Mendorong peranan koperasi sebagai salah satu pilar penyangga perekonomian di Jawa Timur khususnya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah/BMT dalam mendukung infrastruktur keuangan mikro pembiayaan syariah dalam meningkatkan program inklusi keuangan Syariah. ▪ Mendorong Digitalisasi Koperasi Syariah melalui aplikasi Sistem Informasi Pembelajaran dan Peningkatan Wawasan Perkoperasian (SiJawara), Toko Online Milik Koperasi (Tomiko) dan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti *e-commerce*.	▪ Menyelenggarakan promosi/pameran skala internasional ▪ Program pelatihan ekspor ▪ Program fasilitasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) ▪ Program penghargaan eksportir berprestasi

Program Pemerintah Daerah
di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah

Sektor Industri Halal

Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Sektor industri halal unggulan yang akan diprioritaskan pengembangannya adalah sektor pariwisata ramah Muslim, dan ekonomi kreatif seperti fesyen Muslim dan kuliner.

Program Pendukung Sektor Halal

Makanan dan Minuman halal	▪ *Workshop* sistem jaminan halal ▪ Program dana bergulir sebesar Rp 900 juta yang rencananya akan dibagikan ke 30 UMKM pangan (termasuk makanan/minuman halal) di wilayah setempat ▪ Fasilitasi UMKM dalam mendapatkan sertifikasi Halal ▪ Promosi/pameran ▪ Kantor Perwakilan Dagang (KPD) ▪ Misi dagang ▪ Sertifikasi halal
Pariwisata Ramah Muslim	Pembangunan kawasan wisata islami yang terintegrasi di kaki Jembatan Surabaya-Madura, yaitu *Islamic Science Park* dengan luas lahan 101 hektare, dan porsi wahana yang akan dibangun di tempat rekreasi itu adalah 20% untuk education, 30% untuk art, dan 50% untuk entertainment.
Fesyen Muslim	▪ Promosi/pameran ▪ Kantor Perwakilan Dagang (KPD) ▪ Misi dagang

Jumlah Kegiatan Syariah/Halal

	Jumlah Event Produk Daerah	Jumlah Event Produk Halal/Syariah/Islami
Makanan dan Minuman	33	-
Fesyen	3	-
Pariwisata	15	1

Penetapan Daerah Pariwisata Ramah Muslim

Tahap	Daftar Desa/Kabupaten/Kota Wisata ramah Muslim
Sudah ada	Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, Kabupaten Surabaya, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kota Blitar, Kota Surabaya, Kota Batu, Kabupaten Magetan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Bangkalan, Kota Probolinggo, dan Kota Malang
Dalam tahap perencanaan	Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep

Program Pendorong Pariwisata Ramah Muslim

Program utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur maupun pendampingan / pemberdayaan / bantuan, belum secara khusus ditujukan pada pariwisata ramah Muslim, hal ini karena belum ada peraturan perundangan di tingkat pusat yang mengatur tentang pariwisata ramah Muslim. Namun pada tahun 2019 telah dilaksanakan inisiasi promosi pariwisata ramah Muslim melalui kegiatan pameran pariwisata ramah Muslim pada Jatim Fair 2019 yang melibatkan 25 industri pariwisata ramah Muslim.

Sektor UMKM dan Ekonomi Pesantren

Program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

Program Kemitraan UMKM dan Pengusaha Besar

Tahap	Daftar Program Kemitraan di peringkat Desa/Kabupaten/Kota
Sudah ada	▪ Upaya memfasilitasi kemitraan pemasaran lainnya dilakukan pemasaran produknya baik kepada ritel modern, AKRINDO, atau market-place online/e-commerce
Tahap Perencanaan	▪ Mendorong terjalinnya kemitraan antara UKM dan BUMD/BUMDES

Program Pemberdayaan UMKM

Sektor	Daftar Program Pendampingan
Makanan dan minuman halal Fesyen Muslim Pariwisata ramah Muslim	▪ Program pelatihan kewirausahaan dan sertifikasi produk halal pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ▪ Program penguatan akses pembiayaan UMKM halal ▪ Program peningkatan usaha ekonomi desa/kelurahan dan yang terkait UMKM halal

Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	2017	2018	2019
IKM mendapat pendampingan	Diseminasi: Standarisasi 541 IKM Kekayaan intelektual 100 IKM Fasilitasi: Standarisasi 365 IKM Kekayaan Intelektual 816 IKM	Diseminasi: Standarisasi 129 IKM Kekayaan intelektual 100 IKM Fasilitasi: Standarisasi 179 IKM Kekayaan Intelektual 644 IKM	Diseminasi: Standarisasi 125 IKM Kekayaan Intelektual 413 IKM Fasilitasi: Standarisasi 84 IKM -
IKM mendapat pendampingan sertifikasi halal	Masih di Bidang Agro	Diseminasi Halal 200 IKM Sertifikasi Halal 130 IKM	Pelatihan Penyelia Halal 25 IKM Sertifikasi Halal 35 IKM

Sektor Keuangan Syariah

Program Otoritas Jasa Keuangan (Regional)

Sub-sektor	Detil Program
Edukasi Keuangan Syariah	▪ Edukasi tentang perencanaan keuangan dan diseminasi buku "Gaul Keuangan Syariah" ke institusi pendidikan di wilayah Jawa Timur bekerja sama dengan Bank Umum Syariah dan BPR Syariah. ▪ Edukasi kewirusahaan pesantren dengan perbankan Syariah ▪ Webinar Series Generasi Milinial Cinta Keuangan Syariah: 1) Asuransi Syariah 2) Pasar Modal Syariah dan 3) Perbankan Syariah ▪ Keuangan Digital bagi Milenial untuk Santri dan alumni Santri ▪ Diseminasi Buku Khotbah terhadap Pengurus Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur
Pendampingan Pembiayaan Jamaah Masjid	Pendampingan dan Bimbingan teknis pembiayaan oleh industri keuangan terhadap jamaah masjid.

Sektor Keuangan Mikro Syariah

Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Program Pengembangan Koperasi Syariah

Program	Institusi Keuangan Mikro Syariah
Program dengan target sasaran: KSPPS / USPPS – Koperasi Program dengan target sasaran Dewan Pengawas Syariah Koperasi	▪ Sosialisasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Usaha Antar KSPPS/USPPS Koperasi dengan Koperasi Sekunder Syariah ▪ Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan Produk dan Akad Syariah Oleh KSPPS/USPPS Koperasi ▪ Bimbingan Teknis Pemahaman dan Ketrampilan Operasional Produk - Produk Pembiayaan Syariah ▪ Bimbingan Teknis Pendayagunaan Ziswah Oleh KSPPS/USPPS Koperasi ▪ Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) Koperasi
Program dengan target sasaran : USPPS - Koperasi	▪ Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Resiko Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pola Syariah ▪ Sosialisasi Infrastruktur Keuangan Mikro Koperasi Wanita Dalam Rangka Mendukung Akselerasi Keuangan Syariah ▪ Bimbingan Teknis Standar Akuntansi pada Pembiayaan Syariah ▪ Bimbingan Teknis Usaha Simpan Pinjam Pola Tanggungrenteng Bagi Koperasi Syariah ▪ Sosialisasi Standar Operasional Manajemen (SOM) Usaha Simpan Pinjam Syariah bagi KSPPS/USPPS-Kop
Program dengan target sasaran: KSPPS / USPPS – Koperasi, BMT, dan Koppontren	▪ Bimbingan Teknis Sistem Pelaporan Keuangan Usaha Simpan Pinjam Berbasis IT bagi Koperasi Syariah/KSPPS

Program Otoritas Jasa Keuangan (Regional)

Program Pendampingan, Pengawasan, dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Pendampingan dan Pembinaan Laporan Keuangan	▪ Bimbingan teknis peningkatan kapasitas pegawai LKMS ▪ Bimbingan teksnis pelaporan keuangan dan tata kelola bagi pengurus LKMS ▪ Bimbingan teknis Standar Akuntansi pada pembiayaan syariah ▪ Bimbingan teknis pemahaman dan ketrampilan operasional produk pembiayaan syariah ▪ Pemeriksaan dan Pengawasan Laporan Keuangan ▪ Pelatihan penyusunan Laproan Keuangan
Program penguatan Teknologi Informasi	▪ Bimbingan teknis Sistem pelaporan berbasis IT

Sektor Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Program BAZNAS Provinsi Jawa Timur

Kategori Program ZIS dan Alokasi Baznas Provinsi Jawa Timur

Kategori	Nama Program	Jumlah Penerima Manfaat (jiwa)	Besar Alokasi Penyaluran (Rp)
Sosial Kemanusiaan	Jawa Timur Peduli Bantuan Fakir Bantuan Yatim Bantuan Bencana dll	192,756	45,119,001,105
Pendidikan	Beasiswa SMA/SMK, SI Alat Sekolah Biaya Sekolah Mustahik Lainnya	18,025	9,220,683,257
Kesehatan	Biaya Pengobatan Fakir dan Miskin	16,498	4,105,039,017
Pemberdayaan Ekonomi	Pemberian Modal Usaha, dan Alat Usaha, serta Pemberdayaan	8,334	8,930,922,020
Dakwah	Bantuan Da'i Rawan Aqidah Bantuan Marbot Masjid Bantuan Guru Ngaji	27,015	7,801,866,959

Program BAZNAS Provinsi Jawa Timur dalam Mengatasi Permasalahan Pandemi Covid-19

Nama Program	Mekanisme Penyaluran Bantuan	Alokasi Penyaluran (Rp)	Tipe Penerima Bantuan/Manfaat	Dampak yang Terjadi pada Penerima Manfaat
Bantuan Tunai Mustahik (BTM) Covid-19(dari BAZNAS RI)	BAZNAS Jatim mencari calon penerima melalui Baznas Kab/Kota. Bantuan dikirim BAZNAS RI langsung kepada ybs melalui rek bank atau melalui wesel pos.	807,300,000 u/ 2691 orang	Tenaga pendidik dan dakwah; pelaku usaha mikro dan kecil, buruh informal dan formal, korban PHK dan pengangguran	Beban kebutuhan hidup saat pandemi jadi lebih ringan
Bantuan Mustahik Terdampak Covid-19	Bantuan diberikan kepada mustahik melalui relawan dalam 3 tahap	643,200,000 u/ 1342 orang @ 600,000	Mustahik Perorangan terdampak covid-19 (pelaku usaha mikro dan kecil, buruh informal dan formal, korban PHK dan pengangguran)	Beban hidup saat pandemi lebih ringan
Bantuan modal usahamikro/kecilter dampak covid-19	BAZNAS Jatim mencari calon penerima melalui Baznas Kab/Kota, juga memverifikasi permohonan dari masyarakat. Bantuan disalurkan langsung kepada yang bersangkutan dan/atau melalui Baznas Kab/Kota dan/atau relawan/LSM pendamping	70,000,000 u/ 69 pelaku usaha	Pelaku usaha mikro/kecil di sektor kuliner halal, busana muslim, dan jasa halal yang terancam gulung tikar	Lebih bergairah untuk memajukan usahanya
Bantuan alat kerja/tempat usaha mikro/kecil terdampak covid-19	BAZNAS Jatim mencari calon penerima melalui BaznasKab/Kota, juga memverifikasi permohonan dari masyarakat. Bantuan disalurkan langsung kepada yang bersangkutan dan/atau melalui Baznas Kab/Kota dan/atau relawan/LSM pendamping	147,000,000 u/ 48 pelaku usaha	Pelaku usaha mikro/kecil di sektor kuliner halal, busana muslim, dan jasa halal yang terancam gulung tikar.	Lebih semangat untuk menjalankan usahanya
Bantuan biaya sekolah terdampak covid-19	BAZNAS Jatim memverifikasi permohonan yang diajukan sekolah atau masyarakat. Bantuan disalurkan ke sekolah	801,000,000	Siswa dhuafa SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi	Bisa belajar tanpa beban tagihan biaya sekolah
Bantuan pelunasan hutang usaha terdampak covid-19	BAZNAS Jatim memverifikasi permohonan yang diajukan masyarakat dengan mengundang debitur dan kreditur ybs. Bantuan dibayarkan langsung ke kreditur, khusus rentenir, bantuan dibayar jika ybs bersedia menghapus tagihan ribanya.	50.472,000	Mustahik gharimin perorangan, termasuk yang terlilit hutang rentenir	Dapat menjalankan usaha dengan lebih tenang karena tidak dikejar-kejar tagihan hutang
Bantuan Konsumsi Dhuafa terdampak covid-19	BAZNAS Jatim mencari dhuafa calon penerima bantuan. Bantuan disalurkan dalam bentuk makanan siap santap melalui warung nasi terdekat yang ditugasi melakukan pengadaan dan pengiriman ke alamat dhuafa ybs.	43,200,000	Mustahik yang tidak bisa memasak sendiri karena sakit atau sudah renta, termasuk tukang becak, kuli banguan/proyek.	Beban hidup untuk konsumsi jadi lebih ringan

Nama Program	Mekanisme Penyaluran Bantuan	Alokasi Penyaluran (Rp)	Tipe Penerima Bantuan/Manfaat	Dampak yang Terjadi pada Penerima Manfaat
Bantuan pengadaan sarana pencegahan penularan covid-19, dan pemulasaraan jenazah covid-19	BAZNAS Jatim memverifikasi permohonan dari masyarakat, Dan menggali informasi dari satgas covid-19 rumah sakit tentang kebutuhan sarana pemulasaraan jenazah. Bantuan disalurkan langsung kepada penerima manfaat	26,615,000	Pesantren dan Satgas Covid Rumah Sakit Dr.Soetomo Surabaya	Terpenuhinya sarana pencegahan penularan covid-19 dan sarana pemulasaraan jenazah covid-19
Bantuan Biaya Hidup Fakir Terdampak Covid-19	Melalui rekening bank relawan wali fakir setempat. Bantuan diberikan setiap bulan	3,416,800,000	Fakir lansia, terutama yang sebatangkara	Biaya hidup yang lebih berat selama pandemic bisa lebih terpenuhi
Bedah Rumah Dhuafa Tidak Layak Huni		1,325,000,000 u/ 106 rumah duafa	Fakir yang rumahnya tidak sehat, rusak, roboh	Bisa berteduk dan beristirahat Dungan lebih tenang

Gambaran
Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah

Sektor Industri Halal

Nilai Ekspor Provinsi Jawa Timur

Sektor	Jumlah Ekspor tahun (USD)	% Dibandingkan dengan Total Ekspor Non-Migas
Makanan dan Minuman	827,770,241	6.09 %
Makanan dan Minuman Halal	83,328,398	0.61 %
Fesyen	73,707,771	0.59 %
Fesyen Muslim	41,286,158	0.30 %

Jumlah Usaha/ Merk dengan Sertifikat Halal pada Sektor Makanan dan Minuman (Mamin)

Sektor Usaha/Brand (Tahun 2018)		Sektor Usaha/Brand (Tahun 2019)	
Roti	0	Roti	10
Katering dan Restoran	17	Katering dan Restoran	21
Tepung, Kanji, and produk turunan/olahan	0	Tepung, Kanji, and produk turunan/olahan	2
Es, es krim, dan bahan-bahan pendukung	1	Es, es krim, dan bahan-bahan pendukung	Belum ada
Susu dan produk olahan/turunan susu	0	Susu dan produk olahan/turunan susu	7
Makanan olahan, daging dan unggas	22	Makanan olahan, daging dan unggas	28
Makanan olahan ikan	144	Makanan olahan ikan	178
Makanan olahan telur	3	Makanan olahan telur	3
Makanan ringan	0	Makanan ringan	51
Pemanis, bumbu dapur, bumbu penyedap/ pelengkap	17	Pemanis, bumbu dapur, bumbu penyedap/ pelengkap	Belum ada
Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	75	Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	80
Semua Usaha/Brand Tersertifikasi Halal	279	Semua Usaha/Brand Tersertifikasi Halal	380

Sumber: Daftar Belanja Produk Halal LPPOM MUI hingga periode Maret-April-Mei 2019

Kontribusi Sektor Mamin terhadap Perekonomian Provinsi Jawa Timur

	2019	2018	2017	2016	2015
PDRB (Milliar Rupiah)					
Mamin olahan	248,698	214,642	185,800.4	163,287.1	142,809.6
Mamin olahan, Base = 2010	175,449.3	153,219.6	134,358.1	121,527.6	112,027.5
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb)	119,937	109,697.7	100,834.8	91,226.2	79,007
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb), Base = 2010	81,370.2	75,748.4	70,317.5	65,154.7	60,006
Pertumbuhan PDRB (%)					
Mamin olahan, Base = 2010	14.51	14.04	10.56	8.48	10.17
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb), Base = 2010	7.42	7.72	7.92	8.58	7.81

Kontribusi pada PDRB (%)					
Mamin olahan	10.57	9.8	9.23	8.8	8.44
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb)	5.10	5.01	5.01	4.92	4.67

Total Produksi Daging Daerah (Tahun 2017)

Populasi Ternak		Produksi Daging Ternak kg)	
Sapi Potong	4,511,613	Sapi	96,917,009
Sapi Perah	273,881	Sapi Impor	Belum ada
Kerbau	26,622	Kerbau	64,011
Kuda	10,758	Kuda	25,755
Kambing	3,376,323	Kambing	18,680,537
Domba	1,362,062	Domba	5,984,037
Populasi Unggas		Produksi Daging Unggas (kg)	
Ayam Kampung	36,439,200	Ayam Kampung	42,114,650
Ayam Petelur	46,900,576	Ayam Petelur	32,288,326
Ayam Broiler	224,815,584	Ayam Broiler	270,881,895
Bebek	5,600,971	Bebek	6,193,790

Skor Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) Tahun 2018 Provinsi Jawa Timur

Akses	75
Komunikasi	41
Lingkungan	54
Jasa	42
Skor IMTI	49

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Provinsi Jawa Timur

	2019	2018	2017	2016	2015
PDRB (Milliar Rupiah)					
Jasa akomodasi	19,267	17,140.3	15,223.5	13,712.6	12,469.3
Jasa akomodasi, Base = 2010	10,341	9,499.1	8,884.7	8,243.3	7,651
Pertumbuhan PDRB (%)					
Jasa akomodasi, Base = 2010	8.86	6.92	7.78	7.74	6.99
Kontribusi pada PDRB (%)					
Jasa akomodasi	0.63	0.78	0.76	0.74	0.74
Jumlah turis					
Turis domestik	82.561.561	70.935.415	65.623.535	58.068.493	51.466.969
Turis mancanegara	770.826	830.968	690.509	618.615	612.412

Rating untuk Pariwisata Ramah Muslim di Provinsi Jawa Timur

Skor	Aspek		Skor	Aspek	
Skor Akses	Udara	5	Skor Lingkungan	Kedatangan Turis Muslim	5
	Kereta	4			
	Laut	2		Jangkauan Wi-Fi	4
	Infrastruktur Jalan	4		Komitmen terhadap Pariwisata ramah Muslim	4
Skor Komunikasi	Panduan Pelancong Muslim	3	Skor Jasa	Restoran Halal	5
	Edukasi Pemangku Kepentingan	4		Masjid	3
	Jangkauan Pasar	4		Bandara	5
	Pemandu Tur	5		Hotel	4
	Pemasaran Digital	5		Atraksi	4
			Skor Total		70
			Rata-rata Skor		4.12

NB: data lengkap bisa didapatkan di dalam Laporan Perkembangan Pariwisata ramah Muslim Daerah 2019-2020

Indikator Pariwisata Ramah Muslim Provinsi Jawa Timur

Indikator	Skor/Nilai	Keterangan
Akses	**Cukup baik**	**Terdapat akses udara, akses kereta, dan infrastruktur jalan yang bagus, namun tidak ada akses laut**
Akses Udara	Cukup baik	Hanya ada bandara domestik
Bandara International	-	
Bandara Domestik	1	
Akses Kereta	Baik	Terdapat akses kereta yang baik
Jumlah rute	-	
Jumlah stasiun	141	
Akses Laut	Tidak ada	Tidak ada akses laut
Terminal Kapal Pesiar	-	
Infrastruktur Jalan	Baik	Kondisi jalan sebagian besar dalam keadaan baik dan layak pakai
Jalan Nasional/Negara	-	-
Jalan Provinsi	1,221,293	(km), 5,112.92 km-nya merupakan jalan tol
Komunikasi	**Cukup baik**	**Memiliki edukasi untuk pemangku kepentingan, kegiatan pendukung jangkauan pasar, pemandu tur, dan melakukan pemasaran digital**
Panduan bagi Pelancong Muslim	Kurang	Tidak ada buku panduan dalam Bahasa Inggris dan Arab
Eksemplar Bahasa Inggris	-	
Eksemplar Bahasa Arab	-	
Edukasi Pemangku Kepentingan	Baik	Terdapat edukasi dalam berntuk *workshop*
Workshop	50	

Indikator	Skor/Nilai	Keterangan
Jangkauan Pasar	Baik	Terdapat kegiatan konferensi/*event/expo*
Konferensi/Event/Expo	2	Bati Islamic International Tourism, Halla Tourism Bazaar
Halal *Travel Mart*	-	
Brosur	-	
Pameran	-	
Pemandu Tur	Baik	Terdapat 125 orang pemandu tur berlisensi, tapi tidak dijelaskan mana yang berbahasa Inggris atau Arab
Bahasa Arab	-	
Bahasa Inggris	-	
Pemasaran Digital	Baik	Pemasaran secara digital dilakukan dengan media sosial dan Youtube
Applikasi	-	
Website	-	
Media Sosial	Ada	Google plus, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube
Lainnya	Ada	
Lingkungan	Cukup baik	Jawa timur kedatangan banyak wisatawan domestik dan mancanegara. Jawa Timur sedang merencanakan pengembangan pariwisata ramah Muslim
Kedatangan Turis	Baik	Terdapat wisatawan domestik dan mancanegara
Wisatawan Domestik	110,000	
Wisatawan Mancanegara	-	
Jangkauan Wifi	-	
Komitmen terhadap Pariwisata ramah Muslim	Cukup baik	Ada 75 rencana tapi tidak dijelaskan secara rinci
Jasa	Baik	Sebagian besar kebutuhan industri pariwisata ramah Muslim dan hal-hal yang fundamental seperti restoran halal, masjid, bandara, hotel, dan atraksi sudah dimiliki dengan kualitas yang baik. Selain itu, sudah ada rencana untuk mengembangkan pariwisata ramah Muslim
Restoran Halal	Baik	Banyak restoran bersertifikasi halal
Restoran bersertifikat halal	800	
Outlet bersertifikat halal	-	
Restoran/ Rumah makan halal (*Self-claimed*)	2	
Masjid	Baik	Terdapat banyak masjid yang layak
Masjid	40,205	
Mushala	-	
Bandara	Baik	Terdapat tempat shalat di bandara dan diselenggarakan shalat jumat
Mushala	2	1 di area transit, 1 di area umum
Tempat Wudhu	-	
Shalat Jumat	Ada	

Indikator	Skor/Nilai	Keterangan
Hotel	Baik	Terdapat hotel syariah, hotel dengan dapur bersertifikat halal, dan hotel yang tidak menyediakan menu babi dan alkohol
Hotel Syariah	2	
Hotel dengan dapur bersertifikat halal	3	
Hotel yang tidak menyediakan menu babi dan alkohol	10	
Atraksi	Baik	Belum ada info terkait wisata budaya islami, tetapi terdapat daya tarik wisata, daya tarik lokal, dan tempat ibadah di pusat perbelanjaan
Situs budaya Islami	-	
Daya tarik wisata budaya	65	
Daya tarik lokal	82	
Tempat ibadah di pusat perbelanjaan	12	

Sektor Keuangan Syariah

Indeks Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah

Indeks	Tahun 2016	Tahun 2019
Indeks literasi keuangan Syariah (OJK)	29.4%	28.2%
Indeks inklusi keuangan Syariah (OJK)	12.2%	23.6%
Indeks literasi ekonomi Syariah (BI)	-	24.2%

Profil Keuangan BPD Syariah – Bank Jatim Syariah (*dalam miliar Rupiah*)

	2015	2016	2017	2018	2019
Total aset gross	1,691	2,113	2,504	2,234	2,386
Total pembiayaan	720	829	919	1,120	1,402
Total DPK	1,339	1,494	1,896	1,651	1,646
Total FDR	53.76%	55.48%	48.49%	67.83%	85.19%
Total NPF	1.97%	2.77%	2.36%	2.18%	2.86%
Pangsa pasar (%)	-	-	-	3%	2.5%

Profil Industri Perbankan syariah (BUS) di Provinsi Jawa Timur (*dalam miliar Rupiah*)

	2018	2019
Pangsa pasar (%)	23.7%	22.7%
Pembiayaan berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	4,168	4,782
Modal kerja (bukan UMKM)	4,342	4,190
Investasi (UMKM)	1,651	1,897
Investasi (bukan UMKM)	1,323	859
Konsumsi	5,942	6,896
NPF berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	254	214
Modal kerja (bukan UMKM)	276	89
Investasi (UMKM)	76	59
Investasi (bukan UMKM)	213	3
Konsumsi	120	158
Total		
Total aset gross	23,828	27,036
Total pembiayaan	17,425	18,624
Total DPK	19,170	21,974
Total FDR	90.90%	84.75%
Total NPF	939	524
Total NPF (%)	5.4%	2.8%

Profil Industri perbankan syariah (UUS) di Jawa Timur (*dalam miliar Rupiah*)

	2018	2019
Pangsa pasar (%)	15.7%	15%
Pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan		
Modal kerja (UMKM)	1,445	1,222
Modal kerja (bukan UMKM)	166	258
Investasi (UMKM)	241	303
Investasi (bukan UMKM)	846	709
Konsumsi	2,708	2,984
NPF berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	160	274
Modal kerja (bukan UMKM)	-	-
Investasi (UMKM)	46	22
Investasi (bukan UMKM)	10	212
Konsumsi	84	110
Total		
Total aset gross	8,074	9,037
Total pembiayaan	5,404	5,475
Total DPK	6,412	7,298
Total FDR	84.29%	75.01%
Total NPF	300	618
Total NPF (%)	1.2%	4.3%

Sektor Keuangan Mikro Syariah

Jumlah LKMS dan BWM yang Mendapatkan Program Pendampingan dan Pengawasan dari OJK

LKMS	Tahun 2019
Jumlah yang mendapat pendampingan OJK	31

Profil Fundamental LKMS dan BWM di Bawah Pengawasan OJK

LKMS dan BWM	Tahun 2019
Jumlah LKMS yang berada di wilayah daerah	31
Jumlah anggota LKMS	353
Jumlah pegawai LKMS	88
Modal sendiri	2.924.337.935
Volume usaha	-
Sisa Hasil Usaha (SHU)	89.600.377
Total aset	67.612.304.568
Rata-rata pembiayaan LKMS	20.005.424

Jumlah IKMS yang Mendapatkan Program Pendampingan dan Pengawasan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur

IKMS	2017	2018	2019
Jumlah IKMS yang mendapatkan program pendampingan	2,000	1,700	1,200
Jumlah IKMS yang diawasi oleh Dinas (pengawasan yang dimaksud adalah pengecekan laporan RAT, kunjungan ke IKMS, dsb.)	15	22	8

Profil Fundamental IKMS di Bawah Pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Koperasi Pondok Pesantren di Provinsi Jawa Timur

IKMS (KSPPS/USPPS, BMT, Kopontren)	Tahun 2019
Jumlah IKMS yang berada di wilayah kerja	1,585
Jumlah anggota IKMS	36,170
Jumlah pegawai IKMS	2,169
Jumlah pegawai yang mempunyai serifikasi pengelola KSPPS (IKMS)	-
Jumlah modal sendiri (*dalam Rupiah*)	129.6 Miliar
Jumlah modal luar/pinjaman (*dalam Rupiah*)	263.1 Miliar
Jumlah cadangan koperasi/permodalan (*dalam Rupiah*)	-
Jumlah volume usaha (*dalam Rupiah*)	721.1 Miliar
Jumlah sisa hasil usaha (*dalam Rupiah*)	18.3 Miliar
Jumlah aset IKMS	-
Rata-rata pembiayaan IKMS di Wilayah kerja	0 < n <= 5 jt 100%

Koperasi Fungsional dengan Pola Syariah di Provinsi Jawa Timur

IKMS (KSPPS/USPPS,BMT, Kopontren, dll)	Tahun 2019
Jumlah IKMS yang berada di wilayah kerja	2,307
Jumlah anggota IKMS	62,544
Jumlah pegawai IKMS	4,614
Jumlah modal sendiri (*dalam Rupiah*)	63.3 Miliar
Jumlah modal luar/pinjaman (*dalam Rupiah*)	295.2 Juta
Jumlah cadangan koperasi/permodalan	Belum ada
Jumlah volume usaha (*dalam Rupiah*)	62.3 Miliar
Jumlah sisa hasil usaha (*dalam Rupiah*)	559.8 Juta
Jumlah aset IKMS (*dalam Rupiah*)	63.6 Miliar
Rata-rata pembiayaan IKMS di wilayah kerja	0 < n <= 5 jt 100%
Tingkat kesehatan IKMS	Sehat: 3 Cukup Sehat: 5

Sektor Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Daftar BAZNAS dan LAZ Aktif Rekomendasi BAZNAS

36 BAZNAS aktif & 16 LAZ aktif (Rekomendasi BAZNAS)	Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lumajang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Batu, Kota Malang Kota Probolinggo serta LAZ Nurul Hayat LAZ Yatim Mandiri Surabaya LAZ Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah Islamiyah LAZ Dana Sosial Al Falah Surabaya, LAZ Baitul Maal FKAM, LAZ Yayasan Nurul Falah Surabaya, LAZ Yayasan Persyada Al Haromain, LAZ Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera, LAZ Yayasan, LAZ Sidogiri, LAZ Ummul Quro' Jombang, LAZ Dompet Amanah Umat Sedati Sidoarjo, LAZ Yayasan Amal Sosial As-Shohwah Malang, LAZ Yayasan Lembaga Pengembangan Infaq Mojokerto, LAZ Yayasan Rumah Itqon Zakat dan Infak Yayasan Majlis Amal Sholeh dan Yayasan Rahmatul Anwar Surabaya

Alokasi APBD/Hibah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Kepada Institusi Pengelola Zakat yang Resmi

Daftar Alokasi APBD/Hibah	Nominal Alokasi (Rp)
HIbah	4,417,434,000

Jumlah Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah (dalam Rupiah)

Jenis Dana	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Penghimpunan Zakat			
▪ Zakat Fitrah	1,634,066,480	1,709,280,500	1,805,129,550
▪ Zakat Maal/Harta	26,047,912,737	39,661,938,020	49,126,700,094
Penghimpunan Infak			
▪ Infak Bebas	19,473,534,397	19,448,183,656	23,578,561,605
▪ Infak Terikat (termasuk CSR dan kurban)	469,127,555	1,280,800,518	1,276,556,444

Jumlah Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (dalam Rupiah)

Jenis Dana	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Penyaluran Zakat	24,409,813,166	35,984,970,309	43,555,458,393
Penyaluran Infak	15,527,894,593	16,924,336,712	20,767,592,200
Jumlah Penerima Manfaat Tercatat			
▪ Perorangan	121,049 Orang	159,719 Orang	208,135 Orang
▪ Yayasan/Komunitas	364 Orang	569 Orang	540 Orang

Program Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah di Provinsi Jawa Timur

Bidang Program	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Sosial Kemanusiaan	13,501,776,841	22,056,896,393	25,143,354,594
Pendidikan	4,823,470,064	6,492,178,976	7,182,484,885
Kesehatan	1,949,379,599	1,727,208,444	3,392,192,471
Pemberdayaan Ekonomi	3,169,230,042	3,524,191,632	4,105,888,739
Dakwah	4,098,990,679	5,382,589,997	8,019,578,342

Program Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kategori	Nama Program	Jumlah Penerima Manfaat (Jiwa)	Besar Alokasi Penyaluran (Rp)	Nama Lembaga
1	Sosial Kemanusiaan	Jawa Timur Peduli Bantuan Fakir Bantuan Yatim Bantuan Bencana dll	192,756	45,119,001,105	BAZNAS di Jawa Timur
2	Pendidikan	Beasiswa SMA/SMK, SI Alat Sekolah Biaya Sekolah Mustahik Lainnya	18,025	9,220,683,257	BAZNAS di Jawa Timur
3	Kesehatan	Biaya Pengobatan Fakir dan Miskin	16,498	4,105,039,017	BAZNAS di Jawa Timur
4	Pemberdayaan Ekonomi	Pemberian Modal Usaha, dan Alat Usaha, serta Pemberdayaan	8,334	8,930,922,020	BAZNAS di Jawa Timur
5	Dakwah	Bantuan Da'i Rawan Aqidah Bantuan Marbot Masjid Bantuan Guru Ngaji	27,015	7,801,866,959	BAZNAS di Jawa Timur

Indeks Zakat Nasional (IZN) Provinsi Jawa Timur

	2018	2019
Indeks Zakat Nasional/IZN (Dimensi Makro)	0.25	0.92
Regulasi	1	0.92
Dukungan Finansial dari Pemerintah (APBN/APBD) untuk BAZNAS	0.75	0.81
Jumlah Resmi Lembaga Zakat/OPZ, muzakki, and mustahik	0	0.31
Rasio, Jumlah muzakki individual/jumlah rumah tangga di level Provinsi	0.25	0.60
Rasio, Jumlah dari muzakki institusi/jumlah institusi di level Provinsi	0.33	0.57
Database dari institusi/lembaga zakat yang terdaftar	0.58	0.82
Total Indeks Makro	**0.25**	**0.92**

Indeks Zakat Nasional/IZN (Dimensi Mikro)		
Penghimpunan	1	0.25
Pengelolaan	0.75	0.69
Penyaluran	0.69	0.75
Pelaporan	0.75	0.67
Indeks Kesejahteraan CIBEST	0.75	0.81
Modifikasi Indeks Pengembangan Manusia (HDI)	0.75	0.48
Kemandirian	0.5	0.50
Institutional	0.81	0.57
Dampak Zakat	0.7	0.62
Total Indeks Mikro	**0.74**	**0.58**

Indeks Skor Literasi dan Pemahaman Zakat Provinsi Jawa Timur

	2020
Indeks Literasi Zakat	65.87
Indeks Pemahaman Dasar tentang Zakat	68.54
Indeks Pemahaman Lanjutan tentang Zakat	60.92

Indeks Skor Literasi dan Pemahaman Wakaf Provinsi Jawa Timur

	2020
Indeks Literasi Wakaf	52.81
Indeks Pemahaman Dasar tentang Wakaf	60.75
Indeks Pemahaman Lanjutan tentang Wakaf	38.07

Sektor UMKM dan Ekonomi Pesantren

Jumlah Pesantren dengan Usaha-Usaha Syariah

25 Pondok Pesantren	26 Usaha-usaha Syariah (*detil di Lampiran*)

Sektor Pendidikan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Perguruan Tinggi yang Menyediakan Program Studi Ekonomi & Keuangan Syariah Terkait

Jenjang	Jumlah Universitas tahun 2019	Program Studi tahun 2019		2018		2019	
		Nama Program studi	Jumlah Program Studi	Jml. Dosen	Jml. Mahasiswa	Jml. Dosen	Jml. Mahasiswa
Sarjana	97	Akuntansi Syariah	4	23	1,732	23	684
		Ekonomi Syariah	79	483	32,972	483	16,617
		Hukum Ekonomi Syariah	23	144	9,551	144	5,886
		Hukum Bisnis Syariah	2	13	884	13	390
		Manajemen Bisnis Syariah	4	19	2,151	19	1,482
		Manajemen Keuangan Syariah	2	7	671	7	580
		Manajemen Zakat dan Wakaf	5	30	1,092	30	565
		Perbankan Syariah	30	175	13,051	175	5,969
		Zakat dan Wakaf					
Magister	11	Ekonomi Syariah	7	34	1,070	34	671
		Hukum Ekonomi Syariah	4	25	454	25	296
		Sains Ekonomi Islam	1	4	224	4	129
Doktoral	2	Ilmu Ekonomi Islam	1	5	48	5	32
		Ekonomi Syariah	1	4	203	4	79

Akreditasi Perguruan Tinggi Dan Program Studi Ekonomi Syariah Terkait

Akreditasii	AkreditasiPerguruan Tinggi			AkreditasiProgram Studi		
	S1	S2	S3	S1	S2	S3
Akreditasi A	8	3	2	6	1	1
Akreditasi B	14	5	-	39	7	1
Akreditasi C	50	1	-	55	2	-
Belum TerAkreditasii	25	2	-	50	2	-

Peluang Investasi Daerah
untuk Industri Keuangan Syariah

No.	Nama Proyek Investasi	Stakeholders	Sektor	Tahapan Proyek Investasi	Nilai Perkiraan Investasi (dalam Rupiah)
1	Halal Port (Kabupaten Bangkalan)	DPM PTSP Kabupaten Bangkalan	Infrastruktur	Perencanaan	218.6 miliar
2	Ruas Tol Demak – Tuban – Manyar	Belum ada	Infrastruktur	Perencanaan	14.5 triliun
3	Toll Juanda – Tanjung Perak	Belum ada	Infrastruktur	Perencanaan	6.7 triliun
4	Toll Gempol – Mojosari - Mojokerto	Belum ada	Infrastruktur	Perencanaan	4.6 triliun
5	Toll Malang – Kepanjen	Belum ada	Infrastruktur	Perencanaan	3.8 triliun
6	Pembangunan LRT Terintegrasi Malang Raya	Belum ada	Infrastruktur	Perencanaan	2.4 triliun
7	Jalan Lintas Selatan Kepanjen	Belum ada	Infrastruktur	Perencanaan	5,9 triliun
8	*Fly Over* Singosari Malang	Bappeda Kabupaten Malang	Infrastruktur	Perencanaan	175.8 miliar
9	Industri Pakan Ternak	DPM PTSP Bojonegoro	Manufaktur	Perencanaan	16.1 miliar
10	Industri Cairan Infus	PT. Kasa Husada (BUMD Jatim)	Manufaktur	Perencanaan	195.5 miliar

Survei UMK (Usaha Mikro dan Kecil) Makanan Minuman Olahan[17]

Provinsi Jawa Timur

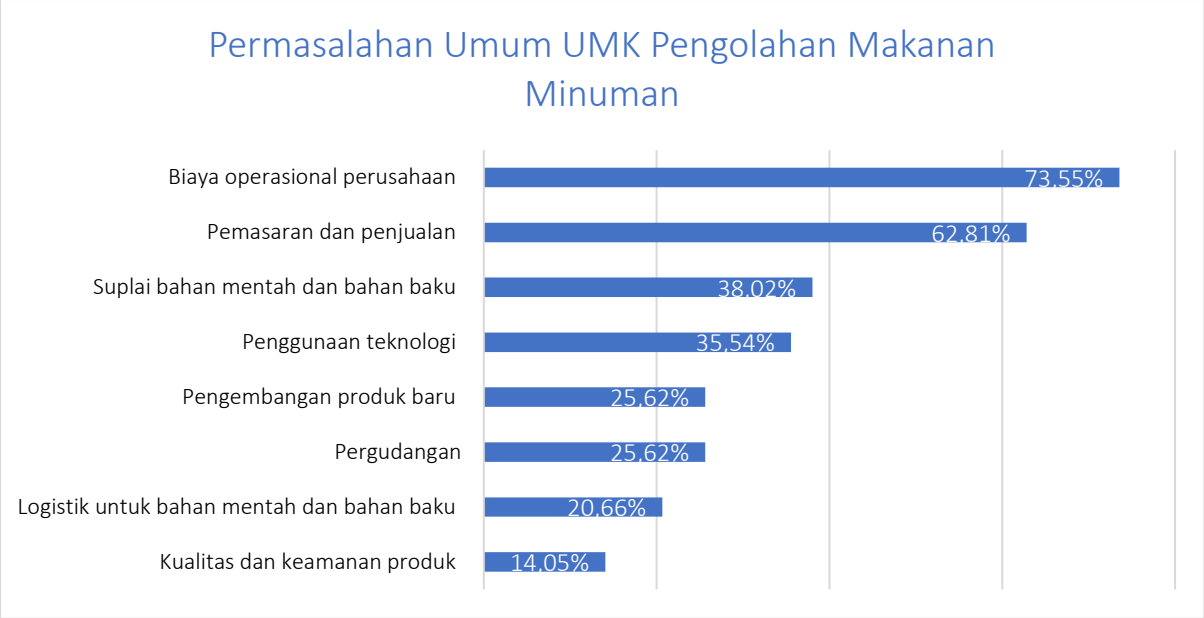

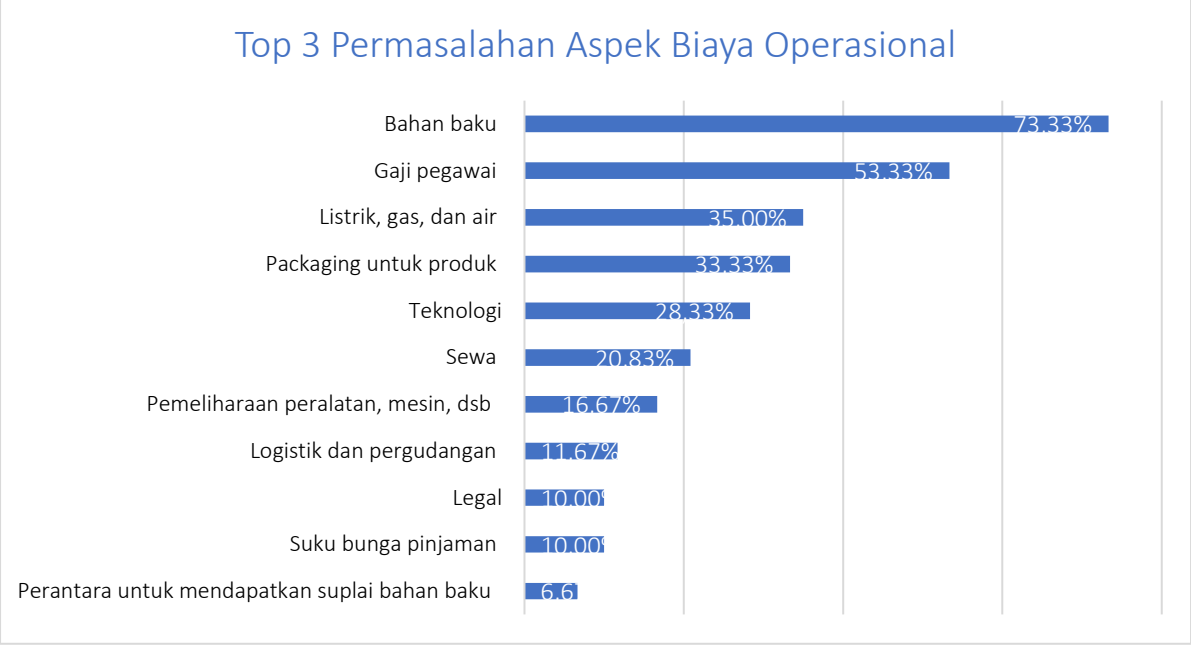

[17] Kegiatan survey dilakukan bersama IPB dan GAPPMI (bagian UMKM) dengan jumlah responden sebanyak 121 UMK Makanan Minuman Olahan di Provinsi Jawa Timur

Top 3 Permasalahan Aspek Pemasaran
Terlalu banyak kompetitor produk sejenis
51,24%
Harga produk kompetitif dengan kualitas terbaik
45,45%
Kurang dapat memenuhi permintaan konsumen dalam volume besar dan cepat
38,02%
Kesulitan dalam menjual produk kepada perusahaan besar
33,88%
Kesulitan dalam menentukan jalur penjualan yang paling efisien dan efektif
29,75%
Mahalnya biaya iklan
24,79%
Kesulitan dalam menjual produk ke pasar ekspor
22,31%
Design packaging produk
20,66%
Tidak/kurang memahami perubahan kebutuhan/keinginan konsumen serta perilakunya
16,53%
Program iklan dan pemasaran tidak sesuai dengan target konsumen
13,22%

Top 3 Permasalahan Aspek Bahan Baku
Fluktuasi harga bahan baku
66,12%
Mahalnya harga bahan baku
62,81%
Faktor musiman untuk bahan baku jenis tertentu
33,88%
Kurangnya akses kepada berbagai macam supplier
31,40%
Kesulitan dalam mendapatkan kualitas yang baik
23,97%
Cukupnya ketersediaan uang kas
23,14%
Kurangnya informasi yang benar terkait harga pasar
17,36%
Keterlambatan dalam menerima bahan baku
13,22%
Kurangnya variasi jenis bahan baku
10,74%
Kesalahan spesifikasi bahan baku pada saat barang diterima
7,44
Rendahnya kualitas jasa logistik dari supplier
7,44

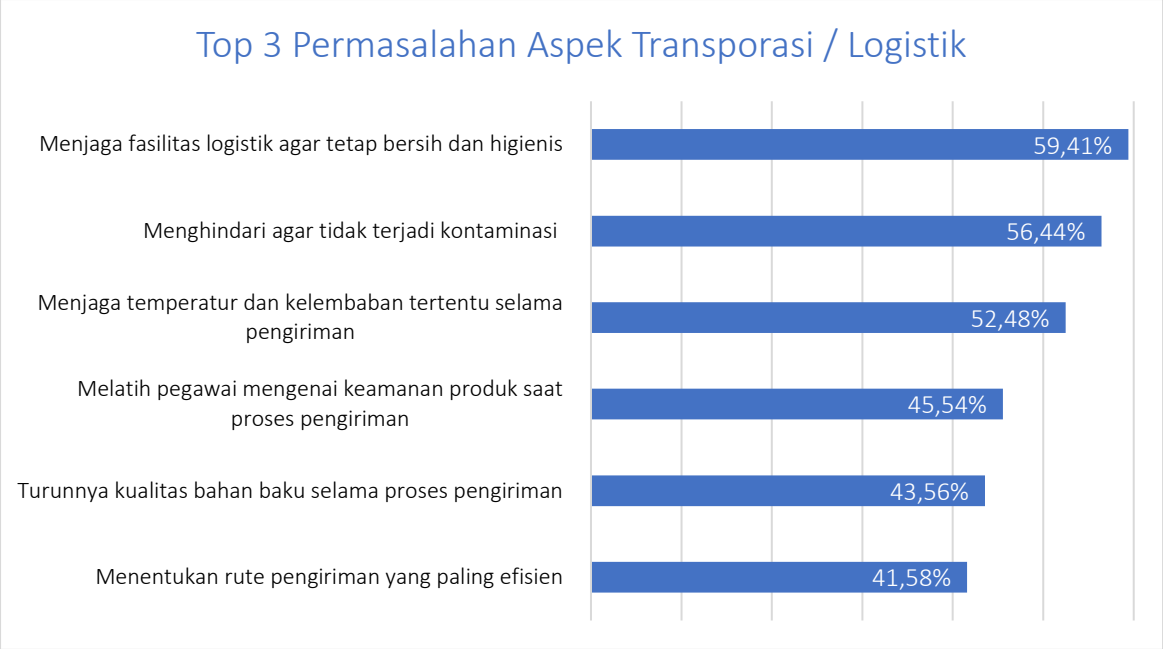
Top 3 Permasalahan Aspek Transporasi / Logistik
Menjaga fasilitas logistik agar tetap bersih dan higienis
59,41%
Menghindari agar tidak terjadi kontaminasi
56,44%
Menjaga temperatur dan kelembaban tertentu selama pengiriman
52,48%
Melatih pegawai mengenai keamanan produk saat proses pengiriman
45,54%
Turunnya kualitas bahan baku selama proses pengiriman
43,56%
Menentukan rute pengiriman yang paling efisien
41,58%

Top 3 Permasalahan Aspek Pergudangan
Menjaga temperatur dan kelembaban tertentu di tempat penyimpanan untuk bahan mentah/barang jadi
47,20%
Menghindari tidak terjadi kontaminasi di bahan mentah/barang jadi
44,00%
Menjaga tempat penyimpanan agar tetap bersih dan higienis
41,60%
Kurangnya/tidak adanya fasilitas untuk menyimpan barang jadi
39,20%
Kurangnya/tidak adanya fasilitas untuk menyimpan bahan mentah
38,40%
Mengatur perputaran produk secara optimal
30,40%
Turunnya kualitas bahan mentah di tempat penyimpanan
28,80%
Turunnya kualitas barang jadi di tempat penyimpanan
23,20%

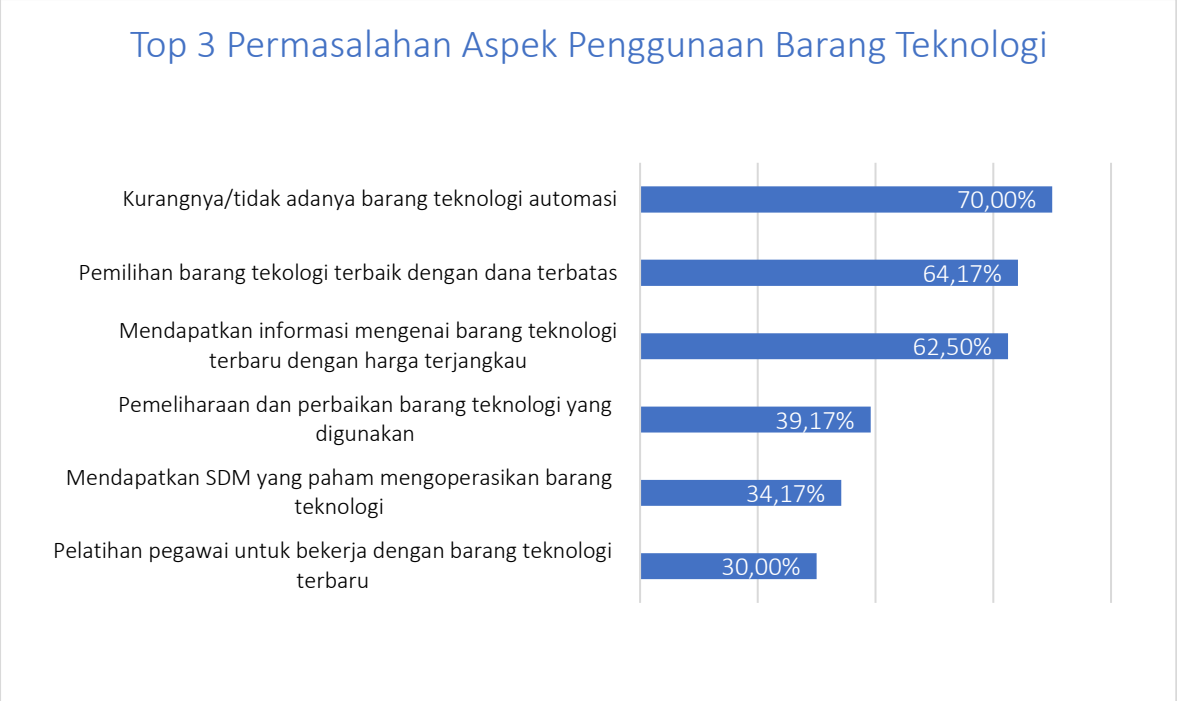
Top 3 Permasalahan Aspek Penggunaan Barang Teknologi
Kurangnya/tidak adanya barang teknologi automasi
70,00%
Pemilihan barang tekologi terbaik dengan dana terbatas
64,17%
Mendapatkan informasi mengenai barang teknologi terbaru dengan harga terjangkau
62,50%
Pemeliharaan dan perbaikan barang teknologi yang digunakan
39,17%
Mendapatkan SDM yang paham mengoperasikan barang teknologi
34,17%
Pelatihan pegawai untuk bekerja dengan barang teknologi terbaru
30,00%

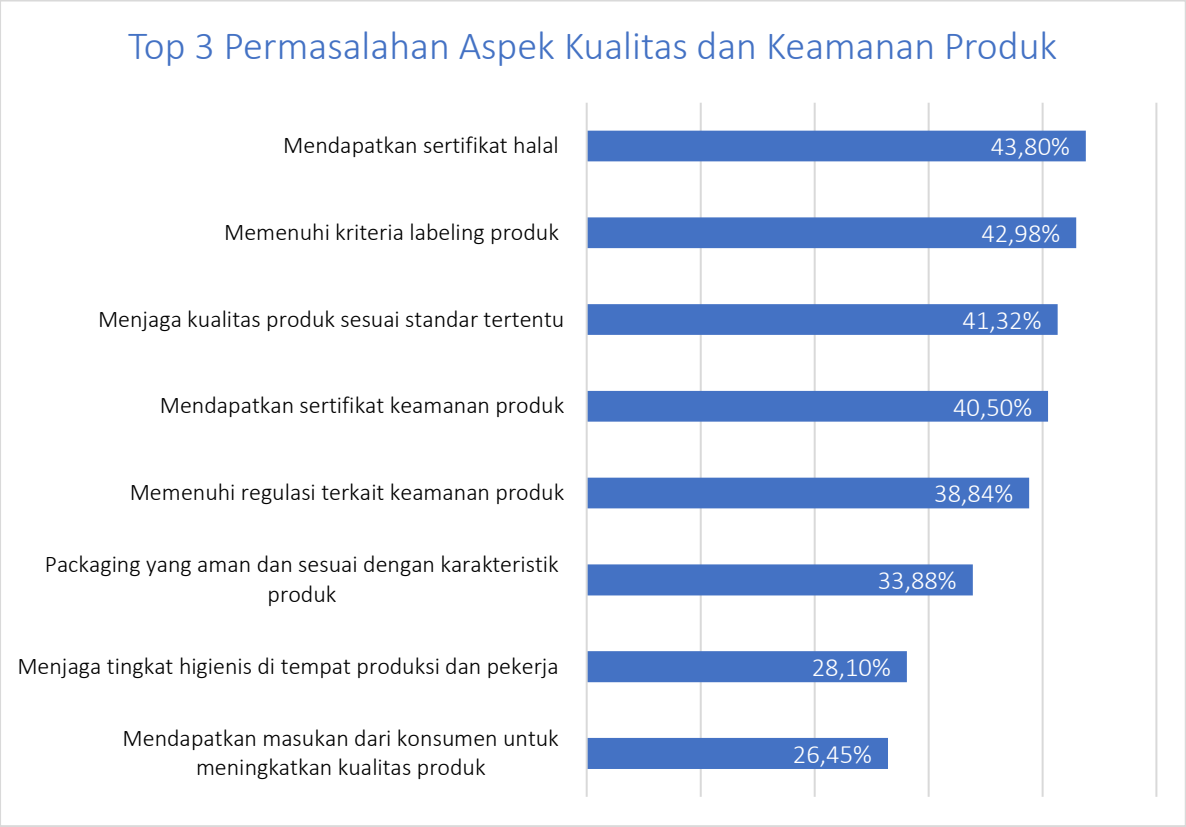
Top 3 Permasalahan Aspek Kualitas dan Keamanan Produk
Mendapatkan sertifikat halal
43,80%
Memenuhi kriteria labeling produk
42,98%
Menjaga kualitas produk sesuai standar tertentu
41,32%
Mendapatkan sertifikat keamanan produk
40,50%
Memenuhi regulasi terkait keamanan produk
38,84%
Packaging yang aman dan sesuai dengan karakteristik produk
33,88%
Menjaga tingkat higienis di tempat produksi dan pekerja
28,10%
Mendapatkan masukan dari konsumen untuk meningkatkan kualitas produk
26,45%

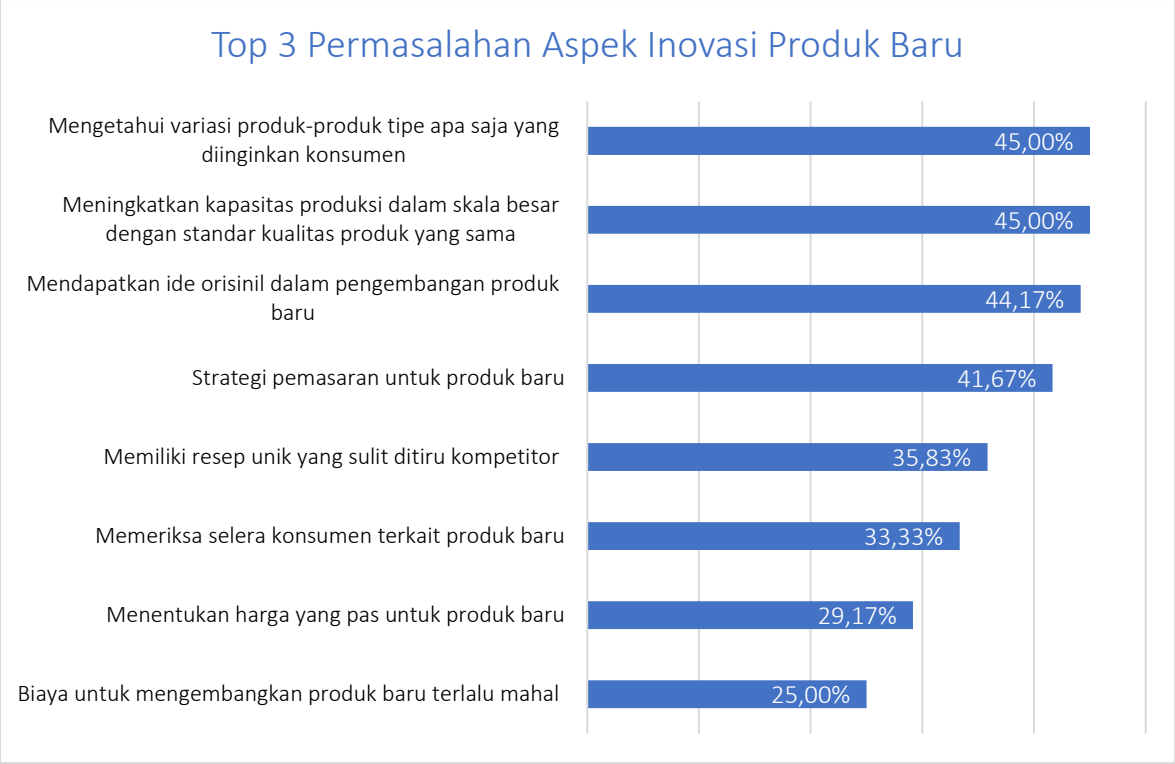
Top 3 Permasalahan Aspek Inovasi Produk Baru
Mengetahui variasi produk-produk tipe apa saja yang diinginkan konsumen
45,00%
Meningkatkan kapasitas produksi dalam skala besar dengan standar kualitas produk yang sama
45,00%
Mendapatkan ide orisinil dalam pengembangan produk baru
44,17%
Strategi pemasaran untuk produk baru
41,67%
Memiliki resep unik yang sulit ditiru kompetitor
35,83%
Memeriksa selera konsumen terkait produk baru
33,33%
Menentukan harga yang pas untuk produk baru
29,17%
Biaya untuk mengembangkan produk baru terlalu mahal
25,00%

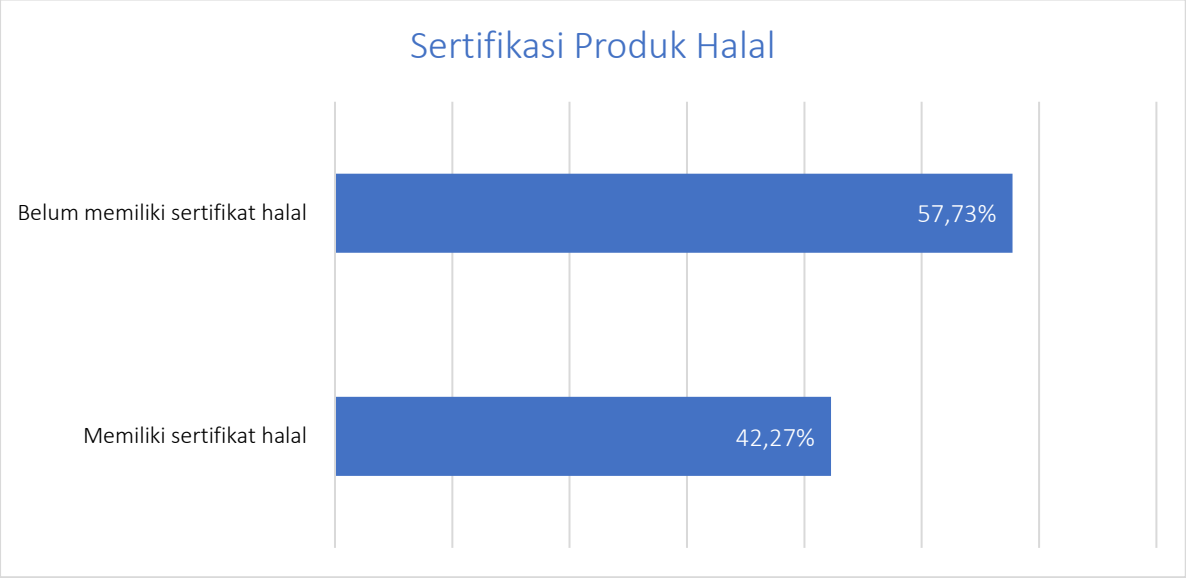
Sertifikasi Produk Halal
Belum memiliki sertifikat halal
57,73%
Memiliki sertifikat halal
42,27%

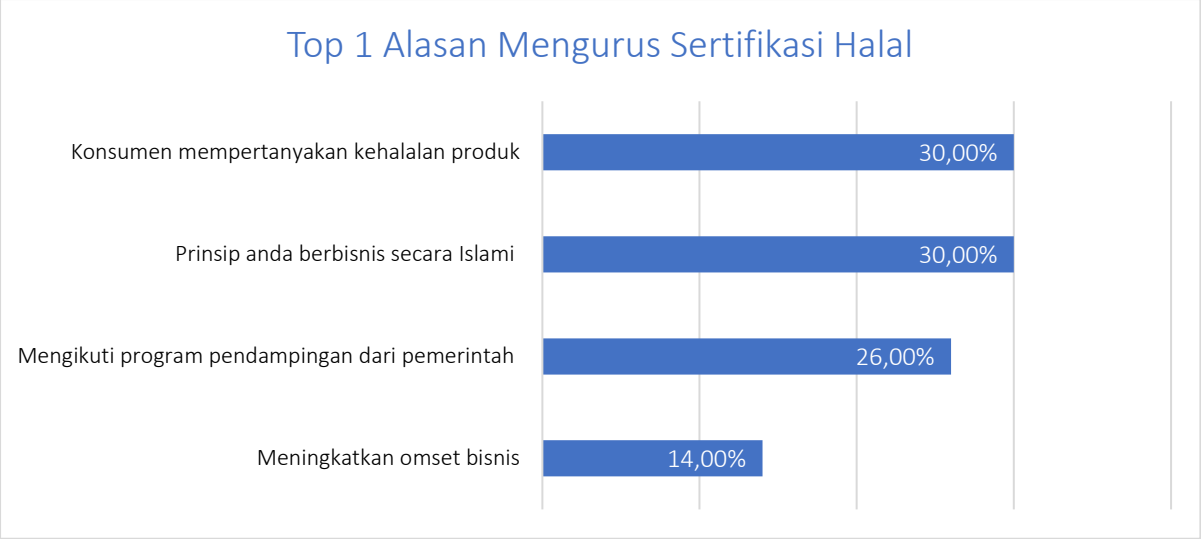
Top 1 Alasan Mengurus Sertifikasi Halal
Konsumen mempertanyakan kehalalan produk
30,00%
Prinsip anda berbisnis secara Islami
30,00%
Mengikuti program pendampingan dari pemerintah
26,00%
Meningkatkan omset bisnis
14,00%

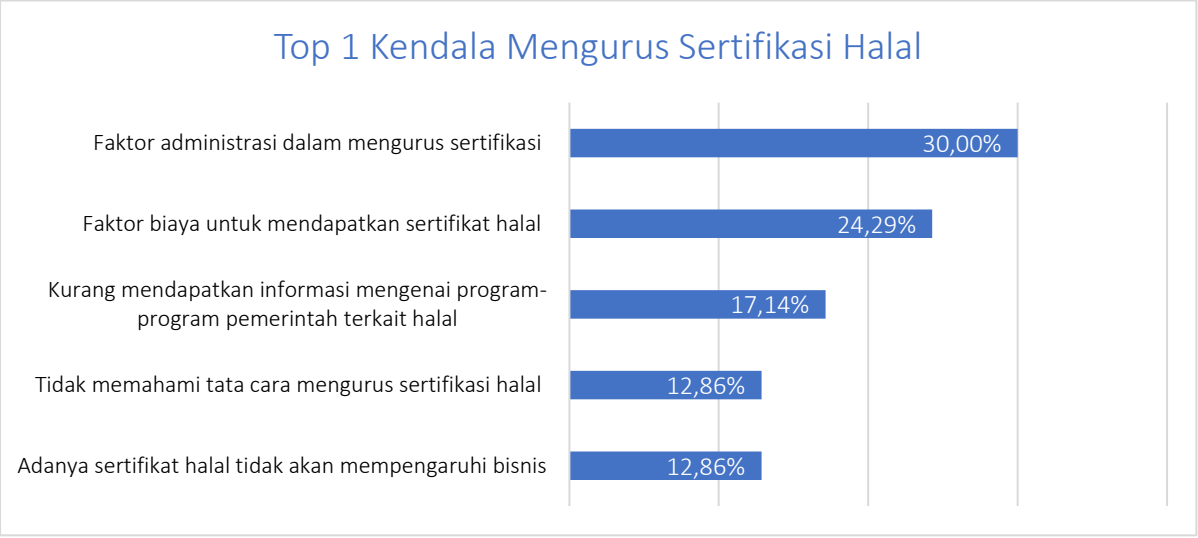
Top 1 Kendala Mengurus Sertifikasi Halal
Faktor administrasi dalam mengurus sertifikasi
30,00%
Faktor biaya untuk mendapatkan sertifikat halal
24,29%
Kurang mendapatkan informasi mengenai program-program pemerintah terkait halal
17,14%
Tidak memahami tata cara mengurus sertifikasi halal
12,86%
Adanya sertifikat halal tidak akan mempengaruhi bisnis
12,86%

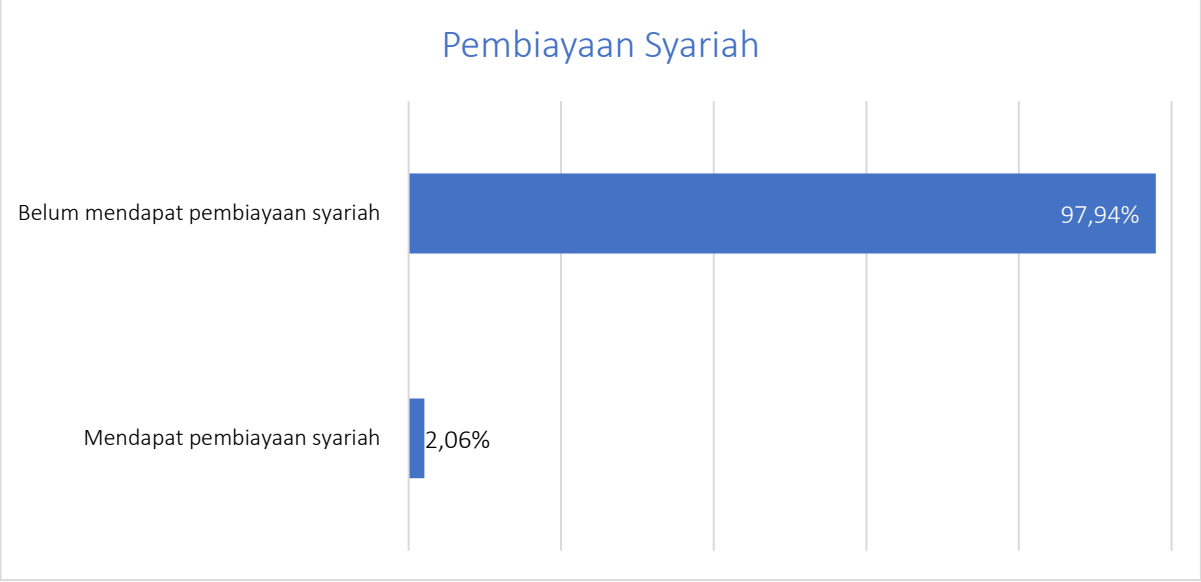
Pembiayaan Syariah
Belum mendapat pembiayaan syariah
97,94%
Mendapat pembiayaan syariah
2,06%

Survei UMK (Usaha Mikro dan Kecil) Makanan Minuman Kuliner[18]

Provinsi Jawa Timur

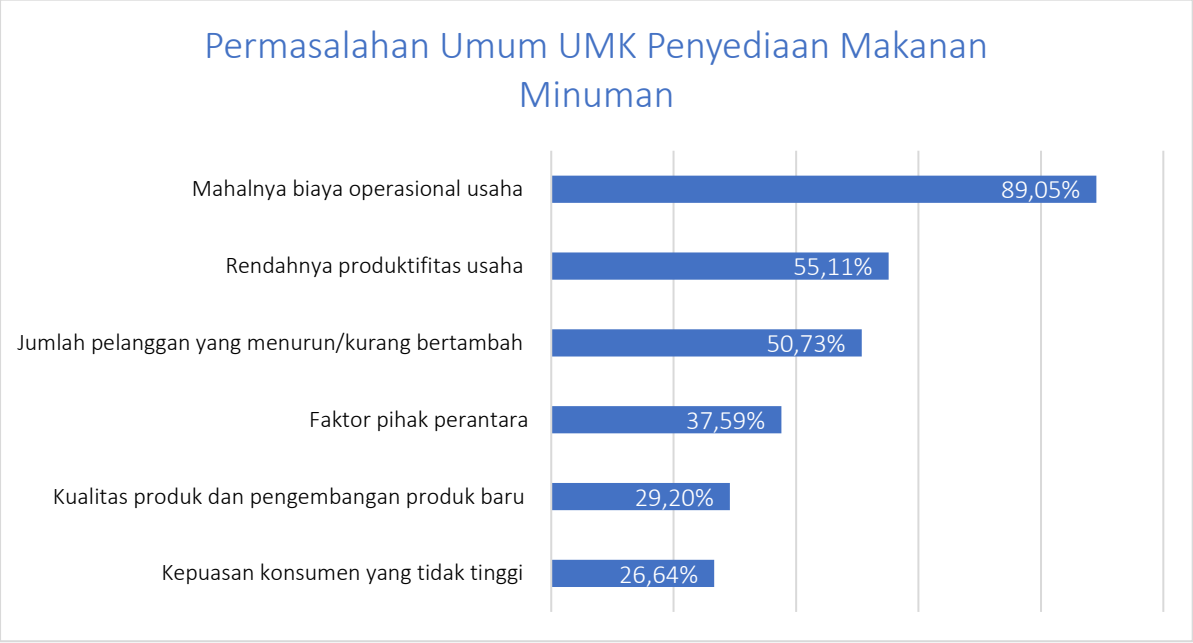

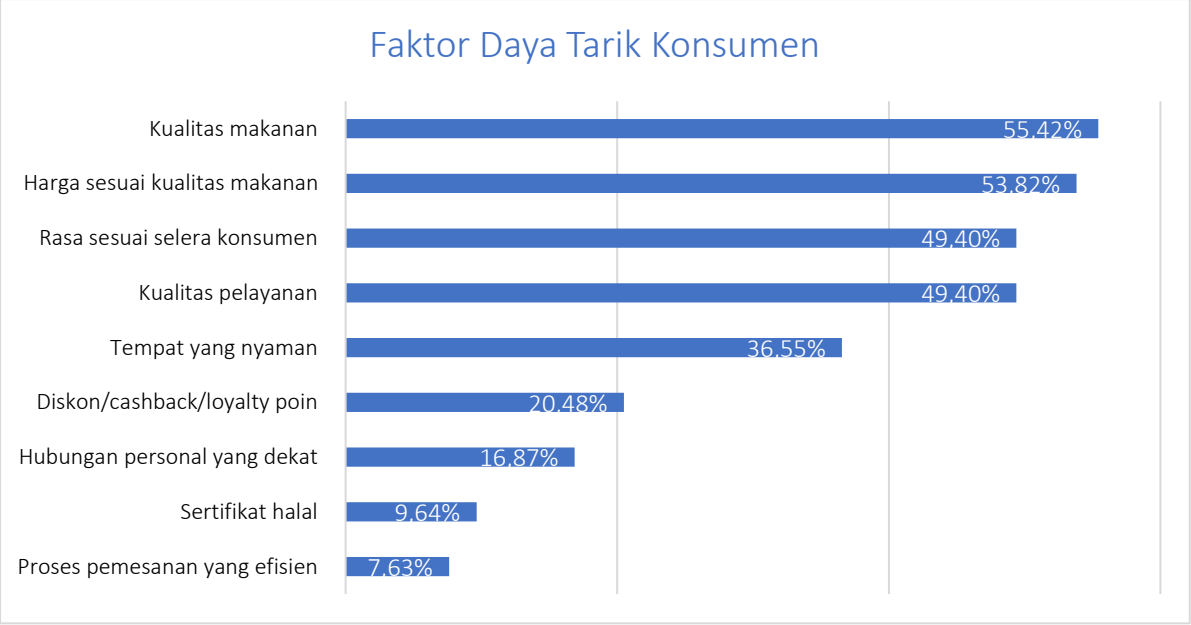

[18] kegiatan survey dilakukan bersama IPB dan GAPPMI (bagian UMKM) dengan jumlah responden sebanyak 311 UMK Makanan Minuman Kuliner di Provinsi Jawa Timur

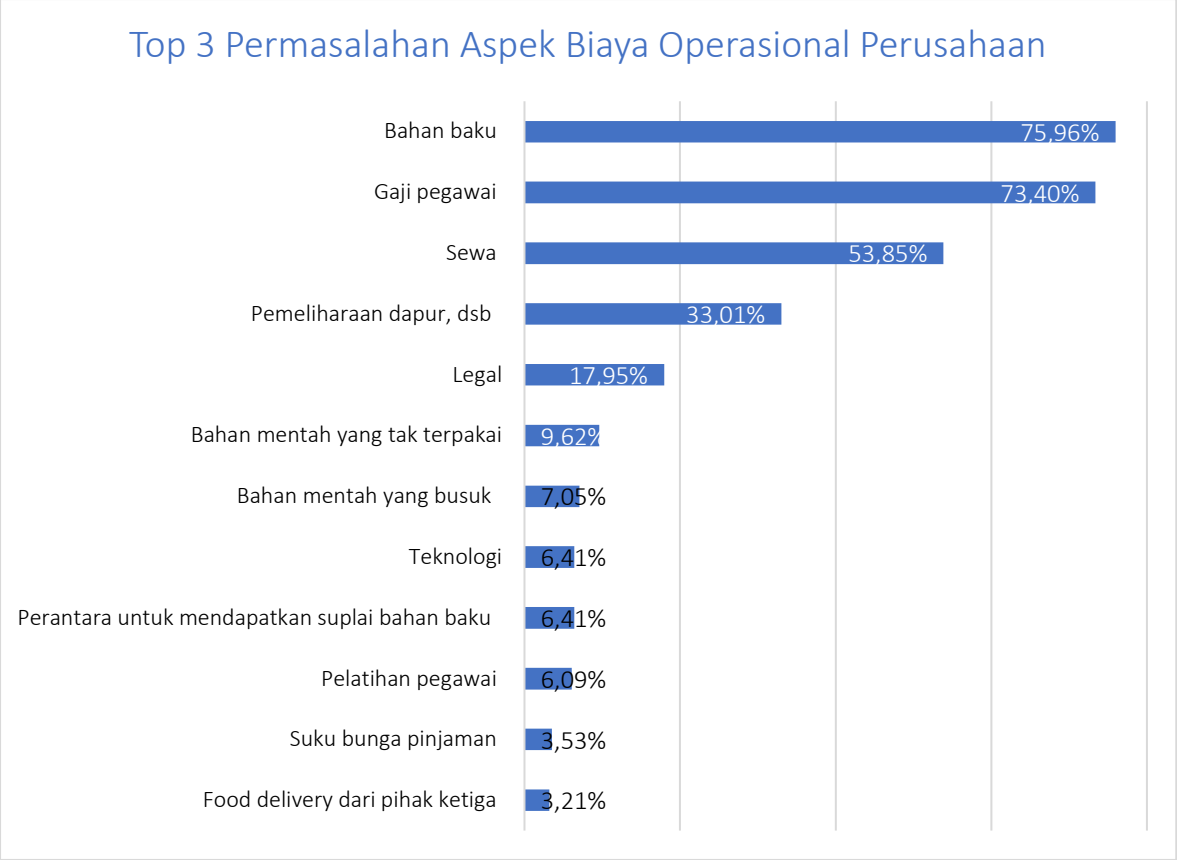
Top 3 Permasalahan Aspek Biaya Operasional Perusahaan
Bahan baku
75,96%
Gaji pegawai
73,40%
Sewa
53,85%
Pemeliharaan dapur, dsb
33,01%
Legal
17,95%
Bahan mentah yang tak terpakai
9,62%
Bahan mentah yang busuk
7,05%
Teknologi
6,41%
Perantara untuk mendapatkan suplai bahan baku
6,41%
Pelatihan pegawai
6,09%
Suku bunga pinjaman
3,53%
Food delivery dari pihak ketiga
3,21%

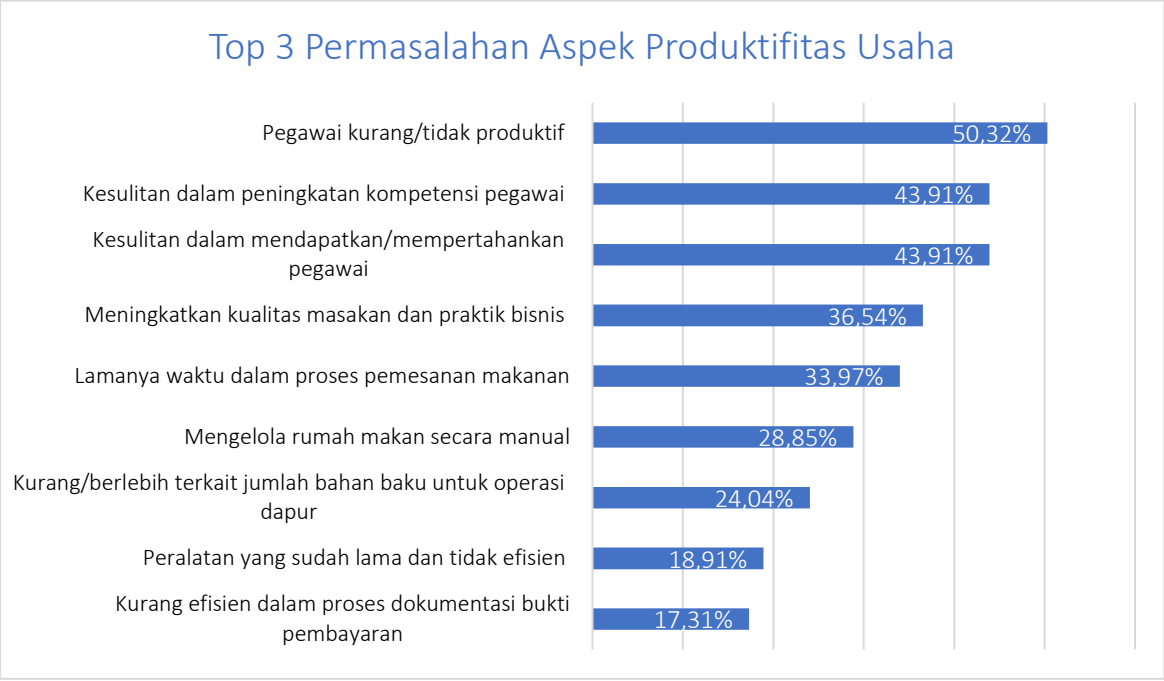
Top 3 Permasalahan Aspek Produktifitas Usaha
Pegawai kurang/tidak produktif
50,32%
Kesulitan dalam peningkatan kompetensi pegawai
43,91%
Kesulitan dalam mendapatkan/mempertahankan pegawai
43,91%
Meningkatkan kualitas masakan dan praktik bisnis
36,54%
Lamanya waktu dalam proses pemesanan makanan
33,97%
Mengelola rumah makan secara manual
28,85%
Kurang/berlebih terkait jumlah bahan baku untuk operasi dapur
24,04%
Peralatan yang sudah lama dan tidak efisien
18,91%
Kurang efisien dalam proses dokumentasi bukti pembayaran
17,31%

Top 3 Permasalahan Aspek Pemasaran
Terlalu banyak kompetitor di lokasi usaha
64,84%
Mahalnya biaya iklan
49,68%
Konsumen baru tidak mau mencoba
42,26%
Konsumen baru tidak menjadi konsumen setia
36,77%
Konsumen lebih banyak datang hanya jika ada diskon/cashback
28,39%
Program iklan dan pemasaran tidak sesuai dengan target konsumen
24,19%
Lokasi restoran tidak menarik
23,23%
Kurangnya/tidak ada jasa catering
11,61%
Konsumen memberi feedback yang buruk di social media
9,68%
Mahalnya biaya pengantaran makanan
7,74

Top 3 Permasalahan Aspek Suplai Bahan Baku
Mahalnya harga bahan baku
63,85%
Fluktuasi harga bahan baku
59,80%
Faktor musiman untuk bahan baku jenis tertentu
33,45%
Kesulitan dalam mendapatkan kualitas bahan baku yang baik
27,03%
Keterlambatan dalam menerima bahan baku
25,34%
Kurangnya akses kepada berbagai macam pensuplai
23,31%
Kurangnya informasi yang benar terkait harga pasar
19,59%
Cukupnya ketersediaan uang kas
16,22%
Kurangnya variasi terkait jenis bahan baku
10,81%
Kesalahan spesifikasi bahan baku pada saat barang diterima
10,47
Rendahnya kualitas jasa logistik dari pensuplai
9,12%

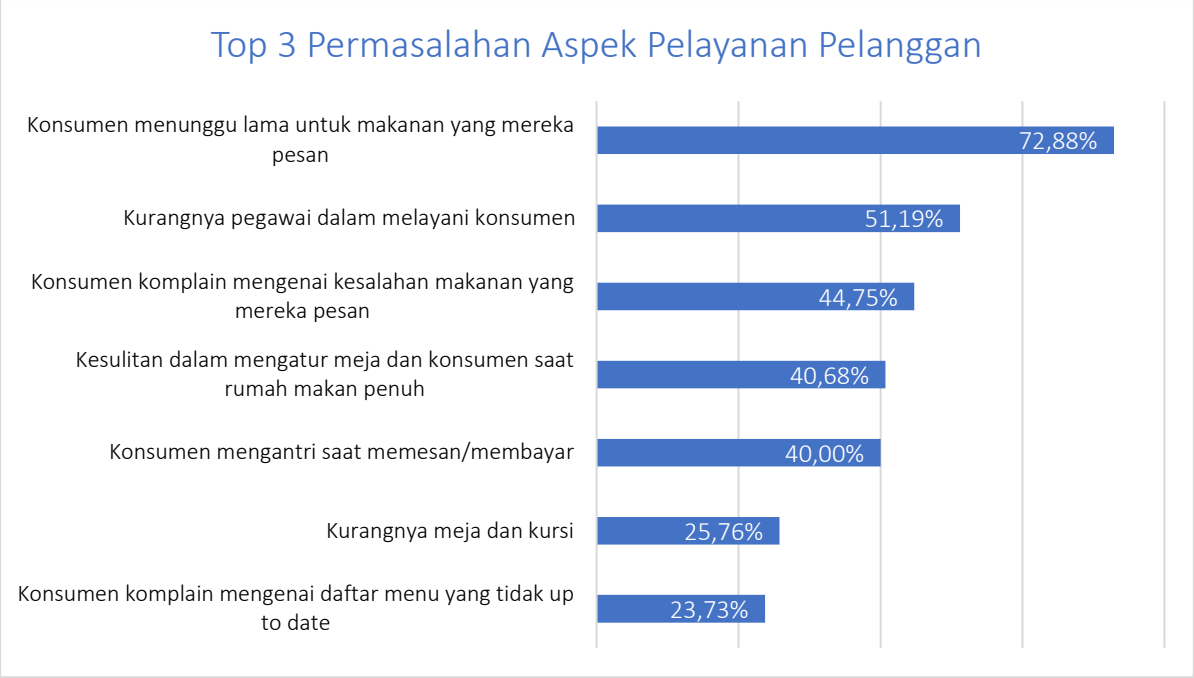
Top 3 Permasalahan Aspek Pelayanan Pelanggan
Konsumen menunggu lama untuk makanan yang mereka pesan
72,88%
Kurangnya pegawai dalam melayani konsumen
51,19%
Konsumen komplain mengenai kesalahan makanan yang mereka pesan
44,75%
Kesulitan dalam mengatur meja dan konsumen saat rumah makan penuh
40,68%
Konsumen mengantri saat memesan/membayar
40,00%
Kurangnya meja dan kursi
25,76%
Konsumen komplain mengenai daftar menu yang tidak up to date
23,73%

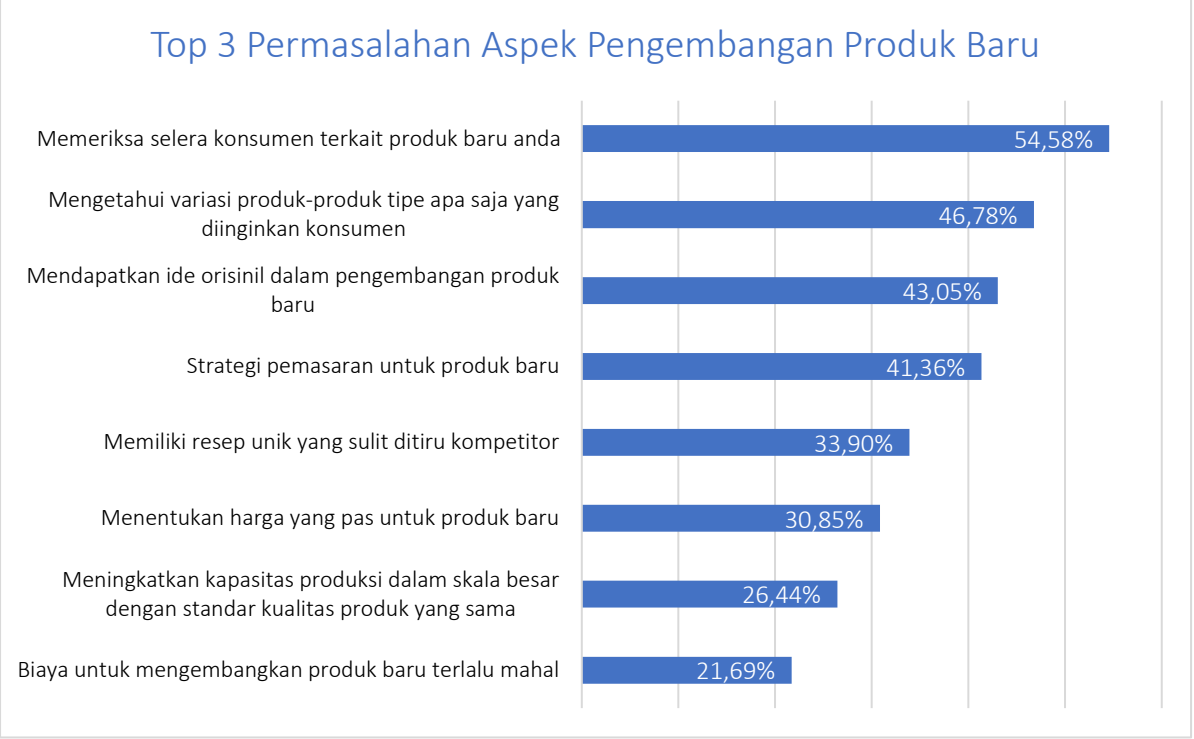
Top 3 Permasalahan Aspek Pengembangan Produk Baru
Memeriksa selera konsumen terkait produk baru anda
54,58%
Mengetahui variasi produk-produk tipe apa saja yang diinginkan konsumen
46,78%
Mendapatkan ide orisinil dalam pengembangan produk baru
43,05%
Strategi pemasaran untuk produk baru
41,36%
Memiliki resep unik yang sulit ditiru kompetitor
33,90%
Menentukan harga yang pas untuk produk baru
30,85%
Meningkatkan kapasitas produksi dalam skala besar dengan standar kualitas produk yang sama
26,44%
Biaya untuk mengembangkan produk baru terlalu mahal
21,69%

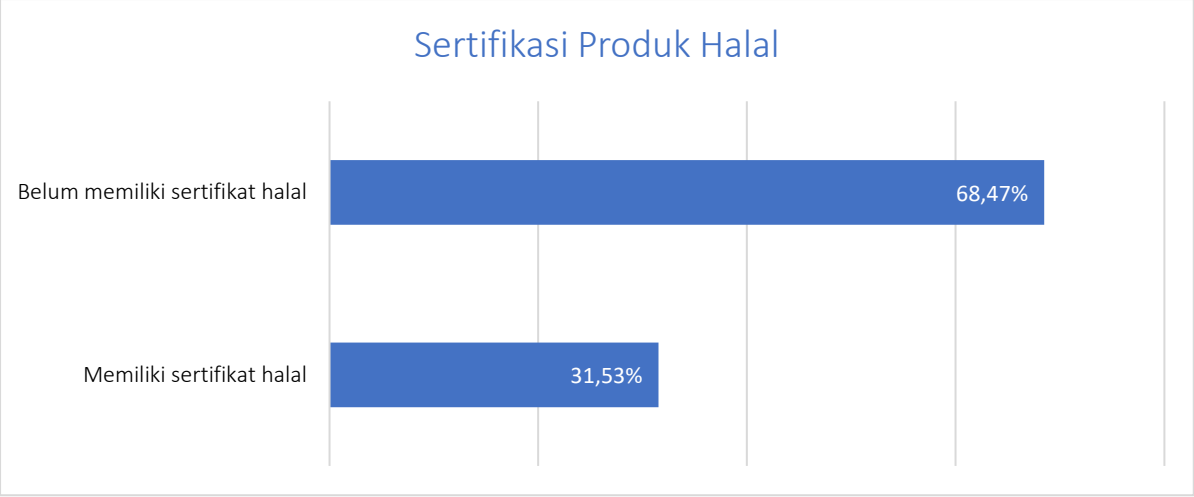
Sertifikasi Produk Halal
Belum memiliki sertifikat halal
68,47%
Memiliki sertifikat halal
31,53%

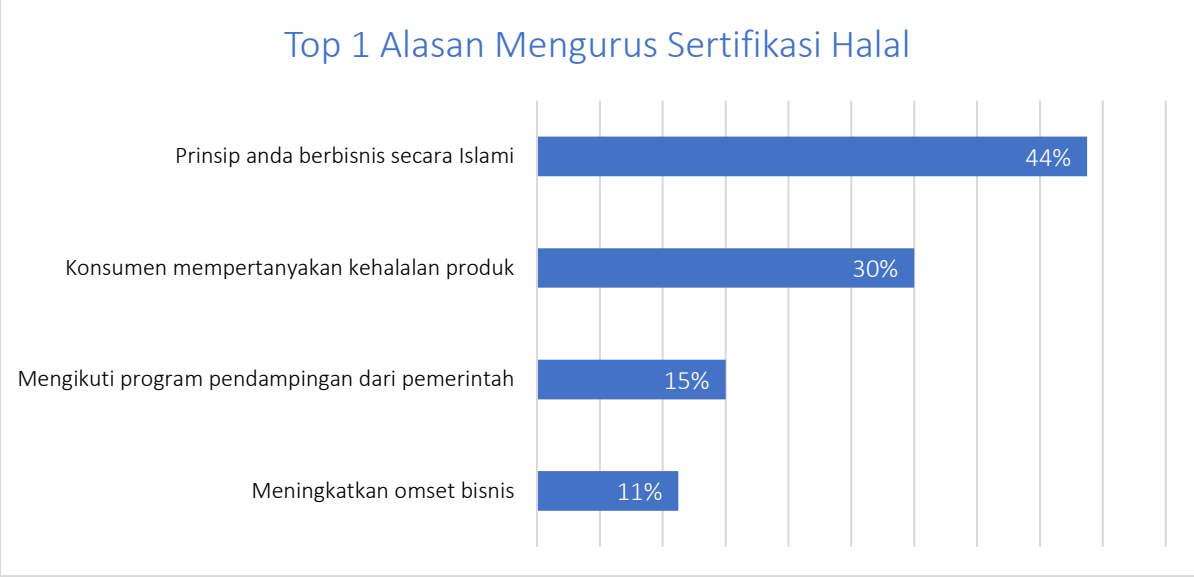
Top 1 Alasan Mengurus Sertifikasi Halal
Prinsip anda berbisnis secara Islami
44%
Konsumen mempertanyakan kehalalan produk
30%
Mengikuti program pendampingan dari pemerintah
15%
Meningkatkan omset bisnis
11%

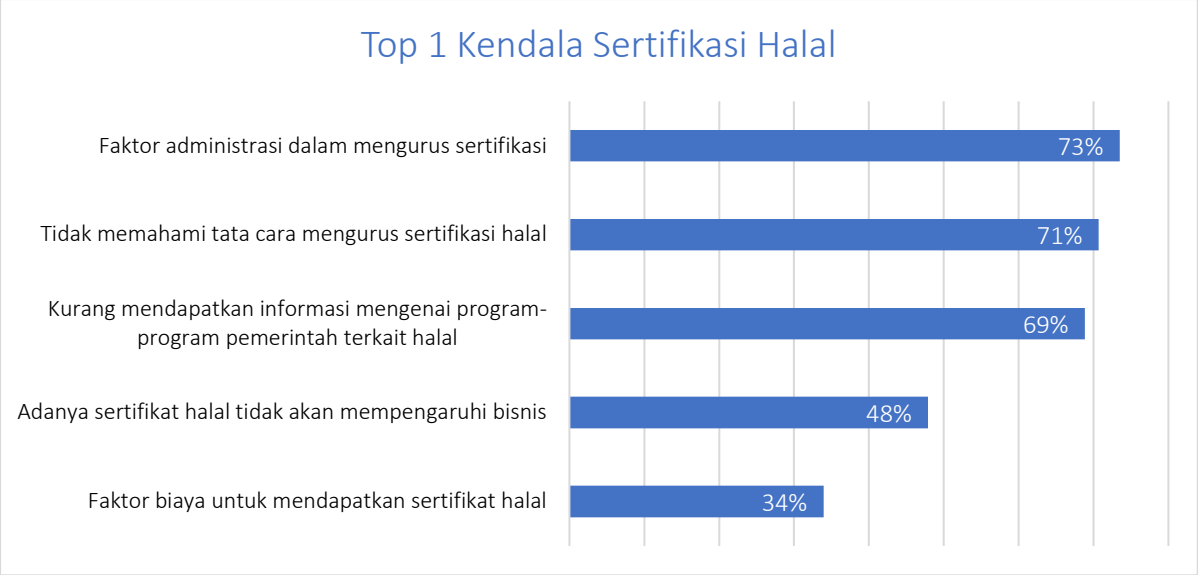
Top 1 Kendala Sertifikasi Halal
Faktor administrasi dalam mengurus sertifikasi
73%
Tidak memahami tata cara mengurus sertifikasi halal
71%
Kurang mendapatkan informasi mengenai program-program pemerintah terkait halal
69%
Adanya sertifikat halal tidak akan mempengaruhi bisnis
48%
Faktor biaya untuk mendapatkan sertifikat halal
34%

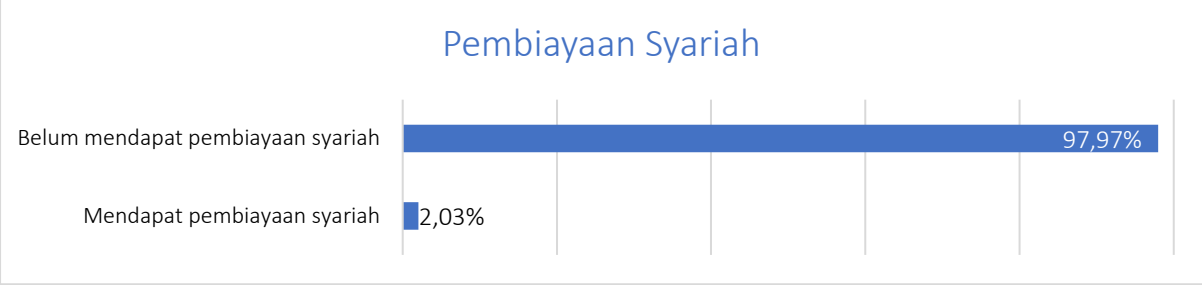
Pembiayaan Syariah
Belum mendapat pembiayaan syariah
97,97%
Mendapat pembiayaan syariah
2,03%

Sakinah Mart, Layanan Ritel Modern, Islami dan Berdampak Sosial dari Koperasi Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya

Eko Fajar Cahyono,SE,ME [19]

Pendahuluan/ Latar Belakang

Motivasi didirikannya Sakinah Mart adalah tidak lepas dari tujuan didirikan Koperasi Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya didirikan oleh jamaah pondok pesantren Hidayatullah Surabaya dengan tujuan mendapatkan sumber pendapatan lain. Tujuan utama tentu sebagai lembaga komersial adalah keuntungan namun apabila misal tidak menguntungkan, setidaknya santri tidak perlu mencari sumber lain untuk penghidupan. Bila sudah terwujud kemandirian ekonomi maka santri dapat berfokus pada pendidikan. Tetapi cita-cita besarnya tidak hanya sampai di situ saja, namun ada juga pandangan pragmatis dari para pendiri, yaitu:

- Untuk menjadi percontohan konsep dakwah pada sektor ekonomi yang dilandaskan pada ekonomi syariah
- Sebagai perwujudan visi dan misi koperasi yang berupa membangun jaringan muamalah syariah yang berbasis keumatan dan berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi nusantara di Indonesia

Profil Perusahaan

Sejarah minimarket Sakinah yaitu bermula dari kegiatan usaha Koperasi Pondek Pesantren Hidayatullah As Sakinah pad atahun 1991. Pembukaan minimarket pertama pada tahun 1993 dengan mendiami lahan seluas 200 m2 dan sejarah berlanjut pada tahun 2000 menempati lahan seluas 500 m2 dan merupakan cikal-bakal perkembangan minimarket As Sakinah. Lompatan perkembangan minimarket terjadi pada tahun 2004 dimana luas gerai telah mencapai 1100 m2. Pertumbuhan aset dari tahun ke tahun semakin menunjukan hasil yang menggembirakan. Hal ini adalah tidak terlepas dari adanya potensi pelanggan yang besar utamanya dari mahasiswa dan civitas akademika ITS (Insititut Teknologi Sepuluh Nopember) yang berada tidak jauh dari lokasi gerai dan potensi dari warga Keputih yang dikenal dengan perumahan yang populer di kota Surabaya.

Hingga saat ini minimarket Sakinah sudah memiliki beberapa cabang yang tersebar di Jawa Timur seperti Gresik, Lamongan, Sidorajo dan Malang. Minimarket Sakinah Keputih adalah minimarket pertama dan terbesar. Minimaket Sakinah Keputih dibagi menjadi beberapa bagian ruangan layanan seperti bagian penjualan kebutuhan pokok di lantai 1, bagian penjualan alat tulis dan alat perkantoran serta buku-buku berada di lantai 2 dan bagian penjualan busana Muslim dan perlengkapan ibadah disamping bagian juga berada di lantai 2. Selain itu minimarket juga membuka kerjasama bagi pemilik usaha dengan cara menyewa *stand* maupun tempat di lahan bagian depan minimarket Sakinah. Beberapa kerjasama yang terjalin seperti Sego Jamur, Buna Rendang, Pentol Gila dan usaha usaha kuliner lainya. Minimarket Sakinah Keputih telah dilengkapi dengan beberapa fasilitas seperti lahan parker, kamar mandi, tempat sholat, tempat wudhu serta tempat penitipan barang. Beberapa gerai cabang meskipun tidak sebesar dan semegah Sakinah Mart Keputih juga masih memberikan standar pelayanan minimal seperti lahan parker dan kamar mandi serta pendingin ruangan.

[19] Dosen Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga

Pandangan Industri Secara Makroekonomi dan Mikroekonomi

Industri minimarket adalah industri yang penting bagi rakyat Indonesia. Keberadaan minimarket adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari hari masyarakat. Banyak fasilitas dan kemudahan yang ditawarakan oleh minimarket seperti ketersediaan barang yang terjamin, keberagaman produk, lokasi yang strategis, harga yang jelas, penerangan yang baik dan penampilan toko yang menarik. Selain itu jangkauan pasar modern minimarket juga sangat luas mulai daerah perkotaan sampai dengan pedesaan. Dengan demikian ada banyak pemain besar dan pemain menengah yang turut serta berpartisipasi dalam industri ini. Gaya hidup masyarakat modern yang menuntut kepraktisan dan kebersihan juga menjadikan layanan minimarket diminati. Apalagi pada masa pandemi Covid 19 industri minimarket adalah layanan strategis yang masih diizinkan menjaalankan kegiatan operasional.

Tak bisa dipungkiri bahwa Alfamart dan Indomaret merupakan dua merek minimarket paling popular di Indonesia. Keduanya telah berhasil menguasai pangsa pasar minimarket sebanyak 87 %. Pada 2017, jumlah toko Indomaret tercatat 15,335 gerai atau tumbuh 74 persen dari 2013. Pada saat bersamaan, jumlah toko Alfamart mencapai 13,400 gerai, naik 44 persen pada periode yang sama. Dalam rentang periode tersebut, gerai Indomaret lebih ekspansif ketimbang Alfamart. Akibat dari jumlah toko yang lebih banyak, Indomaret juga lebih unggul dalam urusan penjualan. Minimarket milik Salim Grup itu meraup penjualan Rp 73.37 triliun sepanjang 2018 atau naik 16 persen dari 2017. Pada saat bersamaan, Alfamart meraup penjualan Rp 66.81 triliun. Penjualannya hanya tumbuh 9 persen dari realisasi 2017 sebesar Rp 61.46 triliun. (Gumiwang, 2019). Data data laba juga menunjukan angka yang menggiurkan Alfamart telah mencatatkan sisi pertumbuhan laba bersih, perusahaan ini meraup laba sebesar Rp 668 miliar, naik 159 persen. Sementara itu laba pesaing utamanya Indomaret tumbuh lebih lambat, hanya tumbuh 75 persen atau meraup Rp 766 miliar, tapi Indomaret tetap unggul dari sisi jumlah laba. Selain kedua pemain besar yang tersebut, terdapat juga beberapa pemain minimarket seperti Podjok Halal milik PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, Coco Mart milik Coco Grup, 212, Ok Oce Mart dan lain sebagainya (Gumiwang, 2019)

Dengan data data aset dan laba pada paragraph sebelumnya maka dapat digambarkan bahwa industri minimarket adalah industri strategis di Indonesia. Umat Islam sebagai penduduk mayoritas negara ini pastinya menjadi konsumen terbesar mereka. Bagaimanapun, umat Islam memiliki potensi besar dalam melakukan bisnis dan kewirausahaan. Dengan melihat sejarah Indonesia, maka umat Islamlah yang termasuk pertama tama dalam mendirikan perkumpulan usaha dagang yang dinamakan dengan Sarikat Dagang Islam yang berisi pedagang kain batik Muslim di Jawa.

Isu tentang kemandirian umat Islam Indonesia telah bergulir sejak lama. Fakta bahwa umat Islam Indonesia hanya menjadi penonton daripada pemain di negerinya sendiri mungkin ada benarnya. Konsumsi barang barang kebutuhan pokok, sekunder dan tersier kebanyakan disediakan oleh umat lain. Dalam prespektif ekonomi mikro, telah jamak bahwa ada perubahan perilaku konsumen dari waktu ke waktu. Dalam kondisi saat ini, minimarket menjadi pilihan utama konsumen karena konsumen lebih sering berbelanja dalam jumlah kecil namun sering daripada belanja banyak dan jarang. Perilaku seperti ini dapat dilayani oleh minimarket. Konsumen Indonesia juga sering membayar berbagai kewajiban seperti listrik, air minum, iuran jaminan sosial dan pembayaran belanja daring di jaringan minimarket. Tidak heran jika industi ini berkembang pesat di Indonesia.

Potensi industri halal Indonesia juga sangat besar. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia maka permintaan terhadap produk produk halal juga akan selalu tinggi. Halal sudah menjadi gaya hidup Muslim dimanapun termasuk di Indonesia. Beberapa industri yang diproyeksikan tumbuh seperti industri makanan halal, industri obat-obatan dan farmasi halal, industri kosmetik halal, industri modest fashion atau busana Muslim, industri keuangan syariah serta industri halal lain. Semakin meningkatnya permintaan terhadap produk halal akan mendorong gerai atau toko khusus yang menyediakan kebutuhan halal bagi konsumen Muslim. Maka dengan demikian perlu adanya minimarket atau supermarket yang mampu menjawab tantangan ini.

Latar Belakang Peraturan

Jenis Koperasi dari Koperasi Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya berbentuk koperasi jenis konsumen. Jenis koperasi ini dipilih karena adanya sifat flesksibiltas dan dapat merambah pada jenis usaha yang lain dengan beragam jenis. Sakinah mart sebagai minimarket sebagai inti bisnisnya dan ada usaha pendukung dan pembantu berupa Baitul Mall Wattamwil. Koperasi Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya dalam pendirian dan kegiatan operasioanal tunduk pada Undang Undang Yang Berlaku Yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Institusi

Dalam struktur organisasi dalam Koperasi Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya ada 4 bagian penting yang terdiri dari Bagian Tertinggi adalah rapat anggota koperasi Lewat rapat anggota, jumlah anggota pengawas,

masa jabatan, dan persyaratan untuk dipilih serta diangkat sebagai anggota. Kemudian bagian kedua adalah pengawas yang terdiri dari Badan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah. Badan Pengawas sebagaimana dalam koperasi lain memiliki tugas anatara lain:

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus,
- Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya, kemudian menyampaikan kepada rapat anggota.

Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan pengawasan pada bidang implementasi dan penegakan hukum Islam dalam seluruh kegiatan koperasi pondok pesantren Hidayatullah Surabaya. Anggota Dewan Pengawas Syariah diambil dari tenaga internal pesantren yang memenuhi syarat dan dari pihak luar yang tidak berafiliasi langsung namun bisa sejalan dalam visi. Bagian penting Koperasi Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya adalah Pengurus. Tugas pengurus adalah:

- Menyelenggarakan rapat anggota Menyelenggarakan pembinaan organisasi
- Mewakili koperasi di dalam dan di luar forum,
- Mengelola koperasi dan usahanya mengajukan rancangan kerja dan rencana anggaran pednapatan dan belanja (RAPB) koperasi
- Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Menyelenggarakan pembukuan koperasi secara tertib Memelihara daftar buku anggota, daftar buku pengurus, dan daftar buku pengawas
- Kedudukan antara Pengurus, Badan pengawas dan Dewan pengawas syariah adalah setara. Sakinah Mart adalah bagian dari bisnis yang dijalankan oleh Koperasi Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya.

Produk Kunci dan Inovasi

Beberapa karateristik pembeda Sakinah Mart dengan minimarket lain:

- Perusahaan menjual produk-produk yang tidak melanggar syariat, misalkan produk makanan dan minuman harus berlabel halal. Untuk produk yang belum berlabel halal seperti produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tetap bisa dijual di Sakinah setelah dipastikan halal, ditinjau dari proses produksi yang diawasi langsung oleh pihak Sakinah dan produsen membuat surat pernyataan halal. Sakinah juga menghindari menjual produk yang bersifat syubhat atau masih diragukan kehalalannya seperti rokok dan alat kontrasepsi.
- Perusahaan menjual produk ekonomi mikro yang biasanya sulit memasuki pasar. Sakinah menyediakan pasar untuk sektor ini, tapi juga memiliki standar sendiri dalam memasarkan produk tersebut, seperti masa trial pengenalan produk selama tiga bulan dan target kapasitas produksi tertentu yang harus dipenuhi.
- Perusahaan mengaplikasikan konsep perdagangan sesuai syariah
- Perusahaan mengambil margin keuntungan yang lebih rendah dari usaha lain yang sejenis, dan menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok yang lebih lengkap. Hal ini dilakukan agar harga jual menjadi lebih punya daya saing dan masyarakat terlayani dengan baik.
- Perusahaan memperkerjakan tenaga berjenis kelamin laki laki untuk menjaga pergaulan dengan konsumen dan sesama karyawan dan menghindari fitnah.
- Perusahaan berkomitmen dengan perjuangan umat Islam meskipun hal itu memiliki konsekwensi kepada bisnis. Sakinah Mart berkomitmen tidak menjual produk produk yang disinyalir atau dicurigai mendukung kampanye anti Umat Islam seperti pada merk roti tertentu dan minuman ringan tertentu.
- Perusahaan mengusahakan pertambahan modal dengan mekanisme yang sesuai dengan hukum Islam.
- h. Pada setiap toko, perusahaan juga menggandeng badan amil zakat untuk melayani donasi dari para konsumen.
- Pada kebanyakan toko, perusahaan menggandeng bank-bank syariah untuk meletakan mesin anjungan tunai mandiri dari bank bank tersebut untuk melayani konsumen.
- Suasana toko yang Islami, yaitu para pegawai yang sopan dan berpakaian menutup aurat, mengucap salam serta diperdengarkan lagu lagu Islami, murrotal Alquran atau kajian dari Ustadz.

Inovasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia pada Perusahaan

Pada bidang pengembangan sumber daya manusia Sakinah Mart menekankan ketaatan beragama seperti shalat berjamaah dan membaca Alquran dengan benar. Bila tiba waktu shalat, seluruh karyawan wajib

meninggalkan aktivitas dan mengikuti shalat berjamaah. Juga selalu diadakan halaqah dan kajian rutin. Mayoritas karyawan adalah laki-laki agar dapat mengurangi fitnah. Sebanyak 90% karyawan diambil dari luar pesantren (masyarakat umum) dan sisanya adalah santri sendiri. Hal ini dilakukan agar segala aktivitas yang dilakukan senantiasa mendapat keberkahan dan juga sebagai upaya pelaksanaan visi dan misi pesantren. Penegakan kedisiplinan dilakukan dengan pemberian peringatan lisan, teguran dan penerbitan surat peringatan. Pelanggaran yang bersifat syariah atau pelanggaran hukum agama (termasuk diantaranya adalah penegakan tidak diizinkannya pacaran bagi karyawan) diberikan pembinaan, bila tidak dihiraukan maka akan dilakukan pemberhentian.

Inovasi dalam Permodalan

Dalam rangka mengembangkan usaha, koperasi pondek pesantren Hidayatullah Surabaya menawarkan konsep investasi yang sesuai dengan syariah Islam. Secara umum ada dua akad yang digunakan dalam pengembangan usaha yaitu akad Mudhrabah dan Akad Musyarakah. Sistem Mudharobah dikenal dengan sistem Kerjasama. Mitra atau Investor menyediakan bangunan siap pakai (renovasi) dan investasi pengeadaan peralatan, sistem dan modal kerja. Dengan nisbah bagi hasil 25 % pengelola dan 75 % mitra setelah dikurangi biaya operasional. Pola kerjasama yang ditawarkan ke mitra adalah tempat, bukan nilai uang modal. Mitra menyediakan tempat dan Sakinah Mart menyediakan isi (barang daganganya). Pola ini dianggap lebih adil karena bila mengalami kerugian dan harus ditutup, pembagian asetnya jelas. Aset tempat kembali ke mitra, aset peralatan kembali ke Sakinah. Laba bersih dibagi antara Sakinah dan mitra pemilik modal dengan pembagian 25:75.

Jenis akad kedua yang dipakai dalam kerjasama dengan investor adalah dengan akad musyarakah. Kerjasama ini disebut juga dengan kerjasama pola kerjasama operasional dan permodalan. Mitra/Investor menyediakan bangunan gerai siap pakai (renovasi). Manajemen Sakinah Mart menyediakan peralatan, sistem, modal kerja (stok barang). Dengan modal nisbah bagi hasil 50 % pengelola dan 50 % mitra setelah dikurangi biaya operasional. Kemudian masih dalam rangka memperoleh modal yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi masyarakat, pihak koperasi pondok pesantren Hidayatullah Surabaya menerbitkan saham atau surat kepemilikan Sakinah Mart dengan dengan harga satu juta rupiah per lembar. Untuk permulaan saham ini diperjualkanbelikan di kalangan internal.

Analisa Pesaing

Bahwa pesaing pada industri sejenis memiliki kekuatan kekuatan antara lain jaringan yang tersebar dari seluruh pelosok Indonesia mulai dari kota besar sampai ke kota kecil. Pesaing juga memiliki persediaan barang kontinyu sehingga mampu menggaet kesetiaan pelanggan. Pesaing telah memiliki kerjasama dengan para pemasok besar. Pemasok besar ini memiliki keunggulan dalam bidang penyediaan barang yang stabil dan berkelanjutan. Pesaing memiliki infrastruktur lunak yang baik sehingga mereka mampu melayani permintaan pembayaran pembayaran fasilitas publik seperti pembayaran listrik dan pembayaran langganan air.

Strategi Bisnis dan Strategi Ekspansi

- Perusahaan mengikuti pola bisnis sesuai dengan perkembangan zaman. Adanya pergeseran pola belanja masyarakat dari konvensional menjadi online direspon Sakinah dengan merambah ke internet marketplace seperti Lazada, Tokopedia, Shopee dan Blibli.
- Perusahan telah menyesuakan dengan kebutuhan masyarakat. Pada saat pandemi Covid 19 seperti sekarang, strategi yang dilakukan adalah mengembangkan bisnis di sektor kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok.
- Perusahaan menjual saham dengan harga 1 juta per lembar sejak Januari 2020. Sistem ini masih diujicobakan pada kalangan internal dulu meski tidak menutup bagi kalangan luar untuk bergabung.

Dampak sosial Perusahaan Untuk Masyarakat

- Menyerap tenaga kerja (300 orang) dengan persyaratan yang mudah (pendidikan dan pengalaman kerja tidak dipersyaratkan). Kualitas tenaga kerja juga ditingkatkan dengan memberikan biaya untuk kejar paket dan kuliah ekonomi syariah di Sekolah Tingi Ilmu Agama Islam Luqmanul Hakim
- Anggota koperasi (600 orang) menerima keuntungan dari Sakinah melalui Sisa Hasil Usaha dan diskon yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan.
- Dana sosial untuk internal kelembagaan seperti lembaga tahfizh yang berada dalam naungan yayasan Hidayatullah berupa beasiswa dan tunjangan untuk guru-guru.
- Perusahaan telah membagikan paket sembako, uang tunai dan bakti sosial setiap membuka toko baru, peringatan ulang tahun dan kondisi khusus seperti pandemi. Selama pandemi covid-19 Sakinah telah membagikan 500 paket ke masyarakat yang terdampak.

Analisa Keuangan Perusahaan

Rata-rata hasil indikator tahun 2020 menunjukkan hal yang cukup bagus. ROI atau Return on Investment rata-rata 20% dan selalu di atas 10% setiap bulan. Bagi hasil penyertaan modal di bulan Maret 2%. Pada masa yang akan datang Sakinah Mart harus mengatur strategi keuangan karena sudah ada investasi yang akan mengganggu cash flow. Manajemen cash flow sedang dilakukan juga. Di bulan April omzet menurun 1.6%.

Rekomendasi

Bahwa sakinah Mart telah memiliki modal sosial yang besar yaitu jamaah organisasi Hidayatullah di seluruh Indonesia. Sakinah Mart bisa memanfaatkan modal sosial tersebut dengan baik dengan cara membuka cabang cabang baru di seluruh Indonesia. Kemudian Sakinah Mart telah berupaya secara konsisten dalam memasarkan produk halal baik dari industri besar maupun produk dari usaha mikro. Komitmen ini perlu disosialisasikan kepada konsumen dengan menempel poster, gambar dan foto foto terkait pada gerai. Dengan adanya pemberitahuan seperti itu akan menambah yakin konsumen untuk berbelanja di Sakinah Mart.

Melalui hasil wawancara penulis dengan pengelola koperasi diketahui bahwa pengelola Sakinah Mart kesulitan dalam mencari pemasok dengan tingkat produksi yang stabil dan berkelanjutan karena sebagian dari pemasok tidak ajeg dalam berproduksi. Beberapa faktor yang menyebabkan itu adalah sistem produksi yang tradisional, jumlah tenaga kerja yang sedikit, pengusaha yang tidak tekun atau beralih alih profesi dan kurangnya modal. Sehingga Sakinah Mart memerlukan kolaborasi dengan industriawan Muslim terkemuka dan pengusaha Muslim yang telah memiliki kapasitas produksi tinggi sehingga mampu melayani konsumen dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara juga ditemukan bahwa kekuatan pesaing berada pada infrastruktur lunak yang memungkinkan mereka melayani pembayaran tagihan publik seperti pembayaran listrik dan lain lain. Maka dengan demikian Sakinah Mart memerlukan sinergi yang baik dengan lembaga keuangan syariah atau sistem pembayaran syariah seperti Link Aja Syariah dalam memenuhi aspirasi konsumen perusahaan.

Wawancara
Kepala Instansi Daerah

Bagaimana visi, rencana, dan program-program terkait ekonomi syariah?

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur

Ada beberapa program terkait ekonomi syariah yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur yaitu:

1. Sektor Peternakan

Menguatkan industri halal Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan Pusat Penyembelihan Halal, untuk mendukung penyembelihan halal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan pelatihan yang diberi nama Juleha (Juru Penyembelihan Halal), pelatihan ini dilakukan di rumah pemotongan hewan (RPH) melalui Program/kegiatan yang ada di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

2. Untuk mendukung pengembangan Sektor Ekonomi Syariah, Industri Halal dan Sektor keuangan syariah Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan UKM melaksanakan program Penguatan Permodalan Bagi KUKM, Penguatan Kualitas Produksi Koperasi dan UKM dan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah mengganggarkan untuk kegiatan OPOP yang dialokasikan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Biro Perekonomian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, ada 30 pesantren yang produknya siap diberi pendampingan untuk menjadi *pilot project* pelaksanaan program OPOP, mereka adalah pesantren yang para santrinya sudah memiliki embrio produk. Mulai produk bidang fashion, makanan, bahan olahan, serta perangkat lunak dan *start up*. Ada tiga pilar OPOP yang digagas Pemprov Jatim.
   - Menyasar *santripreneur* untuk menciptakan wirausaha baru di kalangan siswa Aliyah, SMA, SMK, mahasiswa dan santri lainnya yang ada di lingkungan pesantren.
   - *Pesantrenpreneur* yang merupakan peningkatan kualitas dan pemasaran produk melalui penguatan koperasi pesantren.
   - *Sociopreneur* yang tak lain upaya menumbuhkan wirausaha baru dari kalangan alumni pesantren yang melibatkan masyarakat sekitar pesantren.
3. Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur untuk mendukung halal tourism melaksanakan program/kegiatan Promosi dan Kerjasama Pariwisata, Penguatan Sarana Promosi dan Informasi Pariwisata, Pendataan dan Pemetaan Pasar, Penguatan Usaha Sarana Pariwisata dengan bentuk kegiatan (Pengawasan dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata, Bimtek Peningkatan Kapasitas Usaha Jasa transportasi Wisata, Bimtek Penyusunan Paket Wisata bagi BPW PPIU & PIHK, Pemberdayaan Pelaku Usaha Pariwisata Jawa Timur), Penguatan Usaha Jasa Pariwisata dan Penguatan Sumber Daya Manusia Profesionalisme Bidang Pariwisata yaitu dengan peningkatan sumber daya manusia di bidang pariwisata.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur untuk memfasilitasi sertifikasi halal bagi IKM Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Disperindag Provinsi Jawa Timur melaksanakan Program Peningkatan Standarisasi Industri dengan kegiatan-kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Mutu Produk Industri & Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual pada UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif.
5. Bekerjasama dengan perguruan tinggi (Universitas Brawijaya dan Universitas Airlangga) untuk menciptakan produk kesehatan dari rumput halal dengan tujuan untuk mendorong produk halal ke ranah medis.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Timur

Visi yang ingin dicapai berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 adalah terwujudnya 'Kerja Bersama untuk Jawa Timur Sejahtera dan Bermartabat dengan Semangat Gotong Royong, Religius, dan Berkeadilan Sosial dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris dan Inklusif'.

Program yang terkait dalam hal ini yaitu yang tertuang dalam program Nawa Bakti Satya yang terdiri dari :

1. Jatim Berkah: Membangun karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas.

Bhakti ini bertujuan untuk memberi tunjangan kehormatan bagi penjaga situs budaya dan tempat peribadatan di kampung, pesisir, dan pulau terluar.

2. Jatim Agro: Memajukan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan berbasis kerakyatan.
   Bhakti ini merupakan sebuah komitmen pembangunan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian sebagai pilar kedaulatan pangan.
3. Jatim Berdaya: Ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, koperasi, MUM Desa dan mendorong pemberdayaan Pemerintahan Desa.
   Bhakti ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa.

Strategi yang digunakan untuk mencapai visi misi terkait pengembangan sektor ekonomi syariah, industri halal, dan sektor keuangan syariah di Jawa Timur, di antaranya melalui:

- Penguatan daya saing dan peningkatan produktivitas industri agro, khususnya dalam pemberian fasilitas sertifikasi halal bagi IKM (Industri Kecil Menengah)
- Pengembangan wisata ramah Muslim (*halal tourism*) melalui ziarah wali-wali (9 wali)
- Pengembangan koperasi/jasa keuangan syariah, khususnya pada pengembangan BUMD (Bank Jatim Syariah)

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur

1. Program utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dalam mendorong industri pariwisata daerah secara umum meliputi:
   - Program Pengembangan Pemasaran pariwisata
   - Program Pengembangan Industri pariwisata
   - Program Pengembangan Destinasi pariwisata
2. Program utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur maupun pendampingan / pemberdayaan / bantuan, belum secara khusus ditujukan pada pariwisata ramah Muslim, hal ini karena belum ada peraturan perundangan di tingkat pusat yang mengatur tentang pariwisata ramah Muslim. Namun pada tahun 2019 telah dilaksanakan inisiasi promosi pariwisata ramah Muslim melalui kegiatan pameran pariwisata ramah Muslim pada Jatim Fair 2019.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur

1. Visi yang ingin dicapai berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 adalah Terwujudnya Kerja Bersama Untuk Jawa Timur Sejahtera dan Bermartabat dengan Semangat Gotong Royong, Religius, dan Berkeadilan Sosial dengan tata kelola pemerintahan yang Partisipatoris dan Inklusif.
2. Program yang terkait dalam hal ini yaitu yang tertuang dalam program Nawa Bakti Satya yang terdiri dari:
   a. Jatim Berkah: Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas. Bhakti ini bertujuan untuk memberi tunjangan kehormatan bagi penjaga situs budaya dan tempat peribadatan di kampung, pesisir, dan pulau terluar.
   b. Jatim Agro: Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan. Bhakti ini merupakan sebuah komitmen pembangunan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian sebagai pilar kedaulatan pangan.
   c. Jatim Berdaya: Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa. Bhakti ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa.
3. Strategi yang digunakan untuk mencapai visi misi terkait pengembangan sektor Ekonomi Syariah, Industri Halal, dan sektor Keuangan Syariah di Jawa Timur, diantaranya melalui:

   a. Penguatan Daya Saing dan Peningkatan produktivitas industri agro, khususnya dalam Pemberian Fasilitas Sertifikasi Halal bagi IKM Industri Kecil Menengah)
   b. Pengembangan Wisata ramah Muslim (Halal Tourism) melalui Ziarah Wali-wali (9 Wali)
   c. Pengembangan Koperasi/Jasa Keuangan Syariah, khususnya pada pengembangan BUMD (Bank Jatim Syariah)

Ketua Baznas Provinsi Jawa Timur

- Visi: Menguatkan BAZNAS sebagai bagian yang berarti dalam ikhtiar penguatan ekonomi syariah Indonesia, khususnya di sektorsosial.
- Rencana dan program: 1) Pendistribusian ZIS untukpeningkatandayabelikaumduafa; 2) Pendistribusian ZIS untukpeningkatanmodal, alat, dan tempatkerjapelakuusahamikro/kecil Syariah di sektormakanan halal, busanamuslim, dan jasa halal; 3) Program kerjasamadenganlembagakeuangan Syariah dalampenghimpunan ZIS dan penyalurannya.

Bagaimana peluang pengembangan sektor ekonomi syariah, industri halal, dan sektor keuangan syariah?

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur

- Mayoritas penduduk Jatim sebesar 96 persen beragama Islam. Memiliki Pondok Pesantren (Ponpes) lebih dari 6,000 Ponpes. Semuanya berdiri secara mandiri dan sebagian besar telah mempunyai usaha, maka dari sisi permodalan perlu perbankan syariah untuk mendukung usaha di lingkungan pesantren dengan agunan yang tidak memberatkan.
- Diperlukan fasilitasi dari pemerintah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan sertifikasi halal agar produk yang dihasilkan mereka benar-benar bisa mendapatkan sertifikasi yang dapat memenuhi standar.
- Besarnya potensi di Jawa Timur sebagai basis pengembangan ekonomi Syariah dan keuangan syariah, maka untuk mendorong perkembangan ekonomi Syariah dan keuangan syariah di Jawa Timur perlunya wadah organisasi khusus menanganinya.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Timur

Peluang pengembangan sektor ekonomi syariah, industri halal, dan sektor keuangan di Provinsi Jawa Timur:

- Pemerintah Jawa Timur, mendukung pengembangan ekonomi syariah mengingat peluang investasi di industri halal Indonesia terbuka luas. Jumlah penduduk Jawa Timur sebanyak 40 juta jiwa, yang beragama Muslim sebanyak 94.35%,
- Komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur pada tahun 2019 terdiri dari sektor industri sebesar 30.24%, sektor perdagangan sebesar 18.46%, sektor pertanian sebesar 11.43% dan 14 sektor lainnya sebesar 39.87%. Industri agro merupakan penyumbang terbesar bagi sektor industri olahan, posisi pertama adalah industri makanan dan minuman sebesar 248.70 triliun, kemudian industri pengolahan tembakau sebesar 194.57 triliun, disusul kertas dan barang dari kertas sebesar 35.33%, lalu industri kayu dan barang dari kayu sebesar 28,81 triliun, terakhir industri furniture sebesar 20.54 triliun. Jumlah industri makanan dan minuman di Jawa Timur sebanyak 479,561 unit usaha.

Mencermati data tersebut maka peluang untuk berkembangnya sektor ekonomi syariah, industri halal, dan sektor keuangan di Provinsi Jawa sangat besar.

- Permintaan akan produk dan jasa halal di Jawa Timur terus meningkat. Era tatanan baru atau *new normal* (normal baru) bisa menjadi peluang bagi pelaku industri halal baik kecil, menengah dan besar untuk memproduksi kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang makanan dan perlengkapan kesehatan. Di Jawa Timur pelaku industri dan ekonomi syariah dapat mulai memproduksi produk dan jasa terkait kesehatan, seperti masker kain non-medis, *hand sanitizer*, sabun pencuci tangan, dan pelindung wajah.
- Di Jawa Timur juga sudah terdapat Kawasan Industri yang melakukan pengembangan industri halal terutama untuk sektor makanan, minuman dan kosmetik.
- Sesuai dengan UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan bahwa industri makanan dan minuman wajib mencantumkan label halal di setiap produk yang diperdagangkan per 17 Oktober 2019, serta memberi tenggang waktu selama lima tahun, tepatnya hingga 17 Oktober 2024, hal ini juga akan mendorong berkembangnya ekonomi syariah, industri halal, dan sektor keuangan di Provinsi Jawa Timur.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur

Peluang pengembangan sektor ekonomi syariah, industri halal, dan sektor keuangan di Provinsi Jawa Timur (dalam aspek perdagangan), diantaranya adalah:

- Posisi geografis Jawa Timur yang sangat strategis sebagai penghubung antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur menjadi modal pendorong kegiatan ekonomi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Besarnya jumlah penduduk juga menjadi salah satu faktor pendukung besarnya kegiatan perdagangan di Jawa Timur.
- Pada tahun 2019 perdagangan antar daerah Jawa Timur yang terdiri dari nilai Ekspor sebesar 19,37 miliar, nilai impor sebesar 18,93 miliar, dan nilai Net Neraca sebesar 0,44 miliar.
  - Sektor Non Migas masih memegang peranan besar ekspor impor di Jawa Timur.
  - Di tahun 2019 PDRB Sektor perdagangan memberikan kontribusi sebesar 18,46 % terhadap jumlah total PDRB Jawa Timur.
- Ekspor luar negeri (ekspor non migas) Jawa Timur memberi kontribusi sekitar 14% terhadap ekspor nasional yang mana mayoritas berasal dari produk-produk industri sebesar 91,44%. Pada tahun 2019 sektor perdagangan juga mencatat kinerja pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 6,85%.
- Selain itu di sektor ekspor dan impor dimana angka ekspor tertinggi dihasilkan dari Provinsi Jawa Timur dalam hal ini disumbang dari sektor Perikanan.

Ketua Baznas Jawa Timur

Bagus sekali, karena potensinya besar dan kesadaran beragama penduduk makin baik. Sehingga ini peluang yang sangat bagus.

Bagaimana tantangan utama yang saat ini dihadapi dalam mengembangkan sektor ekonomi syariah, industri halal, dan sektor keuangan syariah?

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur

1. Kredit perbankan syariah dinilai masih cukup mahal oleh UMKM.
2. Masih rendahnya pemahaman terkait ekonomi syariah sehingga masih perlunya sosialisasi dan edukasi kepada UMKM agar terlibat dalam ekonomi syariah.
3. Masih rendahnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah mendapatkan sertifikasi halal khususnya produk makanan dan minuman (di Jawa Timur sekitar 40% yang telah memiliki sertifikasi halal).
4. Indonesia khususnya Jawa Timur penduduknya merupakan mayoritas Muslim dan saat ini di Jawa Timur penduduk Muslim masih banyak yang menjadi konsumen daripada menjadi produsen.
5. Terbatasnya peran sektor keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan, termasuk rendahnya kapasitas perbankan Syariah.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Timur

Tantangan utama yang dihadapi dalam mengembangkan sektor ekonomi syariah, industri halal, dan sektor keuangan di Jawa Timur (dalam aspek perindustrian)

1. Sedikitnya produsen yang mendaftarkan sertifikasi halal. Jumlah IKM di Jawa Timur yang baru memiliki kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal hanya sedikit dari total produsen yang ada. Saat ini hanya sekitar 40% sampai dengan 50% dari 726,000 Industri Mamin Jawa Timur (sumber data Forum Industri Kecil Menengah Jawa Timur). Hal ini kemungkinan terjadi karena prosedur yang rumit dan panjang serta biaya yang besar dalam pembuatan sertifikasi halal.
2. Beberapa negara yang merupakan negara pesaing yang telah lebih dahulu memiliki sertifikasi halal dan penerapan syariah secara menyeluruh di negara tersebut. Indonesia umumnya dan Jawa Timur khususnya belum semua industri memiliki pengelolaan industri halal yang baik sehingga pangsa pasar yang sangat besar ini tidak akan diambil alih oleh negara lain yang lebih memiliki kesiapan dalam mengelola industri halal. Jawa Timur perlu secepat mungkin untuk menyiapkan diri dalam menghadapi ketatnya persaingan pasar industri halal.

3. Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang melakukan beberapa hal terkait mendorong industri halal antara lain:
   - Sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi halal kepada pelaku usaha di Jawa Timur.
   - Bimbingan dan pendampingan serta fasilitasi sertifikasi halal untuk meningkatkan kualitas produk halal Jawa Timur agar dapat bersaing di pasar domestik dan internasional. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur telah memfasilitasi sertifikasi halal bagi 775 IKM.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur

Tantangan utama yang dihadapi dalam mengembangkan sektor ekonomi syariah, industri halal, dan sektor keuangan di Jawa Timur (dalam aspek perdagangan)

- Tingginya biaya logistik yaitu biaya untuk mengirim barang antardaerah dalam negeri lebih mahal dibanding pengiriman dari dan ke luar negeri, hal berdampak pada rendahnya daya saing produk lokal di banding produk impor.
- Masih banyak produk IKM (Industri Kecil Menengah) khususnya olahan pangan yang belum mendapatkan sertifikat halal.
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam perdagangan dan pemasaran sehingga IKM kurang dapat memanfaatkan peluang pasar melalui media online.
- Belum tergalinya secara maksimal potensi ekspor produk-produk halal di negara-negara mitra yang mayoritas penduduknya Muslim.

Ketua Baznas Provinsi Jawa Timur

Tantangan utamanya adalah kualitas SDM, trust, dan dukungan pemerintah.

Lampiran

Daftar Usaha-Usaha Syariah yang dikelola Pondok Pesantren di Provinsi Jawa Timur

No.	Nama Pesantren	Unit Usaha	Deskripsi
1	MBS Lamongan	Pemberdayaan Unit Usaha Syariah di Pesantren	Sektor Usaha Air Minum
2	Al Amin	Pemberdayaan Unit Usaha Syariah di Pesantren	Sektor Usaha Peternakan
3	An Nuqoyah	Pemberdayaan Unit Usaha Syariah di Pesantren	Sektor Usaha Air Minum
4	An Nur 1	Pemberdayaan Unit Usaha Syariah di Pesantren	Sektor Usaha Daur Ulang Sampah
5	Bahrul Ulum	Pemberdayaan Unit Usaha Syariah di Pesantren	Sektor Usaha Daur Ulang Sampah
6	Mamba'ul Ma'arif	Pemberdayaan Unit Usaha Syariah di Pesantren	Sektor Usaha Daur Ulang Sampah
7	Miftachussunah	Pemberdayaan Unit Usaha Syariah di Pesantren	Sektor Usaha Peternakan Lele
8	Sunan Drajat	Pemberdayaan Unit Usaha Syariah di Pesantren	Sektor Usaha Daur Ulang Sampah
9	Tebuireng	Pemberdayaan Unit Usaha Syariah di Pesantren	Sektor Usaha Pertanian
10	Zainul Hasan Genggong	Pemberdayaan Unit Usaha Syariah di Pesantren	Sektor Usaha Daur Ulang Sampah
11	Al Islah	Pemberdayaan Unit Usaha Syariah di Pesantren	Sektor Usaha Pertanian
12	As Salam	Pemberdayaan Unit Usaha Syariah di Pesantren	Sektor Usaha Peternakan
13	Baitul Hikmah	Pemberdayaan Unit Usaha Syariah di Pesantren	Sektor Usaha Jasa
14	Darul Ulum	Pemberdayaan Unit Usaha Syariah di Pesantren	Sektor Usaha Jasa

No.	Nama Pesantren	Unit Usaha	Deskripsi
15	Nurul Inaroh	Pemberdayaan Unit Usaha Syariah di Pesantren	Sektor Usaha Jasa
16	Salafiyah Syafi'iyah	Pemberdayaan Unit Usaha Syariah di Pesantren	Sektor Usaha Daur Ulang Sampah
17	Wali Songo	Pemberdayaan Unit Usaha Syariah di Pesantren	Sektor Usaha Pertanian
18	Al Falah	Pemberdayaan Unit Usaha Syariah di Pesantren	Sektor Usaha Perikanan dan Tenun Ikat
19	Gontor	Pemberdayaan Unit Usaha Syariah di Pesantren	Sektor Usaha Daur Ulang Sampah
20	An Nur 2	Pemberdayaan Unit Usaha Syariah di Pesantren	Sektor Usaha Daur Ulang Sampah
21	Bahrul Magfirah	Pemberdayaan Unit Usaha Syariah di Pesantren	Sektor Usaha Pertanian
22	Islamiyah Salafiyah	Pemberdayaan Unit Usaha Syariah di Pesantren	Sektor Usaha Konveksi
23	Nurul Huda	Pemberdayaan Unit Usaha Syariah di Pesantren	Sektor Usaha Perikanan
24	Nurul Jadid	Pemberdayaan Unit Usaha Syariah di Pesantren	Sektor Usaha Daur Ulang Sampah
25	Al Rosyid	Pemberdayaan Unit Usaha Syariah di Pesantren	Sektor Usaha Pertanian

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Provinsi

DKI Jakarta

Sekilas

tentang Ekonomi Syariah Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia dan sebagai pusat kegiatan perekonomian (70% pusat peredaran uang secara nasional) memiliki penduduk sekitar 11 juta jiwa, dimana 84% diantaranya adalah muslim.

Di sektor industri halal, Provinsi DKI Jakarta mempunyai potensi yang sangat besar pada sektor pariwisata ramah Muslim dimana Jakarta sudah mempunyai modal baik dari segi infrastruktur, aksesibilitas, maupun amenitas. Menurut kajian yang dilakukan oleh Sekolah Bisnis IPB (2018), potensi ekonomi halal di Jakarta diperkirakan sebesar US$ 62.53 miliar dimana potensi terbesarnya yaitu dari sektor keuangan syariah berupa jasa keuangan dan asuransi. Keseriusan Pemerintah Provinsi DKI terhadap potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ditandai dengan telah dibuatnya road-map spin off *Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BPD DKI yang akan dilakukan pada tahun 2022 dan segera dibuatnya Halal Industrial Estate Jakarta yang terletak di Pulogadung, Jakarta Timur.*

Regulasi Tingkat Daerah
di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah

Peraturan Daerah	Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian
Peraturan Gubernur	Peraturan Gubernur No. 158 Tanggal 19 Desember 2013 Tentang Tata Cara Sertifikasi Halal Restoran dan Non Restoran
Peraturan Gubernur terkait Pariwisata ramah Muslim	Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Pariwisata ramah Muslim (dalam proses)
Peraturan Gubernur terkait Dana Sosial Keagamaan	Tidak ada
Rencana / *Masterplan* / *Blueprint* Pengembangan Keuangan Syariah Daerah	Tidak ada
Lainnya	Keputusan Gubernur Nomor 1717 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Penerimaan PT Bank Syariah Mandiri sebagai tempat penerimaan pembayaran Pajak Daerah secara elektronik Surat Edaran Badan Kepegawaian Daerah Nomor 13/SE/2018 Tanggal 24 September 2018 tentang Opsi Penggunaan Rekening Bank DKI Syariah sebagai Rekening Pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Daerah

Rencana Pemerintah Daerah
di Sektor Ekonomi Syariah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 di Provinsi DKI Jakarta memfokuskan pada "Pemantapan kualitas produktivitas masyarakat sesuai dengan sumber daya yang dimilliki sehingga seluruh masyarakat Jakarta dapat menikmati kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan dengan terus memantapkan daya saing global". Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022, adalah: "Terwujudnya Jakarta yang Maju, Aman, Modern, Tertata Rapi, Lestari, Manusiawi Berbudaya dan Fokus Kepada Pembangunan Manusia yang Mengedepankan Keadilan dan Kesejahteraan Sosial Melalui Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Profesional".

Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Inflasi		Tingkat Pengangguran		Tingkat Kemiskinan		Konsumsi RT		Konsumsi Pemerintah		Investasi		Ekspor		Impor	
2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
6.17%	5.89%	3.27%	3.23%	6.24%	6.22%	3.55%	3.42%	6.03%	6.0%	16.45%	-0.13%	4.67%	1.30%	4.53%	1.44%	10.58%	-5.53%

Rencana Pembangunan Jangka Menengah DKI Jakarta Tahun 2017-2022

- Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
- Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan masyarakat secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
- Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
- Menjadikan Jakarta ibu kota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Program-Program Unggulan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2017-2022	Isu Strategis RPJMD DKI Jakarta 5 tahun ke depan
▪ Membuka 200,000 lapangan kerja baru dengan membangun 44 pos pengembangan kewirausahaaan ▪ Meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan dengan mengintegrasikan dunia usaha ▪ Membangun pemerintahan yang bersih, modern berbasis transparansi, akuntabilitas & keteladanan ▪ Meningkatkan program penanggulangan banjir, kemacetan dan pemeliharaan lingkungan hidup ▪ Memberdayakan perempuan Jakarta dengan partisipasi perempuan dalam perekonomian ▪ Membangun sistem transportasi umum yang terintegrasi dalam bentuk interkoneksi antarmoda ▪ Mengatasi kesenjangan, menjadikan Kepulauan Seribu sebagai Kepulauan Pembangunan Mandiri ▪ Mengaktifkan pengembangan kebudayaan, kesenian, olahraga, PAUD dan budaya membaca ▪ Menyelenggarakan festival olahraga dan kesenian Jakarta berbasis komunitas sepanjang tahun ▪ Membangun pusat pariwisata dan tempat sejarah yang ramah, aman, sejuk bagi anak, lansia dan disabilitas ▪ Meningkatkan bantuan sosial untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan keagamaan, lembaga sosial, Sekolah Minggu dan majelis taklim	▪ Pembangunan manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pembangunan Kesehatan, Kesetaraan Akses Untuk Disabilitas, Permuliaan Perempuan, serta Isu Pemuda dan Olahraga ▪ Percepatan Ekonomi dan Infrastruktur Penguatan Ketahanan Pangan, Industri Kreatif Yang Berdaya Saing, Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja, Antisipasi Banjir, Rob dan Genangan, Ketahanan Energi, Pengembangan Sistem Transportasi, Isu Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota ▪ Integritas Aparatur Isu Reformasi Birokrasi, Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan ▪ Isu Kota Lestari. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ▪ Jakarta sebagai Simpul Kemajuan dengan Pembangunan Budaya Multikultur, Penguatan Inovasi dan Kreativitas Daerah

Rencana Pembangunan Ekonomi Syariah di Provinsi DKI Jakarta

Sektor Pariwisata Ramah Muslim

- Pengembangan pariwisata ramah Muslim untuk meningkatkan kunjungan dan pelayanan wisatawan muslim dari dalam dan luar negeri
- Merumuskan kebijakan pengembangan pariwisata ramah Muslim yang sesuai dengan standar sertifikasi halal untuk menjamin kualitas layanan dan meningkatkan fasilitas penunjang pariwisata ramah Muslim
- Pemberian insentif untuk setiap pengusaha pariwisata yang melaksanakan pariwisata ramah Muslim yaitu:
  - Fasilitasi pemasaran dan promosi
  - Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM
  - Pemberian pengurangan pajak daerah
  - Pemberian sertifikat halal secara cuma-cuma (gratis)

Sektor Makanan dan Produk Halal

- Peningkatan Literasi Keamanan Pangan khususnya sertifikasi halal di sektor makanan dan minuman bagi konsumen dan/atau masyarakat
- Pemenuhan jumlah sumber daya insani untuk mendukung kebutuhan industri halal
- Pengembangan kompetensi SDM berbasis syariah
- Promosi industri halal
- Meningkatkan komitmen dan koordinasi antar pemangku kepentingan di sektor industri halal
- Penyusunan regulasi yang mendukung industri halal
- Penguatan kelembagaan yang mendukung program-program syariah
- Pengembangan inovasi produk halal
- Meningkatkan mutu dan variasi produk halal
- Pengembangan teknologi yang mendukung industri halal
- *Halal champion* untuk mempersiapkan pelaku yang berdaya saing tinggi
- Penguasaan dan pengembangan industri halal
- Peningkatan kemampuan advokasi dan jejaring kerjasama perdagangan *halal value chain*

Sektor Keuangan Syariah

- Dukungan Produk dan Layanan Skim Syariah oleh UUS BPD-DKI Jakarta untuk sertifikasi halal, pariwisata ramah Muslim, UMK dan usaha-usaha syariah.
- Penyediaan alternatif permodalan dengan menggunakan layanan keuangan syariah oleh UUS BPD-DKI Jakarta.
- Meningkatkan penyaluran kredit dalam bentuk pembiayaan modal kerja *linkage* kepada berbagai institusi keuangan syariah lainnya di Provinsi DKI Jakarta seperti Koperasi Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Pegadaian Syariah, Multifinance Syariah.

Program Pemerintah Daerah
di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah

Sektor Industri Halal

Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Sektor industri halal unggulan yang akan diprioritaskan pengembangannya adalah sektor makanan minuman, pariwisata, dan fesyen. Peraturan Gubernur terkait ekonomi syariah seperti sertifikasi halal, pariwisata ramah Muslim, akan menjadi landasan hukum untuk mengembangkan potensi ekonomi syariah.

Program Pendukung Sektor Industri Halal

Makanan dan Minuman Halal	▪ Sertifikasi halal produk makanan dan minuman ▪ Bantuan pengurusan perizinan produk halal khas daerah ▪ Promosi makanan dan minuman halal terutama makanan minuman halal khas daerah, Pameran
Fesyen Muslim	▪ Festival Busana Muslim ▪ Promosi perdagangan dalam dan luar negeri, pameran ▪ Promosi fesyen muslim khas daerah, pameran
Pariwisata Ramah Muslim	▪ Pengembangan Destinasi Pariwisata ramah Muslim ▪ Promosi Produk-Produk Industri Pariwisata ramah Muslim, pameran ▪ Seminar Internasional Pariwisata ramah Muslim Internasional ▪ Bantuan pengurusan perizinan produk pariwisata ramah Muslim

Jumlah Kegiatan Syariah/Halal

	Jumlah Kegiatan Produk Daerah	Jumlah Kegiatan Produk Halal/Syariah/Islami
Makanan dan minuman	-	-
Fesyen	-	-
Pariwisata	-	1

Sentra Sektor Industri Halal

Makanan dan Minuman Halal	Fesyen Muslim
Kawasan Kuliner Taman Monas, Jakarta dimana sudah lebih dari 118 pelaku usaha di Taman Monas yang telah memiliki sertifikat halal MUI	Kawasan Halal Park Senayan, Jakarta

Program Pendorong Pariwisata Ramah Muslim

Program industri pariwisata melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada 820 kewirausahaan produk halal di 41 kecamatan dari 44 kecamatan, meliputi pembinaan:

- Pelatihan manajemen pemasaran termasuk *digital marketing* bekerjasama dengan perguruan tinggi dan perusahan aplikasi
- Pelatihan keterampilan
- Pelatihan seni budaya seperti membatik, Tari Betawi
- Bimbingan teknologi peningkatan kapasitas pelaku industri akomodasi

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pendukung Sektor Industri Halal

- Fasilitasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi 10 UMKM pada tahun 2020.
- Fasilitasi dan kurasi digital bagi 6 UMKM kandidat anggota Industri Kreatif Syariah (IKRA) pada tahun 2020.
- Pelatihan, pembuatan katalog, pembaharuan informasi pada *website* IKRA bagi anggota IKRA 2019.
- Dalam rangka pengembangan pariwisata ramah Muslim di Kawasan Kota Tua dan Kep. Seribu, telah dilaksanakan program sertifikasi halal bagi UMKM pendukung pariwisata sebagai bagian dari upaya penguatan *halal value chain* di Jakarta serta pembangunan sarana ibadah. Hasil integrasi para pemangku kepentingan dalam program tersebut adalah telah tersertifikasinya 13 UMKM di Kepulauan Seribu, 3 UMKM di kawasan Kota Tua dan 7 UMKM di kawasan lainnya serta sertifikasi halal untuk *resort* di Pulau Macan dan beberapa UMKM di Ancol.

Sektor UMKM dan Ekonomi Pesantren

Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

- Pemberian fasilitasi halal baik Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang sudah berproduksi rutin dan memiliki omset
- Pelatihan, pembinaan, partisipasi pada bazaar/promosi dagang/pameran

Program Kemitraan UMKM dan Pengusaha Besar

Tahap	Daftar Program Kemitraan di Peringkat Desa/Kabupaten/Kota
Sudah ada	▪ Program kemitraan IKM dan UKM dengan perusahaan teknologi dan *e-commerce* (Gojek dan Shopee) ▪ Program kemitraan UKM dengan OJK, Pegadaian, BJB dan KonWorks ▪ Program rehab Lokasi Sementara (Loksem) dengan bantuan CSR
Tahap perencanaan	Program kemitraan IKM dan UKM dengan Perguruan Tinggi

Program Pemberdayaan IKM dan UMKM

Sektor	Daftar Program Pendampingan
Makanan dan minuman halal	▪ Pelatihan Desain Kemasan, Fasilitasi Hak Merk, dan Pelatihan Esmart (*Digital Marketing*) bagi IKM yang berproduksi rutin dan memiliki omset ▪ Pelatihan Wirausaha Industri Baru Komoditi Makanan dan Minuman dalam 7 tahap mulai dari pendaftaran, pelatihan pendampingan, perijinan, pemasaran, pelaporan keuangan dan permodalan ▪ Menyediakan tenaga pendamping kewirausahaan di setiap kecamatan yang bertugas mendampingi UKM (Jakpreneur) dalam menjalankan fase P1 dalam program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu ▪ Memberikan pelatihan kewirausahaan di setiap kecamatan ▪ Menyelenggarakan Bazar di setiap kecamatan bagi UKM yang terdaftar Jakpreneur ▪ Pendampingan mendaftarkan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) Menyediakan slot bazar yang diselenggarakan melalui APBD maupun bazar kolaborasi dengan pemangku kepentingan ▪ Membuka akses permodalan dengan perbankan dan fintech ▪ Pemberian sarana berdagang berupa gerobak dan etalase di tahun 2017 dan 2018

Fesyen muslim	▪ Pelatihan Desain Kemasan, Fasilitasi Hak Merk, dan Pelatihan Esmart (Digital Marketing) bagi IKM yang berproduksi rutin dan memiliki omset ▪ Pelatihan Wirausaha Industri Baru Komoditi Makanan dan Minuman dalam 7 tahap mulai dari pendaftaran, pelatihan pendampingan, perijinan, pemasaran, pelaporan keuangan dan permodalan ▪ Menyediakan tenaga pendamping kewirausahaan di setiap kecamatan yang bertugas mendampingi UKM (Jakpreneur) dalam menjalankan fase P1 dalam program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu ▪ Memberikan pelatihan kewirausahaan di setiap kecamatan ▪ Menyelenggarakan bazar di setiap kecamatan bagi UKM yang terdaftar Jakpreneur ▪ Pendampingan mendaftarkan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) ▪ Menyediakan slot bazar yang diselenggarakan melalui APBD maupun bazar kolaborasi dengan pemangku kepentingan ▪ Membuka akses permodalan dengan perbankan dan fintech ▪ Pemberian sarana berdagang berupa gerobak dan etalase di tahun 2017 dan 2018

Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	2017	2018	2019
IKM mendapat pendampingan	-	2,327	2,913
IKM mendapat pendampingan sertifikasi halal	225	300	1,000
UMKM mendapat pendampingan	-	14,964	28,385

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Ekonomi Pesantren

Jumlah Pesantren	Program Pengembangan Ekonomi (*Lampiran*)
2	3

- Program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren bagi Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin. Program yang dicanangkan diberi nama SMART PONTREN yang terdiri *smart farming*, *smart creative industry*, dan pengolahan sampah. Implementasi program tersebut menggunakan bantuan teknologi untuk menarik minat santri muda, meningkatkan akurasi, produktivitas, dan kualitas produk yang dihasilkan.

Sektor Keuangan Syariah

Program Otoritas Jasa Keuangan

Sub-sektor	Detil Program
Perbankan Syariah	Dalam rangka menciptakan industri perbankan syariah yang sehat, kuat dan produktif serta berdaya saing maka OJK Kantor Regional 1 DKI Jakarta dan Banten (OJK KR01) melakukan beberapa program sebagai berikut: 1. Pengawasan aktif terhadap seluruh perbankan syariah yang berada di wilayah kerja Kantor OJK Regional 1 terdiri dari 24 BPRS (DKI Jakarta: 1 BPRS, Banten: 8 BPRS, Depok: 4 BPRS, Bogor: 5 BPRS dan Bekasi: 6 BPRS) 2. Program penguatan permodalan BPRS melalui POJK Nomor

Sub-sektor	Detil Program
	66/POJK.03/2016 dimana pada akhir Desember 2020 seluruh BPRS diminta memenuhi modal inti sebesar Rp3 miliar atau Rp6 miliar (sesuai tier BPRS saat POJK tersebut diberlakukan).
Bank Pembangunan Daerah	OJK KR01 memiliki kewenangan dalam pengawasan Bank Pembangunan Daerah, dalam hal ini PT Bank DKI. Adapun kewenangan pengawasan Unit Usaha Syariah (UUS) tidak berada di OJK KR01 melainkan pada Departemen Pengawasan Bank Syariah. Namun demikian mengingat PT Bank DKI memiliki UUS, maka dalam pelaksanaan pengawasan OJK KR01 terhadap entitas PT Bank DKI, OJK KR01 turut melakukan pengawasan terhadap pencapaian target bisnis, progress spin-off dan perbaikan proses bisnis UUS PT Bank DKI dengan senantiasa berkoordinasi dengan Pengawas UUS di Departemen Pengawasan Bank Syariah (Kantor Pusat OJK)
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS dan BWM)	OJK KR01 tidak memiliki kewenangan pengawasan LKM syariah, namun demikian OJK KR01 melakukan inisiasi pembentukan Bank Wakaf Mikro pertama di Provinsi DKI Jakarta yang saat ini masih dalam proses penghimpunan sumber modal
IKNB Syariah 1. Asuransi 2. Dana Pensiun 3. Multifinance 4. Penjaminan 5. Pegadaian	OJK KR01 tidak memiliki kewenangan pengawasan IKNB syariah
Fintech Syariah	OJK KR01 tidak memiliki kewenangan pengawasan fintech syariah

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Keuangan syariah

- Sosialisasi serta edukasi ekonomi dan keuangan syariah ke masyarakat dan pemangku kepentingan di Provinsi DKI Jakarta

Sektor Keuangan Mikro Syariah

Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Program Pengembangan Koperasi Syariah

Program	Institusi Keuangan Mikro Syariah
Belum ada	Belum ada

Program Otoritas Jasa Keuangan (Regional)

Program Pendampingan, Pengawasan, dan Pengembangan Bank Wakaf Mikro (BWM)

LKMS	OJK KR01 tidak memiliki kewenangan pengawasan LKM syariah
Bank Wakaf Mikro	OJK KR01 melakukan inisiasi pembentukan Bank Wakaf Mikro pertama di Provinsi DKI Jakarta dimana saat ini masih dalam proses penghimpunan sumber modal.

Gambaran
Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah

Sektor Industri Halal

Nilai Ekspor Provinsi DKI Jakarta

Sektor	Jumlah Ekspor (USD)	% Dibandingkan dengan Total Ekspor Non-Migas
Makanan dan minuman	1,091,988,008	10.43%
Makanan dan minuman Halal	-	-
Fesyen	726,242,914	6.94%
Fesyen Muslim	-	-

Jumlah Usaha/ Merk dengan Sertifikat Halal pada Sektor Makanan dan Minuman (Mamin)

Sektor Usaha/*Brand* (Tahun 2018)		Sektor Usaha/*Brand* (Tahun 2019)	
Roti	222	Roti	179
Katering dan Restoran	247	Katering dan Restoran	202
Tepung, kanji, dan produk turunan/olahan	14	Tepung, Kanji, dan produk turunan/olahan	11
Es, es krim, dan bahan-bahan pendukung	11	Es, es krim, dan bahan-bahan pendukung	11
Susu dan produk olahan/turunan susu	4	Susu dan produk olahan/turunan susu	3
Makanan olahan, daging dan unggas	68	Makanan olahan, daging dan unggas	48
Makanan olahan ikan	36	Makanan olahan ikan	30
Makanan olahan telur	5	Makanan olahan telur	4
Makanan ringan	342	Makanan ringan	241
Pemanis, bumbu dapur, bumbu penyedap/ pelengkap	66	Pemanis, bumbu dapur, bumbu penyedap/ pelengkap	50
Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	16	Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	13
Semua Usaha/*Brand* Tersertifikasi Halal	1031	Semua Usaha/*Brand* Tersertifikasi Halal	792

Sumber: Daftar Belanja Produk Halal LPPOM MUI hingga periode Maret-April-Mei 2019

Kontribusi Sektor Mamin terhadap Perekonomian Provinsi DKI Jakarta

	2019	2018	2017	2016	2015
PDRB (Jutaan Rupiah)					
Mamin olahan	27,363.74	25,228.87	23,490.75	20,384.00	18,506.06
Mamin olahan, *Base* = 2010	16,715.43	15,626.01	14,894.32	13,238.96	12,698.38
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb)	116,662.82	105,319.23	98,345.84	92,144.21	85,406.98
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb), *Base* = 2010	79,933.04	73,876.68	69,876.76	66,200.45	61,977.68
Pertumbuhan PDRB (%)					
Mamin olahan, *Base* = 2010	6.97	4.91	12.5	4.26	12.88
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb), *Base* = 2010	8.20	5.72	5.55	6.81	6.16

Kontribusi pada PDRB (%)					
Mamin olahan	0.96	0.97	0.99	0.94	0.93
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb)	4.11	4.05	4.16	4.27	4.29

Total Produksi Daging Daerah (Tahun 2017)

Populasi Ternak		Produksi Daging Ternak (ton)	
Sapi Potong	1,730	Sapi	15,611.43
Sapi Perah	1,897	Sapi Impor	Belum ada
Kerbau	58	Kerbau	84,37
Kuda	313	Kuda	Belum ada
Kambing	4,537	Kambing	1,207.81
Domba	2,134	Domba	209,68
Populasi Unggas		**Produksi Daging Unggas ton)**	
Ayam Kampung	Belum ada	Ayam Kampung	Belum ada
Ayam Petelur	2,169,135	Ayam Petelur	Belum ada
Ayam Broiler	7,469,013	Ayam Broiler	8,116.13
Bebek	125	Bebek	0.12

Skor Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) Tahun 2018 Provinsi DKI Jakarta

Akses	96
Komunikasi	43
Lingkungan	65
Jasa	53
Skor IMTI	**59**

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Provinsi DKI Jakarta

	2019	2018	2017	2016	2015
PDRB (Milliar Rupiah)					
Jasa akomodasi	19,872	19,016	18,222	16,752	16,454
Jasa akomodasi, *Base* = 2010	12,148	11,903	11,513	10,673	10,622
Pertumbuhan PDRB (%)					
Jasa akomodasi, *Base* = 2010	2.06	3.39	7.87	0.48	1.47
Kontribusi pada PDRB (%)					
Jasa akomodasi	0.66	0.69	0.70	0.69	0.73

Rating untuk Pariwisata Ramah Muslim di Provinsi DKI Jakarta

Skor	Aspek		Skor	Aspek	
Skor Akses	Udara	5	Skor Lingkungan	Kedatangan Turis Muslim	5
	Kereta	5		Jangkauan Wi-Fi	4
	Laut	2		Komitmen terhadap Pariwisata ramah Muslim	5
	Infrastruktur Jalan	4			

Skor Komunikasi	Panduan Pelancong Muslim	3	Skor Jasa		
	Edukasi Pemangku Kepentingan	5		Restoran Halal	5
	Jangkauan Pasar	5		Masjid	5
	Pemandu Tur	5		Bandara	5
	Pemasaran Digital	5		Hotel	5
				Atraksi	1
			Skor Total		74
			Rata-rata Skor		4.35

Catatan: Data lengkap bisa didapatkan di dalam Laporan Perkembangan Pariwisata ramah Muslim Daerah 2019-2020

Indikator Pariwisata Ramah Muslim Provinsi DKI Jakarta

Indikator	Skor/Nilai	Keterangan
Akses	Cukup baik	Terdapat akses udara, akses kereta, akses laut, dan infrastruktur jalan yang baik
Akses Udara	Baik	Terdapat bandara internasional
Bandara International	2	
Bandara Domestik	Belum ada	
Akses Kereta	Baik	Terdapat akses kereta dalam kota, luar kota, serta MRT dan LRT
Jumlah rute kereta dalam kota	7	
Jumlah rute kereta ke luar kota	16	
MRT	16	(km)
LRT	130.4	(km)
Akses Laut	Cukup baik	Terdapat pelabuhan
Terminal Kapal Pesiar	Belum ada	
Pelabuhan	1	
Infrastruktur Jalan	Baik	Kondisi jalan sebagian besar dalam kondisi baik dan layak
Jalan Nasional/Negara	276.24	
Jalan Provinsi	6,681.4	
Komunikasi		Memiliki panduan pengunjung, edukasi untuk pemangku kepentingan, kegiatan pendukung jangkauan pasar, pemandu tur, dan melakukan pemasaran digital
Panduan bagi Pelancong Muslim	Baik	Terdapat banyak sekali buku petunjuk bahasa Inggris, namun bahasa Arab masih sedikit
Eksemplar Bahasa Inggris	43,000	
Eksemplar Bahasa Arab	24	
Edukasi Pemangku Kepentingan	Cukup baik	
Workshop	6	Sosialisasi pariwisata ramah Muslim
Jangkauan Pasar	Cukup baik	Terdapat beberapa kegiatan terkait pariwisata ramah Muslim, terutama festival ramah muslim
Konferensi/Pameran/Expo	Belum ada	Tidak terinfo
Acara B2B	Belum ada	Tidak terinfo

Indikator	Skor/Nilai	Keterangan
Festival Ramah Muslim	11	
Trip Keluarga	3	Trip keluarga ke Dubai, Saudi Arabia, dan Beirut
Pemandu Tur	Baik	Terdapat pemandu tur yang menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris
Bahasa Arab	253	
Bahasa Inggris	17	
Pemasaran Digital	Baik	Terdapat kampanye Jakarta ramah muslim via sosial media dan web
Website	Ada	
Media Sosial	Ada	Facebook, Twitter, Instagram
Lingkungan	Baik	Banyak wisatawan yang datang ke Jakarta. Cakupan jaringan wifinya juga bagus. Selain itu, Jakarta memiliki komitmen untuk mengembangan pariwisata ramah Muslim
Kedatangan Turis	Baik	Terdapat wisatawan domestik dan mancanegara, namun turis mancanegara relatif lebih sedikit
Wisatawan Domestik	34,192,053	
Wisatawan Mancanegara	2,813,411	71% wisatawan muslim
Jangkauan Wifi	Baik	Jaringan internet di bandara gratis dan kualitasnya bagus
Komitmen terhadap Pariwisata ramah Muslim	Baik	Telah disusun DSRA pariwisata ramah Muslim dan telah dibangun halal park
Jasa	Baik	Sebagian besar kebutuhan industri pariwisata ramah Muslim dan hal-hal yang fundamental seperti restoran halal, masjid, bandara, hotel, dan atraksi sudah dimiliki dengan kualitas yang baik
Restoran Halal	Baik	Terdapat banyak restoran dan outlet bersertifikasi halal dan restoran yang diklaim halal
Restoran dan outlet bersertifikat halal	510	
Restoran/ Rumah makan halal (*Self-claimed*)	3,214	
Masjid	Baik	Terdapat banyak masjid dan mushala dengan kondisi baik dan sangat layak
Masjid	5,000	
Mushala	2,775	
Bandara	Baik	
Mushala	10	
Shalat Jumat	Ada	
Hotel	Baik	Terdapat hotel syariah
Hotel syariah	5	
Hotel dengan dapur bersertifikat halal	-	-
Hotel yang tidak menyediakan menu babi	-	-
Hotel yang tidak menyediakan alkohol	-	-
Hotel yang tidak menyediakan menu babi dan alkohol	-	-

Indikator	Skor/Nilai	Keterangan
Atraksi	Baik	Terdapat situs budaya islami, wisata budaya lokal, serta tempat ibadah di tempat perbelanjaan
Situs budaya islami	20	
Daya tarik wisata budaya	4	
Daya tarik lokal	21	
Pusat perbelanjaan dengan masjid/mushala yang layak	186	
Lainnya	-	-

Sektor Keuangan Syariah

Indeks Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah

Indeks	Tahun 2016	Tahun 2019
Indeks Literasi Keuangan Syariah (OJK)	16.4%	34.03%
Indeks Inklusi Keuangan Syariah (OJK)	17.5%	35.60%
Indeks Literasi Ekonomi Syariah (BI)	-	15.00%

Profil Keuangan BPD DKI Jakarta– Unit Usaha Syariah (*dalam miliar Rupiah*)

	2015	2016	2017	2018	2019
Total aset gross	3,463	4,012	4,206	5,657	6,190
Total pembiayaan	3,386	3,783	4,018	5,350	6,016
Total DPK	2,146	3,517	3,376	3,936	1,769
Total FDR	158%	108%	119%	136%	340%
Total NPF	0.5%	2.4%	0.6%	1.03%	5.7%
*Pangsa pasar (%)	-	-	-	9.2%	9.5%

Profil Industri Perbankan Syariah (BUS) di Provinsi DKI Jakarta (*dalam milliar Rupiah*)

	2018	2019
Pangsa pasar (%)	79.6%	80.2%
Pembiayaan berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	5,145	6,542
Modal kerja (bukan UMKM)	30,839	34,419
Investasi (UMKM)	4,952	5,146
Investasi (bukan UMKM)	21,367	24,710
Konsumsi	13,477	14,467
NPF berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	181	208
Modal kerja (bukan UMKM)	377	1,043
Investasi (UMKM)	80	141
Investasi (bukan UMKM)	1,396	735
Konsumsi	274	272
Total		
Total aset gross	217,598	237,720
Total pembiayaan	75,779	85,285
Portfolio pembiayaan UMKM (%)	13.3%	13.7%

Total DPK	114,225	120,936
Total FDR	66.34%	70.52%
Total NPF	2,309	2,399
Total NPF (%)	3.0%	2.8%

Profil Industri Perbankan Syariah (UUS) di Provinsi DKI Jakarta (*dalam miliar Rupiah*)

	2018	2019
Pangsa pasar (%)	71.3%	72%
Pembiayaan berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	3,952	3,679
Modal kerja (bukan UMKM)	18,077	17,233
Investasi (UMKM)	4,688	2,216
Investasi (bukan UMKM)	12,913	21,251
Konsumsi	22,305	23,240
NPF berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	89	114
Modal kerja (bukan UMKM)	511	106
Investasi (UMKM)	50	71
Investasi (bukan UMKM)	138	69
Konsumsi	384	411
Total		
Total aset gross	138,219	148,700
Total pembiayaan	61,936	67,619
Portfolio pembiayaan UMKM (%)	14.0%	8.7%
Total DPK	59,917	69,413
Total FDR	103.37%	97.41%
Total NPF	1,171	772
Total NPF (%)	1.89%	1.14%

Sektor Keuangan Mikro Syariah

Jumlah IKMS yang Mendapatkan Program Pendampingan dan Pengawasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

LKMS	2017	2018	2019
Jumlah yang mendapatkan pendampingan	-	14,964	28,385
Jumlah IKMS yang diawasi oleh Dinas (pengawasan yang dimaksud adalah pengecekan laporan RAT, kunjungan ke LKMS, dsb.)	-	-	-

Profil Fundamental IKMS di Bawah Pengawasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

IKMS (KSPPS/USPPS,BMT,Kopontren,dll)	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah IKMS yang berada di wilayah daerah	83	56
Jumlah anggota IKMS	632	579
Jumlah pegawai IKMS	15	15
Modal sendiri (*dalam Rupiah*)	1.19 Juta	1.18 Juta
Volume usaha (*dalam Rupiah*)	1.96 Juta	2.09 Juta
Sisa Hasil Usaha/SHU (*dalam Rupiah*)	35 Juta	92,4 Juta
Total asset (*dalam Rupiah*)	12.78 Juta	13.98 Juta
Rata-rata pembiayaan IKMS (*dalam Rupiah*)	-	-

Sektor Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Daftar BAZNAS Aktif dan LAZ Aktif (Rekomendasi BAZNAS)

1 BAZNAS Aktif dan 16 LAZ (Rekomendasi BAZNAS)	BAZIS Provinsi DKI Jakarta serta LAZ Baitul Maal Hidayatullah, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia, LAZ Pesantren Islam Al-Azhar, LAZ Baitulmaal Muamalat, LAZ Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdatul Ulama (LAZIS NU), LAZ Global Zakat, LAZ Muhammadiyah, LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, LAZ Yayasan Kesejahteraan Madani, LAZ Yayasan Pusat Peradaban Islam (AQL), LAZ Yayasan Mizan Amanah, LAZ Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa, LAZ Abdurrahman Bin Auf, LAZ Komunitas Mata Air Jakarta, LAZ Baitul Maal Madinatul Iman, Yayasan Ar Raudhah Ihsan Foundation

Indeks Zakat Nasional (IZN) Provinsi DKI Jakarta

	2018	2019
Indeks Zakat Nasional/IZN (Dimensi Makro)		
Regulasi	0	1.00
Dukungan Finansial dari Pemerintah (APBN/APBD) untuk BAZNAS	1	1.00
Jumlah Resmi Lembaga Zakat/OPZ, muzakki, and mustahik	0.5	0.75
Rasio, Jumlah muzakki individual/jumlah rumah tangga di level Provinsi	0	0.00
Rasio, Jumlah dari muzakki institusi/jumlah institusi di level Provinsi	0	1.00
Database dari institusi/lembaga zakat yang terdaftar	0.17	0.68
Total Indeks Makro	**0.45**	**0.88**
Indeks Zakat Nasional/IZN (Dimensi Mikro)		
Penghimpunan	1	0.00
Pengelolaan	0.75	0.75
Penyaluran	0.94	1.00
Pelaporan	1	0.75
Indeks Kesejahteraan CIBEST	1	1.00
Modifikasi Indeks Pengembangan Manusia (HDI)	0.75	0.50
Kemandirian	0.5	0.56
Institutional	0.93	0.64
Dampak Zakat	0.8	0.69
Total Indeks Mikro	**0.85**	**0.67**

Indeks Skor Literasi dan Pemahaman Zakat Provinsi DKI Jakarta

	2020
Indeks Literasi Zakat	54.60
Indeks Pemahaman Dasar tentang Zakat	59.94
Indeks Pemahaman Lanjutan tentang Zakat	44.68

Indeks Skor Literasi dan Pemahaman Wakaf Provinsi DKI Jakarta

	2020
Indeks Literasi Wakaf	36.71
Indeks Pemahaman Dasar tentang Wakaf	40.13
Indeks Pemahaman Lanjutan tentang Wakaf	30.36

Sektor UMKM dan Ekonomi Pesantren

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Jumlah Pesantren dengan Usaha-Usaha Syariah

2 Pondok Pesantren	3 Usaha-usaha Syariah (*detil di Lampiran*)

Program Pengembangan Ekonomi Pesantren

Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin

Dalam rangka mendukung program pengembangan pesantren, KPw BI DKI Jakarta bekerjasama dengan Departemen Pengembangan Ekonomi Syariah (DEKS) telah menyerahkan PSBI senilai Rp 1,024,925,000,-, yang terdiri dari:

- Instalasi pengolahan sampah terpadu;
- Mesin CNC untuk pengembangan usaha kerajinan kayu berbasis teknologi 3D; dan
- Instalasi *smart farming*.

Ke depan akan dilakukan program pendampingan bagi unit usaha yang telah terbentuk agar dapat lebih bernilai ekonomis sehingga dapat mendukung upaya kemandirian ekonomi ponpes.

Sektor Pendidikan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Perguruan Tinggi yang Menyediakan Program Studi Ekonomi dan Keuangan Syariah Terkait

Jenjang	Jumlah Universitas tahun 2019	Program Studi tahun 2019		2018		2019	
		Nama Program studi	Jml. Program Studi	Jml. Dosen	Jml. Mahasiswa	Jml. Dosen	Jml. Mahasiswa
Sarjana	23	Ekonomi Syariah	14	78	3538	78	2440
		Hukum Ekonomi Syariah	6	36	2087	36	696
		Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah	1	5	200	5	107
		Manajemen Perbankan Syariah	1	6	970	6	375
		Manajemen Zakat dan Wakaf	1	7	28	7	31
		Perbankan Syariah	7	35	2018	35	1311
		Zakat dan Wakaf	1	5	180	5	70
Magister	2	Hukum Ekonomi Syariah	2	13	144	13	53
		Perbankan Syariah	1	7	199	7	53
Doktoral	1	Perbankan Syariah	1	7	84	7	43

Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi Ekonomi Syariah Terkait

Akreditasi	AkreditasiPerguruan Tinggi			AkreditasiProgram Studi		
	S1	S2	S3	S1	S2	S3
Akreditasi A	2	1	1	2	-	-
Akreditasi B	6	1	-	9	2	-
Akreditasi C	7	-	-	10	1	1
Belum TerAkreditasii	8	-	-	9	-	-

Peluang Investasi Daerah
untuk Industri Keuangan Syariah

No.	Nama Proyek Investasi	Pemangku Kepentingan	Sektor	Tahapan Proyek Investasi	Nilai Perkiraan Investasi (dalam Rupiah)
1	Jakarta Sewerage System Zona 8	Dinas Sumber Daya Air & PD PAL JAYA	Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	Perencanaan dan Persiapan (KPDBU *Solicited*)	13 Triliun
2	LRT-Jakarta	PT Pembangunan Jaya	Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	Persiapan (KPDBU *Unsolicited*)	13 Triliun
3	Kondominium, Gedung Perkantoran dan Apartemen	PT JIEP	Sektor Properti, *Real Estate* dan konstruksi bangunan	-	1.3 Triliun
4	Pergudangan *E-Commerce*	PT JIEP	Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	-	176 Miliar
5	Kondominium, Gedung Perkantoran, Apartemen dan Mall	PT JIEP	Sektor Properti, *Real Estate* dan konstruksi bangunan	-	2.3 Triliun
6	Hotel dan Gedung Perkantoran	PT JIEP	Sektor Properti, *Real Estate* dan konstruksi bangunan	-	367 Miliar
7	Jakpro Waterfront City	PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	Sektor Properti, *Real Estate* dan konstruksi bangunan	-	23 Miliar
8	Pengembangan Berorientasi Transit (Stadion Internasional Jakarta)	PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	-	5,8 Triliun
9	Pengembangan Berorientasi Transit (Pegangsaan Dua)	PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	-	2,2 Triliun
10	LRT Loopline	PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	-	44,1 Triliun (Loopline) 7,5 T (LRT Fase 2A dan 2B)"
11	Fasilitas Pengelola Sampah di Dalam Kota	PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	-	3,6 Triliun (ITF Sunter) ITF lain (masih dalam Studi)

No.	Nama Proyek Investasi	Pemangku Kepentingan	Sektor	Tahapan Proyek Investasi	Nilai Perkiraan Investasi (dalam Rupiah)
12	Pengembangan Komersial di Lebak Bulus	• Perumda Sarana Jaya • Totalindo Eka Persada (TEP) • Kalma Indocorpora	Sektor Properti, *Real Estate* dan konstruksi bangunan	-	± 2.2 Triliun
13	Perumahan yang Terjangkau di Pondok Kelapa	• Perumda Sarana Jaya • Totalindo Eka Persada (TEP) • Kalma Indocorpora	Sektor Properti, *Real Estate* dan konstruksi bangunan	-	± 1.13 Triliun
14	Pengembangan Berorientasi Transit Sentra Primer Tanah Abang	Perumda Sarana Jaya	Sektor Properti, *Real Estate* dan konstruksi bangunan	-	± 19.4 Triliun
15	Pengembangan Lahan di Rorotan	Perumda Sarana Jaya	Sektor Properti, *Real Estate* dan konstruksi bangunan	-	± 2.9 Triliun
16	Pengembangan Lahan di Ujung Menteng	Perumda Sarana Jaya	Sektor Properti, *Real Estate* dan konstruksi bangunan	-	± 1.4 Triliun
17	Perumahan Terjangkau di Pulo Gebang	Perumda Sarana Jaya	Sektor Properti, *Real Estate* dan konstruksi bangunan	-	± 2.2 Triliun
18	Perumahan Terjangkau di Cilangkap	• Perumda Sarana Jaya • Totalindo Eka Persada	Sektor Properti, *Real Estate* dan konstruksi bangunan	-	± 1.2 Triliun
19	Pulomas Office Park (Lahan Pribadi PT Pulo Mas Jaya)	PT Pulo Mas Jaya	Sektor Properti, *Real Estate* dan konstruksi bangunan	-	± 2.8 Triliun
20	Perumahan Equistrian dan Komersial	PT Pulo Mas Jaya	Sektor Properti, *Real Estate* dan konstruksi bangunan	-	± 2.4 Triliun
21	Equestrian Park Junction (Lahan Pribadi PT Pulo Mas Jaya)	PT Pulo Mas Jaya	Sektor Properti, *Real Estate* dan konstruksi bangunan	-	± 2.5 Triliun
22	Pengembangan Berorientasi Transit Area Cipete	PT MRT Jakarta	Sektor Properti, *Real Estate* dan konstruksi bangunan	-	1,5 Triliun
23	Pengembangan Berorientasi Transit Bundaran HI	PT MRT Jakarta	Sektor Properti, *Real Estate* dan konstruksi bangunan	-	1,5 Triliun
24	Proyek MRT Jakarta East West	PT MRT Jakarta	Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	-	57,4 Triliun
25	Perpanjangan MRT Jakarta Lebak Bulus sampai Pondok Cabe (Tangerang Selatan)	PT MRT Jakarta	Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	-	8,5 Triliun

No.	Nama Proyek Investasi	Pemangku Kepentingan	Sektor	Tahapan Proyek Investasi	Nilai Perkiraan Investasi (dalam Rupiah)
26	East West Line – Soekarno Hatta International Airport to Jakarta International Stadium	PT MRT Jakarta	Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	Pra - FS	20,4 Triliun
27	East West Line – Fatmawati to TMII	PT MRT Jakarta	Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	Pra - FS	1,5 Triliun
28	*Cold Storage Facility*	PD Dharma Jaya	Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	Konsep Perencanaan	88 Miliar (Fase 1)) & 353 M(Fase 2))
29	Tanah Abang Logistic Center	Perumda Pembangunan Sarana Jaya	Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	Konsep Perencanaan	Data tidak tersedia
30	NUANSA Pulo Gebang	Perumda Pembangunan Sarana Jaya	Sektor Properti, *Real Estate* dan konstruksi bangunan	Studi Kelayakan	2,3 Triliun
31	*Bonds Refinancing*	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	Sektor Finansial	Diskusi internal	706 Miliar

Green sukuk: Investasi untuk Masa Depan

Dr.Tika Arundina[20]

Pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan, atau ekonomi "hijau", saat ini telah menjadi orientasi dari negara-negara di dunia. Komitmen tersebut tertuang dalam Paris Agreement 2015 yang mencakup kesepakatan untuk menyelamatkan dan melestarikan sumber daya alam serta mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim (OECD, 2011). Meskipun demikian, realisasi ekonomi hijau memerlukan pendanaan yang besar terutama bagi proyek-proyek energi terbarukan. Permasalahan ini kemudian mendorong pemangku kepentingan untuk mengembangkan instrumen keuangan yang khusus digunakan untuk proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip *Environment, Social, and Governnance* (ESG) dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Salah satu instrumen keuangan yang dikembangkan adalah *green bond* dan *green sukuk*. *Green bond* atau Obligasi Hijau merupakan surat berharga yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah untuk mendanai proyek-proyek yang termasuk dalam kategori F (ICMA, 2018). Sementara *green sukuk* adalah instrumen obligasi hijau yang diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Obligasi ini dapat diterbitkan oleh entitas pemerintah dan korporasi, baik perusahaan sektor keuangan maupun non-keuangan untuk mendapat pendanaan bagi proyek-proyek ramah lingkungan. Meskipun memiliki karakteristik keuangan yang sama dengan obligasi pada umumnya, penerbitan *green bond* harus mengacu pada sertifikasi tertentu, seperti Prinsip-Prinsip Obligasi Hijau atau *Green bond Principles* (GBP).

Di Indonesia, selain *green bond*, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan juga telah menerbitkan tiga seri instrumen obligasi hijau dengan struktur *green sukuk*. *Sovereign green sukuk* ini merupakan yang pertama di dunia. *Green sukuk* global ini diterbitkan pada tahun 2018 senilai USD 1,25 miliar. Penerbitan pertama ini mengalami *oversubscription* (kelebihan permintaan) sebesar 2,5 kali nilai penawaran dengan diversifikasi investor yang luas, baik dari segi geografi maupun tipe investor, termasuk sebanyak 29% didistribusikan untuk investor *green* (yaitu investor yang hanya menempatkan investasinya pada instrumen ramah lingkungan). Selanjutnya, penerbitan kedua dilakukan pada tahun 2019 dengan nilai penerbitan USD 750 juta yang juga menyasar target investor institusi internasional. *Pricing* juga berhasil dilakukan dengan sangat baik, dimana dapat dilakukan tightening yang signifikan dari *initial price guidance*, dengan *final yield* sebesar 3.75%.

Pada bulan November 2019, Pemerintah Republik Indonesia mulai juga memperbesar inklusi keuangan hijau kepada investor ritel dengan menerbitkan *green sukuk* ritel melalui seri ST-006 yang merupakan jenis instrumen *green sukuk* ritel pertama di dunia. Secara spesifik, sukuk ini hanya menargetkan penjualan kepada investor ritel domestik di wilayah Republik Indonesia. Penerbitan ini berhasil menyerap pada kisaran Rp 1.4 triliun dengan jumlah total investor sebanyak 7,735 orang dengan tingkat tingkat imbalan sebesar 6.75% (*floating with floor*).

Hal yang menarik adalah investor dari *green sukuk* ritel ST-006 didominasi oleh generasi milenial yaitu sebanyak 3.950 investor atau sebesar 51.07% dari total seluruh investor. Sementara itu, jika dilihat jumlah investor dari kalangan usia lainnya, Generasi Z (dibawah 19 tahun) yang berinvestasi pada ST-006 adalah sebanyak 21 investor (Rp3.56 miliar) dengan rata-rata pembelian Generasi Z sebesar Rp169 juta. Selanjutnya, berdasarkan jenis pekerjaannya, pegawai swasta mendominasi pemesanan *green sukuk* ritel ST-006 dari sisi jumlah investor sebanyak 2.822 investor (36.48%), sedangkan wiraswasta mendominasi dari sisi *volume* sebesar Rp535.49 miliar (36.68%).

[20]Kepala Prodi Ilmu Ekonomi Islam FEB Universitas Indonesia

Adapun berdasarkan profil investor dari segi wilayah, pada *green sukuk* ritel ST-006, Indonesia Bagian Barat (selain DKI Jakarta) masih mendominasi pemesanan baik dari sisi *volume* investor (59.03%) maupun dari sisi total *volume* (46.37%). Dalam konteks penambahan investor baru, *green sukuk* ritel ST-006 mampu menambah 2,908 investor baru, di mana 56% diantara investor baru tersebut merupakan Generasi Milenial. Kondisi yang demikian sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mendorong investor milenial menjadi *smart investor* sekaligus investor yang peduli terhadap lingkungan.

Keberadaaan *green sukuk* ritel ini membawa dampak yang positif dari berbagai aspek. Pertama, telah diketahui bahwa konsep ekonomi dan keuangan syariah sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan yang menekankan pada etika, keadilan, dan kesetaraan. Oleh karena itu, instrumen-instrumen ekonomi keuangan syariah termasuk *green sukuk* ritel memberikan dampak positif dalam mendukung berbagai aktivitas produktif, redistribusi kesejahteraan kepada masyarakat kurang mampu sekaligus mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Selain itu, instrumen *green sukuk* ritel ini tidak hanya merupakan kebijakan fiskal negara yang meningkatkan pendapatan negara namun juga berdampak pada penurunan emisi karbon. Penerbitan *green sukuk* juga mendukung komitmen Indonesia untuk mencapai beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, antara lain energi yang bersih dan terjangkau, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, industri, inovasi dan infrastruktur, kota dan komunitas berkelanjutan, serta aksi mengatasi perubahan iklim.

Penerbitan *green sukuk* ritel juga merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk bergantung pada sumber pembiayaan dalam negeri. Melakukan investasi pada *green sukuk* retail merupakan salah satu bentuk kontribusi warga negaranya mewujudkan cita-cita kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Dalam hal ini, salah satu keunggulan *green sukuk* domestik adalah terhindar dari risiko nilai tukar. Berbeda dengan *green sukuk* global yang diterbitkan dengan denominasi US Dollar, *green sukuk* ritel dibuat dengan denominasi Rupiah. Dengan memberdayakan dana dari masyarakat, pemerintah terhindar dari risiko nilai tukar apabila terjadi gejolak nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, khususnya US Dollar. Sehingga dengan fitur ini, *green sukuk* ritel domestik juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan di dalam negeri.

Selain itu, *green sukuk* ritel ini dapat dijadikan acuan (*benchmark*) bagi penentuan nilai instrumen keuangan lainnya, khususnya sukuk atau obligasi dengan orientasi *green*. Hal ini disebabkan *yield curve* yang dibentuk oleh sukuk dapat menjadi acuan perusahaan untuk menentukan yield sukuk yang diterbitkan oleh korporasi. Acuan ini juga dapat digunakan investor untuk melakukan penilaian (valuasi) dan analisis atas harga wajar suatu sukuk dengan tingkat risiko tertentu. Tidak hanya itu, adanya inisiatif pemerintah untuk menerbitkan instrumen berbasis *green* dapat memberikan inspirasi dan dorongan kepada sektor swasta untuk ikut berpartisipasi menerbitkan instrumen serupa. Misalnya saja, PT Sarana Multi Infrastuktur ditahun yang sama mengikuti jejak pemerintah menerbitkan *corporate green bond* pertama. Oleh karena itu, dengan diterbitkan *green sukuk* oleh pemerintah ini diharapkan dapat memicu perusahaan swasta atau daerah untuk menerbitkan *green sukuk*. Dampak lainnya adalah terkait literasi dan inklusi pasar modal syariah di Indonesia. Berdasarkan laporan survei indeks literasi dan inklusi keuangan OJK tahun 2016, tingkat literasi dan inklusi keuangan untuk pasar modal di Indonesia masih sangat rendah, yaitu pada level 4.44% untuk literasi keuangan dan 1.25% untuk tingkat inklusi pasar modal. Sementara, untuk pasar modal syariah, tingkat literasi dan inklusi masyarakat berada pada level yang lebih rendah lagi, yaitu sebesar 0.02% untuk literasi pasar modal syariah dan inklusinya sebesar 0.01%.

Masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi pasar modal syariah di tanah air, mendorong pemerintah untuk mengembangkan sosialisasi dan menambah instrumen investasi di pasar modal syariah. Melalui *green sukuk* ritel ini, diharapkan dapat memperluas basis investor di dalam negeri kepada investor yang memiliki preferensi terhadap pelestarian lingkungan dan SDG's sehingga dapat meningkatkan inklusi pasar modal syariah di Indonesia. Dengan promosi dan sosialisasi yang dilakukan secara masif, diharapkan literasi pasar modal syariah, khususnya *green sukuk* juga akan meningkat. Sosialisasi budaya investasi ini juga dapat disinergikan dengan budaya peduli lingkungan hidup. Kepedulian terhadap lingkungan dapat mulai dikampanyekan menjadi budaya yang melekat di kehidupan sehari-hari dan mencakup berbagai sisi mulai dari memilih makanan, pakaian, menggunakan produk ramah lingkungan untuk kebutuhan sehari-hari sampai dengan memilih investasi yang berbasis *green*. Jika investasi *green* telah menjadi pilihan dan budaya masyarakat, maka dorongan pihak pemerintah dan swasta untuk pembangunan infrastruktur ramah lingkungan menjadi semakin besar juga. Sehingga komitmen Indonesia untuk memitigasi perubahan iklim dan membangun bangsa yang berketahan nasional akan lebih cepat terwujud.

Wawancara
Kepala Instansi di Provinsi DKI Jakarta

Bagaimana visi, rencana, dan program-program terkait ekonomi syariah?

Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Pada umumnya, Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum memiliki visi, rencana, dan program-program terkait sektor ekonomi dan keuangan syariah secara khusus. Pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah belum menjadi fokus baik itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
Namun, untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Usaha Milik Daerah PT Bank DKI sudah memiliki unit usaha syariah yaitu Bank DKI Syariah yang telah beroperasi sejak 16 Maret 2004.
Pemprov DKI Jakarta juga sudah menerbitkan berbagai peraturan untuk mendorong perkembangan sektor syariah, yaitu:

a. Peraturan Gubernur Nomor 158 Tanggal 19 Desember 2013 Tentang Tata Cara Sertifikasi Halal Restoran dan Non Restoran,
b. Keputusan Gubernur Nomor 1717 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Penerimaan PT Bank Syariah Mandiri sebagai tempat penerimaan pembayaran Pajak Daerah secara elektronik,
c. Surat Edaran Badan Kepegawaian Daerah Nomor 13/SE/2018 Tanggal 24 September 2018 Tentang Opsi Penggunaan Rekening Bank DKI syariah sebagai Rekening Pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Daerah.

Selain itu, kami juga beberapa kali menyelenggarakan dan turut berpartisipasi dalam berbagai acara bertema syariah, seperti:

- Muslim Fashion Festival Indonesia (MUFFEST) 2019
- Muslim LifeFest 2019
- Islamic Book Fair 2019
- Ramadhan Jazz Fest. 2019
- Hijrahfist 2019
- Halal Indonesia Expo
- Jakarta Muharam Festival 2019
- Indonesia Shari'a Economic Festival
- Pameran Pariwisata ramah Muslim
- Jakarta Halal Things 2019

Kami juga memberikan pendampingan kepada para pelaku UMKM yang tergabung dalam Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (Jakpreneur) untuk melalukan pendaftaran sertifikasi halal

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta mengampu tiga urusan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat yang sifatnya cukup strategis yaitu urusan Perindustrian, Urusan Perdagangan dan Urusan Koperasi dan UKM. Dalam pelaksanaan tugasnya, turut mendukung Visi Pemprov DKI Jakarta 2017-2022 yaitu “Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”. Visi ini menggambarkan bahwa keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga Jakarta menjadi fondasi penting dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan fisik seperti infrastruktur yang megah serta penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, namun juga pembangunan manusia yang mencakup segala upaya perubahan positif untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman, kesejahteraan, dan kebahagiaan semua warga. Pendekatan pembangunan fisik dan manusia ini harus dilingkupi dengan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kebudayaan serta keterlibatan masyarakat. Tidak hanya sekedar berpartisipasi,

masyarakat menjadi motor penggerak utama pembangunan yang ikut menentukan arah gerak pembangunan Jakarta ke depan

Sedangkan Misi Pemprov DKI Jakarta 2017-2022 adalah :

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan

Berdasarkan uraian misi diatas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam pelaksanaan tugasnya mengacu kepada misi nomor 2 dan 4.

Terkait dengan pengembangan industri halal dan koperasi syariah, beberapa hal yang sudah dilakukan yaitu sebagai berikut:

a. Fasilitasi sertifikasi halal bagi IKM binaan.

Melalui program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (Jakpreneur), Dinas PPKUKM menargetkan sebanyak 1.500 peserta pelatihan bisa mendapatkan sertifikasi halal di tahun 2020. Proses sertifikasi halal melibatkan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetik Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI. Mekanisme dan penilaian dalam proses sertifikasi halal ini di antaranya, suplai, uji bahan baku, proses pengolahan, sanitasi, dan peninjauan lokasi. Melalui sertifikasi halal ini, produk para Jakpreneur akan semakin memiliki jaminan kualitas, peningkatan nilai jual dan memperoleh kepercayaan masyarakat atau konsumen. Adapun total IKM yang sudah difasilitasi sertifikasi halal sejak tahun 2016 berjumlah kurang lebih 1.575 IKM.

b. Pengembangan Koperasi Syariah

Jumlah Koperasi Syariah di DKI Jakarta yang merupakan binaan Dinas PPKUKM yaitu sejumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) koperasi atau hanya sebesar 1,6 persen dari total keseluruhan koperasi binaan Dinas PPKUKM (total koperasi 8.782). Dalam hal pengembangan, Dinas PPKUKM memberikan pembinaan kepada Koperasi Syariah yang merupakan binaan Dinas PPKUKM. Adapun bentuk pembinaan yang diberikan yaitu sosialisasi kebijakan terkait koperasi.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

1. Mendorong DKI Jakarta sebagai Pusat Destinasi Pariwisata ramah Muslim Dunia.

DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia memiliki potensi besar sebagai pusat wisata ramah Muslim dunia hal ini karena Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, aksesibilitas, infrastruktur yang memadai dan lengkap dimiliki DKI Jakarta dibandingkan dengan kota lain di Indonesia, keindahan kota dan pesona alam Kepulauan Seribu merupakan modal besar untuk menjadikan Jakarta sebagai pusat Destinasi Pariwisata ramah Muslim berkelas internasional. Langkah menuju DKI Jakarta sebagai pusat pariwisata ramah Muslim dunia harus didukung dengan menghadirkan semua syarat dan indikator standar internasional oleh karena itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak terkait harus bekerja sama dan sinergi untuk memenuhi standar tersebut untuk menjadikan DKI Jakarta sebagai pusat destinasi pariwista halal dunia.

2. Pentingnya dukungan kebijakan dan peraturan.

Kebijakan dan regulasi yang mendukung terkait dengan pariwisata ramah Muslim merupakan syarat utama dalam mengembangkan pariwisata ramah Muslim di DKI Jakarta sebagai pedoman dalam menjalankan dan mengembangkan pariwisata ramah Muslim tanpa dukungan kebijakan yang memihak akan sulit bagi pelaku

usaha dan industri mengembangkan pariwisata ramah Muslim. Dengan adanya kebijakan dan peraturan terkait dengan pariwisata ramah Muslim dari Pemerintah DKI Jakarta juga akan memaksa dan mewajibkan pihak terkait melakukan langkah-langkah pengembangkan pariwisata ramah Muslim. Dalam regulasi tersebut nanti diharapkan dapat mengatur seperti pentingnya sosialisasi, indikator pengembangan, dan sertifikasi halal. Di samping itu, pengembangan pariwisata ramah Muslim selain dukungan kebijakan diperlukan juga dukungan teknis dari pemprov DKI lintas sektoral dan pihak swasta terkait. Kebijakan yang dibutukan seperti diterbitkannya Peraturan Gubernur tentang Pariwisata ramah Muslim dan perangkat kebijakan daerah lainnya yang mendukung.

3. Peningkatan SDM Pelaku Usaha di sektor Pariwisata

Peranan SDM memiliki sangat penting dalam menentukan kesuksesan industri pariwisata ramah Muslim berupa pelayanan service excelent kepada wisatawan oleh karena itu training dan pelatihan pelayanan pariwisata ramah Muslim harus dilakukan kepada SDM industri pariwisata ramah Muslim baik dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dan dapat bekerja sama dengan universitas dan asosiasi.

4. Gencar melakukan sosialisasi, promosi, branding, positioning dan investasi pariwisata ramah Muslim Ke Tingkat Internasional

Kegiatan sosialisasi, promosi, branding, positioning dan investasi pariwisata ramah Muslim saat ini masih dirasakan kurang baik yang skala nasional maupun internasional sehingga perlu ditingkatkan dan dilakukan secara berkelanjutan. Dalam meningkatkan informasi dan pemahaman akan destinasi wisata ramah Muslim DKI Jakarta kepada masyarakat dan pihak terkait maka kegiatan sosialisasi dan promosi destinasi sangat penting dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan bekerja sama dan sinergi dengan pihak terkait seperti universitas, asosiasi, pelaku usaha industri pariwisata yang dilakukan secara berkala baik dalam bentuk seminar, event, FGD dan kegiatan lainnya yang sifatnya menyampaikan informasi. Pemerintah Provinsi harus ikut berperan aktif dalam event-event Halal Tourism baik Nasional ataupun Internasional serta aktif melakukan promosi keluar negeri dengan bekerja sama dengan berbagai pihak di luar negeri seperti memanfaatkan fungui Kantor Kedubes RI di luar negeri, selain itu juga promosi investasi dan melakukan kegiatan forum bisnis baik di dalam maupun di luar negeri. Sementara itu, media promosi, branding dan sosialisasi dapat dilakukan dengan membuat Konten berupa tulisan, gambar, audio, dan video, yang dituangkan dalam berbagai media mainstream.

5. Menguatkan Produk Pariwisata Ramah Muslim

Dukungan pengembangan produk pariwisata ramah Muslim dengan paket-paket kunjungan wisata mulai yang sifatnya singkat dan jangka panjang. Penyusunan Paket Wisata ramah Muslim DKI Jakarta yang terintegrasi dalam Sembilan Destinasi Wisata Unggulan DKI Jakarta harus segera disusun sehingga para wisatawan dapat menjadikan kunjungan ke destinasi halal tersebut sebagai rujukan dan informasi.

6. Membuat Program Pariwisata ramah Muslim Terpadu di setiap SKPD dan BUMD DKI Jakarta

Dalam rangka mendorong percepatan pariwisata ramah Muslim di DKI Jakarta perlu keterlibatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BUMD DKI Jakarta yang sifatnya wajib bukan sukarela atau volunteer sehingga dengan sendirinya SKPD dan BUMD akan membuat program yang mendukung terkait pariwisata ramah Muslim. Melalui langkah program terpadu tersebut maka akan membuat perkembangan pariwisata ramah Muslim menjadi lebih cepat dan terarah.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

1. Visi "Jakarta Sebagai Pusat Investasi Halal Dunia", hal ini didukung oleh antara lain:
   - Aksesibilitas dan infrastruktur yang lengkap dan memadai;
   - Pembenahan fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung iklim investasi halal;
   - Penetapan KNEKS tentang Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu provinsi untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

2. Rencana Aksi Program Kerja antara lain:
- Mengajukan Peraturan Gubernur Tentang Investasi Halal;
- Menyusun Masterplan & Buku Pedoman Investasi Industri Halal DKI Jakarta;
- Melakukan Pelatihan Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Kepada Pelaku Usaha Industri Halal oleh SKPD terkait;
- Membuat Applikasi Dan Data Center Industri Halal Terintegrasi Dalam Smart City;
- Melakukan Kegiatan Promosi Investasi Halal Ke Malaysia, Singapura, Turki, Timur Tengah, Eropa;
- Melakukan Kegiatan Business Matching International Halal Investment Forum di DKI Jakarta;
- Menyusun tupoksi Tim Percepatan Badan Investasi Halal DKI Jakarta.

3. Rencana Program-program antara lain:
- Penyusunan Kebijakan dan landasan hukum tentang investasi di sektor industri halal;
- Pembentukan Tim Percepatan Badan Investasi Halal DKI Jakarta;
- Clustering Pendataan Pelaku U saha dan Stakeholder investasi halal;
- Pengembangan infrastruktur dan ekosistem investasi halal;
- Pembentukan kawasan industri halal;
- Pengembangan industri halal berbasis digital;
- Sinergi BUMD pangan, pariwisata, keuangan syariah dalam pengembangan industri halal;
- Sinergi dengan ZISWAF dengan pelaku UMKM untuk bantuan permodalan, pembiayaan labelisasi halal.

Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

- Visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta yakni menjadi KPwBI yang kredibel dalam mendukung kebijakan Bank Indonesia dan berkontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi daerah dan nasional.
- Terkait visi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang dilakukan BI maka merujuk pada visi Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah yakni mendukung terwujudnya Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.
- Untuk mencapai visi dimaksud, BI berfokus pada 3 strategi utama yakni
  - Pemberdayaan ekonomi syariah,
  - Pendalaman keuangan syariah, dan
  - Penguatan riset, asesmen, dan edukasi.
- Dari ketiga strategi tersebut, KPwBI DKI Jakarta berperan pada pilar 1 dan 3 berupa beberapa program, antara lain:
  - Pengembangan halal value chain bagi UMKM
  - Fasilitasi dan pendampingan pemenuhan sertifikasi halal bagi UMKM
  - Pengembangan Industri Kreatif Syariah (IKRA)
  - Pengembangan kemandirian ekonomi pondok pesantren
  - Pengembangan pariwisata ramah Muslim dan pulau berdikari

Edukasi ekonomi dan keuangan Syariah

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 1 DKI Jakarta dan Banten

OJK KR01 mendukung penuh pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi DKI Jakarta secara khusus untuk perbankan syariah sesuai kewenangan yang dimiliki dimana OJK KR01 senantiasa melakukan pengawasan aktif kepada BPR Syariah di bawah wilayah kerjanya dan melakukan tindakan-tindakan dalam koridor pengawasan yang diperlukan untuk menjaga perbankan syariah tetap sehat, kuat dan dapat tumbuh secara berkelanjutan agar dapat berkontribusi aktif untuk perekonomian di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu OJK KR01 juga memantau dan mendorong pemenuhan permodalan BPR Syariah sesuai POJK Nomor 66/POJK.03/2016 dimana pada akhir Desember 2020 seluruh BPRS diminta memenuhi modal inti sebesar Rp3 miliar atau Rp6 miliar (sesuai tier BPRS saat POJK tersebut diberlakukan) dalam rangka penguatan permodalan BPRS baik melalui pertumbuhan organik maupun melalui merger, konsolidasi atau akuisisi. Pada tahun 2020, OJK KR01 juga telah melakukan inisiasi pembentukan Bank Wakaf Mikro yang pertama di Provinsi DKI Jakarta dimana saat ini belum ada Bank Wakaf Mikro di Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu OJK KR01 telah mengadakan penjajakan dengan salah satu Pondok Pesantren di Provinsi DKI Jakarta dan saat ini masih dalam proses penghimpunan sumber modal untuk pembentukan Bank Wakaf Mikro tersebut.

Bagaimana peluang pengembangan sektor ekonomi syariah, industri halal, dan sektor keuangan syariah?

Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Peluang pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi DKI Jakarta sangat besar. Penduduk DKI Jakarta yang mayoritas beragama Islam merupakan pangsa pasar yang sangat potensial. Kebutuhan akan produk-produk halal dan keuangan syariah bukan hanya menjadi kebutuhan tetapi sudah menjadi gaya hidup, tidak hanya bagi masyarakat Muslim namun juga non-Muslim. Jika dapat terus dikembangkan, masyarakat tidak perlu mencari produk-produk di tempat lain namun dengan mudah mendapatkan di Jakarta. Potensi ekonomi halal di Jakarta sebesar US$ 62.53 miliar dengan proporsi terbesar berasal dari sektor makanan halal, pakaian muslim, farmasi, dan kosmetik halal, wisata ramah Muslim, media dan rekreasi halal, serta keuangan Islam.

Beberapa kebijakan terkait sektor ekonomi syariah, industri halal, dan keuangan syariah di DKI Jakarta antara lain:

a. Surat Edaran Kepala BKD tanggaal 24 September 2018 No. 13/SE/2018 tentang Opsi Penggunaan Rekening Bank DKI Syariah sebagai Rekening Pebayaran Gaji dan atau Tunjangan Kinerja Derah
b. Sertifikasi halal untuk menjamin produk aman halal sesuai syariat Islam mengacu pada UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Perkembangan jumlah IKM bersertifikasi halal di DKI Jakarta mengalami peningkatan yang cukup pesat selama 5 tahun terakhir, yaitu 75 IKM pada tahun 2015 menjadi 1500 IKM pada tahun 2020
c. Regulasi terkait pariwisata ramah Muslim di Provinsi DKI Jakarta yaitu Perda No. 2 tahun 2018 tertang Perpasaran, pasal 49 ayat 3 menyatakan dalam hal toko swalayan menjual barang yang tidak halal maka wajib ditempatkan dalam tempat dan diberikan label/papan informasi yang mudah dilihat konsumen, serta Pergub No. 158 tahun 2013 tentang Tata Cara Sertifikasi Halal Restoran dan Non Restoran.
d. Pergub terkait Pengembangan Pariwisata ramah Muslim sedang dalam proses, pergub ini ditujukan untuk meningkatkan kunjungan dan pelayanan wisatawan Muslim dari dalam dan luar negeri.

Peluang pada sektor pariwisata ramah Muslim yaitu infrastruktur dan aksesibilitas cukup baik dan lengkap, destinasi wisata yang beragam (alam, sejarah budaya, dan buatan), dan mayoritas masyarakat DKI Jakarta beragama Islam sehingga fasilitas ibadah tersedia dalam jumlah yang banyak.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan satu juta turis muslim mancanegara berkunjung ke ibu kota pada tahun 2020. Karena itu, Pemprov DKI akan merancang wisata ramah Muslim. Salah satu yang harus dikembangkan untuk mendukung rencana tersebut yaitu program fasilitasi sertifikasi halal bagi UKM/IKM binaan, dengan harapan semakin banyak UKM/IKM yang memiliki sertifikasi halal, dapat menarik minat wisatawan untuk dapat berkunjung ke DKI Jakarta. Selain itu, dalam rangka mempercepat pertumbuhan industri halal di DKI Jakarta, Dinas PPKUKM juga melakukan pembinaan terhadap koperasi syariah yang ada diwilayah DKI Jakarta. Dengan demikian, peluang untuk pengembangan industri halal dan koperasi syariah di DKI Jakarta masih cukup besar karena merupakan rangkaian program pendukung wisata ramah Muslim di DKI Jakarta.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data Global Muslim Travel Index (GMTI), peringkat Indonesia dari tahun ke tahun konsisten naik dengan peringkat skor cenderung selalu membaik selama tahun 2015-2019 sebagai berikut:

- Tahun 2015 - Peringkat ke enam, skor 67.5
- Tahun 2016 - peringkat ke empat - skor 70.6
- Tahun 2017 - peringkat ke tiga , skor 72.6
- Tahun 2018 - Peringkat ke dua, skor 72.8
- Tahun 2019 - peringkat pertama skor 78

TOP 10 DESTINASI NEGARA OKI

RANK	GMTI 2019 RANK	DESTINATION	SCORE	CHANGE
1	1	Malaysia	78	0
1	1	Indonesia	78	1
3	3	Turkey	75	1
4	4	Saudi Arabia	72	1
5	5	United Arab Emirates	71	-3
6	6	Qatar	68	0
7	7	Morocco	67	3
8	8	Bahrain	66	0
8	8	Oman	66	1
10	10	Brunei	65	1

Sumber: Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Mastercard-Crescent Rating meluncurkan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019 yang mengacu pada standar global Global Muslim Travel Index (GMTI) dalam melakukan kajian dan penilaian kepada sepuluh detinasi wisata ramah Muslim yang telah ditetapkan oleh pemerintah dimana sepuluh destinasi tersebut yaitu Aceh, Riau dan Kepulauan Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur (Malang Raya), Lombok, dan Sulawesi Selatan (Makassar dan sekitarnya). Sementara itu, berdasarkan dengan laporan Ranking of the Provinces on IMTI 2019 dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019, posisi DKI Jakarta berada pada rangking ke – 4 masih kalah dari Provinsi NTB (Lombok), Aceh, serta Riau & Kepulauan Riau.

PERINGKAT IMTI 2019 BERDASARKAN PROVINSI

DESTINATION	IMTI 2018 SCORE	IMTI 2018 RANK	IMTI 2019 SCORE	IMTI 2019 RANK	CHANGE
Lombok (West Nusa Tenggara)	58	1	70	1	+12
Aceh	57	2	66	2	+9
Riau & Riau Islands	50	7	63	3	+13
Jakarta	56	3	59	4	+3
West Sumatera	55	4	59	5	+4
West Java	51	6	52	6	+1
Yogyakarta	51	5	52	7	+1
Central Java	47	9	49	8	+2
East Java (Malang Area)	48	8	49	9	+1
South Sulawesi (Makassar & Surroundings)	30	10	33	10	+3

Sumber: Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019

Penetapan *rangking* tersebut berdasarkan atas pada 4 faktor penilaian utama yang juga digunakan pada peringkat global antara lain: Kemudahan Akses ke tujuan *(Access)*; Komunikasi Internal dan Eksternal oleh

tujuan *(Communication);* Lingkungan di tempat tujuan (*Environment);* dan Layanan yang disediakan oleh tujuan *(Services).* Dari ke Empat Kriteria di dalam IMTI, yaitu: Access, Comunication, Environment and Service, Jakarta mendapatkan nilai terbesar di dalam kategori Access di tahun 2018 dan 2019 dengan nilai 96.

Posisi DKI Jakarta pada rangking 4 dalam 10 destinasi halal di Indonesia, apabila melihat berbagai potensi dan peluang DKI Jakarta sesungguhnya masih dapat ditingkatkan, hal ini karena DKI Jakarta didukung oleh berbagai kelengkapan fasilitas infrastruktur yang memadai dan jasa yang beragam dan lengkap di DKI Jakarta. DKI Jakarta memiliki kekuatan/potensi serta peluang untuk bersaing diantaranya:

Kekuatan:

- Terdapat SHIA sebagai bandara internasional
- KI Jakarta memiliki moda transportasi terlengkap di Indonesia
- Sebagai ibukota negara, DKI Jakarta didukung pelayanan publik yang maksimal, khususnya dalam hal keamanan, kebersihan dan kesehatan
- Mayoritas penduduk Jakarta adalah Muslim dengan berbagai jenis tradisi/budaya bernuansa Islami dan terdapat beberapa komunitas Kampung Arab
- Mayoritas Masjid di perkotaan cukup layak bagi wisatawan
- Bandara dan tempat umum selalu dilengkapi mushola
- Terdapat cukup banyak situs peninggalan Islam

Peluang:

- Penilaian GMTI 2019, Indonesia menjadi destinasi wisata ramah Muslim nomor 1 di dunia bersama dengan Malaysia.
- Tren kunjungan dari negara Muslim cenderung meningkat.
- DTW yang melimpah namun kurang didorong untuk mendukung pariwisata ramah Muslim.
- Industri pariwisata dengan sektor usaha yang variaitif dan jumlah pelaku usaha yang banyak dengan skala pelayanan yang luas dan global, yang mayoritas mendukung pengembangan program pariwisata ramah Muslim di DKI Jakarta.
- Mayoritas pusat perbelanjaan dilengkapi mushola, hanya perlu peningkatan metode informasi bagi pengunjung.
- Terdapat banyak kegiatan bernuansa Islami yang dapat diarahkan menjadi daya tarik tambahan bagi wisman Muslim.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

1. DKI Jakarta memiliki BUMD yang bergerak dalam pembiayaan Syariah yaitu Bank DKI Syariah;
2. DKI Jakarta memiliki BUMD bidang pangan yaitu Pasar Jaya, Dharma Jaya dan Food Station yang dikembangkan sebagai tujuan investasi *halal food* atau pendorong ekosistem *halal food*;
3. Terdapat Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur yang saat ini sedang mengembangkan Kawasan Halal Hub oleh PT. JIEP;
4. Terdapat restoran besar yang tersebar di kawasan DKI Jakarta yang berpotensi dijadikan investasi restoran halal;
5. Terdapat sekitar kurang lebih 200 destinasi wisata yang meliputi Wisata Alam, Wisata Sejarah, dan Budaya Keagamaan, Wisata Buatan Manusia, Wisata Urban *Lifestyle* (Belanja, Fesyen, dan Kuliner) yang dijadikan sebagai tujuan investasi pariwisata ramah Muslim;
6. DKI Jakarta memiliki sekitar 700 mal atau pusat perbelanjaan yang digunakan sebagai potensi mendukung destinasi tujuan investasi belanja fesyen Muslim;
7. Terdapat 536 hotel di Jakarta yang digunakan untuk mendukung konsep wisata ramah Muslim yang didorong dengan insentif pemerintah sehingga pelaku usaha hotel dapat menarik investor untuk menjadikan tujuan investasi hotel *halal restaurant and kitchen*;
8. Terdapat bandara dan pelabuhan di DKI Jakarta yang didorong menjadi tujuan investasi *halal logistic*;
9. Jakarta sebagai Ibukota negara, mempunyai kelebihan dari sisi aksebilitas, yaitu adanya Bandara International Soekarno Hatta (2 juta pengunjung per tahun), infrastruktur transportasi darat yang sudah terintegrasi mulai dari Busway, MRT, KRL, Taksi, dan ojek *online*.

Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Peluang pengembangan sektor ekonomi syariah dan industri halal di DKI Jakarta sangat besar, mengingat jumlah penduduk muslim yang besar, kesadaran akan produk halal yang semakin meningkat, dan besarnya potensi ZISWAF untuk percepatan perekonomian apabila berjalan optimal.
Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia didominasi sektor riil sehingga apabila dikembangkan akan menjadikan perekonomian nasional yang lebih resilien.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 1 DKI Jakarta dan Banten

Peluang pengembangan sektor keuangan khususnya perbankan Syariah masih cukup besar mengingat mayoritas penduduk Provinsi DKI Jakarta beragama Islam bahkan keuangan syariah seharusnya juga dapat menjadi solusi keuangan untuk konsumen non-muslim.

Bagaimana tantangan utama apa yang saat ini dihadapi dalam mengembangkan sektor ekonomi syariah, industri halal, dan sektor keuangan syariah?

Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Belum terdapat Perda/Pergub khusus terkait industri halal ataupun alokasi yang cukup besar di APBD dan belum ada kawasan khusus terkait perekonomian syariah. Adapun saat ini terdapat kegiatan pemberian sertifikat halal untuk para IKM yang dianggarkan di Dinas PPKUKM dan ada usulan dari PT. JIEP untuk mengembangkan kawasan tersebut menjadi Hub Kawasan Industri Halal. Dibutuhkan komitmen dari Kepala Daerah untuk membangun kawasan industri halal.

a. Tantangan pada sektor pariwisata ramah Muslim antara lain: (i) daerah atau provinsi lain sedang giat mengembangkan pariwisata ramah Muslim sehingga apabila DKI Jakarta lambat dalam prosesnya segmen pasar ini dapat diambil oleh daerah lain; (ii) belum adanya regulasi dan insentif untuk mendukung pariwisata ramah Muslim; kurangnya branding dan promosi wisata ramah Muslim; (iii) belum adanya masterplan pariwisata ramah Muslim di DKI Jakarta; serta belum banyaknya usaha pariwisata yang bersertifikat halal.
b. Jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi halal: (i) dari sekitar 300 hotel berbintang, 1 hotel telah tersertifikasi halal; (ii) dari sekitar 4000 restoran, 510 telah tersertifikasi halal; (iii) dari sekitar 50 *family spa* belum ada yang tersertifikasi halal; serta (iii) belum adanya sertifikasi halal bagi SDM Pariwisata.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

Tantangan Pengembangan Industri Halal:
Fasilitasi pemasaran bagi IKM yang masih belum optimal, hal ini ditindaklanjuti dengan cara menjalin kerja sama dengan *market place*, perusahaan *start up*, dan perguruan tinggi.

Tantangan Pengembangan Koperasi Syariah:
a. Tipologi masyarakat Indonesia yang ingin menginvestasikan uangnya dilembaga dengan tujuan profit oriented, hal ini kurang sesuai dengan tujuan utama koperasi syariah yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota bukan profit oriented
b. Adanya persyaratan Dewan Pengawas Koperasi Syariah sebagai bagian struktur koperasi yang mana cukup memberatkan mengingat DPKS harus disertifikasi oleh MUI
c. Kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk dan plural dari berbagai suku dan agama, sehingga proses transformasi koperasi konvensional ke koperasi syariah tidak mudah.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

Berikut analisis tantangan utama yang dihadapi saat ini dalam mengembangkan Sektor Pariwisata ramah Muslim di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kelemahan dan ancaman yang dimiliki.

Kelemahan:
- Hanya sebagian dari 30 negara sumber wisatawan Muslim dunia berstatus visa on arrival (VoA).
- Buku Panduan berbahasa Arab masih terbatas.
- Pengadaan sosialisasi/pelatihan wisata ramah Muslim masih terbatas.
- Promosi ke negara sumber wisman Muslim masih terbatas.
- SDM bersertifikasi melimpah, namun minim pengetahuan tentang pariwisata ramah Muslim.

- Jaringan wifi terbatas di ruang semi-publik.
- Restoran bersertifikat halal masih terbatas dan informasi restoran halal juga terbatas.
- Hotel bersertifikat syariah masih terbatas.
- Terdapat cukup banyak Spa khusus wanita yang tersebar di DKI Jakarta, namun yang berlabel halal masih terbatas.

Ancaman:

- Promosi digital terselenggara cukup masif di media sosial, namun didominasi masyarakat umum dan kurang terarah pada tema wisata ramah Muslim.
- Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, penduduk Indonesia menjadi sasaran promosi wisata ramah Muslim negara lain.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perspektif Wisata ramah Muslim masih harus dibangun dan dikembangkan terus kepada masyarakat karena masih ada pemahaman masyarakat yang menganggap pariwisata ramah Muslim merupakan kegiatan Islamisasi dan ketakutan akan isu Islamfobia, sementara pariwisata ramah Muslim mengandung nilai-nilai yang bersifat universal yang meliputi bersih, sehat, higenis, nyaman, tertib, dan nilai tambah *(added value)* pariwisata sehingga pariwisata ramah Muslim bukan bagian dari Islamifobia dan bukan kegiatan Islamisasi yang tidak bertentangan dengan tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi tentang pemahaman pariwisata ramah Muslim kepada pelaku usaha dan *stakeholder* pariwisata harus terus ditingkatkan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

1. Di Indonesia, pengeluaran individu Muslim per tahun untuk membeli produk halal hanya sebesar US$ 1,330, Malaysia lebih unggul dengan US$ 3,507. Sedangkan pengeluaran setiap Muslim untuk membeli produk halal paling tinggi yaitu di Singapura dengan US$ 17,511.
2. Kompetisi dengan negara tetangga yang sudah lebih dahulu mengembangkan industry halal seperti Thailand (dapur halal), Korea Selatan (Kosmetik Halal), Brazil (Unggas Halal) dan Jepang (Pariwisata ramah Muslim);
3. Masih rendahnya permintaan produk halal lokal maupun luar negeri;
4. Masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal;
5. Keterbatasan sumber daya pelaku usaha kecil dan mikro tentang industri halal;
6. Minimnya akses informasi, sosialisasi dan edukasi tentang sertifikasi halal.

Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

- Produk halal tantangan utama yang dihadapi yakni masi rendahnya literasi ekonomi dan keuangan syariah bagi masyarakat secara umum serta kesadaran untuk mau menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian.

Untuk itu diperlukan program yang bersifat massif untuk mengedukasi masyarakat mengenai ekonomi dan keuangan syariah serta mengajak serta masyarakat untuk mau menerapkan prinsip syariah dalam perekonomian.

Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Salah satu tantangan bagi perbankan syariah adalah menciptakan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat terutama yang selama ini menggunakan produk dan jasa perbankan konvensional dapat beralih dan memilih perbankan syariah. Untuk itu diperlukan peran pemilik dan pengurus perbankan syariah untuk menciptakan produk dan jasa yang lebih menarik dan memiliki nilai tambah lebih daripada perbankan konvensional. Selain itu penamaan produk dan jasa syariah juga diharapkan dapat lebih mudah dan menarik untuk memikat konsumen. Untuk dapat menyediakan layanan yang baik maka perbankan syariah juga perlu memiliki permodalan yang kuat dan pengurus yang kompeten dan berkomitmen untuk memajukan perbankan syariah.

Provinsi DKI Jakarta

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Ekonomi Pesantren di Provinsi DKI Jakarta

No	Nama Pesantren	Nama Unit Usaha yang dikelola Santri	Deskripsi
1	Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin	*Smart Farming*	Unit usaha pertanian ini bertujuan untuk memanfaatkan lahan idle seluas 2 Ha dan hasil pertaniannya dapat digunakan untuk membantu kebutuhan pangan internal pondok pesantren.
		Smart Creative Industry	Unit usaha yang menghasilkan produk kerajinan dengan *brand* Minjura Craft ini bertujuan untuk melengkapi kurikulum kewirausahaan yang sudah dimiliki ponpes namun belum optimal.
		Pengolahan sampah	Mengingat kapasitas pesantren yang cukup besar sehingga berdampak pada jumlah sampah yang diproduksi yakni sebanyak ±1.02 ton per hari, maka untuk mengurangi beban dilakukan pula program pengolahan sampah yang selain bisa mengurangi jumlah sampah di DKI Jakarta namun juga dapat menambah pendapatan pesantren dari hasil pengolahan sampah dimaksud.

Daftar Usaha-usaha Syariah yang Dikelola Pondok Pesantren di Provinsi DKI Jakarta

No.	Nama Pesantren	Nama Unit Usaha yang dikelola Santri	Deskripsi Program
1	PP. Tsaqofah	Sektor Usaha Air Minum	Pemberdayaan Unit Usaha Syariah
2	PP. Minhajurrosyidin	Sektor Usaha Pertanian dan Daur Ulang Sampah	Pemberdayaan Unit Usaha Syariah

Provinsi
Jawa Tengah

Sekilas
tentang Ekonomi Syariah Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Prinsip ekonomi syariah sejalan dengan misi pembangunan Jawa Tengah, untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka banyak ruang usaha baru.

Dengan sekitar 4,759 pondok pesantren yang tersebar di 29 kabupaten dan 6 kota, Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi syariah sebagai arus baru ekonomi Indonesia khususnya di Pulau Jawa. Sementara di sektor industri halal, Jawa tengah yang saat ini sudah memiliki 11 kawasan industri, mempunyai prospek yang bagus di tengah geliat pengembangan kawasan industri halal di Indonesia. Sementara di sektor keuangan syariah, walaupun pangsa pasar perbankan syariah di Provinsi Jawa Tengah masih sangat kecil namun pertumbuhan asetnya meningkat 3.95% (yoy) pada kuartal I 2020 (OJK, 2020). Hal ini ditunjukkan dengan mulai meningkatnya kesadaran masyarakat Jawa Tengah dalam menggunakan layanan perbankan syariah serta layanan keuangan mikro syariah melalui Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah/KSPPS (BMT). Dengan jumlah sekitar 550 KSPPS (BMT) yang aktif pada semester I 2020 (Kemenkop, 2020), koperasi syariah telah mendorong pembiayaan dan pemberdayaan pelaku UMKM halal di Provinsi Jawa Tengah.

Dengan potensi unggulan ekonomi syariah pada sektor makanan/kuliner halal serta Pariwisata Ramah Muslim, Provinsi Jawa Tengah memiliki banyak peluang untuk mendominasi pasar domestik dan internasional untuk segmen tersebut. Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa sentra kuliner yang ke depan didorong oleh sertifikasi halal untuk semua produk pelaku kuliner UMKM. Di sektor pariwisata ramah Muslim, Provinsi Jawa Tengah yang telah mendapat penghargaan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019 sebagai Destinasi Wisata ramah Muslim Unggulan, mempunyai beragam jenis destinasi pariwisata yang berpotensi ramah Muslim. Dukungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk regulasi dan program terkait ekonomi syariah membuka peluang lebih lanjut dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di provinsi tersebut.

Regulasi Tingkat Daerah
di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah

Peraturan Daerah	Perda Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2012 tentang "Pedoman Pengelolaan Koperasi Jawa Tengah"
Peraturan Gubernur	Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2012
Peraturan Gubernur terkait Pariwisata ramah Muslim	Belum ada
Peraturan Gubernur terkait Dana Sosial Keagamaan	Belum ada
Rencana / *Masterplan* / *Blueprint* Pengembangan Keuangan Syariah Daerah	Belum ada
Lainnya	Belum ada

Rencana Pemerintah Daerah
di Sektor Ekonomi Syariah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 di Provinsi Jawa Tengah memfokuskan pada visi "Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi". Dalam rangka mencapai visi tersebut maka dilakukan upaya yang dijabarkan dalam 4 (empat) misi diantaranya yaitu: (1) membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI; (2) mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota; (3) memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan (4) menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan. Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengahdaerah Jawa Tengah, serta menghadapi isu kemiskinan, bonus demografi, dan daya saing ekonomi daerah, maka kebijakan pembangunan lima tahun kedepanakan lebih menempatkan manusia sebagai fokus pembangunan. Sumberdaya manusia tidak saja dipandang sebagai objek pembangunan, namun menempatkannya dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan.

Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Inflasi		Tingkat Pengangguran		Tingkat Kemiskinan		Konsumsi RT		Konsumsi Pemerintah		Investasi		Ekspor		Impor	
2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
5.32%	5.41%	2.82%	2.80%	4.51%	4.49%	11.32%	10.8%	4.69%	4.62%	2.98%	3.98%	7.68%	4.85%	12.02%	4.92%	32.61%	-9.33%

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah lima tahun kedepan. Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018-2023 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

10 Program Unggulan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023	Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 5 tahun ke depan
▪ Sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK; ▪ Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru agama ▪ Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi ▪ Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni; ▪ Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk wirausaha muda; ▪ Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan ▪ Pengembangan transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi ▪ Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi ▪ Rumah sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel ▪ Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan	▪ Penanggulangan kemiskinan ▪ Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia ▪ Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha ▪ Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam ▪ Kedaulatan pangan dan energi ▪ Kesenjangan wilayah ▪ Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah

Rencana Pembangunan Ekonomi Syariah di Provinsi Jawa Tengah

Sektor Pariwisata Ramah Muslim	Sektor Makanan dan Produk Halal
▪ Mengadakan program-program terkait pengembangan destinasi pariwisata, program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah	▪ Mendorong sertifikasi halal untuk produk-produk dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk pelaku UMKM di lingkungan pondok pesantren

Sektor Keuangan Syariah

- Melakukan kajian (*exercise*) terkait dengan Unit Usaha Syariah (UUS) BPD Provinsi Jawa Tengah untuk memenuhi persyaratan *spin-off* paling lambat tahun 2023.
- Mendorong Edukasi, Literasi serta Inovasi/Digitalisasi Keuangan Syariah kepada masyarakat Jawa Tengah baik itu melalui perbankan Syariah maupun koperasi simpan pinjam pembiayaan Syariah (KSPPS)

Program Pemerintah Daerah
di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah

Sektor Industri Halal

Program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Sektor industri halal unggulan yang akan diprioritaskan pengembangannya adalah sektor makanan minuman, pariwisata, dan fesyen.

Program Pendukung Sektor Halal

Makanan dan Minuman Halal	▪ Pendampingan Survey Pedagang Produk Halal ▪ Seminar / *hearing* dengan *stakeholder* terkait Pasar Rakyat yang menjual produk halal ▪ Fasilitasi sertifikasi halal produk makanan dan minuman ▪ Pendampingan dan sertifikasi SNI, HACCP, dan GMP bagi industri agro (fasilitasi) ▪ Fasilitasi uji nutrisi ▪ Pelatihan peknik produksi olahan pangan ▪ Pelatihan grup produk agro ▪ Promosi produk agro
Fesyen Muslim	▪ Promosi produk melalui pameran dan temu dagang ▪ Mengadakan *fasion show* ▪ Perluasan Pemasaran Produk IKM melalui *e-commerce* ▪ Bantuan sertifikasi gudang SNI ▪ Bimbingan teknis peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat ▪ Pelatihan Pengelolaan resi gudang

Penetapan Daerah Pariwisata Ramah Muslim

- Untuk daerah Pariwisata ramah Muslim di Provinsi Jawa Tengah saat ini belum ada, yang ada hanya paket wisata religi, contohnya paket wisata di Kudus, Lasem, dll

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pendukung Sektor Halal

- Program IKRA (Industri Kreatif Syariah); Total existing hasil kurasi 6 UMKM (3 di sektor makanan minuman dan 3 di sektor fesyen)
- Pelatihan dan *Workshop* Sistem Jaminan Halal bekerja sama dengan MUI Jateng
- Festival Ekonomi Syariah wilayah Jawa (FeSyar).
- Pendampingan pengurusan perijinan Sertifikasi Halal bagi 20 UMKM binaan dan mitra
- 20 UMKM tersebut telah memperoleh sertifikasi halal dari MUI

Sektor UMKM dan Ekonomi Pesantren

Program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

- Meluncurkan program TOSAGA Toko Santri Gayeng (Tosaga) yang tersebar di beberapa daerah seperti Kabupaten Rembang, Pati, Demak, Semarang, dan Temanggung. Tosaga tersebut merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam menciptakan ekotren, yaitu ekonomi pesantren.

Program Kemitraan UMKM dan Pengusaha Besar

Tahap	Daftar Program Kemitraan di peringkat Desa/Kabupaten/Kota
Sudah ada	▪ Program Mitra Praja Utama (MPU) - kerja sama temu bisnis dan pemasaran produk antar provinsi (ada 10 Provinsi, Jawa Tengah salah satunya) di sektor makanan dan minuman olahan serta fesyen ▪ Temu bisnis UMKM dengan pembeli di provinsi lain seperti Provinsi Bali ▪ *Matchmaking* antara usaha besar PMA dan PMDN dengan UKM (Sesuai Perpres 44 Tahun 2016)
Tahap perencanaan	Kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Besar

Program Pemberdayaan UMKM

Sektor	Daftar Program Pendampingan
Makanan dan Mnuman Halal	▪ Pameran Dalam dan Luar Negeri ▪ Pelatihan Manajemen Ekspor ▪ Pelayanan Dokumen ekspor SKA ▪ Mengikutsertakan dalam pameran/misi dagang ke luar negeri ▪ Mengikutsertakan dalam *choaching* program ekspor ▪ Mengadakan Forum Informasi Pasar dan *One on One Meeting* dengan Atdag/ITPC ▪ Pendampingan GMP, SNI, HACCP ▪ Bantuan Alat bagi IKM Agro ▪ Fasilitas promosi dan uji nutrisi produk Agro ▪ Bimbingan teknis olahan pangan
Fesyen Muslim	▪ Pameran Dalam dan Luar Negeri ▪ Pelatihan Manajemen Ekspor ▪ Pelayanan Dokumen ekspor SKA ▪ Mengikutsertakan dalam Pameran/Misi dagang ke luar negeri ▪ Mengikutsertakan dalam *choaching* program ekspor ▪ Mengadakan Forum Informasi Pasar dan *One on One Meeting* dengan Atdag/ITPC

Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	2017	2018	2019
IKM mendapat pendampingan	10	14	10
IKM mendapat pendampingan sertifikasi halal	24	60	60

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Ekonomi Pesantren

Jumlah Pesantren	Program Pengembangan Ekonomi (*Lampiran*)
22	26
▪ Program sosial Bank Indonesia berupa pendampingan pengembangan unit usaha untuk kemandirian pondok pesantren ▪ Pelatihan dan pendampingan inisiasi Usaha konveksi di pesantren Al-Anwar Sarang Rembang ▪ Fasilitasi *linkage program* bekerjasama dengan Baznas dan Asbisindo. ▪ Inisiasi pembentukan Holding bisnis pesantren Jawa Tengah Bersama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Fourm Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Jawa Tengah, dan ISEI Jawa Tengah	▪ Pendampingan inisiasi usaha dan bantuan peralatan budidaya lele, sablon, dan pertanian hidroponik di Pondok Pesantren Al-Masudiyah Kab. Semarang ▪ Fasilitasi pelatihan Standarisasi Pengolahan Produk *Virgin Coconut Oil* dan kunjungan industri pengolahan *virgin coconut oil* PT. Krambil Idjo Jogja kepada Pondok Pesantren Mathaliul Huda Al Kautsar, Kab. Pati ▪ Pemberian bantuan sarana prasarana seperti bantuan unit digester, *green house*, dan instalasi hidroponik di Pondok Pesantren Roudhatul Mubtadiin Belekambang, Jepara

Sektor Keuangan Syariah

Program Otoritas Jasa Keuangan (Regional)

Sub-sektor	Detil Program
Perbankan Syariah	▪ Melakukan pengawasan *off site* (tidak langsung) terhadap kondisi kesehatan bank secara bulanan dan triwulanan serta menyampaikan pembinaan kepada bank yang memiliki indikator keuangan kurang memadai ▪ Melakukan pengawasan *on site* (langsung) untuk memastikan laporan keuangan bulanan ▪ Pengawasan secara aktif untuk memastikan tata kelola bank (*Good Corporate Governance*/GCG) berjalan dengan baik serta memberikan pembinaan jika GCG tidak berjalan dengan baik ▪ Melakukan *review* terhadap Rencana Bisnis, Realisasi Rencana Bisnis, Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan menyampaikan pembinaan terhadap kinerja keuangan dan strategi operasional dan bisnis yang kurang memadai ▪ Melakukan pemantauan debitur BPRS yang terdampak Covid-19 dan melakukan restrukturisasi pembiayaan secara mingguan ▪ Melakukan pemantauan indikator likuiditas BPRS secara harian ▪ Melaksanakan kegiatan forum Pemegang Saham BPRS dan meminta Pemegang Saham untuk meningkatkan dukungan terhadap likuiditas BPRS yang dimiliki ▪ Melakukan *review* terhadap Laporan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait *sharia compliant* serta menyampaikan pembinaan terhadap bank jika terdapat pelanggaran prinsip syariah yang signifikan dan berulang
Bank Pembangunan Daerah	▪ Melakukan pengawasan *off site* (tidak langsung) terhadap kondisi kesehatan secara bulanan dan triwulanan, serta pengawasan *on site* untuk memastikan laporan keuangan bulanan ▪ Pengawasan secara aktif untuk memastikan penyerapan profil risiko dan Tata Kelola bank (GCG) berjalan dengan baik serta memberikan pembinaan jika GCG tidak berjalan dengan baik ▪ Melakukan pembahasan dan pembinaan terhadap rencana *spin off* Unit Usaha Syariah (UUS) yang telah tercantum pada *Corporate Plan Bank* ▪ Melakukan pemantauan debitur UUS yang terdampak Covid-19 dan melakukan restrukturisasi pembiayaan secara mingguan ▪ Melakukan pemantauan indikator likuiditas Bank secara harian ▪ Melakukan pemeriksaan terhadap kecukupan jumlah, kualitas, dan manajemen Sumber Daya Insani (SDI) ▪ Melakukan pemeriksaan terhadap dukungan TI yang dimiliki bank ▪ Memastikan kesesuaian tingkat modal yang dibentuk dengan eksposur risiko yang ada akibat kegiatan operasional dan bisnis bank ▪ Melakukan *review* terhadap Laporan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait *sharia compliant* serta menyampaikan pembinaan terhadap bank jika terdapat pelanggaran prinsip syariah yang signifikan dan berulang

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Keuangan Syariah

- Program pendampingan dan pembiayaan untuk kemandirian pesantren bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Asbisindo Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (Asbisindo)

Sektor Keuangan Mikro Syariah

Program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Program Pengembangan Koperasi Syariah

Program	Institusi Keuangan Mikro Syariah
Bimtek Kepatuhan Koperasi Pola Syariah	KSPPS/USPPS/BMT
Bimtek Pemahaman Aspek Aspek Penilaian Kesehatan KSPPS/USPPS	KSPPS/USPPS/BMT
Bimtek Pembinaan Usaha KSPPS/USPPS	KSPPS/USPPS/BMT
Sosialisasi Pembiayaan bagi Koperasi	KSP/KSPPS/USPPS/BMT
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi melalui Kegiatan Kualitas Aspek Pemeringkatan Koperasi	KSP/KSPPS/USPPS/BMT
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi melalui Kegiatan Pembinaan Pengelola Tatalaksana Koperasi	KSP/KSPPS/USPPS/BMT

Program Otoritas Jasa Keuangan (Regional)

Program Pendampingan, Pengawasan, dan Pengembangan Bank Wakaf Mikro (BWM)

- Koperasi LKMS BMT Sumber Harapan Maju
- Koperasi LKMS BMT Artha Surya
- Koperasi LKMS BTM Pemalang
- Koperasi LKMS BTM BTM Surya Amanah
- Koperasi LKMS BTM Banyumas di Patikraja
- Koperasi LKMS Bankwakaf Al Muttaqien Pancasila Sakti (Alpansa)
- Koperasi LKMS Amanah Berkah Nusantara
- Koperasi LKMS Almuna Berkah Mandiri
- Koperasi LKMS Assa Berkah Sejahtera
- Koperasi LKMS Al Ihya Baitul Auqof
- Koperasi LKMS Bankwakaf Al Manshur Barokahing Gusti
- Koperasi LKMS BTM Kota Tegal
- Koperasi LKMS UNISA
- Koperasi LKMS BWM Ponpes Futuhiyyah
- Koperasi LKMS Bankwakaf Imam Syuhodo
- Koperasi LKMS BWM Sunan Pandan Aran
- Koperasi LKMS Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang
- Koperasi LKMS BWM Apik Kaliwungu Kendal
- Koperasi LKMS BWM Pondok Pesantren Syubbanul Wathon Maslahah
- Koperasi LKMS BWM Bangkit Nusantara
- Koperasi LKMS Bank Wakaf Mikro Al Fadlu Kendal

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Koperasi dan Keuangan Mikro Syariah

- Program pendampingan dan pengembangan ekosistem *Halal Value Chain* pada UMKM untuk menghasilkan nilai tambah pada setiap proses bisnis
- Program pembentukan forum bisnis pesantren yang akan diformalkan menjadi *Holding* Bisnis Pesantren

Sektor Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Program BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

Kategori Program ZIS dan Alokasi Baznas Provinsi Jawa Tengah

Kategori	Nama Program	Jumlah Penerima Manfaat (jiwa)	Besar Alokasi Penyaluran (Rp)
Sosial Kemanusiaan	Bantuan Konsumtif	4.177	3.067.325.000
	Bencana Alam	50 lokasi	1.645.370.000
	Jambanisasi	107 unit	402.000.0000
	Rumah tidak layak huni	420 unit	4.299.000.000
Pendidikan	Beasiswa	1.686	1.037.750.000
Kesehatan	Kursi roda dan bantuan pengobatan	308	6.530.700.000
Pemberdayaan Ekonomi	Pelatihan sertifikasi jasa konstruksi	1.279	
	Pelatihan pengolahan industri makanan	1.306	
	Budidaya lele bioflok, jangkrik, dan cacing sutra	592	
	Pelatihan perawatan jenazah	153	
	Pelatihan wirausaha potong rambut	75	
	Pelatihan usaha laundry	77	
Dakwah	Bisyaroh imam	94	135.000.000
	Bisyaroh untuk Penyuluh Agama Islam non ASN	175	175.000.000
	Bisyaroh guru Madrasah Diniyah	1.126	1.126.000.000
	Bisyaroh pengajar TPQ	1.461	1.461.000.000

Program Baznas Provinsi Jawa Tengah dalam Mengatasi Permasalahan Pandemi Covid-19

Nama Program / Rencana Aksi	Jumlah Bantuan yang Diberikan (Rp)	Tipe Penerima Bantuan / Manfaat
Bantuan santri tidak pulang	2.538.300.000	Pondok Pesantren
APD	130.500.000	Tenaga Kesehatan
Paket Sembako	1.214.117.500	Masyarakat
Nasi Kotak	180.000.000	Masyarakat
Masker	19.200.000	Tenaga Kesehatan
Bantuan masyarakat Jateng di Jabodetabek	20.000.000	Belum ada
Modal usaha produktif	300.000.000	Binaan Dinkop & UKM Jateng
Istighosah online	24.050.000	Disiarkan secara daring TVRI dan RRI

Gambaran
Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah

Sektor Industri Halal

Nilai Ekspor Provinsi

Sektor	Jumlah Ekspor (USD)	% Dibandingkan dengan Total Ekspor Non-Migas
Makanan dan minuman	29,182,824	0.53 %
Fesyen	4,705,369	25.30 %

Jumlah Usaha/ Merk dengan Sertifikat Halal pada Sektor Makanan dan Minuman (Mamin)

Sektor Usaha/*Brand* (Tahun 2018)		Sektor Usaha/*Brand* (Tahun 2019)	
Roti	97	Roti	108
Katering dan Restoran	13	Katering dan Restoran	16
Tepung, Kanji, dan produk turunan/olahan	10	Tepung, Kanji, dan produk turunan/olahan	12
Es, es krim, dan bahan-bahan pendukung	1	Es, es krim, dan bahan-bahan pendukung	2
Susu dan produk olahan/turunan susu	0	Susu dan produk olahan/turunan susu	0
Makanan olahan, daging dan unggas	23	Makanan olahan, daging dan ungags	29
Makanan olahan ikan	58	Makanan olahan ikan	60
Makanan olahan telur	5	Makanan olahan telur	5
Makanan ringan	75	Makanan ringan	75
Pemanis, bumbu dapur, bumbu penyedap/ pelengkap	75	Pemanis, bumbu dapur, bumbu penyedap/ pelengkap	81
Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	20	Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	26
Semua Usaha/*Brand* Tersertifikasi Halal	377	Semua Usaha/*Brand* Tersertifikasi Halal	414

Sumber: Daftar Belanja Produk Halal LPPOM MUI hingga periode Maret-April-Mei 2019

Kontribusi Sektor Mamin terhadap Perekonomian Provinsi Jawa Tengah

	2018	2017	2016	2015	2014
PDRB (Milliar Rupiah)					
Mamin olahan	-	147,585	136,196.85	121,215.65	105,019.91
Mamin olahan, *Base* = 2010	-	103,369.91	98,049.76	92,730.16	85,508.74
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb)	32,898.49	29,947.38	27,765.89	25,476.36	22,630.58
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb), *Base* = 2010	30,667.2	24,220.78	22,707.99	21,327.81	19,905.77
Pertumbuhan PDRB (%)					
Mamin olahan, *Base* = 2010	4.87	5.43	5.74	8.45	9.9
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb), *Base* = 2010	8.72	6.66	6.47	7.14	7.62

Kontribusi pada PDRB (%)					
Mamin olahan	12.5	12.59	12.53	11.99	11.38
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb)	2.59	2.55	2.55	2.52	2.45

Total Produksi Daging Daerah (Tahun 2018)

Populasi Ternak		Produksi Daging Ternak (ton)	
Sapi Potong	1,751,799	Sapi	64,755.61
Sapi Perah	154,202	Sapi Impor	
Kerbau	50,507	Kerbai	1,642.74
Kuda	10,643	Kuda	1.63
Kambing	3,937,013	Kambing	11,819.85
Domba	2,389,721	Domba	5,933.9
Populasi Unggas		**Produksi Daging Unggas (ton)**	
Ayam Kampung	40,633,383	Ayam Kampung	31,404.69
Ayam Petelur	32,763,071	Ayam Petelur	11,446.37
Ayam Broiler	500,399,757	Ayam Broiler	543,754.32
Bebek	6,705,767	Bebek	4,263.09

Skor Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) Tahun 2018 Provinsi Jawa Tengah

Akses	79
Komunikasi	28
Lingkungan	33
Jasa	60
Skor IMTI	**49**

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Provinsi Jawa Tengah

	2018	2017	2016	2015	2014
PDRB (Milliar Rupiah)					
Jasa akomodasi	6,608.07185	6,257.29	5,892.42	5,492	5,157.22
Jasa akomodasi, *Base* = 2010	4,335.22	4,129.35	3,925.48	3,736.47	3,565.87
Pertumbuhan PDRB (%)					
Jasa akomodasi, *Base* = 2010	4.99	5.19	5.06	4.78	7.51
Kontribusi pada PDRB (%)					
Jasa akomodasi	0.16	0.18	0.16	0.17	0.14

Rating untuk Pariwisata Ramah Muslim di Provinsi Jawa Tengah

Skor	Aspek		Skor	Aspek	
Skor Akses	Udara	4	Skor Lingkungan	Kedatangan Turis Muslim	5
	Kereta	4		Jangkauan Wi-Fi	4
	Laut	2		Komitmen terhadap Pariwisata ramah Muslim	3
	Infrastruktur Jalan	4			
Skor Komunikasi	Panduan Pelancong Muslim	2	Skor Jasa		
	Edukasi Pemangku Kepentingan	3		Restoran Halal	5
	Jangkauan Pasar	4		Masjid	3
	Pemandu Tur	5		Bandara	5
	Pemasaran Digital	5		Hotel	5
				Atraksi	3
			Skor Total		66
			Rata-rata Skor		3,9

NB: data lengkap bisa didapatkan di dalam Laporan Perkembangan Pariwisata ramah Muslim Daerah 2019-2020

Indikator Pariwisata Ramah Muslim Provinsi Jawa Tengah

Indikator	Skor/Nilai	Keterangan
Akses	Cukup baik	Terdapat akses udara, akses kereta, akses laut, dan infrastruktur jalan yang baik
Akses Udara	Baik	Terdapat bandara internasional dan domestik
Bandara International	2	
Bandara Domestik	3	
Akses Kereta	Baik	Akses kereta mudah
Jumlah rute	1	Solo – Yogya – Purwokerto – Tegal – Semarang – Solo
Akses Laut	Cukup baik	Terdapat pelabuhan
Terminal Kapal Pesiar	Belum ada	
Pelabuhan	2	
Infrastruktur Jalan	Baik	Jalan dalam kondisi baik
Jalan Provinsi	2,405 km	358.4 kmnya adalah jalan tol
Komunikasi	Cukup baik	Memiliki panduan pengunjung, edukasi untuk pemangku kepentingan, kegiatan pendukung jangkauan pasar, pemandu tur, dan melakukan pemasaran digital
Panduan bagi Pelancong Muslim	Cukup baik	Hanya terdapat buku panduan dalam Bahasa Inggris
Eksemplar Bahasa Inggris	11,500	
Edukasi Pemangku Kepentingan	Cukup baik	Hanya sekali workshop
Workshop	1	
Jangkauan Pasar		
Konferensi/Pameran/Expo	1	*Malaysia Tourism Gathering*
Pemandu Tur	Cukup Baik	Pemandu tur hanya menguasai Bahasa Inggris
Bahasa Inggris	132	

Indikator	Skor/Nilai	Keterangan
Pemasaran Digital	Baik	
Aplikasi	1	MySemarangTravelGuide
Lainnya	1	Tim khusus promosi digital
Lingkungan	Cukup Baik	Banyak wisatawan yang datang ke Jawa Tengah. Cakupan jaringan wifi-nya juga baik. Jawa Tengah memiliki komitmen untuk mengembangan pariwisata ramah Muslim
Kedatangan Turis	Baik	Kedatangan wisatawan domestik dan mancanegara cukup banyak, namun wisatawan mancanegara yang Muslim cenderung sedikit
Wisatawan Domestik	40,118,470	
Wisatawan Mancanegara	781,107	21% nya Muslim
Jangkauan Wifi	Baik	Jaringan internet di bandara gratis dan kualitasnya bagus
Komitmen terhadap Pariwisata ramah Muslim	Cukup baik	Sedang dipersiapkan paket wisata religi di destinasi prioritas
Jasa	Baik	Sebagian besar kebutuhan industri pariwisata ramah Muslim dan hal-hal yang fundamental seperti restoran halal, masjid, bandara, hotel, dan atraksi sudah dimiliki dengan kualitas yang baik
Restoran Halal	Baik	Restoran dan outlet bersertifikasi halal sudah banyak walaupun masih ada yang *self-claimed*
Restoran bersertifikat halal	23	
Outlet bersertifikat halal	886	
Restoran/ Rumah makan halal *(self-claimed)*	1,260	
Masjid	Baik	
Masjid	28	
Mushala	125	
Bandara	Baik	
Mushala	9	5 di area trans 4 di area umum
Shalat Jumat	Ada	
Hotel	Baik	Terdapat hotel syariah, hotel dengan dapur bersertifikat halal dan hotel yang tidak menyediakan menu babi dan alkohol
Hotel Syariah	4	
Hotel dengan dapur bersertifikat halal	11	
Hotel yang tidak menyediakan menu babi dan alkohol	721	
Atraksi	Baik	
Situs budaya islami	24	
Daya tarik wisata budaya	132	Hanya 6 yang ramah Muslim
Daya tarik lokal	440	
Lainnya	3,130	

Sektor Keuangan Syariah

Indeks Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah

Indeks	Tahun 2016	Tahun 2019
Indeks Literasi Keuangan Syariah (OJK)	11.2%	11.78%
Indeks Inklusi Keuangan Syariah (OJK)	13.8%	12.57%
Indeks Literasi Ekonomi Syariah (BI)	-	16.0%

Profil Keuangan BPD Syariah – UUS BPD Jawa Tengah (*Milliar Rupiah*)

	2015	2016	2017	2018	2019
Total aset gross	1,344	3,095	4,143	5,137	5,737
Total pembiayaan	919	1,298	2,192	2,765	3,010
Total DPK	798	2,168	2,682	2,387	2,722
Total FDR	115.10%	59.85%	78.9%	115.85%	110.57%
Total NPF	0.72%	1.01%	0.87%	0.68%	2.30%
Pangsa pasar (%)	-	-	-	5%	5.1%

Profil Industri Perbankan Syariah (BUS) di Provinsi Jawa Tengah (*Milliar Rupiah*)

	2018	2019
Pangsa pasar (%)	14.1%	13.9%
Pembiayaan berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	2,614	2,835
Modal kerja (bukan UMKM)	3,350	3,076
Investasi (UMKM)	1,020	1,172
Investasi (bukan UMKM)	1,506	1,291
Konsumsi	3,470	3,841
NPF berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	84	115
Modal kerja (bukan UMKM)	108	958
Investasi (UMKM)	31	71
Investasi (bukan UMKM)	213	142
Konsumsi	62	64
Total		
Total aset gross	16,126	17,377
Total pembiayaan	11,960	12,215
Portfolio pembiayaan UMKM (%)	30.4%	32.8%
Total DPK	11,742	13,255
Total FDR	101.86%	92.16%
Total NPF	498	1,349
Total NPF (%)	4.1%	11.04%

Profil Industri Perbankan Syariah (UUS) di Provinsi Jawa Tengah (dalam *miliar Rupiah*)

	2018	2019
Pangsa pasar (%)	11.4%	11%
Pembiayaan berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	1,445	1,222
Modal kerja (bukan UMKM)	166	258
Investasi (UMKM)	241	303
Investasi (bukan UMKM)	846	709
Konsumsi	2,708	2,984
NPF berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	160	274
Investasi (UMKM)	46	22
Investasi (bukan UMKM)	10	212
Konsumsi	84	110
Total		
Total aset gross	8,074	9,037
Total pembiayaan	5,404	5,475
Portfolio pembiayaan UMKM (%)	19.9%	19.9%
Total DPK	6,412	7,298
Total FDR	84.29%	75.01%
Total NPF	300	618
Total NPF (%)	5.5%	11.2%

Sektor Keuangan Mikro Syariah

Jumlah LKMS dan BWM yang Mendapatkan Program Pendampingan dan Pengawasan dari OJK

IKMS	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah yang mendapat pendampingan OJK	8	17	21

Profil Fundamental LKMS dan BWM di Bawah Pengawasan OJK

LKMS dan BWM	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah anggota LKMS	-	-
Jumlah pegawai LKMS	-	-
Modal sendiri	-	-
Volume usaha	-	-
Sisa Hasil Usaha (SHU)	-	-
Total aset (*dalam Rupiah*)	161.69 miliar	225.92 miliar
Rata-rata pembiayaan IKMS	-	-

Jumlah IKMS yang Mendapatkan Program Pendampingan dan Pengawasan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

LKMS	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah IKMS yang mendapat pendampingan	6	-	30
Jumlah IKMS yang diawasi oleh Dinas (pengawasan yang dimaksud adalah pengecekan laporan RAT, kunjungan ke IKMS, dsb.)	141	148	161

Profil Fundamental LKMS di Bawah Pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

LKMS (KSPPS/USPPS,BMT, Kopontren, dll)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah LKMS yang berada di wilayah kerja	106	108	115
Jumlah Anggota LKMS	554,330	831,112	957,230
Jumlah Pegawai LKMS	5011	4790	5455
Jumlah Pegawai yang mempunyai sertifikasi pengelola KSPPS (LKMS)	84	86	92
Modal sendiri (*dalam Rupiah*)	244.2 Miliar	356.6 Miliar	455.6 Miliar
Modal luar/pinjaman (*dalam Rupiah*)	306.8 Miliar	281.5 Miliar	306.9 Miliar
Cadangan koperasi/permodalan (*dalam Rupiah*)	-	-	-
Volume usaha (*dalam Rupiah*)	1,420 Miliar	1,991 Miliar	2,713 Miliar
Sisa Hasil Usaha/SHU (*dalam Rupiah*)	23.9 Miliar	27.7 Miliar	35.6 Miliar
Total aset (*dalam Rupiah*)	3,081 Miliar	3,981 Miliar	4,330 Miliar
Rata-rata pembiayaan LKMS (*dalam Rupiah*)	0 < n <= 5 jt 0% 5 jt < n <= 12.5 jt 100% 12.5 jt < n <= 20 jt 0% 20 jt < n <= 50 jt 0% > 50 jt 0%	0 < n <= 5 jt 0% 5 jt < n <= 12.5 jt 100% 12.5 jt < n <= 20 jt 0% 20 jt < n <= 50 jt 0% > 50 jt 0%	0 < n <= 5 jt 0% 5 jt < n <= 12.5 jt 100% 12.5 jt < n <= 20 jt 0% 20 jt < n <= 50 jt 0% > 50 jt 0%
Tingkat kesehatan LKMS	Sehat: 10 Cukup Sehat: 12 Dalam pengawasan: 0 Dalam pengawasan khusus: 0	Sehat: 10 Cukup Sehat: 12 Dalam pengawasan: 0 Dalam pengawasan khusus: 0	Sehat: 13 Cukup Sehat: 5 Dalam pengawasan: 0 Dalam pengawasan khusus: 0

Sektor Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Daftar BAZNAS Aktif dan LAZ Aktif (Rekomendasi BAZNAS)

35 BAZNAS dan 5 LAZ Aktif (Rekomendasi BAZNAS)	Kab. Semarang, Kab. Kendal, Kab. Demak, Kab. Grobogan, Kab. Pati, Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Rembang, Kab. Blora, Kab. Pekalongan, Kab. Batang, Kab.Pemalang, Kab.Tegal, Kab.Brebes, Kab. Cilacap, Kab. Purbalingga, Baznas Kab. Banjarnegara, Kab. Magelang, Kab. Temanggung, Kab.Wonosobo, Kab. Purworejo, Kab. Kebumen, Klaten, Baznas Kab. Boyolali, Baznas Kab.Sragen, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Banyumas, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta serta LAZ Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto, LAZ Yayasan Dana Kemanusiaan Dhuafa Magelang, Yayasan LAZ Cilacap, LAZ Solo Peduli Ummat, LAZ Yayasan Al-Ihsan Jawa Tengah

Jumlah Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah

Jenis Dana	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Penghimpunan Zakat (*dalam Rupiah*)			
▪ Zakat Maal/Harta	17,792,215,008	29,886,343,376	50,715,603,640
Penghimpunan Infak (*dalam Rupiah*)			
▪ Infak Bebas	-	23,760,175	20,632,210
▪ Infak Terikat (termasuk CSR dan kurban)	128,073,136	1,055,494,698	977,653,816

Jumlah Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah

Jenis Dana	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Penyaluran Zakat (*dalam Rupiah*)	17,970,601,784	29,886,343,376	49,868,095,346
Penyaluran Infak (*dalam Rupiah*)	-	756,457,560	1,215,003,650
Jumlah Penerima Manfaat Tercatat			
▪ Perorangan (Yayasan/Komunitas)	1,673 Orang	47,979 Orang	67,423 Orang

Besar Alokasi Penyaluran Zakat, Infak, Infak Terikat, Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Bidang Program	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Sosial Kemanusiaan	2,265,282,500	1,073,320,000	3,460,000,000
Pendidikan	1,190,750,000	16,000,000	1,377,000,000
Kesehatan	5,010,750,000	634,200,000	715,250,000
Pemberdayaan Ekonomi	585,000,000	407,240,000	8,282,890,700
Dakwah	7,655,683,994	10,966,229,254	13,153,798,950

Program Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah di Provinsi Jawa Tengah

No	Kategori	Nama Program	Jumlah Penerima Manfaat (Jiwa)	Besar Alokasi Penyaluran (Rp)
1	Sosial Kemanusiaan	1. Bantuan Konsumtif	4,177	3,067,325,000
		2. Bencana Alam		
		3. Jambanisasi	50 lokasi	1.645.370,000
		4. Rumah Tidak Layak Huni	107 unit	402,000,000
			420 unit	4,299,000,000
2	Pendidikan	1. Beasiswa	1,686	1,037,750,000
3	Kesehatan	1. Kursi Roda dan Bantuan Pengobatan	308	6,530,700,000

4	Pemberdayaan Ekonomi	1. Pelatihan Sertifikasi Jasa Konstruksi	1,279	Belum ada
		2. Pelatihan Pengolahan Industri Makanan	1,306	
		3. Budidaya Lele Bioflok, Jangkrik, dan Cacing Sutra	592	
		4. Pelatihan Perawatan Jenazah	153	
		5. Pelatihan Wirausaha Potong Rambut	75	
		6. Pelatihan Usaha Laundry	77	
5	Dakwah	1. Bisyaroh Imam	94	135,000,000
		2. Bisyaroh untuk Penyuluh Agama Islam Non ASN	175	175,000,000
		3. Bisyaroh Guru Madrasah Diniyah	1,126	1,126,000,000
		4. Bisyaroh Pengajar TPQ	1,461	1,461,000,000

Indeks Zakat Nasional (IZN) Provinsi Jawa Tengah

	2018	2019
Indeks Zakat Nasional/IZN (Dimensi Makro)		
Regulasi	0	0.86
Dukungan Finansial dari Pemerintah (APBN/APBD) untuk BAZNAS	0	0.34
Jumlah Resmi Lembaga Zakat/OPZ, muzakki, and mustahik	0.75	0.85
Rasio, Jumlah muzakki individual/jumlah rumah tangga di level Provinsi	0	0.17
Rasio, Jumlah dari muzakki institusi/jumlah institusi di level Provinsi	0.75	0.27
Database dari institusi/lembaga zakat yang terdaftar	0.5	0.44
Total Indeks Makro	**0.15**	**0.66**
Indeks Zakat Nasional/IZN (Dimensi Mikro)		
Penghimpunan	0.75	0.57
Pengelolaan	0.75	0.61
Penyaluran	0.88	0.87
Pelaporan	1	0.45
Indeks Kesejahteraan CIBEST	1	0.80
Modifikasi Indeks Pengembangan Manusia (HDI)	0.75	0.42
Kemandirian	0.5	0.54
Institutional	0.84	0.67
Dampak Zakat	0.8	0.65
Total Indeks Mikro	**0.82**	**0.66**

Indeks Skor Literasi dan Pemahaman Zakat Provinsi Jawa Tengah

	2020
Indeks Literasi Zakat	71.39
Indeks Pemahaman Dasar tentang Zakat	61.83
Indeks Pemahaman Lanjutan tentang Zakat	66.94

Indeks Skor Literasi dan Pemahaman Wakaf Provinsi Jawa Tengah

	2020
Indeks Literasi Wakaf	52.54
Indeks Pemahaman Dasar tentang Wakaf	61.83
Indeks Pemahaman Lanjutan tentang Wakaf	35.29

Sektor UMKM dan Ekonomi Pesantren

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Jumlah Pesantren dengan Usaha-Usaha Syariah

22 Pondok Pesantren	36 Usaha-Usaha Syariah (*detil di Lampiran*)

Sektor Pendidikan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Perguruan Tinggi yang Menyediakan Program Studi Ekonomi dan Keuangan Syariah Terkait

Jenjang	Jumlah Universitas tahun 2019	Program Studi tahun 2019		2018		2019	
		Nama Program Studi	Jumlah Program Studi	Jml. Dosen	Jml. Mahasiswa	Jml. Dosen	Jml. Mahasiswa
Sarjana	32	Akuntansi Syariah	5	53	2886	53	1941
		Ekonomi Syariah	24	153	9191	153	4716
		Hukum Ekonomi Syariah	12	93	7035	93	3579
		Manajemen Bisnis Syariah	6	49	2648	49	1797
		Manajemen Haji dan Umroh	1	6	77	6	107
		Manajemen Zakat dan Wakaf	3	19	454	19	324
		Zakat dan Wakaf	1	7	35	7	-
Magister	7	Ekonomi Syariah	5	28	170	28	219
		Hukum Ekonomi Syariah	3	17	187	17	143
		Manajemen Bisnis Syariah	1	1	-	1	-
		Manajemen Keuangan Syariah	1	3	21	3	-

Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi Ekonomi Syariah Terkait

Akreditasi	AkreditasiPerguruan Tinggi			AkreditasiProgram Studi		
	S1	S2	S3	S1	S2	S3
Akreditasi A	2	1	-	9	-	-
Akreditasi B	10	4	-	25	5	-
Akreditasi C	12	-	-	10	1	-
Belum TerAkreditasii	8	2	-	22	4	-

Peluang Investasi Daerah untuk Industri Keuangan Syariah Provinsi Jateng

No.	Nama Proyek Investasi	*Stakeholders*	Sektor	Tahapan Proyek Investasi	Nilai Perkiraan Investasi (dalam Rupiah)
1	Pengembangan Wisata Pulau Panjang	Pemkab Jepara	Pariwisata	Perencanaan	22.2 Miliar
2	Pengembangan Kawasan Wisata Agro Wisata Agroedupark Tlogowening	Pemkab Semarang	Pariwisata	Perencanaan	361.5 Miliar
3	Industri Perikanan Udang Terpadu	Pemkab Cilacap	Manufaktur	Perencanaan	550 Miliar
4	Pembangunan Solo Convention Exhibition Hall	Pemkot Surakarta	Properti	Perencanaan	124.2 Miliar
5	Pengembangan Pembenihan Ikan Nila Salin	Pemkab Pati	Pertanian	Perencanaan	11.9 Miliar
6	Pengembangan Pemandian Kalianget	Pemkab Wonosobo	Pariwisata	Perencanaan	12.2 Miliar
7	Pengembangan Rest Area Kledung	Pemkab Temanggung	Infrastruktur	Perencanaan	18.7 Miliar
8	Pembangunan Docking Kapal	Pemkab Rembang	Infrastruktur	Perencanaan	45.5 Juta

Survei UMK (Usaha Mikro dan Kecil) Makanan Minuman Olahan[21]

Provinsi Jawa Tengah

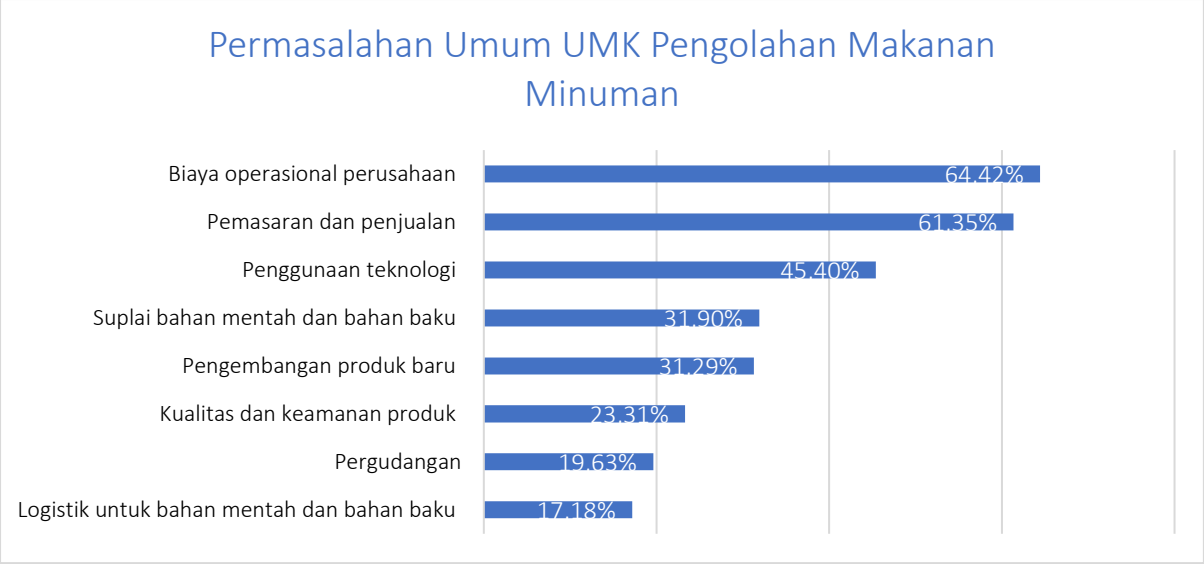

[21] Kegiatan survey dilakukan bersama IPB dan GAPPMI (bagian UMKM) dengan jumlah responden sebanyak 155 UMK Makanan Minuman Olahan di Provinsi Jawa Tengah

Top 3 Permasalahan Aspek Pemasaran
Terlalu banyak kompetitor produk sejenis
51,72%
Harga produk kompetitif dengan kualitas terbaik
44,83%
Kurang dapat memenuhi permintaan konsumen dalam volume besar dan cepat
38,51%
Kesulitan dalam menjual produk kepada perusahaan besar
36,21%
Kesulitan dalam menjual produk ke pasar ekspor
25,29%
Kesulitan dalam menentukan jalur penjualan yang efektif dan efisien
24,71%
Design packaging produk
24,14%
Mahalnya biaya iklan
17,24%
Tidak/kurang memahami kebutuhan dan perilaku konsumen
14,94%
Program iklan & pemasaran tidak sesuai dengan target konsumen
11,49%

Top 3 Permasalahan Aspek Suplai Bahan Baku
Fluktuasi harga bahan baku
68,26%
Mahalnya harga bahan baku
54,49%
Kurangnya akses kepada berbagai macam supplier
31,74%
Faktor musiman untuk bahan baku jenis tertentu
29,94%
Cukupnya ketersediaan uang kas
29,34%
Kesulitan dalam mendapatkan kualitas yang baik
28,74%
Kurangnya informasi yang benar terkait harga pasar
11,98%
Keterlambatan dalam menerima bahan baku dari supplier
10,78
Kurangnya variasi jenis bahan baku
10,78
Kesalahan spesifikasi bahan baku pada saat barang diterima
9,58%
Rendahnya kualitas jasa logistik dari supplier
8,38

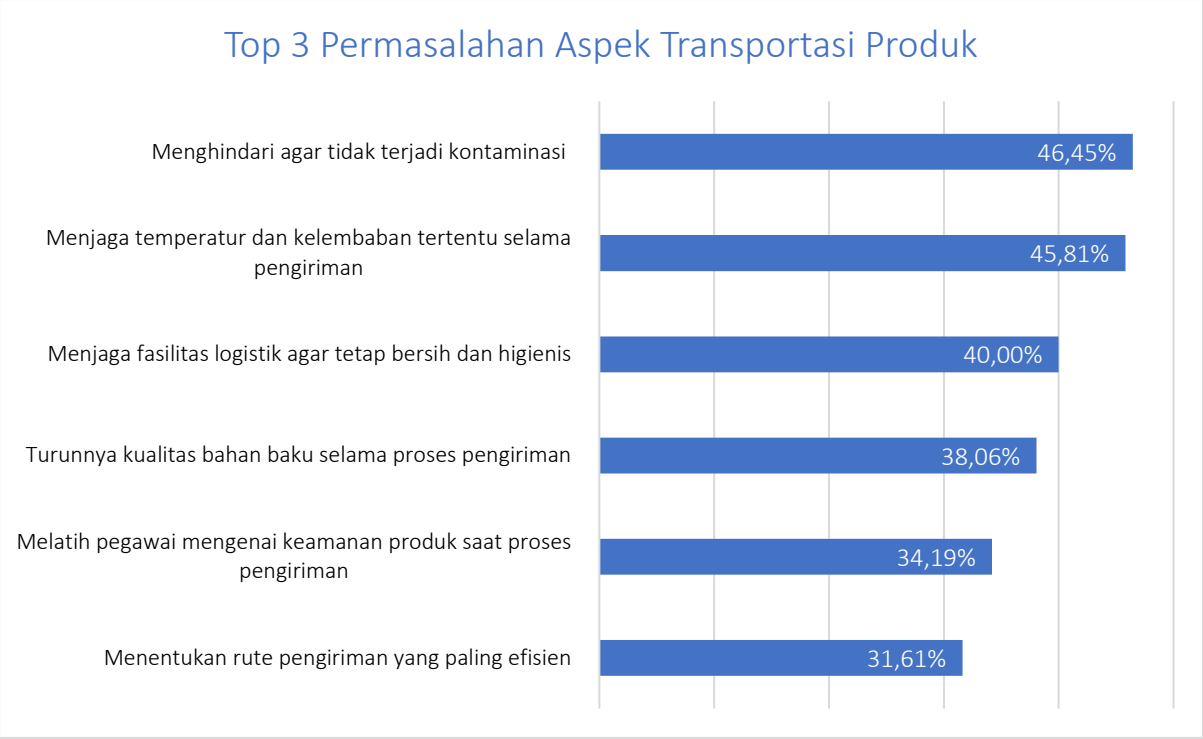
Top 3 Permasalahan Aspek Transportasi Produk
Menghindari agar tidak terjadi kontaminasi
46,45%
Menjaga temperatur dan kelembaban tertentu selama pengiriman
45,81%
Menjaga fasilitas logistik agar tetap bersih dan higienis
40,00%
Turunnya kualitas bahan baku selama proses pengiriman
38,06%
Melatih pegawai mengenai keamanan produk saat proses pengiriman
34,19%
Menentukan rute pengiriman yang paling efisien
31,61%

Top 3 Permasalahan Aspek Pergudangan
Menjaga temperatur dan kelembaban tertentu di tempat penyimpanan untuk bahan mentah/barang jadi
45,20%
Menjaga tempat penyimpanan agar tetap bersih dan higienis
44,07%
Menghindari tidak terjadi kontaminasi di bahan mentah/barang jadi
40,68%
Mengatur perputaran produk secara optimal
40,11%
Kurangnya/tidak adanya fasilitas untuk menyimpan barang jadi
34,46%
Kurangnya/tidak adanya fasilitas untuk menyimpan bahan mentah
31,64%
Turunnya kualitas bahan mentah di tempat penyimpanan
23,73%
Turunnya kualitas barang jadi di tempat penyimpanan
19,77%

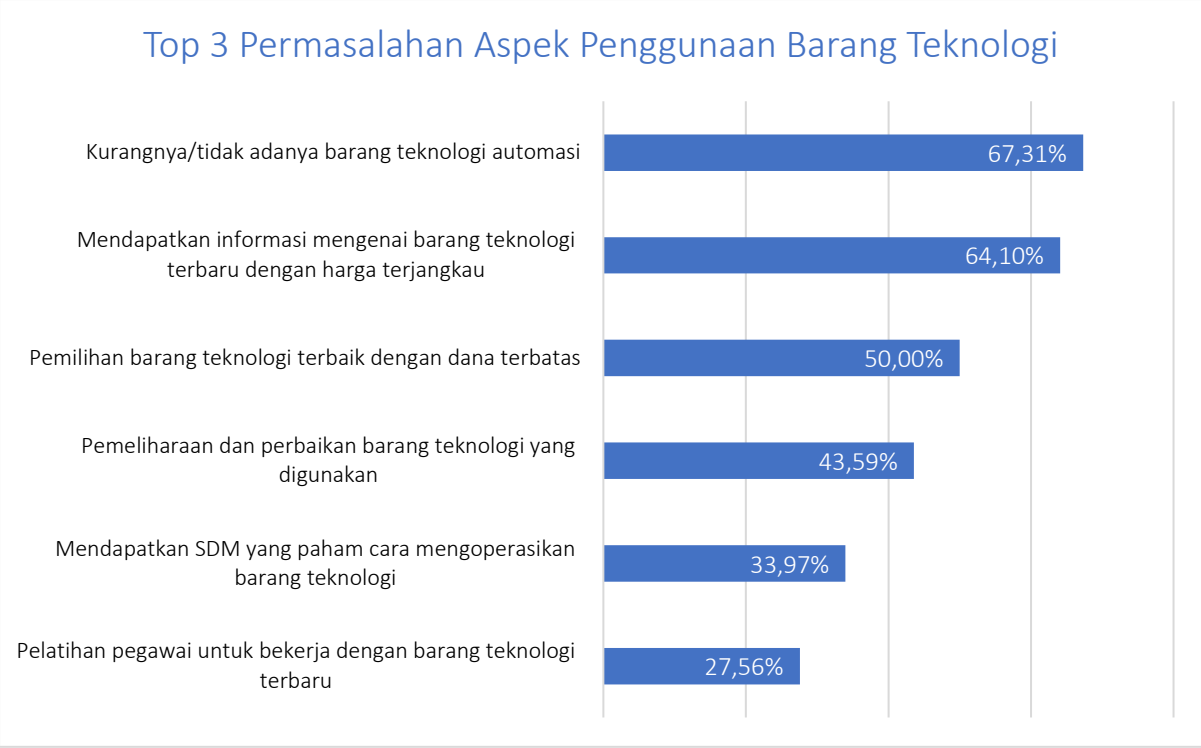
Top 3 Permasalahan Aspek Penggunaan Barang Teknologi
Kurangnya/tidak adanya barang teknologi automasi
67,31%
Mendapatkan informasi mengenai barang teknologi terbaru dengan harga terjangkau
64,10%
Pemilihan barang teknologi terbaik dengan dana terbatas
50,00%
Pemeliharaan dan perbaikan barang teknologi yang digunakan
43,59%
Mendapatkan SDM yang paham cara mengoperasikan barang teknologi
33,97%
Pelatihan pegawai untuk bekerja dengan barang teknologi terbaru
27,56%

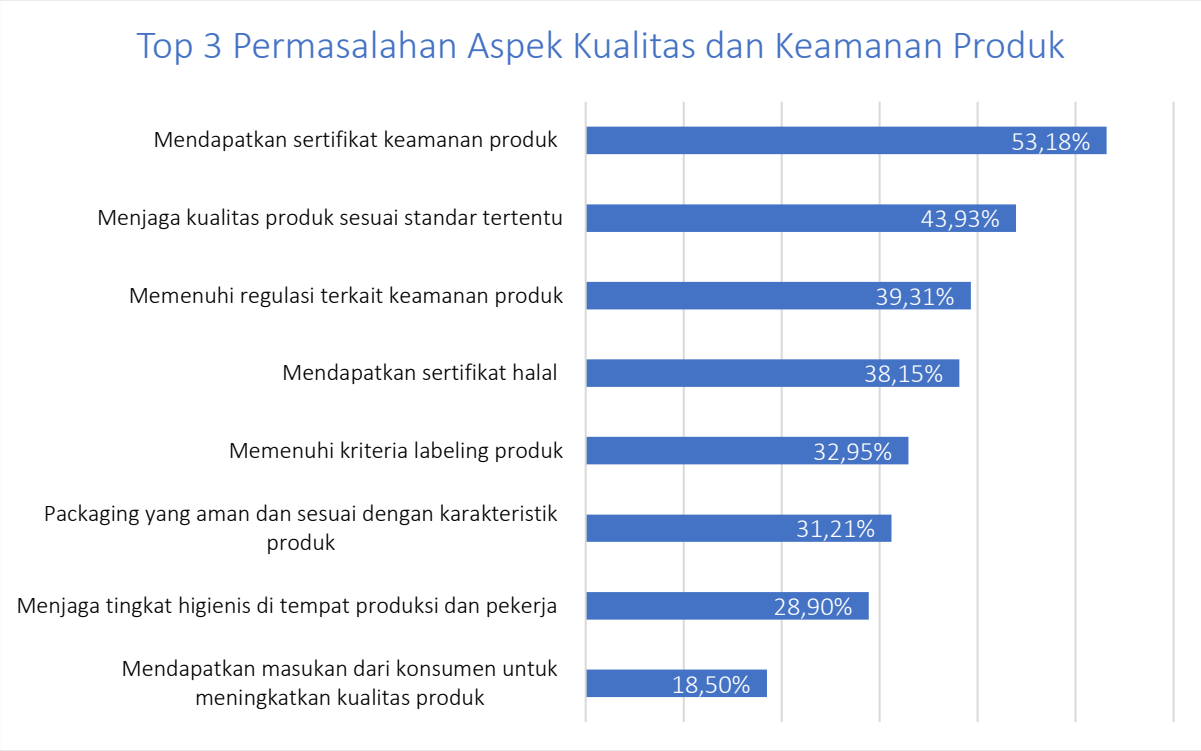
Top 3 Permasalahan Aspek Kualitas dan Keamanan Produk
Mendapatkan sertifikat keamanan produk
53,18%
Menjaga kualitas produk sesuai standar tertentu
43,93%
Memenuhi regulasi terkait keamanan produk
39,31%
Mendapatkan sertifikat halal
38,15%
Memenuhi kriteria labeling produk
32,95%
Packaging yang aman dan sesuai dengan karakteristik produk
31,21%
Menjaga tingkat higienis di tempat produksi dan pekerja
28,90%
Mendapatkan masukan dari konsumen untuk meningkatkan kualitas produk
18,50%

Top 3 Inovasi Produk Baru
Mengetahui variasi produk-produk tipe apa saja yang diinginkan konsumen
45,24%
Strategi pemasaran untuk produk baru
44,64%
Mendapatkan ide orisinil dalam pengembangan produk baru
43,45%
Meningkatkan kapasitas produksi dalam skala besar dengan standar kualitas produk yang sama
37,50%
Memeriksa selera konsumen terkait produk baru
34,52%
Biaya untuk mengembangkan produk baru terlalu mahal
31,55%
Memiliki resep unik yang sulit ditiru kompetitor
29,17%
Menentukan harga yang pas untuk produk baru
26,19%

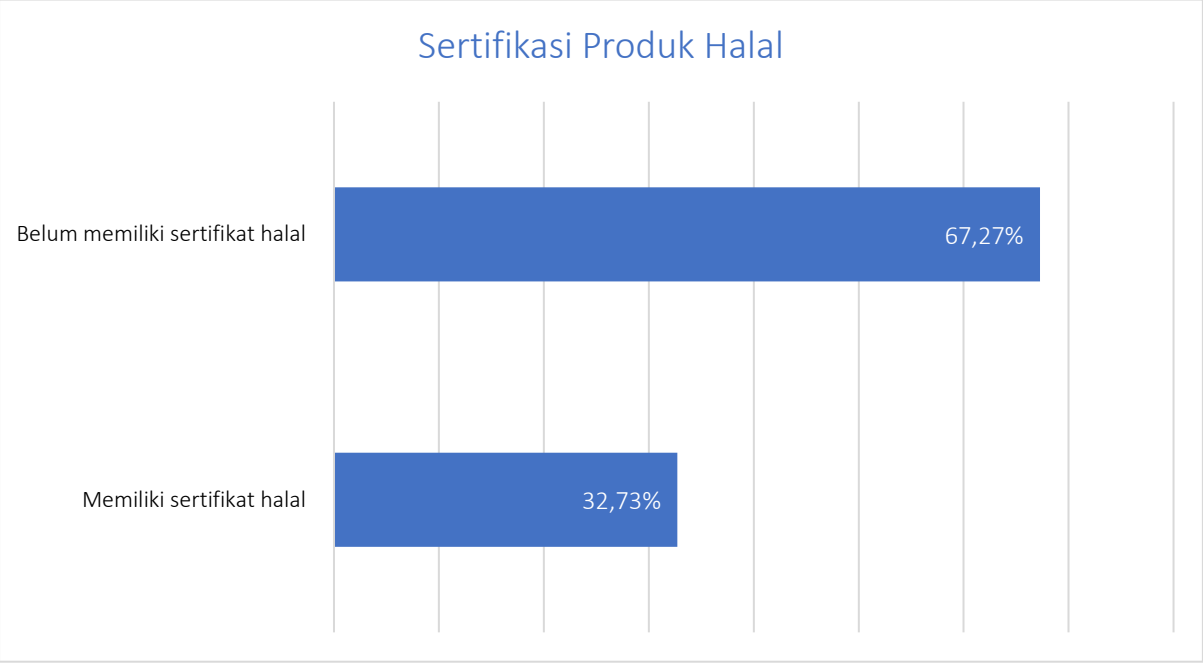
Sertifikasi Produk Halal
Belum memiliki sertifikat halal
67,27%
Memiliki sertifikat halal
32,73%

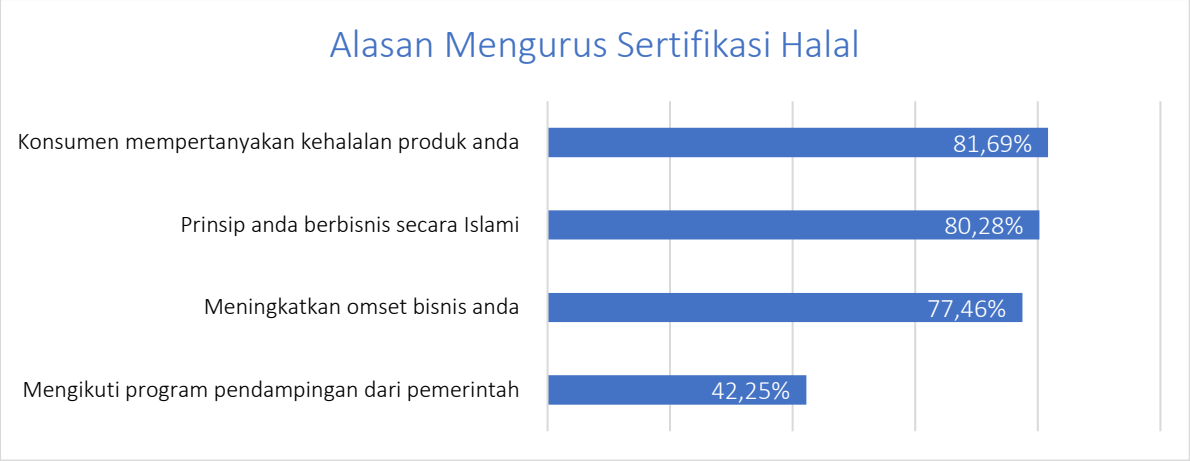
Alasan Mengurus Sertifikasi Halal
Konsumen mempertanyakan kehalalan produk anda
81,69%
Prinsip anda berbisnis secara Islami
80,28%
Meningkatkan omset bisnis anda
77,46%
Mengikuti program pendampingan dari pemerintah
42,25%

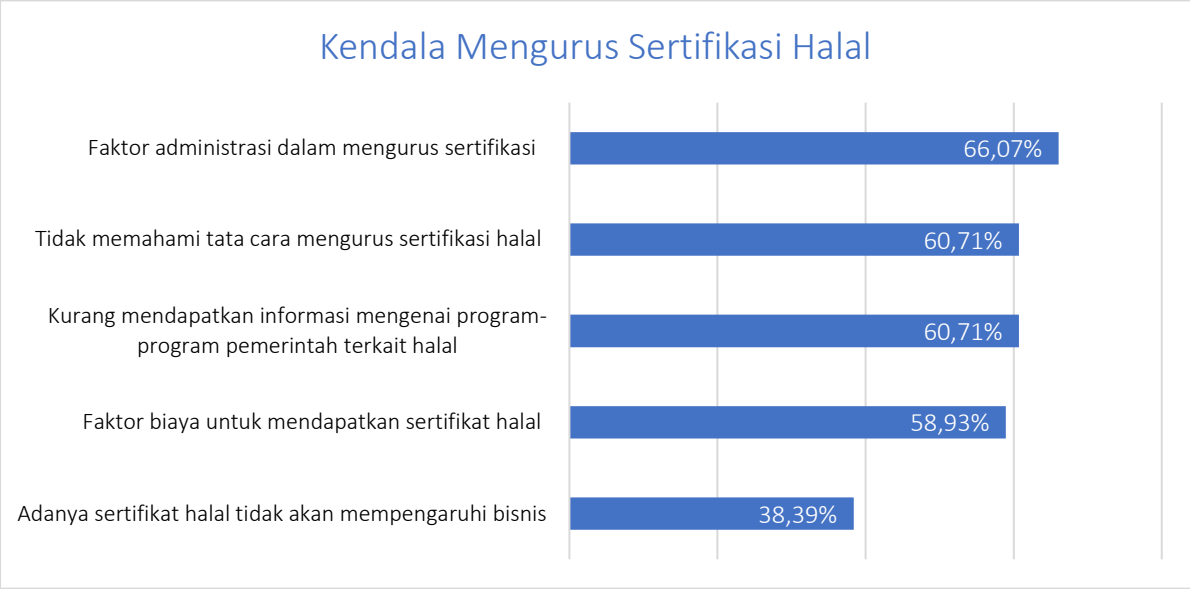
Kendala Mengurus Sertifikasi Halal
Faktor administrasi dalam mengurus sertifikasi
66,07%
Tidak memahami tata cara mengurus sertifikasi halal
60,71%
Kurang mendapatkan informasi mengenai program-program pemerintah terkait halal
60,71%
Faktor biaya untuk mendapatkan sertifikat halal
58,93%
Adanya sertifikat halal tidak akan mempengaruhi bisnis
38,39%

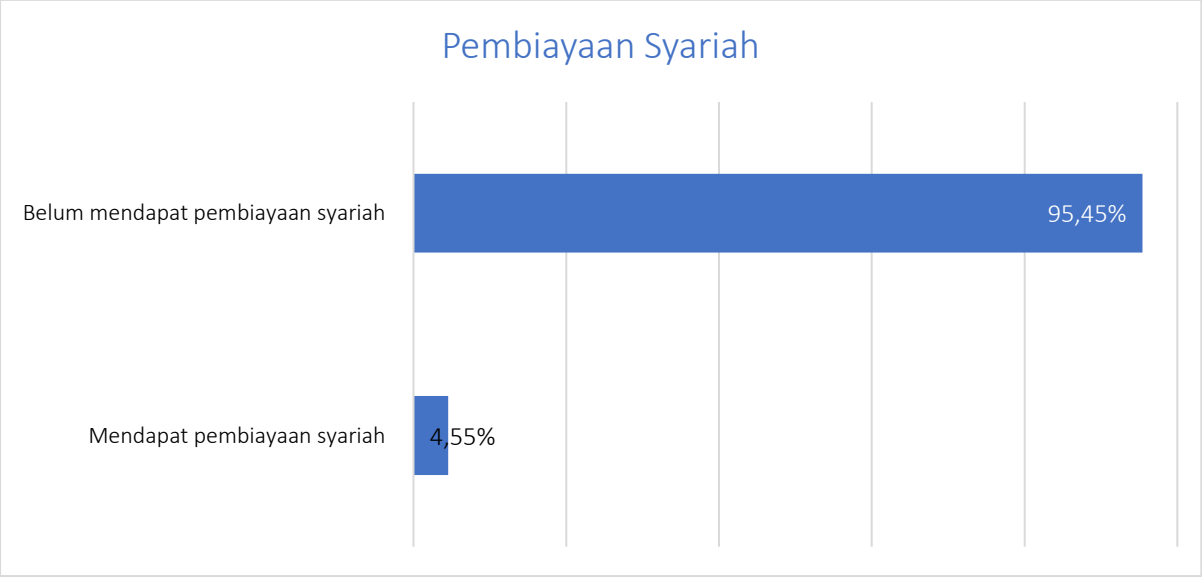
Pembiayaan Syariah
Belum mendapat pembiayaan syariah
95,45%
Mendapat pembiayaan syariah
4,55%

Survei UMK (Usaha Mikro dan Kecil) Makanan Minuman Kuliner[22]

Provinsi Jawa Tengah

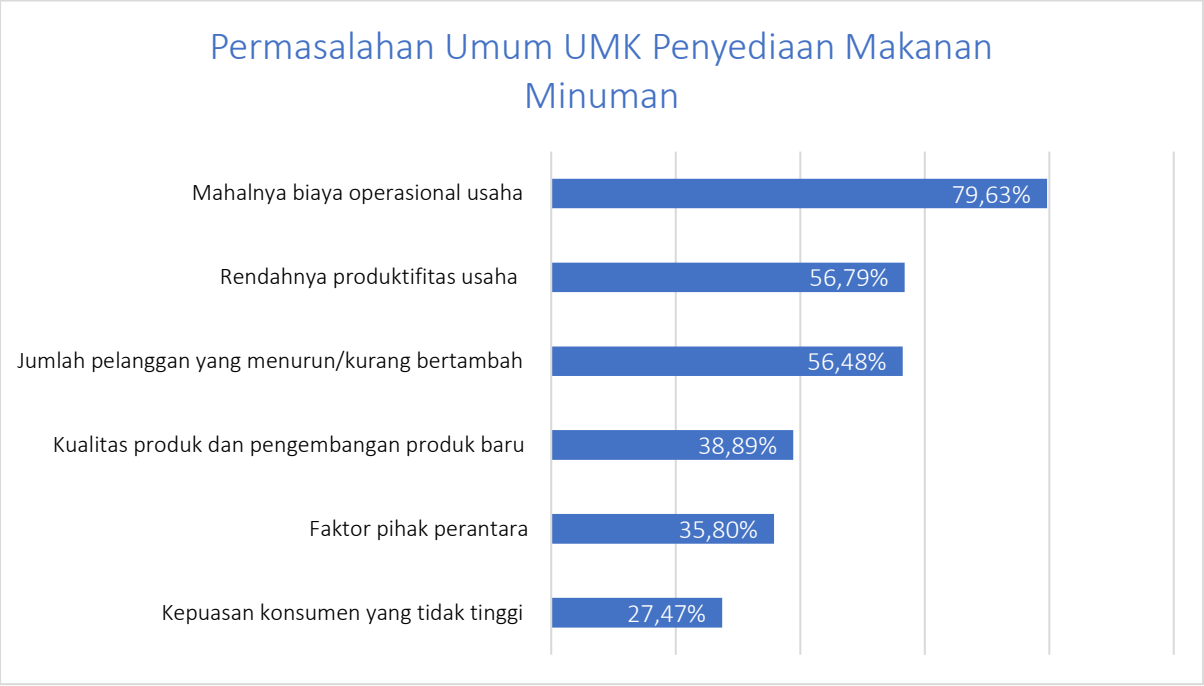

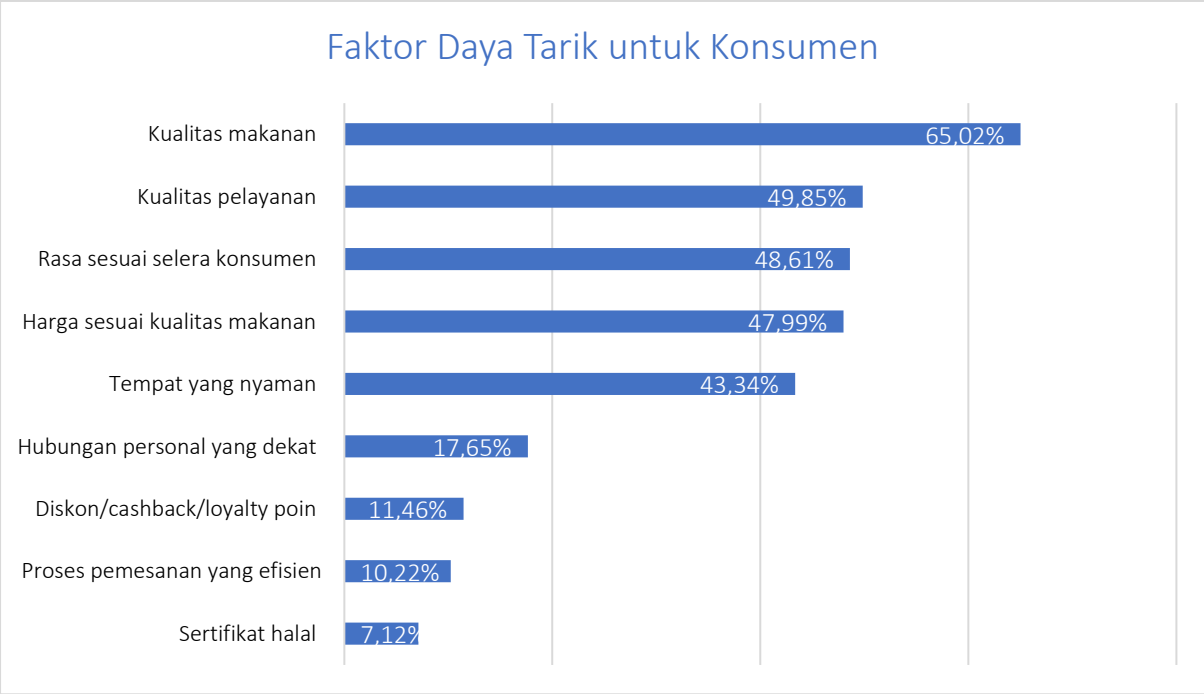

[22] Kegiatan survey dilakukan bersama IPB dan GAPPMI (bagian UMKM) dengan jumlah responden sebanyak 325 UMK Makanan Minuman Kuliner di Provinsi Jawa Tengah

Top 3 Permasalahan Aspek Biaya Operasional
Gaji pegawai
76,63%
Bahan baku
75,44%
Sewa
48,82%
Pemeliharaan dapur, dsb
32,54%
Legal
17,16%
Pelatihan pegawai
9,17%
Teknologi
8,28%
Bahan mentah yang tak terpakai
8,28%
Bahan mentah yang busuk
6,51%
Perantara untuk mendapatkan suplai bahan baku
3,85%
Food delivery dari pihak ketiga
3,25%
Suku bunga pinjaman
3,25%

Top 3 Permasalahan Aspek Produktifitas Usaha
Pegawai kurang/tidak produktif
46,87%
Kesulitan dalam peningkatan kompetensi pegawai
46,27%
Kesulitan dalam mendapatkan/mempertahankan pegawai
40,90%
Meningkatkan kualitas masakan dan praktik bisnis
33,13%
Lamanya waktu proses pemesanan makanan
31,94%
Mengelola rumah makan secara manual
28,96%
Peralatan yang sudah lama dan tidak efisien
23,28%
Kurang efisien dalam proses dokumentasi bukti pembayaran
22,99%
Kurang/berlebih terkait jumlah bahan baku untuk operasi dapur
20,30%

Top 3 Permasalahan Aspek Pemasaran
Terlalu banyak kompetitor di lokasi usaha
72,87%
Mahalnya biaya iklan
43,90%
Konsumen baru tidak menjadi konsumen setia
38,41%
Konsumen baru tidak mau mencoba
38,11%
Lokasi restoran tidak menarik
28,05%
Program iklan dan pemasaran tidak sesuai dengan target konsumen
22,26%
Konsumen lebih banyak datang hanya jika ada diskon/cashback
21,65%
Konsumen memberi feedback yang buruk di social media
12,50%
Kurangnya/tidak ada jasa catering
10,67
Mahalnya biaya pengantaran makanan
10,06

Top 3 Permasalahan Aspek Suplai Bahan Baku
Fluktuasi harga bahan baku
65,06%
Mahalnya harga bahan baku
63,25%
Faktor musiman untuk bahan baku jenis tertentu
38,86%
Kesulitan dalam mendapatkan kualitas bahan baku yang baik
28,31%
Kurangnya akses kepada berbagai macam pensuplai
20,78%
Kurangnya informasi yang benar terkait harga pasar
19,88%
Keterlambatan dalam menerima bahan baku
19,28%
Kurangnya variasi terkait jenis bahan baku
12,95%
Cukupnya ketersediaan uang kas
11,45
Kesalahan spesifikasi bahan baku pada saat barang diterima
10,54
Rendahnya kualitas jasa logistik dari pensuplai
6,3

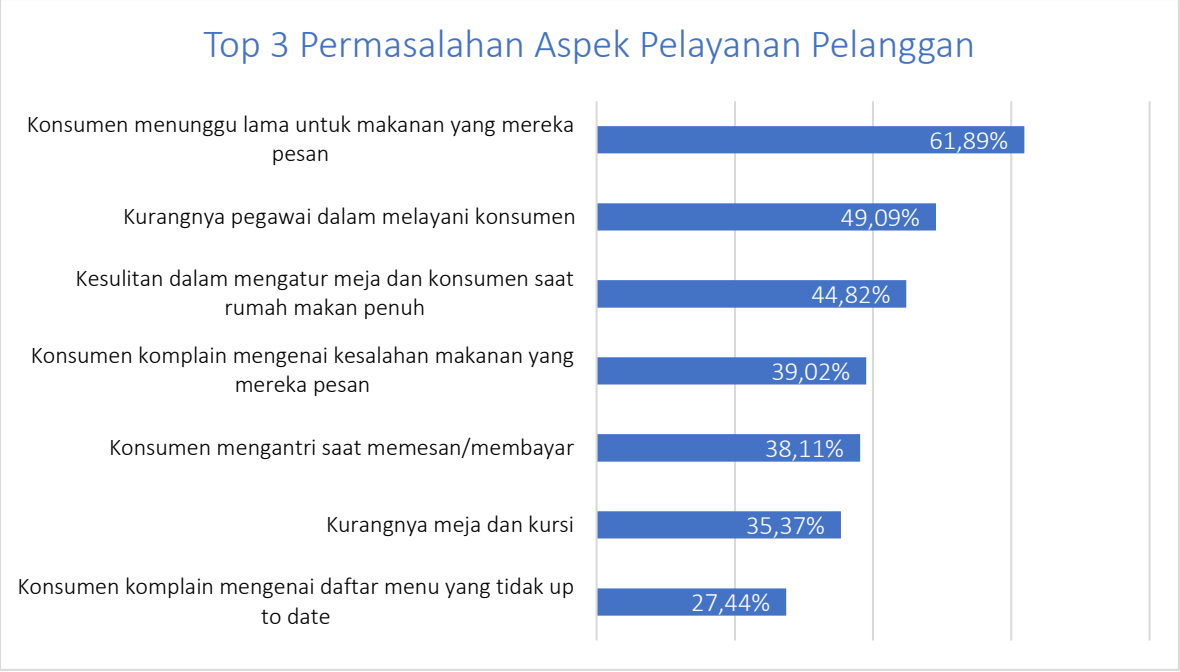
Top 3 Permasalahan Aspek Pelayanan Pelanggan
Konsumen menunggu lama untuk makanan yang mereka pesan
61,89%
Kurangnya pegawai dalam melayani konsumen
49,09%
Kesulitan dalam mengatur meja dan konsumen saat rumah makan penuh
44,82%
Konsumen komplain mengenai kesalahan makanan yang mereka pesan
39,02%
Konsumen mengantri saat memesan/membayar
38,11%
Kurangnya meja dan kursi
35,37%
Konsumen komplain mengenai daftar menu yang tidak up to date
27,44%

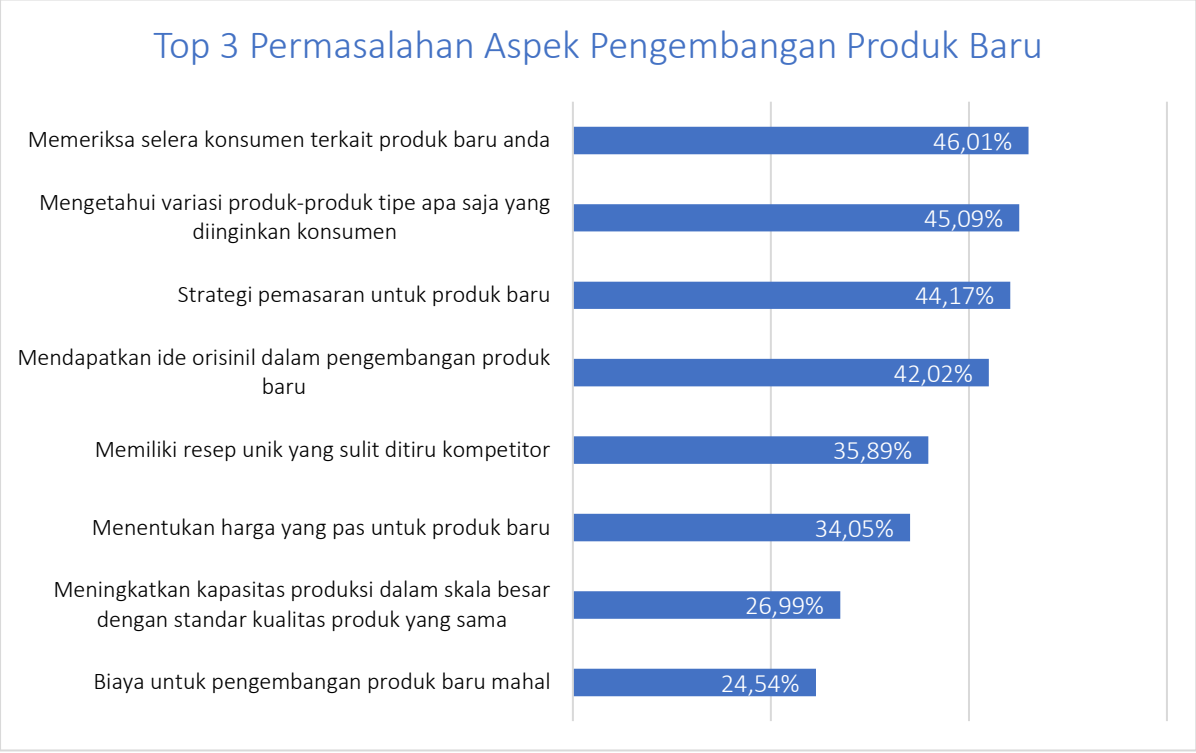
Top 3 Permasalahan Aspek Pengembangan Produk Baru
Memeriksa selera konsumen terkait produk baru anda
46,01%
Mengetahui variasi produk-produk tipe apa saja yang diinginkan konsumen
45,09%
Strategi pemasaran untuk produk baru
44,17%
Mendapatkan ide orisinil dalam pengembangan produk baru
42,02%
Memiliki resep unik yang sulit ditiru kompetitor
35,89%
Menentukan harga yang pas untuk produk baru
34,05%
Meningkatkan kapasitas produksi dalam skala besar dengan standar kualitas produk yang sama
26,99%
Biaya untuk pengembangan produk baru mahal
24,54%

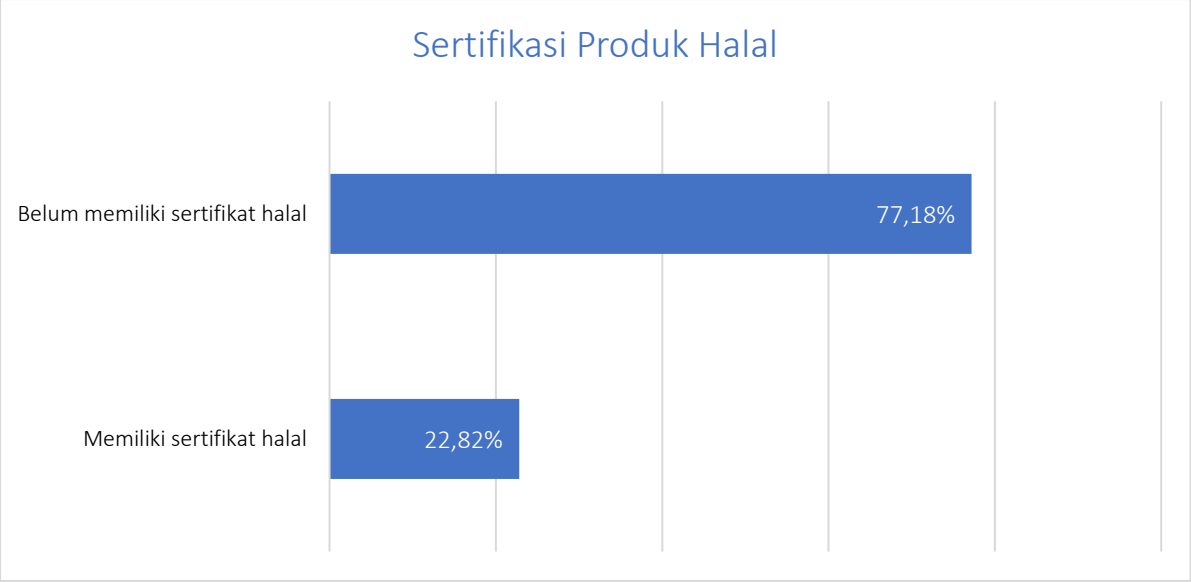
Sertifikasi Produk Halal
Belum memiliki sertifikat halal
77,18%
Memiliki sertifikat halal
22,82%

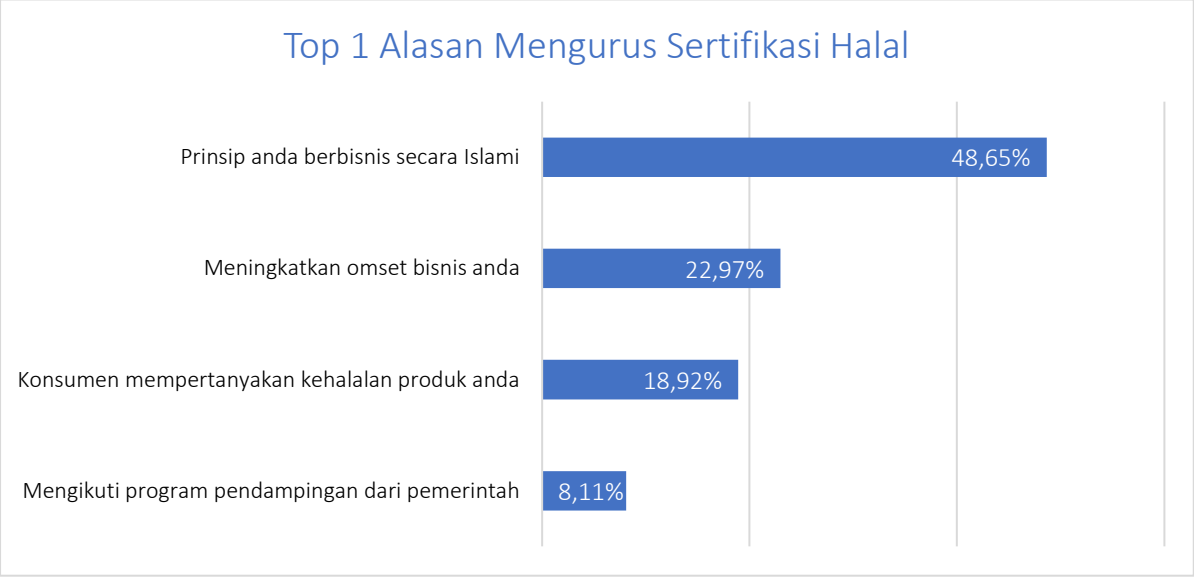
Top 1 Alasan Mengurus Sertifikasi Halal
Prinsip anda berbisnis secara Islami
48,65%
Meningkatkan omset bisnis anda
22,97%
Konsumen mempertanyakan kehalalan produk anda
18,92%
Mengikuti program pendampingan dari pemerintah
8,11%

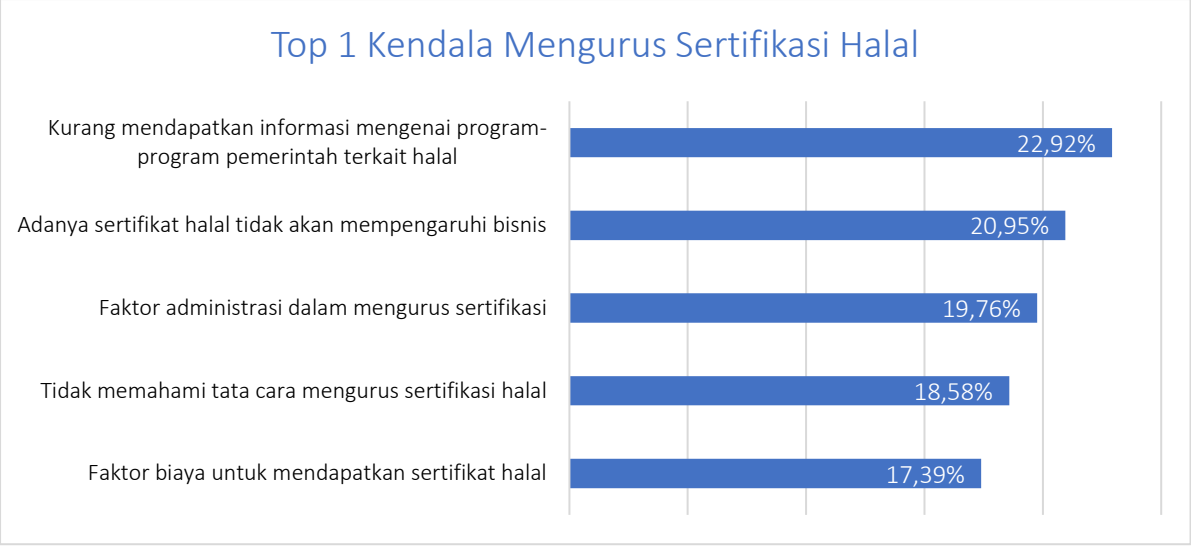
Top 1 Kendala Mengurus Sertifikasi Halal
Kurang mendapatkan informasi mengenai program-program pemerintah terkait halal
22,92%
Adanya sertifikat halal tidak akan mempengaruhi bisnis
20,95%
Faktor administrasi dalam mengurus sertifikasi
19,76%
Tidak memahami tata cara mengurus sertifikasi halal
18,58%
Faktor biaya untuk mendapatkan sertifikat halal
17,39%

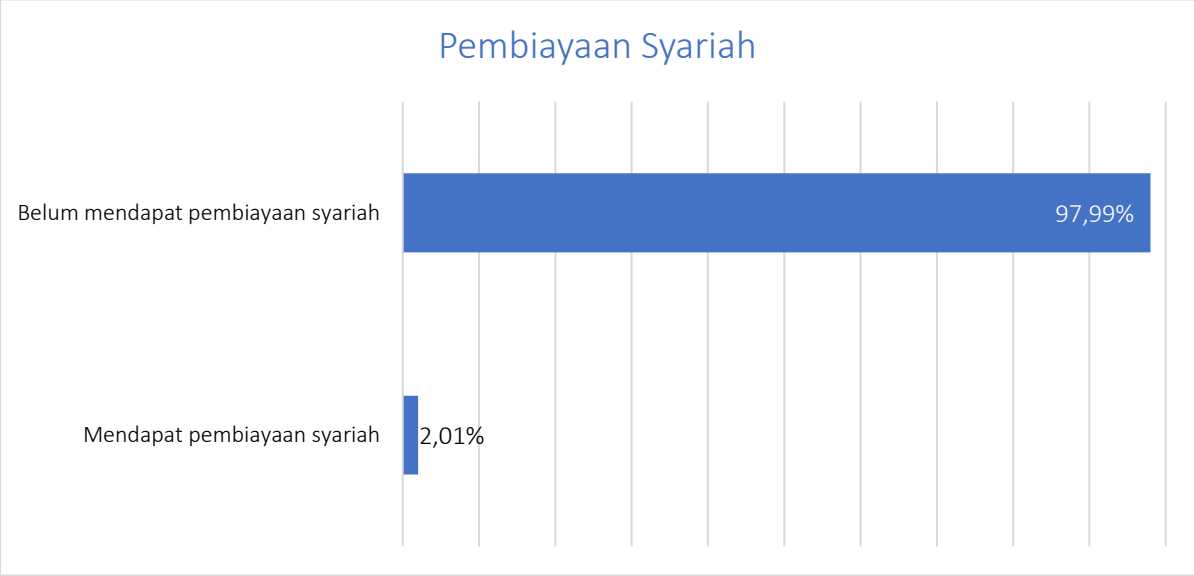
Pembiayaan Syariah
Belum mendapat pembiayaan syariah
97,99%
Mendapat pembiayaan syariah
2,01%

Dana *Ta'awun* dan No Denda (Kearifan Lokal Lembaga Keuangan Syariah yang Memberi Solusi

Dr. H. Nur Fatoni, M.A[23]

Dana *Ta'awun* pada KSPPS TAMZIZ Wonosobo Jawa Tengah

Jawa Tengah memiliki lembaga keuangan mikro yang maju dan masing-masing memiliki caranya sendiri dalam berbisnis. Ada BMT/KSPPS yang besar dibeberapa kabupaten seperti BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) di Lasem Rembang, BMT TAMZIZ di Wonosobo, Kospin Jasa Syariah di Pekalongan. Praktek baik yang saya temukan di BMT TAMZIZ Wonosobo, yaitu: Adanya Dana *Ta'awun* yang dikelola dengan baik oleh internal BMT.

Nasabah BMT mayoritas pengusaha kecil dan mikro yang rentan masalah. Mayoritas sektor usaha yang dibiayai oleh BMT TAMZIZ adalah perdagangan. Umumnya tempat usahanya ada di pasar-pasar tradisional. Mereka ada yang memiliki kios ada yang hanya lapak bahkan ada yang tidak memiliki tempat di pasar. Mareka pedagang keliling untuk menjajakan dagangannya. Pasar tradisional sering terjadi kebakaran, bahkan ada yang berkali-kali terbakar seperti Pasar Induk Wonosobo. Para nasabah belum memiliki asuransi, ketika suatu saat pasar terbakar dan masih memiliki kewajiban di BMT, nasabah memiliki beban yang sangat berat.

Di sisi lain BMT tidak menemukan kecocokan dengan lembaga asuransi syariah sekalipun. Ketidakcocokannya dalam hal praktis seperti besarnya premi, ribetnya proses transaksi asuransi, susahnya dan lamanya klaim asuransi dan keterbatasan produk asuransi dalam melindungi nasabah BMT. BMT menginginkan perlindungan total kewajiban nasabah akibat kejadian yang diluar kesengajaan (*force majeur*) dengan premi yang kecil dan dibayar sekali. Problem itu coba dipecahkan dengan simulasi bisnis perlindungan nasabah yang dikelola secara internal.

Jawaban atas persoalan di atas adalah membentuk dana *ta'awun* pada internal BMT dan dikelola oleh divisi tersendiri. Divisi tersebut merupakan divisi khusus yang mengatur dana *ta'awun* mulai dari penetapan besaran premi sampai ketentuan-ketentuan perlindungannya dan pegaturan keuangannya. Semua nasabah pembiayaan wajib membayar premi yang dibayarkan sekali selama pembiayaan. Besarnya antara 0.5-0.75 % dari total pembiayaan. Perlindungan yang diberikan meliputi kerugian akibat nasabah meninggal, modal usaha terkena musibah yang bersifat *force majeur* seperti terbakar. Besaran perlindungan adalah sebesar kewajiban nasabah pada BMT.

Kewajiban nasabah BMT ditentukan oleh akad yang digunakan. Akad yang digunakan oleh BMT mayoritas *mudharabah*. Persentasenya sampai 80%. Konsep *mudharabah* yang praktekkan di BMT menggunakan filosofi "nggaduh". masyarakat jawa biasa melakukan kerjasama ternak atau pengolahan sawah, dimana ada pemilik ternak dan peternak. Ternak milik pemilik 100% dan peternak 100% melakukan fungsi peternak. Begitu juga pada pengolahan sawah. Masyarakat paham bahwa jika terjadi kematian hewan ternak karena sesuatu yang tidak disengaja oleh peternak maka kerugian ditanggung 100% oleh pemilik ternak sedangkan peternak tidak mendapat beban menanggung harga ternak yang mati.

[23] Dosen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Filosofi tersebut yang digunakan oleh BMT. Jika modal *mudharabah* yang diberikannya habis atau rusak akibat *force majeur* maka BMT tidak menagihnya dan menyatakan lunas. Pihak yang melunasi adalah divisi *ta'awun*. Jika ditelusuri memang ada persoalan pada premi dana *ta'awun* yang dibebankan kepada nasabah. Lazimnya penghapusan hutang nasabah bisa dari cadangan penghapusan aktiva yang disisihkan dari kentungan BMT. Upaya membentuk dana *ta'awun* ini kami anggap praktek baik yang memberi solusi dengan catatan dilakukan secara bertangung jawab dan tidak melanggar regulasi. Divisi *ta'awun* di BMT TAMZIZ telah mampu membebaskan kewajiban nasabah dalam total akumulasi yang sangat besar untuk ukuran BMT.

No Penalty dan *Margin Flat* pada BPRS Asad Alif Sukorejo Kendal Jawa Tengah

Keunikan yang kami temkan pada sektor ekonomi dan keuangan, merupakan pilihan industri yang tidak lazim untuk menjawab persoalan yang dihadapinya. Keunikan yang diangkat di tulisan ini berupa tidak ada denda dan cara pengakuan keuntungan *murabahah* dengan cara *flat* atau margin tetap tiap bulan.

1. Tidak ada denda

   BPRS Asad Alif menerapkan kebijakan tidak ada denda karena telat membayar angsuran *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah*. Ketiganya merupakan akad yang digunakan pada pembiayaannya. Umumnya BPRS dan LKS dan konvensional menerapkan denda untuk membangun keteraturan nasabah dalam membayar angsuran. Fatwa DSN MUI membolehkannya. Manajemen sepakat (direktur & Komisaris) tidak menggunakan denda untuk menertibkan angsuran nasabah. Manajemen memiliki keyakinan bahwa denda tidak membawa manfaat dan bukan cara yang baik. Dengan tidak menerapkan denda akan semakin membangun gambaran masyarakat tentang lembaga keuangan syariah yang berbeda dengan konvensional.

   Para petugas lapangan harus lebih rajin mengunjungi nasabah untuk mengingatkan jika hampir mendekati jatuh tempo dan belum membayar. Cara ini lebih berhasil. Buktinya NPF BPRS Asad Alif termasuk sehat di bawah BPRS lain yang menerapkan denda. Pilihan ini membuahkan hasil. Image masyarkat tentang BPRS semakin positif dengan kesan 'mau mengerti" dan "memberi solusi". Rupanya masyarakat sudah berprasangka jelek dengan istilah denda, meskipun nominalnya kecil. Pilihan ini telah dijalankan lebih dari 20 tahun.

2. Pengakuan keuntungan *murabahah* menggunakan sistem *flat* (keuntungan tetap tiap bulan)

   Fatwa DSN MUI No. 84 tahun 2012 mengarahkan LKS untuk memilih cara anuitas dalam pengakuan keuntungan. Cara itu lebih menguntungkan bank tetapi BPRS Asad Alif memiliki pengalaman lain. Nasabah merasakan tidak "srek" (kurang pas dihati) menggunakan cara anuitas, karena angsuran yang dibayarkan tidak menggambarkan besaran pokok yang dibayar. Tipe nasabahnya cenderung *top up*. DPS telah menyempurnakan akad khusus untuk *top up* dengan akad dan mekanisme musyarakah mutanaqisah. Tahun 2020 telah diajukan ke OJK. Hal ini yang diupayakan oleh BPRS sad Alif. Ia ingin nasabahnya tetap loyal maka cara yang telah biasa dipraktekkan (tidak biasa bagi yang lain) dipertahankan, meskipun pernah disarankan juga oleh OJK untuk dirubah. Keteguhan pada pilihan ini bagi kami sebuah keunikan yang menjawab persoalan riil. Terbukti pembiayaannya tetap tumbuh baik.

Wawancara
Kepala Instansi Provinsi Jawa Tengah

Bagaimana visi, rencana, dan program-program terkait ekonomi syariah?

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak mempunyai program / visi misi khusus berkaitan dengan pengembangan ekonomi Syariah.

Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah

Visi:
Menuju Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera
Rencana dan Program:

1. Program Pengembangan Jaringan Usaha
   - Sosialisasi Pembiayaan bagi Koperasi Syariah di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
   - Implementasi Pembiayaan bagi Koperasi Syariah di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
   - Bersama dengan LPDB Kemenkop UKM RI memfasilitasi kegiatan pelatihan pembiayaan Koperasi Syariah mitra LPDB

2. Program Sertifikasi Halal bagi UMKM melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun 2020 kepada 500 UMKM yang tersebar di 35 Kapubaten/Kota, total yang terfasilitasi sebanyak 1,144 UMKM.

Kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Priwisata Provinsi Jawa Tengah

Pariwisata ramah Muslim/wisata syariah adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan Muslim. Beberapa contoh bentuk pelayanan wisata ramah Muslim:

1. Hotel yang tidak menyediakan makanan dan minuman yang mengandung alkohol, fasilitas kolam renang, toilet, spa dan lain – lain terpisah antara pria dan wanita;
2. Transportasi dalam industri pariwisata ramah Muslim juga memakai konsep islami, penyedia jasa transportasi wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan Muslim dalam pelaksanaan ibadah selama perjalanan. Kemudahan ini bisa berupa penyediaan tempat sholat dalam pesawat, pemberitahuan berupa pengumuman maupun adzan jika telah memasuki waktu sholat, selain tentunya menyediakan makanan dan minuman yang tidak mengandung alkohol.
3. Visi Misi secara tertulis tentang hal tersebut di atas Provinsi Jawa Tengah belum ada, namun Jawa Tengah telah memulai menggarap potensi Pariwisata ramah Muslim di 6 Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Jawa Tengah, antara lain :
   - DPP Semarang – Karimunjawa dan sekitarnya
   - DPP Solo - Sangiran dan sekitarnya
   - DPP Borobudur – Dieng dan sekitarnya
   - DPP Rembang - Blora dan sekitarnya
   - DPP Pekalongan – Tegal dan sekitarnya
   - DPP Nusakambangan – Baturraden dan sekitarnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Sesuai tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah secara spesifik (langsung) tidak memiliki rencana / program yang terkait dengan pengembangan sektor ekonomi syariah dan keuangan syariah, namun terkait dengan industri halal sebagai pembina sektor industri khususnya industri kecil dan menengah memiliki peran yang sangat strategis, agar tercipta iklim usaha yang kondusif, tanpa mengecilkan arti penting peran serta *stakeholder* yang lain, yang tentu saja juga secara sinergis ikut berperan secara bersama-sama dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Harus diakui bahwa jumlah populasi industri halal di Jawa Tengah masih sangat kecil, dan ini menjadi PR bagi pemda untuk membuat terobosan program agar populasi industri halal di Jawa Tengah semakin berkembang dan dapat menyumbang bagi pertumbuhan perekonomian daerah.
Sejauh ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sudah memberikan fasilitasi sertifikasi halal kepada industri makanan dan minuman namun dikarenakan keterbatasan anggaran jumlah industri yang tertutupi sangat sedikit tidak sebanding dengan populasi yang ada. Diharapkan kepada masyarakat/konsumen dan masyarakat industri yaitu tumbuhnya kesadaran untuk mengkonsumsi dan atau memproduksi produk yang halal, apabila hal ini sudah menjadi budaya masyarakat maka industri halal akan tumbuh secara otomatis dan alami.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah

Sebagai bagian dari jaringan kantor Bank Indonesia di daerah, KPw BI Jawa Tengah melakukan pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah berdasarkan blueprint pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dari Kantor Pusat dan disesuaikan dengan kondisi di Jawa Tengah.
Pada *blueprint* tersebut, visi pengembangan sektor ekonomi syariah adalah: Indonesia yang Mandiri, Makmur, dan Madani dengan Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka Dunia.
Sesuai dengan visi tersebut, beberapa program Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah yang telah dilaksanakan di Jawa Tengah termasuk rencana ke depan adalah sebagai berikut:

1. Mendorong Kemandirian Pondok Pesantren
    - Program Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren
        - Ponpes Al-Anwar Sarang Rembang-Sarang, Kab. Rembang
          Pemberian bantuan teknis dan peralatan untuk mendukung unit usaha konfeksi. Beberapa fasilitasi yang dilakukan antara lain: pelatihan, manajemen usaha, menghubungkan dengan Baznas dan Asbisindo untuk akses modal usaha, dan *linkage* dengan industri tekstil (Prisma Grup).
        - Ponpes Al-Mas'udiyah-Jimbaran, Kab. Semarang
          Fasilitasi pada usaha perikanan lele, berupa: pelatihan makanan olahan, manajemen usaha, *linkage* program (dengan Baznas, Asbisindo, dan Klaster Ikan Air Tawar binaan BI Jateng) diantaranya untuk penyediaan pembiayaan pembangunan tambahan kolam lele dan pemasaran, serta penyediaan sarana prasarana (seperti green house, hidroponik, komputer dan perangkatnya, mesin pembuat pakan lele, dan alat pengolahan abon.
        - Pondok Pesantren Pabelan-Muntilan, Kab. Magelang
          Fasilitasi pada usaha peternakan domba, berupa: perbaikan kandang komunal dan akses bantuan ternak dari Baznas.
        - Pondok Pesantren Roudlatul Mubtadiin-Balekambang, Kab. Jepara
          Pendampingan, berupa: pelatihan penyusunan pedoman Akuntansi Ponpes dan fasilitasi program elektronifikasi dengan PT. Bank BRI; serta pemberian bantuan sarana prasarana seperti digester pengolahan limbah kotoran santri, *green house*, dan hidroponik.
        - Pondok Pesantren Mathali'ul Huda Al-Kautsar-Kab. Pati
          Fasilitasi unit usaha di bidang makanan dengan produk VCO, berupa kunjungan industri ke PT. Krambil Idjo Jogja sekaligus pelatihan Standarisasi Pengolahan Minyak Kelapa Murni (VCO).
        - Pondok Pesantren Futuhiyyah-Mranggen, Kab.Demak
          Fasilitasi unit usaha berupa kegiatan program replikasi model bisnis pengolahan air minum. Selain Ponpes Futuhiyyah, program replikasi model bisnis pengolahan air minum ini juga akan dilakukan di Ponpes Al Fadlu 2, Kab. Kendal pada 2020.

- Pengembangan Trenshop (Pesantren Shop) bekerja sama dengan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) dengan pemberian bantuan rak/etalase.

- Penyusunan Standarisasi Laporan Keuangan Pesantren
  Tujuannya adalah untuk membuat laporan pesantren bersifat kompatibel dengan lembaga lain (terutama lembaga keuangan syariah). Fasilitasi pendampingan *pilot project* pembukuan Ponpes aplikasi SANTRI (Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia) berdasarkan Pedoman Akuntansi Pondok Pesantren.
- Implementasi Layanan Keuangan Digital di Ponpes
  Fasilitasi sinergi antara Pondok Pesantren dengan penerbit uang elektronik di Ponpes Al Fusha, Kab. Pekalongan.
- Pembentukan Holding Bisnis Pesantren (HBP) se-Jawa Tengah
  Telah dilaksanakan dua kali *Focus Group Discussion* (FGD) untuk membahas rencana pembentukan HBP Jawa Tengah yang melibatkan perwakilan Ponpes se-Jawa Tengah, Pemprov. Jateng, dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). Saat ini sedang proses pembentukan pengurus Forum Bisnis Pesantren yang diharapkan bisa menjembatani terbentuknya HBP berbadan hukum.

2. Pengembangan UMKM berbasis syariah
   - Fasilitasi program IKRA (Industri Kreatif Syariah Indonesia), yaitu program pengembangan usaha syariah yang *holistic* dengan mengintegrasikan semua aspek pengembangan kapasitas usaha, produk, *branding* hingga mediasi pertemuan antara seller dan buyer baik secara *offline* maupun *online*. KPwBI Jateng mengirimkan 6 UMKM yang terdiri dari 3 UMKM makanan dan 3 UMKM fesyen untuk diikutkan dalam seleksi IKRA. Pada seleksi tersebut, UMKM dikurasi oleh kurator profesional yaitu "Dewan IKRA Indonesia" dan yang terpilih akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti *capacity building*, promosi maupun ekspo baik di dalam dan luar negeri.
   - Fasilitasi halal bekerja sama dengan LPPOM MUI
     Pelaksanaan Pelatihan Sertifikasi Jaminan Halal kepada 23 UMKM dan 21 diantaranya telah memenuhi syarat. Selanjutnya kepada UMKM yang telah memenuhi syarat didampingi untuk memproses sertifikasi halal dan seluruhnya telah memperoleh sertifikat halal, yaitu 19 UMKM pada tahun 2019 dan 2 UMKM pada awal 2020.

3. Pengembangan Kerjasama Ekonomi Syariah
   - Kerjasama antara pelaku bisnis dengan ponpes, diantaranya kerjasama antara Ponpes Al Anwar dengan perusahaan tekstil Pisma Group berupa pemberian pelatihan operasional konfeksi dari Pisma Group kepada santri dan alumni santri Ponpes Al Anwar.
   - Riset Potensi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Melalui Pemberdayaan Pondok Pesantren di Jawa Tengah pada tahun 2016.
   - Pembentukan Pusat Informasi, Kajian, dan Pengembangan Ekonomi Syariah (PIKES).

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 3 Jawa Tengah

Visi:
Mewujudkan industri keuangan syariah yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan mendukung stabilitas sistem keuangan serta berdaya saing tinggi.
Misi:
1. Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi
2. Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan
3. Memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk
4. Memperbaiki kuantitas dan kualitas SDI & TI serta infrastuktur lainnya
5. Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat

Program:
1. Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi
   - Sosialisasi kebijakan modal inti minimum perbankan syariah dan forum pemegang saham;
   - Pemantauan pemenuhan modal inti minimum perbankan syariah;
   - Optimalisasi peran dan peningkatan komitmen BUK untuk mengembangkan layanan perbankan syariah hingga mencapai *share* minimal di atas 10% aset BUK induk;

2. Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan
   - Optimalisasi pengelolaan dana wakaf/zakat/infaq/shodaqoh melalui perbankan syariah;
   - Mendorong keterlibatan bank syariah dalam pengelolaan dana pemerintah pusat/daerah dan dana BUMN/BUMD;
3. Memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk
   - Mendorong dukungan infrastruktur BUK Induk dalam penyediaan produk mobile banking syariah;
   - Melakukan *review* terhadap Rencana Bisnis UUS;
4. Memperbaiki kuantitas dan kualitas SDI & TI serta infrastruktur lainnya
   - Pemantauan anggaran pendidikan SDI perbankan syariah dan realisasi program pendidikan yang diikuti SDI;
   - Mendorong dukungan infrastruktur TI BUK Induk dalam penyediaan produk *mobile banking* syariah;
5. Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat
   - Penyelenggaraan kegiatan edukasi, pameran, maupun sosialisasi;
   - Memperkuat kolaborasi dengan bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) serta pemangku kepentingan utama dalam peningkatan literasi keuangan syariah.

Direktur Bisnis Ritel & UUS PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng)

Bank Jateng Syariah merupakan Unit Bisnis yang dibentuk oleh Bank Jateng guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan berbasis syariah. Unit Usaha Syariah Bank Jateng resmi dibuka Mei 2008. Sejak awal berdiri, Bank Jateng Syariah terus berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi syariah khususnya di Jawa Tengah. Program-program yang telah kami lakukan antara lain penguatan sektor-sektor riil berbasis syariah melalui penyaluran pembiayaan ke Rumah Sakit Islam, Universitas/Sekolah Islam, UMKM Halal maupun sektor keuangan syariah (BPRS, BMT, dll). Di sisi penghimpunan dana, kami juga bekerjasama dengan Pondok Pesantren, Universitas/Sekolah Islam dan juga memberikan edukasi tentang perbankan syariah. Tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi, kami juga menjalankan fungsi sosial bekerjasama dengan BAZNAS Provinsi dalam menghimpun dana dari muzakki serta menyalurkannya kepaa mustahiq.

Bagaimana peluang pengembangan sektor ekonomi syariah, industri halal, dan sektor keuangan syariah?

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah

1. Jumlah penduduk Muslim yang besar di Jawa Tengah mencapai 96,59 % (2019) di 35 Kab/Kota ditambah dengan tren konsumsi produk halal yang meningkat.
2. Jawa Tengah tahun 2019 memperoleh penghargaan destinasi wisata ramah Muslim unggulan (peringkat 9) dari kementerian Pariwisata salah satunya karena kemudahan untuk akses ke tempat wisata dan pelayanan yang ramah Muslim. Pelayanan ramah Muslim mencakup destinasi wisata religi sertifikasi pada tempat makan dan kuliner halal, hotel, peningkatan fasilitas tempat ibadah, pemisahan ruang antara laki-laki perempuan misalnya untuk spa dan olahraga.
3. Peningkatan fasilitas, pelayanan dalam wisata ramah Muslim akan terus dilakukan mengingat sebesar 80% wisatawan yang berkunjung ke Jawa Tengah adalah Muslim.
4. Di tengah ekonomi masyarakat dan fenomena halal, saat ini jumlah koperasi syariah di Jateng sudah sebanyak 544. Jumlah usaha yang telah mendapat sertifikasi halal oleh MUI sebanyak 6,050. Sejumlah 500 usaha diantaranya telah mendapat diklat jaminan halal. Dalam rangka membantu ekonomi pesantren dan juga pemberdayaan UMKM, Baznas Jateng membeli produk UMKM, setiap UMKM 1 juta untuk memberi bantuan kepada pesantren-pesantren.
5. Ketersediaan lembaga keuangan syariah yang ada di Jawa Tengah untuk mendukung sistem keuangan syariah yaitu:
   - Bank Umum Syariah 10 bank tersebar dalam 155 kantor
   - Unit usaha syariah 35 unit
   - BPR Syariah 25 Bank di 25 kantor

Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah

Koperasi Syariah yang ada di Jawa Tengah sebanyak 525 Koperasi, pengembangan Koperasi Syariah seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran stratejik dalam perluasan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. KJKS berperan sebagai agent of asset distribution untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, melalui kegiatan baitul maal yang berfungsi sebagai lembaga soial dan baitul tamwil sebagai lembaga bisnis dengan pola syariah memiliki peluang yang sangat strategis, melalui program pembiayaan syariah terlihat dari:

1. Kebutuhan pembiayaan yang mudah, murah dan cepat
2. Adanya kepercayaan pihak luar sebagai mitra/lembaga donor
3. Besarnya pelaku usaha mikro yang berminat terhadap layanan koperasi
4. Keinginan masyarakat untuk menjalankan syariat Islam
5. Perhatian positif pemerintah terhadap pengembangan KJKS
6. Semakin mudah akses sistem manajemen informasi dan teknologi bagi KJKS
7. Pendirian dan perkembangan jaringan KJKS melalui perhimpunan/asosiasi

Peluang pengembangan fasilitas halal khususnya makanan dan minuman sangat terbuka luas, karena produk makanan dan minuman halal sudah menjadi pola hidup masyarakat Indonesia baik Muslim maupun non Muslim.

Kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Priwisata Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah mempunyai beberapa tempat yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi wisata syariah atau wisata ramah Muslim yaitu:

- DPP Semarang – Karimunjawa dan sekitarnya
  - Kabupaten Demak: Masjid Agung, Makam Sunan Kalijogo, Makam Raden Patah,
  - Kabupaten Kudus: Masjid Menara Kudus, Makam Sunan Muria,
  - Kabupaten Jepara: Makan Sunan Mantingan, Makam Ratu Kalinyamat
  - Kabupaten Pati: Makam Mbah Mutamakin, Makam Mbah Pragola, Makam Mbah Renggo, Makam Syeh Jangkung dan Makam Sunan Ngerang
  - Kabupaten Kendal: Desa Wisata (Kampung Budaya) Kaliwungu, Museum Plumpungan
  - Kota Semarang: Makam Mbah Soleh Darat, Makam Mbah Kubro, Kaligawe, Makam KH. Hsyim Asy'Ari dan Makam KH, A. Dahlan, Masjid Agung Jawa Tengah
  - Kabupaten Semarang: Gemuk Reco Bakung, Banyubiru
  - Kota Salatiga: Pasar Takzil, Tingkir dan Museum Mooi

- DPP Solo - Sangiran dan sekitarnya
  - Kabupaten Klaten: Umbul Ponggok, Makan Sunan Pandanaran (Bayat), Makam Ki Ageng Balak, Cokro Tulung, Museum Gula Gondang Winangun, Ziarah ke Makam Ronggowarsito (Trucuk), Belanja Sarung Gloyor (Tawangsari).
  - Kabupaten Sukoharjo: Candi Sewu, Pembuatan Gamelan (Wirun), Desa Wisata Trangsan (Getak), Kraton Kartosuro, The Heritage Palace Kartosuro.
  - Kota Surakarta: Kraton Surakarta Hadiningrat, Makam Ki Gede Sala, Masjid Agung Surakarta
  - Kabupaten Sragen: Makam Pangeran Samudra, Museum Sangiran, Museum Manusia Purba, Pembuatan Keris Brojobuwono, Pemandian Air hangat Gondang.
  - Kabupaten Wonogiri: Makam Matah Ati (Selogiri), Sendang Siwani, Pembuatan Wayang (Tatah Sungging).
  - Kabupaten Karanganyar: Kampong Wisata Bahasa Desa Pakel, Candi Cetho, Sapta Tirta (Pablengan), Makam Mangadeg Mangkunegoro I, Makam Astana Giri Bangun (Matesih), Museum Rumah Atsiri (Plumbon) dan tracking ke Puncak Gunung Lawu.
  - Kabupaten Boyolali: Etasia Tlatar, Tumang, Selo.

- DPP Borobudur – Dieng dan sekitarnya
  - Kabupaten Purworejo: Pantai Jatimalang, Pantai Ketawang, Makam Kyai Imampuro, Masjid Agung Purworejo (Bedug terbesar di Asean).

- Kabupaten Magelang: Makam Kyai Raden Santri (Gunungpring), Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Mendut, Langgar Agung P Diponegoro, Punthuk Setumbu, Makam Sunan Geseng Tirto Grabag.
- Kota Magelang: Makam Syekh Subakir (Gunung Tidar), Museum Diponegoro, Rumah Cemara, Makam Kyai Dudan
- Kabupaten Wonosobo: UNSIQ (Universitas Ilmu Al Qur'an), Agrowisata Tambi, Dieng, Dusun Legentang (Dusun yang hilang karena dilaknat Allah SWT), Ponpes Al Asy'ariyah, Makam KH. Muntaha Al Haidz Kabupaten Banjarnegara: Makam Ki Ageng Girig, Makam Ki Wanusaba Kabupaten Temanggung: Makam Ki Ageng Makukuhan

- DPP Rembang - Blora dan sekitarnya
  - Kabupaten Grobogan: Candi Joglo, Makam Ki Ageng Selo, Makam Joko Tarub, Bledug Kuwu.
  - Kabupaten Blora: Goa Terawang, Makam Sunan Pojok, Kerajinan Jati, Makam Syekh Abdul Qohar, Wisata Heritage Train Loko Tour di Cepu.
  - Kabupaten Rembang: Pasujudan Sunan Bonang, Makam Putri Cempa, Masjid Jami' Lasem (Makam Tejokusumo, Makam Eyang Sambu dan Makam Mbah Maksum), Makam RA. Kartini, Makam Pangeran Sedo Laut (Bupati I Rembang), Rumah Pohon Asem, Galangan Kapal (Sarang) Perahu Kuno (Punjulharjo).

- DPP Pekalongan – Tegal dan Sekitarnya
  - Kota Pekalongan: Makam Habib Achmad Sapuro, Kampung Arab Klego, Ponpes Cendekia
  - Kabupaten Batang: Makam Syekh Maulana Mahgribi (Desa Ujungnegoro), Makam Habib Muhyi (Wonobodro)
  - Kabupaten Pekalongan: Makam Mbah Wali Agung Rogoselo, Makam Habib Abubakar bin Thoha bin Yahya, Pertunjukan Tari Sufi "Cahyo Kedaton"
  - Kabupaten Pemalang: Makam Syekh Maulana Syamsuddin
  - Kota Tegal: Habib Haddad, Ponpes Giren
  - Kabupaten Brebes: Makam Syekh Junaedi.

- DPP Nusakambangan – Baturraden dan sekitarnya
  - Kabupaten Kebumen: Ponpes Somalangu, Souvenir Genitri, Masjid Banyu Mudal, Makam Mbah Lancing
  - Kabupaten Cilacap: Pantai Teluk Penyu, Benteng Pendem, Gunung Srandil dan Gunung Selok
  - Kabupaten Bamyumas: Makam Joko Kaiman,
  - Kabupaten Purbalingga: Masjid Cheng Hoo, Petilasan Syekh Jambu Karang/Ardilawet.

- Provinsi Jawa Tengah dianugerahi penghargaan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019 sebagai wisata ramah Muslim unggulan dari Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya.
  Jawa Tengah menjadi bagian dari 10 daerah di Indonesia yang memiliki wisata ramah Muslim unggulan berstandar global 2019.

- Pengembangan wisata ramah Muslim
  - Strategi memperluas pemasaran. Sajiannya inklusif tapi terbuka untuk wisatawan non-Muslim.
  - Bekerja sama pariwisata dengan provinsi lain di Indonesia yang mempunyai potensi wisata ramah Muslim dan di negara-negara yang tergabung dalam *Organization of Islamic Cooperation* (OIC).
  - Perlu aturan yang mewajibkan setiap pemda mengelola, mengembangkan destinasi wisata ramah Muslim di daerah masing-masing, misalnya regulasi tentang pengembangan wisata ramah Muslim di Jawa Tengah.
  - Penyiapan sarana jalan dan infrastruktur yang baik, sarana hotel dan penginapan dan tentunya saja sarana kebutuhan ibadah karena mereka umumnya beragama Islam, sehingga butuh masjid/musholah, tempat wudhu, makanan yang halal dan pelayanan yang ramah dan Islami.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Pengembangan sektor industri halal di wilayah Jawa Tengah masih sangat terbuka, mengingat populasi industri makanan dan minuman sekala kecil dan menengah jumlah nya sangat besar dan sebagian besar belum memiliki sertifikat halal, perlu di dorong adanya satu program terpadu melalui skema bantuan pendanaan/pembiayaan/permodalan bagi industri agar para pelaku industri baru akan menumbuhkan industri halal secara otomatis dan alami. Apabila program tersebut bisa di implementasikan di lapangan diharapkan sektor ekonomi syariah dan sektor keungan syariah secara pararel akan bisa tumbuh berjalan secara bersama. Peluang pengembangan sektor ekonomi syariah, industri halal, keuangan syariah dalam aspek perdagangan, masih sangat terbuka luas ditinjau dari sisi konsumen, dengan mayoritas masyarakat Muslim.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah

Ekonomi dan keuangan syariah Indonesia terus berkembang, antara lain ditandai oleh perkembangan berbagai lembaga keuangan Islam seperti perbankan syariah, takaful, koperasi syariah, dan pasar keuangan syariah, serta berbagai lembaga sosial Islam. Bersama itu, terjadi pula peningkatan minat masyarakat Indonesia terhadap industri halal yang telah berkembang menjadi suatu gaya hidup. Hal tersebut mencakup sektor-sektor ekonomi syariah secara luas seperti makanan halal, fesyen syariah, pariwisata ramah Muslim, pengobatan dan kosmetik, serta usaha (bisnis) syariah. Lebih jauh lagi, pemerintah dan regulator khususnya Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mendukung pembangunan infrastruktur dengan peran pasar keuangan, termasuk dengan instrumen sukuk

Berdasarkan survei, Indonesia masuk dalam Top 10 Player dunia pada sektor *Islamic finance*, *halal travel* dan *modest fashion*. Kondisi itu menunjukkan ada peluang bagi sektor industri halal dan keuangan syariah Indonesia untuk mengambil posisi terdepan, dan bukan hanya sebagai target pasar. Langkah optimalisasi pengembangan ekonomi syariah Indonesia dipercaya akan dapat berperan sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru bagi perekonomian Provinsi Jawa Tengah dengan pola kerjasama dengan beberapa instansi seperti BAZNAS, MUI.

Saat ini kesadaran masyarakat terhadap kehalalan suatu produk semakin tinggi. Yang menjadi perhatian utama adalah tingkat kehalalan dari sisi zat yang dikandungnya. Oleh karena itu, ke depan, proses mengelola zat tersebut akan menjadi perhatian. Dengan terbangunnya ekosistem industri halal yang lengkap dan komprehensif maka diharapkan kontribusi ekonomi syariah daerah terhadap ekonomi nasional akan semakin meningkat.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 3 Jawa Tengah

Secara umum, hingga akhir tahun 2019, kondisi makro ekonomi Jawa Tengah masih sangat baik, tercermin pada pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 5.34%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4.97%. Namun demikian, akibat Covid-19, pertumbuhan ekonomi Triwulan I/2020 turun menjadi 2.60%, lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 2.97%. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut mencerminkan pengembangan sektor keuangan syariah yang masih potensial.

Peluang pengembangan sektor keuangan syariah juga terpengaruh dengan pengembangan pada beberapa sektor usaha seperti sektor pariwisata, sektor akomodasi dan penyediaan makan minum, sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian dan sektor konstruksi. Meskipun sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang terdampak Covid-19, namun Lembaga Keuangan Syariah perlu memetakan industri-industri yang terdampak dan melakukan *selective growth*, sehingga Lembaga Keuangan Syariah mampu berkontribusi dalam proses pemulihan perekonomian.

Selain itu, tingkat inflasi Provinsi Jawa Tengah masih sebesar 2.89% (yoy), meskipun pada April 2020 Jawa Tengah mengalami deflasi sebesar 0.01% (mtm). Penyebab utama inflasi antara lain peningkatan harga gula pasir, bawang merah, emas perhiasan, beras dan tempe. Sehubungan dengan hal tersebut, Lembaga Keuangan Syariah dapat melakukan ekspansi bisnis pada sektor-sektor yang masih menggeliat di tengah pandemic Covid-19.

Direktur Bisnis Ritel & UUS PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng)

Peluang pengembangan sektor keuangan syariah di Jawa Tengah masih cukup besar. Berdasarkan data Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2019 yang dirilis oleh BPS, komposisi jumlah penduduk Muslim mencapai 96,59% dari keseluruhan jumlah penduduk di Jawa Tengah. Hal tersebut menjadi pangsa pasar potensial untuk pengembangan keuangan syariah di Jawa Tengah. Pondok pesantren juga bisa menjadi cikal bakal pengembangan keuangan syariah di Jawa Tengah. Lebih dari 4.400 pondok pesantren, menjadi peluang bagi kami untuk mengembangkan keuangan syariah. Sebagai contoh, ada salah satu pondok pesantren di Surakarta (Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam) yang telah bekerjasama dengan kami melalui *cash management system* untuk pengelolaan keuangannya.

Bagaimana tantangan utama apa yang saat ini dihadapi dalam mengembangkan sektor ekonomi syariah, industri halal, dan sektor keuangan syariah?

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah

1. Rendahnya pengetahuan dan literasi mengenai ekonomi dan keuangan syariah di kalangan masyarakat dan anggapan bahwa syariah dan konvensional itu sama.
2. Ketersediaan infrastrktur halal yang masih perlu ditingkatkan khususnya di bidang pariwisata
3. Sertifikasi, dimana jumlah produk yang beredar sangat banyak dan dibutuhkan dana yang besar.
4. Regulasi terkait ekonomi syariah

Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah

Tantangan utama saat ini yang dihadapi dalam mengembangkan sektor ekonomi syariah dalam hal ini pengembangan Koperasi Syariah/BMT dan UMKM Syariah/Halal di Jawa Tengah:

1. Persaingan dengan lembaga keuangan lain
2. Berkembangnya layanan produk perbankan berbasis teknologi informasi
3. Terbatasnya literasi syariah sehingga pengelola kurang inovatif dan pemahaman masyarakat sangat variatif
4. Kepercayaan masyarakat masih rendah karena banyak kasus investasi yang berkedok syariah (bahkan melibatkan tokoh-tokoh) yang bermasalah
5. Efek dari poin 3 dan 4 permodalan bisnis syariah terbatas
6. Menumbuhkembangkan ekosistem ekonomi syariah, khususnya koperasi syariah belum optimal
7. Besarnya biaya perolehan pendanaan dari lembaga perbankan
8. Pesatnya perkembangan kredit mikro dari perbankan/lembaga keuangan

Tantangan dalam mengembangkan industri halal:

1. Persaingan produk-produk dari luar negeri
2. Kurangnya pemahaman UMKM arti pentingnya sertifikasi halal bagi produknya
3. Regulasi dari kabupaten/kota yang tidak sama terhadap salah satu persyaratan sertifikasi halal yaitu S-PIRT

Kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Priwisata Provinsi Jawa Tengah

Sarana dan prasarana yang mendukung Bisnis Wisata ramah Muslim di Jawa Tengah belum memadai. Misalnya saja sampai saat ini jumlah hotel yang dioperasikan menurut prinsip syariah belum begitu banyak, juga ada restoran-restoran yang belum mengantongi sertifikasi halal.

1. Dari sekitar 683 Usaha Biro Perjalanan Wisata (BPW) di Jawa Tengah baru sekitar 39 usaha yang sudah memperoleh lisensi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, sehingga perlu memotivasi usaha BPW untuk mengurus sertifikasi halal ke Kementerian Agama RI.

2. Sedangkan dari 1080 usaha hotel yang ada, baru sekitar 8 usaha Hotel Syariah, antara lain :
   - Hotel Grasia bintang 3
     Jl. Jenderal S. Parman No. 29 Semarang
   - Hotel Semesta bintang 3
     Jl. KH. Wakhid Hasyim No. 125-127 Semarang
   - Hotel Muria bintang 2
     Jl. Dr. Cipto No. 73 Semarang
   - Hotel Arini bintang 3
     Jl. Slamet Riyadi No. 361 Surakarta
   - Hotel Azizah bintang 3
     Jl. Kapten Mulyadi 15 Surakarta
   - Hotel Riez Palace bintang 3
     Jl. Gajahmada No. 75 Tegal
   - Hotel Syari'ah bintang 4
     Jl. Adi Sucipto No. 47 Gonilan Kab. Sukoharjo
   - Hotel Akbar Syariah bintang 3
     Jl. Jaya Serayu Banyumas.
   - Sehingga perlu memotivasi usaha hotel untuk mengurus sertifikasi halal ke Kementerian Agama RI.

3. Penyediaan Sumber daya manusia yang kompeten, sebagai contoh
   - *Guide* yang sopan, cakap, berlisensi
   - *Driver* yang sopan dan terampil
   - *Waiter/ waitres* yang kompeten
   - Penjaga destinasi yang ramah.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Tantangan pengembangan sektor ekonomi syariah, industri halal, keuangan syariah, adalah kesadaran atau budaya masyarakat kita khususnya kaum Muslim yang masih melihat/menganggap bahwa ke 3 sektor tersebut tidak penting untuk dijalankan, mereka sudah terbiasa hidup dengan menikmati pola ekonomi, pola industri dan pola keuangan konvensional, sehingga mereka sulit untuk meninggalkan kemapanan gaya hidup yang sudah dijalani dan nikmati.

Pemerintah memiliki kewenangan/otoritas untuk menyusun program-program yang terkait dengan sektor ekonomi sektor industri dan sektor keuangan dalam rangka untuk membangun dan mewujudkan kesejahteraan keadilan dan kemakmuran rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tantangan utama dalam pengembangan sektor ekonomi syariah, industri halal, keuangan syariah dalam aspek perdagangan, adalah minimnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat Muslim terhadap arti penting serta makna ekonomi syariah, industri halal, keuangan syariah dalam praktek kehidupan mereka.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah

Beberapa tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah khususnya industri halal di tanah air khususnya di Provinsi Jawa Tengah, antara lain: regulasi terkait industri halal yang belum memadai, literasi dan kesadaran masyarakat akan produk halal yang masih rendah, serta keterkaitan industri halal dan keuangan syariah yang masih rendah. Selain itu, peningkatan konsumsi dan kebutuhan produk halal di dalam negeri belum diimbangi dengan jumlah produksinya. Tata kelola dan manajemen risiko sektor halal masih belum memadai. Pemanfaatan teknologi belum optimal pada industri halal, seperti pembuatan platform digital proses sertifikasi yang dapat mendorong aspek transparansi dan keamanan layanan hingga saat ini belum terwujud.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 3 Jawa Tengah

1. Skala usaha dan permodalan perbankan syariah yang masih relatif kecil, apabila dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal tersebut berdampak pada tingkat efisiensi yang rendah dan membatasi ruang gerak industri dari sisi keragaman produk dan/atau aktivitas yang ditawarkan kepada nasabah;
2. Biaya dana yang mahal yang berdampak pada keterbatasan segmen pembiayaan. Seiring dengan keterbatasan permodalan dan struktur pendanaan perbankan syariah yang secara umum belum se-efisien Bank Umum Konvensional (BUK) tercermin dari komposisi *Cash and Saving AAccounts* (CASA) yang lebih rendah, sehingga secara umum model bisnis perbankan syariah fokus pada segmen ritel, termasuk UMKM dan konsumer, dan kurang memiliki variasi segmen pembiayaan seperti kepada korporasi dan investasi;
3. Produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai ekspektasi masyarakat. Walaupun variasi produk dan layanan perbankan syariah cukup berkembang, terutama pada segmen ritel, namun penerimaan masyarakat belum sebaik pada produk BUK antara lain karena faktor fitur yang belum selengkap produk serupa di BUK, harga dan kualitas layanan yang belum setara dengan BUK, serta faktor akses dan pengenalan nasabah yang terbatas;
4. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai serta Teknologi Informasi (TI) yang belum dapat mendukung pengembangan produk dan layanan. SDM dan TI merupakan dua faktor utama yang menentukan keberhasilan pengembangan produk dan layanan perbankan, serta operasional perbankan secara umum. Disadari bahwa kualitas SDM dan TI pada bank-bank syariah secara umum masih dibawah kualitas dan kapasitas SDM serta TI perbankan konvensional. Di samping itu, perbankan syariah menghadapi tantangan tersendiri dalam memenuhi kualitas dan kapasitas SDM dan TI yang mampu memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah;
5. Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap jasa yang ditawarkan perbankan syariah menjadi salah satu permasalahan mendasar, sehingga perbankan syariah juga sering menghadapi mispersepsi masyarakat antara lain terkait kerumitan akad dan istilah serta berbiaya mahal.

Direktur Bisnis Ritel & UUS PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng)

Tidak hanya peluang yang besar, tantangan bagi kami dalam pengembangan keuangan syariah pun cukup beragam. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari eksternal, tapi juga internal. Gambaran tersebut tercermin dari *market share* keuangan syariah yang masih sangat kecil di Jawa Tengah. Berdasarkan data Statistik Keuangan Daerah dan Statistik Perbankan Syariah per posisi Januari 2020, *market share* Perbankan Syariah masih berkutat di angka 6,28%. Tantangan lain yang kami hadapi adalah masih rendahnya literasi masyarakat terhadap keuangan syariah. Untuk peningkatan literasi, saat ini telah terdapat program studi Ekonomi dan Keuangan Syariah di beberapa Universitas dan sekolah di Jawa Tengah. Kami pun mengambil peran peningkatan literasi melalui kerjasama penempatan mahasiswa magang untuk meningkatkan pengetahuan tentang praktek perbankan syariah. Di sisi internal, kapasitas kelembagaan masih menjadi tantangan bagi kami seperti masih terbatasnya penggunaan teknoogi, belum optimalnya pelayanan pada Kantor Layanan Syariah di cabang konvensional maupun kapasitas SDM yang belum merata.

Provinsi Jawa Tengah

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Ekonomi Pesantren

No	Nama Pesantren	Deskripsi Program
1	Fathul Huda	Sektor usaha air minum
2	Al Anwar 3	Sektor usaha perdagangan
3	Al Kautsar	Sektor usaha pengolahan kelapa
4	Al Masudiyah	Sektor usaha pertanian, ternak lele, dan pelatihan desain grafis
5	Darul Falah	Sektor usaha perdagangan
6	Futuhiyah	Sektor usaha jasa (bengkel)
7	Pabelan	Sektor usaha peternakan
8	Roudhotul Mubtadiin	Sektor usaha pertanian
9	Al Ihya Ulumudin (Kesugihan)	Sektor usaha pertanian dan daur ulang sampah
10	An Najah	Sektor usaha perikanan
11	Assa'idiyah (Kedungreja)	Sektor usaha pertanian
12	At-Taujieh Al-Islamy (Cilacap)	Sektor usaha pertanian
13	Miftahul Huda (Rawalo)	Sektor usaha pertanian
14	Rubat Mbalong Ell Firdaus (Cilacap)	Sektor usaha pertanian dan pengolahan tepung mocaf
15	Tarbiyah Islamiyah (Patimuan)	Sektor usaha industri pengolahan makanan
16	Al Islam Darul Falah	Sektor usaha pertanian
17	As Salaam	Sektor usaha daur ulang sampah
18	Baitul Quran	Sektor usaha perikanan
19	Darul Fath	Sektor usaha air minum
20	Tahfizul Quran Ibnu Abas	Sektor usaha air minum
21	Al Hikmah 2	Sektor usaha air minum dan pertanian
22	At Tuhidiyah, Giren	Sektor usaha air minum

Daftar Usaha-Usaha Syariah yang Dikelola Pondok Pesantren

No.	Nama Pesantren	Nama Unit Usaha yang dikelola Santri	Deskripsi
1	Ponpes Raudatul Mubtadiin, Kab. Jepara	Sayuran Hidroponik, Minimarket, dan Konveksi	Usaha budidaya sayuran metode hidroponik menggunakan greenhouse seluas 10 x 30 m.
2	Ponpes Futuhiyyah Mranggen, Kab. Demak	Air Minum dan Perbengkelan	Usaha air minum untuk memenuhi kebutuhan internal santri dan bengkel motor dibuka utk masyarakat umum.

No.	Nama Pesantren	Nama Unit Usaha yang dikelola Santri	Deskripsi
3	Ponpes Darul Falah, Kab. Pati	Minimarket	Usaha toko ritel modern bekerjasama dengan Indogrosir yang menjual kebutuhan pokok baik untuk memenuhi kebutuhan santri maupun masyarakat sekitar Ponpes.
4	Ponpes Al-Masudiyah, Kab. Semarang	Budidaya Lele dan Sayuran Hidroponik	Usaha budidaya lele yang dikelola oleh Ponpes, menghasilkan sekitar 12.5 kwintal per 3 bulan. Adapun unit usaha sayuran hidroponik dengan luas greenhouse 800 m, baru dimulai dan menghasilkan 30kg per periode panen.
5	Ponpes Assaidiyah, Kab. Kudus	Minimarket	Menjual berbagai kebutuhan santri
6	Ponpes Khozinatul Ulum, Kab. Blora	Minimarket	Usaha toko ritel modern bekerjasama dengan Indogrosir yang menjual
7	Ponpes Asrama Perguruan Islam Tegalrejo, Magelang	Konveksi, Minimarket, Rental Kendaraan, dan Rental Multimedia	▪ Unit usaha minimarket yang dimiliki Ponpes menjual produk kebutuhan santri. ▪ Usaha konveksi baru akan dilaksanakan dengan target awal bisa menyediakan sendiri kebutuhan seragam sekolah santri. ▪ Usaha rental mobil dan multimedia telah berjalan baik ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal santri maupun masyarakar sekitar.
8	Ponpes Raudlatut Tholibin, Kab. Rembang	Toko Kelontong dan Kantin	Unit usaha yang dimiliki Ponpes menjual produk kebutuhan santri.
9	Ponpes Al Huda, Kab. Kebumen	Pertokoan	Unit usaha yang dimiliki Ponpes menjual produk kebutuhan santri.
10	Ponpes Nuril Anwar, Kab. Purworejo	Pertokoan	Unit usaha yang dimiliki Ponpes menjual produk kebutuhan santri.
11	Ponpes Edi Mancoro, Kab. Semarang	Digital Printing dan Transportasi	Unit usaha yang dimiliki ponpes berupa digital printing MMT untuk memenuhi kebutuhan internal dan masyarakat sekitar.

No.	Nama Pesantren	Nama Unit Usaha yang dikelola Santri	Deskripsi
12	Ponpes Al-Fadllu 2, Kab. Kendal	Air Minum, Konveksi, dan Digital Printing	▪ Unit usaha ini dijalankan untuk memenuhi kebutuhan internal Ponpes dan sebagian memenuhi permintaan eksternal. ▪ Produk yang dihasilkan, a.l: digital printing banner, baliho, spanduk, dan MMT versi indoor. ▪ Saat ini produktivitas sebesar 10 roll per bulan. ▪ Untuk air minum kapasitas produksi 100 galon per hari di mana 40 galon di konsumsi Ponpes, dan 60 galon di jual ke pihak luar.
13	Ponpes Mathaliul Huda Al-Kautsar Kab. Pati	Virgint Coconut Oil (VCO)	▪ Unit usaha dikelola SMK farmasi milik Ponpes. ▪ Saat ini produksi masih skala kecil 5 liter/bulan. ▪ Namun demikian, Ponpes sudah mulai menjalin kerjasama dengan salahsatu rumah sakit untuk memasok VCO.
14	Ponpes Fathul Huda, Kab. Demak	Air Minum Kemasan	-
15	Ponpes Al-Anwar III Kab. Rembang	Konveksi	Unit usaha yang dijalankan Divisi Ekonomi Ponpes ini memproduksi kaos dan seragam. Saat ini pemasaran mencakup internal dan eksternal Ponpes dengan rata-rata penjualan 300-500 pcs/bulan.
16	Ponpes Banat, Kab. Kudus	Konveksi	-
17	Ponpes Yanbu'ul Qur'an, Kab. Kudus	Air Minum Kemasan dan Percetakan	-
18	Ponpes Sirojuth Tholibin, Kab. Grobogan	Makanan Kemasan, Percetakan, dan Toserba	-
19	Ponpes Daarut Tauhid	Madu Alam dan Toko	-
20	Ponpes Al Musyaffa', Kab. Kendal	Simpan Pinjam dan Toko Kelontong	-

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Provinsi

Kalimantan Selatan

Sekilas

tentang Ekonomi Syariah Provinsi Kalimantan Selatan

Provinsi dengan julukan "Bumi Lambung Mangkurat" ini memiliki akar sejarah sebagai salah satu pusat penyebaran Islam di Nusantara. Dengan mayoritas penduduknya Muslim (97%) kehadiran konsep ekonomi syariah di masyarakat Kalsel sudah tidak asing karena berkaitan dengan nilai-nilai atau ajaran agama Islam.

Kalsel berpotensi besar sebagai pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Karena banyaknya pesantren dan kegiatan wisata religious seperti haul Guru Sekumpul yang dihadiri hingga satu juta jemaah dari berbagai penjuru nusantara. Di sektor industri halal khususnya sektor pariwisata, Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki kawasan wisata ramah Muslim yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata ramah Muslim nasional diantaranya yaitu Riam Kanan, Mandiangin, Lembah Kahung, dan banyak lagi.

Di sektor keuangan Syariah keseriusan pemerintah daerah ditunjukkan melalui proses spin-off Unit Usaha Syariah Bank Kalimantan Selatan paling lambat tahun 2022 yang sudah diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tahun 2019. Geliat perbankan Syariah di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan aset sebesar 7.35% (yoy) dan pertumbuhan DPK sebesar 6.17% (yoy) pada periode Juni 2020 (OJK, 2020). Di sektor keuangan mikro Syariah, Provinsi Kalsel memiliki jumlah koperasi Syariah terbanyak di Pulau Kalimantan dengan 38 Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan 2 Bank Wakaf Mikro (Kemenkop, 2020; OJK, 2020)

Regulasi Tingkat Daerah
di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah

Peraturan Daerah terkait Keuangan Syariah	Belum ada
Peraturan Daerah terkait Makanan/Minuman Halal	Belum ada
Peraturan Daerah terkait Industri Halal	Belum ada
Peraturan Gubernur terkait Pariwisata Ramah Muslim	Belum ada
Peraturan Gubernur terkait Pengelolaan Zakat	Belum ada
Peraturan Daerah Lainnya	Belum ada

Rencana Pemerintah Daerah
di Sektor Ekonomi Syariah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 di Provinsi Kalimantan Selatan memfokuskan pada "Kalimantan Selatan 2025 Maju dan Sejahtera sebagai Wilayah Perdagangan dan Jasa Berbasis Agroindustri" denga 5 misi utama yaitu:

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM, dengan menitikberatkan pada aspek kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial budaya dan agama berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ.
2. Mengembangkan ekonomi ke arah industri dan perdagangan, yang berbasis pada potensi agraris dan kerakyatan dengan dukungan transportasi yang baik.
3. Mengembangkan prasarana dan sarana pembangunan, yang relatif merata pada berbagai wilayah pembangunan.
4. Mendorong pengelolaan SDA secara efisien, untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan.
5. Menciptakan taat asas dan tertib hukum, bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, sosial, budaya dan agama.

Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Inflasi		Tingkat Pengangguran		Tingkat Kemiskinan		Konsumsi RT		Konsumsi Pemerintah		Investasi		Ekspor		Impor	
2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
5.13%	4.08%	2.63%	4.01%	4.50%	4.31%	4.47%	4.65%	5.09%	4.02%	2.71%	3.03%	8.01%	6.37%	4.58%	0.98%	6.02%	-0.04%

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021

Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan secara berkesinambungan.

Program-Program Unggulan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021

Secara garis besar memiliki sekitar 168 program unggulan yang beberapa di antara terkait dengan aspek:

- Meningkatkan akses anak usia sekolah pada semua jenis dan jenjang pendidikan
- Meningkatkan pelayanan kesehatan pada institusi pelayanan kesehatan
- Meningkatkan penyediaan *supply* air bersih, sanitasi layak dan penyediaan permukiman sehat
- Peningkatan dan pengembangan sekolah kejuruan dan sentra pelatihan ketenagakerjaan
- Meningkatkan pendidikan karakter dan pengembangan budaya religius masyarakat

Isu Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021

- Kualitas sumber daya manusia
- Daya saing perekonomian daerah
- Kualitas dan kuantitas lingkungan
- Kualitas dan kuantitas infrastruktur perekonomian dan dasar
- Kinerja pemerintahan daerah

▪ Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan di berbagai sektor ▪ Peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya aparatur, kualitas pelayanan publik serta transparansi pelaksanaan pembangunan daerah ▪ Pengembangan sumber-sumber pendanaan pembangunan dan pengembangan sektor-sektor produksi yang berkualitas ▪ Pengembangan standarisasi pelaksanaan pembangunan serta pengembangan kualitas Sistem Informasi Kinerja Pemerintah Daerah ▪ Pengembangan data-data dan informasi kesejahteraan sosial ▪ Peningkatan pembinaan keamanan berbasis masyarakat ▪ Pembangunan fasilitas dan prasarana publik termasuk fasilitas olahraga ▪ Pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan sarana serta prasarana publik, aparatur, perumahan, air minum, persampahan dan limbah ▪ Pengelolaan dan pengembangan *e-government*, komunikasi serta informasi publik ▪ Program pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan ▪ Peningkatan produksi dan produktivitas serta mutu hasil tanaman pangan dan holtikultura ▪ Peningkatan kemandirian dan diversifikasi pangan serta sosialisasi penyadaran pola konsumsi pangan sehat ▪ Peningkatan produksi hasil ternak serta pengendalian pencegahan pemberantasan penyakit hewan, penyakit *zoonosa* dan keamanan pangan ▪ Pengembangan budidaya perikanan serta optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan ▪ Program peningkatan iklim investasi, promosi, realisasi dan kerjasama terkait investasi ▪ Pengembangan & penataan organisasi, tatalaksana & administrasi serta Badan Hukum Koperasi ▪ Peningkatan SDM KUMKM serta peningkatan pengawasan & pengendalian, monitoring & evaluasi serta perwujudan transparansi & akuntabilitas pengelolaan KUMKM ▪ Program pengembangan pariwisata ▪ Program perlindungan, rehabilitasi, pemulihan dan konservasi cadangan SDA dan LH ▪ Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ▪ Pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan persampahan	

Rencana Pembangunan Ekonomi Syariah di Provinsi Kalimantan Selatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 di Provinsi Kalimantan Selatan bertujuan sebagai berikut:

Tujuan 1 : Misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil
Tujuan 2 : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik
Tujuan 3 : Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah yang Berbasiskan Kearifan Lokal
Tujuan 4 : Mengembangkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya
Tujuan 5 : Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sumberdaya Lokal, dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan

.

Sektor Pariwisata Ramah Muslim	Sektor Makanan dan Produk Halal
▪ Belum ada program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait sektor tersebut	▪ Belum ada program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait sektor tersebut
Sektor Keuangan Mikro Syariah	**Sektor Keuangan Sosial Syariah**
▪ Belum ada program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait sektor tersebut	▪ Belum ada program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait sektor tersebut

Program Pemerintah Daerah
di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah

Sektor Industri Halal

Program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Sektor industri halal unggulan yang akan diprioritaskan pengembangannya adalah sektor Pariwisata Ramah Muslim, dan ekonomi kreatif seperti fesyen Muslim dan kuliner halal.

Program Pendukung Sektor Industri Halal

Makanan dan Minuman Halal	▪ Memberikan bimbingan teknis tentang produk halal dan pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi halal ▪ Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan yaitu berupa kegiatan pengujian mutu barang dan kalibrasi peralatan
Fesyen Muslim	▪ Fasilitasi keikutsertaan pelaku usaha dalam pameran, temu usaha dan misi dagang dalam dan luar daerah
Pariwisata ramah Muslim	▪ Fasilitasi keikutsertaan pelaku usaha dalam pameran, temu usaha dan misi dagang dalam dan luar daerah ▪ Pengembangan Pasar Digital Kuliner Halal Khas Kalimantan Selatan, Desa Karang Taruna Kabupaten Tanah Laut

Penetapan Daerah Pariwisata Ramah Muslim

Tahap	Daftar Desa/Kabupaten/Kota Wisata Ramah Muslim
Sudah ada	-
Dalam tahap perencanaan	Kota Banjarmasin (Raperda sedang dibahas)

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pendukung Sektor Industri Halal

- Memberikan pembinaan dan juga mengikutsertakan UMKM makanan dan UMKM fesyen binaan dan mitra Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalsel dalam seleksi Industri Kreatif Syariah Indonesia (IKRA Indonesia).
- Menyelenggarakan *Talkshow* Pariwisata Ramah Muslim dalam Festival Ekonomi Syariah Tahun 2019.
- Koordinasi dengan Kemenag terkait keberadaan/kejelasan BPJPH sebagai lembaga yang akan melakukan pengujian produk halal, sehingga pelaku usaha dapat mengurus sertifikasi halal dengan mudah dan cepat.

Sektor UMKM dan Ekonomi Pesantren

Program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Program Pemberdayaan UMKM

Sektor	Daftar Program Pendampingan
Makanan dan Minuman Halal	▪ Program mencetak wirausaha baru di sektor UMKM makanan/minuman halal ▪ Program pengembangan industri kecil dan menengah ▪ Kegiatan pelatihan pengembangan industri berbasis agro ▪ Program peningkatan kemampuan teknologi industri ▪ Kegiatan inovasi teknologi industri berbasis agro
Fesyen Muslim	▪ Promosi dan pemasaran produk koperasi dan usaha kecil
Pariwisata ramah Muslim	▪ Program pengembangan pariwisata o Promosi/pameran pariwisata o Promosi kegiatan *kegiatan* pariwisata ▪ Kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta dan sadar wisata ramah Muslim masyarakat

Sektor Keuangan Syariah

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Sektor Keuangan Syariah

Sub-sektor	Detil Program
Perbankan Syariah	▪ Melibatkan perbankan syariah dalam kegiatan *Business Matching* dalam Festival Ekonomi Syariah Tahun 2019, kegiatan dimaksud mempertemukan perbankan syariah, investor dan pelaku usaha agar tercipta kesepakatan bisnis. Saat ini KPwBI Provinsi Kalsel juga melakukan pendampingan di 5 pesantren dalam rangka mendorong pengembangan unit usaha, dan ke depan jumlah pendampingan pondok pesantren akan terus ditingkatkan. Pendampingan ini direncanakan juga akan melibatkan perbankan syariah dalam penyusunan laporan keuangan syariah maupun permodalan. ▪ Pada tahun 2020 direncanakan akan diadakan kegiatan Road To Festival Ekonomi Syariah di Kalsel yang akan melibatkan berbagai pelaku usaha syariah, termasuk Perbankan Syariah, Baznas dan Kemenag yang antara lain untuk mendorong terbangunnya ekosistem industri halal, forum ekonomi bisnis pesantren dll.
Bank Pembangunan Daerah	▪ BPD Kalsel memiliki produk pinjaman modal barakah tanpa bunga yang diperuntukan kepada UMKM termasuk pondok pesantren. Program Modal Barakah adalah program pinjaman ultra mikro yang dikeluarkan Bank Kalsel melalui UPZ. Ke depan KPwBI Kalsel akan mendorong agar produk tersebut dapat dimanfaatkan oleh pondok pesantren binaan untuk mendorong pengembangan unit usahanya.

Sektor Keuangan Mikro Syariah

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Koperasi dan Keuangan Mikro Syariah

Telah dilaksanakan *talkshow* dalam Festival Ekonomi Syariah Tahun 2019 dengan tema Aman dan Halal Bertransaksi yang dikuti oleh UMKM Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan IKNB Syariah. Kedepan diharapkan Koperasi Syariah/BMT sebagai salah satu alternatif pembiayaan akan semakin berkembang di Kalsel mengingat mayoritas masyarakat Kalsel adalah Muslim.

Sektor Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Program BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Kategori Program ZIS dan Alokasi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Kategori	Nama Program	Besar Alokasi Penyaluran (Rp)
Sosial Kemanusiaan	Bantuan Biaya Hidup Dasar	169,410,000
	Banjarmasin Peduli	269,928,000
	(HSS Peduli) Santunan Keuangan	5,100,000
	Program Bantuan Dana	147,008,000
	Program Bantuan Bedah Rumah	91,106,000
	Program Bantuan Dana untuk Korban	108,727,500
	Bantuan Masyarakat Miskin Terdampak	503,500,000
	Santunan Ibnu Sabil	28,678,000
	Santunan Faqir Miskin	226,678,000
	Layanan Aktif BAZNAS Kemanusiaan	383,360,255
	Santunan Gharim (Hutang)	40,780,000
	(HSS Peduli) Bantuan Kebutuhan Dasar	1,504,419,500
	Memberikan Bantuan Uang Tunai Halal	19,215,000
	Paket Ceria Dhuafa	86,996,500
	Penyaluran Dana Zakat	118,062,500
	Program Kemanusiaan Lainnya	50,793,800
	Santunan Kematian Biaya Duka	2,000,000
	Penyaluran Dana	691,697,496
	(HSS Peduli) Santunan untuk Korban	7,000,000
	Paket Logistik Keluarga (PLK)	25,035,000
	Bantuan Korban Kebakaran	83,750,000
	Zakat Community Development	1,000,000
	Santunan Paket Ramadhan	146,590,000
	Penyaluran Dana untuk Fisabilillah	3,750,000
	Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DKSL)	5,214,200,000
	Penyaluran Penanganan Dana Infak Haji	3,000,000
Pendidikan	Pendidikan	4,750,000
	Banjarmasin Cerdas	12,104,000
	Beasiswa	816,263,700
	Program Bantuan Non Beasiswa	223,154,650
	Bantuan Permodalan Keterampilan	5,000,000
	Layanan Aktif BAZNAS Pendidikan	292,905,200
	Program Pendidikan Lainnya	22,725,000
	Program Rehab Tempat Belajar	3,500,000
	Program Bantuan Dana untuk Guru	43,000,000
	Sarjana Pendidikan Keagamaan	33,174,500
	Pendampingan Beasiswa	1,715,000

Kategori	Nama Program	Besar Alokasi Penyaluran (Rp)
Kesehatan	Banjarmasin Sehat	56,510,720
	Program Bantuan Dana Berobat	84,500,000
	Santunan Dhuafa/Warga Miskin	61,338,300
	Pedampingan Layanan Ibu	2,600,000
	Layanan Mustahik	15,700,000
	Bantuan Dana Kesehatan	10,900,000
	Layanan Aktif BAZNAS (Kesehatan)	206,345,225
	Biaya Pendampingan	144,930,000
	(HSS Sehat) Tambahan Biaya Berobat	31,587,300
	Pengadaan Barang Logistik	13,984,270
	Program Bantuan Kebutuhan Tenaga Bantu	14,695,500
	Program Bantuan Dana	2,500,000
	Pinjaman Bergulir	7,500,000
	(HSS Makmur) Modal Usaha Produktif	199,700,000
	(HSS Makmur) Bantuan Keuangan	7,650,000
	Bantuan Penguatan Modal	13,000,000
	Program Pemberdayaan Ekonomi UMKM	75,855,000
	Program Z-MART	40,172,000
	Program Ekonomi Dakwah Adv	131,186,134
	Program Pemberdayaan Ekonomi	65,000,000
	UP 10% Hasil Infak Kupon	500,000
	UP 25% Hasil Infak Kupon	3,851,000
	Bantuan Bahan-Bahan Pertanian	37,880,000
	Pendampingan Modal Usaha	11,100,000
	Kebun Sehat BAZNAS	14,830,000
	Program Pedagang BAZNAS Kalsel	4,245,500
Dakwah	Bantuan Operasional Muallaf Centre	24,350,000
	Bantuan untuk Fisabilillah	81,282,000
	Banjarmasin Taqwa	49,800,000
	Bantuan Muallaf	75,050,000
	Bantuan Dana Penyuluh Agama Islam	79,800,000
	Kaderisasi 1000 Ulama	18,800,000
	Bantuan untuk Kaum Masjid	13,900,000
	Zakat Fitrah	1,449,003,430
	Layanan Mustahik	11,300,000
	Layanan Aktif BAZNAS Advokasi	648,035,230
	(HSS Taqwa) Insentif Guru TK/TPA	374,510,000
	(HSS Taqwa) Insentif Dai	61,900,000
	(HSS Taqwa) Insentif Pendamping	2,300,000
	(HSS Taqwa) Pembinaan Muallaf	23,000,000
	Program Dakwah Lainnya	1,050,000
	Pengadaan Alat Kegiatan	500,000
	Kegiatan Keagamaan Mahasiswa KKN	5,250,000
	Pembangunan Rehab TPA	2,500,000
	Bantuan Penunjang Kegiatan Masjid	33,775,000
	(HSS Taqwa) Santunan Fisabilillah	76,775,000
	Penyaluran Zakat Maal Via UPZ	146,160,000
	Penyaluran Infak dan Sedekah	61,135,000

Kategori	Nama Program	Besar Alokasi Penyaluran (Rp)
	Paket Zakat Fitrak (Idul Fitri)	7,105,000
	Bantuan Sarana Keagamaan	32,010,000

Program BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam Mengatasi Permasalahan Pandemi Covid-19

Nama Program	Mekanisme Penyaluran Bantuan	Alokasi Penyaluran (Rp)	Tipe Penerima Bantuan/Manfaat	Dampak yang Terjadi pada Penerima Manfaat
Bantuan *handsanitizer*	Penyaluran berupa *hand sanitizer* untuk ruang/tempat yang diakses masyarakat sebelum PSBB	1,800,000	Masjid, pesantren, wilayah perumahan masyarakat dan sekolah	Memudahkan masyarakat mendapatkan fasilitas *hand sanitizer* gratis di masa awal pandemi dengan kondisi kelangkaan serta tingginya harga *hand sanitizer*
Wastafel sehat	Penyaluran berupa wastafel di sekitar fasilitas publik	14,500,000	Pasar dan pemukiman masyarakat di Banjarmasin	Memudahkan masyarakat mendapatkan fasilitas cuci tangan saat terpaksa harus keluar rumah di masa pandemi untuk memenuhi kebutuhan keluarga
Paket logistik keluarga	Penyaluran berupa bahan pangan (beras, minyak, sarden, mie instan, gula, abon, sepat olahan dll), alat ibadah dan masker. Isi paket dilengkapi dengan produk usaha mustahik untuk program pemberdayaan. Penyaluran diantar langsung ke rumah penerima manfaat sesuai protokol untuk memudahkan dan mencegah terjadinya kerumunan masyarakat	375,000,000	Mustahik fakir dan miskin	Memudahkan para penerima manfaat memenuhi kebutuhan sehari-hari di masa pandemi
Hidangan berkah	Penyaluran berupa hidangan berbuka puasa. Penyaluran diantar langsung ke rumah penerima manfaat sesuai protokol untuk memudahkan dan mencegah terjadinya kerumunan masyarakat	105,000,000	Mustahik fakir dan miskin	Memudahkan para penerima manfaat memenuhi kebutuhan berbuka puasa saat pandemi
Pelatihan webinar	Memberikan fasilitas pelatihan *online* serta melakukan pendampingan	5,000,000	Mustahik miskin dalam program *micropreneur* dan	Menyiapkan para penerima manfaat untuk berjualan via

Nama Program	Mekanisme Penyaluran Bantuan	Alokasi Penyaluran (Rp)	Tipe Penerima Bantuan/Manfaat	Dampak yang Terjadi pada Penerima Manfaat
UMKM BAZNAS Kalsel	untuk memperkuat usaha para penerima manfaat di masa pandemi		pedagang BAZNAS Kalsel	*online* agar dapat bertahan di masa pandemi
Pasar Online BAZNAS	Memberikan fasilitas pasar *online* dan biaya promosi disertai pendampingan untuk penerima manfaat	2,000,000	Mustahik miskin dalam program *micropreneur* dan pedagang BAZNAS Kalsel	Penerima manfaat dapat bertahan mengelola usaha bisnisnya dengan inovasi baru di pasar *online*
Masker sehat	Penyaluran berupa masker *reusable* yang diproduksi oleh mustahik program ekonomi BAZNAS Kalsel	2,500,000	Mustahik fakir dan miskin	Penerima manfaat memiliki masker gratis untuk beraktifitas di luar rumah karena harus memenuhi kebutuhan keluarga

Gambaran
Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah

Sektor Industri Halal

Jumlah Usaha/ Merk dengan Sertifikat Halal pada Sektor Makanan dan Minuman (Mamin)

Sektor Usaha/Brand (Tahun 2018)		Sektor Usaha/Brand (Tahun 2019)	
Roti	62	Roti	80
Katering dan Restoran	29	Katering dan Restoran	38
Tepung, Kanji, and produk turunan/olahan	2	Tepung, Kanji, and produk turunan/olahan	2
Es, es krim, dan bahan-bahan pendukung	-	Es, es krim, dan bahan-bahan pendukung	2
Susu dan produk olahan/turunan susu	2	Susu dan produk olahan/turunan susu	2
Makanan olahan, daging dan unggas	7	Makanan olahan, daging dan unggas	10
Makanan olahan ikan	16	Makanan olahan ikan	20
Makanan olahan telur	1	Makanan olahan telur	4
Makanan ringan	104	Makanan ringan	123
Pemanis, bumbu dapur, bumbu penyedap/ pelengkap	33	Pemanis, bumbu dapur, bumbu penyedap/ pelengkap	45
Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	7	Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	10
Semua Usaha/Brand Tersertifikasi Halal	263	Semua Usaha/Brand Tersertifikasi Halal	336

Sumber: Daftar Belanja Produk Halal LPPOM MUI hingga periode Maret-April-Mei 2019

Kontribusi Sektor Mamin terhadap Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan

	2018	2017	2016	2015	2014
PDRB (Milliar Rupiah)					
Mamin olahan	16,386.45	15,570.09	13,913.43	12,107.11	10,494.7
Mamin olahan, Base = 2010	11,104.97	10,568.2	9,958.3	9,212.08	8,700.06
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb)	2,933.43	2,660.13	2,429.32	2,242.37	1,986.82
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb), Base = 2010	2,109.67	1,972.02	1,846.32	1,726.51	1,619.76
Pertumbuhan PDRB (%)					
Mamin olahan, Base = 2010	5.08	6.12	8.1	5.89	4.8
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb), Base = 2010	6.98	6.81	6.94	6.59	6.82
Kontribusi pada PDRB (%)					
Mamin olahan	9.53	9.78	9.52	8.83	8.21
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb)	1.71	1.67	1.66	1.64	1.55

Total produksi daging daerah (tahun 2018)

Populasi Ternak		Produksi Daging Ternak (ton)	
Sapi Potong	113,094	Sapi	7,237.91
Sapi Perah	227	Sapi Impor	Belum ada
Kerbau	16,062	Kerbau	584.36
Kuda	131	Kuda	1.26
Kambing	74,878	Kambing	361.36
Domba	1913	Domba	4.56
Populasi Unggas		**Produksi Daging Unggas (ton)**	
Ayam Kampung	9,685,797	Ayam Kampung	3,110.17
Ayam Petelur	6,040,318	Ayam Petelur	2,730.61
Ayam Broiler	83,358,923	Ayam Broiler	90,581.13
Bebek	4,284,438	Bebek	1,323.78

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan

	2019	2018	2017	2016	2015
PDRB (Milliar Rupiah)					
Jasa akomodasi	1,568	1,634.08	1,786.34	1,638.88	1,446.96
Jasa akomodasi, Base = 2010	884	924.73	1,030.21	966.27	877.36
Pertumbuhan PDRB (%)					
Jasa akomodasi, Base = 2010	-4.40	-10.2	6.62	10.13	4.72
Kontribusi pada PDRB (%)					
Jasa akomodasi	0.94	1.32	1.44	1.41	1.37

Sektor Keuangan Syariah

Indeks Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah

Indeks	Tahun 2016	Tahun 2019
Indeks literasi keuangan Syariah (OJK)	6.5%	6.82%
Indeks inklusi keuangan Syariah (OJK)	2.5%	5.25%
Indeks literasi ekonomi Syariah (BI)	-	17.5

Profil Keuangan BPD Syariah – Bank BPD Kalsel (*Miliar Rupiah*)

	2015	2016	2017	2018	2019
Total aset gross	619	846	1,216	1,335	1,748
Total pembiayaan	484	492	688	869	934
Total DPK	386	480	650	754	1,118
Total FDR	125.42%	102.54%	105.76%	115.23%	83.54%
Total NPF	8.81%	6.61%	6.86%	4.75%	5.16%
Pangsa Pasar (%)	-	-	-	9%	10,6%

Profil Industri Perbankan Syariah (BUS) di Provinsi Kalimantan Selatan (*Miliar Rupiah*)

	2018	2019
Pangsa pasar (%)	27.7%	37.2%
Pembiayaan berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	402.64	389.88
Modal kerja (bukan UMKM)	418.81	327.28
Investasi (UMKM)	272.31	394.71
Investasi (bukan UMKM)	379.94	318.18
Konsumsi	992.09	1,223.77
NPF berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	26.93	39.38
Modal kerja (bukan UMKM)	23.04	-
Investasi (UMKM)	25.31	9.97
Investasi (bukan UMKM)	114.88	2.30
Konsumsi	26.88	23.81
Total		
Total aset gross	7,498	8,718
Total pembiayaan	4,592	4,932
Portfolio pembiayaan UMKM (%)	14.7%	15.9%
Total DPK	5,254	6,117
Total FDR	87.4%	80.6%
Total NPF	8.8%	2.8%
Total NPF (%)	4.7%	1.5%

Profil Industri Perbankan Syariah (UUS) di Provinsi Kalimantan Selatan (*Miliar Rupiah*)

	2018	2019
Pangsa pasar (%)	20.8%	24%
Pembiayaan berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	160	274
Investasi (UMKM)	46	22
Investasi (bukan UMKM)	10	212
Konsumsi	84	110
NPF berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	160	274
Investasi (UMKM)	46	22
Investasi (bukan UMKM)	10	212
Konsumsi	84	110
Total		
Total aset gross	8,074	9,037
Total pembiayaan	5,404	5,475
Portfolio pembiayaan UMKM (%)	10.5%	11.4%
Total DPK	6,412	7,298
Total FDR	84.29%	75.01%
Total NPF	300	618
Total NPF (%)	3.3%	3.8%

Sektor Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Daftar BAZNAS Aktif dan LAZ Aktif

10 BAZNAS dan 4 LAZ Aktif (Rekomendasi BAZNAS)	BAZNAS Kota Banjarmasin, Kota Banjarbatu, Kab. Batola, Kab. Banjar, Kab. Tapin, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Tabalong, Kab. Balangan, Kab. Tanah Laut, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Kotabaru serta LAZ Rumah Zakat, LAZ Rumah Yatim, LAZ LMI, LAZ LAZISMU, LAZ LAZISNU, LAZ Darut Tauhid, LAZ Global Zakat.

Alokasi APBD/Hibah Pemerintah Daerah kepada Institusi Pengelola Zakat yang Resmi

Daftar Alokasi APBD/Hibah	Nominal Alokasi (Rp)
BAZNAS Provinsi Kalsel	1,000,000,000 (2020) 750,000,000 (2019 750,000,000 (2018)

Jumlah Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah (*dalam Rupiah*)

Jenis Dana	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Penghimpunan Zakat			
▪ Zakat Fitrah	688,657,525	921,515,248	1,868,483,469
▪ Zakat Maal/Harta	4,429,475,654	8,113,926,796	17,616,573,798
Penghimpunan Infak			
▪ Infak Bebas	3,790,801,838	6,327,459,005	13,223,464,017
▪ Infak Terikat (termasuk CSR dan kurban)	810,550,448	744,122,516	1,139,280,118

Jumlah Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (*dalam Rupiah*)

Jenis Dana	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Penyaluran Zakat	4,804,123,616	9,035,442,044	11,341,264,048
Penyaluran Infak	3,433,300,318	6,146,748,467	6,026,547,635
Jumlah Penerima Manfaat Tercatat			
▪ Perorangan	9,091 Orang	31,483 Orang	55,627 Orang

Besar Alokasi Penyaluran Zakat, Infak, Infak Terikat, Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Bidang Program	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Sosial Kemanusiaan	3,689,736,782	4,640,302,540	11,324,307,873
Pendidikan	1,479,448,000	2,740,465,407	3,346,486,811
Kesehatan	102,981,009	994,240,840	991,980,207
Pemberdayaan Ekonomi	745,958,219	1,521,012,794	2,495,655,789
Dakwah	799,534,969	2,864,566,380	6,326,011,534

`

Program Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah di Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Kategori	Nama Program	Besar Alokasi Penyaluran (Rp)
1	Sosial Kemanusiaan	1. Bantuan Biaya Hidup Dasar	169,410,000
		2. Banjarmasin Peduli	269,928,000
		3. (HSS Peduli) Santunan Keuangan	5,100,000
		4. Program Bantuan Dana	147,008,000
		5. Program Bantuan Bedah Rumah	91,106,000
		6. Program Bantuan Dana untuk Korban…	108,727,500
		7. Bantuan Masyarakat Miskin Terdampak	503,500,000
		8. Santunan Ibnu Sabil	28,678,000
		9. Santunan Faqir Miskin	226,678,000
		10. Layanan Aktif BAZNAS Kemanusiaan	383,360,255
		11. Santunan Gharim (Hutang)	40,780,000
		12. (HSS Peduli) Bantuan Kebutuhan…	1,504,419,500
		13. Memberikan Bantuan Uang Tunai Halal	19,215,000
		14. Paket Ceria Dhuafa	86,996,500
		15. Penyaluran Dana Zakat untuk…	118,062,500
		16. Program Kemanusiaan Lainnya	50,793,800
		17. Santunan Kematian Biaya Duka	2,000,000
		18. Penyaluran Dana	691,697,496
		19. (HSS Peduli) Santunan untuk Korban…	7,000,000
		20. Paket Logistik Keluarga (PLK)	25,035,000
		21. Bantuan Korban Kebakaran	83,750,000
		22. Zakat Community Development	1,000,000
		23. Santunan Paket Ramadhan	146,590,000
		24. Penyaluran Dana untuk Fisabilillah	3,750,000
		25. Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DKSL)	5,214,200,000
		26. Penyaluran Penanganan Dana Infak Haji	3,000,000
2	Pendidikan	1. Pendidikan	4,750,000
		2. Banjarmasin Cerdas	12,104,000
		3. Beasiswa	816,263,700
		4. Program Bantuan Non Beasiswa	223,154,650
		5. Bantuan Permodalan Keterampilan	5,000,000
		6. Layanan Aktif BAZNAS Pendidikan	292,905,200
		7. Program Pendidikan Lainnya	22,725,000
		8. Program Rehab Tempat Belajar	3,500,000
		9. Program Bantuan Dana untuk Guru	43,000,000
		10. Sarjana Pendidikan Keagamaan	33,174,500
		11. Pendampingan Beasiswa	1,715,000
3	Kesehatan	1. Banjarmasin Sehat	56,510,720
		2. Program Bantuan Dana Berobat	84,500,000
		3. Santunan Dhuafa/Warga Miskin…	61,338,300
		4. Pedampingan Layanan Ibu…	2,600,000
		5. Layanan Mustahik	15,700,000
		6. Bantuan Dana Kesehatan	10,900,000
		7. Layanan Aktif BAZNAS (Kesehatan)	206,345,225
		8. Biaya Pendampingan Keluarga Pa…	144,930,000

		9. (HSS Sehat) Tambahan Biaya Berobat	31,587,300
		10. Pengadaan Barang Logistik	13,984,270
		11. Program Bantuan Kebutuhan Tena…	14,695,500
4	Pemberdayaan Ekonomi	1. Program Bantuan Permodalan Usaha	268,500,000
		2. Program Bantuan Dana	2,500,000
		3. Pinjaman Bergulir	7,500,000
		4. (HSS Makmur) Modal Usaha Produktif	199,700,000
		5. (HSS Makmur) Bantuan Keuangan	7,650,000
		6. Bantuan Penguatan Modal untuk…	13,000,000
		7. Program Pemberdayaan Ekonomi UMKM	75,855,000
		8. Program Z-MART	40,172,000
		9. Program Ekonomi Dakwah Adv	131,186,134
		10. Program Pemberdayaan Ekonomi	65,000,000
		11. UP 10% Hasil Infak Kupon	500,000
		12. UP 25% Hasil Infak Kupon	3,851,000
		13. Bantuan Bahan-Bahan Pertanian	37,880,000
		14. Pendampingan Modal Usaha	11,100,000
		15. Kebun Sehat BAZNAS	14,830,000
		16. Program Pedagang BAZNAS Kalsel	4,245,500
5	Dakwah	1. Bantuan Operasional Muallaf Centre	24,350,000
		2. Bantuan untuk Fisabilillah	81,282,000
		3. Banjarmasin Taqwa	49,800,000
		4. Bantuan Muallaf	75,050,000
		5. Bantuan Dana Penyuluh Agama Islam	79,800,000
		6. Kaderisasi 1000 Ulama	18,800,000
		7. Bantuan untuk Kaum Masjid	13,900,000
		8. Zakat Fitrah	1,449,003,430
		9. Layanan Mustahik	11,300,000
		10. Layanan Aktif BAZNAS Advokasi	648,035,230
		11. (HSS Taqwa) Insentif Guru TK/TPA	374,510,000
		12. (HSS Taqwa) Insentif Dai	61,900,000
		13. (HSS Taqwa) Insentif Pendampin…	2,300,000
		14. (HSS Taqwa) Pembinaan Muallaf	23,000,000
		15. Program Dakwah Lainnya	1,050,000
		16. Pengadaan Alat untuk Kegiatan…	500,000
		17. Kegiatan Keagamaan Mahasiswa KKN	5,250,000
		18. Pembangunan Rehab TPA	2,500,000
		19. Bantuan Penunjang Kegiatan Masjid	33,775,000
		20. (HSS Taqwa) Santunan Fisabilillah	76,775,000
		21. Penyaluran Zakat Maal Via UPZ	146,160,000
		22. Penyaluran Infak, Sedekah dan…	61,135,000
		23. Paket Zakat Fitrak (Idul Fitri)	7,105,000

Indeks Zakat Nasional (IZN) Provinsi Kalimantan Selatan

	2018	2019
Indeks Zakat Nasional/IZN (Dimensi Makro)		
Regulasi	0.5	0.89
Dukungan Finansial dari Pemerintah (APBN/APBD) untuk BAZNAS	0	0.81
Jumlah Resmi Lembaga Zakat/OPZ, muzakki, and mustahik	0.5	0.72
Rasio, Jumlah muzakki individual/jumlah rumah tangga di level Provinsi	0	0.19
Rasio, Jumlah dari muzakki institusi/jumlah institusi di level Provinsi	0	0.64
Database dari institusi/lembaga zakat yang terdaftar	0.16	0.52
Total Indeks Makro	**0.20**	**0.75**
Indeks Zakat Nasional/IZN (Dimensi Mikro)		
Penghimpunan	0	0.89
Pengelolaan	0.75	0.69
Penyaluran	0.75	0.96
Pelaporan	0	0.69
Indeks Kesejahteraan CIBEST	0.75	1.00
Modifikasi Indeks Pengembangan Manusia (HDI)	0.75	0.50
Kemandirian	0.75	0.63
Institutional	0.37	0.83
Dampak Zakat	0.75	0.73
Total Indeks Mikro	**0.60**	**0.77**

Indeks Skor Literasi dan Pemahaman Zakat Provinsi Kalimantan Selatan

	2020
Indeks Literasi Zakat	67.06
Indeks Pemahaman Dasar tentang Zakat	73.30
Indeks Pemahaman Lanjutan tentang Zakat	55.46

Indeks Skor Literasi dan Pemahaman Wakaf Provinsi Kalimantan Selatan

	2020
Indeks Literasi Wakaf	48.69
Indeks Pemahaman Dasar tentang Wakaf	56.71
Indeks Pemahaman Lanjutan tentang Wakaf	33.79

Sektor UMKM dan Ekonomi Pesantren

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Ekonomi Pesantren

8 Pondok Pesantren	8 Usaha-usaha Syariah (*detil dapat di Lampiran*)

- Pemberian program pemberdayaan usaha pesantren melalui pembentukan unit usaha baru dan memberikan program peningkatan kapasitas operasional dalam area produksi/pemasaran bagi pondok pesantren di Kalsel
- Telah menyelenggarakan Seminar Pemeberdayaan Pondok Pesantren dalam Kemandirian Ekonomi dalam Festival Ekonomi Syariah Tahun 2019

- Memberikan pelatihan pertanian organik dan pembudidayaan ikan air tawar kepada pondok pesantren di Agro Edupark Bumitangi Bank Indonesia Kalsel
- Memberikan Bantuan teknis pelatihan penyusunan laporan keuangan syariah bekerjasama dengan perbankan syariah/lembaga lainnya

Sektor Pendidikan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Perguruan Tinggi yang Menyediakan Program Studi Ekonomi dan Keuangan Syariah Terkait

Jenjang	Jumlah Universitas tahun 2019	Program Studi tahun 2019		2018		2019	
		Nama Program Studi	Jumlah Program Studi	Jml. Dosen	Jml. Mahasiswa	Jml. Dosen	Jml. Mahasiswa
Sarjana	4	Hukum Ekonomi Syariah	1	12	434	12	-
		Ekonomi Syariah	3	19	2678	19	350
		Asurasi Syariah	1	7	176	7	-
		Perbankan Syariah	3	11	23	11	39
Magister	1	Ekonomi Syariah	1	6	284	6	117
Doktoral	-						

Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi Ekonomi Syariah Terkait

Akreditasi	Akreditasi Perguruan Tinggi			Akreditasi Program Studi		
	S1	S2	S3	S1	S2	S3
Akreditasi A	-	-	-	1	-	-
Akreditasi B	1	1	-	2	1	-
Akreditasi C	2	-	-	2	-	-
Belum Terakreditasi	1	-	-	3	-	-

Peluang Investasi Daerah
untuk Industri Keuangan Syariah

No	Peluang Proyek Investasi	Sektor	Tahapan Proyek Investasi	Nilai Perkiraan Investasi (*dalam Rupiah*)
1	Kawasan Industri Batulicin	Kawasan Industri	Perencanaan	33 Triliun
2	Kawasan Industri Jorong	Kawasan Industri	Perencanaan	41 Triliun
3	Aero City Syamsuddin Noor	Sektor Lain-lain	Perencanaan	16.6 Triliun
4	Pembangunan Pembangkit Listrik pada Bendungan Tapin	Infrastruktur	Perencanaan	2.18 Triliun
5	Pembangunan Pembangkit Listrik pada Bendungan Kusan	Infrastruktur	Perencanaan	3 Triliun
6	Pembangunan Sport City	Infrastruktur	Perencanaan	1.5 Triliun
7	Geopark Pegunungan Meratus	Pariwisata	Perencanaan	1 Triliun
8	KEK Pariwisata Loksado	Pariwisata	Perencanaan	2 Triliun
9	Kawasan Pariwisata Riam	Pariwisata	Perencanaan	1 Triliun
10	Traditional Floating Market	Pariwisata	Perencanaan	1 Triliun
11	Hotel	Pariwisata	Belum ada	20 Miliar
12	Wisata Alam dan Budaya	Pariwisata	Belum ada	5 Miliar
13	Cool Storage	Sektor Lain-lain	Belum ada	20 Miliar
14	Pengolahan Produk Daging Ayam	Infrastruktur	Belum ada	15 Miliar
15	Makanan	Infrastruktur	Belum ada	Belum ada
16	Pakaian Muslim	Infrastruktur	Belum ada	Belum ada
17	Kosmetik	Pariwisata	Belum ada	Belum ada
18	Sekolah	Pariwisata	Belum ada	Belum ada
19	Matahari Cipta Sentosa*	Budidaya Ikan Air Tawar	Sudah Operasi	1.4 Miliar
20	Alamraya Kencana Mas*	Pertanian Buah-buahan, Perkebunan Kelapa Sawit, Perkebunan Tanaman untuk Minuman, Perkebunan Jambu Mete dan Perkebunan Tanaman utk Rempah	Sudah Operasi	120 Miliar
21	Laguna Mandiri*	Pertanian Buah-buahan, Perkebunan Kelapa Sawit, Perkebunan Tanaman untuk Minuman, Perkebunan Jambu	Sudah Operasi	370 Miliar

No	Peluang Proyek Investasi	Sektor	Tahapan Proyek Investasi	Nilai Perkiraan Investasi (*dalam Rupiah*)
		Mete dan Perkebunan Tanaman untuk Rempah		
22	Langgeng Muara Makmur	Pertanian Buah-buahan, Perkebunan Kelapa Sawit, Perkebunan Tanaman untuk Minuman, Perkebunan Jambu Mete dan Perkebunan Tanaman untuk Rempah	Sudah Operasi	168 Miliar
23	Paripurna Swakarsa	Pertanian Buah-buahan, Perkebunan Kelapa Sawit, Perkebunan Tanaman untuk Minuman, Perkebunan Jambu Mete dan Perkebunan Tanaman untuk Rempah	Sudah Operasi	275 Miliar

NB: (*) Nilai Perkiraan Investasi adalah nilai realisasi investasi pada triwulan 1 tahun 2020 bukan nilai perkiraan investasi proyek tersebut
(*) Proyek tersebut adalah proyek yang sudah jalan bukan peluang investasi

Banjarmasin Kota Seribu Sungai

Mochammad Arif Budiman, Ph.D.[24]

Kalimantan Selatan adalah provinsi yang sangat kental dengan sejarah dan nuansa keislaman. Agama Islam masuk ke wilayah ini pada sekitar abad ke-15 M yang secara formal ditandai dengan masuk Islamnya Pangeran Samudera, penguasa pertama Kerajaan Banjar yang bergelar Sultan Suriansyah. Sebagai agama resmi kerajaan, Islam memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat Banjar.

Mayoritas penduduk Kalimantan Selatan adalah Muslim (96.7%) yang dikenal taat menjalankan ajaran Islam. Bagi orang Banjar, Islam adalah identitas yang membentuk dan memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya secara turun-temurun. Prosesi kelahiran, sunatan, pernikahan, perdagangan, hingga kematian dilaksanakan mengikuti ajaran Islam. Hari-hari besar Islam, seperti Maulid Nabi Muhammad, Isra Mi'raj, dan bulan Ramadhan juga diperingati dengan berbagai seremonial dan atraksi budaya yang khas dan menarik untuk dinikmati oleh siapapun yang berkunjung ke Bumi Antasari. Di provinsi ini terdapat Kota Martapura yang dikenal sebagai Kota Santri dan Serambi Mekkah.

Budaya Sungai

Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan adalah kota yang unik dan dikenal dengan julukan *Kota Seribu Sungai* karena banyaknya sungai yang mengalir di dalamnya. Sungai memiliki peran vital bagi orang Banjar sejak zaman dahulu kala. Di samping memenuhi kebutuhan hidup bagi warganya, sungai berfungsi sebagai sumber mata pencaharian dan jalur transportasi orang maupun barang. *Jukung* (perahu kecil) dan *klotok* (perahu motor) adalah moda transportasi sungai yang biasa digunakan oleh warga. Kegiatan ekonomi dan bisnis juga banyak dilakukan di sungai dan masih tetap bertahan sampai sekarang dengan istilah *pasar terapung*.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, sungai mulai kehilangan pamornya. Pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah mengubah aktivitas dan kehidupan masyarakat Banjar dari yang semula berorientasi ke sungai menjadi berorientasi ke daratan. Banyak sungai yang mati atau menyempit karena pesatnya pendirian bangunan dan kawasan permukiman yang mengabaikan prinsip kearifan lokal. Hal ini tentunya mengancam kelangsungan budaya sungai dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, untuk mengembalikan fungsi dan peran sungai, pemerintah kota Banjarmasin gencar melaksanakan program revitalisasi sungai. Selain untuk mencegah banjir, program ini juga ditujukan untuk membangkitkan wisata sungai dan menjadikan Banjarmasin sebagai kota sungai terindah di Indonesia.

Pariwisata Ramah Muslim

Pariwisata Ramah Muslim merupakan konsep pengelolaan wisata yang bersifat inklusif. Konsep ini tentu tidak sebatas wisata religi saja, namun mencakup semua jenis pariwisata, baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pariwisata Ramah Muslim sangat sesuai dengan karakter masyarakat Banjar yang religius, namun tetap toleran dan terbuka dengan berbagai agama dan budaya lain.

Pemerintah Kalimantan Selatan terus berupaya memajukan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan dan mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan yang selama ini menjadi primadona. Berbeda dengan

[24] Dosen Politeknik Negeri Banjarmasin, Prodi D4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

pertambangan, pariwisata memiliki kelebihan karena merupakan sumber daya yang terbarukan, ramah lingkungan dan mampu memberikan efek berganda (*multiplier effect*) bagi masyarakat luas. Pada tahun 2020, pemerintah daerah mencanangkan program Visit Kalsel 2020 dengan 32 *kegiatan* wisata andalan untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara.

Wisata Sungai

Banjarmasin memiliki potensi besar untuk mengusung dan mengembangkan konsep Pariwisata Ramah Muslim berbasis sungai karena didukung oleh kombinasi unik aspek historis, demografis, dan sosiologis berlatar Islam dan aspek geografis berlatar sungai. Untuk mengembangkan wisata sungai ini, Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina, menerbitkan Peraturan Walikota No. 25 Tahun 2016 yang menetapkan arah kebijakan pengelolaan dan pengembangan wisata berbasis sungai dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan dan menstimulasi perekonomian masyarakat. Dalam peraturan ini, kawasan pengembangan wisata sungai dimulai dari Pasar Terapung Siring Tendean dan dibagi menjadi tiga zona, yaitu:

1. Zona Utara dengan 18 titik destinasi;
2. Zona Barat dengan 5 titik destinasi; dan
3. Zona Selatan dengan 12 titik destinasi.

Sungai Martapura yang membelah kota Banjarmasin merupakan titik sentral pengembangan wisata sungai. Terdapat banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi di kawasan ini mulai dari Taman Siring 0 Km, Menara Pandang, Taman Maskot Bakantan, pasar terapung Tendean, dan Rumah Anno 1925. Siring di kedua tepi Sungai Martapura dengan penataan trotoar dan tanaman yang asri sangat cocok untuk bersantai sambil menikmati suasana sungai yang eksotik. Di sekitar kawasan ini terdapat fasilitas olahraga, arena bazar, tempat ibadah, toko suvenir, restoran dan hotel sehingga memudahkan bagi para wisatawan yang berkunjung.

Menara Pandang adalah *landmark* kota yang terdiri dari empat lantai yang dari puncaknya wisatawan dapat menikmati pemandangan indah sepanjang Sungai Martapura, sedangkan di Taman Maskot Bekantan terdapat patung Bekantan (monyet hidung panjang) setinggi 7 meter yang merupakan hewan maskot Kalimantan Selatan. Tidak jauh dari Taman Siring 0 km, terdapat Masjid Raya Sabilal Muhtadin, masjid terbesar di provinsi ini yang namanya diambil dari nama kitab karangan ulama terkenal Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

Sedangkan di pasar terapung Tendean, wisatawan dapat menyantap aneka makanan dan kue tradisional khas Banjar serta membeli berbagai jenis buah dan sayuran segar. Pasar terapung Tendean hanya beroperasi pada dari Sabtu dan Minggu. Selain itu, wisatawan juga dapat mengunjungi Kampung Sasirangan, kawasan penghasil kain tradisional khas Banjar yang dibuat melalui proses pewarnaan rintang dengan menggunakan bahan perintang seperti tali atau benang menurut corak-corak tertentu.

Dari Siring Tendean, wisatawan dapat menaiki *klotok* untuk menyusuri sungai-sungai di Banjarmasin dengan berbagai rute pilihan, seperti Pasar Lama (jarak pendek), Kampung Hijau, Jembatan Barito (Pulau Bakantan), Kubah Basirih, Museum Wasaka, atau SungaiBiuku. Di samping melihat panorama sngai yang eksotik dan deretan rumah panggung kayu dengan berbagai aktivitas warganya, wisatawan susur sungai juga dapat mengunjungi situs bersejarah masjid dan makam Sultan Suriansyah di daerah Kuin, menikmati soto banjar di warung Soto Bang Amat di Banua Anyar dengan diiringi alunan musik *panting*, maupun memetik beraneka buah langsung dari pohonnya di daerah Sungai Gampa. Wisatawan yang tertarik melihat langsung suasana pasar terapung tradisional di Lok Baintan yang terletak di Kabupaten Banjar dapat naik *klotok* dengan waktu tempuh sekitar 40 menit dan harus berangkat sekitar jam 5 pagi.

Bagi wisatawan yang tertarik dengan wisata religi, Banjarmasin juga memiliki sejumlah destinasi unggulan dan bersejarah, yaitu Masjid Raya Sabilal Muhtadin, masjid dan makam Sultan Suriansyah, masjid Jami Sungai Jingah, dan makam Habib Basirih. Selain itu, wisatawan juga dapat pergi ke Martapura untuk berziarah ke makam ulama karismatik Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani di Sekumpul dan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari di Kelampayan.

Wawancara
Kepala Instansi Daerah

Bagaimana visi, rencana, dan program-program terkait ekonomi syariah?

Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan

1. Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan
   Visi Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 adalah "Terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai Wilayah Industri yang Maju dan Berdaya Saing Tinggi pada Tahun 2038 "

   Misi Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan
   Misi Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 sebagai berikut:
   - Meningkatkan pengelolaan sumber daya unggulan daerah secara efisien yang mampu mendukung pengembangan komoditas industri unggulan
   - Meningkatkan industri-industri hilir lanjutan yang mandiri, berdaya saing dan maju untuk meningkatkan nilai tambah dan kompetensi industri daerah
   - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing
   - Mempercepat pembangunan dan penguatan infrastruktur dan fasilitas industri

   Tujuan Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan
   Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan adalah:
   - Tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan berbasis sumber daya lokal
   - Menguatnya daya saing industri melalui penerapan inovasi dan teknologi

   Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan
   Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan sasaran pembangunan sektor industri Kalimantan Selatan yang diharapkan tercapai adalah sebagai berikut:
   - Tercapainya pertumbuhan sektor industri sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat
   - Terjadinya peningkatan pangsa pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor serta meningkatkan ekspor
   - Peningkatan kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri Provinsi Kalimantan Selatan
   - Peningkatan penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri
   - Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
   - Penguatan struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam
   - Terjadinya peningkatan inovasi dan penguatan teknologi

No	Sasaran	Tahun			
		2023	2028	2033	2038
1	Pertumbuhan sektor industri tanpa migas (%)	5.21%	7.50%	8.75%	10.0%
2	Kontribusi industri tanpa migas terhadap PDRB (%)	13.45%	14.30%	15.15%	18.00%
3	Nilai ekspor produk industri tanpa migas (Juta USD)	10,775	13,109	16,731	22,390
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas (orang)	307,496	374,116	477,477	638,972
5	Nilai Investasi sektor industri tanpa migas				
	a. Penanaman Modal Asing (Juta US $)	76.77	105.25	163.29	255.13
	b. Penanaman Modal Dalam Negeri (Miliar Rupiah)	237.54	325.67	505.28	789.46

2. Terkait Usaha Syariah Provinsi Kalimantan Selatan
   Visi Perusahaan
   Menjadikan Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Jamkrida Kalsel sebagai penjamin yang terdepan dalam melakukan penjaminan berdasarkan prinsip syariah.

   Program-Program:
   - Bekerjasama dengan lembaga perbankan syariah maupun lembaga non perbankan syariah untuk mendorong perkembangan UMKM Kalsel
   - Bekerjasama dengan *co-guarantee* atau reasuransi untuk *sharing risk*
   - Tingkat pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah dengan telah dikembangkannya koperasi syariah yang berada di pesantren-pesantren dan sekolah-sekolah berbasis Islam di Kalsel merupakan potensi yang potensial
   - Pengembangan fesyen syar'i dengan jumlah masyarakat yang sebagian besar beragama Islam, Provinsi Kalsel berpotensi menyiapkan busana-busana Islami dengan bersinergi dengan busana lokal (sasirangan) akan lebih menarik dengan dukungan dinas pariwisata dan ekokraf serta dinas perindustrian

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan

Visi Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan adalah mewujudkan perdagangan yang kondusif dan berdaya saing menuju masyrakat KalSel yang MAPAN (Mandiri dan Terdepan), termasuk di dalamnya perdagangan berbasis Syariah

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, dengan kegiatan:
   - Promosi komoditi perdagangan luar negeri
   - Sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri
   - Pelatihan UKM calon eksportir
   - Promosi produk perdagangan kalsel berbasis teknologi informasi
2. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, dengan kegiatan:
   - Pengawasan dan penyuluhan peredaran barang dan jasa
   - Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan konsumen
   - Forum penyelenggaraan kesepakatan kerjasama dan pemetaan potensi alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) di wilayah provinsi
3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan kegiatan:
   - Pasar murah
   - Pemasaran produk dalam negeri
   - Informasi harga pasar
   - Penataan pasar

Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

Visi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan terpadu dalam visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021, yakni Kalimantan Selatan Mapan (Mandiri dan Terdepan), Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berkelanjutan, Berdikari, dan Berdaya Saing.

Rencana dan program kerja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan dalam urusan penanaman modal dijabarkan dan mengacu pada beberapa dokumen perencanaan, antara lain:

1. RPJMD Kalsel 2016-2021 dan perubahannya
2. Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 dan perubahannya
3. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kalimantan Selatan dan perubahannya

Pelaksanaan program kerja diuraikan sebagaimana dokumen perencanaan tersebut, meliputi:

1. Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari:
   - Identifikasi potensi dan evaluasi kebijakan investasi
   - Pengembangan dan pemberdayaan usaha (kemitraan)
2. Promosi Investasi, antara lain: pameran, forum, *one-one meeting*, dll
3. Pengendalian Pelaksanaan Investasi, yakni:
   - Monitoring
   - Evaluasi
   - Pembinaan
   - Pengawasan
4. Pengelolaan Sistem Informasi

Pada dasarnya, DPMPTSP tidak mempunyai kewenangan dan bertanggungjawab dalam mengelola perekonomian syariah. DPMPTSP hanya berwenang pada urusan penanaman modal berupa investasi langsung. Namun demikian, secara umum DPMPTSP tetap mendorong para pelaku usaha, baik konvensional maupun syariah, dengan mempermudah dan fasilitasi program kerjasama dan kemudahan perizinan. Harapan kami agar investasi yang masuk ke Kalimantan Selatan dapat berjalan lancar. Kami selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

Bank Indonesia Kalimantan Selatan memiliki tugas pokok di bidang pengembangan sektor Ekonomi Syariah yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

- Peningkatan pemahaman pelaksanaan program edukasi/kampanye ekonomi dan keuangan syariah dengan target tingkat pemahaman peserta atas *post-test* minimal 60%; Dalam pelaksanaanya BI Kalsel aktif memberikan edukasi/kampanye ekonomi syariah kepada masyarakat dan UMKM mitra dan binaan, adapun untuk mengukur tingkat pemahaman dari audience setelah dilaksanakan edukasi, masing-masing peserta mengisi kuesioner penilaian apabila nilai *post-test* melebihi 60% edukasi dinilai berhasil.
- Jumlah pesantren yang dikembangkan (minimal 2 pesantren). Setiap tahun BI Kalsel memiliki target jumlah pondok pesantren yang dibina, pada tahun 2020 direncanakan ada 3 pondok pesantren baru yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan. Program pemberdayaan usaha pesantren dilakukan melalui pembentukan unit usaha baru bagi ponpes yang belum memiliki unit usaha dan program peningkatan kapasitas operasional dalam area produksi/pemasaran bagi pondok pesantren yang telah memiliki unit usaha.
- Fasilitasi infrastruktur pendukung industri halal (1 UMKM), kepemilikan sertifikasi halal bagi UMKM makanan saat ini menjadi salah satu syarat utama dan wajib dimiliki seiring dengan telah diimplementasikannya UU No. 33 Tahun 2014. Berkaitan dengan hal tersebut BI Kalsel akan memberikan pembinaan dan pelatihan kepada UMKM mitra dan binaan untuk mendapatkan sertifikasi halal.
- Jumlah pelaku usaha syariah yang meningkat (target 2 UMKM lolos IKRA). Dalam rangka pengembangan bisnis UMKM syariah, BI Kalsel telah memberikan pembinaan kepada UMKM binaan antara lain: penyusunan bisnis plan, marketing plan, pembuatan foto dan video proses produksi, penyusunan pelaporan keuangan, teknik presentasi dan pelatihan dasar lainya. BI Kalsel mengikutsertakan UMKM binaan dari kategori makanan dan fesyen dalam seleksi Industri Kreatif Syariah Indonesia (IKRA Indonesia). Kegiatan kurasi selama pandemi COVID-19 dilakukan secara *online* oleh kurator skala Nasional.

- Jumlah insiasi *linkage* antar pelaku usaha syariah yang meningkat (5% dari pelaku usaha mendapatkan *business matching*). Dalam rangka peningkatan skala usaha industri syariah BI Kalsel menyelenggarakan Business Matching yang melibatkan industri perbankan, investor dan pelaku usaha dalam satu forum agar terdapat kesepakatan bisnis diantara pelaku usaha.

Ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

1. Visi
   Menjadikan BAZNAS KALSEL sebagai BAZNAS Provinsi terbaik di Indonesia pada tahun 2025 dengan moto "Ampih Miskin dengan Sentuhan Zakat"
2. Misi
   Visi tersebut direalisasikan melalui misi dan rencana ke depan BAZNAS Kalimantan Selatan sebagai berikut:
   - Mengkoordinasikan BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ dalam pencapaian target
   - Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat (sosialisai yang tepat dan pengumpulan yang cermat)
   - Mengoptimalkan pendistirbusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemoderasian kesenjangan sosial (pendayagunaan yang akurat)
   - Menerapakan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknoligi dan komunikasi terkini
   - Menerapkan layanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat
   - Menggerakkan dakwah islam untuk kebangkitan zakat di kalimantan selatan melalui sinergi umat
   - Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat Kalimantan Selatan yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun warabbun ghafuur*
   - Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul.

Bagaimana peluang pengembangan sektor ekonomi syariah, industri halal, dan sektor keuangan syariah?

Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan

1. Industri Halal
   Di dalam pembangunan dan pengambangan produk-produk industri yang dikonsumsi khususnya industri pangan perlu dilengkapi dengan sertifikasi halal. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurigaan konsumen terhadap kandungan bahan-bahan baik bahan baku maupun bahan penolong yang mempunyai unsur-unsur yang diharamkan oleh agama sekaligus menjadi jaminan mutu halal bagi konsumen dengan tujuan untuk merebut kepercayaan konsumen secara umum.
2. Ekonomi Syariah
   Dengan promosi dan sistem pemasaran produk-produk industri berlabel halal, memungkinkan untuk membangun usaha industri secara syariah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip wirausaha.

Unit Usaha Syariah PT. Jamkrida Kalsel berencana bekerjasama dengan lembaga perbankan syariah maupun lembaga non perbankan syariah untuk menunjang program pemerintah di bidang usaha UMKM dengan melakukan penjaminan syariah.

PT. Jamkrida Kalsel dapat merealisasikan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan potensi bisnis yang relatif besar di bidang penjaminan pembiayaan syariah, mengingat budaya provinsi Kalimantan Selatan yang kental akan keislamannya.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan

Pengembangan sektor ekonomi syariah, industri halal dan sektor keuangan syariah di Kalsel peluangnya sangat besar dan cukup menarik bagi masyarakat, karena penduduk Kalsel Sebagian besar beragama Islam yang patuh dalam menjalankan ajaran agamanya sehingga kegiatan ekonomi syariah dipandang sebagai bagian dari kegiatan ibadah sosial. Ekonomi syariah, industri halal serta sektor keuangan syariah juga cukup diminati oleh non-Muslim.

Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

Dengan memperhatikan faktor geografi yang strategis, demografi, dan luas wilayah, maka Kalsel berpeluang dalam mengembangkan sektor tersier, termasuk yang berhubungan dengenan keuangan syariah. Peluang pengembangan tersebut didukung dengan faktor dominan penduduk yang Muslim dan tingkat religius penduduk yang cukup tinggi.

Untuk peluang investasi halal lebih diutamakan pada sektor pariwisata, industri dan pendidikan, serta sektor keuangan syariah. Sektor-sektor ini mempunyai peluang yang bagus untuk dikembangkan Kalsel. Kami sangat mendukung jika ada investor yang berminat pada sektor ekonomi syariah, dimana Kalsel sebagai wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

Peluang pengembangan ekonomi syariah, industri halal dan keuangan syariah di provinsi Kalimantan Selatan sangat potensial mengingat penduduk Kalsel 96% adalah Muslim. Industri yang berkembang baik industri rumah tangga (kuliner dll), pertanian dan perikanan, peternakan, manufaktur dan lain-lain umumnya baik proses maupun bahan baku tidak mengandung zat-zat yang diharamkan sehingga sesuai dengan syar'í. Kondisi ini didukung dengan dijadikannya Kalsel sebagai daerah penyangga calon Ibu Kota Negara, yang membutuhkan pembangunan sarana/prasarana (infrastruktur), sumber pasokan pangan dan daerah transit sehingga dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan syariah sebagai salah satu alternatif pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur dimaksud. Pengembangan industri halal sangat tepat dikembangkan mengingat potensi pasar yang besar. Di sisi lain, Kalsel juga memiliki prospek untuk pengembangan wisata religi/wisata ramah Muslim, mengingat banyaknya kegiatan-kegiatan Islami (Haul Guru Sekumpul, dll) dan tempat-tempat bersejarah (masjid, makam) dll yang sering dikunjungi oleh umat Muslim dari berbagai negara

Ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Pengelolaan zakat secara nasional sangat erat kaitannya dengan ekonomi syariah. Di dalam Roadmap Keuangan Syariah Indonesia 2015-2019 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diungkapkan bahwa nilai ekonomi syariah memiliki kesamaan dengan nilai luhur dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Nilai dasar ekonomi syariah terkait dengan akidah, syariah, akhlak yang melahirkan kesetiakawanan (ukhuwah), keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan. Sedangkan nilai luhur bangsa Indonesia terdiri dari masyarakat berke-Tuhanan YME, adab dan moral yang tinggi, persatuan dan gotong royong, musyawarah untuk mufakat dan kesejahteraan bersama.

Ekonomi Syariah sebagai kompenan penting dalam Keuangan Syariah Indonesia memiliki kaitan yang sangat erat dengan Pengelolaan zakat, karena di dalam Arsitektur Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia, yang dirilis oleh Bappenas, zakat merupakan salah satu pilar penting dalam *religius financial sector*. Keberadaan zakat dalam kerangka ini menjadi komplemen penyempurna yang tidak dimiliki oleh model keuangan konvensional. Penguatan ekonomi syariah tidak bisa terlepas dari pertumbuhan pengelolaan zakat di Indonesia.

Geliat ekonomi syariah di Kalimantan Selatan dimulai awal tahun 2000-an yang mana perkembangannya tidak terlepas dari peran ulama melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan, DPRD, dan Pemerintah Daerah yang memberikan ruang sangat terbuka kepada para pelaku ekonomi syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan hotel syariah untuk berusaha di Kalimantan Selatan. Perkembangannya yang cukup baik dalam menopang pertumbuhan ekonomi tentunya perlu terus didukung mengingat Kalimantan Selatan merupakan lumbung umat Islam terbesar yang sangat berpotensi dalam menumbuhkembangkan ekonomi syariah secara komprehensif termasuk zakat. Pendalaman agama yang semakin berkembang di masyarakat, baik melalui majelis-majelis ta'lim, kajian-kajian kitab serta peran media sosial memberikan dampak positif dalam perkembangan keislaman terutama masalah ekonomi syariah dan zakat.

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sebagai garda terdepan di dalam pengelolaan zakat tentunya harus mengambil peran terbesar dalam perkembangan bidang ekonomi syariah ini, agar moment kebangkitan zakat yang dicanangkan presiden RI tidak hanya sekadar slogan yang tidak menimbulkan harmonisasi dalam pelaksanaannya.

Atas dasar BAZNAS merupakan sektor Keuangan Sosial Syariah yang mana pelaporan sesuai dengan akuntansi syariah PSAK 109 maka BAZNAS Kalsel telah melaksanakan kegiatannya dalam ruang lingkup Ekonomi Sosial Syariah. Beberapa

contoh program dalam membantu pengusaha mikro, kecil dan menengah bahwa setelah mereka berpenghasilan maka mereka dianjurkan untuk menabung di Koperasi Syariah atau Bank Syariah. Dalam membantu di bidang pendidikan dan dakwah penyalurannya melawati Bank Syariah. BAZNAS telah membina UMKM dalam memproduksi produk halal seperti makanan, minuman, pakaian. Khusus penanggulangan wabah Covid-19 BAZNAS telah membantu dalam bidang kesehatan dengan mengadakan kegiatan penyemprotan disinfektan masjid, pengadaan masker dari produksi mustahik BAZNAS, pengadaan APD untuk rumah sakit. BAZNAS Kalsel juga membantu dalam bidang ekonomi antara lain memberikan bantuan modal dan pelatihan UMKM.

Bagaimana tantangan utama apa yang saat ini dihadapi dalam mengembangkan sektor ekonomi Syariah, industri halal, dan sektor keuangan Syariah?

Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan

Tantangan utama yang dihadapi saat ini dalam mengembangkan sektor keuangan syariah:

- Penafsiran Syariah yang berbeda dari beberapa mode dan konsep adalah masalah utama yang menghambat perkembangan keuangan syariah.
- Menggunakan tolak ukur yang sama dan menerapkan biaya yang sebanding dengan pasar konvensional utama.

Kendala pengembangan ekonomi dan keuangan syariah

- Penerapannya masih bersifat eksklusif sehingga perlu lebih terbuka dan disosialisasikan secara masif dan terencana.
- Belum menjadi prioritas pembangunan daerah dan masih lemahnya regulasi.
- Daya saing yang masih lemah dan belum melembaga

.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan

Tantangan yang dihadapi saat ini adalah:

- Kurangnya pelaku usaha besar yang berani berinvestasi pada sektor ekonomi syariah baik pada sektor industri, sektor pariwisata, perdagangan maupun perhotelan, komunikasi dan perbankan.
- Masih banyaknya industri rumahan yang bergerak pada sektor produk makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan bagaimana berproduk secara Islami dan higienis.
- Belum siapnya pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat halal
- Kurangnya sosialisasi dari lembaga penerbit sertifikat halal kepada pelaku usaha
- Prosedur pengurusan sertifikat halal yang dipandang sulit oleh pelaku usaha serta tidak adanya Lembaga Sertifikat Halal hingga ke tingkat kabupaten/kota.

Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

Secara umum, lemahnya identifikasi terhadap lingkungan pemasaran menjadi tantangan utama DPMPTSP Kalsel dalam mengundang masuk investasi, khususnya penyediaan data untuk menunjang pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan strategis dalam mengundang invvestor. Selanjutnya terkait sosialisasi dan promosi.

Di samping itu, secara eksternal persaingan juga menjadi tantangan utama. Jika tingkat religiusitas penduduk Kalsel menjadi kelebihan daya saing Kalsel, maka tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan dapat menjadi tantangan. Tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat menjadi faktor yang diyakini dapat menentukan tingkat keberhasilan pengembangan sektor tersier termasuk sektor keuangan syariah.

Tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan di Kalsel bisa jadi mempunyai daya saing yang tinggi di regional Kalimantan. Namun jika menempatkan persaingan dengan Jawa Timur yang wilayahnya cukup berdekatan, maka Kalsel menghadapi tantangan yang berat dalam mengembangkan perekonomian syariah dan sektor keuangan syariah di Kalsel. Harapan kami, agar semua *stakeholder* dapat berpartisipasi dalam hal ini. Sehingga investasi di Kalsel dapat meningkat yang berdampak pada peningkatan perekonomian, khususnya di Kalimantan Selatan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam pengembangan sektor ekonomi syariah tantangan utama yang dihadapi adalah peningkatan SDM syariah dan kesadaran/pemahaman masyarakat terkait pentingnya muamalah. Selama ini masyarakat lebih terfokus pada kegiatan ibadah, sementara penerapan fiqih/syariah di bidang muamalah yang meliputi seluruh aspek hubungan antar manusia kurang diperhatikan. Sehingga perkembangan lembaga keuangan syariah juga menjadi stagnan, walau potensi masyarakatnya sangat besar. Disisi lain juga masih banyak ponpes yang beraliran salafi yaitu pesantren yang menganut sistem tradisional di mana didalamnya hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama. Sehingga kegiatan muamalah misalnya di bidang perekonomian/keuangan masih dianggap tabu. Namun demikian terdapat juga ponpes yang sudah modern yang sangat ingin mandiri secara ekonomi. Pesantren-pesantren modern seperti ini sedang di rangkul oleh BI agar ke depan bisa menghasilkan SDM-SDM yang mumpuni secara agama maupun pengetahuan ekonomi/keuangan/usaha syariah yang diharapkan dapat mendukung semakin berkembangnya ekonomi syariah di Kalsel khususnya dan Kalimantan pada umumnya. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan unit usaha di pesantren-pesantren modern tersebut adalah pemisahan laporan keuangan antara unit usaha ponpes dengan kegiatan pondok pesantren lainnya.

Ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah:

- Belum banyak tersedia tenaga yang siap pakai di sektor keuangan sosial syariah
- Masih belum optimal koordinasi di tingkat pimpinan di daerah dalam mengembangkan keuangan sosial syariah
- Sosialisasi dan eduksi yang belum optimal kepada masyarakat
- Perangkat kebijakan yang belum memenuhi harapan masyarakat seperti fatwa MUI terkait penyaluran zakat dalam bentuk pinjaman atau dana bergulir, investasi dana zakat, penyaluran zakat kepada yayasan sosial, pengaturan zakat perusahaan, dan penyaluran dalam bentuk aset kelolaan oleh amil

Kalimantan Selatan

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Ekonomi Pesantren

No	Nama Pesantren	Deskripsi Program
1	PP Darul Hijrah	▪ Usaha Penggilingan Padi ○ Penggilingan padi menjadi beras untuk dikonsumsi warga pondok pesantren ▪ Jasa Pengelolaan Air Minum ○ Produk air minum telah dikonsumsi oleh warga pesantren dan selebihnya dikonsumsi oleh masyarakat disekitar
2	PP Darul Ilmi	▪ Jasa Pengelolaan Air Minum ○ Pembangunan instalasi pengelolaan air minum telah selesai dilaksanakan, saat ini masih menunggu sertifikasi kelayakan dari Sucofindo. Kedepan produksi air minum diharapkan dapat dijual ke pesantren lain dan/atau masyarakat
3	PP Ishlahul Aulad	▪ Jasa Penggilingan Padi ○ Penggilingan padi menjadi beras untuk dikonsumsi warga pondok pesantren dan/atau dijual ke pesantren lainnya
4	PP Al Islam	▪ Budidaya Ikan Air Tawar dan Pertanian Organik ○ Pembudidayaan ikan air tawar di tanah untuk kemandiran pakan, sedangkan limbah dari budidaya peternakan dijadikan pupuk organik untuk pertanian. Ke depan produksi ikan diharapkan dapat dijual ke pesantren lainnya

Daftar Usaha-Usaha Syariah yang Dikelola Pondok Pesantren

No	Nama Pesantren	Nama Unit Usaha yang dikelola Santri	Deskripsi Program
1	PP Darul Hijrah	Usaha Penggilingan Padi dan Jasa Pengelolaan Air Minum	Belum ada
2	PP Darul Ilmi	Jasa Pengelolaan Air Minum	Belum ada
3	PP Ishlahul Aulad	Jasa Penggilingan Padi	Belum ada
4	PP Al Islam	Budidaya Ikan Air Tawar dan Pertanian Organik	Belum ada
5	PP Misbahul Munir	Pertanian dan Perikanan	Belum ada
6	PP Walisongo	Pertanian dan Perikanan	Belum ada
7	PP Al Falah	Pertanian dan Perikanan	Belum ada
8	PP Yasin	Pertanian dan Perikanan	Belum ada

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Provinsi

Nusa Tenggara Barat

Sekilas

tentang Ekonomi Syariah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan mayoritas penduduk Muslim sebanyak 97% memiliki potensi pengembangan ekonomi syariah yang cukup besar khususnya di sektor Pariwisata ramah Muslim. Sektor Pariwisata ramah Muslim di Provinsi NTB sudah mendunia dan menduduki peringkat nomor satu untuk tujuan wisata ramah Muslim oleh Global Muslim Travel Index 2019 serta pernah meraih penghargaan World Halal Travel Awards (WHTA) untuk kategori World Best Halal Tourism Destination pada tahun 2015 dan kategori World Best Halal Honeymoon Destination pada tahun 2016. Selain itu komitmen Pemerintah Daerah NTB dalam mengembangkan potensi ekonomi Syariah dapat dilihat dari kiprah NTB sebagai provinsi pertama yang mengeluarkan Peraturan Pariwisata ramah Muslim Daerah pada tahun 2016. Selain itu pada tahun 2018 proses konversi Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTB menjadi Bank NTB Syariah mendorong peningkatan inklusi keuangan Syariah di Provinsi NTB. Dengan adanya pembinaan dan pengembangan pelaku UMKM Halal yang ditopang oleh pembiayaan melalui bank Syariah dan juga koperasi simpan pinjam pembiayaan Syariah (KSPPS) serta penyelenggaraan kegiatan-kegiatan nasional dan internasional di sektor industri halal dan ekonomi kreatif, maka hal ini menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah provinsi NTB terhadap pengembangan ekonomi Syariah dari mulai dari hulu ke hilir.

Regulasi Tingkat Daerah
di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah

Peraturan Daerah terkait Keuangan Syariah	Perda No.8 Tahun 2018 Tentang Konversi Bank NTB menjadi PT Bank NTB Syariah
Peraturan Gubernur terkait Pariwisata Ramah Muslim	Perda NTB No.2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Ramah Muslim Pergub NTB No. 51 Tahun 2015 tentang Wisata ramah Muslim
Rencana / *Masterplan* / *Blueprint* Pengembangan Keuangan Syariah Daerah	Rencana Bisnis Bank PT Bank NTB Syariah Tahun 2020-2022 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT. Bank NTB Syariah Tahun 2020 -2024

Rencana Pemerintah Daerah
di Sektor Ekonomi Syariah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023 di Provinsi Nusa Tenggara Barat memfokuskan pada "Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman, Maju dan Sejahtera" dengan 6 misi utama yaitu:

- Misi 1: NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah
- Misi 2: NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi
- Misi 3: NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah
- Misi 4: NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
- Misi 5: NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi
- Misi 6: NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan

Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Inflasi		Tingkat Pengangguran		Tingkat Kemiskinan		Konsumsi RT		Konsumsi Pemerintah		Investasi		Ekspor		Impor	
2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
-4.46%	4.01%	3.16%	2.22%	3.72%	3.42%	14.63%	13.88%	2.19%	3.09%	1.03%	3.91%	5.19%	7.19%	-50.34%	-40.40%	25.23%	-19.52%

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NTB Tahun 2019-2023

RPJMD merupakan arah pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, dengan pertimbangan pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah di NTB pada khususnya. Penekanan dan skala prioritas pembangunan pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2016-2021 secara umum ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di tengah masyarakat. RPJMD Provinsi NTB disusun dengan keyakinan bahwa Provinsi NTB dapat berperan besar di kancah nasional dan internasional serta komitmen bahwa percepatan dan lompatan pembangunan harus terus diikhtiarkan untuk mewujudkan Provinsi NTB yang tertata rapi sebagai tempat hunian menyenangkan, dengan masyarakat yang berdaya saing, tangguh, dan berbudi luhur serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Program - Program Unggulan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi NTB 2019-2023

- Gemilang Infrastruktur Dan Tangguh Bencana
- Gemilang Birokrasi
- Gemilang Pendidikan dan Kesehatan
- Gemilang Lingkungan
- Gemilang Ekonomi, Pariwisata, Pertanian dan Industri
- Gemilang Pembangunan Sosial Budaya

Isu Strategis RPJMD Provinsi NTB 5 tahun ke depan

- NTB Daerah Rawan Bencana
- Mutu dan Daya Saing Luaran Pendidikan Belum Optimal
- Derajat Kesehatan Masyarakat Relatif Rendah
- Tingkat Kemiskinan Masih di Atas Rata-Rata Nasional

	▪ Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Belum Berjalan Optimal ▪ Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan dan Ketahanan Keluarga Belum Optimal ▪ Pertumbuhan Ekonomi Relatif Stagnan ▪ Industrialisasi Produk Unggulan Daerah Belum Optimal ▪ Belum Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Damai Secara Optimal ▪ Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan Belum Optimal ▪ Penataan Ruang, Konektivitas, dan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Belum Optimal

Rencana Pembangunan Ekonomi Syariah di Provinsi NTB

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023 di Provinsi NTB bertujuan sebagai berikut:

- Terwujudnya KetangguhanMenghadapi Resiko Bencana
- Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur untuk Pengembangan Sektor Unggulan
- Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Bebas KKN dan Akuntabel
- Terwujudnya Masyarakat NTB yang Berdaya Saing
- Meningkatnya Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup
- Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
- Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Alam
- Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani

Sektor Pariwisata Ramah Muslim	Sektor Makanan dan Produk Halal
▪ Pengembangan Desa Wisata ramah Muslim sehingga dapat mengintegrasikan potensi dalam hal pembinaan produk-produk UMKM diantaranya aneka kain tenun-songket, busana Muslim berbahan tenun-songket, perhiasan mutiara hasil budi daya lokal, dan makanan oleh-oleh khas NTB ▪ Mengembangkan daerah wisata di NTB dengan memenuhi standar wisata ramah Muslim	▪ Mendorong dan membantu pelaku-pelaku UMKM di Provinsi NTB dengan melakukan bimbingan untuk mendapat sertifikat halal
Sektor Fesyen Muslim	**Sektor Keuangan Syariah (Komersial & Sosial)**
▪ Mendorong pengembangan dan pemberdayaan pelaku industri kreatif sperti pelaku fesyen Muslim. Optimalisasi penggunaan teknologi, peningkatan daya saing produk fesyen Muslim di Provinsi NTB agar mampu bersaing dengan pasar domestik dan pasar luar negeri	▪ Mendorong peranan koperasi khususnya Koperasi Syariah/BMT dalam mendukung program pemerintah Provinsi NTB untuk membantu Usaha Mikro dan Kecil seperti pedagang-pedagang kecil yang selama ini terjerat pinjaman ke rentenir dengan berbunga tinggi

Program Pemerintah Daerah
di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah

Sektor Industri Halal

Program Pemerintah Provinsi NTB

Sektor industri halal unggulan yang akan diprioritaskan pengembangannya adalah sektor pariwisata, dan ekonomi kreatif seperti fesyen Muslim dan kuliner.

Program Pendukung Sektor Industri Halal

Makanan dan Minuman halal	▪ Fasilitasi halal bagi IKM. Fasilitasi halal dalam pemasaran produk tetap dilaksanakan guna memacu IKM agar tetap eksis dan terus berkembang. Untuk itu syarat sertifikasi halal adalah hal wajib yang dimiliki oleh IKM NTB.
Fesyen Muslim	▪ Selain permasalahan warna tenun, corak dan motif juga masih menjadi monoton dikalangan IKM, sehingga perlu diberikan pelatihan desain guna meningkatkan wawasan IKM dalam bersaing di pasar.
Pariwisata ramah Muslim	▪ Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata ▪ Program Pengembangan Destinasi Pariwisata ▪ Program Pengembangan Kemitraan ▪ Program Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata ▪ Program Penataan Geopark

Jumlah Kegiatan Syariah/Halal

	Jumlah Kegiatan Produk Daerah	Jumlah Kegiatan Produk Halal/Syariah/Islami
Makanan dan Minuman	1	1
Fesyen	1	1
Pariwisata	16	1

Sentra Sektor Industri Halal

Makanan dan Minuman Halal	Fesyen Muslim
Belum ada	Sentra kerajinan tenun di Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, dan Kab/Kota Bima

Penetapan Daerah Pariwisata Ramah Muslim

Tahap	Daftar Desa/Kabupaten/Kota Wisata Ramah Muslim
Sudah ada	Kota Mataram - Islamic Center
Dalam tahap perencanaan	Sumbawa – Samota, Kota Bima dan Lombok Timur - Sembalun

Program Pendorong Pariwisata Ramah Muslim

Program pemerintah daerah dalam mendorong industri Pariwisata ramah Muslim yaitu program "NTB Wisata ramah Muslim Kelas Dunia" dengan mengembangkan potensi daerah-daerah wisata di NTB seperti Lombok, Sembalun, Mandalika dan sebagainya dengan didasarkan pada potensi lokasi dan permintaan pasar akan aspek-aspek sesuai kriteria pariwisata ramah Muslim. Selain itu beberapa program pendukung terkait sektor pariwisata ramah Muslim di NTB di antaranya:

- Sertifikai tour guide dan tour planner berbahasa Arab *(hospitality)*
- Sertifikasi restoran hotel
- Pelatihan auditor MUI
- Pelatihan pariwisata ramah Muslim bagi industri pariwisata
- Edukasi sadar wisata ramah Muslim pada masyarakat
- Sertifikasi BPW
- Sertifikasi rumah makan, restoran non hotel
- Sertfikasi ketering
- GMTI melakukan lomba NTB-Halal Tourism Award bagi Industri Pariwisata
- Khazanah Ramadhan dan *kegiatan* lainnya
- Pengembangan kawasan *halal tourism*
- Pembuatan dan pengembangan *website halal tourism*
- Promosi halal tourism dengan BAS Model.

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pendukung Sektor Halal

- Mengikutsertakan UMKM binaan dalam seleksi memasuki platform IKRA (Industri Kreatif Syariah Indonesia)
- Melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) kami memberikan bantuan kepada beberapa Desa Wisata termasuk Desa Wisata Religi yaitu Desa Wisata ramah Muslim Setanggor, Lombok Tengah.
- Melalui Program Wirausaha Unggulan Bank Indonesia (WUBI) berhasil menghasilkan wirausaha yang unggul dari berbagai sektor termasuk makanan/minuman halal, kosmetik halal
- Melalui program *NTB Goes to Moeslem Fashion Industri*, kami melakukan pembinaan kepada pelaku industri fesyen a.l. pengrajin tenun, penjahit, desainer, sampai model. Tujuan program tersebut adalah NTB mampu memiliki produk busana Muslim brand NTB yang kompetitif dengan bahan baku lokal (tenun)
- Melalui program Klaster Gula Aren kami membina UMKM syariah antara lain dari sisi aspek pengemasan, pengolahan, dan pemasaran

Sektor UMKM dan Ekonomi Pesantren

Program Pemerintah Provinsi NTB

Program Kemitraan UMKM dan Pengusaha Besar

Tahap	Daftar Program Kemitraan di peringkat Desa/Kabupaten/Kota
Sudah ada	▪ Pendampingan Diklat KUMKM (510 KUMKM terkait pengelolaan KUMKM, 450 KUMKM terkait Kewirausahaan) ▪ Pendamping PLUT (8 orang) ▪ Fasilitasi pendamping koperasi syariah (12 orang) ▪ Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM dalam hal pembiayaan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah (standarisasi usaha dan jaminan sistem halal olahan makanan minuman
Tahap Perencanaan	▪ Pengelolaan produk hasil Usaha Kecil dan Menengah (CV. Al. Ansar Bina Malaysia) ▪ Pemberdayaan produk Usaha Kecil dan Menengah dalam industri pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat. ▪ Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB ▪ Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) NTB Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB

Program Pemberdayaan UMKM

Sektor	Daftar Program Pendampingan
Makanan dan minuman halal Fesyen Muslim Pariwisata ramah Muslim	▪ Program pemberdayakan UKM/IKM di NTB melalui program bantuan JPS Gemilang pada masa pandemi Covid-19 ▪ Pemberdayaan UMKM melalui fasiltas pembiayaan modal kepada pelaku sektor makanan dan minuman halal, fesyen Muslim dan pariwisata ramah Muslim menggunakan Bank Daerah yaitu Bank NTB Syariah ▪ Melakukan pendampingan wirausaha UMKM baru melalui pembentukan Kader Penggerak Wirausaha Usaha Baru, pembentukan Koordinator Kader Penggerak WUB, memberikan pelatihan di bidang otomotif, tata boga, tata rias, konveksi, PUD dan pemberian bantuan peralatan kepada wirausaha baru

Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	2017	2018	2019
IKM mendapat pendampingan	-	-	440
IKM mendapat pendampingan sertifikasi halal	-	-	125
UMKM mendapat pendampingan	92	38	42

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Ekonomi Pesantren

Jumlah Pesantren yang dikembangkan BI	Program Pengembangan Ekonomi (*Lampiran*)
4	4
▪ Ponpes Nurul Haramain ▪ Ponpes Nurul Bayan ▪ Ponpes Darunnahdlatain NW Pancor ▪ Ponpes Al Kautsar Al Gontory, Aik Nyambuk	▪ Program Ekonomi Silaturahmi, yaitu upaya pondok untuk mendidik santri berwirausaha dengan cara mengambil hikmah dari bersilaturahmi. Contoh: Ponpes menerapkan kegiatan berbagi produk Haramain Bakery kepada jamaah sholat Jumat di beberapa masjid sebagai salah satu upaya bersilaturahmi dengan sesama Muslim sekaligus untuk promosi produk, dan masih banyak implementasi lainnya. Selain itu sektor produksi pertanian/peternakan juga akan dikembangkan di Ponpes Nurul Haramain ▪ Program pengembangan Integrated Farming (IF). Ketahanan pangan menjadi salah satu konsen bagi pondok pesantren. Melalui program IF maka ponpes dapat memaksimalkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan produksi yang maksimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan ▪ Program pengembangan usaha *bakery* (toko roti), dengan jumlah santri yang sangat banyak mencapai lebih dari 20,000 jiwa, maka prospek usaha ini sangat menjanjikan. ▪ Program Forum Bisnis Pesantren. Sebagai salah satu implementasi program pembentukan holding bisnis pesantren, maka dibentuk forum bisnis pesantren yang berfungsi sebagai wadah alumni ponpes yang berwirausaha/masyarakat untuk saling bersinergi mengembangkan usaha yang sesuai Syariah

Sektor Keuangan Syariah

Program Otoritas Jasa Keuangan (Provinsi)

Sub-sektor	Detil Program
Perbankan Syariah	Berdasarkan program transformasi yang dirumuskan oleh PT Bank NTB Syariah periode 2020 s.d. 2022, terdapat beberapa inisiatif strategis dalam rangka perkembangan usaha di wilayah Nusa Tenggara Barat, antara lain namun tidak terbatas pada: ▪ Optimalisasi *corporate culture* dan *engagement* pegawai terkait dengan kaidah dan prinsip syariah. ▪ Diversifikasi produk dan jawa bank sesuai dengan kebutuhan nasabah, antara lain pengembangan produk deposito mudharabah muqayyadah dan segmentasi produk DPK sesuai karakteristik nasabah. ▪ Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi "*sharia lifestyle*" melalui *tagline* "Ayo Kembali ke PT Bank NTB Syariah, Insya Allah berkah" ▪ Pengembangan infrastuktur Teknologi Informasi (TI) baik eksternal maupun internal, antara lain pengembangan pembayaran *e-commerce* dan *travel* daring berbasis syariah.

Sub-sektor	Detil Program
	▪ Perluasan jaringan kantor dan *e-channel* bank agar dapat menjangkau masyarakat yang berada di wilayah yang terkategori "*remote area*" sehingga perlu dilakukan monitoring dan koordinasi secara berkala terkait dengan perkembangan program transformasi yang diimplementasi oleh pihak bank yang dimaksud.
IKNB Syariah	Melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait dengan industri keuangan non bank syariah, bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan/atau industri keuangan non-bank syariah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Sektor Keuangan Syariah

- Pendampingan proses konversi Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah
- Program sosialisasi QRIS dengan BSM
- Mendorong dan mendampingi Bank NTB Syariah dalam program non tunai pemerintah daerah
- Memfasilitasi Bank NTB Syariah terkait perizinan QRIS
- Melibatkan seluruh perbankan syariah dalam kegiatan seminar wakaf nasional terkait pemanfaatan wakaf tunai yang diselenggarakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB
- Mendorong dan mendampingi Bank NTB Syariah dalam program non tunai pemerintah daerah
- Kerja sama pengelolaan kas titipan Bank Indonesia di Kab. Sumbawa dan Kota Bima
- Melibatkan Bank NTB Syariah dalam festival syariah untuk kawasan Indonesia Timur
- Melaksanakan pelatihan *integrated eco-farming* kepada peternak bersama Bank NTB Syariah

Sektor Keuangan Mikro Syariah

Program Pemerintah Provinsi NTB

Program Pendampingan, Pengawasan, dan Pengembangan Koperasi Syariah (KSPPS)

Program	Institusi Keuangan Mikro Syariah
Peningkatan dan Pengembangan Koperasi Syariah untuk Kawasan Bebas Riba	Pemberdayaan Koperasi Syariah/BMT dilakukan melalui pengintegrasian 3 pokok: ▪ Penguatan karakter pengurus, pengelola, pengawas dan anggota ▪ Penguatan usaha anggota (melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kualitas produk dan pemasaran) ▪ Penguatan akses financial koperasi dan anggota (melalui pengembangan pinjaman atau qardhul hasan), pembiayaan, simpanan dan dana sosial ekonomi (ZIS) dan wakaf dimitrakan dengan BAZNAS setempat) di samping dana halal lainnya.
Pengelolaan, Pendampingan dan Penumbuhan KSP/USP pola syariah	▪ Program rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi ▪ Pengelolaan mal untuk KSP/USP dengan pola syariah Kabupaten/Kota ▪ Pembiayaan pendamping Syariah. ▪ Temu kemitraan antara dinas Koperasi Prov/Kab/Kota se-NTB dengan BAZNAS dan Koperasi Simpan Pinjam Syariah/BMT ▪ Koordinasi penguatan peran PerKopsah (persatuan koperasi Syariah) dan IAEI dalam rangka pengembangan KSP/USP Pola Syariah ▪ Penumbuhan pengembangan wirausaha tanpa riba dengan KSP/USP pola syariah ▪ Pembentukan ADRT dari pola konvensional ke pola syariah

Program Pendampingan, Pengawasan, dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) oleh Pemerintah Provinsi NTB

- Bintek Pengawasan Bagi Calon Pengawas Syariah Kab/Kota Se NTB
- Bimtek Pengembangan SDI Pengurus dan Pengelola KSPPS/USPPS Koperasi
- Sosialisasi Kawasan Bebas Riba pada Perkopsyah di 10 Kab/Kota di Provinsi NTB
- Fasilitasi Pembuatan Akte Notaris Kopsyah

Program Otoritas Jasa Keuangan (Provinsi)

Program Pendampingan, Pengawasan, dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Bank Wakaf Mikro (BWM)

- Melakukan pendampingan langsung ke Bank Wakaf Mikro terkait penyusunan laporan keuangan
- Pendampingan langsung ke Bank Wakaf Mikro terkait penyusunan laporan keuangan tahun 2019
- Pembukaan stan Bank Wakaf Mikro pada kegiatan "Pasar Keuangan Rakyat Nusa Tenggara Barat tahun 2019"
- Pameran/*booth* produk nasabah Bank Wakaf Mikro pada kegiatan "Silahturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro tahun 2019"
- Melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait dengan Bank Wakaf Mikro termasuk pemanfaatan mobil SIMOLEK OJK oleh Bank Wakaf Mikro
- Pameran/*booth* produk nasabah Bank Wakaf Mikro pada "Peresmian Bank Wakaf Mikro tahun 2020"
- Bantuan Operasional dari OJK kepada Pondok Pesantren Al-Manshuriyah Kab. Lombok Tengah yang merupakan Ponpes yang menaungi Bank Wakaf Mikro

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Keuangan Mikro Syariah

- Mendorong beberapa pesantren untuk membentuk koperasi syariah dalam rangka pembentukan holding bisnis pesantren
- Mengundang koperasi syariah/lembaga keuangan mikro syariah dalam berbagai seminar terkait ekonomi dan keuangan syariah, contohnya seminar nasional wakaf

Sektor Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Program BAZNAS Provinsi NTB

Kategori Program ZIS dan Alokasi BAZNAS Provinsi NTB

Kategori	Tahun 2018	Tahun 2019
Sosial Kemanusiaan	25,640,502,833	21,139,597,137
Pendidikan	10,017,457,117	9,571,332,475
Kesehatan	8,092,799,800	5,636,573,935
Pemberdayaan Ekonomi	8,323,208,081	11,507,225,112
Dakwah	14,049,053,457	12,681,429,774

Program BAZNAS Provinsi NTB dalam Mengatasi Permasalahan Pandemi Covid-19

Nama Program	Mekanisme Penyaluran Bantuan	Alokasi Penyaluran (Rp)	Tipe Penerima Bantuan/Manfaat	Dampak yang terjadi penerima bantuan
10,000 Masker	Memberikan bantuan berupa masker standar COVID-19 yang berasal dari UMKM di Lombok utamanya dari UMKM binaan Baznas Provinsi NTB	10,000 masker senilai Rp 60,000,000	Seluruh masyarakat yang tidak memakai masker	Masyarakat menggunakan masker
Hand Sanitizer	Memberikan bantuan *hand sanitizer* kepada masyarakat NTB yang membutuhkan utamanya fakir miskin	350 orang senilai Rp 5,347,000	Fakir miskin dan petugas medis	Masyarakat sadar petingnya *hand sanitizer* dan mendapatkan bantuan secara gratis
Paket Logistik Keluarga	Memberikan bantuan berupa paket kebutuhan pokok kepada mustahik yang membutuhkan dengan nilai perpaketnya Rp 200,000	1,500 paket senilai Rp 285,000,000	Fakir dan miskin	Memperoleh bantuan berupa kebutuhan pokok untuk jangka waktu 2 minggu
APD untuk Paramedis	Bantuan berupa 1 set APD *reusable* yang diperuntukan untuk petugas medis	10 paket senilai Rp 3,194,000	Paramedis	Memperoleh bantuan berupa APD yang dapat dicuci Kembali
Penyemprotan Disinfektan	Penyemprotan disinfektan ke berbagai lokasi berkerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi NTB	2,609 orang di 46 Lokasi senilai Rp 34,692,500	Seluruh masyarakat NTB	Penyemprotan disinfektan secara gratis kepada masyarakat
Mustahik Konsumtif (Bantuan Langsung Tunai)	Bantuan diberikan berupa bantuan uang senilai Rp 150,000 setiap masing-masing penerima	1,935 orang senilai Rp 290,250,000	Fakir miskin	Memberikan bantuan berupa Bantuan Tunai Langsung kepada mustahik
Bantuan Marbot	Bantuan berupa uang tunai diberikan kepada marbot senilai Rp 750,000	266 orang senilai Rp 299,500,000	Marbot yang masuk dalam fisabilillah	Diberikan bantuan berupa uang tunai untuk kebutuhan pokoknya selama masa pandemi
Bantuan Untuk Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (TOGATOMA)	Bantuan yang diberikan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat berupa uang tunai senilai R p 1,000,000	200 Tuan Guru senilai Rp. 200,000,000	Tuan Guru se pulau Lombok	Mendapatkan bantuan langsung tunai kepada Tuan Guru

Nama Program	Mekanisme Penyaluran Bantuan	Alokasi Penyaluran (Rp)	Tipe Penerima Bantuan/Manfaat	Dampak yang terjadi penerima bantuan
Bantuan untuk Pegawai Tidak Tetap	Bantuan berupa uang tunai kepada PTT (tukang sapu, tukang jaga malam, satpam, pramusaji) yang ada di lingkungan UPZ Baznas Provinsi NTB dengan masing masing mendapatkan bantuan Rp 200,000	2,900 Orang senilai Rp 580,000,000	Fakir miskin PTT yang tidak mendapatkan tunjangan dari intansi	Mendapatkan bantuan berupa unag tunai senilai Rp 200,000
Paket Sembako untuk Yatim	Bantuan berupa paket sembako senilai Rp 150,000 bekerja sama dengan LKKS Provinsi NTB	1,000 orang senilai Rp 150,000	Anak anak yatim yang tergolong fakir miskin	Diberikan bantuan berupa paket sembako senilai 150,000

Gambaran
Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah

Sektor Industri Halal

Jumlah Usaha/ Merk dengan Sertifikat Halal pada Sektor Makanan dan Minuman (Mamin)

Sektor Usaha/Brand (Tahun 2018)		Sektor Usaha/Brand (Tahun 2019)	
Roti	20	Roti	20
Katering dan Restoran	93	Katering dan Restoran	93
Tepung, Kanji, and produk turunan/olahan	Belum ada	Tepung, Kanji, and produk turunan/olahan	Belum ada
Es, es krim, dan bahan-bahan pendukung	2	Es, es krim, dan bahan-bahan pendukung	2
Susu dan produk olahan/turunan susu	6	Susu dan produk olahan/turunan susu	6
Makanan olahan, daging dan unggas	13	Makanan olahan, daging dan unggas	13
Makanan olahan ikan	24	Makanan olahan ikan	24
Makanan olahan telur	3	Makanan olahan telur	3
Makanan ringan	21	Makanan ringan	22
Pemanis, bumbu dapur, bumbu penyedap/ pelengkap	13	Pemanis, bumbu dapur, bumbu penyedap/ pelengkap	13
Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	4	Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	4
Semua Usaha Tersertifikasi Halal	199	Semua Usaha Tersertifikasi Halal	200

Sumber: Daftar Belanja Produk Halal LPPOM MUI hingga periode Maret-April-Mei 2019

Kontribusi Sektor Mamin terhadap Perekonomian Provinsi NTB

	2018	2017	2016	2015	2014
PDRB (Milliar Rupiah)					
Mamin olahan	2,663.43	2,528.68	2,289.21	1,966.61	1,758.71
Mamin olahan, Base = 2010	2,190.7	2,135.04	1,986.03	1,817	1,719.99
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb)	1,026.15	961.15	864.55	759.91	675.59
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb), Base = 2010	656.96	627.6	579.17	526.4	490.81
Pertumbuhan PDRB (%)					
Mamin olahan, Base = 2010	2.61	7.5	9.3	5.64	6.01
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb), Base = 2010	4.68	8.36	10.03	7.25	6.04
Kontribusi pada PDRB (%)					
Mamin olahan	2.15	2.04	1.97	1.86	2.15
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb)	0.8	0.78	0.74	0.72	0.83

Total Produksi Daging Daerah (Tahun 2018)

Populasi Ternak		Produksi Daging Ternak (ton)	
Sapi Potong	1,183,570	Sapi	5,447.37
Sapi Perah	Belum ada	Sapi Impor	Belum ada
Kerbau	83,458	Kerbau	942.18
Kuda	47,738	Kuda	109.36
Kambing	675,852	Kambing	269.67
Domba	26,713	Domba	0.93
Populasi Unggas		**Produksi Daging Unggas (ton)**	
Ayam Kampung	8,155,768	Ayam Kampung	11,049.04
Ayam Petelur	1,142,076	Ayam Petelur	1,085.76
Ayam Broiler	27,127,512	Ayam Broiler	29,477.84
Bebek	1,110,870	Bebek	1,083.48

Skor Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) Tahun 2018 Provinsi NTB

Akses	63
Komunikasi	76
Lingkungan	80
Jasa	50
Skor IMTI	**70**

Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah Provinsi NTB

	2018	2017	2016	2015	2014
PDRB (Milliar Rupiah)					
Jasa akomodasi	1,634.08	1,786.34	1,638.88	1,446.96	1,269.62
Jasa akomodasi, Base = 2010	924.73	1,030.21	966.27	877.36	837.83
Pertumbuhan PDRB (%)					
Jasa akomodasi, Base = 2010	-10.2	6.62	10.13	4.72	7.45
Kontribusi pada PDRB (%)					
Jasa akomodasi	1.32	1.44	1.41	1.37	1.56
Jumlah turis					
Turis domestik	1,607,823	-	-	-	-
Turis mancanegara	1,204,556	-	-	-	-

Rating untuk Pariwisata Ramah Muslim di Provinsi NTB

Skor	Aspek		Skor	Aspek	
Skor Akses	Udara	5	Skor Lingkungan	Kedatangan Turis Muslim	5
	Kereta	1		Jangkauan Wi-Fi	4
	Laut	5		Komitmen terhadap Pariwisata Ramah Muslim	5
	Infrastruktur Jalan	4			
Skor Komunikasi	Panduan Pelancong Muslim	5	Skor Jasa	Restoran Halal	5
	Edukasi Pemangku Kepentingan	4		Masjid	5
	Jangkauan Pasar	5		Bandara	5
	Pemandu Tur	5		Hotel	4
	Pemasaran Digital	5		Atraksi	5
			Skor Total		77
			Rata-rata Skor		4.81

NB: data lengkap bisa didapatkan di dalam Laporan Perkembangan Pariwisata Ramah Muslim Daerah 2019-2020

Indikator Pariwisata Ramah Muslim Provinsi NTB

Indikator	Skor/Nilai	Keterangan
Akses	Cukup baik	Terdapat akses udara, akses laut dan kondisi jalan yang baik, tapi belum memiliki akses/jalur kereta api
Akses Udara	Baik	Terdapat bandara internasional dan domestik
Bandara International	1	
Bandara Domestik	2	
Akses Laut	Baik	Terdapat pelabuhan
Terminal Kapal Pesiar	1	
Infrastruktur Jalan	Baik	Mayoritas kondisi jalan dalam kondisi baik
Jalan Nasional/Negara	934.55	km
Jalan Provinsi	1,484.44 km	km
Komunikasi	Baik	Memiliki panduan pengunjung, edukasi untuk pemangku kepentingan, kegiatan pendukung jangkauan pasar, pemandu tur, dan melakukan pemasaran digital
Panduan bagi Pelancong Muslim	Ada	Hanya terdapat buku panduan dalam Bahasa Inggris
Eksemplar Bahasa Inggris	40,000	Terdapat 2 jenis eksemplar
Eksemplar Bahasa Arab	20,000	
Edukasi Pemangku Kepentingan	Baik	Terdapat workshop pariwisata ramah Muslim
Workshop	30	
Jangkauan Pasar	Baik	Terdapat beberapa kegiatan terkait pariwisata ramah Muslim, terutama festival ramah Muslim
Konferensi/Kegiatan/Expo	5	Telah diselenggarakan 5 kali atau lebih, 2 di antaranya diselenggarakan pemangku kepentingan

Indikator	Skor/Nilai	Keterangan
Halal Travel Mart	1	Diselenggarakan setiap tahun
Brosur	4	Destinasi pariwisata, hasil kerajinan gerabah, tenuh khas Lombok, dan paket wisata. Dicetak dalam berbagai bahasa, termasuk Inggris dan Arab. Sudah dipublikasikan sebanyak kurang lebih 500 kali
Pameran	3	Pameran parwisata dalam dan luar negeri, pameran pembangunan NTB, pameran kegiatan internasional di NTB yang kurang lebih ada 50 kegiatan
Pemandu Tur	Baik	Terdapat pemandu tur yang menguasai Bahasa Arab dan Bahasa Inggris
Bahasa Arab	60	
Bahasa Inggris	595	
Pemasaran Digital	Baik	Terdapat beberapa platform digital marketing lainnya
Aplikasi	2	Google apps
Website	9	Web promosi wisata ramah Muslim
Media Sosial	Ada	Google Plus, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube
Lingkungan	Baik	Lombok kedatangan banyak wisatawan domestik dan mancanegara. Jaringan wifi-nya pun memadai. Lombok sangat berkomitmen untuk mengembangkan pariwisata ramah Muslim
Kedatangan Turis	Baik	Terdapat wisatawan domestik dan mancanegara
Wisatawan Domestik	1,607,823	Data tidak tersedia
Wisatawan Mancanegara	1,204,556	59% nya Muslim
Jangkauan Wifi	Baik	Wi-fi di area bandara sangat memadai dan memiliki akses di semua lini
Komitmen terhadap Pariwisata ramah Muslim	Baik	Setiap pemangku kepentingan industri pariwisata harus menyiapkan fasilitas dan sarana pariwisata ramah Muslim (Perda NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Ramah Muslim)
Jasa	Baik	Sebagian besar kebutuhan industri pariwisata ramah Muslim dan hal-hal yang fundamental seperti restoran halal, masjid, bandara, hotel, dan atraksi sudah dimiliki dengan kualitas yang baik
Restoran Halal	Baik	Restoran dan outlet bersertifikasi halal sudah banyak walaupun masih ada yang *self-claimed*
Restoran bersertifikat halal	316	
Outlet bersertifikat halal	13	
Restoran/Rumah makan halal (*self-claimed*)	1,206	
Masjid	Baik	Terdapat banyak masjid dan mushala
Masjid	50	
Mushala	29	Biasanya terdapat di Destinasi Daya Tarik Wisata Unggulan

Indikator	Skor/Nilai	Keterangan
Bandara	Baik	
Mushala	4	3 mushala di area transit, 1 mushala di area umum
Tempat Wudhu	6	3 di area transit, 3 di area umum
Shalat Jumat	Ada	
Hotel	Baik	Sudah ada hotel dengan dapur bersertifikat halal dan hotel yang tidak menyediakan menu babi dan alkohol
Hotel Syariah	Ada	Data tidak tersedia
Hotel dengan dapur bersertifikat halal	10	
Hotel yang tidak menyediakan alkohol	255	Data tidak tersedia
Atraksi	Baik	Banyak destinasi dengan akses mudah dan restoran bersertifikasi halal, dilengkapi dengan toilet dan mushala yang bersih
Situs budaya Islami	1	
Daya tarik wisata budaya	19	
Daya tarik lokal	206	

Sektor Keuangan Syariah

Indeks Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah

Indeks	Tahun 2016	Tahun 2019
Indeks literasi keuangan Syariah (OJK)	5.1%	22%
Indeks inklusi keuangan Syariah (OJK)	8.4%	16.2%
Indeks literasi ekonomi Syariah (BI)	-	18.4%

Profil Keuangan BPD Syariah – Bank NTB Syariah (*Milliar Rupiah*)

	2015	2016	2017	2018	2019
Total aset gross	506	670	1,397	7,039	8,640
Total pembiayaan	304	430	1,066	4,869	5,582
Total DPK	258	413	591	4,921	6,816
Total FDR	177.62%	103.95%	180.42%	98.93%	81.89%
Total NPF	1.33%	1.06%	0.55%	1.63%	1.36%

Profil Industri Perbankan Syariah (BUS) di Provinsi NTB (*Miliar Rupiah*)

	2018	2019
Pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan		
Modal kerja (UMKM)	983	1,056
Modal kerja (bukan UMKM)	6	111
Investasi (UMKM)	482	404
Investasi (bukan UMKM)	21	52
Konsumsi	5,523	6,603
NPF berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	74	57
Investasi (UMKM)	17	16
Konsumsi	47	55

Total		
Total aset gross	10,877	13,433
Total pembiayaan	7,015	8,227
Total DPK	6,154	8,171
Total FDR	114%	100.68%
Total NPF	138	128
Total NPF (%)	2%	1.6%

Profil industri perbankan Syariah (UUS) di Provinsi NTB (*Miliar Rupiah*)

	2018	2019
Pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan		
Modal kerja (UMKM)	38	32
Modal kerja (bukan UMKM)	6	3
Investasi (UMKM)	1	Beum ada
Investasi (bukan UMKM)	1	Belum ada
Konsumsi	85	133
NPF berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (bukan UMKM)	1	1
Total		
Total aset gross	187	262
Total pembiayaan	131	168
Total DPK	88	115
Total FDR	149.58%	146.03%
Total NPF	1	1
Total NPF (%)	0.6%	0.6%

Sektor Keuangan Mikro Syariah

Jumlah LKMS dan BWM yang Mendapatkan Program Pendampingan dan Pengawasan dari OJK

LKMS	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah yang mendapat pendampingan OJK	-	-	1
Jumlah yang mendapat pengawasan OJK	-	-	1

Profil Fundamental LKMS dan BWM di Bawah Pengawasan OJK

LKMS dan BWM	Tahun 2019
Jumlah IKMS yang berada di wilayah daerah	1
Jumlah anggota LKMS	20
Jumlah pegawai LKMS	355
Modal sendiri (*dalam juta Rupiah)*	3
Sisa Hasil Usaha (SHU) (*dalam Rupiah)*	3 Juta
Total aset (*dalam Rupiah)*	4.2 Miliar

Jumlah IKMS yang Mendapatkan Program Pendampingan dan Pengawasan dari Pemerintah Provinsi NTB

IKMS	2017	2018	2019
Jumlah yang mendapat pendampingan	92	38	42
Jumlah yang diawasi oleh Dinas (pengawasan yang dimaksud adalah pengecekan laporan RAT, kunjungan ke IKMS, dsb.)	21	23	25

Profil Fundamental IKMS di bawah Pengawasan Pemerintah Provinsi NTB

IKMS (KSPPS/USPPS, BMT, Kopontren, dll)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah IKMS yang berada di wilayah kerja	33	50	72
Jumlah Anggota IKMS	8,761	13,275	14,426
Jumlah Pegawai IKMS	231	350	504
Jumlah Pegawai yang mempunyai serifikasi pengelola KSPPS (IKMS)	-	-	-
Modal sendiri (*dalam Rupiah)*	8.4 Miliar	12.8 Miliar	25.5 Miliar
Modal luar/pinjaman (*dalam Rupiah)*	6.5 Miliar	9.9 Miliar	14.2 Miiar
Cadangan koperasi/permodalan	Belum ada	Belum ada	Belum ada
Volume usaha (*dalam Rupiah)*	10.6 Miliar	16.2 Miliar	233.4 Miliar
Sisa hasil usaha (SHU)	776.4 Juta	1.1 Miliar	1.6 Miliar
Total aset (*dalam Rupiah)*	51.5 Miliar	56.4 Miliar	61.3 Miliar
Rata-rata pembiayaan IKMS (*dalam Rupiah)*	0 < n <= 5 jt 0% 5 jt < n <= 10 jt 0% 10 jt < n <= 20 jt 100% 20 jt < n <= 50 jt 0% > 50 jt 0%	0 < n <= 5 jt 0% 5 jt < n <= 10 jt 0% 10 jt < n <= 20 jt 100% 20 jt < n <= 50 jt 0% > 50 jt 0%	0 < n <= 5 jt 0% 5 jt < n <= 10 jt 100% 10 jt < n <= 20 jt 100% 20 jt < n <= 50 jt 0% > 50 jt 0%
Tingkat kesehatan	Sehat: 15 Cukup Sehat: 16 Dalam pengawasan: 1 Dalam pengawasan khusus: 1	Sehat: 27 Cukup Sehat: 19 Dalam pengawasan: 4 Dalam pengawasan khusus: 1	Sehat: 30 Cukup Sehat: 35 Dalam pengawasan: 8 Dalam pengawasan khusus: Belum ada

Sektor Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Daftar BAZNAS dan LAZ Aktif Rekomendasi Baznas

9 BAZNAS dan 4 LAZ aktif (Rekomendasi BAZNAS)	Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kota Bima serta LAZ Dompet Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI), LAZ Rumah Yatim, LAZ Baitul Maal LAZ Hidayatullah, LAZ Nahdatul Ulama

Alokasi APBD/Hibah Pemerintah Daerah kepada Institusi Pengelola Zakat yang Resmi

Daftar Alokasi APBD/Hibah	Nominal Alokasi (Rp)
APBD/Hibah 2017	Rp.1,500,000,000
APBD/Hibah 2018	Rp.1,250,000,000
APBD/Hibah 2019	Rp.1,000,000,000

Jumlah Penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (*dalam Rupiah*)

Jenis Dana	Tahun 2018	Tahun 2019
Penghimpunan Zakat		
▪ Zakat Fitrah	8,638,873,121	5,775,333,440
▪ Zakat Maal/Harta	58,557,256,490	59,502,661,196
Penghimpunan Infak		
▪ Infak Bebas	Rp.8,380,084,830	Rp.9,968,321,907
▪ Infak Terikat (termasuk CSR dan kurban)	Rp.901,624,781	Rp.6,906,915,768

Jumlah Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (*dalam Rupiah*)

Jenis Dana	Tahun 2018	Tahun 2019
Penyaluran Zakat	Rp.8,638,873,121	Rp.5,775,333,440
Penyaluran Infak	Rp.49,454,420,251	Rp.51,179,931,274
▪ Infak Bebas	Rp. 8,380,084,830	
▪ Infak Terikat (termasuk CSR dan kurban)	Rp.901,624,781	Rp.6,906,915,768
Jumlah Penerima Manfaat Tercatat	172,404 Orang	147.751 Orang

Program Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah di Provinsi NTB

Bidang Program	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Sosial Kemanusiaan	25,640,502,833	21,139,597,137
Pendidikan	10,017,457,117	9,571,332,475
Kesehatan	8,092,799,800	5,636,573,935
Pemberdayaan Ekonomi	8,323,208,081	11,507,225,112
Dakwah	14,049,053,457	12,681,429,774

Indeks Zakat Nasional (IZN) Provinsi NTB

	2018	2019
Indeks Zakat Nasional/IZN (Dimensi Makro)		
Regulasi	0.25	1.00
Dukungan Finansial dari Pemerintah (APBN/APBD) untuk BAZNAS	1	0.69
Jumlah Resmi Lembaga Zakat/OPZ, muzakki, and mustahik	0.75	0.72
Rasio, Jumlah muzakki individual/jumlah rumah tangga di level Provinsi	0	0.67
Rasio, Jumlah dari muzakki institusi/jumlah institusi di level Provinsi	0	0.67
Database dari institusi/lembaga zakat yang terdaftar	025	0.68
Total Indeks Makro	**0.55**	**0.79**
Indeks Zakat Nasional/IZN (Dimensi Mikro)		
Penghimpunan	1	0.56
Pengelolaan	0.75	0.69
Penyaluran	1	0.97
Pelaporan	0.75	0.81
Indeks Kesejahteraan CIBEST	1	0.86
Modifikasi Indeks Pengembangan Manusia (HDI)	1	0.72
Kemandirian	0.75	0.63
Institutional	0.9	0.76
Dampak Zakat	0.95	0.76
Total Indeks Mikro	**0.93**	**0.76**

Indeks Skor Literasi dan Pemahaman Zakat Provinsi NTB

	2020
Indeks Literasi Zakat	63.50
Indeks Pemahaman Dasar tentang Zakat	69.99
Indeks Pemahaman Lanjutan tentang Zakat	51.44

Indeks Skor Literasi dan Pemahaman Wakaf Provinsi NTB

	2020
Indeks Literasi Wakaf	53.53
Indeks Pemahaman Dasar tentang Wakaf	62.67
Indeks Pemahaman Lanjutan tentang Wakaf	36.57

Sektor UMKM dan Ekonomi Pesantren

Jumlah pesantren dengan usaha-usaha syariah

4 Pondok Pesantren	6 Usaha-usaha Syariah (*detil di Lampiran*)

Sektor Pendidikan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Perguruan Tinggi yang Menyediakan Program Studi Ekonomi & Keuangan Syariah Terkait

Jenjang	Jumlah Universitas tahun 2019	Program Studi tahun 2019		2018		2019	
		Nama Program studi	Jumlah Program Studi	Jml. Dosen	Jml. Mahasiswa	Jml. Dosen	Jml. Mahasiswa
Sarjana	9	Ekonomi Syariah	7	52	3,862	52	1,992
		Hukum Ekonomi Syariah	5	36	3,464	36	1,580
		Pariwisata Syariah	1	7	288	7	278
		Perbankan Syariah	3	31	4,028	31	2,153
Magister	1	Ekonomi Syariah	1	8	-	8	-
Doktoral	-		-		-		-

Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi Ekonomi Syariah Terkait

Akreditasii	AkreditasiPerguruan Tinggi			AkreditasiProgram Studi		
	S1	S2	S3	S1	S2	S3
AkreditasiA	-	-	-	-	-	-
AkreditasiB	1	1	-	5	-	-
AkreditasiC	4	-	-	8	1	-
Belum TerAkreditasii	4	-	-	4	-	-

Peluang Investasi Daerah
untuk Industri Keuangan Syariah di Provinsi NTB

No.	Nama Proyek Investasi	Peluang Investasi	Sektor	Tahapan Proyek Investasi	Nilai Perkiraan Investasi (dalam Rupiah)
1	KEK Mandalika	a. Komplek Komersial b. Hotel Syariah c. Hotel Hutan Bakau d. Hotel Laguna e. Lapangan Golf Perbukitan f. Lapangan Golf Area Danau	a. Pariwisata b. Infrastruktur	Perencanaan	40 Triliun
2	Global Hub	a. Pembangunan Perkapalan b. Pelabuhan Internasional c. Bandara Eksklusif d. Empat terikatan Jalan: ▪ Jalan Utama ▪ Jalan antar Lingkungan ▪ Jalan Lingkar Lingkungan ▪ Perluasan Jalan e. LRT, Listrik, Konsep Penghijauan 1000 MW, Gas, Air 1,200 Liter/detik f. Manajemen Pengairan dan Sanitasi g. Telekomunikasi h. Pelatihan dan Pendidikan i. Perumahan	a. Maritim b.Infrastruktur c.Pariwisata d.ESDM	Perencanaan	135 Triliun
3	Geopark Rinjani	a. Hotel b. Pondokan c. Villa Pribadi d. Restaurant e. Perkemahan Mewah f. Tempat Perkemahan g. Kereta Gantung h. Wisata Agro i. Listrik j. Manajemen Air & Restaurant k. Telekomunikasi	a. Pariwisata b. Listrik	Perencanaan	Belum ada
4	Smelter	a. Pembuatan Tembaga, kabel, dll b. Pupuk c. Semen d. Industri krimar lainnya	Pertambangan	Sudah beroperasi	20 Triliun
5	Samota	a. Keramah Tamahan b. Desa Wisata c. Wisata Berburu	a. Pariwisata b. Perikanan	Perencanaan	Belum ada

No.	Nama Proyek Investasi	Peluang Investasi	Sektor	Tahapan Proyek Investasi	Nilai Perkiraan Investasi (dalam Rupiah)
		d. Tur Budaya e. Wisata Sejarah f. Wisata Geologi g. Wisata Bahari			
6	Sakosa	a. Makanan b. Akuakultur c. Industrial Produk d. Peternakan Hewan e. Indutri Agro f. Industri Kreatif g. Industri Pelayanan	Pariwisata	Perencanaan	Belum ada

Ekonomi Syariah Dan Kebijakan Politik Lokal Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag
Dr. Muh. Salahuddin, M.Ag
Dr. Muhamad Yusup, M.SI[25]

Prolog

Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia pada umumnya dilakukan dengan pendekatan *political will state support*. Intervensi pemerintah mutlak diperlukan untuk legalitas hukum pengembangan ekonomi syariah, tanpa adanya dukungan tersebut, gerakan pengembangan ekonomi syariah akan terhambat. Walau telah lama dicetuskan, namun tarik-ulur kepentingan yang sifatnya politis, terus membayangi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Eksistensi ekonomi syariah baru diakui secara nasional setelah terjadinya krisis moneter Tahun 1997.

Sukses ekonomi syariah ini kemudian ditindaklanjuti dengan penguatan legalitas atas eksistensi ekonomi syariah dengan diterbitkannya UU. No. 21 Tahun 1998 dan Perubahan UU. No. 10 Tahun 1992 tentang Perbankan. Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) yang dicanangkan oleh pemerintah pada masa SBY – JK juga menguatkan secara politis ekonomi syariah, yang ending-nya adalah diterbitkannya UU. No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Eksistensi pengembangan ekonomi syariah pada tingkat lokal pun difasilitasi oleh UU tentang Otonomi Daerah. Dalam undang-undang tersebut daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengidentifikasi potensi serta membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah tersebut.

Provinsi NTB merupakan salah satu provinsi yang berani mengambil sikap pro-aktif dalam pengembangan ekonomi syariah. Sikap pro-aktif tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan ekonomi syariah. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan instrument yang memungkinkan secara operasional realisasi praksis ekonomi syariah. Pro-kontra kebijakan politis di Provinsi NTB adalah bentuk "campur tangan pemerintah" untuk menguatkan ekonomi Syariah dan a *living system* dalam masyarakat.

Kebijakan Politis Ekonomi Syariah NTB

Fondasi ekonomi yang dibangun Provinsi NTB adalah menguatkan infrastruktur, menghidupkan aktivitas ekonomi kelas bawah dan mengurangi angka kemiskinan. Kesemuanya itu diselaraskan dengan tujuan pembangunan nasional dengan konsep Islam yang rahmatan lil-alamin. Latar belakang sosilogis masyarakat Muslim yang religius, Gubernur Provinsi NTB dengan segala resiko politis mengambil langkah untuk mewarnai aktivitas ekonomi Provinsi NTB dengan label syariah. Inilah yang membedakan Provinsi Aceh dengan Provinsi NTB terkait inisiasi konversi Bank Daerah menuju Bank Syariah. Di Provinsi Aceh, eksistensi Bank Syariah terbangun karena adanya ketetapan qanun Aceh, sementara di Provinsi NTB diinisiasi oleh kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan ekonomi syariah. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan Provinsi NTB terkait ekonomi syariah, diantaranya adalah:

[25] Dekan, WD I dan WD III FEBI UIN Mataram

- Peraturan Daerah No. 9 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat Infaq dan Sedekah. Lembaga zakat daerah pada awalnya adalah "penampungan" pensiunan pejabat pemerintah dengan kinerja yang rendah. Namun setelah adanya UU zakat tahun 2011, yang kemudian implementasinya diatur secara teknis lebih operasional dalam bentuk peran zakat bagi masyarakat. BAZNAS Provinsi NTB mereformasi banyak hal dalam internal kelembagaan; mulai dari identifikasi potensi zakat, memetakan potensi, bekerjasama dengan pihak terkait, penyaluran, pelaporan dan seterusnya. Khusus untuk penyaluran, dana zakat, lebih banyak diorientasikan untuk menggerakkan ekonomi mikro dan meningkatkan daya beli masyarakat melalui beasiswa. Sebagai "buah" atas keberpihakan BAZNAS Provinsi NTB dalam kegiatan pengelolaan zakat, tahun 2019 BAZNAS memperoleh 3 awards sekaligus, yaitu Kategori Pemerintah Provinsi Pendukung Kebangkitan Zakat, BAZNAS Provinsi dengan Pendistribusian ZIS Terbaik di Indonesia, dan BAZNAS Provinsi dengan Program Pendayagunaan Terbaik.
- Peraturan Daerah N0. 2 tahun 2016 tentang Pariwisata ramah Muslim.
  Dalam konteks ini, Provinsi NTB meraih dua penghargaan international dalam bidang halal tourism, yaitu: World's Best Halal Honeymoon Destination, World's Best Halal Beach Resort, dan World's Best Halal Travel Website. Dengan modal International Awards tersebut, NTB bergerak secara perlahan pada level arus bawah ekonomi untuk menguatkan pariwisata. Sayangnya, gerakan baru saja dimulai, Provinsi NTB dihadapkan oleh musibah gempa bumi pada tahun 2018, yang kemudian disusul dengan wabah Covid-19 pada tahun 2020 ini. Praktis aspek pariwisata ini belum dapat diidentifikasi secara baik ketercapaiannya karena faktor alam tersebut.
- Peraturan Daerah N0. 8 tahun 2018 tentang Konversi PT Bank NTB menjadi PT Bank NTB Syariah.
  Pada awalnya, banyak yang meragukan kemampuan Provinsi NTB dalam menggerakkan ekonomi syariah melalui PT. Bank NTB Syariah. Nyatanya, secara kuantitatif menunjukkan bahwa PT. Bank NTB Syariah berhasil dengan baik, bahkan melampaui ekspektasi, sekaligus menjawab "keraguan" beberapa pemangku kepentingan terkait Bank Syariah, dan prestasi PT. Bank NTB Syariah tahun 2019 tersebut merupakan kemajuan yang luar biasa. Pertumbuhan Asset mencapai 22.32%. Sementara bank umum konvensional secara nasional meningkat 6%, dan bank umum syariah meningkat 9.9%. Pembiayaan di PT. Bank NTB Syariah meningkat 14.65%. Kredit di perbankan konvensional nasional meningkathanya 6%, dan pembiayaan di Bank Umum Syariah meningkat 10.93%. BPD se-Indonesia meningkat 10.15%. Penyertaan dana pihak ketiga (DPK) di PT. Bank NTB Syariah meningkat 38.81%. Sementara di bank umum konvensional meningkat sampai 7%, Bank Umum Syariah meningkat 12.03% dan BPD se-Indonesia meningkat 11.9%. Secara keseluruhan, pertumbuhan PT. Bank NTB Syariah sangat menakjubkan.

Ekonomi Syariah NTB: Tantangan dan Harapan

Tidak hendak bereuforia dengan sukses PT. Bank NTB Syariah, karena masih banyak hal yang sifatnya substansial untuk diselesaikan dalam pengembangan ekonomi syariah di Provinsi NTB. Pengembangan usaha mikro kecil menengah masyarakat, penguatan Lembaga keuangan mikro Syariah, dan kesiapan masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata syariah di Provinsi NTB. Kesemuanya hal tersebut merupakan pekerjaan besar yang harus dipikirkan secara bersama-sama.

Bagaimanapun, eksistensi legal-formal dalam bentuk Peraturan Daerah di Provinsi NTB untuk pengembangan ekonomi syariah adalah Best Practice yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung percepatan laju kembang ekonomi syariah. Mimpi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia akan benar-benar dapat terwujud jika masing- masing kepala daerah menggunakan otoritas dan kewenangannya untuk bermetamorfosis seperti Provinsi NTB.

Ada beberapa catatan yang dapat ditulis dari Provinsi NTB, sebagai berikut:

- Mindset berpikir ekonomi syariah di Provinsi NTB adalah kebutuhan sosiologis masyarakat, yang secara kuantitatif mayoritas Muslim. Walaupun sebenarnya di internal umat Islam NTB juga mempertanyakan "*What is Islamic Economy*?"
- Berpijak pada realitas sosiologis tersebut, pemerintah daerah mengkomunikasikan kebutuhan pengembangan daerah berbasis mindset ekonomi syariah kepada beberapa stake holder, dan menginisiasi langkah dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan ekonomi syariah. Hal ini yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB adalah tasharruf al-imam 'ala ra'iyyatihi manuthun bil maslahah. Untuk menjawab keraguan sebagian kalangan tentang ekonomi syariah, yang wajib dilakukan adalah kerja keras dan kerja cerdas, sebagaimana yang diraih oleh PT. Bank NTB Syariah.

Wawancara
Kepala Instansi Daerah

Bagaimana visi, rencana, dan program-program terkait ekonomi syariah?

Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat

Visi dan misi pembangunan yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Provinsi NTB Tahun 2018-2023 adalah "Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang".

- Misi 1: NTB TANGGUH DAN MANTAP
  Melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah
- Misi 2: NTB BERSIH DAN MELAYANI
  Melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi
- Misi 3: NTB SEHAT DAN CERDAS
  Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sebagai Pondasi Daya Saing Daerah"
- Misi 4: NTB ASRI DAN LESTARI
  Melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan"
- Misi 5: NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI
  Melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi
- Misi 6: NTB AMAN DAN BERKAH
  Melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan"

Tujuan dalam misi ke-5 adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi berkualitas dengan salah satu indikator tujuannya adalah pertumbuhan industri. Salah satu upaya untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi adalah dengan industrialisasi. Pemerintah provinsi NTB melalui RPJMD tahun 2019-2023 berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui industrialisasi yang sasarannya yaitu mengembangkan Industri Olahan dan Permesinan. Untuk mencapai sasaran tersebut maka didukung oleh beberapa program antara lain: Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi, Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, Peningkatan Kemasan (Packing) Produk IKM Olahan, Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial, Program Kerjasama Pembangunan Sektor Perindustrian, dan Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah. Selain itu sasaran pada misi ke 5 adalah Meningkatnya pengembangan *community bassed tourism* dan *friendly moslem tourism*.

Untuk mencapai sasaran tersebut maka didukung oleh beberapa program antara lain: Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Kemitraan, dan Program Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata.

Dalam rangka meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke NTB, beberapa terobosan yang telah dilakukan diantaranya pengembangan pemasaran pariwisata dengan meningkatkan promosi dan *kegiatan* untuk meningkatkan daya tarik wisatawan, kemudian Pengembangan Destinasi Pariwisata yang dihajatkan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi pariwisata yang ada di desa. Disamping itu, untuk mengoptimalkan layanan pariwisata yang memenuhi standar, dilakukan pengembangan Sumber Daya Manusia yang bergerak dibidang kepariwisataan.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat

Saat ini industri NTB berada pada lima sektor yang akan dikembangkan yaitu:

- Industri pengolahan
- Industri kreatif
- Industri hulu agro
- Industri permesinan, otomotif dan energi terbarukan
- Industri turunan pertambangan

Adapun komoditi yang akan dikembangkan adalah jagung, sapi, unggas, garam, *essem oil*, cengkeh, kayu putih, nilam, sereh, rumput laut, kopi, coklat mede, kelapa, dan ikan laut.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat

Visi: Terwujudnya Nusa Tenggara Barat sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan Indonesia.
Program-program:

1. Program pengembangan pemasaran pariwisata
2. Program pengembangan destinasi pariwisata
3. Program pengembangan kemitraan
4. Program pengembangan atraksi dan daya tarik wisata
5. Program penataan *geopark*

Kepala Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB

Merujuk RPJMD Provinsi NTB Tahun 2018-2023 , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, sebagai salah satu organisasi perangkat daerah , yang berfungsi mendukung urusan Pemerintah di Bidang Penanaman Modal, diharapkan dan didorong untuk mengeksploitir segenap Sumber Daya yang dimiliki guna mendukung proyeksi jangka menengah daerah (2018-2023) yaitu “Membangun NTB Gemilang” melalui NTB Sejahtera dan Mandiri (Misi ke 5 dari Misi NTB Gemilang (Penanggulangan kemiskinan, Mengurangi Kesenjangan dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif bertumpu pada Pertanian,Pariwisata dan Industrilisasi).
Sebagai Instrumen yang digunakan dalam ikhtiar mewujudkan visi RPJM 2018-2023 Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni “Membangun NTB Gemilang” dan mengandung makna:

1. Satu keyakinan bahwa NTB dapat berperan besar di kancah nasional dan internasional
2. Satu komitmen bahwa percepatan dan lompatan pembangunan harus terus diikhtiarkan untuk mewujudkan NTB yang tertata rapi sebagai tempat hunian menyenangkan, dengan masyarakat yang berdaya saing, tangguh, dan berbudi luhur serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik

Program-program dan kegiatan:

1. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
   a. Kegiatan Peningkatan Kerjasama strategis antara usaha besar dan UKM
   b. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran investasi
   c. kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
   d. Kegiatan Peningkatan Promosi Dalam Daerah
   e. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Antar Dunia Usaha
   f. Layanan Perizinan dan Non Perizinan sector ESDM, Lingkungan Hidup dan Kehutanan
   g. Penyelarasan Program Perencanaan dan pengembangan Penanaman Modal
   h. Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Ekonomi, Sosial dan Kemasyarakatan.
2. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
   a. Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
   b. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Renvana dan Realisasi Penanaman Modal
   c. PeningkatanPenyelesaian Masalah Pelaksanaan Investasi PMA/PMDN
   d. Pengembangan Sistim Informasi Penanaman Modal
   e. Penyusunan system informasi Penanaman Modal di Daerah
   f. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu pintu (PTSP)
   g. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan pelayanan Penanaman Modal

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dalam pengembangan ekonomi syariah Bank Indonesia memiliki visi mendukung tercapainya Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut BI berupaya untuk

- Mendorong mengalirnya faktor produksi (harta, tenaga kerja, inovasi teknologi) untuk kegiatan produktif/investasi bagi bertumbuhnya perekonomian
- Mengintegrasikan sektor keuangan dengan sektor riil
- Memberdayakan dana sosial syariah (ZISWAF)
- Mengembangkan kebijakan untuk mendorong terkelolanya kesinambungan aktivitas ekonomi syariah;
- Meningkatkan pemahaman masyarakat.

Beberapa program dan bentuk dukungan terhadap pengembangan ekonomi syariah di NTB telah dilaksanakan oleh KPwBI NTB, antara lain melalui pendampingan bagi Bank NTB untuk melakukan konversi menjadi Bank NTB Syariah (BUS). Keikutsertaan dalam kegiatan festival ekonomi syariah dengan mengikutsertakan Bank NTB Syariah, ponpok pesantren unggulan, serta UMKM syariah binaan.

Selain itu, dalam bidang fesyen Muslimah, KPwBI NTB membuat program *NTB Goes to Moeslem Fashion Industry*. Melalui program ini kami melakukan pembinaan terhadao pelaku industri fesyen secara terintegrasi mulai dari pengrajin tenun, penjahit, desainer, sampai model. Tujuan program tersebut adalah NTB mampu memiliki produk busana Muslim brand NTB yang kompetitif dengan bahan baku, penjahit, desainer, hingga modelnya berasal dari NTB. Dari sisi pengembangan industri halal, KPwBI NTB juga melaksanakan program pengembangan dan akselerasi sertifikasi halal melalui fasilitasi berupa *capacity building* dan/atau penyediaan infrastruktur. Selain itu, untuk mendorong peningkatan kapasitas, kualitas, dan produktifitas UMKM Syariah, KPwBI NTB juga memfasilitasi beberapa UMKM binaan BI untuk dapat mengikuti seleksi Industri Kreatif Syariah (IKRA). Untuk memajukan sektor pertanian, program yang sedang dan akan terus dilaksanakan adalah konsep *integrated farming* dengan proses produksinya mengedepankan konsep *halal value chain*.

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Nusa Tenggara Barat

- Optimalisasi pelaksanaan program transformasi BPD pada PT Bank NTB Syariah
- Pendampingan terhadap rencana pengembangan produk dan aktivitas baru berbasis syariah (iB)
- Pelaksanaan literasi, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan industri keuangan syariah bekerja sama dengan lembaga keuangan, organisasi keagamaan dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) NTB
- Koordinasi dengan Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo), Masyarakat Ekonomi Syariah NTB dan lain-lain terkait dengan issue terkini terkait dengan industri keuangan syariah

Ketua KADIN Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dewan Pengurus Kadin NTB Periode 2020 – 2025 hasil Musyawarah Provinsi pada tanggal 3 – 4 Maret 2020 merumuskan visi misi KADIN NTB, sebagai berikut:

VISI

Visi Misi Kadin Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2020 – 2024 “Mewujudkan KADIN NTB menjadi wadah pengusaha yang professional dan berdaya saing sebagai mitra pemerintah daerah dalam merealisasikan target pertumbuhan ekonomi NTB melalui pengembangan investasi dan pemberdayaan para pelaku bisnis.

MISI

Sebagai dasar pembuatan kebijakan strategis dan program kerja KADIN NTB Periode 2020 2025, Visi diatas dijabarkan kedalam lima Misi sebagai berikut:

1. Melakukan restrukturisasi dan perkuatan organisasi KADIN NTB sehingga menjadi mitra yang strategis dan efektif bagi pemerintah daerah dan dunia usaha
2. KADIN bersama serikat pekerja dan dunia pendidikan dan pelatihan menciptakan tenaga-tenaga ahli dan terampil siap pakai berkualifikasi internasional
3. KADIN bersama para pengusaha kreatif mendorong, menciptakan dan mengembangkan inovasi dan teknologi siap pakai untuk memudahkan pelaku bisnis

4. Kadin bersama lembaga pemerintah terkait melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan finansial, manajemen, tehnik prosesing dan manufaktur dan pengembangan peluang pasar untuk pelaku bisnis daerah
5. Melakukan kerjasama internasional, regional dan nasional dengan komunitas bisnis yang relevan dan strategis dalam program-program perbaikan dan peningkatan perekonomian, antara lain: investasi, ekspor dan impor, dan *transfer of knowledge and technology* yang signifikan

Penjabaran visi misi tersebut ke dalam program kerja disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi NTB dan budaya daerah NTB. Populasi penduduk di Provinsi NTB mayoritas beragama Islam yang taat menjalan syariat agamanya dan khususnya untuk Pulau Lombok dikenal dengan selogan Pulau Seribu Masjid, maka Program Kerja Bidang Ekonomi dan Keuangan (Perbankan dan Koperasi) diarahkan mengadopsi sistem syariah. Oleh karena itu kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan) Koperasi dan UKM mengusung materi-materi yang didasarkan pada prinsip prinsip syariah.

Keseriusan KADIN NTB untuk menyelaraskan program-program kerja bidang ekonomi dan keuangan berlandaskan prinsip-prinsip syariah merupakan suatu keharusan untuk menjadi ciri khas produk-produk UMKM di Provinsi NTB. Hal ini dapat dilihat dari Program program Kerja Bidang UKM, Koperasi dan Industri Kreatif sebagai berikut:

1. Memperbesar pasar produk dan jasa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal melalui kerjasama dengan pasar-pasar nasional, regional dan internasional berwawasan syariah
2. Memfasilitasi dukungan permodalan melalui kerjasama dengan Lembaga Keuangan (Khususnya Perbankan Syariah)
3. Mendorong pengembangan kapasitas dan usaha berlandaskan prinsip-prinsip Syariah melalui layanan konsultasi, pendampingan, serta pelatihan
4. Mendorong peningkatan kualitas produk industri UMKM local berlandaskan prinsip prinsip Syariah melalui pelatihan tehnik prosesing dan manufaktur sehingga produk produk lokal (berlabel HALAL) memiliki daya saing yang sejajar dengan produk produk impor
5. Mendorong tumbuh kembangnya usaha dan startup-startup baru berlandaskan prinsip-prinsip Syariah di kalangan anak muda (Kaum milenial) dengan melibatkan Lembaga-lembaga Pendidikan dan Pusat-pusat Pengembangan UKM

Ketua BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Baznas Provinsi NTB memiliki Visi: Menjadikan Amil Baznas yang Amanah, Profesional, Jujur, Disiplin, dan Adil. Untuk menjalankan visi- visi tersebut Baznas Provinsi NTB menjabarkan dalam misi antara lain:

1. Intensifikasi pengumpulan dan efektifitas penyaluran
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola zakat, membangun kemitraan dengan pihak ketiga delam rangka digitalisasi muzaki, Amil pelaksana yang professional atau memiliki keahlian dan memiliki kejujuran dalam mengelola zakat, menjadikan teknologi infomasi sebagai sokoguru (tiang tengah) dalam pengelolaan zakat

Baznas berkomitmen dalam mengentaskan kemiskinan melalui dana ZIS serta turut andil berkerjasama dengan pemerintah daerah. Kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah daerah juga dapat mendorong efektifitas kebermanfaatan dana ZIS di masyarakat.

Bagaimana peluang pengembangan sektor ekonomi syariah, industri halal, dan sektor keuangan syariah?

Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat

Peluang pengembangan sektor Ekonomi Syariah, Industri Halal, dan sektor Keuangan Syariah di Provinsi Nusa Tenggara Barat berpotensi untuk dikembangkan karena didukung oleh telah tersusunnya Perda No. 8 Tahun 2018 tentang konversi Bank NTB menjadi PT Bank NTB Syariah, sudah tersusunnya PERDA No 2 tahun 2016 tentang pariwisata ramah Muslim dan telah tersusunnya PERGUB No 51 tahun 2015 tentang pariwisata ramah Muslim. Selain itu beberapa program di organisasi perangkat daerah juga mendukung antara lain; pengelolaan, pendampingan dan penumbuhan KSP/USP pola syariah pada dinas koperasi dan Program Melawan Rentenir Berbasis Masjid (Mawar Emas) pada biro ekonomi Provinsi NTB. Dengan regulasi tersebut di atas pemerintah Nusa Tenggara Barat berkeyakinan akan dapat menggerakkan dan berkolaborasi dengan sektor-sektor lainnya untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah di NTB.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat

Potensi pengembangan syariah pada sektor industri cukup menjanjikan mengingat kebanyakan IKM di NTB merupakan masyarakat yang tidak mau terikat akan riba dan bunga bank yang ada, sehingga dalam melakukan usahanya lebih mengedepankan hukum-hukum syariah yang telah ada.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat

Menurut kami sangat bagus apabila sektor ekonomi syariah, industri halal dan sektor keuangan syariah dapat dikembangkan di Indonesia, terutama pada provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki julukan sebagai pulau seribu masjid.

Kepala Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dengan adanya predikat Wisata ramah Muslim di Nusa Tenggara Barat pada 3 tahun berturut-turut, peluang NTB untuk investasi di sektor Ekonomi Syariah sangat menjanjikan Investor di Bidang Perhotelan, terutama hotel-hotel syariah sudah mulai disiapkan, seperti Peluang Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, sudah disiapkan untuk pembangunan hotel-hotel syariah. NTB juga Mencanangkan Islamic Centre sebagai lokasi wisata syariah dan perekonomian syariah yang *Detail Enginering Design* (DED) nya sedang diproses oleh DPM & PTSP Provinsi NTB.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat

Potensi pengembangan ekonomi syariah di provinsi NTB sangat besar hal ini antara lain ditunjukan dengan besarnya porsi aset perbankan syariah di NTB yang pada tahun 2019 mencapai 27 persen. Selain itu, dari sisi komitmen pemerintah daerah juga sangat mendukung pengembangan ekonomi syariah. Provinsi NTB merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sangat gencar menerapkan kebijakan pengembangan ekonomi syariah, salah satu wujudnya adalah konversi PT Bank NTB dari konvensional ke bank syariah. Wujud dukungan lainnya dari pemerintah daerah adalah gencarnya promosi pariwisata ramah Muslim di Lombok yang telah diakui secara internasional. Selain itu, bentuk dukungan lain adalah visi Gubernur NTB untuk memajukan industri pengolahan serta memajukan produk lokal.

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Nusa Tenggara Barat

Peluang pengembangan sektor keuangan syariah di Nusa Tenggara Barat dinilai cukup besar dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- Adanya konversi usaha PT. Bank NTB menjadi PT. Bank NTB Syariah pada September 2018 menjadi faktor utama peningkatan kinerja keuangan industri keuangan syariah Provinsi NTB. Berdasarkan data posisi Maret 2020, total aset PT. Bank NTB Syariah sebesar Rp 9.9 triliun dengan kontribusi (*share*) sebesar

terhadap seluruh perbankan di NTB sebesar 16.37%. Selanjutnya total aset perbankan syariah di NTB mencapai Rp 15.38 triliun pada Maret 2020, sehingga berkontribusi (*share*) sebesar 25.48% terhadap total aset perbankan di NTB.

- Potensi mayoritas masyarakat Nusa Tenggara Barat merupakan Muslim dan destinasi wisata ramah Muslim, jumlah pesantren yang cukup banyak di NTB.
- Pendekatan pengembangan sektor keuangan syariah melalui tokoh agama/ulama, karena sebagian besar karakter masyarakat NTB patuh atau mengikuti anjuran dari tokoh agama/ulama.

Pemenuhan kebijakan aturan beberapa tahun ke depan yang mendorong pemisahan usaha (*spin off*) Unit Usaha Syariah menjadi secara *full pledge* terhadap sejumlah industri keuangan syariah antara lain asuransi dan perusahaan pembiayaan dapat mendorong peningkatan pangsa pasar dari sektor keuangan syariah.

Ketua KADIN Provinsi Nusa Tenggara Barat

Peluang pengembangan sector Ekonomi dan Keuangan Syariah di Propinsi NTB sangat besar (tinggi), karena:

- Populasi penduduk Provinsi NTB mayoritas Islam (di atas 90%) dan Alhamdulillah sangat taat dalam beribadah.
- Pusat-pusat ekonomi dan keuangan seperti pasar-pasar rakyat dan pasar-pasar modern tidak ditemukan produk-produk tidak halal, begitu pula lembaga-lembaga keuangan sudah banyak dikembangkan ke arah keuangan syariah.
- Pemerintah Provinsi NTB mulai mengembangkan sektor pariwisata berlandaskan syariah (pariwisata ramah Muslim), dan sektor ini merupakan pasar andalan produk-produk halal UMKM yang ada di Provinsi NTB.
- Sekarang ini makin banyak inverstasi asing yang masuk di Provinsi NTB terutama untuk sektor pariwisata, industri, properti, tambang dan energi. Masuknya investor ini memiliki dampak yang signifikan untuk pengembangan ekonomi dan keuangan di Provinsi NTB.

Ketua BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Peluang untuk pengembangan dana zakat, infaq, dan sedekah di Provinsi NTB sangat besar. Karena sebagian penduduk NTB merupakan Muslim dan memiliki pengetahuan tentang agama yang sangat baik. Namun terjadi kendala dimasyarakat yang masih menyalurkan dana ZIS-nya secara pribadi sehingga tidak efektif dan tidak berdampak signifikan di masyarakat. Selain itu potensi besar ini juga bisa menjadi dorongan serta acuan bagi Baznas Provinsi NTB untuk terus meningkatkan sosialisasi dan konsolidasi dengan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pengumpulan dan pengelolaan ZIS yang lebih baik lagi

Bagaimana tantangan utama yang saat ini dihadapi dalam mengembangkan sektor ekonomi Syariah, industri halal, dan sektor keuangan Syariah?

Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tantangan utama yang dihadapi adalah Kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia, sarana dan prasarana yang memadai belum terpenuhi secara optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi syariah, sehingga berdampak pada optimalisasi pelayanan jika dibandingkan dengan lembaga/organisasi non syariah. Perlu upaya yang terencana dan terkoordinasi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya dimaksud melalui pendidikan dan pelatihan. Selain itu kemitraan atau kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah dengan pelaku usaha atau pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain khususnya terkait pengembangan ekonomi syariah, dalam implementasinya belum dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu diperlukan pola-pola kemitraan dan kerjasama yang efektif, sehingga kemitraan atau kerjasama dimaksud dapat berjalan dengan baik dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi syariah.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tantangan yang ada saat ini adalah berupa persaingan modal yang dimiliki para IKM, sehingga masih banyak IKM yang bekerjasama dengan bank yang belum menggunakan syariah.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tantangan yang dihadapi Dinas Pariwisata Provinsi NTB untuk 5 tahun ke depan yaitu :

1. Tantangan dan peluang bidang pemasaran pariwisata
   - Melakukan promosi di dalam dan di luar negeri
   - Melakukan promosi baik melalui media cetak ataupun media elektronik
   - Membuat promosi yang menarik sehingga menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke NTB
2. Tantangan dan peluan bidang pengembangan destinasi pariwisata
   - Mengenalkan restoran/café dan rumah makan yang bersertifikasi halal
   - Menata sarana dan prasarana destinasi pada desa wisata yang telah terbentuk, seperti pembangunan mushola, toilet umum, kios cendramata, kios kuliner, lahan parkir, dll
3. Tantangan dan peluang bidang kelembagaan pariwisata
   - Melakukan pelatihan pada SDM pelaku wisata, agar memiliki pelayanan pariwisata yang memenuhi standar
   - Memberikan penyuluhan serta pendampingan unuk desa wisata agar memenuhi standar desa wisata, sehingga banyak wisatawan yang datang berkunjung ke desa wisata
4. Tantangan dan peluang bidang atraksi dan daya tarik wisata
   - Melakukan festival budaya pada obyek wisata, sehingga menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung
   - Melakukan kerjasama terhadap produksi industri kreatif sehingga menarik minat wisatawan akan produk-produk lokal

Kepala Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB

Tantangan Utama Pemerintah NTB saat ini dalam mengundang masuknya investor Dalam/Luar Negeri sangat terindikasi hal-hal sebagi berikut:

a. Karena masih adanya anggapan investor tentang buruknya pelayanan investasi dan peraturan yang berbelit-belit serta infrastruktur yang belum memadai dilokasi /lahan investasi
b. Akses transportasi terutama tidak ada penerbangan langsung dari Negara tujuan yang berinvestasi
c. Dana promosi yang masih kurang di instansi yang menangani investasi

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tantangan utama dalam pengembangan ekonomi syariah adalah literasi keuangan syariah masih perlu ditingkatkan. Pengetahuan masyasarakat terkait ekonomi syariah sebagian besar hanya tentang keharaman riba namun masih awam terkait produk-produk jasa keuangan syariah. Oleh karena itu masih diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait ekonomi syariah. Sosialisasi ini tidak hanya disampaikan kepada masyarakat awam saja tetapi juga kepada ulama, pondok pesantren, ormas, pengusaha, dan sebagainya, yang selama ini belum mengetahui secara detil apa dan bagaimana operasional dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang berbasis syariah walaupun mereka mengetahui dengan benar dari sisi fiqih dan syariah. Tantangan lainnya adalah dari sisi kapasitas teknis yang terbatas untuk mengolah hasil alam/pertanian yang sebenarnya melimpah, serta akses pasar yang masih belum efisien.

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tantangan utama adalah mendorong peningkatan akses keuangan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah, dan menjadi pilihan utama dalam transaksi keuangan syariah.

Ketua KADIN Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tantangan utama yang dihadapi dalam Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah di Provinsi NTB antara lain:

- Masalah permodalan, dimana masih tingginya persentase bagi hasil pinjaman (bunga pinjaman) yang diterapkan oleh Lembaga-lembaga Keuangan Syariah.
- Beban resiko kegagalan hanya ditanggung oleh peminjam (UMKM), mestinya bebas resiko kegagalan dibagi secara proporsional antara UMKM dan Lembaga Perbankan. Tentu dalam pelaksanaan kerjasama antara UMKM dan Lembaga Keuangan dilakukan pembinaan dan pengawasan yang ketat dari pihak Lembaga Keuangan.

Kualitas Produk-produk Halal masih rendah sehingga perlu pembinaan yang intensip baik dari Lembaga Pemerintah, KADIN NTB, Lembaga Keuangan Syariah, dan Investor. Hal ini untuk menjadikan produk-produk Halal UMKM di Provinsi NTB dapat bersaing dengan produk-produk import, sehingga dapat dterima oleh pasar internasional dan perhotelan.

Ketua BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tantangan besar yang dihadapi oleh Baznas NTB antara lain:

- Masih banyaknya masyarakat dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya berzakat di lembaga resmi
- Informasi dan sosialisasi tentang ZIS dan program-program Baznas Provinsi NTB masih minim
- Mengoptimalisasikan UPZ yang telah dibentuk oleh Baznas Provinsi NTB

Nusa Tenggara Barat (NTB)

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Ekonomi Pesantren

No	Nama Pesantren	Deskripsi Program
1	Ponpes Nurul Haramain	Program Ekonomi Silaturahmi, Program ini dibuat sebagai upaya pondok untuk mendidik santri berwirausaha dengan cara mengambil hikmah dari bersilaturahmi. Contoh: Ponpes menerapkan kegiatan berbagi produk Haramain Bakery kepada jamaah sholat Jumat di beberapa Masjid sebagai salah satu upaya bersilaturahmi dengan sesama Muslim sekaligus untuk promosi produk, dan masih banyak implementasi lainnya. Selain itu sektor produksi pertanian/peternakan juga akan dikembangkan di Ponpes Nurul Haramain.
2	Ponpes Nurul Bayan	Program Pengembangan *Integrated Farming (IF)* Ketahanan pangan menjadi salah satu konsen bagi pondok pesantren. Melalui program IF maka ponpes dapat memaksimalkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan produksi yang maksimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan
3	Ponpes Darunnahdlatain NW Pancor	Program Pengembangan Usaha *Bakery* Dengan jumlah santri yang sangat banyak mencapai lebih dari 20.000 jiwa, maka prospek usaha ini sangat menjanjikan.
4	Ponpes Al Kautsar Al Gontory	Program Forum Bisnis Pesantren Sebagai salah satu implementasi program pembentukan *holding* bisnis pesantren, maka dibentuk forum bisnis pesantren yang berfungsi sebagai wadah alumni ponpes yang berwirausaha/ masyarakat untuk saling bersinergi mengembangkan usaha yang sesuai syariah

Daftar Usaha-Usaha Syariah yang Dikelola Pondok Pesantren

No.	Nama Pesantren	Nama Unit Usaha	Deskripsi
1	Pondok Pesantren Al Kautsar Al Gontory	Sektor Usaha Pengolahan Kelapa	Pemberdayaan Unit Usaha di Pesantren
2	Pondok Pesantren Bayyinul Ulum	Sektor Usaha Air Minum	Pemberdayaan Unit Usaha di Pesantren
3	Pondok Pesantren Nurul Bayan	Sektor Usaha Air Minum, Pertanian dan Peternakan	Pemberdayaan Unit Usaha di Pesantren
4	Pondok Pesantren Nurul Haramain	Sektor Usaha Pertanian	Pemberdayaan Unit Usaha di Pesantren dan Implementasi Pedoman Akuntansi Pesantren

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta

Sekilas

tentang Ekonomi Syariah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 3.84 juta jiwa dimana 98 persen diantaranya adalah Muslim, maka Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpeluang untuk dijadikan sebagai poros ekonomi syariah. Dengan letak geografis, keluhuran sejarah, keragaman, dan keunikan budaya lokal, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beberapa sektor unggulan yang dapat dimaksimalkan untuk mendukung perekonomian daerah yakni sektor Pariwisata ramah Muslim, sektor makanan/minuman halal serta Kuliner Halal, dan sektor Fesyen Halal.

Dari sisi sektor keuangan syariah, perbankan syariah di Yogyakarta pada periode Juni 2020 memiliki pertumbuhan aset dan DPK yang cukup tinggi yaitu masing-masing sebesar 7.33% (yoy) dan 8.37% (yoy) (OJK, 2020). Sementara di sektor Keuangan Mikro Syariah, Provinsi Yogyakarta yang merupakan salah satu daerah tempat lahirnya Koperasi Syariah/BMT, memiliki jumlah koperasi Syariah serta pertumbuhan aset dan anggota yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari sisi sektor riil atau industri halal, Yogyakarta memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada wisata ramah Muslim Indonesia. Menurut data Kementerian Pariwisata (2018), Yogyakarta merupakan salah satu dari 10 provinsi yang ditetapkan sebagai 10 destinasi pariwisata ramah Muslim di Indonesia. Melihat potensi-potensi tersebut Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak peluang untuk mendominasi pasar domestik dan internasional untuk sektor-sektor ekonomi dan keuangan syariah tersebut.

Regulasi Tingkat Daerah
di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah

Peraturan Daerah terkait Keuangan Syariah	Belum Ada
Peraturan Daerah terkait Industri Halal	Belum Ada
Peraturan Gubernur terkait Pariwisata ramah Muslim	Belum ada. Namun ada penambahan satu pasal (Pasal 17F) dalam Perubahan atas Perda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah sebagai berikut: “Pemerintah Daerah menyelenggarakan pariwisata ramah Muslim yang didasarkan atas kearifan lokal.”
Peraturan Daerah Lainnya	Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2005 Tentang “Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”

Rencana Pemerintah Daerah
di Sektor Ekonomi Syariah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memfokuskan pada konsep "Renaisans Yogyakarta" sebagai paradigma pembangunan agar menjadi Yogyakarta yang maju, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai keluhuran dan nilai-nilai keutamaan Yogyakarta sehingga Yogyakarta memiliki martabat yang istimewa dalam peta sejarah Indonesia. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022, adalah: "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Yogya".

Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Inflasi		Tingkat Pengangguran		Tingkat Kemiskinan		Konsumsi RT		Konsumsi Pemerintah		Investasi		Ekspor		Impor	
2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
6.20%	6.60%	3.13%	2.72%	3.33%	3.14%	11.81%	11.44%	1.37%	3.71%	0.11%	3.82%	3.61%	1.91%	0.53%	-0.99%	0.34%	-11.40%

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Yogyakarta Tahun 2017-2022

- Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban
- Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis

Program - Program Unggulan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi DIY 2017-2022

- Pelayanan Dasar Pendidikan
- Peningkatan Layanan Kesehatan
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- Perlindungan, Penjaminan, dan Rehabilitasi Sosial
- Urusan Ketenagakerjaan
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Peningkatan Ketersediaan dan Akses Pangan

Isu Strategis RPJMD DIY 5 tahun ke depan

- Pencemaran Lingkungan dan Risiko Bencana Alam Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial
- Belum Optimalnya Pengendalian Pemanfatan Ruang dan Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian
- Tingginya ketimpangan wilayah
- Penyediaan Infrastruktur Strategis di Kawasan Pesisir Selatan Belum Optimal
- Angka Kemiskinan Masih Tinggi

Rencana Pembangunan Ekonomi Syariah di Provinsi Yogyakarta

Sektor Keuangan Syariah

- Program Pembinaan koperasi syariah.

Sektor Makanan dan Produk Halal

- Pembinaan industri olahan pangan (sertifikasi halal)

Program Pemerintah Daerah
di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah

Sektor Industri halal

Program Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Program Pendukung Sektor Industri Halal

Makanan dan minuman halal	▪ Sertifikasi Halal ▪ Pelatihan Industri Makanan dan Minuman untuk Pondok Pesantren ▪ Pameran dan pendampingan produk olahan makanan serta kemasan ▪ Pameran online ▪ Kemitraan produk olahan makanan
Fesyen Muslim	▪ Pelatihan dan pameran dalam negeri ▪ Pameran luar negeri ▪ Temu Bisnis ▪ Pameran online

Jumlah Kegiatan Syariah/Halal

	Jumlah Kegiatan Produk Daerah	Jumlah Kegiatan Produk Halal/Syariah/Islami
Makanan dan minuman	2	-
Fesyen	1	2
Pariwisata	35	3

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pendukung Sektor Industri Halal

- Program inisiatif dan pendampingan berupa fasilitasi sertifikasi halal UMKM
- Pada tahun 2019 terdapat 20 UMKM yang difasilitasi sertifikasi halal mulai dari produk air minum, wedang rempah, bakery, abon, bakpia, berbagai olahan seperti olahan susu, cabai, beras, salak, pisang, okra, daging sapi, dan makanan ringan lainnya
- Di tahun 2020, juga terdapat 20 UMKM yang difasilitasi sertifikasi halal. UMKM yang difasilitasi juga UMKM pesantren. Jenis produk makanannya pun juga semakin beragam mulai dari makanan dan minuman ringan yang berasal dari kearifan lokal hingga makanan siap saji

Sektor UMKM dan ekonomi pesantren

Program Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Program Pemberdayaan UMKM

Sektor	Daftar Program Pendampingan
Makanan dan minuman halal	▪ Pelatihan Industri Makanan dan Minuman ▪ Kemitraan/temu bisnis Produk Olahan Makanan ▪ Pameran Produk Olahan Makanan dan Minuman ▪ Pelatihan Kemasan ▪ Pameran dalam dan luar negeri ▪ Pendampingan ekspor ▪ Bantuan alat produksi ▪ Bantuan dan pendampingan sertifikasi halal
Fesyen Muslim	▪ Pameran dalam dan luar negeri ▪ Pameran berskala ekspor ▪ Pelatihan dan pendampingan ekspor impor ▪ Fasilitas pameran dan pemasaran secara online ▪ Temu kemitraan/temu bisnis

Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	2017	2018	2019
IKM mendapat pendampingan	-	-	8
IKM mendapat pendampingan sertifikasi halal	38	-	90
UMKM mendapat pendampingan	1,200	600	590
UMKM mendapat pendampingan sertifikasi halal	25	25	60

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program pengembangan ekonomi pesantren

Jumlah Pesantren	Program Pengembangan Ekonomi (*Lampiran*)
14	23
▪ Pendirian dan pembenahan Koperasi primer pesantren ▪ Penguatan kelembagaan dan administrasi keuangan usaha pesantren ▪ Pengembangan usaha air minum di MBS Prambanan, PP Mualimin, PP Alimdad, dan PP Al-Mumtaz ▪ Pengembangan usaha *mini market* di PP Al-Mumtaz, MBS Pleret, PP Nurul Haromain Kulon Progo, PP Alimdad Bantul, PP Al-Hikmah Gunungkidul	▪ Pengembangan usaha laundry di MBS Prambanan dan MBS Pleret ▪ Pengembangan usaha daur ulang sampah di PP Darul Quran Gunungkidul ▪ Pengembangan usaha jasa hiburan di PP Nurul Haromain Kulon Progo ▪ Pengembangan layanan non-tunai usaha pesantren ▪ Bantuan alat penunjang produksi usaha pesantren ▪ Bantuan sertifikasi halal produk usaha pesantren

Sektor Keuangan Syariah

Program Otoritas Jasa Keuangan (Regional)

Sub-sektor	Detil Program
Perbankan Syariah	▪ Melakukan pengawasan *off site* (tidak langsung) terhadap kondisi kesehatan bank secara bulanan dan triwulanan serta menyampaikan pembinaan kepada bank yang memiliki indikator keuangan kurang memadai ▪ Melakukan pengawasan on site (langsung) untuk memastikan laporan keuangan bulanan ▪ Pengawasan secara aktif untuk memastikan Tata Kelola bank (GCG) berjalan dengan baik serta memberikan pembinaan jika GCG tidak berjalan dengan baik ▪ Melakukan reviu terhadap Rencana Bisnis, Realisasi Rencana Bisnis, Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan menyampaikan pembinaan terhadap kinerja keuangan dan strategi operasional dan bisnis yang kurang memadai ▪ Melakukan pemantauan debitur BPRS yang terdampak Covid-19 dan melakukan restrukturisasi pembiayaan secara mingguan ▪ Melakukan pemantauan indikator likuiditas BPRS secara harian ▪ Melaksanakan kegiatan forum Pemegang Saham BPRS dan meminta Pemegang Saham untuk meningkatkan dukungan terhadap likuiditas BPRS yang dimiliki ▪ Melakukan reviu terhadap Laporan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait *sharia compliant* serta menyampaikan pembinaan terhadap bank jika terdapat pelanggaran prinsip syariah yang signifikan dan berulang
Bank Pembangunan Daerah	▪ Melakukan pengawasan off site (tidak langsung) terhadap kondisi kesehatan secara bulanan dan triwulanan, serta pengawasan on site untuk memastikan laporan keuangan bulanan ▪ Pengawasan secara aktif untuk memastikan penyerapan profil risiko dan Tata Kelola bank (GCG) berjalan dengan baik serta memberikan pembinaan jika GCG tidak berjalan dengan baik ▪ Melakukan pembahasan dan pembinaan terhadap rencana spin off Unit Usaha Syariah (UUS) yang telah tercantum pada Corporate Plan bank ▪ Melakukan pemantauan debitur UUS yang terdampak Covid-19 dan melakukan restrukturisasi pembiayaan secara mingguan ▪ Melakukan pemantauan indikator likuiditas Bank secara harian

	▪ Melakukan pemeriksaan terhadap kecukupan jumlah, kualitas, dan manajemen Sumber Daya Insani (SDI) ▪ Melakukan pemeriksaan terhadap dukungan TI yang dimiliki bank ▪ Memastikan kesesuaian tingkat modal yang dibentuk dengan eksposur risiko yang ada akibat kegiatan operasional dan bisnis bank ▪ Melakukan reviu terhadap Laporan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait *sharia compliant* serta menyampaikan pembinaan terhadap bank jika terdapat pelanggaran prinsip syariah yang signifikan dan berulang

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Keuangan Syariah

- Implementasi QRIS pada usaha pondok pesantren

Sektor Keuangan Mikro Syariah

Program Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Program Pendampingan, Pengawasan, dan Pengembangan Koperasi Syariah (KSPPS)

Program	Institusi Keuangan Mikro Syariah
Diklat Pengawasan Syariah dan Sertifikasi Uji Kompetensi Pengawas Syariah Diklat dan Uji Kompetensi Manajer/ Kepala Cabang Koperasi Syariah Diklat dan Sertifikasi Uji Kasir dan Pembukuan Koperasi Syariah Diklat Akuntansi, Auditing, dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) bagi Koperasi Syariah	KSPPS/USPPS
Bimtek Perkoperasian bagi Kopontren	Kopontren

Program Otoritas Jasa Keuangan (Regional)

Program Pendampingan, Pengawasan, dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Bank Wakaf Mikro (BWM)

- Koperasi LKMS BMT Sumber Harapan Maju
- Koperasi LKMS BMT Artha Surya
- Koperasi LKMS BTM Pemalang
- Koperasi LKMS BTM BTM Surya Amanah
- Koperasi LKMS BTM Banyumas di Patikraja
- Koperasi LKMS Bankwakaf Al Muttaqien Pancasila Sakti (Alpansa)
- Koperasi LKMS Amanah Berkah Nusantara
- Koperasi LKMS Almuna Berkah Mandiri
- Koperasi LKMS Assa Berkah Sejahtera
- Koperasi LKMS Al Ihya Baitul Auqof
- Koperasi LKMS Bankwakaf Al Manshur Barokahing Gusti
- Koperasi LKMS BTM Kota Tegal
- Koperasi LKMS UNISA
- Koperasi LKMS BWM Ponpes Futuhiyyah
- Koperasi LKMS Bankwakaf Imam Syuhodo
- Koperasi LKMS BWM Sunan Pandan Aran
- Koperasi LKMS Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang
- Koperasi LKMS BWM Apik Kaliwungu Kendal
- Koperasi LKMS BWM Pondok Pesantren Syubbanul Wathon Maslahah
- Koperasi LKMS BWM Bangkit Nusantara
- Koperasi LKMS Bank Wakaf Mikro Al Fadlu Kendal

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Koperasi dan Keuangan Mikro Syariah

- Program pendampingan dalam rangka pedirian koperasi primer bagi pondok pesantren
- Program pendampingan UMKM untuk akses layanan keuangan non-tunai

Sektor Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Program BAZNAS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kategori Program ZIS dan Alokasi BAZNAS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kategori	Nama Program	Jumlah Penerima Manfaat (jiwa)	Besar Alokasi Penyaluran (Rp)
Sosial Kemanusiaan	Respon bencana dan paket logistik keluarga	9,184	1,352,804,552
Pendidikan	Beasiswa dan bantuan tunggakan	5,007	5,239,718,119
Kesehatan	Bantuan pengobatan dan alat medis	1,592	355,359,322
Pemberdayaan Ekonomi	Ekonomi produktif dan support alat usaha	934	764,078,960
Dakwah	Penguatan aqidah muallaf dan support tempat ibadah	6,919	1,778,594,589

Program BAZNAS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Mengatasi Permasalahan Pandemi Covid-19

Nama Program	Mekanisme Penyaluran Bantuan	Alokasi Penyaluran (Rp)	Tipe Penerima Bantuan/Manfaat	Dampak yang Terjadi pada Penerima Manfaat
Penyemprotan Disinfektan	Penyemprotan Pondok Pesantren, Masjid, Sekolah, Kantor, Rumah Sakit	35,000,000	Lembaga	Belum ada
Pembagian APD Masker, Hansa, Handsoap, Hazmad, dan Multivitamin	Langsung dan melalui Mitra	50,000,000	Individu dan Lembaga	Belum ada
Paket Logistik Keluarga	Langsung dan melalui Mitra	75,000,000	Individu	Belum ada

Gambaran
Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah

Sektor Industri Halal

Nilai Eskpor Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Sektor	Jumlah Ekspor tahun 2019 (USD)	% Dibandingkan dengan Total Ekspor Non-Migas
Makanan dan minuman	97,848,175,145	1.82%
Fesyen	1,702,774,150,000	31.72%

Jumlah Usaha/ Merk dengan Sertifikat Halal pada Sektor Makanan dan Minuman (Mamin)

Sektor Usaha (Tahun 2018)		Sektor Usaha (Tahun 2019)	
Roti	136	Roti	163
Katering dan Restoran	186	Katering dan Restoran	189
Tepung, Kanji, and produk turunan/olahan	4	Tepung, Kanji, and produk turunan/olahan	4
Es, es krim, dan bahan-bahan pendukung	9	Es, es krim, dan bahan-bahan pendukung	11
Susu dan produk olahan/turunan susu	47	Susu dan produk olahan/turunan susu	55
Makanan olahan, daging dan unggas	65	Makanan olahan, daging dan unggas	147
Makanan olahan ikan	20	Makanan olahan ikan	22
Makanan olahan telur	1	Makanan olahan telur	1
Makanan ringan	170	Makanan ringan	305
Pemanis, bumbu dapur, bumbu penyedap/ pelengkap	35	Pemanis, bumbu dapur, bumbu penyedap/ pelengkap	39
Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	56	Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	69
Semua Usaha Tersertifikasi Halal	729	Semua Usaha Tersertifikasi Halal	1005

Sumber: Daftar Belanja Produk Halal LPPOM MUI hingga periode Maret-April-Mei 2019

Kontribusi Sektor Mamin terhadap Perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

	2019	2018
PDRB (Milliar Rupiah)		
Mamin olahan	10,286.78	9,390.16
Mamin olahan, Base = 2010	7,508.5	6,954.98
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb)	11,072.19	10,321.18
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb), Base = 2010	7,874.98	7,412.56
Pertumbuhan PDRB (%)		
Mamin olahan, Base = 2010	7.96	6.91
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb), Base = 2010	6.24	5.21
Kontribusi pada PDRB (%)		
Mamin olahan	7.27	7.23
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb)	7.83	7.95

Total produksi daging daerah (tahun 2018)

Populasi Ternak		Produksi Daging Ternak (ton)	
Sapi Potong	313,425	Sapi	9,272.92
Sapi Perah	3,747	Sapi Impor	Belum ada
Kerbau	616	Kerbau	4.84
Kuda	1,913	Kuda	84.75
Kambing	405,948	Kambing	1,601.79
Domba	148,942	Domba	2,499.95
Populasi Unggas		**Produksi Daging Unggas (ton)**	
Ayam Kampung	3,584,305	Ayam Kampung	6,076.08
Ayam Petelur	6,235,984	Ayam Petelur	3,914.96
Ayam Broiler	24,372,273	Ayam Broiler	26,483.88
Bebek	485,803	Bebek	539.81

Skor Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) Tahun 2018 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Akses	89
Komunikasi	58
Lingkungan	42
Jasa	48
Skor IMTI	**52**

Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

	2018	2017	2016	2015	2014
PDRB (Milliar Rupiah)					
Jasa akomodasi	2,952	2,596	2,274	2,050	1,814
Jasa akomodasi, Base = 2010	1,971	1,743	1,569	1,450	1,353
Pertumbuhan PDRB (%)					
Jasa akomodasi, Base = 2010	13.08	1.,09	8.21	7.17	4.88
Kontribusi pada PDRB (%)					
Jasa akomodasi	2.01	1.89	1.79	1.74	1.70

Rating untuk Pariwisata Ramah Muslim di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Skor	Aspek		Skor	Aspek	
Skor Akses	Udara	5	Skor Lingkungan	Kedatangan Turis Muslim	4
	Kereta	4		Jangkauan Wi-Fi	4
	Laut	2		Komitmen terhadap Pariwisata Ramah Muslim	3
	Infrastruktur Jalan	5			
Skor Komunikasi	Panduan Pelancong Muslim	3	Skor Jasa		
	Edukasi Pemangku Kepentingan	3		Restoran Halal	5
	Jangkauan Pasar	4		Masjid	3
				Bandara	5

	Pemandu Tur	5		Hotel	4
	Pemasaran Digital	5		Atraksi	4
			Skor Total		68
			Rata-rata Skor		4,00

NB: data lengkap bisa didapatkan di dalam Laporan Perkembangan Pariwisata Ramah Muslim Daerah 2019-2020

Indikator Pariwisata Ramah Muslim Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Indikator	Skor/Nilai	Keterangan
Akses	Cukup baik	Terdapat akses udara, akses kereta, dan infrastruktur jalan yang baik, namun belum ada akses laut
Akses Udara	Baik	Terdapat bandara internasional
Bandara International	2	
Akses Kereta	Baik	Terdapat stasiun yang menghubungkan daerah yogya dengan kota-kota besar di pulau jawa
Jumlah stasiun	1	Stasiun Tugu
Akses Laut	Kurang	Belum ada akses laut
Pelabuhan	Belum ada	Sedang dibangun
Infrastruktur Jalan	Baik	Kondisi jalan sebagian besar dalam kondisi baik
Jalan Nasional/Negara	247.91	(km)
Jalan Provinsi	760.45	(km)
Komunikasi	Cukup baik	Memiliki panduan pengunjung, edukasi pemangku kepentingan, kegiatan pendukung jangkauan pasar, pemandu tur, dan melakukan pemasaran digital
Panduan bagi Pelancong Muslim	Cukup baik	Hanya ada dalam Bahasa Inggris
Eksemplar Bahasa Inggris	34.000	
Edukasi Pemangku Kepentingan	Cukup baik	Terdapat edukasi dalam bentuk workshop
Workshop	6	
Jangkauan Pasar	Baik	Terdapat beberapa kegiatan terkait pariwisata ramah Muslim seperti konferensi, expo, kegiatan, festival, dan famtrip
Konferensi/Kegiatan/Expo	Ada	Jogja Heboh
Kegiatan B2B	Ada	Yogyakarta turut berpartisipasi
Festival Muslim Friendly	7	
Famtrip	Ada	Halal festival dan yang lain
Pemandu Tur	Cukup baik	Terdapat pemandu tur yang menguasai Bahasa Inggris, namun yang menguasai Bahasa Arab masih kurang
Bahasa Arab	2	
Bahasa Inggris	410	
Pemasara Digital	Baik	Pemasaran secara digital dilakukan dengan website, forum, youtube, dan sebagainya
Website	7	

Indikator	Skor/Nilai	Keterangan
Lainnya	Ada	Forum kaskus, youtube, dll
Lingkungan	Cukup baik	Yogyakarta kedatangan banyak wisatawan domestik dan mancanegara. Jaringan wifi-nya pun memadai. Yogyakarta sedang mempersiapkan diri untuk mengembangkan pariwisata ramah Muslim
Kedatangan Turis	Baik	
Wisatawan Domestik	4,831,347	
Wisatawan Mancanegara	397,951	Sekitar 14% nya adalah Muslim
Jangkauan Wifi	Baik	Wifi bandara gratis dan berkualitas
Komitmen terhadap Halal Tourism	Cukup baik	Yogyakarta sedang dipersiapkan sebagai destinasi wisata ramah Muslim
Jasa	Baik	Sebagian besar kebutuhan industri pariwisata ramah Muslim dan hal-hal yang fundamental seperti restoran halal, masjid, bandara, hotel, dan atraksi sudah dimiliki dengan kualitas yang baik
Restoran Halal	Baik	Restoran dan outlet bersertifikasi halal sudah banyak walaupun masih ada yang *self-claimed*
Restoran bersertifikat halal	92	
Outlet bersertifikat halal	170	
Restoran/ Rumah makan halal *(self-claimed)*	53	
Masjid	Baik	Terdapat banyak masjid dan mushalla yang layak digunakan
Masjid	7,934	
Mushala	5,360	
Bandara	Baik	Terdapat tempat shalat di bandara
Mushala	5	3 di area transit, 2 di area umum
Shalat Jumat	Ada	
Hotel	Baik	Terdapat hotel syariah, hotel dengan dapur bersertifikat halal dan hotel yang tidak menyediakan menu babi dan alkohol
Hotel Syariah	3	
Hotel dengan dapur bersertifikat halal	7	
Hotel yang tidak menyediakan menu babi dan alkohol	10	
Atraksi	Baik	Terdapat situs budaya Islami, daya tarik wisata budaya, daya tarik lokal, serta tempat ibadah di tempat perbelanjaan
Situs budaya Islami	11	
Daya tarik wisata budaya	36	Hanya 6 yang ramah Muslim
Daya tarik lokal	314	
Tempat ibadah di pusat perbelanjaan	9	
Lainnya		

Sektor Keuangan Syariah

Indeks literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah

Indeks	Tahun 2016	Tahun 2019
Indeks literasi keuangan Syariah (OJK)	9.5%	12.60%
Indeks inklusi keuangan Syariah (OJK)	13.5%	8.92%

Profil Keuangan BPD Syariah – Bank BPD DIY (*Milliar Rupiah*)

	2015	2016	2017	2018
Total aset gross	8,689,887	973,953	10,695,372	11,993,576
Total pembiayaan	336,000	373,000	478,000	683,000
Total DPK	296,000	331,622	432,511	521,266
Total FDR	114%	112%	111%	131%
Total NPF	1.26%	1.45%	1.64%	1.84%
Pangsa pasar (%)	-	-	-	39%

Profil Industri Perbankan Syariah (BUS) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (*Milliar Rupiah*)

	2018	2019
Pangsa pasar (%)	19.9%	20.1%
Pembiayaan berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	463	430
Modal kerja (bukan UMKM)	75	44
Investasi (UMKM)	354	392
Investasi (bukan UMKM)	525	396
Konsumsi	996	1,085
NPF berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	13	8
Modal kerja (bukan UMKM)	-	5
Investasi (UMKM)	9	14
Konsumsi	18	21
Total		
Total aset gross	4,571	5,242
Total pembiayaan	2,413	2,348
Portfolio pembiayaan UMKM (%)	33.9%	35%
Total DPK	4,183	4,810
Total FDR	57.68%	48.82%
Total NPF	40	49
Total NPF (%)	1.7%	2.1%

Profil Industri Perbankan Syariah (UUS) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (*Miliar Rupiah*)

	2018	2019
Pangsa pasar (%)	9.4%	9%
Pembiayaan berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	119	87
Modal kerja (bukan UMKM)	94	118
Investasi (UMKM)	56	67
Investasi (bukan UMKM)	484	453
Konsumsi	892	1,032
NPF berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	12	24
Modal kerja (bukan UMKM)	Belum ada	70
Investasi (UMKM)	Belum ada	4
Investasi (bukan UMKM)	Belum ada	Belum ada
Konsumsi	10	17
Total		
Total aset gross	1,910	2,043
Total pembiayaan	1,645	1,757
Portfolio pembiayaan UMKM (%)	10.6%	8.8%
Total DPK	1,157	1,248
Total FDR	142.19%	140.77%
Total NPF	21	115
Total NPF (%)	1.3%	6.5%

Sektor Keuangan Mikro Syariah

Jumlah LKMS dan BWM yang mendapatkan program pendampingan dan pengawasan dari OJK

LKMS	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah yang mendapat pendampingan OJK	8	17	21
Jumlah yang mendapat pengawasan OJK	8	17	21

Profil Fundamental LKMS dan BWM di bawah Pengawasan OJK

LKMS dan BWM	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Total aset (*dalam rupiah*)	80.4 Miliar	161.69 Miliar	225.92 Miliar

Jumlah IKMS yang Mendapatkan Program Pendampingan dan Pengawasan dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

IKMS	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah yang mendapat pendampingan	55	57	58
Jumlah yang diawasi oleh Dinas (pengawasan yang dimaksud adalah pengecekan laporan RAT, kunjungan ke IKMS, dsb.)	41	43	26

Profil Fundamental IKMS di bawah Pengawasan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

IKMS (KSPPS/USPPS, BMT, Kopontren, dll)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah IKMS yang berada di wilayah kerja	55	57	58
Jumlah Anggota IKMS	60,103	61,176	62,249
Jumlah Pegawai IKMS	327	339	345
Jumlah Pegawai yang mempunyai sertifikasi pengelola KSPPS (IKMS)	20	46	72
Modal sendiri (*dalam rupiah*)	28.8 Miliar	29.9 Miliar	30.4 Miliar
Modal luar/pinjaman (*dalam rupiah*)	228.5 Miliar	232.5 Miliar	236.6 Miliar
Cadangan koperasi/permodalan (*dalam rupiah*)	9.9 Miliar	10.5 Miliar	11.5 Miliar
Volume usaha (*dalam rupiah*)	205.9 Miliar	213.4 Miliar	217.2 Miliar
Sisa Hasil Usaha (SHU) (*dalam rupiah*)	3.7 Miliar	3.8 Miliar	3.9 Miliar
Total aset (*dalam rupiah*)	253.3 Miliar	262.5 Miliar	267.1 Miliar
Rata-rata pembiayaan IKMS (*dalam rupiah*)	0 < n <= 5 jt 100% 1,25 jt < n <= 10 jt 0% 10 jt < n <= 20 jt 0% 20 jt < n <= 50 jt 0% > 50 jt 100%	-	-
Tingkat kesehatan IKMS	Sehat: 10 Cukup Sehat: 12 Dalam pengawasan: Belum ada Dalam pengawasan khusus: Belum ada	Sehat: 10 Cukup Sehat: 12 Dalam pengawasan: Belum ada Dalam pengawasan khusus: Belum ada	Sehat: 13 Cukup Sehat: 5 Dalam pengawasan: Belum ada Dalam pengawasan khusus: Belum ada

Sektor Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Daftar BAZNAS Aktif dan LAZ Aktif Rekomendasi Baznas

5 BAZNAS dan 3 LAZ aktif (Rekomendasi Baznas)	Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunung Kidul, Kab. Sleman, Kota Yogyakarta, Yayasan Amal Syuhada Kota Yogyakarta, Yayasan Pendidikan Dakwah Sosial Al Khairaat (Goedang Zakat Al Khairaat) Kota Yogyakarta, Yayasan LazisQu Lazis Quran Kab. Sleman.

Alokasi APBD/Hibah Pemerintah Daerah kepada Institusi Pengelola Zakat yang Resmi

Daftar Alokasi APBD/Hibah	Nominal Alokasi (Rp)
APBD	200,000,000
APBN	18,400,000

Jumlah Penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (*dalam Rupiah*)

Jenis Dana	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Penghimpunan Zakat			
▪ Zakat Fitrah	410,000	5,360,000	446,164,957
▪ Zakat Maal/Harta	1,673,912,537	2,756,961,728	3,568,638,141
Penghimpunan Infak			
▪ Infak Bebas	260,882,634	297,889,923	464,512,452
▪ Infak Terikat (termasuk CSR dan kurban)	-	-	124,915,013

Jumlah Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (*dalam Rupiah*)

Jenis Dana	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Penyaluran Zakat	2,023,479,348	3,048,241,332	4,248,238,383
Penyaluran Infak	260,743,482	182,696,878	412,399,013
Jumlah Penerima Manfaat Tercatat			
▪ Perorangan	2,866 Orang	11,930 Orang	8,840 Orang

Program Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Bidang Program	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Sosial Kemanusiaan	196,769,870	372,976,500	783,058,182
Pendidikan	1,367,755,761	1,668,514,351	2,203,448,007
Kesehatan	24,737,790	186,547,984	144,073,548
Pemberdayaan Ekonomi	137,500,000	443,530,960	183,048,000
Dakwah	373,025,734	653,896,946	751,671,909

Program Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Kategori	Nama Program	Jumlah Penerima Manfaat (Jiwa)	Besar Alokasi Penyaluran (Rp)
1	Sosial Kemanusiaan	Respon Bencana dan Paket Logistik Keluarga	9,184	1,352,804,552
2	Pendidikan	Beasiswa dan Bantuan Tunggakan	5,007	5,239,718,119
3	Kesehatan	Bantuan Pengobatan dan Alat Medis	1,592	355,359,322
4	Pemberdayaan Ekonomi	Ekonomi Produktif dan Support Alat Usaha	934	764,078,960
5	Dakwah	Penguatan Aqidah Muallaf dan Support Tempat Ibadah	6,919	1,778,594,589

Indeks Zakat Nasional (IZN) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

	2018	2019
Indeks Zakat Nasional/IZN (Dimensi Makro)		
Regulasi	0	1,00
Dukungan Finansial dari Pemerintah (APBN/APBD) untuk BAZNAS	0	0,44
Jumlah Resmi Lembaga Zakat/OPZ, muzakki, and mustahik	0.75	0,88
Rasio, Jumlah muzakki individual/jumlah rumah tangga di level Provinsi	0	0,13
Rasio, Jumlah dari muzakki institusi/jumlah institusi di level Provinsi	0	0
Database dari institusi/lembaga zakat yang terdaftar	0.25	0,33
Total Indeks Makro	**0.48**	**0,58**
Indeks Zakat Nasional/IZN (Dimensi Mikro)		
Penghimpunan	1	0,63
Pengelolaan	1	0,69
Penyaluran	1	0,91
Pelaporan	0,75	0,75
Indeks Kesejahteraan CIBEST	0,75	0,88
Modifikasi Indeks Pengembangan Manusia (HDI)	0.75	0,50
Kemandirian	0.5	0,56
Institutional	0.95	0,75
Dampak Zakat	0.70	0,66
Total Indeks Mikro	**0.80**	**0,70**

Indeks Skor Literasi dan Pemahaman Zakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

	2020
Indeks Literasi Zakat	68.19
Indeks Pemahaman Dasar tentang Zakat	73.36
Indeks Pemahaman Lanjutan tentang Zakat	68.19

Indeks Skor Literasi dan Pemahaman Wakaf Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

	2020
Indeks Literasi Wakaf	55.76
Indeks Pemahaman Dasar tentang Wakaf	64.71
Indeks Pemahaman Lanjutan tentang Wakaf	39.14

Sektor UMKM dan Ekonomi Pesantren

Jumlah Pesantren dengan Usaha-Usaha Syariah

10 Pondok Pesantren	19 Usaha-usaha Syariah (*detil di Lampiran*)

Sektor Pendidikan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Perguruan Tinggi yang Menyediakan Program Studi Ekonomi dan Keuangan Syariah Terkait

Jenjang	Jumlah Universitas tahun 2019	Program Studi tahun 2019		2018		2019	
		Nama Program studi	Jml. Program Studi	Jml. Dosen	Jml. Mahasiswa	Jml. Dosen	Jml. Mahasiswa
Sarjana	5	Hukum Ekonomi Syariah	2	14	551	14	325
		Perbankan Syariah	2	13	1,028	13	668
		Ekonomi Syariah	3	29	1,794	29	1,044
Magister	1	Ekonomi Syariah	1	5	116	5	68

Akreditasi Perguruan Tinggi Dan Program Studi Ekonomi Syariah Terkait

Akreditasi	AkreditasiPerguruan Tinggi			AkreditasiProgram Studi		
	S1	S2	S3	S1	S2	S3
Akreditasi A	1	-	-	-	-	-
Akreditasi B	1	-	-	3	1	-
Akreditasi C	1	1	-	3	-	-
Belum TerAkreditasii	1	-	-	-	-	-

Peluang Investasi Daerah
untuk Industri Keuangan Syariah

No.	Nama Proyek Investasi	Pemangku Kepentingan	Sektor	Tahapan Proyek Investasi	Nilai Perkiraan Investasi (dalam Rupiah)
1	Keuangan Syariah	Koperasi Syariah Kafe 77 Mitra	Keuangan	Beroperasi	≥ 200 juta
2	Keuangan Syariah	KSP dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Projo Artha Sejahtera	Keuangan	Beroperasi	≥ 200 juta
3	Keuangan Syariah	KSPPS BMT Nur Hidayah Sejahtera	Keuangan	Beroperasi	≥ 200 juta
4	Keuangan Syariah	KSPPS BMT Dana Insani	Keuangan	Beroperasi	≥ 200 juta

Digital *Value Chain* Pariwisata ramah Muslim di Yogyakarta

Alex Fahrur Riza, SE., M.Sc[26]

Pariwisata ramah Muslim merupakan salah satu segmen pasar pariwisata dengan tingkat pertumbuhan tercepat di dunia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar yang kaya akan keragaman sumberdaya alam dan budaya, memang sudah sepantasnya Indonesia ditetapkan sebagai destinasi wisata ramah Muslim terbaik dunia pada tahun 2019 oleh Global Muslim Travel Index (GMTI). Dimana Indonesia memiliki keunggulan lebih dibandingkan negara lain dalam bidang akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan. Dengan peringkat ini, diharapkan akan semakin banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia.

Yogyakarta memiliki potensi yang besar terhadap perkembangan pariwisata ramah Muslim ini, dimana Yogyakarta ditetapkan sebagai salah satu dari 10 provinsi destinasi pariwisata ramah Muslim di Indonesia (KEMENPERIN, 2019). Serta mendapatkan penghargaan dalam ajang Indonesia Attractiveness Award (IAA) pada tahun 2019, yang menunjukkan bahwa Yogyakarta memiliki keunggulan dalam bidang pariwisata. Bahkan pada tahun yang sama, Yogyakarta juga mendapat 8 penghargaan yang dianugerahkan oleh The Asian Post, salah satunya adalah provinsi dengan kondisi pariwisata terbaik. Kemajuan sektor pariwisata ini akan berdampak terhadap peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik. Serta berkontribusi terhadap variabel makro seperti GDP, pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran.

Meskipun kontribusi perekonomian di pulau Jawa masih didominasi oleh provinsi DKI Jakarta, namun pertumbuhan tertinggi berada di provinsi D.I. Yogyakarta (BPS, 2019). Tentu saja pertumbuhan ini tidak lepas dari kontribusi keuangan syariah, melalui dua aspek utama, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif, serta stabilitas perekonomian dan keuangan yang lebih baik (Kemenkeu, 2018). Pertumbuhan sektor riil ekonomi syariah perlu dukungan dari sektor keuangan syariah (begitupun sebaliknya). Namun, untuk mengoptimalkan pertumbuhan ini, tidak dapat dilakukan secara parsial. Dukungan ini perlu dilakukan secara holistik dan terintegrasi melalui Halal Value Chain.

Berkembangnya teknologi yang disruptif membuat industri dan model rantai nilai harus bertransformasi, yang awalnya cukup melakukan transaksi secara manual dan offline, sekarang sudah banyak yang bergeser menggunakan media online dan serba otomatis. Hal ini juga terjadi dalam bidang industri keuangan syariah dan sektor riil ekonomi syariah (Riza, 2020). Faktanya, perbankan syariah menanggapinya dengan menghadirkan digital banking, seperti BSM yang memberikan layanan Mandiri Syariah Mobile. Start-up fintech syariah juga memiliki peran penting, sehingga kolaborasi antara fintech syariah dengan bank syariah terbukti dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah, seperti ALAMI syariah yang bekerjasama dengan bank-bank syariah sebagai market aggregator.

Beberapa laporan tahunan ekonomi digital global mengedepankan platform fintech dan e-commerce sebagai infrastruktur pendukung lintas industri seperti perjalanan, makanan, fesyen, dan TI (KNKS, 2019). Pariwisata ramah Muslim tidak hanya berbicara tentang destinasi saja, namun industri pariwisata ramah Muslim memiliki hubungan yang erat dengan industri pendukungnya, serta membentuk value chain yang terdiri dari destinasi pariwisata, transportasi, hotel & akomodasi, restoran, serta tour & travel.

---

[26] Dosen FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Terkait dengan pemesanan hotel syariah di Yogyakarta, saat ini sudah dapat dilakukan menggunakan platform aplikasi seperti Traveloka, Agoda, Pegipegi, booking.com dsb. Pada aplikasi tersebut kita juga bisa menshortir hotel-hotel syariah yang ada di Yogyakarta. Pembayaran pun dapat menggunakan digital banking bank syariah, misalnya melakukan Top-up saldo Traveloka melalui BNI Syariah maupun bank syariah lainnya. Informasi terkait dengan reviu akomodasi halal di Yogyakarta juga bisa didapatkan di tripadvisor dan platform serupa. Paket wisata ramah Muslim juga sudah disediakan oleh perusahaan tour & travel seperti Cheria Holiday dan antarejatour. Sedangkan untuk oleh-oleh berupa makanan maupun fesyen juga sudah dapat dipesan melalui e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dll. Hal ini menunjukkan bahwa Digital Halal Value Chain pada ekosistem pariwisata ramah Muslim di Yogyakarta memiliki potensi yang sangat baik untuk ditingkatkan. Oleh karena itu, keuangan syariah harus masuk sebagai penopang baik dari sisi pembiayaan, pendanaan, maupun layanan perbankan, dan lebih memperhatikan perkembangan teknologi yang sangat pesat di era revolusi industri 4.0.

Terkait dengan akomodasi, beberapa hotel di Yogyakarta sudah menerapkan prinsip Syariah sesuai fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. Seperti Hotel Grand Dafam Rohan Jogja, Hotel Sofyan Inn Unisi, Hotel Alzara Syariah, dll. Meskipun belum tersertifikasi, namun pada praktiknya hotel-hotel tersebut telah memenuhi ketentuan standar halal, ditambah setiap kamar terdapat perlengkapan shalat & Al-Quran, murottal & lagu Islami juga diputar untuk membuat wisatawan Muslim lebih nyaman, serta pelayanan ramah untuk memuliakan tamu hotel.

Dengan melakukan digital branding dan menyediakan paket wisata ramah Muslim yang terintegrasi, akan membantu kesuksesan digital value chain pariwisata ramah Muslim di Yogyakarta. Melihat penghargaan yang diperoleh terkait pariwisata ramah Muslim, menunjukkan prestasi dan potensi yang tinggi untuk menjadikan Yogyakarta sebagai destinasi wisata ramah Muslim terbaik di Indonesia. Namun, ketika melihat laporan akhir kajian pengembangan pariwisata ramah Muslim di Yogyakarta, hasilnya masih belum maksimal. Serta tidak dapat dipungkiri pada tahun 2020 ini sektor pariwisata menurun drastis, karena terkena dampak pandemi COVID19. Meskipun begitu, setelah pandemi ini selesai, jika sektor pariwisata ramah Muslim dijadikan prioritas, maka dapat menjadi gerbong baru bagi lokomotif perekonomian di Yogyakarta.

Wawancara
Kepala Instansi Daerah

Bagaimana visi, rencana, dan program-program terkait ekonomi syariah?

Kepala Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pembangunan perekonomian yang dirumuskan dalam dokumen RPJP atau RPJMD di Provinsi DIY secara spesifik tidak menyebutkan pengembangan ekonomi syariah. Visi pembangunan seperti yang tercantum dalam RPJMD DIY 2017-2022 adalah "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja." Titik tekan pembangunan ekonomi pada peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumber daya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk halnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan DIY, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Gini Index), dan menurunkan ketimpangan antar wilayah (Index Wlliamson). Hal tersebut sejalan dengan isu utama pembangunan DIY yaitu: tingginya kemiskinan, tingginya ketimpangan pendapatan dan tingginya ketimpangan antar wilayah. Terkait dengan ekonomi syariah, Pemda melakukan intervensi diantaranya melalui pembinaan industri olahan pangan (sertifikasi halal) dan juga pembinaan koperasi syariah.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada Periode 2017- 2022 adalah "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja" sedangkan misi Gubernur DIY adalah sebagai berikut ini. Untuk mencapai misi tersebut, Gubernur menetapkan 2 misi. Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah misi 1 yaitu "Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang berkeadilan dan Berkeadaban"

Meningkatnya Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban diantaranya dapat diwujudkan melalui peningkatan kemampuan pendapatan masyarakat. Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat ekonomi masyarakat harus didukung oleh berbagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Disperindag DIY sebagai salah satu OPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Pemerintah Daerah di Bidang perindustrian dan Perdagangan, tentu dukungan tersebut akan diwujudkan melalui Pembinaan pelaku industri dan Perdagangan. Peningkatan skala usaha dan jumlah pelaku usaha di sektor perindustrian dan perdagangan sebagai dampak dari pembinaan kepada pelaku usaha sektor tersebut dan tentu akan berdampak pada serapan tenaga kerja yang kemudian akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Peningkatan skala usaha dan jumlah pelaku usaha di sector perindustrian dan perdagangan yang dibina diantaranya pelaku usaha yang berbasiskan ekonomi syariah dan industri halal. Program pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, baik kegiatan dari Bidang Perindustrian maupun Perdagangan yang terkait pengembangan sektor Ekonomi Syariah dan Industri Halal, diantaranya sebagai berikut: Bidang Industri terdapat Program Pembinaan Industri Kecil dan Menengah kegiatan yang dilaksanakan, di antaranya adalah Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi Halal sertifikasi halal, dengan adanya kegiatan fasilitasi sertifikasi halal IKM dapat memasarkan produknya lebih luas lagi. Selain itu terdapat Kegiatan Pelatihan Agro, bantuan alat IKM untuk Pondok Pesantren. Sedangkan di Bidang Perdagangan terdapat kegiatan Pameran Muslim Fesyen. Rencana kedapan terdapat penambahan kuota halal dan penambahan IKM yang megikuti Pameran Fashion Muslim.

Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rencana Strategis Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY 2017-2022 tidak spesifik mencantumkan perekonomian syariah di dalam program kegiatannya. Hal ini dikarenakan instansi ini lebih menitikberatkan pada performa organisasi berupa pencapaian realisasi investasi secara umum di DIY (tidak spesifik apakah investasi tersebut adalah investasi syariah atau bukan). Namun demikian, kami berupaya untuk memberikan pengalaman dan pelayanan terbaik kepada seluruh pelaku usaha di DIY. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal per Februari 2020 memiliki capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 85,59 dan menyandang predikat baik. Survey dilakukan dalam kurun waktu 1 Februari – 29 Februari 2020 dengan responden sebanyak 138 orang. Sebagai rencana kerja di tahun anggaran 2021, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY merencanakan untuk melaksanakan Bimbingan teknis OSS sebanyak 140 orang untuk menunjang target kenaikan IKM dari 84% ke 85%. Hal ini diharapkan dapat secara tidak langsung mendorong pelaku usaha (termasuk sektor ekonomi syariah) untuk lebih berminat mengembangkan usahanya di DIY.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Visi Dinas Pariwisata DIY yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY tahun 2005 – 2025 adalah sebagai berikut: "Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebagai pusat pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera."

Pengembangan wisata ramah Muslim di DIY tidak hanya dilakukan oleh Dinas Pariwisata DIY sendiri. *Kegiatan-kegiatan* seminar mengenai wisaya halal, penyusunan paket wisata ramah Muslim dilakukan oleh beberapa komunitas dengan mengundang Dinas Pariwisata. BI juga mendukung pengembangan wisata ramah Muslim dan pameran serta pemberian sertifikat halal kepada UMKM secara bersama-sama dilakukan oleh swasta.

Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Visi Bank Indonesia tentang Ekonomi Syariah:
Mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Pusat Ekonomi dan KEuangan Syariah Dunian (melalui berkembangkan ekonomi dan keuangan Indonesia yang adil, bertumbuh sepadan, dan berkesinambungan sesuai dengan nilai-nilai syariah).

Target Capaian Bank Indonesia tentang Ekonomi Syariah:

1. Peningkatan usaha syariah dengan indicator pertumbuhan usaha syariah
2. Pembiayaan keuangan syariah dengan indikator *share* pembiayaan syariah
3. Tingkat kedalaman Pasar Keuangan dengan indikator pertumbuhan pasar uang syariah
4. Tingkat literasi dengan indikator indeks literasi
5. *International standing* dengan indikator inisiasi internasional

Strategi Utama Bank Indonesia tentang Ekonomi Syariah

1. Pemberdayaan Ekonomi Syariah melalui *halal value chain*, kelembagaan dan infrastruktur pendukung,
2. Pendalaman pasar keuangan melalui regulasi, infrastruktur, instrumen, basis investor dan kelembagaan,
3. Penguatan Riset Asesmen dan Edukasi melalui riset dan asesmen, edukasi, dan kelembagaan

Sesuai dengan visi, target capaian dan strategi utama yang dibuat oleh Kantor Pusat tentang ekonomi syariah, Kantor Perwakilan BI DIY akan/telah melakukan berbagai kegiatan agar ekonomi syariah dapat berkembang dengan baik dan implementasi ekonomi syariah sebagai gaya hidup di masyarakat. Adapun upaya yang akan/telah dilakukan adalah mendorong pertumbuhan usaha/ekonomi syariah yang produktif, inklusif dan terintegrasi untuk membangun kemandirian ekonomi umat sesuai prinsip-prinsip ekonomi syariah di tingkat local/daerah. Program tersebut dilakukan secara inklusif dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai komponen lapisan masyarakat baik pemerintah daerah, akademisi, tokoh-tokoh masyarakat maupun pelaku usaha. Di tingkat nasional program-program yang telah dan akan terus dilakukan meliputi:

1. Program Kemandirian Ekonomi Pesantren
2. Program IKRA Indonesia (UMKM Syariah)
3. Program Desa Berdikari
4. Program Sertifikasi Halal
5. Program Holding Bisnis Pesantren
6. ISEF-FESyar
7. Program Edukasi/Kampanye EKSyar
8. Program Edukasi Pengembangan Keuangan Syariah Sosial/Komersial

Di DIY, implementasi program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dilakukan melalui replikasi program di atas. Program dilakukan penguatan kegiatan dan inovasi untuk membangun ekosistem ekonomi syariah sesuai dengan potensi, permasalaha dan kearifan lokal DIY. Adapun kegiatan yang telah/akan dilaksanakan antara lain:

1. Pendapingan dan pelatihan usaha syariah terhadap UKM dengan identifikasi & membangun *data base* UKM potensial yang dilakukan melalui kurasi produk UKM.
2. Melakukan literasi ekonomi syariah, industry keuangan syariah dan *Islamic social finance* yang berkolaborasi bersama regulator, ormas/lembaga dan akademisi dengan membentuk Jogja Berwakaf merupakan gerakan kolaboratif yang diinisiasi Bank Indonesia DIY untuk mendukung program Pemerintah Daerah yaitu pengembangan ekonomi dan pengentasan kemiskinan DIY melalui pemanfaatan *Sosial Islamic Finance* produk Wakaf. Ruang lingkup kegiatan meliputi memberikan informasi mengenai manfaat system wakaf dalam proses pembangunan ekonomi, memfasilitasi proses pengumpulan dan penyaluran wakaf serta konsultasi bagi pemanfaatan aset wakaf secara produktif. Selain itu, BI DIY juga memfasilitasi terbentuknya ekosistem pendukung proses pengelolaan aset wakaf melalui pembentukan mekanisme koordinasi antara lembaga. Anggota Jogja Berwakaf yaitu Bank Indonesia, OJK, Sekretaris Daerag DIY, Dinas Koperasi dan UKM DIY, Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY, Kemenag DIY, BWI, GWI, Bank Indonesia (DEKS, KPw DIY), MES DIY, LAZ DIY a.I Rumah Zakat, Dompet Dhuafa, Human Initiative, Lazis NU DIY, BMM, Baznas DIY, FEB UIN Sunan Kalijaga, Asbisindo, Baitul Mal BMT Beringharjo dan G2RT. Berbagai kegiatan literasi dan sosialisasi yang dilakukan yakni dengan menampilkan bebagai produk-produk unggulan BERWAKAF dari anggota Gerakan Jogja Berwakaf dan lelang wakaf yaitu melakukan penawaran lelang wakaf produktif kepada audiens terhadap program yang ditawarkan oleh konsorsium gerakan Jogja Berwakaf. Selain itu, juga dilakukan seimar untuk mencari solusi program pengembangan ekonomi DIY berbasis wakaf guna berperan serta dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Kemudian, *literacy instrument* wakaf produktif untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat terhadap pentingnya wakaf produktif sebagai alternative pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
3. Fasilitas sertifikasi halal dalam rangka mendorong peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM, baik pasar domestic maupun pasar global sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan UMKM. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Bank Indonesia dengan BP POM DIY, LP POM DIY, MUI, Kementerian Agama DIY, MES DIY, G2R Tetrapreneur
4. Memberikan apresiasi kepada para pelaku ekonomi syariah yang telah berjuang memberikan edukasi dan sosialiasi ekonomi syariah di masyarakat melalui program penghargaan tokoh ekonomi syariah. Tujuan program tersebut yaitu untuk menjaring Tokoh/Pelaku pengembangan ekonomi syariah terbaik sebagai *role model* agen pengembangan ekonomi syariah. Kegiatan ini bekerjasama dengan MUI DIY dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIY. Tokoh /pelaku pengembangan ekonomi syariah terpilih akan mengikuti lomba tingkat nasional (*road to* ISEF). Kriteria nominasi yang diinginkan adalah: Peranan yang dilakukan dalam mengubah paradigm masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah, Konsep dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Dampak dari Aktivitas dan Keberlangsungan dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah.
5. Program *halal value chain* (HVC). Melaksanakan kegiatan yang menghasilkan nilai tambah pada setiap proses yang meliputi proses produksi, distribusi, dan pemasaran barang dan/atau jasa antara klaster pangan dan pondok pesantren, yang memenuhi aspek kepatuhan terhadap nilai dan prinsip dasar syariah. Realisasi kegiatan hilirisasi melalui sinergi program Klaster-HVC berupa kemitraan *supply* kebutuhan beras dari beberapa pesantren binaan KPw BI DIY.
6. Kemandirian ekonomi-pesantren dengan melakukan program pendampingan terhadap pesantren secara intensif. Adapun *output* program tersebut adalah mencapai kesejahteraan dan kemandirian ekonomi pesantren dalam rangka pengembangan unit usaha koperasi sebagai induk usaha koperasi pesantren DIY dan mencapai usaha yang profesional guna mendukung operasional pesantren serta

unit pendidikan belajar-mengajar yang terarah dan sistematis sehingga keberadaan pesantren mampu menjadi solusi bagi kemajuan bangsa dan negara untuk mensejahterakan masyarakat. Sampai dengan tahun 2020, terdapat 14 (empat belas) pesantren yang sudah menjadi mitra pendampingan BI DIY dan saat ini sudah terbentuk forum bisnis pesantren yang menjadi langkah awal pembentukan koperasi *holding* bisnis pesantren.

7. Berkolaborasi dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIY dan organisasi lainnya untuk melaksanakan berbagai kegiatan bernuansa syariah seperti *Jogja Halal Fest* sebagai upaya untuk memberikan edukasi dan sosialisasi keberadaan ekonomi syariah di DIY dan mengumpulkan berbagai komunitas penggerak syariah baik akademisi, pelaku usaha maupun lembaga zakat.
8. Melaksanakan *pilot project* program berdikari di Desa Nglanggeran Kecamatan Pathuk Gunungkidul yang bekerjasama dengan Bumdes Desa Nglanggeran Desa Berdikari yaitu pengembangan ekosistem rantai nilai halal (*halal value chain*) berbasis masyarakat desa yang terintegrasi dengan penguatan pembiayaan melalui edukasi dan pendampingan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.
9. Rencana ke depan Bank Indonesia DIY selain mengoptimalkan program kolaborasi yang telah dilakukan juga akan melakukan inovasi menggunakan teknologi informasi guna mendukung pengembangan dan pertumbuhan ekonomi syariah DIY.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional Jawa Tengah dan DIY

Visi:
Mewujudkan industri keuangan syariah yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan mendukung stabilitas sistem keuangan serta berdaya saing tinggi.

Misi:

1. Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi
2. Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan
3. Memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk
4. Memperbaiki kuantitas dan kualitas SDI & TI serta infrastruktur lainnya
5. Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat

Program pengembangan sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah:

1. Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi
   - Sosialisasi kebijakan modal inti minimum perbankan syariah dan forum pemegang saham
   - Pemantauan pemenuhan modal inti minimum perbankan syariah
   - Optimalisasi peran dan peningkatan komitmen BUK untuk mengembangkan layanan perbankan syariah hingga mencapai share minimal di atas 10% aset BUK induk
2. Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan
   - Optimalisasi pengelolaan dana wakaf/zakat/infaq/shodaqoh melalui perbankan syariah
   - Mendorong keterlibatan bank syariah dalam pengelolaan dana pemerintah pusat/daerah dan dana BUMN/BUMD
3. Memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk
   - Mendorong dukungan infrastruktur BUK Induk dalam penyediaan produk mobile banking syariah
   - Melakukan reviu terhadap Rencana Bisnis UUS
4. Memperbaiki kuantitas dan kualitas SDI & TI serta infrastruktur lainnya
   - Pemantauan anggaran pendidikan SDI perbankan syariah dan realisasi program pendidikan yang diikuti SDI
   - Mendorong dukungan infrastruktur TI BUK Induk dalam penyediaan produk mobile banking syariah
5. Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat
   - Penyelenggaraan kegiatan edukasi, pameran, maupun sosialisasi
   - Memperkuat kolaborasi dengan bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) serta pemangku kepentingan utama dalam peningkatan literasi keuangan syariah.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

BAZNAS DIY sebagai lembaga pemerintah non-struktural dalam menentukan visi, misi dan rencana kegiatan syariah, termasuk keuangan sosial syariah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mendasarkan pada ketentuan syar'i. Sesuai aturan, BAZNAS berwenang melakukan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan DSKL agar tepat sasaran, efektif dan efisien dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus membantu dalam penanggulangan kemiskinan. Keuangan dikelola dengan amanah, transparan dan akuntabel dengan sistem PSAK 109. Pelaporan keuangan dilakukan audit oleh kantor akuntan publik (KAP) maupun audit syariah oleh kementrian agama.

Visi:
Terwujudnya BAZNAS yang profesional, efektif dan efisien serta terpercaya di Daerah Istimewa Yogyakarta

Misi:
1. Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS)
2. Mudahnya pelayanan bagi muzakki dan mustahik
3. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
4. Intensifikasi dan ekstensifikasi pengumpulan dan pendayagunaan Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS)
5. Menjalin kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat

Program-Program:
1. DIY Cerdas
   Penyaluran di bidang pendidikan ini bertujuan untuk membantu mustahik dalam meningkatkan jenjang pendidikan mereka sampai pada tingkat tertentu sehingga memiliki kapasitas lebih dalam membangun ekonominya. Bentuk penyaluran di bidang pendidikan ini meliputi:
   - Bantuan biaya pendidikan
   - Pembinaan kepribadian/karakter
2. DIY Peduli
   Penyaluran di bidang sosial kemanusiaan yang bersifat sesaat atau sementara waktu yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum dari mustahik prioritas dan masyarakat korban bencana alam atau konflik sosial. Bentuk penyaluran berupa:
   - Bantuan kebutuhan pangan minimum
   - Bantuan kebutuhan pakaian minimum
   - Bantuan kebutuhan perumahan minimum
   - Bantuan untuk transportasi orang terlantar
   - Bantuan untuk mahar pernikahan.
   - Bantuan lain yang bersifat emergency/ darurat

   Dengan terbentuknya tim BAZNAS TANGGAP BENCANA DIY diharapkan dapat semakin melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan.
3. DIY Taqwa
   Penyaluran di bidang dakwah bertujuan untuk menguatkan akidah kaum muslimin dari bahaya paham-paham yang merusak akidah islam (sekularisme, liberalisme, dan pluralisme agama) dan bahaya pemurtadan, serta menguatkan akidah kelompok muallaf. Bentuknya meliputi:
   - Pendidikan dan keterampilan bagi para da'i dan calon da'i
   - Pengembangan dakwah di masjid, majelis taklim, sekolah, dan pondok pesantren/panti asuhan
   - Bantuan pembangunan masjid/mushalla di daerah miskin, terpencil dan rawan perusakan akidah
   - Bantuan pengembangan dakwah di daerah terpencil atau rawan perusakan akidah
   - Pembekalan penguatan akidah Islam dan ibadah bagi para mualaf
4. DIY Sehat
   Penyaluran di bidang kesehatan bertujuan untuk membantu masyarakat dalam pengobatan dan juga rehabilitasi. Bentuk bantuannya meliputi:
   - Bantuan biaya pengobatan
   - Bantuan kursi roda
   - Bantuan alat berjalan
   - Bantuan alat pendengaran
   - Bantuan kesehatan lain sesuai observasi.

5. DIY Sejahtera
   Penyaluran di bidang ekonomi (DIY Sejahtera) atau penyaluran yang bersifat produktif. Penyaluran di bidang ekonomi ini bertujuan untuk membantu mustahik dalam meningkatkan kemampuan ekonominya. Bentuknya meliputi:
   - Pelatihan keterampilan usaha atau profesi
   - Bantuan modal/ dana untuk usaha atau akses pekerjaan
   - Pendampingan pengelolaan usaha atau pengembangan karir, dll

Bagaimana peluang pengembangan sektor ekonomi Syariah, industri halal, dan sektor keuangan syariah?

Kepala Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Sesuai dengan keunggulan DIY, potensi ekonomi DIY terutama didorong oleh: pendidikan dan pariwisata. Pendidikan (banyaknya mahasiswa, banyaknya pusat studi halal dan keuangan syariah) bisa mendukung:

1. Halal supply chain (kampus sebagai pelaku edukasi, mahasiswa sebagai potensi pasar mahasiswa yang berkesadaran halal tinggi)
2. Keuangan syariah (kampus sebagai pelaku edukasi, mahasiswa sebagai pasar *funding* lembaga keuangan syariah terutama bank syariah sebagai lewat dana dari orang tua)
3. UMKM (kampus sebagai pembina UMKM, mahasiwa berpotensi sebaga menjadi mitra *financing* lembaga keuangan syariah dengan aneka start up dan kreativitasnya)
4. Ekonomi digital (kampus sebagai tempat R&D, mahasiswa sebagai pelaku bisnis digital baik sebagai penjual maupun pembeli)

Pariwisata (hotel, restoran, lokawisata, dll)

1. Berpotensi sebagai pelaku halal supply chain (hotel dan wisata syariah)
2. Berpotensi sebagai mitra financing lembaga keuangan syariah
3. Berpotensi memberdayakan UMKM
4. Berpotensi ditingkatkan melalui ekonomi digital (aneka platform booking perjalanan dan hotel digital dll).

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam bidang perindustrian:
Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup besar yaitu mencapai 237 jiwa. Dari seluruh penduduk Indonesia, penduduk dengan agama Islam menempati urutan pertama yaitu mencapai 87,2%. Jumlah penduduk beragama Islam yang cukup besar serta kesadaran akan makanan halal semakin meningkat dapat menjadi pasar yang besar bagi pelaku usaha produk halal.

Terbitnya Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia membuat kesadaran masyarakat akan produk halal meningkat, permintaan produk halal pun juga ikut meningkat ini menjadikan peluang bagi pelaku usaha. Pelaku usaha menjadi sadar salah satu cara untuk memenangkan pasar adalah dengan memiliki sertifikat halal untuk produk yang dijual.

Dalam bidang perdagangan:
Berkembangnya produk halal sebagai gaya hidup Muslim menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk halalnya. Memotivasi para pelaku usaha dan Wirausaha baru untuk menciptakan peluang usaha produk halal. Kerana dengan produk halal IKM dapat memasarkan produknya lebih luas lagi. Meningkatnya permintaan pasar luar negeri akan produk halal juga membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk mempromosikan produk halal Indonesia di luar negeri, dan standarisasi mutu halal food bertaraf internasional.

Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Adanya pandemic covid-19 di seluruh dunia memiliki pengaruh pada sisi penghimpunan dana perbankan di DIY. Berdasarkan Laporan Bank Indonesia Februari-Maret 2020, pertumbuhan simpanan perbankan di DIY masih berada di bawah target. Pertumbuhan DPK perbankan di DIY pada triwulan IV 2019 hanya tumbuh 6.6% (yoy), lebih rendah dari perkiraan pertumbuhan DPK nasional pada kisaran 7-9% (yoy). Perlambatan pertumbuhan DPK disebabkan oleh berkurangnya pendapatan yang bisa dibelanjakan (disposable income) rumah tangga dan suku bunga simpanan yang berkurang. Seiring dengan perlambatan ekonomi nasional maupun DIY, pertumbuhan pendapatan masyarakat cenderung berkurang. Hal ini menyebabkan konsumsi masyarakat menjadi terbatas dan cenderung mengurangi kemampuan masyarakat untuk meningkatkan simpanan. Selain itu, tren penurunan suku bunga acuan menyebabkan suku bunga simpanan perbankan dalam tren menurun. Hal ini menyebabkan instrumen deposito perbankan menjadi bersaing ketat dengan alternatif investasi lain yang cenderung menawarkan imbal hasil yang lebih kompetitif.

Sejalan dengan kinerja perbankan secara umum, kinerja perbankan syariah di DIY turut mengalami perlambatan. Pada triwulan IV 2019 pertumbuhan pembiayaan melambat menjadi 1.13% (yoy) meskipun pertumbuhan simpanan masih tumbuh solid pada 14.59% (yoy). Perlambatan pertumbuhan pembiayaan dipengaruhi oleh pembiayaan macet (NPF) yang masih tinggi sepanjang tahun 2019. Tingkat NPF pada Triwulan IV tercatat mencapai 4.01% lebih tinggi dibandingkan NPF Triwulan III 2019 sebesar 2.13% (yoy). Walaupun dalam tren melambat, namun kinerja perbankan syariah masih relatif baik dibandingkan dengan rata-rata kinerja bank umum lainnya. Meskipun tumbuh melambat, pangsa aset bank syariah di DIY mencapai 9,6% dari total aset bank umum di DIY dan pangsa DPK bank syariah di DIY mencapai 9,7% dari total DPK bank umum di DIY. Kinerja perbankan syariah yang masih bagus di DIY menurut Asbisindo dikarenakan tingginya tren hijrah masyarakat Indonesia untuk memilih bank dan gaya hidup syariah sehingga hal ini menjadi peluang yang bisa digarap oleh perbankan syariah di DIY. Selain itu, perkembangan dan potensi industri halal yang luas, dukungan pemerintah serta dukungan dari pemerintah, antara lain melalui Komite Nasional Keuangan Ekonomi Syariah (KNEKS). Namun, peluang itu bukannya tidak dibayangi oleh kendala. Kendala yang membayangi DIY adalah kewaspadaan terhadap ekonomi domestik yang memiliki potensi terkena pengaruh dari ekonomi politik nasional maupun global. "Kualitas sumber daya manusia (SDM) dan teknologi informasi (TI) yang masih harus ditingkatkan, serta tingkat literasi masyarakat terhadap perbankan syariah juga menjadi kendala". Dalam menghadapi peluang dan kendala ini, para insan perbankan syariah harus melakukan penguatan dan perbaikan berkaitan dengan pengetahuan mengenai dinamika di era revolusi industri 4.0. Hal itu perlu dilakukan agar mampu mempertajam fokus bisnis untuk menghasilkan bisnis yang sehat, profitable, sustain, serta mampu membaca dan merespons isu tentang digitalisasi perbankan syariah.

Terkait dengan potensi secara umum, DIY cukup beruntung memiliki berbagai universitas yang sangat support dengan pengembangan ekonomi syariah yaitu UIN Sunan Kalijaga dan UII sebagai sebuah universitas yang memiliki prodi ekonomi syariah dan memiliki banyak program edukasi serta sosial kemasyarakatan dalam rangka pengembangan ekonomi syariah khususnya di DIY.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Komposisi masyarakat DIY bagaikan miniaturnya Indonesia, di Yogyakarta berkumpul beberapa etnis dan agama yang berbeda serta mahasiswa dari berbagai provinsi di Indonesia di mana masyarakat di DIY hidup berdampingan secara harmoni dengan saling hormat-menghormati. DIY mempunyai destinasi wisata yang sangat indah, baik *nature* (alam), *culture* (budaya) maupun *manmade* (buatan), dan populasi terbesar adalah muslim. Karakteristik ini menjadikan DIY mempunyai peluang yang cukup besar bagi pengembangan wisata ramah Muslim. Sarana dan prasarana ibadah seperti masjid dan mushola tersedia baik di pemukiman penduduk maupun kawasan wisata, sehingga memudahkan wisatawan untuk beribadah. Restoran dan rumah makan sebagian banyak yang bersertifikat halal, di mana sertifikat halal bisa dilihat di *website* LPPOM MUI. Beberapa hotel yang sudah bersertifikat halal untuk *kitchen* antara lain:

1. Grand Dafam Rohan
2. Sofyan Unisi
3. Foriz
4. Cakra Kusuma
5. Fave Malioboro

6. Eastpark
7. Pesona Malioboro

Dari sisi historis, Keraton Yogyakarta dahulunya merupakan Kerajaan Mataram Islam sesudah Kerajaan Mataram Hindu, dan memiliki peninggalan situs bersejarah yang bisa dikembangkan menjadi wisata religi yaitu adanya bangunan arsitektur bernuansa Jawa yang disebut Masjid Pathok Negoro yang bermakna penanda batas perbatasan wilayah Keraton Yogyakarta yaitu:

1. Majid Taqwa Wonokromo di Pleret Bantul
2. Majid Sulthoni Plosokuning di Minomartani, Ngaglik, Sleman
3. Masjid Jami' An-Nur Mlangi di Mlangi, Nogotirto, Kecamatan Gamping, Sleman
4. Masjid Nurul Huda di Dongkelan, Bantul
5. Majid Ad-Dorojatun Babadan, Banguntapan Bantul

Adanya *kegiatan-kegiatan* budaya bernuansa Islami antara lain:

1. Sekaten yang berasal dari bahasa Arab yaitu Shahadatain, di mana *kegiatan* ini merupakan pameran untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan 2 kalimat syahadat.
2. Apem ruwahan yaitu membuat apem sebelum bulan ramadhan, dimaksudkan untuk meminta affuun yaitu ampunan Allah SWT.
3. Gunungan, dimaksudkan untuk sedekah raja, di mana gunungan yang berisi hasil bumi dibagikan kepada rakyat.

Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengembangan sektor ekonomi syariah dan industri halal akan berkembang pesat jika perencanaan yang sudah dibuat dilakukan secara konsisten, dengan beberapa keunggulan sebagai berikut:

1. Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan wisata,
2. Populasi penduduk Muslim di DIY cukup besar menurut data BPS tahun 2010 disebutkan sebesar 92% atau sebanyak 3.179.129 dari 3.457.491 jiwa,
3. Memiliki Perguruan Tinggi yang focus di bidang ekonomi syariah sudah cukup banyak apalagi DIY menjadi barometer kota pendidikan secara nasional,
4. Memiliki tokoh-tokoh ekonomi syariah baik lokal dan nasional di DIY,
5. Keberadaan Keraton Ngayogyokarto sebagai simbol kerajaan Islam di DIY,
6. FIlosofi ekonomi syariah saat ini di DIY telah menjadi gaya hidup sehingga ini menjadi memudahkan dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi syariah di DIY,
7. Maraknya geliat kegiatan baik dari sisi usaha, pendidikan, jasa yang dikaitkan dengan prinsip syariah.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional Jawa Tengah dan DIY

Secara umum, hingga akhir tahun 2019, kondisi makro ekonomi Jawa Tengah masih sangat baik, tercermin pada pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 5.34%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4.97%. Namun demikian, akibat Covid-19, pertumbuhan ekonomi Triwulan I/2020 turun menjadi 2.60%, lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 2.97%. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut mencerminkan pengembangan sektor keuangan syariah yang masih potensial. Peluang pengembangan sektor keuangan syariah juga terpengaruh dengan pengembangan pada beberapa sektor usaha seperti sektor pariwisata, sektor akomodasi dan penyediaan makan minum, sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian dan sektor konstruksi. Meskipun sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang terdampak Covid-19, namun Lembaga Keuangan Syariah perlu memetakan industri-industri yang terdampak dan melakukan selective growth, sehingga Lembaga Keuangan Syariah mampu berkontribusi dalam proses recovery perekonomian.

Selain itu, tingkat inflasi Provinsi Jawa Tengah masih sebesar 2.89% (yoy), meskipun pada April 2020 Jawa Tengah mengalami deflasi sebesar 0.01% (mtm). Penyebab utama inflasi antara lain peningkatan harga gula pasir, bawang merah, emas perhiasan, beras dan tempe. Sehubungan dengan hal tersebut, Lembaga Keuangan Syariah dapat melakukan ekspansi bisnis pada sektor-sektor yang masih menggeliat di tengah pandemi Covid-19.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peluang pengembangan sektor ekonomi syariah akan terus berkembang. Peluang pengembangan sektor ekonomi syariah, industri halal, serta keuangan syariah, sejalan dengan visi misi BAZNAS DIY, sehingga dalam implementasi kegiatan internal & eksternal juga mendasarkan prinsip syariah, misalnya penggunaan perbankan syariah dalam transaksinya, penghimpunan dan pentasyarufan juga mengacu syariah. BAZNAS juga membuat program pemberdayaan syariah, seperti penyaluran ke sektor ekonomi untuk mustahik, beasiswa, kerjasama pengembangan usaha kecil dilingkungan pondok pesantren, penguatan takmir masjid dan lain-lain.

Bagaimana tantangan utama yang saat ini dihadapi dalam mengembangkan sektor ekonomi syariah, industri halal, dan sektor keuangan syariah?

Kepala Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tantangan utama adalah masalah edukasi dan sosialisasi agar kesadaran terhadap indutri halal dan keuangan syariah meningkat.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam bidang perindustrian:
Pelaku usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta didominasi oleh pelaku usaha kecil dan menengah (IKM) untuk kepengurusan halal yang relatif mahal dan relatif lama menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha ini. Pelaku usaha kecil dan menengah belum banyak yang mengetahui tentang pentingnya produk halal.

Dalam bidang perdagangan:
Adanya UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia membuat seluruh pelaku usaha baik didalam negeri dan di luar negeri membuat produk halal, ini akan menyebabkan persaingan usaha di daerah karena seluruh produk dari dalam maupun luar yang berlabel halal akan masuk didaerah. Pelaku usaha harus meningkatkan kualitas produk halalnya agar dapat bersaing dengan produk halal dari luar daerah maupun luar negeri. Maraknya fintech (system financial berbasis teknologi di era digital) dikalangan pelaku usaha yang conventional dan syariah juga menjadi tantangan tersendiri.

Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tantangan utama yang dihadapi DIY dalam mengundang masuknya investasi dari dalam/luar negeri dalam pengembangan sektor ekonomi syariah adalah dari sisi mengedukasi masyarakat untuk lebih paham dalam pemanfaatan ekonomi syariah, selama ini berkembang pemahaman di masyarakat bahwa antara sistem ekonomi syariah dan konvensional hanya berbeda mengenai penamaan saja. Hal ini dapat ditindaklanjuti oleh KNEKS dengan memberdayakan perguruan tinggi yang concern terhadap pengembangan ekonomi syariah untuk lebih memperkenalkan berbagai program-program pengembangan ekonomi syariah di DIY secara umum.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tantangan dalam pengembangan wisata ramah Muslim di DIY adalah:

1. Belum adanya regulasi yang mengatur secara komprehensif tentang wisata ramah Muslim
2. Masih adanya anggapan bahwa wisata ramah Muslim belum/bukan pangsa pasar yang besar di DIY
3. Masih adanya ketakutan pelaku wisata adanya wisata ramah Muslim akan menurunkan pangsa pasar wisata konvensional.

Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Menempatkan ekonomi syariah sebagai *lifestyle* bukan sekedar ajaran agama
2. Menempatkan kredibilitas sistem ekonomi dan keuangan syariah di masyarakat

3. Memperluas variasi usaha halal di mana saat ini masih terbatas dan terkonsentrasi pada sektor usaha dan kegiatan tertentu
4. Upaya optimaliasi peran pengusaha dan dukungan pemerintah/regulator terhadap sektor keuangan syariah perlu ditingkatkan
5. Mengurai serta memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar
6. Kerangka ketentuan, fatwa dan standarisasi yang belum memadai integrasi
7. Integrasi kemampuan terhadap pengetahuan tentang ekonomi syariah dan pengetahuan umum khususnya dalam bidang manajemen usaha

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional Jawa Tengah dan DIY

1. Skala usaha dan permodalan perbankan syariah yang masih relatif kecil, apabila dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal tersebut berdampak pada tingkat efisiensi yang rendah dan membatasi ruang gerak industri dari sisi keragaman produk dan/atau aktivitas yang ditawarkan kepada nasabah
2. Biaya dana yang mahal yang berdampak pada keterbatasan segmen pembiayaan. Seiring dengan keterbatasan permodalan dan struktur pendanaan perbankan syariah yang secara umum belum se-efisien bank umum konvensional (BUK) tercermin dari komposisi cash and saving accounts (CASA) yang lebih rendah, sehingga secara umum model bisnis perbankan syariah fokus pada segmen ritel, termasuk UMKM dan konsumer, dan kurang memiliki variasi segmen pembiayaan seperti kepada korporasi dan investasi
3. Produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai ekspektasi masyarakat. Walaupun variasi produk dan layanan perbankan syariah cukup berkembang, terutama pada segmen ritel, namun penerimaan masyarakat belum sebaik pada produk BUK antara lain karena faktor fitur yang belum selengkap produk serupa di BUK, harga dan kualitas layanan yang belum setara dengan BUK, serta faktor akses dan pengenalan nasabah yang terbatas
4. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai serta teknologi informasi (TI) yang belum dapat mendukung pengembangan produk dan layanan. SDM dan TI merupakan dua faktor utama yang menentukan keberhasilan pengembangan produk dan layanan perbankan, serta operasional perbankan secara umum. Disadari bahwa kualitas SDM dan TI pada bank-bank syariah secara umum masih dibawah kualitas dan kapasitas SDM serta TI perbankan konvensional. Di samping itu, perbankan syariah menghadapi tantangan tersendiri dalam memenuhi kualitas dan kapasitas SDM dan TI yang mampu memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah
5. Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap jasa yang ditawarkan perbankan syariah menjadi salah satu permasalahan mendasar, sehingga perbankan syariah juga sering menghadapi mispersepsi masyarakat antara lain terkait kerumitan akad dan istilah serta berbiaya mahal

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Regulasi pemerintah setempat dan turunannya berperan sangat penting dalam mengembangkan sektor ekonomi syariah. Tantangan yang dihadapi utamanya adalah:

1. Masih rendahnya kesadaran kaum aghniya untuk berzakat, sehingga pentasyarufan dan pemberdayaan eknomi syariah juga terbatas
2. Belum sepenuhnya kalangan dunia usaha, perbankan dan industri di daerah mau bersinergi dan kerjasama dalam pemberdayaan masyarakat, dengan alasan keuangan tersentral dan menjadi kebijakan pusat
3. Belum adanya dukungan dari pemda yang memadai, khususnya menyangkut regulasi daerah yang mendukung, serta masih menganggap BAZNAS seperti ormas, belum diposisikan sebagai lembaga pemerintah yang semestinya
4. Koordinasi dalam kegiatan ekonomi syariah yang masih terbatas

Daerah Istimewa Yogyakarta

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Ekonomi Pesantren

No	Nama Pesantren	Deskripsi Program
1	Pondok Pesantren Al Munawwir, Sewon	Koperasi primer
2	Muhammadiyah Boarding School (MBS) Prambanan, Prambanan	Sektor usaha air minum, perdagangan, dan laundry
3	Mualimat, Ngampilan	Sektor usaha perdagangan
4	Mualimin, Patangpuluhan - Yogyakarta	Sektor air minum
5	PP Al-Hikmah, Karangmojo Gunungkidul	Sektor usaha perdagangan dan koperasi primer
6	PP Nurul Haromain, Kulon Progo	Sektor usaha jasa hiburan dan perdagangan
7	PP Darul Quran, Gunungkidul	Sektor Koperasi primer, air minum, dan daur ulang sampah
8	PP Sunan Pandanaran, Sleman	Sektor usaha perdagangan
9	PP Ali Maksum Krapyak, Krapyak Kulon Bantul	Sektor usaha perdagangan
10	PP Nurul Ummah, Kotagede	Sektor usaha perdagangan
11	MBS Pleret, Bantul	Sektor usaha *mini market* dan *laundry*
12	Ponpes Alimdad, Pandak Bantul	Sektor usaha air minum dan *mini market*
13	PP Al Mumtaz, Pathuk - GK	Sektor usaha air minum dan *mini market*
14	PP Madania, Bantul	Sektor usaha perdagangan

Daftar Usaha-Usaha Syariah yang Dikelola Pondok Pesantren

No.	Nama Pesantren	Nama Unit Usaha yang dikelola Santri	Deskripsi
1	Pondok Pesantren Al Munawwir, Sewon	Koperasi primer	▪ Pembenahan koperasi primer ▪ Penguatan kelembagaan dan administrasi keuangan koperasi primer

No.	Nama Pesantren	Nama Unit Usaha yang dikelola Santri	Deskripsi
2	Muhammadiyah Boarding School (MBS) Prambanan, Prambanan	Air minum, Koperasi primer, dan *laundry*	▪ Penguatan kelembagaan dan administrasi keuangan ▪ Pendirian koperasi primer ▪ Mendapatkan bantuan alat produksi roti dan air minum serta bantuan sertifikasi halal produk serta tersedianya ayanan non-tunai
3	Mualimin, Patangpuluhan - Yogyakarta	Air minum	▪ Sertifikasi halal air minum ▪ Penguatan kelembagaan dan administrasi keuangan dan layanan non tunai
4	PP Al-Hikmah, Karangmojo Gunungkidul	*Mini market* dan koperasi primer	▪ Pendirian koperasi primer ▪ Penguatan kelembagaan dan administrasi keuangan, ▪ Mendapatkan bantuan pengelolaan *mini market* dan sertifikasi halal produk
5	PP Nurul Haromain, Kulon Progo	Usaha jasa hiburan dan *mini market*	▪ Fasilitas penguatan kelembagaan dan administrasi keuangan, ▪ Bantuan alat musik gambus, tenda dan genset ▪ Bantuan pengelolaan *mini market* dan sertifikasi halal produk
6	PP Darul Quran, Gunungkidul	Koperasi primer, air minum, dan daur ulang sampah	▪ Pendirian koperasi primer serta penguatan kelembagaan dan administrasi keuangan, ▪ Bantuan fasilitas usaha air minum dan alat transportasi air minum ▪ bantuan alat produksi olahan sampah, ▪ layanan non tunai dan sertifikasi halal produk
7	MBS Pleret, Bantul	Usaha *mini market* dan laundry	▪ Bantuan sarana prasarana *laundry* syariah, ▪ Penguatan kelembagaan dan administrasi keuangan ▪ Pembuatan dan pengelolaan *mini market*
8	Ponpes Alimdad, Pandak Bantul	Usaha air minum dan *mini market*	▪ Penguatan kelembagaan dan administrasi keuangan ▪ Bantuan sarana prasarana alat kemasan air minum dan sertifikasi halal produk ▪ Pembuatan dan pengelolaan *mini market*

No.	Nama Pesantren	Nama Unit Usaha yang dikelola Santri	Deskripsi
9	PP Al Mumtaz, Pathuk - GK	Usaha air minum dan *mini market*	▪ Penguatan kelembagaan dan administrasi keuangan ▪ Bantuan sarana prasarana alat kemasan air minum dan sertifikasi halal produk ▪ Bimtek pengelolaan *mini market*
10	PP Madania, Bantul	Usaha perdagangan	▪ Bantuan sertifikasi halal produk dari unit usaha pesantren ▪ Implementasi QRIS

Provinsi

Sulawesi Selatan

Sekilas

tentang Ekonomi Syariah di Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi pengembangan ekonomi syariah melalui sektor keuangan syariah dan industri halal. Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam (sekitar 88.33%), kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk mengkonsumsi makanan-minuman halal, menggunakan jasa keuangan syariah dan mengadopsi tren gaya hidup halal seperti fesyen Muslim dan kuliner halal. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan Aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah yaitu masing-masing sebesar 11.82% (yoy) dan 18.51% (yoy) pada periode Juni 2020 (OJK, 2020). Sementara pangsa aset perbankan syariah di Provinsi Sulsel merupakan yang terbesar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu sebesar 15.3% (yoy) pada akhir 2019. Di samping sisi keuangan komersial, Sulawesi Selatan juga memiliki perhatian terhadap keuangan sosial dimana penghimpunan wakaf di sana mencapai hingga 23 persen dari penghimpunan nasional dan merupakan kontributor tanah wakaf terluas kedua secara nasional dengan luasan mencapai 102,000 hektar.

Dilihat dari posisi geografisnya sebagai "Pintu Gerbang Kawasan Timur Indonesia", Provinsi Sulsel dapat didorong menjadi sentra kawasan industri halal di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Di sektor pariwisata ramah Muslim, provinsi Sulsel juga termasuk salah satu Top 10 Destinasi Wisata ramah Muslim di Indonesia menurut Kementerian Pariwisata pada tahun 2018. Pengembangan industri halal di sana dapat dimulai dengan mengembangkan sektor pariwisata ramah Muslim serta sektor makanan-minuman halal dan pertanian. Objek yang ditawarkan bervariasi, seperti wisata alam, sejarah, dan konvensi. Pemerintah provinsi sendiri telah berusaha mendukung pariwisata daerah dengan membangun infrastruktur terutama jalan dan rumah sakit. Sementara dengan kekayaan kuliner yang beragam potensi sektor makanan-minuman halal di Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki modal yang kuat. Dikenal dengan julukan "lumbung pangan nasional" dan daerah kepulauan, Provinsi Sulsel memiliki komoditas pertanian dan laut yang diekspor. Komoditas tersebut utamanya bertumpu pada industri hulu seperti kakao, kopi, ikan, rumput laut, dan hasil laut lainnya. Ke depannya, pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas tersebut merupakan strategi untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus mengembangkan industri halal di Sulawesi Selatan.

Regulasi Tingkat Daerah
di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah

Peraturan Daerah terkait Keuangan Syariah	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar terkait *Spin Off* Unit Usaha Syariah (sedang dibicarakan)
Peraturan Daerah terkait Industri Halal	Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) DPRD Sulawesi Selatan tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal (sedang proses rapat dengar pendapat)
Peraturan Daerah terkait Fesyen Muslim	Belum ada
Peraturan Gubernur terkait Pariwisata ramah Muslim	Belum ada
Peraturan Gubernur terkait Pengelolaan Zakat	Belum ada

Rencana Pemerintah Daerah
di Sektor Ekonomi Syariah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 di Provinsi Sulawesi Selatan memfokuskan pada "Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter" dengan 5 misi utama yaitu:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan

Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Inflasi		Tingkat Pengangguran		Tingkat Kemiskinan		Konsumsi RT		Konsumsi Pemerintah		Investasi		Ekspor		Impor	
2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
7,07%	6,92%	3,50%	2,35%	5,34%	4,97%	8,87%	8,56%	6,79%	6,82%	6,21%	6,97%	5,72%	5,67%	2,50%	0,80%	2,41%	4,94%

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Penekanan dan skala prioritas pembangunan pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 secara umum bertujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
2. Meningkatkan aksesibilitas wilayah pelosok dan konektivitas antar wilayah
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata antar lapisan dan antar wilayah
4. Meningkatkan kualitas SDM secara inklusif
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup

Program-Program Unggulan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023

- Program Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan pendapatan daerah
- Program Peningkatan Kesejahteraan dan Kinerja Aparatur
- Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik
- Program Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
- Program Perencanaan dan Pengembangan Pemukiman, PSU dan Transportasi
- Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan serta Jembatan
- Program Ketahanan Energi

Isu Strategis RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023

- Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Selatan
- Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian
- Pemerataan perdapatan bagi warga Sulawesi Selatan
- Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas
- Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berlimpah

▪ Program Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan ▪ Program Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan ▪ Program Pengkajian, Pengembangan dan Pelestarian Nilai Nilai Budaya ▪ Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana & Prasarana Pertanian ▪ Program Peningkatan Produksi dan Produktifitas Ternak ▪ Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor ▪ Program Pengembangan Pariwisata ▪ Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja ▪ Program Pengembangan Masyarakat dan Kerjasama Teknologi Tepat Guna ▪ Program Hilirisasi Pertanian, Perkebunan, Perikanan/Kelautan dan Peternakan ▪ Program Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus ▪ Program Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan ▪ Program Pengembangan Pendidikan Vokasional ▪ Program Upaya Kesehatan dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan ▪ Program Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan	

Rencana Pembangunan Ekonomi Syariah di Provinsi Sulawesi Selatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 di Provinsi Sulawesi Selatan bertujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
2. Meningkatkan aksesibilitas wilayah pelosok dan koneksivitas antar wilayah
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata antar lapisan dan antar wilayah
4. Meningkatkan kualitas SDM secara inklusif
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup

Sektor Pariwisata Ramah Muslim	Sektor Makanan-Minuman dan Produk Halal
▪ Sosialiasi pengembangan program "Moeslim Friendly Destination" di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara	▪ Program sertifikasi halal gratis terhadap pelaku UKM di Provinsi Sulsel ▪ Sosialiasi penerapan standar halal kepada juru sembelih halal dan RPH halal di Provinsi Sulsel
Sektor Keuangan Mikro Syariah	**Sektor Keuangan Sosial Syariah**
▪ Tidak dibahas secara spesifik di dalam RPJMD 2018-2023	▪ Tidak dibahas secara spesifik di dalam RPJMD 2018-2023

Program Pemerintah Daerah
di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah

Sektor Industri Halal

Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Sektor industri halal unggulan yang akan diprioritaskan pengembangannya adalah sektor makanan/minuman halal (termasuk komoditas, pertanian dan perikanan) serta sektor pariwisata ramah Muslim. Industri makanan dan minuman halal dapat disokong oleh besarnya potensi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berkontribusi sebesar 23.2 persen terhadap PDRB provinsi Sulawesi Selatan.

Program Pendukung Sektor Industri Halal

Makanan dan Minuman halal	▪ Fasilitasi pengurusan izin merek sejumlah 290 UMKM; Izin Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT) sejumlah 48 UMKM dan sertifikasi halal sejumlah 42 UMKM ▪ Peningkatan kualitas produk melalui pengembangan desain kemasan, label halal dan HAKI
Fesyen Muslim	Pengklasifikasian terhadap produk yang sudah disertifikasi halal dan yang belum disertifikasi halal
Pariwisata Ramah Muslim	Sosialisasi pariwisata ramah Muslim di Kabupaten Tana Toraja yang memiliki potensi pariwisata memiliki 300 objek wisata dan 17 di antaranya adalah wisata unggulan seperti Kete' Kesu, Londa, Kalimbong Bori', Saddang Barana, dan Pallawa.

Jumlah Kegiatan Syariah/Halal

	Jumlah Kegiatan Produk Daerah	Jumlah Kegiatan Produk Halal/Syariah/Islami
Makanan dan Minuman	-	1
Fesyen	-	1

Penetapan Daerah Pariwisata Ramah Muslim

Tahap	Daftar Desa/Kabupaten/Kota Wisata ramah Muslim
Sudah ada	-
Dalam tahap perencanaan	Tana Toraja dan Toraja Utara

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pendukung Sektor Industri Halal

- Inisiasi pengembangan usaha syariah sektor makanan/minuman & sektor fesyen muslim melalui pembentukan program IKRA Indonesia. IKRA Indonesia merupakan program pengembangan usaha syariah yang holistik dengan mengintegrasikan semua aspek pengembangan usaha mulai dari pengembangan kapasitas usaha, produk, branding, hingga fasilitasi pertemuan antara seller dan buyer baik secara offline maupun online. Pendampingan difokuskan pada mentoring sisi offline (product development, branding, dan business plan) dan sisi online (perluasan pasar digital, salah satunya melalui platform IKRA https://ikraindonesia.com). Lebih lanjut, UMKM juga turut diikutsertakan dalam expo dan business matching berskala internasional.

Sektor UMKM dan Ekonomi Pesantren

Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Program Kemitraan UMKM dan pengusaha besar

Tahap	Daftar Program Kemitraan di peringkat Desa/Kabupaten/Kota
Perencanaan	▪ Masih dalam tahap perencanaan

Program Pemberdayaan UMKM

Sektor	Daftar Program Pendampingan
Makanan-minuman Halal	▪ Kerjasama dengan ATDAG dan ITPC dalam mengakses pasar ▪ Pertimbangan Teknis Peningkatan daya saing produk dan legalitas usaha melalui pemberian fasilitas pendaftaran merek, P-IRT dan Sertifikasi Halal ▪ Partisipasi dalam Misi Dagang dan Promosi Produk melalui Pameran Dagang
Fesyen Muslim	▪ Kerjasama dengan ATDAG dan ITPC dalam mengakses pasar ▪ Partisipasi dalam Misi Dagang ▪ Partisipasi dalam Promosi Produk melalui Pameran Dagang

Jumlah Industri/Usaha Kecil Menengah (IKM/UKM)	2017	2018	2019
UKM mendapat pendampingan	240	-	140
UKM mendapat pendampingan sertifikasi halal	15	26	42

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Ekonomi Pesantren

Jumlah Pesantren	Program Pengembangan Ekonomi (*Lampiran*)
7	▪ Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sulsel mengadakan program Pemberdayaan Usaha Pesantren – Unit Pengolahan Sampah di Ponpes As'adiyah, Kabupaten Wajo. ▪ Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sulsel mengadakan program Program Pemberdayaan Usaha Pesantren – Unit Budidaya Buah Naga di Ponpes Darul Dakwah wal Irsyad, Kabupaten Barru. ▪ Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sulsel mengadakan program Pemberdayaan Usaha Pesantren – Unit Pengolahan Jeruk (dodol & sirup) di Ponpes Shohwatul Is'ad, Kabupaten Pangkep. ▪ Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sulsel mengadakan program Pemberdayaan Usaha Pesantren – Unit Pengolahan Nugget di Ponpes Darul Aman, Kota Makassar. ▪ Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sulsel mengadakan program Pemberdayaan Usaha Pesantren – Unit Pengolahan Roti di Ponpes Al Ikhlas, Kabupaten Bone. ▪ Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sulsel mengadakan program Pemberdayaan Usaha Pesantren – Unit Pengolahan Air Minum dalam Kemasan di Ponpes Hasanuddin, Kab. Gowa ▪ Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sulsel mengadakan program Program Pemberdayaan Usaha Pesantren – Unit Usaha Penjahitan & Bordir di Ponpes Hidayatullah, Kota Makassar

Sektor Keuangan Syariah

Program Otoritas Jasa Keuangan (Regional)

Sub-sektor	Detil Program
Perbankan syariah	▪ Terdapat UUS BPD Sulselbar dan 8 BPRS yang berada di wilayah kerja Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua ▪ Melakukan komunikasi semaksimal mungkin terkait masalah-masalah yang sering dihadapi oleh perbankan syariah ▪ Memberikan pembinaan baik secara langsung maupun secara tertulis terhadap proses bisnis yang terjadi ketika terdapat sebuah pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan ▪ Memantau pencapaian realisasi RBB secara tertib agar dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun ▪ Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan operasional bank sesuai prinsip syariah ▪ Mengedukasi perbankan syariah terkait pelaksanaan kebijakan/peraturan yang berlaku baik berupa PBI, POJK, maupun ketentuan terkait lainnya

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Sektor Keuangan Syariah

Sub-sektor	Detil Program
Perbankan Syariah	Belum ada program Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sulsel terkait sub-sektor tersebut
Bank Pembangunan Daerah	Belum ada program Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sulsel terkait sub-sektor tersebut

Sektor Keuangan Mikro Syariah

Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Program Pendampingan, Pengawasan, dan Pengembangan Koperasi Syariah (KSPPS)

Program	Institusi Keuangan Mikro Syariah
KSPPS / USPPS Koperasi	▪ Fasilitasi pembiayaan dana bergulir ▪ Fasilitasi akses pengembangan usaha ▪ Latihan Pengembangan SDM pengelola koperasi
Koperasi Pondok Pesantren	▪ Fasilitasi pembiayaan dana bergulir ▪ Fasilitasi akses pengembangan usaha ▪ Latihan Pengembangan SDM pengelola koperasi

Program Otoritas Jasa Keuangan (Regional)

Program Pendampingan, Pengawasan, dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Bank Wakaf Mikro (BWM)

- Program pendampingan/pemberdayaan ke BWM Ummul Mukminin' Aisyiyah serta program Bantuan
- Pelatihan atau *workshop* digitalisasi BWM:
  1. Edukasi terkait penggunaan aplikasi
     - BWM Mobile

yang dilakukan oleh OJK untuk BWM (rekapitulasi kegiatan tahun 2020)

A. Kegiatan Forum Online BWM

- 7 Juni 2020: Pendampingan terkait arah pengembangan BWM di era *new normal* bersama Ketua DK OJK
- 22 Juni 2020: Kebijakan strategis BWM di masa pandemi Covid - 19 bersama Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK dan Direktur Laznas BSM Umat
- Juli 2020: Komunikasi dan optimalisasi *halaqoh* mingguan transisi di masa new *normal bersama* dengan Direktur Laznas BSM Umat
- 20 Juli 2020: Potensi dan optimalisasi pendapatan BWM bersama dengan Direktur Utama Laznas BSM Umat dan Ecodoe
- 20 Agustus 2020: Optimalisasi sosmed dan *digital marketing*
- 24 Agustus 2020: Pengembangan ekosistem BWM oleh Pinbuk dan OJK
- 7 September 2020: Optimalisasi dan *added value* produk nasabah BWM oleh OJK dan Astra Internasional
- BWM Halaqoh
- BWM Bumdes Marketplace
- BWM Info

2. Mendapatkan penjelasan terkait *fiqh muamalah* transaksi di *marketplace* oleh DSN MUI, dan
3. Mendapatkan pembinaan terkait urgensi pemasaran digital pada tanggal 21 September s.d. 2 Oktober 2020

- Fasilitasi bantuan pemerintah untuk Usaha Mikro (BPUM) dari Kementerian Koperasi dan UKM RI kepada nasabah BWM terdampak Covid-19 pada bulan Agustus 2020
- Pendampingan lainnya yang dilakukan oleh masing-masing wilayah (KR/KOJK)

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Koperasi dan Keuangan Mikro Syariah

Program	Koperasi/ Keuangan Mikro Syariah
▪ Belum ada program Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sulsel terkait Koperasi dan Keuangan Mikro Syariah.	▪ Belum ada program Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sulsel terkait Koperasi dan Keuangan Mikro Syariah.

Sektor Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Program BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan

Kategori Program ZIS dan Alokasi BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan

Kategori	Nama Program	Jumlah Penerima Manfaat (jiwa)	Besar Alokasi Penyaluran Tahun 2018 (Rp)	Besar Alokasi Penyaluran Tahun 2019 (Rp)
Pendidikan	Sekolah	350	349,632,550	355,090,000
Kesehatan	Klinik	1,200	236,777,560	180,169,000

Program BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dalam Mengatasi Permasalahan Pandemi Covid-19

Nama Program	Mekanisme Penyaluran Bantuan	Alokasi Penyaluran (Rp)	Tipe Penerima Bantuan/Manfaat
Penyemprotan Disinfektan	Pembelian obat semprotan disinfektan	15,000,000	8 Asnaf yang terdampak Covid-19
Pembagian Sembako	Belum ada	75,000,000	8 Asnaf yang terdampak Covid-19

Gambaran
Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah

Sektor Industri Halal

Nilai Ekspor Provinsi Sulawesi Selatan

Sektor	Jumlah Ekspor tahun 2019 (USD)	% Dibandingkan dengan Total Ekspor Non-Migas (tahun 2019)
Makanan dan Minuman	176.732.991	15.18

Jumlah Usaha/ Merk dengan Sertifikat Halal pada Sektor Makanan dan Minuman (Mamin)

Sektor Usaha (Tahun 2018)		Sektor Usaha (Tahun 2019)	
Roti	1	Roti	1
Katering dan Restoran	22	Katering dan Restoran	23
Tepung, Kanji, and produk turunan/olahan	1	Tepung, Kanji, and produk turunan/olahan	1
Es, es krim, dan bahan-bahan pendukung	-	Es, es krim, dan bahan-bahan pendukung	2
Susu dan produk olahan/turunan susu	-	Susu dan produk olahan/turunan susu	3
Makanan olahan, daging dan unggas	1	Makanan olahan, daging dan unggas	1
Makanan olahan ikan	17	Makanan olahan ikan	20
Makanan olahan telur	2	Makanan olahan telur	2
Makanan ringan	18	Makanan ringan	20
Pemanis, bumbu dapur, bumbu penyedap/ pelengkap	-	Pemanis, bumbu dapur, bumbu penyedap/ pelengkap	1
Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	9	Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	12
Semua Usaha Tersertifikasi Halal	71	Semua Usaha Tersertifikasi Halal	86

Sumber: Daftar Belanja Produk Halal LPPOM MUI hingga periode Maret-April-Mei 2019

Kontribusi Sektor Mamin terhadap Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan

	2019	2018	2017	2016	2015
PDRB (Milliar Rupiah)					
Mamin olahan	37,091.42	31,385.5	30,043.94	26,377.77	23,137.4
Mamin olahan, *Base* = 2010	23,504.1	20,135.66	19,909.9	18,205.79	16,800.13
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb)	5,797.3	5,221.4	4,542.25	3,997.5	3,671.32
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb), *Base* = 2010	4,006.76	3,707.68	3,266.44	2,908.09	2,702.73
Pertumbuhan PDRB (%)					
Mamin olahan, *Base* = 2010	16.73	1.13	9.36	8.37	84
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb), *Base* = 2010	8.07	13.51	12.32	7.6	6.38

Kontribusi pada PDRB (%)					
Mamin olahan	7.35	6.79	7.23	6.99	6.8
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb)	1.15	1.13	1.09	1.06	1.08

Total Produksi Daging Daerah (Tahun 2017)

Populasi Ternak		Produksi Daging Ternak (ton)	
Sapi Potong	1,310,194	Sapi	19,696.5
Sapi Perah	1,763	Sapi Impor	-
Kerbau	85,752	Kerbau	3,243.05
Kuda	172,764	Kuda	1,458.6
Kambing	806,461	Kambing	1,124.76
Domba	831	Domba	-
Populasi Unggas		**Produksi Daging Unggas (ton)**	
Ayam Kampung	30,807,676	Ayam Kampung	33,210.67
Ayam Petelur	674,304	Ayam Petelur	9,320.39
Ayam Broiler	101,990,626	Ayam Broiler	110,827.08
Bebek	8,861,142	Bebek	471.57

Skor Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) Tahun 2018 Provinsi Sulawesi Selatan

Akses	65
Komunikasi	36
Lingkungan	36
Jasa	22
Skor IMTI	**33**

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan

	2019	2018	2017	2016	2015
PDRB (Milliar Rupiah)	`				
Jasa akomodasi	1,315	1,311	1,168.41	993.92	877.64
Jasa akomodasi, *Base* = 2010	889	904.34	825.54	747.49	667.32
Pertumbuhan PDRB (%)					
Jasa akomodasi, *Base* = 2010	-0.02	9.55	10.44	12.01	3.54
Kontribusi pada PDRB (%)					
Jasa akomodasi	0.27	0.28	0.28	0.26	0.26

Rating untuk Pariwisata Ramah Muslim di Provinsi Sulawesi Selatan

Skor	Aspek		Skor	Aspek	
Skor Akses	Udara	5	Skor Lingkungan	Kedatangan Turis Muslim	5
	Kereta	1		Jangkauan Wi-Fi	4
	Laut	2		Komitmen terhadap Pariwisata Ramah Muslim	3
	Infrastruktur Jalan	4			
Skor Komunikasi	Panduan Pelancong Muslim	2	Skor Jasa	Restoran Halal	3
	Edukasi Pemangku Kepentingan	4		Masjid	3
	Jangkauan Pasar	4		Bandara	5
	Pemandu Tur	5		Hotel	3
	Pemasaran Digital	5		Atraksi	4
			Skor Total		62
			Rata-rata Skor		3.65

Catatan: Data lengkap bisa didapatkan di dalam Laporan Perkembangan Pariwisata Ramah Muslim Daerah 2019-2020

Indikator Pariwisata Ramah Muslim Provinsi Sulawesi Selatan

Indikator	Skor/Nilai	Keterangan
Akses	Baik	Memiliki akses udara, laut, dan infrastruktur jalan yang baik. Akses kereta masih dalam tahap pengerjaan
Akses Udara	Baik	Terdapat bandara domestik dan internasional
Bandara Internasional	1	
Bandara Domestik	7	
Akses Kereta	-	Jalur kereta api masih dalam tahap pengerjaan
Akses Laut	Baik	
Pelabuhan	3	
Infrastruktur Jalan	Baik	Sebagian besar jalan dalam kondisi baik dan layak pakai
Jalan Provinsi	2,900	(km), 20 km merupakan jalan tol
Komunikasi	Cukup baik	Memiliki panduan pengunjung, edukasi untuk pemangku kepentingan, kegiatan pendukung jangkauan pasar, pemandu tur, dan melakukan pemasaran digital
Panduan bagi Pelancong Muslim	Cukup baik	Hanya ada dalam Bahasa Inggris
Eksemplar Bahasa Inggris	1,500	
Edukasi Pemangku Kepentingan	Baik	
Workshop	3	
Jangkauan Pasar		Terdapat banyak berbagai macam kegiatan seperti konferensi, kegiatan B2B, festival, dan program perjalanan keluarga
Konferensi/Kegiatan/Expo	Baik	*Sales mission*

Indikator	Skor/Nilai	Keterangan
Acara B22	3	
Festival Ramah terhadap Muslim	1	
Trip Keluarga	3	
Pemandu Tur	Baik	Terdapat pemandu tur berbahasa Inggris dan Arab
Bahasa Arab	2	
Bahasa Inggris	220	
Digital Marketing	Baik	Terdapat pemasaran secara digital lewat aplikasi, media sosial, dan saluran tv
Aplikasi	1	Explore South Sulawesi
Media Sosial	-	Facebook, Twitter, Instagram
Lingkungan		
Kedatangan Turis	Cukup baik	Sulawesi Selatan kedatangan banyak wisatawan domestik dan mancanegara. Jaringan wi-finya pun memadai. Sulawesi Selatan sedang mempersiapkan untuk mengembangkan pariwisata ramah Muslim
Wisatawan Domestik	5,461,667	
Wisatawan Mancanegara	105,447	
Komitmen terhadap Pariwisata Ramah Muslim	Cukup baik	Ada rencana mengenai sosialisasi pariwisata ramah Muslim
Jasa		
Restoran Halal	Baik	Terdapat restoran bersertifikasi halal, gerai bersertifikasi halal, beserta restoran/rumah makan yang diklaim halal
Restoran bersertifikat halal	29	
Outlet bersertifikat halal	4	
Restoran/ Rumah makan halal *(self-claimed)*	8	
Masjid		Terdapat masjid dan mushala yang layak digunakan
Masjid	6	
Mushala	11	
Bandara	Baik	Terdapat tempat shalat pada bandara dan menyelenggarakan shalat Jumat
Mushala	5	
Shalat Jumat	Ada	
Hotel	Cukup baik	Baru sedikit restoran yang tidak menyediakan menu babi dan alkohol, tetapi ada hotel syariah
Hotel Syariah	4	
Hotel yang tidak menyediakan menu babi dan alkohol	10	
Atraksi	Baik	Terdapat berbagai macam situs budaya Islami, daya tarik wisata budaya, daya tarik lokal, beserta tempat ibadah di pusat perbelanjaan

Indikator	Skor/Nilai	Keterangan
Situs budaya Islami	306	
Daya tarik wisata budaya	680	
Daya tarik lokal	5	
Tempat ibadah di pusat perbelanjaan	5	

Sektor Keuangan Syariah

Indeks Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah

Indeks	Tahun 2016	Tahun 2019
Indeks literasi keuangan Syariah (OJK)	6.2%	7.8%
Indeks inklusi keuangan Syariah (OJK)	14.5%	10.5%
Indeks literasi ekonomi Syariah (BI)	-	6.3%

Profil Keuangan BPD Syariah – UUS BPD Sulselbar (*Miliar Rupiah*)

	2015	2016	2017	2018	2019
Total aset gross	765	756	901	1,040	1,383
Total pembiayaan	543	509	651	741	851
Total DPK	402	517	565	784	687
Total FDR	128.44%*	98.44%	80.45%	92.67%	108.54%
Total NPF	1.2%*	1.25%	1.20%	0.93%	0.79%
Pangsa Pasar (%)	-	-	-	4%	4.9%

*data per September 2015

Profil Industri Perbankan Syariah (BUS) di Provinsi Sulawesi Selatan (*Miliar Rupiah*)

	2018	2019
Pangsa pasar (%)	15.8%	15.3%
Pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan		
Modal kerja (UMKM)	473	532
Modal kerja (bukan UMKM)	244	59
Investasi (UMKM)	414	423
Investasi (bukan UMKM)	233	237
Konsumsi	2,074	2,398
NPF berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	40	41
Modal kerja (bukan UMKM)	91	35
Investasi (UMKM)	22	50
Investasi (bukan UMKM)	1	-
Konsumsi	41	74
Total		
Total aset gross	4,391	4,809
Total pembiayaan	3,439	3,650
Portfolio pembiayaan UMKM (%)	25.8%	26.3%
Total DPK	3,194	3,954
Total FDR	107.65%	92.30%
Total NPF	195	200
Total NPF (%)	5.7%	5.5%

Profil Industri Perbankan Syariah (UUS) di Provinsi Sulawesi Selatan (*Miliar Rupiah*)

	2018	2019
Pangsa pasar (%)	13.8%	15%
Pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan		
Modal kerja (UMKM)	233	212
Modal kerja (bukan UMKM)	342	443
Investasi (UMKM)	113	112
Investasi (bukan UMKM)	176	218
Konsumsi	1,977	2,371
NPF berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	12	33
Modal kerja (bukan UMKM)	1	3
Investasi (UMKM)	17	15
Investasi (bukan UMKM)	3	4
Konsumsi	23	42
Total		
Total aset gross	3,746	4,599
Total pembiayaan	2,840	3,357
Portfolio pembiayaan UMKM (%)	12.2%	9.7%
Total DPK	1,769	2,049
Total FDR	160.5%	163.8%
Total NPF	56	96
Total NPF (%)	2.0%	2.9%

Sektor Keuangan Mikro Syariah

Jumlah LKMS dan BWM yang Mendapatkan Program Pendampingan dan Pengawasan dari OJK

LKMS	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah yang mendapat pendampingan OJK	1	1
Jumlah yang mendapat pengawasan OJK	1	1

Profil Fundamental LKMS dan BWM di bawah Pengawasan OJK

LKMS dan BWM	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah LKMS yang berada di wilayah daerah	1	1
Jumlah anggota LKMS	20	20
Jumlah pegawai LKMS	12	12
Modal sendiri (*dalam Rupiah*)	4.2 Miliar	4.2 Miliar
Sisa Hasil Usaha/SHU (*dalam Rupiah*)	-	128.4 Juta
Total aset (*dalam Rupiah*)	4.2 Miliar	4.4 Miliar
Rata-rata pembiayaan LKMS (*dalam Rupiah*)	0 < n <= 5 jt 100% 1,25 jt < n <= 10 jt 0% 10 jt < n <= 20 jt 0%	0 < n <= 5 jt 100% 1,25 jt < n <= 10 jt 0% 10 jt < n <= 20 jt 0%

LKMS dan BWM	Tahun 2018	Tahun 2019
	20 jt < n <= 50 jt 0% > 50 jt 0%	20 jt < n <= 50 jt 0% > 50 jt 0%

Jumlah IKMS yang Mendapatkan Program Pendampingan dan Pengawasan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

IKMS	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah IKMS yang mendapat pendampingan	176	180	186
Jumlah IKMS yang diawasi oleh dinas (pengawasan yang dimaksud adalah di cek laporan RAT, kunjungan ke IKMS dsb.)	42	57	66

Profil Fundamental IKMS di bawah Pengawasan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

IKMS (KSPPS/USPPS, BMT, Kopontren, dll)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah IKMS yang berada di wilayah kerja	176	180	186
Jumlah anggota IKMS	54,343	55,003	56,270
Jumlah pegawai IKMS	210	228	231
Jumlah pegawai yang mempunyai serifikasi pengelola KSPPS (IKMS)	21	21	23
Modal sendiri (*dalam Rupiah*)	13.3 Miliar	13.4 Miliar	13.6 Miliar
Modal luar/pinjaman (*dalam Rupiah*)	15.5 Miliar	15.7 Miliar	15.8 Miliar
Cadangan koperasi/permodalan	3.2 Miliar	3.3 Miliar	3.3 Miliar
Volume usaha (*dalam Rupiah*)	89.3 Miliar	89.6 Miliar	90.6 Miliar
Sisa hasil usaha/SHU (*dalam Rupiah*)	1.07 Miliar	1.07 Miliar	1.07 Miliar
Total aset (*dalam Rupiah*)	174.1 Miliar	174.6 Miliar	175.07 Miliar
Rata-rata Pembiayaan	0 < n <= 5 jt 0% 1,25 jt < n <= 10 jt 0% 10 jt < n <= 20 jt 0% 20 jt < n <= 50 jt 0% > 50 jt 100%	0 < n <= 5 jt 0% 1,25 jt < n <= 10 jt 0% 10 jt < n <= 20 jt 0% 20 jt < n <= 50 jt 0% > 50 jt 100%	0 < n <= 5 jt 0% 1,25 jt < n <= 10 jt 0% 10 jt < n <= 20 jt 0% 20 jt < n <= 50 jt 0% > 50 jt 100%
Tingkat kesehatan	Sehat: 68 Cukup Sehat: 31 Dalam pengawasan: 59	Sehat: 70 Cukup Sehat: 33 Dalam pengawasan: 62	Sehat: 72 Cukup Sehat: 48 Dalam pengawasan: 66

Sektor Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Daftar BAZNAS Aktif dan LAZ Aktif Rekomendasi Baznas

24 BAZNAS dan 5 LAZ Aktif (Rekomendasi Baznas)	Kabupaten Takalar, Kabupaten Bone, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Kep. Selayar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Parepare, Kota Palopo serta LAZ Wahdah Islamiyah, LAZ Yayasan Hadji Kalla, LAZ Hidayadullah, LAZ LAZISMU dan LAZ Dompet Dhuafa

Alokasi APBD/Hibah Pemerintah Daerah kepada Institusi Pengelola Zakat yang Resmi

Daftar Alokasi APBD/Hibah	Nominal Alokasi (Rp)
Pemerintah Provinsi	500,000,000
Kanwil Kementerian Agama	100,000,000

Jumlah Penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (*dalam Rupiah*)

Jenis Dana	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Penghimpunan Zakat			
▪ Zakat Fitrah	-	300,000	128,000,000
▪ Zakat Maal/Harta	2,674,436,189	2,210,239,416	1,701,329,456
Penghimpunan Infak			
▪ Infak Bebas	-	5,500,000	465,000

Jumlah Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (*dalam Rupiah*)

Jenis Dana	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Penyaluran Zakat	565,479,000	596,356,000	987,800,000
Penyaluran Infak	-	5,500,000	30,000,000

`

Program Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah di Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kategori	Nama Program	Jumlah Penerima Manfaat (Jiwa)	Besar Alokasi Penyaluran (Rp)
1	Sosial Kemanusiaan	-	-	-
2	Pendidikan	Sekolah	350	344,090,000
3	Kesehatan	Klinik	1,200	180,164,000

Indeks Zakat Nasional (IZN) Provinsi Sulawesi Selatan

	2018	2019
Indeks Zakat Nasional/IZN (Dimensi Makro)		
Regulasi	0.25	0.93
Dukungan Finansial dari Pemerintah (APBN/APBD) untuk BAZNAS	0	0.73
Jumlah Resmi Lembaga Zakat/OPZ, muzakki, and mustahik	0.75	0.91
Rasio, Jumlah muzakki individual/jumlah rumah tangga di level Provinsi	0	0.61
Rasio, Jumlah dari muzakki institusi/jumlah institusi di level Provinsi	1	0.54
Database dari institusi/lembaga zakat yang terdaftar	0.58	0.68
Total Indeks Makro	**0.25**	**0.77**
Indeks Zakat Nasional/IZN (Dimensi Mikro)	1	0.41
Penghimpunan	0.5	0.68
Pengelolaan	0.56	0.82
Penyaluran	0.25	0.70
Pelaporan	0.75	0.93
Indeks Kesejahteraan CIBEST	0.5	0.50
Modifikasi Indeks Pengembangan Manusia (HDI)	0.5	0.59
Kemandirian	0.61	0.64
Institutional	0.6	0.69
Dampak Zakat	0.61	0.66
Total Indeks Mikro	**0.25**	**0.93**

Indeks Skor Literasi dan Pemahaman Zakat Provinsi Sulawesi Selatan

	2020
Indeks Literasi Zakat	57.90
Indeks Pemahaman Dasar tentang Zakat	61.13
Indeks Pemahaman Lanjutan tentang Zakat	51.90

Indeks Skor Literasi dan Pemahaman Wakaf Provinsi Sulawesi Selatan

	2020
Indeks Literasi Wakaf	45.3
Indeks Pemahaman Dasar tentang Wakaf	53.4
Indeks Pemahaman Lanjutan tentang Wakaf	30.3

Sektor UMKM dan Ekonomi Pesantren

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Jumlah Pesantren dengan Usaha-Usaha Syariah

4 Pondok Pesantren	4 Usaha-usaha Syariah (*detil dapat di Lampiran*)

Sektor Pendidikan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Perguruan Tinggi yang Menyediakan Program Studi Ekonomi dan Keuangan Syariah Terkait

Jenjang	Jumlah Universitas tahun 2019	Program Studi tahun 2019		2018		2019	
		Nama Program Studi	Jumlah Program Studi	Jml. Dosen	Jml. Mahasiswa	Jml. Dosen	Jml. Mahasiswa
Sarjana	22	Akuntansi Syariah	2	21	5,097	40	3,242
		Bisnis Islam	-	-	-	-	-
		Ekonomi Syariah	19	113	8,568	113	5,391
		Hukum Ekonomi Syariah	6	33	4,695	33	2,967
		Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam	-	-	-	-	-
		Manajemen Bisnis Syariah	3	16	808	16	689
		Manajemen Haji dan Umroh	5	16	137	16	44
		Perbankan Syariah	11	40	5,097	40	3242
		Manajemen Keuangan Syariah	-	-	-	-	-
		Manajemen Zakat dan Wakaf	-	-	-	-	-
Magister	2	Ekonomi Syariah	2	5	297	5	200
		Hukum Ekonomi Syariah	1	6	40	6	37
Doktoral	-		-	-	-	-	-

Akreditasi Perguruan Tinggi Dan Program Studi Ekonomi Syariah Terkait

Akreditasi	Akreditasi Perguruan Tinggi			Akreditasi Program Studi		
	S1	S2	S3	S1	S2	S3
Akreditasi A	-	-	-	1	-	-
Akreditasi B	5	2	-	6	1	-
Akreditasi C	7	-	-	12	-	-
Belum Terakreditasi	18	-	-	28	-	-

Peluang Investasi Daerah
untuk Industri Keuangan Syariah

No.	Nama Proyek Investasi	Pemangku Kepentingan	Sektor	Tahapan Proyek Investasi
1	Syariah Mandiri	BUMN	Perbankan	Beroperasi
2	Mega Syariah	Swasta	Perbankan	Beroperasi
3	BNI Syariah	BUMN	Perbankan	Beroperasi
4	BRI Syariah	BUMN	Perbankan	Beroperasi
5	Sulselbar Syariah	BUMD	Perbankan	Beroperasi
6	Muamalat	Swasta	Perbankan	Beroperasi
7	Askrindo Syariah	BUMN	Penjaminan	Beroperasi
8	Panin Syariah	Swasta	Perbankan	Beroperasi
9	Danamon Syariah	Swasta	Perbankan	Beroperasi
10	BTPN Syariah	BUMN	Perbankan	Beroperasi
11	Prudential Syariah	Swasta	Perbankan	Beroperasi
12	Jamkrindo Syariah	BUMN	Penjaminan	Beroperasi
13	AXA Indonesia Syariah	Swasta	Asuransi	Beroperasi
14	BFI Syariah	Swasta	Pembiayaan	Beroperasi
15	ACC Syariah	Swasta	Pembiayaan	Beroperasi
16	Pegadaian Syariah	BUMN	Pegadaian	Beroperasi

Mattessan Uma di Enrekang: Bagi Hasil Pertanian Berbasis Hukum Adat yang Berkeadilan dan Berkemaslahatan

Muhammad Wahyuddin Abdullah[27]
Jhonny Akbar[28]
Hadriana Hanafie[29]

Kerjasama pertanian di Kabupaen Enrekang merupakan warisan dari leluhur (Papa' Jolo) yang senantiasa dijaga, dipelihara, dan dilestarikan masyarakat setempat yang dikenal dengan nama Mattesan Uma. Mattesan Uma merupakan adopsi sistem pertanian tesang, yang diperoleh dari suku Bugis ketika Papa' Jolo Desa Mampu merantau ke Tanru Tedong untuk menjadi buruh padi (pare/pariu), kemudian diadopsi dan dikembangkan di Kabupaten Enrekang hingga sekarang. Matttesan Uma merupakan implikasi dari hukum adat yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan atas dasar kepercayaan.

Mattesan Uma pada petani Desa Mampu tidak terlepas keinginan menambah penghasilan tetapi tidak memiliki waktu untuk menggarap lahan pertanian. Petani penggarap tidak mempunyai biaya untuk membuka lahan tetapi memiliki tenaga yang kuat. Nilai kekerabatan (*mesa' kurin*) dengan semangat tolong-menolong (*saro mase*) memotivasi membukakan lapangan pekerjaan untuk keluarga, tetangga, dan kaum kerabat lainnya. Falsafah hidup petani "*piara laloi to passiturutan lako lalan kameloan to dipukassing kita' solangasan*", yang artinya jagalah kebersamaan menuju jalan kebenaran yang baik untuk kita semua, senantiasa diterapkan petani yang melahirkan perasaan gembira saat pesta panen yang diikuti petani lainnya, tanpa mengharapkan imbalan apapun sebagai wujud budaya gotong-royong.

Dalam pelaksanaan Mattesan Uma, pemilik lahan dengan sukarela menyerahkan lahannya untuk digarap oleh petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil pada waktu panen tiba. Penggarap pun dengan sukarela menerima lahan tersebut untuk digarap dan menghasilkan. Kedua belah pihak tersebut tidak ada keterpaksaan untuk melakukan kerjasama. Begitupun dengan hasil akhir usaha yang dilakukan semata-mata diserahkan kepada Allah SWT sebagai pemberi keputusan yang mutlak. Nisbah hasil panen dibagi berdasarkan kesepakatan tanpa adanya tekanan atau paksaan dan relevan dengan akal sehat. Nisbah berbasis kesepakatan ini telah menjadi tradisi yang berpijak kemanfaatan dunia dan akhirat.

Mattesan Uma yang digunakan petani di Enrekang ini dikenal dengan skema bagi untung nisbah 50:50 (1:1). Skema bagi untung tersebut untuk kerjasama pertanian yang dilakukan kedua belah pihak, pengelolaan tanah dilakukan petani penggarap, dan pemilik lahan melakukan kesepakatan membagi hasil pertanian saat panen. Dalam pengelolaan tanah, petani pengelola mempunyai hak untuk menanam bibit, memelihara tanaman, memberi pupuk tanaman, melakukan pengairan, dan memanennya. Pemilik lahan menyediakan lahan, permodalan, bibit, dan biaya-biaya lainnya terkait kebutuhan pengolahan lahan petani penggarap.

---

[27] Dosen, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
[28] Mahasiswa Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
[29] Dosen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bhakti Makassar

Ketika terjadi gagal panen yang mengakibatkan kerugian sehingga modal yang dikeluarkan tidak mencukupi untuk dikembalikan kepada pemilik lahan, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik lahan dan petani penggarap mendapat santunan berupa uang duka (*asse penawa*) dengan besaranya tergantung dari keikhlasan hati (*canning ati*) pemilik lahan. Pemilik lahan menentukan besaran uang duka, dihitung dari besarnya bibit yang ditanam, jika petani menanam bibit 1 pikul (1 pikul = 100 kati = 61.67 kg), maka besaran uang duka yang diberikan kepada petani penggarap sebesar Rp 500,000, dan ketika menanam bibit di atas 1 pikul maka besaran uang duka yang diberikan mencapai jumlah Rp 1,000,000.

Pemilik lahan berani menanggung risiko dan memberikan santunan berupa uang duka kepada petani penggarap untuk menghargai usaha yang telah digunakan petani penggarap dan untuk kelangsungan hidup petani penggarap. Umumnya, pemilik lahan tergolong kelompok yang memiliki penghasilan lebih. Pemilik lahan ketika rugi masih memiliki pendapatan dari pekerjaan yang lain dibandingkan dengan petani penggarap, yang hanya mengharapkan hasil dari kerjasama bagi hasil tersebut. Santunan uang duka berfungsi mengganti penghasilan akibat kerugian kerja (tenaga) yang telah dilakukan dan membantu pemenuhan kebutuhan hidup petani penggarap yang tidak mempunyai sumber penghasilan lain.

Ketentuan nisabah kerjsama pertanian yang digunakan petani di Desa Mampu Kabupaten Enrekang ini tidak lagi berpedoman pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 yang mengatur perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap lahan. Namun, Mattesan Uma mengedepankan adat kebiasaan yang turun-temurun dilakukan dan berjalan baik sampai sekarang. Skema bagi hasil mattesan uma dilandasi semangat tolong-menolong (*saro mase*) dan dipandang menguntungkan kedua belah pihak. Nisbah bagi hasil mengharuskan kesamaan porsi (*fifty-fifty*). Petani penggarap memiliki rasa tanggung jawab penuh dengan lahan garapannya, sedangkan pemilik lahan merasa puas dengan apa yang dilakukan petani penggarap.

Nisbah bagi hasil kesamaan porsi yang unik tersebut pada dasarnya memenuhi aspek keadilan sosio-ekonomi. Kerugian petani penggarap yang mendapatkan santunan uang duka merupakan bentuk empati pemilik lahan turut merasakan kegagalan panen. Bagi hasil Mattesan Uma dipandang lebih unggul dari sisi syariahnya dan lebih memberikan rasa keadilan dan kemaslahatan bagi petani. Mattesan Uma dilakukan bukan semata-mata untuk memperoleh kuntungan sebesar-besarnya tetapi lebih kepedulian dengan sesama yang terjalin dalam falsafah hidup masyarakat Enrekang. Keterkaitan faktor ekonomi, sosial, kearifan lokal, dan religius petani mendasari kokohnya Mattesan Uma ini.

Wawancara
Kepala Instansi Daerah

Bagaimana visi, rencana, dan program-program terkait ekonomi syariah?

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dalam mendorong peningkatan investasi terkait sektor ekonomi syariah, industri halal, dan sektor keuangan syariah yang dijabarkan kedalam rencana dan Program DPMPTSP adalah:

Visi: Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

Misi (1): Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif Produktif

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
Mewujudkan pelayanan perizinan yang dapat menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Memberikan kemudahan, dan transparansi proses Pelayanan perizinan dan non-perizinan	Penyederhanaan, standarisasi prosedur dan penyelenggaraan proses perizinan paralel untuk mempersingkat waktu pelayanan demi kepuasan masyarakat Menyediakan Pelayanan perizinan *mobile* di *rest area* dan kawasan industri Menyelenggarkan mall pelayanan publik	Pengelolaan dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Misi (3): Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif

TUJUAN	SASARAN	STARATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Meningkatnya realisasi investasi melalui kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Melakukan monitoring proyek-proyek strategis untuk peningkatan realisasi investasi Melakukan pembinaan dan	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

		fasilitasi penyelesaian masalah proyek proyek strategis Melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan jumlah investasi	
	Melaksanakan kegiatan promosi secara terfokus dan terintegrasi untuk mempromosikan potensi daerah	Melaksanakan pameran investasi dalam dan luar negeri	Peningkatan Promosi Penanaman Modal
		Menyediakan sarana dan prasarana promosi untuk menyebarluaskan potensi investasi Melaksanakan temu usaha berskala nasional dan internasional	
	Menyusun kebijakan, pemetaan dan perencanaan yang Mendukung pengem-penanaman modal	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang penanaman	Pengembangan Penanaman Modal

Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

Ekonomi syariah merupakan salah satu prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan terjabarkan dalam visi "Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, kompetitif, Inklusif dan Berkarakter" diwujudkan dalan program dan kegiatan yang bereriontasi pada penciptaan berbagai inovasi dalam memberikan pelayanan kepada pelaku industri usaha berbagai sektor. Salah satunya pengembangan destinasi pariwisata ramah Muslim dan pengembangan indutri halal.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan penelaahan visi kepala daerah yang terpilih yaitu "Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter" di mana keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terfokus pada 2 (dua) misi yaitu:

- Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif, dengan sasaran: Meningkatnya produktifitas pada pusat pusat pertumbuhan ekonomi baru.
- Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter, dengan sasaran: Berkembangnya kebudayaan daerah sebagai spirit penyelenggaraan pembangunan

Adapun rencana yang sudah ada maupun ke depannya yaitu 'Meningkatkan Peran Sektor Pariwisata terhadap Struktur Ekonomi Daerah' di mana pariwisata memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung bagi perekonomian nasional maupun lokal. Hal itu dimulai dari pembayaran jasa transportasi, menginap di hotel, mencicipi kuliner khas, berbelanja *suvenir*, berkunjung ke daerah wisata, semuanya memiliki dampak ekonomi

Dan adapun yang menjadi program pada sektor pariwisata ramah Muslim adalah Program Pengembangan Destinasi Pariwisata ramah Muslim (Prioritas) berupa 'Kegiatan Sosialisasi Wisata ramah Muslim', dengan adanya kegiatan ini untuk menguatkan kualitas destinasi pariwisata nasional, menjadikan Sulawesi Selatan sebagai tujuan wisata ramah Muslim favorit Indonesia, mewujudkan industri halal yang kompetitif dan meningkatkan kualifikasi kelembagaan pariwisata ramah Muslim nasional.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan

Visi: Terwujudnya Perdagangan Sulawesi Selatan yang Inovatif dan Berdaya Saing, sebagai Simpul Jejaring Perdagangan Nasional
Rencana dan Program:

- Membangun/membina pasar pelayanan ekonomi syariah yang produktif yang berdaya saing serta mempromosikan produk lokal yang potensial
- Memfasilitasi produk-produk industri dalam memenuhi persyaratan halal dari lembaga terkait berdasarkan kesesuaian SNI
- Pembinaan melalui klinik pelatihan dan konsultasi teknis ke para pelaku usaha di sektor perdagangan
- Memfasilitasi akses pasar bagi pelaku usaha
- Pendampingan dari tenaga ahli yang berbasis syariah bagi pelaku usaha

Kepala OJK Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua

Dalam jangka pendek, industri keuangan Syariah kami arahkan untuk fokus terlebih dahulu memenangkan pasar *sharia loyalist* yang cenderung *low cost*, sehingga skala usahanya tumbuh progresif ditopang oleh aset yang stabil.

Kemudian, jangka menengah, kita arahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan utamanya permodalan. Untuk dapat bermain di *level-playing field* yang setara dengan industri konvensional yang telah lebih dulu *settled*, dibutuhkan *economics of scale* yang besar sehingga dengan penawaran yang kompetitif masyarakat tertarik untuk beralih ke Syariah. Namun, untuk memiliki *economics of scale* besar, tentu diperlukan modal yang besar pula, ini berkaitan dengan regulasi prudensial maupun *capital expenditure* untuk penyediaan akses transaksional yang memadai.

Selanjutnya, setelah permodalan kuat, kami akan mendorong diversifikasi produk keuangan syariah dan perluasan jaringan layanan. Dengan adanya produk keuangan syariah yang lengkap sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudahan akses transaksional baik dari segi penyediaan dana, penjaminan maupun sistem pembayaran, serta didukung permodalan yang kuat, kami yakin LJK Syariah dapat memenangkan pasar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang 89.62% nya beragama Islam.

Bagaimana peluang pengembangan sektor ekonomi syariah, industri halal, dan sektor keuangan syariah?

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai peluang besar terhadap investasi dari sektor ekonomi syariah, industri halal dan juga dari keuangan syariah bukan hanya selaku konsumen terhadap produk halal tapi dapat sebagai produsen, mengingat negara Indonesia pada umumnya dan berdasarkan data penduduk Provinsi Sulawesi Selatan memiliki jumlah penduduk yang mayoritas Muslim sebesar 7,200,938 jiwa sehingga mempunyai peluang besar terhadap industri makanan halal, pariwisata ramah Muslim, mode Muslim, industri kreatif, pertanian terintegrasi, dan energi terbarukan.

Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

Adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif terhadap pelaku industri dan perbankan. Dengan adanya pengembangan ekonomi syariah, industri halal dan sektor keuangan syariah maka dapat memberikan dorongan kepada masyarakat untuk dapat melakukan aktifitas di berbagai sektor usaha sesuai syariah islam.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

Di Sulawesi Selatan sangat berpeluang untuk pengembangan wisata ramah Muslimnya karena di Sulawesi Selatan sendiri mulai pangan, tempat wisata hingga sarana-prasarana dan wisata kulinernya sangat banyak. Di Makassar sendiri sudah ada Rumah Potong Hewan (RPH) yang bersetifikat halal. Selain itu di Makassar sendiri sudah ada beberapa hotel yang dapurnya bersetifikat halal, begitu juga restoran/rumah makan, jadi peluang Makassar sendiri untuk menjadi destinasi wisata ramah Muslim sangat besar.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan

Peluang Provinsi Sulsel sangat besar karena Sulsel sebagai daerah potensial SDA dan SDM, menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian Timur, mempunyai peluang dalam mendistribusikan produk-produk halal yang berbasis syariah, karena didukung mayoritas muslim, yang akan bermitra dan bersinergi dengan para pelaku usaha dan mayarakat dalam menciptakan iklim usaha syariah dan lembaga keuangan syariah yang kondusif. Disamping itu Provinsi Sulsel juga ditunjang oleh infrastruktur yang memadai di berbagai sektor.

Kepala OJK Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua

Kantor OJK Regional 6 membawahi pengawasan LJK di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, total penduduk di dua provinsi dimaksud mencapai 10,152,226 jiwa, dimana 89.62%-nya beragama Islam, tentu ini merupakan potential market yang sangat besar untuk industri keuangan syariah apabila digarap secara serius.

Bagaimana tantangan utama apa yang saat ini dihadapi dalam mengembangkan sektor ekonomi syariah, industri halal, dan sektor keuangan syariah?

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan

- Tingkat literasi dan inklusi yang masih rendah (pemahaman masyarakat masih rendah).
- Penerbitan produk investasi syariah yang masih terbatas pada saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Padahal, secara regulasi sudah ada efek beragun aset (EBA) syariah dan *Real Estate Investment Trusts* (REITs) Syariah.
- Pemerintah masih mendominasi *market share* sukuk industri jasa keuangan syariah juga tumbuh positif selama 2018.
- Belum optimalnya pelaksanaan harmonisasi pusat dan daerah.
- Kualitas infrastruktur yang kurang memadai.
- Masih cukup panjangnya perizinan investasi sehingga masih tingginya biaya perizinan investasi
- Masih cukup banyak peraturan daerah yang menghambat iklim investasi.
- Masih terkonsentrasinya sebaran investasi di Pulau Jawa, dan belum optimalnya pelaksanaan alih teknologi

Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan syariah di berbagai sektor seperti masih kurangnya pelaku industri dan usaha yang menggunakan label halal, masih kurangnya perbankan dan lembaga pinjaman lainnya belum menerapkan keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan, termasuk rendahnya kapasitas perbankan syariah.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

- Kurangnya kepedulian masyarakat setempat untuk melakukan sertifikat halal atas produk makanan.
- Proses pengajuan sertifikasi halal ke LPPOM-MUI juga memakan waktu yang lama dan biaya yang cukup mahal.
- Infrastruktur yang belum menunjang dan tidak adanya regulasi jelas yang mengatur tentang pariwisata ramah Muslim.

Kepala OJK Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua

Permodalan, produk yang belum dapat memenuhi ekspektasi pasar, dan akses transaksional yang terbatas karena keterbatasan modal dan rendahnya rasio efisiensi.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan

Tantangan :

- Semakin ketat persaingan dalam dunia usaha dan perkembangan teknologi informasi, serta perubahan regulasi yang begitu cepat, baik regulasi dalam negeri maupun internasional, sehingga perlu percepatan dalam mengantisipasi perkembangan tersebut.
- Perlu Peningkatan kualitas SDM pengusaha, agar mampu bersaing dalam hal penerapan teknologi dan pemasaran.

Sulawesi Selatan

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Ekonomi Pesantren

No	Nama Pesantren	Deskripsi Program
1	Ponpes As'adiyah, Kab. Wajo	Program Pemberdayaan Usaha Pesantren – Unit Pengolahan Sampah
2	Ponpes Darul Aman, Kota Makassar	Program Pemberdayaan Usaha Pesantren – Unit Pengolahan Nugget
3	Ponpes Darul Dakwah wal Irsyad, Kab. Barru	Program Pemberdayaan Usaha Pesantren – Unit Budidaya Buah Naga
4	Ponpes Al Ikhlas, Kab. Bone	Program Pemberdayaan Usaha Pesantren – Unit Pengolahan Roti
5	Ponpes Shohwatul Is'ad, Kab. Pangkep	Program Pemberdayaan Usaha Pesantren – Unit Usaha Pengolahan Jeruk (dodol & sirup)
6	Ponpes Hasanuddin, Kab. Gowa	Program Pemberdayaan Usaha Pesantren – Unit Usaha Pengolahan Air Minum dalam Kemasan
7	Ponpes Hidayatullah, Kota Makassar	Program Pemberdayaan Usaha Pesantren – Unit Usaha Penjahitan&Bordir

Daftar Usaha-Usaha Syariah yang Dikelola Pondok Pesantren

No.	Nama Pesantren	Nama Unit Usaha yang dikelola Santri	Deskripsi
1	As'Adiyah, Sengkang	Daur ulang sampah	Sektor usaha daur ulang sampah
2	Darud Da'wah wal Irsyad, Barru	Pertanian	BI mendorong budidaya buah naga yang dikembangkan oleh pondok pesantren DDI Mangkoso menjadi kawasan agrowisata
3	Darul Aman, Makassar	Pengolahan Makanan	Di pesantren ini, BI Sulsel membina pengembangan pembuatan *nugget*. BI Sulsel membantu dengan memberikan 28 jenis peralatan untuk pengembangan *nugget* tersebut. Tak sekadar

No.	Nama Pesantren	Nama Unit Usaha yang dikelola Santri	Deskripsi
			membantu perlengkapan. BI komitmen membimbing dalam membuat produksi *nugget* yang baik melalui pelatihan
4	Shohwatul Ishad, Pangkep	Pengolahan Makanan	BI Sulsel membina pengembangan beberapa hasil kerajian produk produk olahan santri seperti produk olahan pangan yang berbahan dasar jeruk yang diajarkan dalam mata pelajaran Kewirausahaan dan Agribisnis

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Provinsi

Kalimantan Timur

Sekilas

tentang Ekonomi Syariah di Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi yang memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di kawasan timur Indonesia. Kondisi tersebut didukung pula dengan demografi bahwa 85.38% dari jumlah penduduk Kalimantan Timur yaitu beragama Islam. Dengan telah ditunjuknya Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Ibu Kota negara yang baru pada tahun 2019 maka diharapkan geliat ekonomi dan keuangan syariah di provinsi Kalimantan Timur bisa menjadi arus baru pengembangan ekonomi nasional.

Peran lembaga keuangan syariah di Provinsi Kalimantan Timur juga terus meningkat ditandai dengan naiknya aset perbankan syariah sebesar 1.66% (yoy) hingga periode Semester 1 2020 (OJK, 2020). Kepercayaan masyarakat Kalimantan Timur pada perbankan syariah seperti Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Kaltimtara dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) juga meningkat ditandai dengan tingginya DPK Perbankan Syariah Kalimantan Timur sebesar 8.04% yang melebihi DPK Perbankan Syariah Nasional sebesar 5.83%.

Provinsi Kalimantan Timur juga sangat berpotensi dalam pengembangan industri halal pada sektor industri makanan/minuman halal dan pariwisata ramah Muslim. Dengan meningkatnya permintaan sertifikasi halal produk di Provinsi Kalimantan Timur, kondisi geografi dan kekayaan alam yang berlimpah serta didukung oleh perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang maka pengembangan regional halal value chain di provinsi Kalimantan Timur dapat diwujudkan.

Regulasi Tingkat Daerah
di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah

Peraturan Daerah terkait Keuangan Syariah	Belum ada namun telah menyepakati *spin-off* untuk mendirikan Bank Umum Syariah dan menjadi perusahaan anak PT BPD Kaltimtara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Peraturan Daerah terkait Makanan/Minuman Halal	Perda No.2 tahun 2014 tentang Penataan dan Pengawasan terhadap Produk Halal dan Higienis
Peraturan Daerah terkait Indusri Halal	Belum ada
Peraturan Gubernur terkait Pariwisata Ramah Muslim	Belum ada
Peraturan Gubernur terkait Pengelolaan Zakat	Belum ada
Peraturan Daerah Lainnya	Belum ada

Rencana Pemerintah Daerah
di Sektor Ekonomi Syariah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 di Provinsi Kalimantan Timur memfokuskan pada "Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan" dengan 5 misi utama yaitu:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi

Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Inflasi		Tingkat Pengangguran		Tingkat Kemiskinan		Konsumsi RT		Konsumsi Pemerintah		Investasi		Ekspor		Impor	
2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
2.67%	4.77%	3.24%	3.15%	6.60%	6.09%	6.06%	5.91%	2.81%	2.09%	8.21%	13.69%	7.54%	5.22%	-3.71%	10.75%	41.17%	-45.06%

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan mengoperasionalisasikan visi dan misi kepala daerah selama 5 (lima) tahun, serta menjadi tolok ukur pertanggungjawaban kepala daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk menentukan strategi dan kebijakan umum serta program pembangunan yang akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun. Dalam menetapkan strategi dan kebijakan umum serta penentuan program pembangunan dilakukan atas dasar hasil evaluasi pembangunan lima tahun sebelumnya serta dengan memperhatikan kondisi empiris, kemampuan, dan kewenangan daerah.

Program-Program Unggulan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023

- Pengembangan nilai-nilai keagamaan dan budaya
- Pengembangan Anjungan Kalimantan Timur di TMII sebagai etalase seni budaya Kalimantan Timur
- Peningkatan puskesmas kecamatan menjadi puskesmas terAkreditasiparipurna
- Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu bertaraf internasional (*Boarding School*)

Isu Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 5 tahun ke depan

- Masih rendahnya daya saing sumber daya manusia,
- Transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan berjalan lambat baik secara vertikal maupun horizontal
- Pembangunan infrastruktur belum optimal dalam mendukung peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah

▪ Pemberian Beasiswa Kalimantan Timur Tuntas untuk percepatan pembangunan perdesaan ▪ Peningkatan insentif guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/MA ▪ Optimalisasi SMK dan BLK untuk mencetak tenaga kerja handal ▪ Peningkatan kapasitas perempuan, pemuda dan disabilitas ▪ Peningkatan perlindungan anak ▪ Optimalisasi sarana dan prasarana olahraga yang telah terbangun ▪ Pemberian penghargaan bagi atlet dan pekerja seni yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional ▪ Pembinaan bagi usaha kecil dan menengah dengan pola pendampingan ▪ Pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan dan potensi daerah ▪ Peningkatan peran BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa ▪ Pemberian bantuan rumah layak huni untuk keluarga prasejahtera ▪ Memperluas lapangan kerja baru dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal pada sektor industri hilir migas dan pertambangan ▪ Pengembangan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan baru pada lahan kritis untuk rakyat ▪ Pemberian kemudahan berinvestasi di sektor industri dan pertanian dalam arti luas ▪ Pengembangan sentra perikanan laut dan perikanan darat ▪ Penerapan tata niaga BBM yang mendukung stabilitas ketersediaan BBM di seluruh wilayah Kalimantan Timur ▪ Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis potensi lokal ▪ Tersedianya akses telekomunikasi dan internet di pusat desa ▪ Terpenuhinya kebutuhan air baku dan air bersih untuk Kota Balikpapan, Bontang dan Samarinda ▪ Penanganan banjir di Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang ▪ Membangun dan meningkatkan kelas jalan provinsi dan jalan produksi di Kalimantan Timur ▪ Meningkatkan pengembangan Pelabuhan Internasional Kariangau di Teluk Balikpapan sebagai pelabuhan ekspor ▪ Percepatan penyelesaian pembangunan Jembatan Pulau Balang ▪ Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang yang rasional dan harmonis ▪ Penerapan regulasi eksploitasi Sumber Daya Alam yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat ▪ Pengembangan Danau Jempang, Semayang dan Melintang berfungsi untuk pengendalian banjir sekaligus untuk pengembangan perikanan dan pariwisata	▪ Penurunan kualitas lingkungan hidup, Pemerintahan yang belum mencapai kinerja profesional dan akuntabel

▪ Rehabilitasi hutan lindung dan pencegahan kerusakan dan kebakaran hutan ▪ Pengendalian lingkungan dalam rangka penurunan pencemaran tanah, air dan udara ▪ Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan ▪ Harmonisasi dan sinkronisasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terutama dalam urusan-urusan strategis ▪ Peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) ▪ Peningkatan PAD melalui peningkatan hasil usaha daerah ▪ Peningkatan pelayanan publik khususnya perizinan ▪ Pencegahan dan pemberantasan korupsi	

Rencana Pembangunan Ekonomi Syariah di Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 di Provinsi Kalimantan Timur bertujuan sebagai berikut:

Tujuan 1: Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter, Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing
Tujuan 2: Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan
Tujuan 3: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan
Tujuan 4: Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar
Tujuan 5: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Tujuan 6: Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik

Sektor Pariwisata ramah Muslim	Sektor Makanan dan Produk Halal
▪ Belum ada	▪ Mendorong penataan dan pengawasan produk halal dan higienis ▪ Mendorong pelaku usaha termasuk UMKM selayaknya memiliki sertifikat halal, khususnya sertifikasi dari MUI melalui LPPOM MUI

Program Pemerintah Daerah
di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah

Sektor Industri Halal

Program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Program Pendukung Sektor Industri Halal

Makanan dan Minuman Halal	▪ Program fasilitasi sertifikasi halal kepada pelaku industri halal khususnya UMKM ▪ Program survei komoditi/produk potensial ekspor ▪ Diklat untuk ekspor ▪ Sosialisasi pengembangan pasar ekspor
Fesyen Muslim	▪ Monitoring ekspor langsung melalui Pelabuhan Kariangau Balikpapan ▪ Bimtek untuk peningkatan peluang pasar ekspor melalui internet bagi eksportir ▪ Koordinasi pengembangan dan peningkatan pasar ekspor daerah dengan industri terkait ▪ Penciptaan dan pendampingan eksportir baru melalui fasilitas akses pasar ekspor bagi calon eksportir dalam Forum TEI (*business matching*)

Penetapan Daerah Pariwisata Ramah Muslim

Tahap	Daftar Desa/Kabupaten/Kota Wisata Ramah Muslim
Sudah ada	Kota Balikpapan, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Berau dan sekitarnya
Dalam tahap perencanaan	-

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pendukung Sektor Industri Halal

- Bank Indonesia mempunyai program Wirausaha Bank Indonesia (*Mini University* Kalimantan Timur Preneurs fb.me/ukm.Kalimantan Timur, setiap tahunnya meluluskan 400 pengusaha dengan berbagai kategori usaha, termasuk industri halal)
- Menfasilitasi produk bersertifikat halal pada *platform marketplace* minishop.id yang difungsikan sebagai *hub* rantai pasok antar UMKM binaan atau UMKM Mitra dan Klaster BI serta membuka pasar baru di Kalimantan Timur
- Menghadirkan professional kurator nasional untuk mengkurasi produk kerajinan dan fesyen UMKM Binaan antara lain Nola Marta dan Vivi Zubedi serta Javara untuk untuk kurasi produk pangan. Diharapkan dari hasil kurasi ini UMKM mampu mengembangkan produknya lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar
- Program wirausaha setiap angkatan diselesaikan selama tiga bulan dengan materi mencakup; Pemasaran, Keuangan, Sistem Operasional, Sumberdaya Manusia, Pembiayaan Bank/LKBB dan Legalitas (HAKI, PIRT, Halal)

Sektor UMKM dan Ekonomi Pesantren

Program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Program Pemberdayaan UMKM

Sektor	Daftar Program Pendampingan
Makanan dan Minuman Halal	▪ Sosialisasi Sistem Jaminan Halal ▪ Bimtek Manajemen Usaha ▪ Bimtek Kewirausahaan ▪ Diklat Pengembangan Kewirausahaan bagi Kelompok Masyarakat Strategis
Fesyen Muslim	▪ Bimtek Manajemen Usaha ▪ Diklat Pengembangan Kewirausahaan

Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	2017	2018	2019
IKM mendapat pendampingan	65	60	72
IKM mendapat pendampingan sertifikasi halal	-	25	40
UMKM mendapat pendampingan	320	300	250
UMKM mendapat pendampingan sertifikasi halal	-	-	70

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Ekonomi Pesantren

Jumlah Pesantren	Program Pengembangan Ekonomi (*Lampiran*)
5	5
▪ Pesantren KH. Harun Nafsi ▪ Pesantren Al Mujahidin ▪ Pesantren Darusyafa'ah ▪ Ponpes Hidayatullah Kalimantan Timur ▪ Ponpes Ibadurrahman	▪ *Green house* kebun hidroponik ▪ Pertanian komoditas tomat, lombok, dan terong ▪ Pertanian komoditas pangan ▪ Pengembangan komoditas ketahanan pangan dan hortikultura ▪ Pengembangan komoditas ketahanan pangan dan hortikultura

Sektor Keuangan Syariah

Program Otoritas Jasa Keuangan (Provinsi)

Sektor	OJK Regional Provinsi Kalimantan Timur
Perbankan Syariah	OJK Kalimantan Timur memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan UUS PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dan BPRS Manfaat-Syariah.
Bank Pembangunan Daerah (BUS/UUS)	OJK Kalimantan Timur memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan UUS PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
IKNB Syariah	▪ Wewenang perizinan dan pemeriksaan untuk IKNB (selain LKM) saat ini masih berada di Kantor OJK Pusat ▪ OJK Kalimantan Timur secara bulanan terus memantau perkembangan kinerja keuangan dalam bentuk laporan statistik dan analisis kinerja IKNB ▪ OJK Kalimantan Timur berperan aktif dalam menginisiasi maupun mendukung sosialisasi edukasi terkait IKNB kepada masyarakat
Teknologi Finansial Syariah (*Fintech Syariah*)	▪ Wewenang perizinan dan pemeriksaan untuk IKNB (selain LKM) saat ini masih berada di Kantor OJK Pusat ▪ OJK Kalimantan Timur secara bulanan terus memantau perkembangan kinerja keuangan dalam bentuk laporan statistik dan analisis kinerja IKNB, termasuk *Financial Technology*

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Sektor Keuangan Syariah

Sektor	Daftar Program Pendampingan
Perbankan Syariah	▪ Melakukan pendataan terhadap UMKM dan memberikan data tersebut kepada perbankan termasuk perbankan syariah, sehingga meningkatkan pembiayaan kepada UMKM ▪ Memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan oleh perbankan syariah ▪ Menghadirkan narasumber dari perbankan syariah dalam pembelajaran kepada UMKM (*Mini University*/pusat pelatihan UMKM yang dikembangkan oleh BI Kalimantan Timur) ▪ Meningkatkan kapasitas dengan memberikan pelatihan kepada UMKM agar memiliki usaha yang layak dan *bankable* melalui program Wirausaha Bank Indonesia (fb.me/ukm.Kalimantan Timur) ▪ Menfasilitasi produk bersertifikat halal pada *platform marketplace* minishop.id yang difungsikan sebagai *hub* rantai pasok antar UMKM binaan / UMKM Mitra dan Klaster BI serta membuka pasar baru di Kalimantan Timur
Perbankan Syariah (BPD Kaltimtara-Unit Usaha Syariah)	▪ Melakukan pendataan terhadap UMKM dan memberikan data tersebut kepada perbankan termasuk perbankan syariah, sehingga meningkatkan pembiayaan kepada UMKM ▪ Memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan oleh perbankan syariah ▪ Meningkatkan kapasitas dengan memberikan pelatihan kepada UMKM agar memiliki usaha yang layak dan *bankable* melalui program Wirausaha Bank Indonesia (fb.me/ ukm.Kalimantan Timur) ▪ Menfasilitasi produk bersertifikat halal pada *platform marketplace* minishop.id yang difungsikan sebagai *hub* rantai pasok antar UMKM binaan/UMKM Mitra dan Klaster BI serta membuka pasar baru di Kalimantan Timur

Sektor Keuangan Mikro Syariah

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Koperasi dan Keuangan Mikro Syariah

- Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS/USPPS)
- Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
- Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Sedang merintis pelatihan dan pendampingan kepada kelompok ibu-ibu RT yang wilayahnya merupakan daerah dengan tingkat KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) tertinggi di Kalimantan Timur dan sebagian yang terjerat rentenir. Ke depan diproyeksikan, mereka akan memiliki kegiatan produktif halal dan BMT.

Program Otoritas Jasa Keuangan (Provinsi)

Program pendampingan dan emberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan Bank Wakaf Mikro (BWM)

- Pembinaan yang dilakukan berupa pengawasan baik aktif (*on-site*) maupun pasif (*off-site*).
- OJK Kalimantan Timur memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan Koperasi LKMS Bank Wakaf Mikro Taawun Mitra Umat, yaitu:
- Pemeriksaan LKMS dilakukan 2 (dua) kali selama setahun. 1 (satu) pemeriksaan umum dan 1 (satu) pemeriksaan khusus
- Telah dilakukan pembinaan dan pemantauan secara rutin terkait komitmen terhadap hasil pemeriksaan
- Kantor Pusat OJK setahun sekali mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas kepada pegawai LKMS.

Sektor Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Program BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur

Kategori Program ZIS dan Alokasi BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur

Kategori	Nama Program	Jumlah Penerima Manfaat (jiwa)	Besar Alokasi Penyaluran (Rp)
Sosial Kemanusiaan	Bantuan Konsumtif Dhuafa	120	250,000,000
	Santunan Lansia Miskin	1 paket	99,487,305
	Santunan Khitanan Massal	350	52,500,000
	Santunan Anak Dhuafa	600	90,000,000
	Bantuan Paket Ceria Dhuafa	150	30,000,000
	Paket Takjil Ramadhan	1,020	6,000,000
	Paket Takjil Buka Puasa Anak Dhuafa	600	7,200,000
	Paket Nasi Kotak Buka Puasa Anak Dhuafa	600	15,000,000
	BAZNAS Tanggap Bencana	1 paket	200,000,000
	Paket Nasi Dhuafa	800	15,000,000
	Bantuan Konsumtif Ibnu Sabil	1 paket	286,614,841.24
	Bantuan Konsumtif Ghorimin	1 paket	122,834,931.96
	Bantuan Konsumtif Riqob	1 paket	40,944,977
Pendidikan	Bantuan Konsumtif Pendidikan	80	100,000,000
	Beasiswa Relawan BAZNAS Kaltim	32	57,600,000
Kesehatan	Bantuan Biaya Pengobatan	50	100,000,000
Pemberdayaan Ekonomi	Pedagang Kaki Lima	122	732,000,000
	Modal Usaha Mustahik	200	400,000,000
	Program Titik ZCD	70	1,484,900,000
Dakwah	Bantuan Stimulant Tahfidzul Qur'an	324	194,400,000
	Bantuan Ulama Tilawah Qur'an	60	45,000,000
	Bantuan Guru Diniah	100	50,000,000
	Pembinaan Keagamaan Warga Binaan Lapas	1 paket	50,000,000
	Bantuan untuk Pendidikan Dakwah dan Kegiatan Sosial Keislaman	80 paket	100,000,000
	Santunan Mualaaf Perorangan	300	75,000,000

Program BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur dalam Mengatasi Permasalahan Pandemi Covid-19

Nama Program Aksi Baznas yang berkaitan dengan Covid-19	Mekanisme tahapan penyaluran bantuan ZIS yang berkaitan dengan Covid	Jumlah bantuan yang diberikan (*dalam Rupiah*)	Tipe penerima manfaat	Dampak yang terjadi terhadap penerima bantuan
Penyemprotan cairan disinfektan	BAZNAS Kota Balikpapan bekerja sama dengan BPBD Kota Balikpapan	5,000,000	Di sekolah dan masjid	Para guru dan siswa serta jamaah masjid terhindar dari penularan Virus Covid-19
Bantuan paket sembako korban dampak Covid – 19	BAZNAS bekerja sama dengan kelurahan setempat, dengan Koni Balikpapan, PKK Kota Balikpapan dan Forum Madrasah Diniyah Kota Balikpapan	745,590,000	Para masyarakat tedampak Covid yang terdata oleh kelurahan setempat seperti yang terkena PHK, para olahragawan yg terdampak, guru TK/TPA serta guru Madrasah Diniyah di Kota Balikpapan	Dengan bantuan paket sembako tersebut dapat meringankan beban kebutuhan hidup khususnya kebutuhan pangan

Gambaran
Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah

Sektor Industri Halal

Nilai Ekspor Provinsi Kalimantan Timur

Sektor	Jumlah Ekspor tahun 2019 (USD)	% Dibandingkan dengan Total Ekspor Non-Migas (tahun 2019)
Makanan dan Minuman	37,786,000 (hasil perikanan)	1.5%

Jumlah Usaha/Merk dengan Sertifikat Halal pada Sektor Makanan dan Minuman (Mamin)

Sektor Usaha (Tahun 2018)		Sektor Usaha (Tahun 2019)	
Roti	34	Roti	34
Katering dan restoran	16	Katering dan restoran	12
Tepung, kanji, dan produk turunan/olahan	5	Tepung, kanji, dan produk turunan/olahan	5
Es, es krim, dan bahan-bahan pendukung	3	Es, es krim, dan bahan-bahan pendukung	5
Susu dan produk olahan/turunan susu	11	Susu dan produk olahan/turunan susu	Belum ada
Makanan olahan, daging dan unggas	11	Makanan olahan, daging dan unggas	2
Makanan olahan ikan	36	Makanan olahan ikan	13
Makanan olahan telur	1	Makanan olahan telur	Belum ada
Makanan ringan	199	Makanan ringan	138
Pemanis, bumbu dapur, bumbu penyedap/ pelengkap	24	Pemanis, bumbu dapur, bumbu penyedap/ pelengkap	21
Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	19	Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	15
Semua UsahaTersertifikasi Halal	359	Semua UsahaTersertifikasi Halal	245

Sumber: Daftar Belanja Produk Halal LPPOM MUI hingga periode Maret-April-Mei 2019

Kontribusi Sektor Mamin terhadap Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur

	2019	2018
PDRB (Milliar Rupiah)		
Mamin olahan	16,754.28	16,181.13
Mamin olahan, *base* = 2010	10,931.64	10,166.96
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb)	5,662.92	5,193.52
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb), *base* = 2010	3,679.13	3,465.43
Pertumbuhan PDRB (%)		
Mamin olahan, *base* = 2010	7.52	6.13
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb), *base* = 2010	6.17	8.94
Kontribusi pada PDRB (%)		
Mamin olahan	2.56	2.54
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb)	0.87	0.82

Total Produksi Daging Daerah (Tahun 2018)

Populasi Ternak		Produksi Daging Ternak (ton)	
Sapi Potong	117,504	Sapi	7,944.06
Sapi Perah	110	Sapi Impor	-
Kerbau	1,750	Kerbau	47.62
Kuda	97	Kuda	-
Kambing	66,378	Kambing	623.19
Domba	439	Domba	0.11
Populasi Unggas		**Produksi Daging Unggas (ton)**	
Ayam Kampung	4,569,169	Ayam Kampung	5,051.22
Ayam Petelur	480,066	Ayam Petelur	476.00
Ayam Broiler	66,733,989	Ayam Broiler	72,515.81
Bebek	291,829	Bebek	130.99

Sumber: Daftar Belanja Produk Halal LPPOM MUI hingga periode Maret-April-Mei 2019

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur

	2019	2018	2017	2016	2015
PDRB (Milliar Rupiah)					
Jasa akomodasi	1,568	1,634.08	1,786.34	1,638.88	1,446.96
Jasa akomodasi, *base* = 2010	884	924.73	1,030.21	966.27	877.36
Pertumbuhan PDRB (%)					
Jasa akomodasi, *base* = 2010	-4.40	-10.2	6.62	10.13	4.72
Kontribusi pada PDRB (%)					
Jasa akomodasi	0.94	1.32	1.44	1.41	1.37

Sektor Keuangan Syariah

Indeks literasi inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah

Indeks	Tahun 2016	Tahun 2019
Indeks Literasi Keuangan Syariah (OJK)	3.6%	1.85%
Indeks Inklusi Keuangan Syariah (OJK)	12.4%	3.15%
Indeks Literasi Ekonomi Syariah (BI)	-	126

Profil Keuangan BPD Kaltimtara (Unit Usaha Syariah/UUS) (*Miliar Rupiah*)

	2015	2016	2017	2018	2019
Total Aset Gross	1,382	1,690	2,390	2,706	-
Total Pembiayaan	882	792	850	735	-
Total DPK	973	853	1,089	1,409	-
Total FDR	-	-	-	-	-
Total NPF	-	4.94%	4.50%	4.39%	-
Pangsa Pasar (%)	-	-	-	9%	6.7%

Profil Industri Perbankan Syariah (BUS) di Provinsi Kalimantan Timur (*Miliar Rupiah*)

	2018	2019
Pangsa pasar (%)	25.1%	24.9%
Pembiayaan berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	524.22	468.13
Modal kerja (bukan UMKM)	352.94	429.19
Investasi (UMKM)	486.42	304.85
Investasi (bukan UMKM)	225.82	391.88
Konsumsi	1,067.75	1,129.36
NPF berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	35.43	28.53
Modal kerja (bukan UMKM)	56.44	44.64
Investasi (UMKM)	26.15	16.16
Investasi (bukan UMKM)	25.22	23.48
Konsumsi	42.23	38.82
Total		
Total aset gross	5,864	6,714
Total pembiayaan	2,657	2,723
Portfolio pembiayaan UMKM (%)	1,046	1,193
Total DPK	4,200	4,565
Total FDR	100.94%	94.76%
Total NPF	155	79
Total NPF (%)	5.3%	2.5%

Profil Industri Perbankan Syariah (UUS) di Provinsi Kalimantan Timur (*Miliar Rupiah*)

	2018	2019
Pangsa pasar (%)	13.1%	10%
Pembiayaan berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	285	255
Modal kerja (bukan UMKM)	7	7
Investasi (UMKM)	146	139
Investasi (bukan UMKM)	77	205
Konsumsi	1,321	1,559
NPF berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	88	165
Modal kerja (bukan UMKM)	1	1
Investasi (UMKM)	18	30
Investasi (bukan UMKM)	Belum ada	0
Konsumsi	41	49
Total		
Total aset gross	3,952	3,382
Total pembiayaan	1,836	2,164
Portfolio pembiayaan UMKM (%)	431	394
Total DPK	1,846	1,662
Total FDR	99.44%	130.25%
Total NPF	149	245
Total NPF (%)	8.1%	11.3%

Sektor Keuangan Mikro Syariah

Jumlah LKMS dan BWM yang Mendapatkan Program Pendampingan dan Pengawasan dari OJK

LKMS	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah yang mendapat pendampingan OJK	1	1	1
Jumlah yang diawasi oleh OJK	1	1	1

Profil Fundamental LKMS dan BWM di bawah pengawasan OJK

LKMS dan BWM	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah anggota BWM	25	25
Jumlah pegawai BWM	3	3
Modal sendiri	4,243,850,130	4,342,409,453
Volume usaha	4,243,850,130	4,342,409,453
Sisa Hasil Usaha (SHU)	6,149,870	92,409,453
Total aset	4,243,850,130	4,342,409,453
Rata-rata pembiayaan BWM	12,375,000	126,150,000

Jumlah IKMS yang Mendapatkan Program Pendampingan dan Pengawasan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

IKMS	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah yang mendapat pendampingan	55	57	58
Jumlah yang diawasi oleh Dinas (pengawasan yang dimaksud adalah pengecekan laporan RAT, kunjungan ke IKMS, dsb.)	41	43	26

Profil Fundamental IKMS di bawah Pengawasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

IKMS (KSPPS, BMT, Kopontren)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah IKMS yang berada di wilayah kerja	55	57	57
Jumlah anggota IKMS	411	736	2,121
Jumlah pegawai IKMS	16	22	18
Jumlah pegawai yang mempunyai sertifikasi pengelola KSPPS (IKMS)	-	-	-
Jumlah modal sendiri (*dalam Rupiah*)	2.9 Miliar	2.5 Miliar	2.1 Miliar
Jumlah modal luar/pinjaman (*dalam Rupiah*)	1.3 Miliar	5.5 Miliar	8 Miliar
Jumlah cadangan koperasi/permodalan (*dalam Rupiah*)	2.9 Miliar	2 Miliar	1.5 Miliar
Jumlah volume usaha (*dalam Rupiah*)	410 Juta	434 Juta	294 Juta

Sektor Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Daftar BAZNAS Aktif dan LAZ Aktif Rekomendasi Baznas

10 BAZNAS dan 4 LAZ Aktif (Rekomendasi Baznas)	Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Hulu, Kabupaten Kutai Barat serta LAZ Dana Peduli Umat Kalimantan Timur, LAZ Yayasan Baitul Maal Barakatul Ummah, LAZ Yayasan Al-Izzah Samarinda, dan LAZ Yayasan Sinergi Membangun Ummat

Alokasi APBD/Hibah Pemerintah Daerah kepada Institusi Pengelola Zakat yang Resmi

Daftar Alokasi APBD/Hibah	Nominal Alokasi (Rp)
Zakat	500,000.000 (2018)

Jumlah Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah (*dalam Rupiah*)

Jenis Dana	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Penghimpunan Zakat			
▪ Zakat Fitrah	Belum ada	1,255,916,000.00	684,881,000
▪ Zakat Maal/Harta	10,041,015,497.54	8,939,429,878.37	9,266,032,707.25
Penghimpunan Infak			
▪ Infak Bebas	987,919,985.83	1,127,212,644.00	1,030,905,755.00

Jumlah Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (*dalam Rupiah*)

Jenis Dana	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Penyaluran Zakat	2,283,444,394.57	4,656,066,949	5,163,226,385
Penyaluran Infak	995,615,328	407,875,679.5	304,236,277
Jumlah Penerima Manfaat Tercatat			
▪ Perorangan	2,369	1,468	872
▪ Yayasan/Komunitas	141	153	172

`

Besar Alokasi Penyaluran Zakat, Infak, Infak Terikat, Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Bidang Program	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Sosial Kemanusiaan	759,442,357	3,237,314,457	1,829,822,318
Pendidikan	75,091,814	170,217,250	113,345,000
Kesehatan	118,817,909	640,248,043	96,000,000
Pemberdayaan Ekonomi	401,025,807	622,209,329	2,679,220,559
Dakwah	508,060,109	367,409,000	407,847,000

Program Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah di Provinsi Kalimantan Timur

Kategori	Nama Program	Jumlah Penerima Manfaat (jiwa)	Besar Alokasi Penyaluran (Rp)	Nama Lembaga
Sosial Kemanusiaan	Bantuan Konsumtif Dhuafa	120	250,000,000	BAZNAS Kalimantan Timur
	Santunan Lansia Miskin	1 paket	99,487,305	BAZNAS Kalimantan Timur
	Santunan Khitanan Massal	350	52,500,000	BAZNAS Kalimantan Timur
	Santunan Anak Dhuafa	600	90,000,000	BAZNAS Kalimantan Timur

Kategori	Nama Program	Jumlah Penerima Manfaat (jiwa)	Besar Alokasi Penyaluran (Rp)	Nama Lembaga
	Bantuan Paket Ceria Dhuafa	150	30,000,000	BAZNAS Kalimantan Timur
	Paket Takjil Ramadhan	1,020	6,000,000	BAZNAS Kalimantan Timur
	Paket Takjil Buka Puasa Anak Dhuafa	600	7,200,000	BAZNAS Kalimantan Timur
	Paket Nasi Kotak Buka Puasa Anak Dhuafa	600	15,000,000	BAZNAS Kalimantan Timur
	BAZNAS Tanggap Bencana	1 paket	200,000,000	BAZNAS Kalimantan Timur
	Paket Nasi Dhuafa	800	15,000,000	BAZNAS Kalimantan Timur
	Bantuan Konsumtif Ibnu Sabil	1 paket	286,614,841.24	BAZNAS Kalimantan Timur
	Bantuan Konsumtif Ghorimin	1 paket	122,834,931.96	BAZNAS Kalimantan Timur
	Bantuan Konsumtif Riqob	1 paket	40,944,977	BAZNAS Kalimantan Timur
Pendidikan	Bantuan Konsumtif Pendidikan	80	100,000,000	BAZNAS Kalimantan Timur
	Beasiswa Relawan BAZNAS Kaltim	32	57,600,000	BAZNAS Kalimantan Timur
Kesehatan	Bantuan Biaya Pengobatan	50	100,000,000	BAZNAS Kalimantan Timur
Pemberdayaan Ekonomi	Pedagang Kaki Lima	122	732,000,000	BAZNAS Kalimantan Timur
	Modal Usaha Mustahik	200	400,000,000	BAZNAS Kalimantan Timur
	Program Titik ZCD	70	1,484,900,000	BAZNAS Kalimantan Timur
Dakwah	Bantuan Stimulant Tahfidzul Qur'an	324	194,400,000	BAZNAS Kalimantan Timur
	Bantuan Ulama Tilawah Qur'an	60	45,000,000	BAZNAS Kalimantan Timur
	Bantuan Guru Diniah	100	50,000,000	BAZNAS Kalimantan Timur
	Pembinaan Keagamaan Warga Binaan Lapas	1 paket	50,000,000	BAZNAS Kalimantan Timur
	Bantuan untuk Pendidikan Dakwah dan Kegiatan Sosial Keislaman	80 paket	100,000,000	BAZNAS Kalimantan Timur
	Santunan Mualaaf Perorangan	300	75,000,000	BAZNAS Kalimantan Timur

Indeks Zakat Nasional (IZN) di Provinsi Kalimantan Timur

	2018	2019
Indeks Zakat Nasional/IZN (Dimensi Makro)		
Regulasi	0	0.75
Dukungan Finansial dari Pemerintah (APBN/APBD) untuk BAZNAS	1.00	0.25
Jumlah Resmi Lembaga Zakat/OPZ, Muzakki, dan Mustahik	0.50	0.88
Rasio, Jumlah Muzakki Individual/Jumlah Rumah Tangga di Level Provinsi	0	0.47
Rasio, Jumlah Dari Muzakki Institusi/Jumlah Institusi di Level Provinsi	0.75	0.28
Database Dari Institusi/Lembaga Zakat yang Terdaftar	0.42	0.54
Total Indeks Makro	**0.53**	**0.49**
Indeks Zakat Nasional/Izn (Dimensi Mikro)		
Penghimpunan	1.00	0.56
Pengelolaan	0.50	0.63
Penyaluran	0.81	0.82
Pelaporan	0.50	0.69
Indeks Kesejahteraan Cibest	0	0.84
Modifikasi Indeks Pengembangan Manusia (HDI)	0.75	0.47
Kemandirian	0.50	0.64
Institusional	0.74	0.68
Dampak Zakat	0.40	0,65
Total Indeks Mikro	**0.54**	**0.66**

Indeks Skor Literasi dan Pemahaman Zakat Provinsi Kalimantan Timur

	2020
Indeks Literasi Zakat	68.21
Indeks Pemahaman Dasar tentang Zakat	74.82
Indeks Pemahaman Lanjutan tentang Zakat	55.92

Indeks Skor Literasi dan Pemahaman Wakaf Provinsi Kalimantan Timur

	2020
Indeks Literasi Wakaf	45.38
Indeks Pemahaman Dasar tentang Wakaf	54.67
Indeks Pemahaman Lanjutan tentang Wakaf	28.14

Sektor UMKM dan Ekonomi Pesantren

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program pengembangan ekonomi pesantren

3 Pondok Pesantren	3 Usaha-usaha Syariah (*detil terdapat di Lampiran*)

- Pengembangan ekonomi pesantren pada tahun 2019 di Ponpes Harun Nafsi Samarinda melalui pengembangan usaha dan bantuan pembangunan kebun *hidroponik* dan *learning center* sebagai
- Program Pengembangan Ekonomi Pesantren masih dilanjutkan untuk tahun 2020 dan akan ada penambahan pesatren untuk dibina

pusat pelatihan *urban farming*, khususnya hidroponik dan menjadi tempat pembelajaran bagi dunia pendidikan dan masyarakat umum. Saat ini sudah menjadi pusat pembelajaran hidroponik dari berbagai lapisan masyarakat dan UMKM.

- Mendorong terbentuknya *holding* pesantren, untuk menyatukan kegiatan ekonomi pesantren-pesantren ke dalam satu wadah. Pada tahap awal sudah dilakukan FGD untuk menyatukan visi dan misi selanjutnya dilanjutkan pembentukan Forum Bisnis Pesantren untuk dikerucutkan menjadi *Holding* Pesantren Kalimantan Timur.

Sektor Pendidikan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Perguruan Tinggi yang Menyediakan Program Studi Ekonomi dan Keuangan Syariah Terkait

Jenjang	Jumlah Universitas tahun 2019	Program Studi tahun 2019		2018		2019	
		Nama Program Studi	Jumlah Program Studi	Jml. Dosen	Jml. Mahasiswa	Jml. Dosen	Jml. Mahasiswa
Sarjana	5	Hukum Ekonomi Syariah	2	14	551	14	325
		Perbankan Syariah	2	13	1,028	13	668
		Ekonomi Syariah	3	29	1,794	29	1,044
Magister	1	Ekonomi Syariah	1	5	116	5	68

Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi Ekonomi Syariah Terkait

Akreditasi	Akreditasi Perguruan Tinggi			Akreditasi Program Studi		
	S1	S2	S3	S1	S2	S3
Akreditasi A	1	-	-	-	-	-
Akreditasi B	1	-	-	3	1	-
Akreditasi C	1	1	-	3	-	-
Belum Terakreditasi	1	-	-	-	-	-

Peluang Investasi Daerah
untuk Industri Keuangan Syariah

No.	Peluang Proyek Investasi	Pemangku Kepentingan	Sektor	Tahapan Proyek Investasi	Nilai Perkiraan Investasi (*dalam Rupiah*)
1	Sektor Industri	Dinas Perindustrian	Industri Tekstil	Belum berjalan	-
2	Sektor Industri	Dinas Perindustrian	Industri Barang Kulit & Alas Kaki	Belum berjalan	-
3	Sektor Industri	Dinas Perindustrian	Industri Kertas & Percetakan	Belum berjalan	-
4	Sektor Industri	Dinas ESDM	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin & Elektro	Belum berjalan	-
5	Sektor Industri	Dinas Kesehatan	Industri Instrumen, Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam	Belum berjalan	-
6	Sektor Industri Lainnya	Data tidak tersedia	Sektor Industri Lainnya	Belum berjalan	509.5 Juta
7.	Sektor industri	Dinas Perindustrian	Industri Tekstil	Belum ada	-
8	Sektor industri	Dinas Perindustrian	Industri Barang Kulit dan Alas Kaki	Belum ada	-
9	Sektor industri	Dinas Perindustrian	Industri Kertas & Percetakan	Belum ada	-
10	Sektor industri	Dinas ESDM	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin & Elektro	Belum ada	41.3 Miliar
11	Sektor Industri	Dinas Kesehatan	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi & Optik	Belum ada	1.5 Miliar

Meneropong *Best Practice* Kalimantan Timur Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Syariah

Ahmad Syarif, M.Sc[30]

Dinobatkannya Indonesia menjadi destinasi wisata ramah Muslim terbaik di dunia versi Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019 tentu saja patut diapresiasi. Sebelumnya, Nusa Tenggara Barat (NTB) juga pernah berhasil mengenalkan citra daerahnya sebagai destinasi wisata ramah Muslim. Provinsi NTB pernah meraih The Best World Halal Destination pada tahun 2015 dalam ajang International World's Best Halal Travel Summit di Abu Dhabi. Menurut penulis, wisata ramah Muslim adalah wisata yang terkait dengan layanan dan fasilitas wisata kepada wisatawan Muslim dan non-Muslim. Setidaknya memenuhi tiga kebutuhan dasar dalam wisatawan Muslim, yaitu pertama, adanya fasilitas dan layanan ibadah yang memadai, tempat tinggal yang ramah terhadap wisatawan Muslim (hotel syariah). Kedua, makanan dan minuman halal dengan jaminan halal melalui sertifikasi badan tertentu yang memiliki kewenangan. Ketiga, destinasi wisata seperti wisata alam, budaya dan wisata buatan yang dilengkapi dengan fasilitas atau infrastruktur untuk ibadah, seperti masjid atau musholla di sekitar tempat wisata. Kesuksesan NTB dalam mengelola sumber daya alamnya menjadi destinasi pariwisata ramah Muslim tentunya diharapkan dapat menular ke Kalimantan Timur, sebuah provinsi yang memliki sumber daya alam yang sangat luar biasa.

Kalimantan Timur (disingkat Kalimantan Timur) adalah sebuah provinsi Indonesia di Pulau Kalimantan bagian ujung timur dengan luas total sekitar 127,346.92 km² dan populasi sebesar 3.8 juta jiwa. Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi terluas di Indonesia dengan Samarinda sebagai ibu kotanya, wilayah ini memiliki beberapa objek wisata budaya dan juga alam yang ramai dikunjungi turis baik lokal maupun mancanegara. Di provinsi ini pula, industri gas alam serta tambang emas berada. Istimewanya lagi, provinsi ini merupakan rumah dari pusat pelestarian setidaknya 2,500 populasi orang utan. Kalimantan Timur menyimpan berbagai jenis destinasi wisata budaya maupun alam, diantaranya Pulau Derawan, Bukit Bangkirai, Desa Dayak Pampang, serta tempat konservasi hewan, seperti peternakan buaya di Balikpapan dan peternakan rusa di Penajam. Tak hanya itu, pelancong juga dapat mengunjungi Kebun Raya Unmul berlokasi di Samarinda untuk melihat beragam flora dan fauna yang dilindungi, seperti anggrek hitam, orangutan, elang kepala putih, serta burung merak.

Banyaknya keunggulan sektor pariwisata tersebut, Pemerintah Kalimantan Timur terus berupaya mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) yang berada di sekitar lokasi wisata. Berdasarkan data Disperindagkop (Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi) bahwa jumlah UKM di Kalimantan Timur pada 2019 berjumlah 302,527-unit terdiri dari kuliner sebanyak 89,798 unit. Investasi jangka panjang sektor pariwisata ini, tentu saja tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi melainkan juga mendukung pembangunan aspek sosial dan budaya. Kehadiran desa wisata ramah Muslim bisa jadi solusi untuk membentuk masyarakat yang memahami dan sadar mengenai adanya potensi pariwisata di wilayah mereka sendiri sehingga

[30] Dosen Ekonomi Syariah IAIN Samarinda dan Ketua KA-FoSSEI Kalimantan Timur

dapat menciptakan suatu objek wisata yang kreatif dan mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal seperti adanya fasilitas ibadah bagi wisatawan Muslim. Sudah banyak upaya-upaya Pemprov Kalimantan Timur dan beberapa instansi terkait dalam mendorong percepatan ekonomi syariah di Kalimantan Timur.

Beberapa diantara *Best Practice* dan *Unique Case* terkait Percepatan Pembangunan Ekonomi Syariah di Kalimantan Timur antara lain: **Pertama**, kolaborasi yang baik para pemangku kepentingan yaitu Kementrian Agama, Pemerintah Provinsi dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur terkait program sertifikat halal bagi pelaku UKM. Patut diapresisasi pula kesadaran yang besar para pelaku UKM di Kalimantan Timur untuk mengurus sertifikat halal sebagai jaminan produk pangan, makanan dan minuman bahkan kosmetik yang dihasilkan aman digunakan bahkan dikonsumsi masyarakat. Saat ini tercatat di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur bahwa ada sekitar 2000 UKM di Kalimantan Timur yang telah memiliki sertifikat halal dan program ini masih terus berkelanjutan. Uniknya, biaya program sertifikasi halal khusus UKM ini disubsidi oleh beberapa perusahaan sehingga biaya sertifikasi produk halal menjadi gratis.

Kedua, dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur telah bekerja sama dengan beberapa pengusaha travel untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dengan menawarkan tidak hanya wisata kuliner tetapi juga wisata pada sejumlah kawasan tempat-tempat ibadah seperti Masjid Islamic Center yang menawarkan keindahan dan kemegahan, Masjid Islamic Center Kalimantan Timur merupakan masjid termegah dan terbesar kedua di Asia Tenggara. Destinasi wisata selanjutnya adalah Masjid Sirathal Mustaqim yang merupakan masjid tertua berusia sekitar 130 tahun di Samarinda Seberang. Masjid ini juga menyimpan Al-Quran berusia 400 tahun. Selain menggandeng pihak biro perjalanan, Dinas Pariwisata Kalimantan Timur turut menggandeng pula beberapa instansi guna memperbaiki dan melengkapi fasilitas umum demi percepatan kawasan wisata ramah Muslim.

Ketiga, perpaduan kain tradisional khas Kalimantan Timur dan fesyen Muslim telah ditampilkan pada acara *fashion show* di FESyar 2018 (Festival Ekonomi Syariah) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kalimantan Timur. Kain tradisional Kalimantan Timur umumnya dihiasi dengan motif yang diambil dari kekayaan alam di Pulau Borneo, seperti motif flora berupa bunga anggrek hitam dan buah mangga kesturi yang telah punah dan menjadi maskot Pulau Kalimantan. Sentuhan modern fesyen Muslim dikombinasikan dengan kain motif khas Kalimantan Timur memberikan suasana yang berbeda pada festival tersebut. Inovasi para pengrajin tenun dalam mengembangkan fesyen Muslim telah menciptakan ciri khas etnik kontemporer daerah yang dapat diterima lintas generasi. Akulturasi fesyen Muslim dan kain tenun khas daerah tentu menjadi hal yang unik karena lajunya perkembangan zaman ternyata tak menghalangi para pegiat ekonomi kreatif untuk berkaya tanpa meninggalkan identitas daerahnya. Mengacu data Sensus Ekonomi 2016, Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) merilis bahwa terdapat 92,489-unit industri kreatif tersebar di wilayah Kalimantan Timur.

Keempat, adanya program kemandirian dan pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren rintisan Bank Indonesia Kalimantan Timur. Sejumlah program pengembangan ekonomi syariah tersebut yaitu pembentukan klaster usaha dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan menyasar pemberdayaan ekonomi syariah di pesantren. Tentu saja program tersebut mampu meningkatkan perekonomian Kalimantan Timur dari sektor yang halal dan tercipta santripreneur yang handal. Mengacu data Kementrian Agama, Kalimantan Timur memiliki 163 pesantren dengan jumlah santri sekitar 30 ribu. Program yang dicanangkan ini seperti pusat inkubasi bisnis syariah yang berfungsi menanamkan kemandirian ekonomi dikalangan para santri.

Program Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Syariah terus digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan kampus, instansi terkait, dan masyarakat. Kita sadari bahwa mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam (SDA) tidak terbarukan (migas dan batu bara) menjadi hal yang penting dan harus dirubah menjadi berbasis SDA terbarukan sektor pariwisata. Apalagi Kalimantan Timur didukung dengan kondisi geografis dan keanekaragaman objek wisata alam yang tersebar. Pariwisata ramah Muslim saat ini sebagai sektor yang strategis media integrasi program serta kegiatan antar sektor pembangunan sehingga pariwisata ramah Muslim sangat masuk akal jika disebut sebagai *leading* pembangunan. Adanya lembaga inkubasi bisnis syariah turut serta menjadi solusi sebagai wadah kerjasama semua pemangku kepentingan yang memiliki kompetensi tugas dan kewenangan dalam pembangunan UMKM sehingga target percepatan pembangunan ekonomi syariah tercapai.

Wawancara
Kepala Instansi Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Bagaimana visi, rencana, dan program-program terkait ekonomi syariah?

Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Pemerintah Daerah Kalimantan Timur baik visi, misi, maupun program/kegiatannya belum secara spesifik mengarahkan ke pengembangan ekonomi syariah, hal ini disebabkan belum adanya regulasi yang secara spesifik mengaturnya, walaupun pada kenyataannya perbankan syariah cukup berkembang di Kalimantan Timur. Hampir keseluruhan perbankan konvensional membuka bank syariah. Ini menunjukkan bahwa ada potensi di Kalimantan Timur.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Masukan visi, rencana program DPMPTSP Provinsi Kaltim terkait sektor ekonomi syariah, industri halal, dan sektor keuangan syariah adalah DPMPTSP Provinsi Kaltim mempunyai visi, yaitu menjadi institusi yang handal dan profesional untuk menarik dan memfasilitasi investor menuju masyarakat kaltim sejahtera dan misinya adalah meningkatkan perencanaan, kebijakan, promosi, kerjasama, pembinaan, pengendalian pengawasan pelaksanaan, dan pelayanan berbasis teknologi informasi terkait penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu yang didukung aparatur, sarana dan prasana dan pelaku usaha berkualitas.
Pengertian secara umum mengenai ekonomi syariah adalah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Hal ini sangat berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negera kesejahteraan. Selain itu, ekonomi dalam kacamata islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Dari pengertian secara umum mengenai ekonomi syariah, secara subtansial DPMPTSP Provinsi Kaltim telah melaksanakan sistem ekonomi syariah. Hal ini terlihat dari visi dan misi DPMPTSP Provinsi Kaltim. Namun ada beberapa hat secara detail masih belum mengikuti sistem ekonomi syariah, hal ini karena adanya sistem dan aturan pemerintah yang masih belum melaksanakan ekonomi syariah secara keseluruhan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur

a. Bank Indonesia memiliki kerangka dasar pengembangan ekonomi syariah yang memiliki tujuan peningkatan aset usaha syariah, menginklusifkan pembiayaan keuangan syariah, dan memperdalam pasar keuangan syariah di Indonesia dengan memperluas tingkat literasi ekonomi syariah agar mampu mengukuhkan indonesia sebagai pemimpin dalam pengembangan ekonomi syariah. Tujuan-tujuan tersebut ditopang oleh 3 pilar utama yaitu:
   - Pilar 1 penguatan ekonomi syariah (kaitannya dengan industri halal)
   - Pilar 2 pendalaman pasar keuangan syariah
   - Pilar 3 penguatan riset, asesmen & edukasi

   Adapun dalam mendukung pengembangan tersebut, Bank Indonesia bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan untuk mewujudkan ketiga pilar tersebut. Sebagai contoh, Bank Indonesia bekerja sama dengan kementrian keuangan untuk bersama-sama membangun pilar ke satu dan kedua terkait penguatan industri halal serta pendalaman pasar keuangan syariah. Khusus dengan MUI dan Bappenas, Bank Indonesia juga bekerja sama dengan MUI untuk memperkuat ketiga pilar yang tertuang didalam kerangka dasar pengembangan ekonomi syariah.

b. Dalam mewujudkan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia maupun di Kalimantan Timur berjalan dengan baik, KPw BI Kalimantan Timur memiliki *roadmap* pengembangan ekonomi syariah yang mengacu kepada 3 pilar syariah.
   - Pilar pertama, Bank Indonesia telah dan akan melakukan pemberdayaan ekonomi pesantren melalui bantuan teknis Program Pengembangan Ekonomi Pesantren dan pemberian PSBI (Program Sosial Bank Indonesia) di wilayah Kalimantan Timur. Selain itu bersama dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, MUI, BAZNAS Kalimantan Timur, IAIN Samarinda, Universitas Mulawarman, perbankan syariah, Badan Wakaf Kalimantan Timur, tokoh masyarakat dan masyarakat melakukan kampanye Gerakan Infaq Sadaqah dan Wakaf dalam rangka optimalisasi aset wakaf di Kalimantan Timur. Bekerja sama dengan MUI dan IAIN Samarinda, Bank Indonesia Kalimantan Timur sedang merancang Halal Center untuk mengakselerasi jumlah produk halal di Kalimantan Timur. Di Kabupaten Berau, Klaster Padi Organik binaan BI Kalimantan Timur juga mendukung BAZNAS Berau untuk mendistribusikan kepada kaum dhuafa di pedalaman kabupaten Berau.
   - Pilar kedua, banyak dilakukan oleh kantor pusat BI.
   - Pilar ketiga, BI Kalimantan Timur mendorong perluasan literasi ekonomi syariah dengan rutin melalui penyelanggaraan festival ekonomi syariah dan juga pengembangan kurikulum ekonomi syariah di Perguruan Tinggi Nasional (PTN) demi mewujudkan insan cendikia yang madani dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Selain itu melalui program pengembangan Wirausaha Bank Indonesia (Mini University Kalimantan Timur Preneurs), peserta juga diberikan pembekalan terkait pemahaman transaksi bisnis syariah dan akses kepada Lembaga Keuangan Syariah.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan Kantor Provinsi Kalimantan Timur

OJK Kalimantan Timur dalam mengembangkan sektor ekonomi dan keuangan syariah sesuai dengan kewenangan yaitu:

- Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Lembaga Jasa Keuangan khususnya yang berkantor pusat di Kalimantan Timur dan Kaltara
- Sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat

Bagaimana peluang pengembangan sektor ekonomi syariah, industri halal, dan sektor keuangan syariah?

Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Pengembangan sektor Ekonomi Syariah, Industri Halal, dan Sektor Keuangan di Provinsi Kalimantan Timur memiliki peluang yang besar, dimana persentase penduduk Muslim mencapai 85% dari jumlah penduduk di Kalimantan Timur. Di samping itu, peluang yang besar juga didorong oleh keberadaan UKM yang saat ini jumlahnya 307,343 unit.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Masukan tentang peluang potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Kaltim yaitu menurut organisasi masyarakat di bidang ekonomi syariah, masyarakat ekonomi syariah (MES) menilai ekonomi syariah akan tumbuh lebih baik setiap tahunnya, hat ini menyesuaikan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang juga diperkirakan akan membaik sekitar 5.5%. DPMPTSP Prov. Kaltim melihat bahwa investasi yang tumbuh di Provinsi Kaltim akan berbanding lurus dengan ekonomi syariah apabila pemerintah membuat aturan guna mendukung ekonomi syariah. Hal ini tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah di Provinsi Kaltim menjadi lebih baik.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur

- Kalimantan Timur memiliki potensi tinggi untuk melakukan pengembangan ekonomi syariah di wilayah timur Indonesia. Hal tersebut tercermin dari jumlah pesantren yang relatif tinggi dibandingkan wilayah lainnya di kawasan timur Indonesia dengan 141 pesantren. Seperti kita ketahui bersama, pesantren merupakan salah satu faktor pendukung yang kuat demi mewujudkan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia
- Provinsi yang mempunyai potensi Pengumpulan Dana Zakat tertinggi di wilayah Kalimantan. Dari data yang kami himpun dari sistem SIMBA yang dimiliki oleh BAZNAS, tercatat Kalimantan Timur memiliki jumlah penghimpunan ZIS yang cukup tinggi apabila diperbandingkan dari rata-rata nasional. Pada tahun 2017, tercatat ZIS yang dihimpun di Kalimantan Timur mencapai 17 Miliar rupiah berada di atas rata-rata nasional sebesar 14.8 Miliar
- Dari sisi penyaluran ZIS, Kalimantan Timur tercatat mampu menyalurkan sebesar 10,7 miliar rupiah berada di atas rata-rata nasional sebesar Rp 7.7 miliar. Dari indikator a*llocation to collection ratio*, Kalimantan Timur tercatat masuk kedalam kategori *affective* dengan skor ACR sebesar 62%. Adapun indikator ACR sendiri dipergunakan untuk melihat efektivitas penyerapan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan
- Tanah waqaf sejumlah 737.57 H, berada pada 9 kabupaten/ kota tersebar di 3111 lokasi, yang telah bersetifikasi sejumlah 982 lokasi
- Dari sisi industri halal, sudah sekitar 2000 produk UMKM berlabel halal

Ketua Otoritas Jasa Keuangan Kantor Provinsi Kalimantan Timur

Peluang pengembangan sektor keuangan syariah masih terbuka mengingat OJK berperan aktif dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi di sektor jasa keuangan termasuk syariah.

Bagaimana tantangan utama apa yang saat ini dihadapi dalam mengembangkan sektor ekonomi syariah, industri halal, dan sektor keuangan syariah?

Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Tantangan utama dalam mengembangkan sektor Ekonomi Syariah, Industri Halal, dan sektor Keuangan Syariah di Kalimantan Timur adalah belum adanya regulasi yang mengharuskan adanya Pengembangan pada sektor-sektor tersebut.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Masukan terkait tantangan yang dihadapi ekonomi dan keuangan syariah adalah krisis ekonomi yang sering terjadi ditengarai/disusupi oleh ulah sistem ekonomi konvensional yang mengedepankan sistem bunga sebagai instrumen profitnya. Berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh sistem ekonomi syariah, dengan instrumen profitnya, yaitu sistem bagi hasil. Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis dan sosialis yang sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya. Terkait tantangan yang dihadapi sistem ekonomi pemerintah saat ini belum sepenuhnya mengikuti sistem ekonomi syariah, beberapa sistem keuangan negara masih bersifat sistem konvensional. Hal inilah yang harus dikaji oleh pemerintah pusat untuk peningkatan ekonomi Indonesia secara syariah dimasa akan dating

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur

- Pemerintah belum memiliki rencana pengembangan ekonomi dan keuangan syariah
- Pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid belum dikembangkan
- Terdapat potensi ekonomi pesantren yang belum tersentuh dan diberdayakan
- Masih rendahnya *awareness* dan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah
- Masih kurangnya komitmen Pemerintah Daerah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah

Ketua Otoritas Jasa Keuangan Kantor Provinsi Kalimantan Timur

Tantangan utama:

- Masih terdapat persepsi negatif mengenai kemurnian lembaga jasa keuangan syariah khususnya perbankan syariah oleh komunitas tertentu melalui media sosial. Perlu ada kampanye masif dari pemerintah atau Majelis Ulama Indonesia untuk memastikan isu kemurnian lembaga jasa keuangan syariah
- Ketertinggalan produk/layanan berbasis teknologi dari lembaga jasa keuangan syariah dibandingkan lembaga konvensional, seperti layanan aplikasi melalui *mobile* (*mobile banking* dll)
- Tingkat marjin pembiayaan syariah lebih tinggi daripada tingkat suku bunga konvensional
- Belum terbukanya kebijakan instansi pemerintahan, khususnya daerah untuk memberikan opsi rekening penggajian pegawai melalui bank syariah. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan dana murah bank syariah (melalui tabungan), diharapkan beban bank syariah menurun lebih kecil sehingga tingkat marjin lebih rendah lagi.
- SDM pelaku/pegawai lembaga jasa keuangan perlu ditingkatkan pemahaman mengenai akuntansi/ekonomi syariah agar implementasi Fatwa MUI dapat diterapkan dengan lebih baik

Kalimantan Timur

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Ekonomi Pesantren

No	Nama Pesantren	Deskripsi Program
1	Ponpes KH. Harun Nafsi	Pengembangan ekonomi pesantren (2019): ▪ Pembangunan Kebun Hidroponik ▪ Pembangunan Urban Farming Learning Center-Hidroponik
2	Ponpes Hidayatullah Kalimantan Timur dan Ponpes Ibadurrahman	Pengembangan ekonomi pesantren-pengembangan komoditas ketahanan pangan dan hortikultura (2020)
3	Seluruh Pesantren di Kalimantan Timur	*Holding* Bisnis Pesantren dengan tahapan ▪ Telah dilaksanakan FGD Diseminasi Konsep *Holding* Pesantren kepada para Pembina Pembina Ponpes di Kalimantan Timur dengan menghadirkan narasumber dari Ponpes Bahar Ulum Tambak Rejo Jombang Jatim, Disperindagkop UMKM, IAIN Samarinda dan 29 Ponpes yang berasal dari Kalimantan Timur. ▪ Menindaklanjuti hasil FGD, akan dilakukan Pembentukan Forum Bisnis Pesantren, dimana unit usaha pesantren saling bekerja sama dan kebutuhan pesantren akan di penuhi oleh pesantren lainnya (belum terealisasi karena Covid-19). ▪ Menindak lanjuti hasil FGD, ponpes ponpes sepakat untuk membentuk Koperasi Sekunder, gabungan beberapa koperasi pondok pesantren (belum terealisasi karena Covid-19).

Daftar Usaha-Usaha Syariah yang Dikelola Pondok Pesantren

No	Nama Pesantren	Nama Unit Usaha yang dikelola Santri
1	Hidayatullah (Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan Berau	*Mini market,* Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan
2	Nahdatul Wathan	Jual ATK dan Sembako
3	Nabil Husien	Perdagangan dan Jasa
4	Al Husna	Perdagangan
5	Istiqomah	Jual ATK dan Sembako
6	Al Falah	Perdagangan dan Pembuatan Baliho
7	Ihya Ulumuddin	Kantin
8	Shuffah Hizbullah Samarinda	Perdagangan
9	Al-Aziziyah	Perdagangan
10	Darul Qur'an Wattarbiyah	Kantin
11	Al Hidayah	Perdagangan, Air Minum dan *Laundry*
12	Darul Falah	Perdagangan

13	Syaichona Kholil	Perdagangan
14	Lukmanul Hakim	Kebun Sawit
15	Madinatul Qur'an	Perdagangan, Kebun Sawit dan Ternak Lele
16	Salsabila	Perdagangan Sembako dan Alat tulis
17	Darusaadah	Perdangan dan Toko Bangunan
18	Bina Insan	Penjualan ATK, Penjualan Makanan,
19	Annur	Budidaya daya Ikan Lele, Hidroponik
20	Ibadurahman	Perdagangan dan Jasa
21	Hidayatullah (Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan Berau	Minimarket, Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan
22	Al Mukminun	Kantin Pesantren, Sarang Walet

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Provinsi

Sumatera Utara

Sekilas

tentang Ekonomi Syariah Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memiliki potensi untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah. Mayoritas penduduk Sumut beragama Islam (63.91%) namun secara kebudayaan memiliki penduduk heterogen yang lintas etnis, budaya dan agama yang hidup berdampingan dengan keberagaman. Khasanah keragaman budaya Provinsi Sumatera Utara ini dapat menjadi kekuatan pengembangan ekonomi syariah yang menyatu dengan kearifan lokal. Geliat ekonomi Syariah di Provinsi Sumut khususnya pada sektor keuangan syariah perlahan mulai terlihat dari meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 7.47% (yoy) pada periode Juni 2020 (OJK, 2020). Di sektor keuangan sosial syariah, kepedulian penduduk Sumatera Utara terhadap zakat dan wakaf juga mulai meningkat.

Keindahan alam, budaya dan kuliner beragam dan unik menjadi daya tarik Provinsi Sumatera Utara. Potensi ini dapat dimanfaatkan Pemerintah daerah untuk meningkatkan pengembangan industri halal terutama pada sektor makanan dan minuman, industri pengolahan, pertanian dan pariwisata ramah Muslim. Diperkirakan pangsa pasar konsumsi produk halal di Sumut berkisar antara 15-20% dengan konsumsi produk halal di Sumut sekitar Rp 40-80 triliun/tahun (Kepala Kantor Perawakilan BI Sumut, 2019). Sebagai salah satu kota yang memiliki kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar di Pulau Sumatera, Provinsi Sumut memiliki potensi pengembangan Kawasan Industri Halal dan Pariwisata Ramah Muslim misalnya Kawasan Industri Medan (KIM) dan Kawasan Wisata Danau Toba.

Regulasi Tingkat Daerah
di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah

Peraturan Daerah terkait Keuangan Syariah	Belum Ada
Peraturan Daerah terkait Industri Halal	Belum Ada
Peraturan Daerah terkait Fesyen Muslim	Belum Ada
Peraturan Gubernur terkait Pariwisata Ramah Muslim	Belum Ada
Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur lainnya	Wacana dari Gubernur Sumatera Utara untuk mengadakan pariwisata ramah Muslim di kawasan Danau Toba (dalam proses)

Rencana Pemerintah Daerah
di Sektor Ekonomi Syariah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023 di Provinsi Sumatera Utara memfokuskan pada "Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat" dengan 5 misi utama yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan
2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik
3. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan
4. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan
5. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan

Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Inflasi		Tingkat Pengangguran		Tingkat Kemiskinan		Konsumsi RT		Konsumsi Pemerintah		Investasi		Ekspor		Impor	
2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
5.18%	5.22%	3.13%	1.23%	5.56%	5.41%	8.83%	8.63%	5.87%	4.38%	9.17%	0.45%	10.25%	8.60%	5.50%	-1.30%	8.50%	-2.30%

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sumatera Utara Tahun 2019-2023

- Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan dengan meningkatkan kerukunan antar umat beragama, ketersediaan sandang, pangan dan papan, serta meningkatkan konektifitas infrastruktur
- Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan, etika berpolitik dan wawasan kebangsaan.
- Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang berpendidikan, terpelajar, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan madiri
- Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan, bebas dari judi, narkoba, prostitusi, penyelundupan dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
- Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan dengan pengelolaan lingkungan berkelanjutan, pertanian dan pariwisata berkelanjutan

Program-Program Unggulan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara 2019-2023	Isu Strategis RPJMD Sumatera Utara 2019-2023
▪ Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja, diantaranya melalui kerjasama dengan institusi nasional dan internasional, pengembangan pusat inovasi dan industry kreatif, sentra UMKM dan IKM serta peningkatan sosialisasi dan keumudah perizinan. ▪ Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan diantaranya dengan pemberian beasiswa, penambahan gaji guru honorer dan integrasi Pendidikan karakter ▪ Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan. ▪ Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas dari segi SDM kesehatan dan fasilitas kesehatan. ▪ Peningkatan daya saing melaui sektor agraris dan wisata	▪ Ketimpangan dan Pendapatan ▪ Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial ▪ Pendidikan dan Kesehatan ▪ Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup ▪ Infrastruktur ▪ Reformasi Birokrasi

Rencana Pembangunan Ekonomi Syariah di Provinsi Sumatera Utara

Sektor Pariwisata Ramah Muslim

- Peningkatan kuantitas dan kualitas Pariwisata Ramah Muslim Sumatera Utara dengan menggali dan mengembangkan potensi wisata Sumatera Utara
- Mengadakan promosi dan sosialisasi di tatanan negara Asia Tenggara dan dunia internasional.

Program Pemerintah Daerah
di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah

Sektor Industri Halal

Program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Sektor industri halal unggulan yang akan diprioritaskan pengembangannya adalah sektor makanan minuman, pariwisata, dan fesyen, sesuai wacana Gubernur Sumatera Utara terkait pengembangan ekonomi syariah seperti sertifikasi halal, Pariwisata Ramah Muslim termasuk rencana pembangunan kluster halal di Kawasan Industri Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan potensi klaster halal di daerah lain seperti Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, Batu Bara, Asahan, Simalungun, Karo, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga dan Seluruh Kabupaten di Kepulauan Nias.

Program Pendukung Sektor Industri Halal

Makanan dan minuman halal	▪ Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah ▪ Fasilitasi Sertifikasi bagi Industri Kecil Menengah (Terkait pelatihan/ Bimbingan Teknis terhadap prosedur pengusulan sertifikasi halal)

Jumlah Kegiatan Syariah/Halal

	Jumlah Kegiatan Produk Daerah	Jumlah Kegiatan Produk Halal/Syariah/Islami
Pariwisata	-	1

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pendukung Sektor Industri Halal

- Program IKRA (Industri Kreatif Syariah); Total existing hasil kurasi ±6 UMKM.
- Festival Ekonomi Syariah wilayah Sumatera (FeSyar).
- International Sharia Economic Festival (ISEF).
- Melaksanakan pilot project program halal value chain dan pendampingan kepada UMKM Syariah.
- Mendorong UMKM untuk menerapakn prinsip Syariah pada proses produksi dan pemasaran.
- Mendorong dan memfasilitasi UMKM dalam proses sertifikasi halal produk.
- Memfasilitasi penyusunan laporan keuangan UMKM Syariah mengacu kepada pedoman akuntansi pelaku usaha Syariah.
- Mendorong penerapan elektronifikasi pembayaran pada UMKM.
- Mendorong inisiasi *linkage* antar UMKM Syariah dengan industry halal.

Sektor UMKM dan ekonomi pesantren

Program Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Program Kemitraan UMKM dan Pengusaha Besar

Tahap	Daftar Program Kemitraan di peringkat Desa/Kabupaten/Kota
Sudah ada	▪ Program Pendampingan UMKM dalam Pengurusan Label Halal di Disperindag Provinsi Sumatra Utara.
Tahap perencanaan	-

Program Pemberdayaan IKM dan UMKM

Sektor	Daftar Program Pendampingan
Makanan dan minuman halal	▪ Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor-Impor ▪ Pengembangan dan Promosi ekspor hasil industri Sumut di Pulau Penang ▪ Peningkatan Promosi Ekspor UKM ▪ Pelatihan Kemampuan UKM di bidang Ekspor ▪ Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional ▪ Partisipasi pameran dan misi dagang ke mancanegara ▪ Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri ▪ Pelaksanaan Pasar Murah Menyambut Hari Besar Keagamaan Negara (HBKN)

Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	2017	2018	2019
IKM mendapat pendampingan	75	35	80
IKM mendapat pendampingan sertifikasi halal	61	26	69

Program Bank Indonesia (Regional)

Program Pengembangan Ekonomi Pesantren

Jumlah Pesantren	Program Pengembangan Ekonomi (*Lampiran*)
6	6
▪ Melaksanakan edukasi program *pilot project*, dan pendampingan kepada pondok pesantren ▪ Mendorong penerapan prinsip syariah pada unit pengembangan unit usaha Pondok ▪ Melaksanakan dan mefasilitasi keikutsertaan ponpes dalam kurasi produk untuk mendorong promosi dan pemasaran ▪ Memfasilitasi sertifikasi produk halal ▪ Menmasilitasi keikutsertaan dalam kegiatan ekonomi syariah ▪ Memberi bantuan sarana produksi ▪ Menfasilitasi penyusunan laporan keuangan ▪ Mendorong peberapan elektronisasi ▪ Mendorong *linkage* antarunit usaha pesantren	▪ Pengembangan pengelolaan limbah sampah di pesantren Mawaridussalam ▪ Pengembangan usaha *laundry* di Pesantren Tarbiyah Islamiyah Ar Raudhatul Hasanah dan PM Al Hasyimiyah. ▪ Program bantuan teknis dan pelatihan *cake and bakery,* manajemen air bersih dan elektronifikasi. ▪ Bantuan PSBI untuk sarana produksi air minum dalam kemasan, mesin *packaging* di PM Muhammadiyah Kwala Madu Langkat. ▪ Bantuan PSBI untuk Saran Hidroponik, dan pelatihan budidaya hidroponik di pesantren Al Al Kautsar al Akbar Medan.

Program Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Sumatera Utara

- Program sosialisasi usaha berbasis syariah bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut dalam upaya memperkuat ekonomi umat di Provinsi Sumatera Utara.
- Program sosialisasi sertifikasi halal kepada UMKM dan anggota KADIN Sumatera Utara bekerja sama dengan LPPOM MUI Sumatera Utara

Sektor Keuangan Syariah

Program Otoritas Jasa Keuangan (Regional)

Sub-sektor	Detil Program
Perbankan Syariah	▪ Recycling/workshop dengan seluruh BPR dan BPRS berkantor pusat di Sumatera Utara yang dilakukan rutin setiap tahun dengan beberapa topik untuk penguatan bank seperti pemenuhan ketentuan modal inti BPRS dan status pengawasan BPRS. ▪ Pertemuan dengan Dewan Pengawas Syariah BPRS berkantor pusat di Sumatera Utara membahas isu strategis BPRS pada tahun 2018. ▪ *Capacity Building* BPRS se-Sumatera Utara bersinergi dengan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2018 dengan topik analisis pembiayaan dan *selling skill*. ▪ Sosialisasi pelaporan Laporan Bulanan BPRS pada tahun 2019 ▪ Pembahasan dan pendampingan atas ketentuan terkini termasuk Fatwa DSN MUI dengan seluruh BPR dan BPRS berkantor pusat di Sumatera Utara pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2020 direncanakan workshop dengan BPR dan BPRS mengenai ketentuan KAP dan PPAP, PAPSI, ketentuan stimulus pandemi Covid-19, dan isu strategis lainnya.
Bank Pembangunan Daerah	Recycling/workshop dengan seluruh bank umum di Sumatera Utara, termasuk BPD Sumatera Utara dan Unit Usaha Syariahnya yang dilakukan rutin setiap tahun dengan beberapa topik untuk penguatan bank seperti market outlook, analisa pembiayaan, aspek legal, arsitektur perbankan, dsb.

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Keuangan Syariah

- Mendorong partisipasi perbankan syariah dalam pengembangan ekonomi syariah melalui edukasi dan keikutsertaan pada berbagai kegiatan yang dilaksanankan dan diinisiasi oleh BI.
- Mendorong Partisipasi IKNB Syariah dalam pengembangan ekonomi syariah melalui Edukasi Keikutsertaan pada berbagai kegiatan ekonomi syariah seperti Road to Fesyar dan ISEF

Sektor Keuangan Mikro Syariah

Program Otoritas Jasa Keuangan (Regional)

Program Pendampingan, Pengawasan, dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Bank Wakaf Mikro (BWM)

LKMS Madani Emas Nusantara	Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan yang telah dilakukan oleh KR 5 Sumatera Bagian Utara tanggal 17 - 20 September 2019
BWM Mawaridusalam	1. Rencana strategis pengembangan BWM ke depan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara mengimplementasikan kebijakan pengembangan BWM sesuai dengan yang dikembangkan oleh Kantor Pusat. 2. Program pendampingan/pemberdayaan serta program Bantuan yang dilakukan oleh OJK untuk BWM (rekap kegiatan dalam tahun 2020): a. Kegiatan Forum Online BWM 1) 7 Juni 2020: Pendampingan terkait Arah Pengembangan BWM di era New Normal bersama Ketua DK OJK 2) 22 Juni 2020 : Kebijakan Strategis BWM di Masa Pandemi Covid - 19 bersama Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK dan Direktur Laznas BSM Umat

3) 6 Juli 202: Komunikasi dan Optimalisasi Halaqoh Mingguan Transisi di Masa New Normal bersama dengan Direktur Laznas BSM Umat
4) 20 Juli 2020: Potensi dan Optimalisasi Pendapatan BWM bersama dengan Direktur Utama Laznas BSM Umat dan Ecodoe
5) 3 Agustus 2020: Optimalisasi Sosmed dan Digital Marketing dalam Memasarkan Produk Nasabah BWM oleh OJK dan Astra Internasional
6) 24 Agustus 2020: Pengembangan Ekosistem BWM oleh Pinbuk dan OJK
7) 7 September 2020: Optimalisasi dan Added Value Produk Nasabah BWM oleh OJK dan Astra Internasional
8) 9 Oktober 2020: Dukungan dan Kebijakan BWM dimasa Pandemi Covid-19

b. Pelatihan atau Workshop Digitalisasi BWM : edukasi terkait penggunaan aplikasi BWM Mobile, BWM Halaqoh, BWM Bumdes Marketplace, BWM Info, Mendapatkan penjelasan terkait Fiqh Muamalah transaksi di Market Place oleh DSN MUI, Mendapatkan pembinaan terkait urgensi digital marketing pada tanggal 21 September s.d. 2 Oktober 2020.
c. Fasilitasi Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro (BPUM) dari Kementerian Koperasi dan UKM RI kepada Nasabah BWM terdampak Covid - 19 pada bulan Agustus 2020
d. Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BWM.

3. Program pendampingan/pemberdayaan serta program Bantuan yang dilakukan oleh OJK untuk BWM dalam tahun 2019, antara lain:
   a. Mengikutsertakan seluruh pegawai dan satu ornag pengurus pada Pelatihan Pengelolaan BWM di Bogor pada tahun 2018 dan 2019

   Mengikutsertakan pegawai admin pada Pelatihan Pengelolaan BWM tingkat Lanjutan di Bogor pada tahun bulan Desember 2019

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Koperasi dan Keuangan Mikro Syariah

- Mendorong Partisipasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam pengembangan ekonomi syariah melalui Edukasi Keikutsertaan pada berbagai kegiatan ekonomi syariah seperti Road to Fesyar dan ISEF

Program Kamar Dagang dan Industri

Program Pendampingan Koperasi Syariah

Koperasi Syariah Desk	▪ Program bimbingan pembinaan dan kemitraan dengan Koperasi Syariah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sumatra Utara

Sektor Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Program BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Kategori Program ZIS dan Alokasi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Kategori	Nama Program	Jumlah Penerima Manfaat (jiwa)	Besar Alokasi Penyaluran (Rp)
Sosial Kemanusiaan	1. Layanan Aktif 2. Tanggap Bencana 3. Respon Kebencanaan 4. Stimulan Rutilahu 5. Bantuan Rutitebe 6. Sosial Kemanusiaan	15,335	6,465,708,010
Pendidikan	1. Beasiswa Mulia 2. Beasiswa Zakti 3. Fasilitas Belajar 4. Advokasi Pendidikan	3,294	6,632,729,904
Kesehatan	1. Layanan Kesehatan 2. Layanan Mobil Sehat 3. Siaga Gizi Sehat 4. Sanitasi Air Bersih 5. Stimulan Rutisae 6. Advokasi Kesehatan	1,906	4,379,243,427
Pemberdayaan Ekonomi	1. Pemberdayaan Masyarakat 2. Pelatihan Produktif 3. Sarana Mandiri 4. Bantuan Wirausaha 5. Pendampingan Usaha	3,245	1,914,286,000
Dakwah	1. Ramadhan Ceria 2. Safari Ramadhan 3. Berbagi Qur'an 4. Fasilitas Ibadah 5. Pembinaan Imtak 6. Syiar Islam	12,801	7,450,907,846

Gambaran
Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah

Sektor Industri Halal

Jumlah Usaha/Merk dengan Sertifikat Halal pada Sektor Makanan dan Minuman (Mamin)

Sektor Usaha (Tahun 2018)		Sektor Usaha (Tahun 2019)	
Roti	41	Roti	36
Katering dan Restoran	12	Katering dan Restoran	15
Tepung, Kanji, and produk turunan/olahan	25	Tepung, Kanji, and produk turunan/olahan	17
Es, es krim, dan bahan-bahan pendukung	3	Es, es krim, dan bahan-bahan pendukung	2
Susu dan produk olahan/turunan susu	2	Susu dan produk olahan/turunan susu	2
Makanan olahan, daging dan unggas	5	Makanan olahan, daging dan unggas	4
Makanan olahan ikan	25	Makanan olahan ikan	21
Makanan olahan telur	-	Makanan olahan telur	-
Makanan ringan	162	Makanan ringan	135
Pemanis, bumbu dapur, bumbu penyedap/ pelengkap	64	Pemanis, bumbu dapur, bumbu penyedap/ pelengkap	49
Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	8	Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	7
Semua Usaha Tersertifikasi Halal	347	Semua Usaha Tersertifikasi Halal	288

Sumber: Daftar Belanja Produk Halal LPPOM MUI hingga periode Maret-April-Mei 2019

Kontribusi Sektor Mamin terhadap Perekonomian Provinsi Sumatera Utara

	2018	2017	2016	2015	2014
PDRB (Milliar Rupiah)					
Mamin olahan	106,660.98	99,152.01	87,757.85	79,961.49	70,123.04
Mamin olahan, *Base* = 2010	69,182.16	66,562.68	64,622.05	61,268.94	57,827.77
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb)	15,805.61	14,456.19	13,166.43	11,975.87	10,658.09
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb), *Base* = 2010	10,757.45	9,926.50	9,168.66	8,474.00	7,899.32
Pertumbuhan PDRB (%)					
Mamin olahan, *Base* = 2010	3.94	3.00	5.47	5.95	4.82
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb), *Base* = 2010	8.37	8.27	8.20	7.28	6.78
Kontribusi pada PDRB (%)					
Mamin olahan	14.39	14.49	14.02	13.99	13.43
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb)	2.13	2.12	2.10	2.09	2.04

Total produksi daging daerah (tahun 2017)

Populasi Ternak		Produksi Daging Ternak (ton)	
Sapi Potong	712,106	Sapi	26,297.65
Sapi Perah	1,948	Sapi Impor	
Kerbau	108,792	Kerbau	4,664.65
Kuda	1,283	Kuda	57.66
Kambing	895,762	Kambing	3,980.83
Domba	685,643	Domba	1,946.55
Populasi Unggas		**Produksi Daging Unggas (ton)**	
Ayam Kampung	15,953,555	Ayam Kampung	18,919.51
Ayam Petelur	24,670,540	Ayam Petelur	11,527.27
Ayam Broiler	183,833,290	Ayam Broiler	199,760.58
Bebek	3,402,459	Bebek	662.75

Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah

	2018	2017	2016	2015	2014
PDRB (Milliar Rupiah)					
Jasa akomodasi	1,831	1,796	1,768	1,810	1,625
Jasa akomodasi, *Base* = 2010	1,374	1,356	1,344	1,393	1,326
Pertumbuhan PDRB (%)					
Jasa akomodasi, *Base* = 2010	1.33	0.89	-3.52	5.05	4.74
Kontribusi pada PDRB (%)					
Jasa akomodasi	0.27	0.28	0.29	0.32	0.32

Indikator Pariwisata Ramah Muslim Provinsi Sumatera Utara

Indikator	Skor/Nilai	Keterangan
Akses	Baik	Terdapat akses udara, akses kereta, akses laut, dan kondisi jalan masih layak pakai
Akses Udara	Baik	Terdapat bandara internasional
Bandara Internasional	2	
Bandara Domestik	1	
Akses Kereta	Baik	Terdapat akses kereta api
Jumlah rute	ada	terdapat jalur/rute kereta Sumatera Utara - Aceh, kereta bandara dan ke kota-kota lain, namun belum terinfo data detilnya
Akses Laut	Baik	Terdapat beberapa pelabuhan
Terminal Kapal Pesiar	1	
Pelabuhan	7	Belawan, Pangkalan Brandan, Pangkalan Susu, Sibolga, Gunung Sitoli, Tanjungbalai Asahan, Kuala Tanjung
Infrastruktur Jalan	Baik	Kondisi jalan sebagian besar dalam kondisi baik dan layak

Indikator	Skor/Nilai	Keterangan
Jalan Provinsi	3,000.41	(km) sebagian besar dalam kondisi baik dan sedang
Komunikasi	Cukup baik	Terdapat edukasi pemangku kepentingan, program jangkauan pasar, serta beberapa konten pemasaran digital, namun tidak terinfo terkait ada tidaknya pemandu tur dan panduan pengunjung Muslim
Edukasi Pemangku Kepentingan	Cukup baik	Terdapat edukasi pemangku kepentingan dalam bentuk workshop
Workshop	Belum ada	Terdapat workshop yang dilakukan oleh Disbudpar Sumatera Utara bersama Kemenpar, namun belum menyentuh Pariwisata Ramah Muslim
Jangkauan Pasar	Cukup baik	Terdapat kegiatan
Konferensi/Pameran/Expo	ada	Terdapat kegiatan tahunan di Danau Toba dan kegiatan-kegiatan musik
Pemasaran Digital	Cukup baik	Tidak ada apps di ios dan android serta media sosial resmi tentang pariwisata sumatera utara, namun terdapat *website* pemda resmi yang berisi konten pariwisata Sumatera Utara dan pemasaran pariwisatanya terbantu oleh travel vlogger
Website	Ada	Terdapat website resmi pemda Sumatera Utara terkait pariwisata
Lingkungan	Kurang baik	Banyak turis yang datang ke Sumatera Utara, namun warga Sumatera masih menolak pengembangan Pariwisata Ramah Muslim karena berbagai macam alasan
Kedatangan Turis	Baik	
Wisatawan Mancanegara	258,882	Data BPS
Komitmen terhadap wisata ramah Muslim	Belum ada	Masih menjadi polemik di daerah sumatera Utara
Jasa	Cukup baiik	terdapat tempat makan halal, tempat ibadah (masjid), hotel syariah, dan atraksi yang menarik.
Restoran Halal	Cukup baik	terdapat restoran, kedai, dan rumah makan yang diklaim halal
Restoran/ Rumah makan halal *(self-claimed)*	Ada	ada, namun tidak terinfo jumlah pastinya
Masjid	Baik	Terdapat masjid dan mushala yang layak digunakan
Masjid	2391	
Mushala	162	
Hotel	Baik	Terdapat hotel syariah
Hotel Syariah	5	

Indikator	Skor/Nilai	Keterangan
Atraksi	Baik	Terdapat situs budaya Islami serta daya tarik wisata dan lokal
Situs budaya Islami	4	Istana Mai
Daya tarik wisata budaya	ada	terdapat berbagai macam desa wisata, namun tidak terinfo jumlah pastinya
Daya tarik lokal	ada	terdapat banyak macam daya tarik lokal, seperti Danau Toba, Air Terjun Sipiso-Piso, dan sebagainya, namun jumlah pastinya belum terinfo

Sektor Keuangan Syariah

Indeks Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah

Indeks	Tahun 2016	Tahun 2019
Indeks literasi keuangan syariah (OJK)	5.5%	17.28%
Indeks inklusi keuangan syariah (OJK)	8.0%	15.45%
Indeks literasi ekonomi syariah (BI)	-	24.60%

Profil Keuangan BPD Sumatera Utara – UUS Bank Sumut (*Miliar Rupiah*)

	2015	2016	2017	2018	2019
Total aset gross	1,902	2,339	2,752	2,884	3,106
Total pembiayaan	1,755	1,958	2,178	2,389	2,132
Total DPK	1,621	1,799	2,185	2,216	2,330
Total FDR	120.60%	108.84%	99.68%	107.81%	91.50%
Total NPF	16.59%	15.61%	15.35%	10.97%	16.13%
Pangsa pasar (%)	-	-	-	9%	8,5%

Profil Industri Perbankan Syariah (BUS) di Sumatera Utara (*Miliar Rupiah*)

	2018	2019
Pangsa pasar (%)	34.9%	35.1%
Pembiayaan berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	1,009.94	1,122.80
Modal kerja (bukan UMKM)	523.84	565.43
Investasi (UMKM)	690.02	632.95
Investasi (bukan UMKM)	924.33	1,180.48
Konsumsi	2,543.07	3,069.39
NPF berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	58.88	60.11
Modal kerja (bukan UMKM)	38.60	103.72
Investasi (UMKM)	103.87	94.95
Investasi (bukan UMKM)	5.98	306.73
Konsumsi	48.38	56.15

Total		
Total aset gross	15,915	18,171
Total pembiayaan	11,096	12,046
Portfolio pembiayaan UMKM (%)	15.3%	11.8%
Total DPK	12,773	14,806
Total FDR	86.9%	81.36%
Total NPF	255.71	621.66
Total NPF (%)	2.3%	54.5%

Profil Industri Perbankan Syariah (UUS) di Provinsi Sumatera Utara (*Miliar Rupiah*)

	2018	2019
Pangsa pasar (%)	21.3%	21%
Pembiayaan berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	1,445	1,222
Modal kerja (bukan UMKM)	166	258
Investasi (UMKM)	241	303
Investasi (bukan UMKM)	846	709
Konsumsi	2,708	2,984
NPF berdasarkan tipe nasabah		
Modal kerja (UMKM)	160	274
Modal kerja (bukan UMKM)	Belum ada	Belum ada
Investasi (UMKM)	46	22
Investasi (bukan UMKM)	10	212
Konsumsi	84	110
Total		
Total aset gross	8,074	9,037
Total pembiayaan	5,404	5.475
Portfolio pembiayaan UMKM (%)	31.2%	27.9%
Total DPK	6,412	7,298
Total FDR	84.29%	75.01%
Total NPF	300	618
Total NPF (%)	5.55%	11.28%

Sektor Keuangan Mikro Syariah

Jumlah LKMS dan BWM yang Mendapatkan Program Pendampingan dan Pengawasan dari OJK

LKMS	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah yang mendapat pendampingan OJK	1	2	2

Profil Fundamental LKMS dan BWM di bawah Pengawasan OJK

LKMS dan BWM	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah LKMS yang berada di wilayah daerah	1	1
Jumlah anggota LKMS	77 orang	85 orang
Jumlah pegawai LKMS	4 orang	4 orang
Modal sendiri	3,000,000	3,000,000
Volume usaha	66,180,000	85,360,000
Sisa Hasil Usaha (SHU)	3,554,223	15,968,521
Total aset	4,258,561,663	4,278,121,342
Rata-rata pembiayaan LKMS	0<N<=5 juta: 100%	0<n<=5 juta: 100%

Sektor Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Daftar BAZNAS Aktif dan LAZ Aktif Rekomendasi Baznas

21 Baznas dan 2 LAZ aktif	Baznas Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Tapanuli Utara, Dairi, Labuhanbatu, Toba Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Asahan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Kota Binjai, Kota Sibolga, Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Kota Tebing Tinggi, Kota Padangsidimpuan, Labuhanbatu Selatan, Padang Lawas, Batu Bara, Padang Lawas Utara, serta LAZ yaitu LAZ Djalaludin Pane Foundation (DPF) LAZ Yayasan Ulil Albab

Indeks Zakat Nasional (IZN) Provinsi Sumatera Utara

	2018	2019
Indeks Zakat Nasional/IZN (Dimensi Makro)		
Regulasi	0.25	0.92
Dukungan Finansial dari Pemerintah (APBBELUM ADAPBD) untuk BAZNAS	1	0.71
Jumlah Resmi Lembaga Zakat/OPZ, muzakki, dan mustahik	0.75	0.67
Rasio, Jumlah muzakki individual/jumlah rumah tangga di level Provinsi	0	0.00
Rasio, Jumlah dari muzakki institusi/jumlah institusi di level Provinsi	0	0.00
Database dari institusi/lembaga zakat yang terdaftar	0.25	0.22
Total Indeks Makro	**0.55**	**0.63**
Indeks Zakat Nasional/IZN (Dimensi Mikro)		
Penghimpunan	1	0.42
Pengelolaan	0.5	0.54
Penyaluran	0.75	0.79
Pelaporan	0.75	0.31
Indeks Kesejahteraan CIBEST	1	0.83
Modifikasi Indeks Pengembangan Manusia (HDI)	0.75	0.46
Kemandirian	0.5	0.29
Institutional	0.78	0.53
Dampak Zakat	0.8	0.57
Total Indeks Mikro	**0.55**	**0.56**

Sektor UMKM dan Ekonomi Pesantren

Jumlah Pesantren dengan Usaha-Usaha Syariah

11 Pondok Pesantren	11 Usaha-usaha Syariah (*detil di Lampiran*)

Sektor Pendidikan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Perguruan Tinggi yang Menyediakan Program Studi Ekonomi dan Keuangan Syariah Terkait

Jenjang	Jumlah Universitas tahun 2019	Program Studi tahun 2019		2018		2019	
		Nama Program studi	Jumlah Program Studi	Jml. Dosen	Jml. Mahasiswa	Jml. Dosen	Jml. Mahasiswa
Sarjana	15	Akuntansi Syariah	-	-	-	-	-
		Bisnis Islam	-	-	-	-	-
		Ekonomi Syariah	4	19	430	19	212
		Hukum Ekonomi Syariah	2	11	86	11	63
		Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam	-	-	-	-	-
		Manajemen Bisnis Syariah	2	9	108	9	76
		Manajemen Haji dan Umroh	-	-	-	-	-
		Perbankan Syariah	3	4	110	4	91
		Manajemen Keuangan Syariah	1	7	22	7	22
		Manajemen Zakat dan Wakaf	-	-	-	-	-
Magister	1	Ekonomi Syariah	1	6	-	6	138
		Perbankan Syariah	1	-	29	-	9
Doktoral	1	Ekonomi Syariah	1	5	35	5	-

Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi Ekonomi Syariah Terkait

Akreditasi	Akreditasi Perguruan Tinggi			Akreditasi Program Studi		
	S1	S2	S3	S1	S2	S3
Akreditasi A	1	-	-	1	-	-
Akreditasi B	1	1	1	5	1	1
Akreditasi C	6	-	-	12	-	-
Belum Terakreditasi	8	-	-	9	-	-

Peluang Investasi Daerah
untuk Industri Keuangan Syariah

No.	Nama Perusahaan	Sektor	Nilai Perkiraan Investasi (*dalam Rupiah*)
1	PT. Esa Sempurna Lestari	Industri es balok & pembekuan ikan	1.31 Miliar
2	PT. Duta Tangkas Utama	Industri es balok	2.3 Miliar
3	PT.Tobasurimi Indonusantara	Tepung ikan bahan pangan ternak	5.21 Miliar
4	Cv. Mitra Maju Bersama	Air minum dalam kemasan (AMDK)	350 Juta
5	PT. Vindia Agro Industri	Industri pengolahan umbi-umbian	15.23 Miliar
6	PT. Int! Tapioka Hasil OPTimal	Industri pati dan produk pati (bukan beras dan jagung)	2 Miliar
7	PT. Alami Agro Industri	Industri pengawetan buah nenas	24.71 Miliar
8	PT. Hutahean	Industri tepung tapioka	44.86 Miliar
9	PT. Serba Indah Aneka Pangan	Industri makanan dari tepung	28.5 Miliar
10	PT. Ijs Syndikat	Pabrik es balok	145 Juta
11	PT. Timur Djaya Coldstorage	Industri makanan	8.21 Miliar
12	PT. Es Sauu Murni	Industri es balok	88.3 Juta
13	PT. Sri Intan Abadi	Industri tepung santan kelapa	4.06 Miliar
14	PT. Budi Mekar Sentosa	Industri tepung tapioka	25 Juta
15	PT. Indoking Aneka Agar-Agar	Industri pengolahan rumput laut	6.36 Miliar
16	PT. Siantar Top	Industri makanan ringan, industry roti dan sejenisnya	161.1 Miliar
17	PT. Sari Makmur Tunggal Mandiri	Pabrik pengolahan kopi	4.75 Miliar
18	PT. Hamparan Pancaran Chemindo	Industri *soap noodle*	70 Miliar
19	PT. Sinar Sosro	Industri minuman ringan dalam kemasan	18.19 Miliar
20	PT. Aroma Mega Sari	Industri tepung beras / ketan	52.37 Miliar
21	PT. Medan Sugar Industry	Industri gula rafinasi	871.1 Miliar
22	PT. Halim Sarigandum Prima	Industri makanan tepung terigu	45 Miliar

No.	Nama Perusahaan	Sektor	Nilai Perkiraan Investasi (*dalam Rupiah*)
23	PT. Prima Food International	Industri makanan	4.5 Miliar
24	PT. Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk	Industri mie / Industri barang & peralatan teknik/industri dari plastik	43.65 Miliar
25	PT.Tirta Fresindo Jaya	Industri minuman ringan dan barang dari plastik utk pengemasan	15.93 Miliar
26	PT. Sari Tani Sumatera	Industri tepung tapioka	7.5 Miliar
27	PT. Bumi Sumatera Tapioka	Inds penggilingan aneka umbi dan sayuran	5.45 Miliar
28	PT. Union Confectioneri	Industri kembang gula	2.81 Miliar
29	PT. Pabrik Es Mabar	Industri es balok & *cold storage*	202.2 Juta
30	PT. Universal Indofood Product	Macam - macam roti/ Industri produk roti dan kue	10.23 Miliar
31	PT. Mabar Feed Indonesia	Industri makanan udang	238.47 Miliar
32	PT. Tambak Sari Jalmorejo	Industri *cold storage*	9.15 Miliar
33	PT. Putri Eka Maju	Industri es balok	3.25 Miliar
34	PT. Dajaj Utama	Industri pengolahan daging ayam	5 Miliar
35	PT. Karya Agung Lestari Jaya	Pabrik es dan *cold storage*	7.5 Miliar
36	PT. Expraved Nasuba	Industri makanan	28.63 Miliar
37	PT. Lestari Alam Segar	Industri mie instan	85 Miliar

Studi Kasus pada Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

Dr. Andri Soemitra, MA[31]

Bank Wakaf Mikro (BWM) Mawaridussalam Deli Serdang Sumatera Utara merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 berlokasi di Pesantren Mawaridussalam Deli Serdang. BWM Mawaridussalam merupakan BWM ke 33 yang didirikan di lingkungan pesantren. Kehadiran BWM di lingkungan pesantren salah satu tujuannya adalah agar masyarakat kelas bawah yang berada di sekitar lingkungan pesantren memiliki akses pembiayaan dengan skema pembiayaan yang terjangkau. Pesantren menjadi pilihan pendirian lembaga keuangan mikro syariah berbentuk BWM ini tentu memiliki tujuan yang jelas yaitu memperkuat pemberdayaan masyarakat kelas bawah lewat media pesantren yang memiliki akses secara langsung ke masyarakat dan umumnya memiliki hubungan sosial yang lebih dekat dengan masyarakat yang hidup di sekitar pesantren dengan pendekatan kemandirian sebagai pola pesantren yang mengedepankan konsep kemandirian hidup. Organisasi BWM Mawaridussalam terdiri dari Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas, Pengurus, Manager, dan Teller/Pembukuan dan Supervisor.

Sumber dana BWM Mawaridussalam berasal dari dana hibah sebesar 4 milyar yang tidak seluruhnya digunakan untuk modal kerja. Dana sebesar 3 milyar di simpan di rekening Bank Syariah sebagai dana abadi berbentuk deposito dan dana sebesar 1 milyar diputar untuk pembiayaan. Skema pembiayaan melalui bank wakaf mikro adalah pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp 3 juta untuk pinjaman pertama dan margin bagi hasil yang dikenakan setara 3 persen per tahun, juga disediakan pendampingan bagi anggota kelompok usaha. Penyaluran pembiayaan kepada anggota tidak didasarkan pada akad komersial melainkan berbasis akad sosial menggunakan akad qardh sebagai akad utama.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat operasional BWM Mawaridussalam terdapat sejumlah praktik yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam upaya mencari praktik terbaik pengelolaan lembaga keuangan mikro berbentuk Bank Wakaf Mikro. Pertama, kemampuan BWM Mawaridussalam membangun kesadaran produktif masyarakat kelas bawah. BWM Mawaridussalam dalam operasionalnya memberikan alternatif pembiayaan berbasis sosial yang mengedepankan akses pembiayaan skala kecil tanpa agunan hanya berdasarkan pada kepercayaan kepada anggota tetapi bukan sebagai bantuan hibah. Kesadaran masyarakat kecil untuk mengakses pembiayaan produktif dalam skema pinjaman kebajikan yang bukan hibah adalah hal yang penting karena umumnya masyarakat kecil berada pada dilema. Terkadang masyarakat kelas bawah sering memposisikan bantuan yang diterimanya sebagai hibah yang tidak wajib dikembalikan. Hal ini patut difahami karena mereka sering memperoleh bantuan dana BLT yang boleh mereka habiskan tanpa perlu dikembalikan. Terkadang pula masyarakat kelas bawah memiliki halangan mental untuk berhubungan dengan lembaga keuangan karena ketidakmampuan untuk membayar uang pinjaman dalam jumlah tertentu. Kehadiran BWM Mawaridussalam di tengah-tengah masyarakat saat ini berhasil membangun kesadaran dan cara berfikir produktif

[31] Dosen FEBI UIN Sumatera Utara

masyarakat kelas bawah. Keinginan untuk merobah nasib menjadi lebih baik dan memiliki penghasilan untuk membantu perekonomian keluarga mendorong para anggota BWM Mawaridussalam ikut aktif dalam kegiatan produktif yang diperkenalkan oleh BWM Mawaridussalam. Tahapan ini dipandang cukup kritis oleh para pengurus karena masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab mengembalikan dana pinjaman serta tidak takut untuk berurusan dengan lembaga keuangan mikro demi ikhtiar merubah kehidupan yang lebih baik.

Kedua, pendekatan partisipatif dan tanggung renteng. BWM Mawaridussalam melibatkan anggota secara aktif dengan mengadakan pertemuan setiap minggu yang disebut dengan Halaqoh Mingguan (halmi) yang menjadi pertemuan wajib antara pendamping dengan anggota. Nasabah BWM Mawaridussalam tidak dilepas tanpa adanya pembinaan melainkan didampingi oleh tenaga pendamping BWM Mawaridussalam. Melalui prosedur ini nasabah ditingkatkan kapasitasnya untuk mengelola usaha sehingga kemajuan usaha dapat ditingkatkan dari hari kehari. Anggota yang akan memperoleh dana bergulir pembiayaan diwajibkan mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) selama 5 hari berturut-turut. Keseriusan BWM Mawaridussalam juga terlihat dengan proses pendisiplinan pada kegiatan Pelatihan Wajib Kelompok. Anggota yang tidak mengikuti Standar Operasi Prosedur Pelatihan Wajib Kelompok dinyatakan gagal memperoleh dana bergulir dan tidak mendapatkan pencairan modal usaha. Konsep kerja saling tolong menolong (taawun) tercermin pada sistem kerja tanggung renteng yang diterapkan kepada kelompok yang memperoleh dana bergulir pembiayaan. Maknanya masing-masing anggota kelompok bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kelancaran pembayaran pelunasan cicilan dana bergulir pembiayaan. Pola ini mendorong para anggota memiliki semangat saling membantu dan mengingatkan serta perasaan malu apabila gagal bayar karena harus ditanggung renteng oleh sesama anggota kelompok. Untuk memperkuat kapasitas anggota dan kemampuan pemberdayaan anggota BWM Mawaridussalam melaksanakan Halaqoh Akbar kepada para anggota sebulan sekali. Pada pertemuan halaqoh yang dilakukan baik pada halaqoh mingguan maupun halaqoh akbar bulanan BWM Mawaridussalam berfokus pada pendampingan usaha para anggota dan upaya membangun kapasitas anggota (capacity building) setelah membekali anggota dengan pelatihan dasar selama 5 hari.

Ketiga, pembiayaan berbasis akad sosial dengan margin rendah maksimal 3%. Pendekatan pembiayaan berbasis akad sosial tidak berorientasi mencari keuntungan tetapi juga tidak membolehkan timbul kerugian yang menyebabkan badan usaha tidak mampu berlanjut. Untuk menjaga keberlanjutan usaha (sustainability) diperlukan partisipasi anggota untuk membayar pokok cicilan ditambah dengan margin yang rendah sebesar maksimal 3%. Margin yang dibayarkan oleh anggota sebenarnya dipergunakan juga untuk kepentingan anggota antara lain untuk membiayai konsultasi pendamping yang juga membutuhkan fee (upah) sekadar untuk menutup biaya operasional pendampingan, membiayai narasumber apabila dalam kegiatan halaqoh mingguan atau bulanan menghadirkan pembicara ahli dari luar yang perlu dibayar. Transparansi pembiayaan yang berorientasi keberlanjutan usaha lembaga dengan semangat tidak cari untung asal jangan rugi ini dipahami oleh para anggota sehingga mereka tertib dalam membayar margin dan patuh dalam membayar cicilan pokok pembiayaan dana bergulir yang mereka ajukan

Wawancara

Kepala Instansi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Bagaimana visi, rencana, dan program-program terkait ekonomi syariah?

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

Terkait dengan pengembangan sektor ekonomi syariah, industri halal dan sektor keuangan syariah di Provinsi Sumatera Utara telah bahwasanya bisnis syariah sedang berkembang di dunia internasional. Sejalan dengan itu, Pemprov Sumut mendukung program ekonomi syariah yang juga akan berkembang di daerah ini. Bahkan, Pemprov Sumut sedang mengembangkan perbankan syariah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu Bank Sumut. Sementara untuk produk halal, OPD Pemrov. Sumut yang memiliki Tugas dan Fungsi untuk "menumbuh-kembangkan" Industri Kecil Menegah maupun Usaha Kecil Menengah melalui APBD Pemrov. Sumut kerap melaksanakan Sosialisasi, Bimbingan Teknis sampai dengan melakukan Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi IKM/UKM pangan, obat-obatan dan jamu serta kosmetika untuk selalu melakukan peningkatan daya saing produknya dengan mengurus Sertifikat Halalny.

Direktur Utama Bank BPD Provinsi Sumatera Utara

Unit Usaha (UUS) Bank Sumut memiliki beberapa produk yang mendukung pengembangan ekonomi syariah di provinsi Sumatera Utara.
Pada produk dana kami memiliki:

- Tabungan Haji Makbul
- Tabungan Rencana untuk Qurban, Akikah dan Umrah

Tabungan haji Makbul merupakan produk unggulan Bank Sumut karena berdasarkan data yang bersumber dari SISKOHAT adapun share Bank Sumut berdasarkan jumlah nasabah yang telah mendaftar di Provinsi Sumatera Utara mencapai 64.74%. Seiring dengan peningatan jumlah nasabah penabung tabungan haji Makbul, Bank Sumut menerima penghargaan sebagai Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Terbaik pada tahun 2019 dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Kementerian Agama dan BPKH juga memberikan apresiasi kepada Bank Sumut dikarenakan Bank, Sumut merupakan role model dalam memberikan fasilitas bagi jemaah haji melalui program manasik haji akbar yang pada tahun 2019 diikuti sebanyak 2.095 calon jamaah haji yang merupakan nasabah Bank Sumut.
Pada produk pembiayaan kami memiliki Talangan Umrah yaitu pembiayaan untuk keberangkatan menunaikan ibadah umrah yang berkerjasama dengan beberapa perusahaan travel.

UUS Bank Sumut juga aktif melakukan literasi keuangan dan perbankan syariah kepada masyarakat melalui institusi pendidikan seperti sekolah dan universitas. Untuk meningkatkan kompetensi pegawai akan ilmu ekonomi dan keuangan syariah, maka Bank Sumut melaksanakan pelatihan terpadu tentang makosid syariah dan pelatihan dasar perbankan syariah.

Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

a. Bank Indonesia berperan aktif dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah bersama dengan pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaan program pengembangan ekonomi syariah oleh Bank Indonesia mengacu pada *Blueprint* Ekonomi dan Keuangan Syariah dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 6 Juni 2017. *Blueprint* Ekonomi dan Keuangan Syariah secara garis besar memuat 4 hal utama yaitu i) nilai-nilai dasar dan prinsip dasar pengembangan ekonomi dan

keuangan syariah, ii) kerangka dasar kebijakan pengembangan, iii) strategi dan rencana aksi, dan iv) kerjasama dan koordinasi, baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

b. Visi, rencana dan program pengembangan sektor ekonomi syariah dan Industri Halal di Sumatera Utara dilaksanakan berdasarkan inisiatif dan program yang ditetapkan oleh BI-KP, yaitu "Mendukung Terwujudnya Indonesia sebagai Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia", dengan target capaian peningkatan usaha syariah, pembiayaan keuangan syariah, tingkat kedalaman pasar keuangan, tingkat literasi, dan *international standing.*

c. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang dilakukan KPw BI Provinsi Sumatera Utara mengacu pada 3 (tiga) pilar yaitu:
   - Pilar 1 – Pemberdayaan Ekonomi Syariah, dilakukan dalam bentuk pilot project dan implementasi program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren dan UMKM syariah, seperti pengembangan unit usaha yang sudah ada di ponpes maupun kegiatan usaha yang berpotensi untuk dikembangkan (pengolahan air minum, pengolahan sampah, pertanian, dan lain-lain).
   - Pilar 2 – Pendalaman Pasar Keuangan Syariah, dilakukan dalam bentuk program elektronifikasi pesantren dengan tujuan mendukung program less cash society, seperti program kartu uang elektronik yang juga dapat digunakan sebagai kartu akses dan kartu absensi.
   - Pilar 3 – Penguatan Riset, Asesmen, dan Edukasi, dilakukan dalam bentuk pelaksanaan Fesyar (Festival Ekonomi Syariah) yang menjadi salah satu sarana sosialisasi ekonomi syariah kepada masyarakat, dan kajian/penelitian potensi pengembangan unit usaha pesantren dapat bekerjasama dengan pihak lain, seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan lain-lain.

Kepala OJK Regional Sumatera Utara

Area utama arah pengembangan industri keuangan syariah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu (1) Penguatan kelembagaan keuangan syariah, meliputi penguatan permodalan, mengedepankan keunggulan dan diferensiasi produk, pengembangan SDM dan TI, dan kerangka pengaturan yang memadai, (2) Penciptaan *demand* keuangan syariah yang berkelanjutan, meliputi peningkatan layanan yang berorientasi konsumen, pengenalan produk keuangan syariah secara terus-menerus, dan peningkatan akses layanan keuangan syariah melalui teknologi, dan (3) Pembentukan ekosistem keuangan syariah serta industri halal yang terintegrasi, meliputi kolaborasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga serta stakeholder terkait keuangan syariah dan industri produk/jasa halal, dan mendorong Lembaga Jasa Keuangan Syariah agar mampu melayani berbagai instrumen dan kebutuhan pendanaan syariah.

Bagaimana peluang pengembangan sektor ekonomi syariah, industri halal, dan sektor keuangan syariah?

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

Peluang pengembangan sektor ekonomi syariah, industri halal dan sektor keuangan syariah di Provinsi Sumatera Utara sangat berpotensi untuk di implementasikan hal ini sejalan dengan pemahaman masyarakat tentang produk halal juga meningkat.

Direktur Utama Bank BPD Sumut

Peluang perkembangan sektor keuangan syariah di Sumatera Utara sangat terbuka lebar karena religiusitas masyarakat Muslim dan sikap terbuka masyarakat non-Muslim di daerah ini. Hal ini juga dapat dilihat dari terus meningkatnya pangsa pasar perbankan syariah di Sumatera Utara.

Namun demikian meskipun *progress report* perbankan syariah menunjukkan gejala positif dan mengalami kemajuan. Keterbatasan ukuran bank atau kelompok usaha Bank syariah masih kecil jika dibandingkan dengan Bank konvensional dalam industri perbankan. Akibatnya bank syariah masih sulit berperan lebih besar dalam perekonomian nasional secara umum dan Sumatera Utara secara khusus.

Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Peluang pengembangan sektor ekonomi syariah dan industri halal di Sumatera Utara cukup besar. Hal ini didukung antara lain:

a. Proporsi jumlah penduduk Muslim di Sumatera Utara cukup besar. Berdasarkan data BPS "Sumatera Utara Dalam Angka: 2020", jumlah penduduk Muslim di wilayah Sumut mencapai 63.29% (9.52 juta dari jumlah keseluruhan 15.05 juta penduduk).
b. Sumatera Utara merupakan provinsi dengan luas wilayah terbesar di pulau Sumatera, yang juga menjadi salah satu destinasi wisata dan pintu gerbang masuk wisatawan dari negara lain, termasuk dari berbagai negara Muslim seperti Malaysia dan negara-negara Timur Tengah.
c. Sumatera Utara memiliki sekitar 960 ribu UMKM yang berpotensi mendukung sektor ekonomi syariah.
d. Tren gaya hidup masyarakat, terutama masyarakat Muslim dalam menerapkan nilai¬nilai Islami cukup tinggi, balk dalam berpakaian maupun konsumsi, sehingga dapat mendorong berkembangnya industri halal di bidang makanan/minuman dan fesyen.
e. Potensi ekspor produk halal cukup besar, terutama ke negara tetangga.

Kepala OJK Regional Sumatera Utara

Peluang pengembangan sektor keuangan syariah masih terbuka luas sejalan dengan upaya program pengembangan ekosistem halal *value chain*, meliputi (1) Pengembangan Industri Kreatif Syariah Indonesia, meliputi pengembangan kapasitas, penguatan branding, marketing, dan penyediaan outlet pasar baik di dalam maupun di luar negeri, dan (2) Peningkatan kapasitas dan kualitas pelaku usaha syariah, meliputi pelatihan dan pendampingan yang mencakup pemahaman nilai-nilai dan prinsip dasar ekonomi syariah, pembentukan mindset entrepreneurship, serta peningkatan kompetensi, kapasitas dan kualitas produksi, dan akses permodalan/pembiayaan.

Bagaimana tantangan utama apa yang saat ini dihadapi dalam mengembangkan sektor ekonomi syariah, industri halal, dan sektor keuangan syariah?

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

Tantangan terbesar dalam pengembangan sektor ekonomi syariah, industri halal dan sektor keuangan syariah di Provinsi Sumatera Utara adalah pada sektor Sosial Politik, bukan pada sektor Industri dan Perdagangan. Hal ini dikarenakan isu-isu tentang ekonomi syariah dan produk halal sangat sensitif pada daerah yang masyarakat secara sosial antropologi yang cukup heterogen seperti Sumatera Utara. Suatu isu tentang produk halal akan menjadi yang sangat sensitive apabila terkait pada bahan baku dan produsen. Masyarakat akan kritis terhadap dua faktor tersebut yaitu bahan bakunya dan produsennya dimana hal ini akan sangat mudah dipelintir dalam sebuah polemik di media masa dan media sosial.

Direktur Utama Bank BPD Sumut

Tantangan utama yang saat ini dihadapi dalam mengembangkan sektor ekonomi dan keuangan syariah di Sumatera Utara menurut saya ada 3 (tiga), yaitu:

- Sumber Daya Insani
  Masih kurangnya kualitas dan kuantitas somber daya insani yang memiliki dan integritas di lembaga keuangan syariah. Padahal lembaga keuangan syariah adalah komponen utama dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di daerah sehingga sangat membutuhkan tenaga profesional untuk memajukannya.
- Partisipasi Dana Daerah pada Keuangan Syariah
  Masih kurangnya partisipasi alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada lembaga keuangan syariah untuk dikelola. Sehingga Pemerintah Daerah perlu lebih melibatkan peran sektor keuangan syariah dalam pengelolaan kas umum daerah.
- Literasi kepada masyarakat
  Literasi keuangan syariah kepada masyarakat masih rendah, sehingga perlu diberikan pelatihan kepada profesional seperti ustadz, dosen, guru bahkan aparatur negara seperti ASN dan Kepolisian untuk menjadi *agent of change* keuangan syariah yang diharapkan sebagai penyebar informasi kepada jamaah, pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum.

Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sektor ekonomi syariah dan industri halal di Sumatera Utara paling tidak ada 4 hal, diantaranya:

a. Tingkat pemahaman/literasi tentang nilai-nilai syariah masyarakat perlu terus ditingkatkan, sehingga masyarakat semakin memahami penerapan nilai-nilai syariah dalam kehidupan.
b. Tingkat pemahaman pelaku usaha syariah dalam menghasilkan produk-produk halal masih perlu terus diasah, balk dari sisi produksi, sumber bahan baku, pembiayaan dll, sehingga produk yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria produk halal, memenuhi standarisasi BSN, dan sertifikasi halal.
c. Dari sisi peluang ekspor produk halal, tantangan terbesar adalah bagaimana pelaku usaha syariah dapat meningkatan kualitas produk maupun mempertahankan kualitas produk yang sudah memeperoleh sertifikasi, sehingga mampu bersaing di pasar global (ekspor). Untuk itu, peningkatan kapabilitas pelaku usaha syariah dan kurasi produk perlu terus dilakukan secara kontiniu agar produk yang dihasilkan terus meningkat dan berkembang.
d. Pengembangan wisata ramah Muslim di Danau Toba perlu dikomunikasikan dan disinergikan dengan baik, sehingga tidak menghilangkan kearifan lokal yang sudah lama berkembang di masyarakat sekitar.

Kepala OJK Regional Sumatera Utara

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Jasa Keuangan Syariah secara umum adalah peningkatan jumlah dan varian produk dan jasa berbasis syariah sehingga dapat menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat. Ke depannya hal ini diharapkan akan mendorong pendalaman pasar (*market deepening*) yang lebih baik, ditandai dengan meningkatnya jumlah nasabah dan nominal transaksi produk dan jasa berbasis syariah. Selanjutnya, upaya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di industri keuangan syariah untuk mendukung terciptanya ekosistem ekonomi syariah yang lebih baik. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, maka kualitas SDM dituntut untuk dapat menyediakan layanan yang cepat dan prima kepada nasabah. Tantangan lainnya adalah upaya peningkatan literasi atau pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan syariah sehingga ke depannya diharapkan masyarakat akan lebih teredukasi dan terinformasi mengenai produk dan jasa syariah dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi syariah. Untuk menghadapi berbagai tantangan di atas, maka mutlak diperlukan sinergi dan kolaborasi antara otoritas, pemerintah, lembaga jasa keuangan, dan stakeholder lainnya demi mewujudkan ekonomi syariah yang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonoomi Indonesia.

Lampiran

Provinsi Sumatera Utara

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)
Program Pengembangan Ekonomi Pesantren

No	Nama Pesantren	Deskripsi Program
1	PP. Tarbiyah Al Islamiyah	▪ Pemberian Bantuan PSBI untuk sarana produksi berupa mesin *laundry* dan oven ▪ Bantuan Teknis Pelatihan produksi kue, pengelolaan sarana air bersi, dan elektronifikasi
2	PM. Muhammadiyah Kuala Madu	▪ Pemberian Bantuan PSBI untuk sarana produksi berupa mesin produksi air minum, dan mesin pembungkus produk ▪ Bantuan teknis berupa pelatihan pengelolaan sarana air bersih
3	PP. Mawaridussalam	Pemberian Bantuan PSBI untuk sarana produksi berupa mesin pengolah limbah plastik, alat pengolah pupuk organik dan BI corner
4	PM. Al Hasyimiyah	Pemberian Bantuan Program PSBI untuk sarana produksi berupa mesin *laundry*
5	PP. Hidayatullah	▪ Pemberian bantuan sarana produksi hidroponik ▪ Pembuatan kartu santri dalam rangka elektronifikasi ▪ Bantuan teknis pelatihan budi daya hidroponik dan elektronifikasi
6	PP. Al Kautsar Al Akbar Medan	▪ Pemberian Bantuan PSBI sarana produksi Hidroponik ▪ Pembuatan kartu santri dalam rangka elektronifikasi ▪ Bantuan teknis pelatihan budidaya hidroponik dan elektronifikasi

Daftar Usaha-Usaha Syariah yang Dikelola Pondok Pesantren

No	Nama Pesantren	Nama Unit Usaha yang Dikelola Santri
1	PP. Tarbiyah Al Islamiyah	Santri Mart *Laundry* Air Minum dalam kemasan Toko Pelajar Warung Pelajar Kafetaria Percetakan dan *fotocopy* Penginapan Wartel Pangkas Rambut
2	PM. Muhammadiyah Kuala Madu, Langkat	Jasa *Laundry* dan *Dry Cleaning* Usaha Air Minum (AMDK)
3	PP. Mawaridussalam	Toko Pelajar Toko Buku Toko Baju/Kain Warung Pelajar Laundry Studio Photo Wartel Pertanian dan Peternakan Kafetaria Kantin Tamu Kedai Pramuka Bank Wakaf Mikro Baitul Maal wa Tamwil (BMT)
4	PM. Al Hasyimiyah	Hasyimart *Laundry*
5	PP. Hidayatullah	Koperasi Pesantren
6	PP. Al Kautsar Al Akbar Medan	Konveksi Pakaian dan Bordir Percetakan & Pertanian
7	PP. Raudlatul Hasanah	Usaha Air Minum (AMDK)
8	PP. Al Barokah	Usaha Air Minum (AMDK)
9	PP. Daarul Muhsinin	Usaha Air Minum (AMDK)
10	PP. Mustawafiyah	Pengelohan Kelapa dan Air Minum (AMDK)
11	PP. Daarul Mursyid	Sektor Usaha Pertanian (Kebun Kopi)

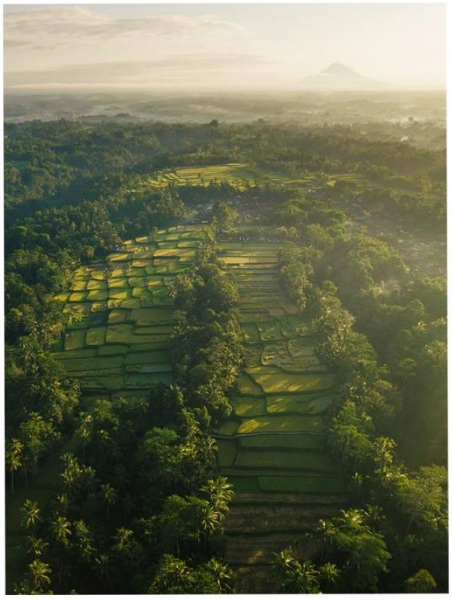

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Kementerian PPN/ Bappenas

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LPS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF TRADE

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UMKM REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

KADIN INDONESIA